

ANNUAL REPORT
LAPORAN TAHUNAN



MEMPERKUAT RANTAI PASOK
MENJAGA KETAHANAN
PANGAN

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini, kondisi mendatang, dan lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PPI", adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia secara umum yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.

Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain dalam edisi cetak, laporan serupa dapat diakses melalui situs resmi PPI www.ptppi.co.id

This Annual Report contains forward-looking statements regarding the financial condition, operational results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company as classified under applicable legislation, except for historical matters. These statements entail risks, uncertainties, and may result in materially different actual developments from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current conditions, future conditions, and the business environment in which the Company operates. The Company does not guarantee that the duly authenticated documents will yield certain results as expected.

This Annual Report contains the term "PPI," and occasionally the term "we" is used for convenience to refer to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in general, defined as PT Perusahaan Perdagangan Indonesia conducting its primary business activities in domestic and international trade.

References to the currency unit "Rupiah," "Rp," or IDR refer to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Indonesian Rupiah.

The report is produced in two languages, Indonesian and English. In addition to the printed edition, a similar report can be accessed through the official PPI website www.ptppi.co.id.



Tentang Laporan Tahunan About the Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang mengangkat tema **“Memperkuat Rantai Pasokan, Menjaga Ketahanan Pangan.”**

Tema ini mencerminkan upaya dan pencapaian PPI pada tahun 2023, sebagai kontribusinya mendukung Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan menjaga pasokan dan distribusi pangan melalui sumber daya Perseroan. Tema ini juga dibuat melalui kajian yang mendalam atas fakta-fakta serta perkembangan bisnis Perseroan sepanjang tahun yang dilaporkan, serta mencerminkan masa depan keberlanjutan bisnis PPI.

Laporan Tahunan ini juga berfungsi sebagai sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja PPI pada tahun yang dilaporkan. Dokumen ini memuat data dan informasi material yang menggambarkan profil perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi PPI kepada otoritas terkait dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, penyusunan Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang PPI melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menyajikan data dan informasi material mengenai kinerja dan tata kelola perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Secara umum, isi laporan ini berasal dari analisis internal serta sumber dokumen dan narasumber yang dapat dipercaya. Beberapa bagian dari laporan ini memuat data dan informasi tentang pandangan ke depan, yang bersifat *forward-looking statement*, seperti target, harapan, perkiraan, estimasi, prospek, atau proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha PPI di masa mendatang.

Welcome to the 2023 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), which carries the theme **“Strengthening the Supply Chain, Ensuring Food Security.”**

This theme reflects PPI’s efforts and achievements in 2023, contributing to national food security by ensuring the smooth supply of food throughout the country. It is formulated based on in-depth analysis of the facts and business developments reported throughout the year, reflecting the future sustainability of PPI’s business.

This Annual Report also serves as a comprehensive documentation source containing information on PPI’s performance in the reported year. It includes data and material information depicting the company’s profile; operational, marketing, and financial performance; information about the duties, roles, and structural functions of the company’s organization, applying best practices and corporate governance principles.

The primary purpose of compiling this Annual Report is to enhance PPI’s information transparency to relevant authorities and other stakeholders, as well as to serve as a yearly book that fosters pride and solidarity among employees. Additionally, the preparation of this Annual Report aims to build understanding and trust among shareholders and other stakeholders regarding PPI through the provision of accurate, balanced, and relevant information.

This report embodies PT Perusahaan Perdagangan Indonesia’s transparency and accountability to present data and material information regarding the company’s performance and governance to stakeholders. Generally, the contents of this report originate from internal analysis as well as reliable document sources and informants. Some sections of this report contain forward-looking statements, such as targets, expectations, estimates, prospects, or projections of PPI’s operational performance and business conditions in the future.

Sebelum dimuat di dalam Laporan, Perseroan telah mempertimbangkan kepastian data dan informasi yang bersifat *forward-looking statement* dengan matang. Meski demikian, PPI tidak dapat menjamin data dan informasi tersebut benar dan akurat serta dapat terpenuhi seluruhnya. Para pembaca perlu memahami bahwa PPI menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi kinerja operasional dan kondisi usaha yang akan datang.

Before being included in the Report, the Company carefully considered the certainty of forward-looking data and information. However, PPI cannot guarantee the accuracy and completeness of this data and information. Readers need to understand that PPI faces various risks and uncertainties caused by factors such as changes in economic, social, and political situations in Indonesia. These factors can undoubtedly affect operational performance and future business conditions.



MEMPERKUAT RANTAI PASOK MENJAGA KETAHANAN PANGAN

Penjelasan Tema Explanation of Theme

PPI senantiasa mengambil langkah proaktif dalam mendukung ketersediaan pangan, akses, dan keterjaminan pangan sesuai dengan Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) oleh Badan Pangan Nasional. Program ini ditujukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejala harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Untuk itu, PPI berkomitmen untuk terus menguatkan fungsinya dalam rantai pasok perdagangan dan logistik dengan membangun sinergi dan inovasi guna meningkatkan kinerja dan kapasitas bisnis yang berkelanjutan.

PPI menyadari perannya dalam mendukung ketahanan pangan dengan menjaga kelancaran rantai distribusi pangan nasional untuk memastikan menjamin harga yang adil bagi produsen dan konsumen. Untuk itu Perseroan akan selalu meningkatkan kapabilitas dan layanannya bagi masyarakat.

PPI consistently takes proactive steps to support food availability, access, and food security in line with the Government Food Reserve Program (CPP) by the National Food Agency. This program aims to address food shortages, food price fluctuations, natural disasters, social disasters, and/or emergency situations.

Therefore, PPI is committed to continuously strengthening its role in the trade and logistics supply chain by building synergy and innovation to enhance performance and sustainable business capacity.

PPI acknowledges its role in supporting food security by maintaining the smooth flow of the national food distribution chain to ensure fair prices for producers and consumers. Therefore, the Company will always improve its capabilities and services for the community.



Kesinambungan Tema

Continuity of Themes



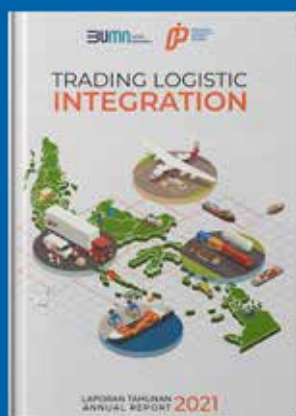
2023

**MEMPERKUAT RANTAI PASOK
MENJAGA KETAHANAN
PANGAN**



2022

**KOLABORASI
PERDAGANGAN DAN
LOGISTIK
UNTUK MEMAJUKAN
PANGAN NASIONAL**



2021

**TRADING LOGISTIC
INTEGRATION**

Daftar Isi

Table of Contents

Pendahuluan Forward

01

- 3 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability
- 4 Tentang Laporan Tahunan
About the Annual Report
- 6 Penjelasan Tema
Explanation of Theme
- 7 Kesenambungan Tema
Continuity of Themes
- 8 Daftar Isi
Table of Contents
- 11 Capaian Penting 2023
2023 Important Achievement

Ikhtisar Kinerja Performance Highlights

02

- 14 Ikhtisar Kinerja Keuangan
Overview of Financial Performance
- 14 Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income
- 15 Laporan Arus Kas
Statements of Cash Flow
- 15 Rasio Keuangan
Financial Ratios
- 18 Penghargaan / Sertifikat
Awards / Certificate
- 20 Peristiwa Penting
Event Highlights
- 26 Kerjasama PPI dengan Mitra Usaha
PPI Collaboration with Business Partners

Laporan Manajemen Management Report

03

- 30 Laporan Dewan Komisaris
Report of The Board of Commissioners
- 44 Laporan Direksi
Report of The Board of Directors
- 54 Surat Pernyataan Laporan Tahunan
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2023
Statement Letter of Annual Report of
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2023

Profil Perusahaan Company Profile

04

- 58 Identitas Perusahaan
Corporate Identity
- 59 Riwayat Singkat Perusahaan
Corporate Brief History
- 62 Jejak Langkah
Milestones
- 66 Bidang Usaha, Produk, dan Layanan
Line of Business, Products, and Services
- 68 Produk dan Komoditi
Products and Commodities
- 88 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan
Corporate Vision, Mission, and Cultural Values
- 92 Sasaran dan Strategi Perusahaan
Corporate Target and Strategy
- 94 5 Prioritas Strategi BUMN
5 SOE Priority Strategies
- 94 Maksud dan Tujuan Perseroan
Company Purpose and Objectives
- 95 Identitas dan Logo Perusahaan
Corporate Identity and Logo
- 96 Manajemen dan Pejabat Perusahaan
The Management and Corporate Officers
- 98 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners
- 100 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors
- 104 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
- 104 Informasi Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci
Information on Share Ownership by Key Management
- 104 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Majority and Controlling Shareholders
- 105 Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology
- 105 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities
- 105 Ikhtisar Kebijakan Dividen Perseroan
Overview of the Company's Dividend Policy
- 105 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)
- 105 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Supporting Institution and Professionals
- 106 Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 108 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure
- 108 Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama
List of Subsidiaries and Joint Ventures
- 113 Informasi Pada Website Perseroan
Information on the Company's Website
- 114 Daftar Keanggotaan Asosiasi
Industri Industrial Association Membership
- 115 Pendidikan dan Pelatihan Level Manajerial di Tahun Buku
Managerial Level Education and Training in the Financial Year
- 118 Wilayah Operasional
Operational Area

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

05

- 124 Tinjauan Perekonomian Global
Global Economic Overview
- 125 Tinjauan Perekonomian Nasional
National Economic Overview
- 127 Prospek Usaha
Business Prospect
- 128 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment
- 135 Tinjauan Keuangan
Financial Overview
- 147 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Level
- 148 Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy
- 157 Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun Mendatang
Comparison between Target, Realization, and Projection of Financial
- 157 Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Operasional
Comparison between Target, Realization, and Projection of Operational
- 161 Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring
- 161 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan
Significant changes in legislation and regulations affecting the company
- 162 Dampak Perubahan Harga terhadap Perusahaan
Impact of Price Changes on the Company
- 162 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)
Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by the Company (ESOP/MSOP)
- 162 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
- 165 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Functions

06

- 168 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 204 Teknologi Informasi
Information Technology

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

07

- 214 Pernyataan Komitmen Penerapan GCG
Statement of GCG Implementation Commitment
- 215 Landasan Penerapan GCG
Legal Basis of GCG Implementation
- 216 Prinsip-Prinsip GCG dan Implementasinya
GCG Principles and Their Implementation
- 217 Maksud dan Tujuan Penerapan GCG
GCG Implementation Purpose and Objective
- 218 Roadmap GCG
GCG Roadmap
- 219 Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 2023
Efforts to Improve the Quality of GCG Implementation in 2023
- 219 Penilaian GCG Oleh Pihak Eksternal
GCG Assessment by External Party
- 221 Skor GCG
GCG Score
- 222 Rencana Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2023
GCG Quality Improvement Plan in 2023
- 222 Struktur dan Mekanisme GCG
GCG Structure and Mechanism
- 224 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Baik Langsung maupun Tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu
Information About Direct and Indirect Majority and Controlling Shareholders up to the Individual Owner
- 224 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 230 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 233 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
- 240 Independensi Dewan Komisaris
Independency of the Board of Commissioners
- 241 Komisaris Independen
Independent Commissioner
- 242 Rapat Dewan Komisaris
Meeting of the Board of Commissioners
- 244 Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023
Report on the Duty Implementation and Supervision of the Board of Commissioners in 2023
- 250 Surat-Surat Keputusan Dewan Komisaris
Decrees of the Board of Commissioners
- 252 Direksi
Board of Directors
- 255 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Duties and Responsibilities of the Board of Directors
- 260 Independensi Direksi
Independence of the Board of Directors
- 262 Rapat Direksi
Meeting of the Board of Directors
- 275 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 284 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors
- 288 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners
- 310 Organ Pendukung di Bawah Direksi
Supporting Organs Under the Board of Directors
- 316 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Audit Unit (IAU)

- 323 Komite di Bawah Direksi
Committees Under the Board of Directors
- 323 Akuntan Publik
Public Accountant
- 326 Manajemen Risiko
Risk Management
- 337 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 348 Perkara Penting Tahun 2023
Legal Cases in 2023
- 348 Sanksi Administratif
Administrative Sanctions
- 348 Pedoman Etika Perusahaan
Corporate Ethics Guidelines
- 353 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System
- 358 Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
Anti-Corruption and Gratuity Control Policy
- 360 Kebijakan *Kickbacks* dan Anti-Penyuapan
Kickbacks and Anti-Bribery Policy
- 361 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
Provision of Funds for Social and Political Activities
- 361 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
Management of State Officials Wealth Reports
- 363 Transparansi Praktik *Bad Governance*
Transparency of Bad Governance Practices
- 365 Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan
Policy on Company Information Classification and Management
- 365 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Governance
- 366 Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Commitment to Fulfilling the Rights Of Creditors
- 367 Kebijakan Seleksi Pemasok
Supplier Selection Policy

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social Responsibility 08

- 370 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan Financial Report 09

Capaian Penting 2023

2023 Important Achievement

Jumlah Aset

Total Assets



▲
0,78%

2022

4.585.367
jutaan Rupiah | million Rupiah

2023

4.621.165
jutaan Rupiah | million Rupiah

▲
2,23%

2022

2.835.603
jutaan Rupiah | million Rupiah

2023

2.898.939
jutaan Rupiah | million Rupiah

Jumlah Ekuitas

Total Equity



Pendapatan

Revenues



▼
(3,30)%

2022

2.367.519
jutaan Rupiah | million Rupiah

2023

2.289.292
jutaan Rupiah | million Rupiah

▼
(65,98)%

2022

49.089
jutaan Rupiah | million Rupiah

2023

16.702
jutaan Rupiah | million Rupiah

Laba Bersih

Tahun Berjalan

Profit for the Year



Bab 01

Ikhtisar Utama

Main Highlights

Perseroan mencatat penurunan tipis pada Pendapatan yang diperoleh tahun 2023, namun masih mampu mencatat peningkatan pada Laba Komprehensif Tahun Berjalan, yang pada tahun lalu mencatat masih kerugian. Hal ini mencerminkan adanya penguatan pada aspek finansial Perseroan.

The Company recorded a slight decrease in Revenue earned in 2023, but was still able to record an increase in Comprehensive Income for the Year, which last year recorded a loss. This reflects the strengthening of the Company's financial aspects.





Ikhtisar Kinerja Keuangan

Overview of Financial Performance

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar Current Assets	890.881	984.420	823.271	922.092	885.678
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	3.730.283	3.600.947	3.587.751	3.266.699	3.194.812
Jumlah Aset Total Assets	4.621.165	4.585.367	4.411.022	4.188.791	4.080.491
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	731.233	754.350	616.102	515.484	526.616
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	990.992	995.413	1.007.482	990.254	962.023
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.722.225	1.749.764	1.623.584	1.505.739	1.488.639
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.898.939	2.835.603	2.787.437	2.683.052	2.591.851

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Revenues	2.289.292	2.367.519	1.938.824	3.972.598	2.047.951
Beban Usaha Operating Expenses	(335.913)	(316.584)	(395.100)	(3.804.021)	(208.769)
Pendapatan (beban) Non-usaha – bersih Non-operating Income (Expenses) – net	64.094	(5.206)	(49.094)	(14.326)	(165.150)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(33.571)	81.068	(128.846)	168.575	15.670
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	30.523	75.863	(177.940)	154.249	(149.480)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(13.821)	(26.773)	32.645	(45.480)	50.398
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	46.635	(924.044)	246.656	(13.129)	(10.786)
Laba Bersih Tahunan Berjalan Profit for the Year	16.702	49.089	(145.295)	108.769	(99.082)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	46.635	(924.044)	101.361	95.639	(109.868)

Laporan Arus Kas

Statements of Cash Flow

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In million Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	(183,43)	(19.273)	(74.448)	377,516	(6,467)
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities	(4,35)	5.565	(96,461)	(107,775)	39,734
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	69,07	22.067	113,719	(135,470)	(61,596)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(118,71)	8.359	230.250	95.979	124.308
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	181,42	173.059	(57.191)	134.271	(28.329)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	62,71	181.418	173.059	230.250	95.979

Rasio Keuangan

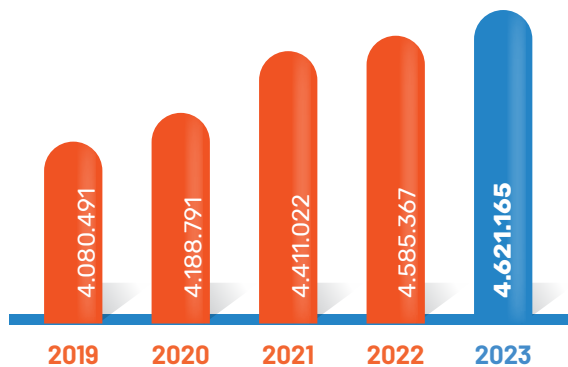
Financial Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio						
Rasio Lancar Current Ratio	%	121,8	123,50	133,63	178,88	168,18
Rasio Cepat Quick Ratio	%	70,1	111,33	87	110,4	90,82
Rasio Kas Cash Ratio	%	8,6	22,76	28,09	44,90	35,69
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio						
Rasio Utang Terhadap Aset Debt To Assets Ratio	%	37,3	38,16	36,81	35,95	36,48
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt To Equity Ratio	%	59,4	61,71	58,25	56,12	57,44
Rasio Aktivitas Activity Ratio						
Collection periods	Hari Days	49,78	65	5,7	11,8	16,22
Perputaran Utang Debt Turnover	Hari Days	8,31	66,2	12,39	12,95	13,27
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	Kali Times	20,8	15	14	10,5	23,43
Perputaran Total Aset Total Assets Turnover	Kali Times	51,03	54,13	45,09	96,08	63,42

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio						
Imbalan kepada pemegang saham Return to Equity (ROE)	%	0,6	1,73	(5,21)	4,05	5,14
Imbalan investasi Return on Investment (ROI)	%	2,2	3,28	(5,3)	4,8	0,5
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	13,2	16,80	13,7	13	11,94
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	0,7	2,07	(7,49)	2,74	7,38
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	4,0	5,53	(4,2)	5,1	1,57

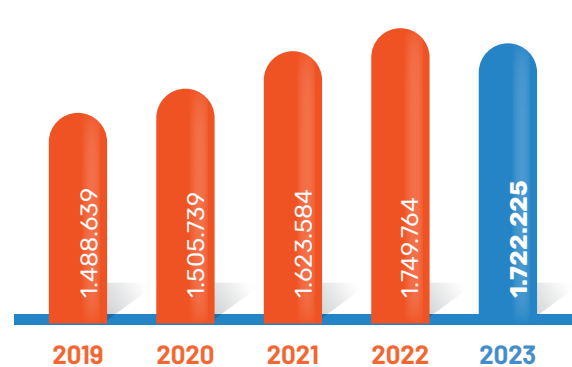
Jumlah Aset / Total Assets

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



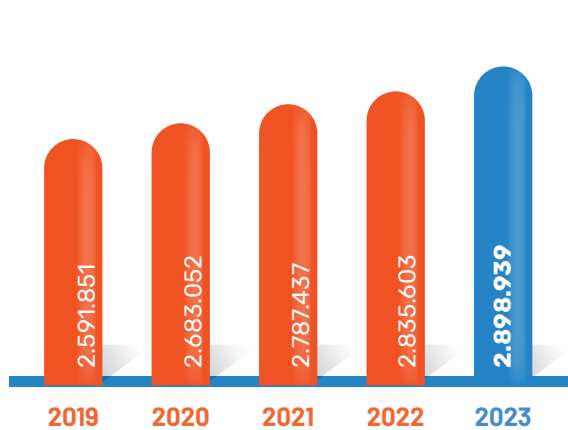
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



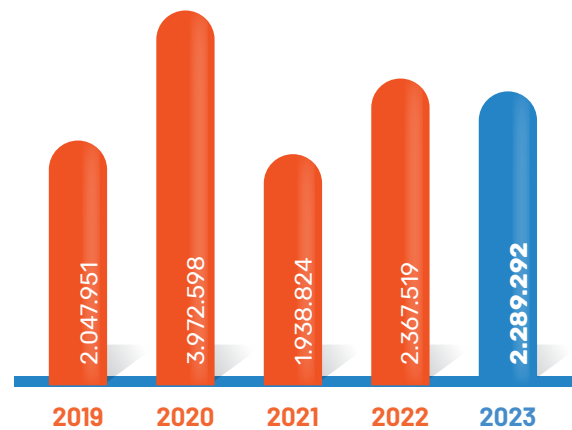
Jumlah Ekuitas / Total Equity

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



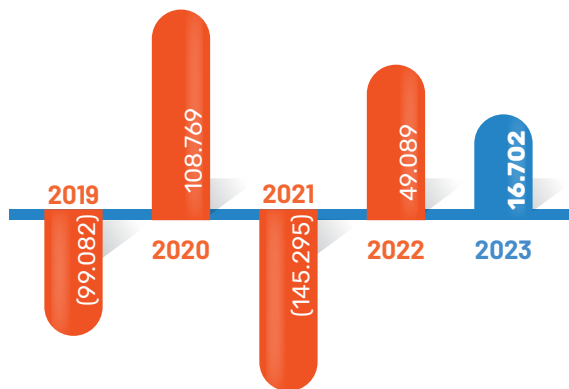
Pendapatan / Revenues

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



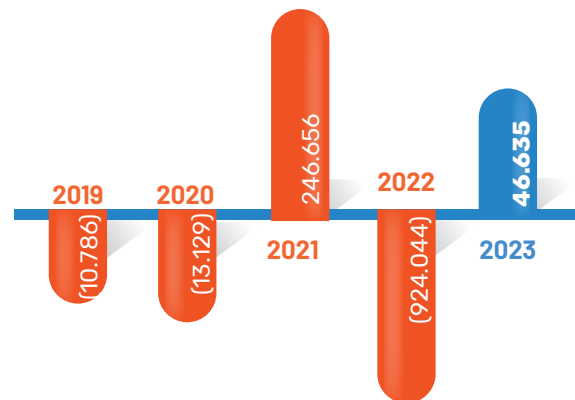
Laba Bersih Tahunan Berjalan / Profit for the Year

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



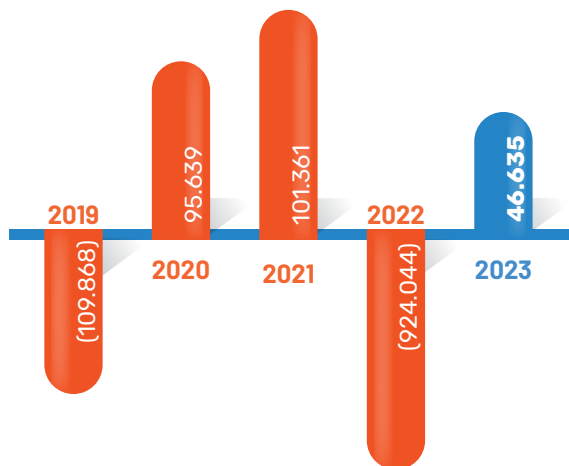
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



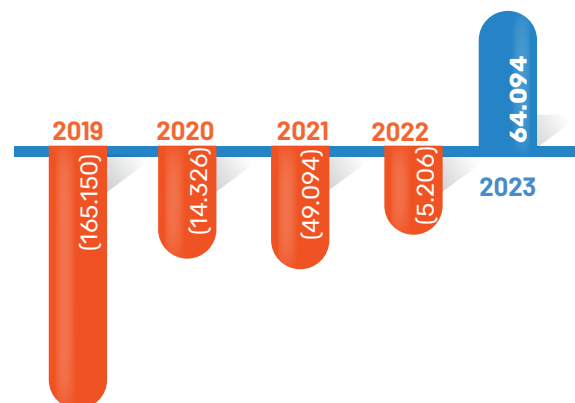
Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income for the Year

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



Pendapatan (beban) Non-usaha - bersih / Non-operating Income (Expenses) - net

dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah



PENGHARGAAN / SERTIFIKAT

Awards / Certificate



Marketeters Sustainable Marketing Excellence (SME) Awards 2023 - Marketeters

12 Juli | July 2023

Community Empowerment of the Year



Indonesia Best BUMN Awards 2023 - WartaEkonomi

27 September | September 2023

Best SOE with Top Financial Performance and Developing Cooperation to Advance Food Trade



BUMN Branding & Marketing Award 2023 - BUMN Track

13 Desember | December 2023

Elevating Human Lives : Brand Evolution in Industry 5.0 Era



PT Biofarma (Persero) Distributor Award 2023 - PT Biofarma (Persero)

15 Desember | December 2023

Best Branch Sales area DKI-JAKBAR



Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja
Certificate of Occupational Safety and Health Management System

9 Juni | June 2023



PERISTIWA PENTING

Event Highlights



21 Januari 2023
January 21, 2023



PPI Berpartisipasi dalam Misi Dagang ke Arab Saudi bersama Menteri Perdagangan RI

PPI Participates in Trade Mission to Saudi Arabia with Indonesian Minister of Trade

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of ID Food* berpartisipasi dalam rangkaian misi dagang ke Arab Saudi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam rangkaian tersebut PPI juga melakukan *MoU Ceremony* dengan Said Bawazir Trading Company tentang kerja sama perdagangan bahan pangan untuk pasar internasional, yang dilaksanakan di Saudi Chambers of Commerce.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), anggota ID Food, participated in a series of trade missions to Saudi Arabia along with Minister of Trade Zulkifli Hasan. During the series of event, PPI also conducted an MoU Ceremony with Said Bawazir Trading Company regarding the cooperation in trading food commodities for the international market, held at the Saudi Chambers of Commerce.



1 Februari 2023
February 1, 2023



PPI dan PPT Energy Trading Jajaki Kerja Sama Ekspor Impor

PPI and PPT Energy Trading Explore Export Import Cooperation

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *Member of ID Food* bersama PPT Energy Trading Co.Ltd. (PPTET) menandatangani nota kesepahaman mengenai rencana kerja sama ekspor dan/atau impor cangkang kelapa sawit Indonesia di pasar Jepang.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Member of ID Food, together with PPT Energy Trading Co. Ltd. (PPTET), signed a memorandum of understanding regarding the planned collaboration for the export and/or import of Indonesian palm kernel shells in the Japanese market.



18 Maret 2023
March 18, 2023



PPI Terima Kunjungan 8 Perusahaan China

PPI Receives Visit from 8 Chinese Companies

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), anggota ID Food, menerima kunjungan dari Tangshan Jiangsu Chamber of Commerce dalam agenda *business matching*. Terdapat 8 perusahaan asal China yang hadir di Graha PPI untuk membahas potensi bisnis yang dapat dikolaborasi antara lain produk pangan, bahan bangunan, bahan kimia, dan alat kesehatan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, received a visit from the Tangshan Jiangsu Chamber of Commerce for a business matching agenda. Eight companies from China attended the meeting at the PPI headquarters to discuss potential collaborative business opportunities, including food products, construction materials, chemicals, and medical equipment.



5 April 2023
April 5, 2023



PPI, Kemendag, dan Duta Besar Mesir, Jalankan Pelepasan Ekspor Perdana 25 Ton Kopi dengan Skema Imbal Dagang
PPI, Ministry of Trade, and Egyptian Ambassador Release 25 Tons of Coffee under Trade Offsets Scheme

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), anggota ID Food, menjadi Badan Pelaksana Imbal Dagang yang memberangkatkan ekspor kopi ke Mesir yang dilaksanakan di Subang. Pada Imbal Dagang tahap pertama ini, Indonesia mengirimkan kopi sebanyak 25 ton senilai 60.000 USD dan Mesir mengirimkan kurma sebanyak 50 ton senilai 60.000 USD.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, acts as the Implementing Body for Trade Offsets, sending coffee exports to Egypt from Subang. In this first phase of the trade offset, Indonesia shipped 25 tons of coffee worth \$60,000 USD, while Egypt sent 50 tons of dates worth \$60,000 USD.



14 Mei 2023
May 14, 2023



PPI Berpartisipasi dalam Rangkaian Misi Dagang ke Mesir Bersama Menteri Perdagangan
PPI Participates in Trade Mission to Egypt with Minister of Trade

PPI selaku Badan Pelaksana imbal dagang Indonesia melakukan penandatanganan kerja sama imbal dagang dengan AI Postan for General Import & Export sebagai BP imbal dagang Mesir. Produk yang dipertukarkan yaitu kopi dari Indonesia dengan anggur dan/atau delima dari Mesir.

PPI as the Implementing Agency for Indonesia's trade offset signed a trade offset cooperation agreement with AI Postan for General Import & Export as the trade offset Implementing Agency for Egypt. The exchanged products are coffee from Indonesia with grapes and/or pomegranates from Egypt.



24 Mei 2023
May 24, 2023



PPI Sampaikan Peluang Kerja Sama di Depan Presiden Iran
PPI Presents Opportunities for Cooperation to the President of Iran

PPI mendapatkan kehormatan untuk bisa menyampaikan peluang kerja sama di depan Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi di sela-sela kunjungan kenegaraan beliau ke Indonesia, juga para pengusaha Iran dalam Forum Pertemuan Para Pengusaha Indonesia dan Iran.

PPI had the honor of presenting collaboration opportunities in front of Iranian President Seyyed Ebrahim Raisi during his state visit to Indonesia, as well as Iranian businessmen at the Indonesia-Iran Business Forum.



29 Mei 2023
May 29, 2023



**Dubes Tanzania Sambangi PPI,
Gali Peluang Kerja Sama Bilateral**

Tanzanian Ambassador Visits PPI, Explores Bilateral Cooperation Opportunities

Duta Besar Tanzania untuk RI, Macocha Tembele, berkunjung ke Kantor Pusat PPI dan berdiskusi dengan Direksi PPI perihal potensi kerja sama Indonesia - Tanzania. Kerja sama kedua negara menitikberatkan sektor pertanian dan masih terbuka ruang untuk memaksimalkan potensi yang ada.

The Ambassador of Tanzania to Indonesia, Macocha Tembele, visited the Head Office of PPI and discussed with the PPI Directorate regarding the potential cooperation between Indonesia and Tanzania. The collaboration between the two countries focuses on the agricultural sector and there is still room to maximize the existing potential.



22 Juni 2023
June 22, 2023



PPI Lakukan Ekspor Perdana Rumput Laut ke Korea Selatan
PPI Conducts Seaweed Export to South Korea

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), *member of ID Food*, melepas ekspor rumput laut dengan jenis *Eucheuma Cottonii* ke Korea Selatan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID FOOD, exported *Eucheuma Cottonii* seaweed to South Korea.



22 Juni 2023
June 22, 2023



PPI Cirebon Sabet Best Branch Sales Biofarma
PPI Cirebon wins Best Branch Sales for Biofarma

PPI Cabang Cirebon mendapat penghargaan dari PT BIOFARMA sebagai *BEST BRANCH SALES* dalam DISTRIBUTOR AWARD kategori *Best Branch Sales* area DKI-JABAR s.d. bulan Juni Tahun 2023 di Bandung.

PPI's Cirebon Branch received an award from PT BIOFARMA as the *BEST BRANCH SALES* in the *DISTRIBUTOR AWARD* category for *Best Branch Sales* area in DKI-JABAR until June 2023 in Bandung.



5 Juli 2023
July 5, 2023



PPI Lepas Ekspor Rumput Laut ke China
PPI Launches Seaweed Export to China

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of* ID Food melepas ekspor rumput laut jenis seaweed *eucheuma spinosum* sebanyak 27,4 ton untuk di ekspor ke China.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, shipped 27.4 tons of seaweed, specifically *Eucheuma Spinosum*, for export to China.



20 Juli 2023
July 20, 2023



PPI dan Paskomnas Launching Kios Pangan ID Food
PPI and Paskomnas Launch ID Food Kiosk

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of* ID Food melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran dan pendistribusian komoditas pangan dengan PT Paskomnas melalui *food hub* 'Kios Pangan ID Food', maupun daring yang didukung melalui Platform Warung Pangan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, signed a cooperation agreement for the distribution of food commodities with PT Paskomnas through the food hub 'Kios Pangan ID Food', both offline and online through the supported Platform Warung Pangan.



4 Agustus 2023
August 4, 2023



PPI Penetrasi Pasar Ekspor dan Impor Kamboja
PPI Penetrates Cambodia's Export and Import Market

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of* ID Food berpartisipasi dalam *Indonesia Trade & Tourism Promotion* (ITTP) 2023 ke-14 di Kamboja. Dalam acara tersebut, PPI juga melakukan penandatanganan MoU bersama Ung Kheang Group Co., Ltd. Tujuan dari MoU tersebut untuk menciptakan sinergi dalam memanfaatkan potensi komoditi yang dimiliki masing-masing negara.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, participated in the 14th *Indonesia Trade & Tourism Promotion* (ITTP) 2023 in Cambodia. During the event, PPI also signed an MoU with Ung Kheang Group Co., Ltd. The purpose of the MoU is to create synergy in utilizing the potential of commodities owned by each country.



Mulai dari 7 Agustus 2023
Starting from August 7, 2023



PPI Salurkan Bantuan Penanganan Stunting ke 519.382 Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Jawa Barat

PPI Distributes Stunting Handling Assistance to 519,382 Stunting Risk Families (KRS) in West Java

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of ID Food* dipercaya salurkan bantuan penanganan *stunting* berupa telur dan daging ayam kepada 519.382 Keluarga Risiko *Stunting* (KRS) di wilayah Jawa Barat yang merupakan program dari Badan Pangan Nasional.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, is entrusted to distribute assistance for stunting mitigation in the form of milk and chicken meat to 519,382 Stunting Risk Families (KRS) in the West Java region, which is a program of the National Food Agency.



19 September 2023
September 19, 2023



Kementerian Perdagangan bersama PPI Sosialisasikan Peran Badan Pelaksana Imbal Dagang

Ministry of Trade and PPI Socialize the Role of Trade Offsets Implementing Agency

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Fasilitas Ekspor Impor bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of ID Food* sosialisasikan peran Badan Pelaksana Imbal Dagang *business to business* Indonesia - Mesir yang dilaksanakan di Surabaya.

The Ministry of Trade, through the Directorate of Export Import Facilitation, together with PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, conducted a socialization on the role of the Trade Offset Implementing Agency for business-to-business Indonesia - Egypt, which was held in Surabaya.



16 Oktober 2023
October 16, 2023



PPI Terima Kunjungan Delegasi Bisnis Kamboja

PPI Receives Visit from Cambodian Business Delegation

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of ID Food* menerima kunjungan Delegasi Bisnis Kamboja yang difasilitasi oleh KBRI Phnom Penh di Graha PPI. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan *The 14th Indonesia Trade & Tourism Promotion* (ITTP) dan sebagai upaya peningkatan kerja sama perdagangan bilateral di bidang ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia dalam sektor *fast-moving consumer goods* (FMCG).

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, welcomed a Business Delegation from Cambodia facilitated by the Indonesian Embassy in Phnom Penh at Graha PPI. This activity is a follow-up to The 14th Indonesia Trade & Tourism Promotion (ITTP) and aims to enhance bilateral trade cooperation in the economic and food security sectors of Indonesia in the fast-moving consumer goods (FMCG) sector.



19 Oktober 2023
October 19, 2023



PPI Melakukan Kerjasama Kontrak Ekspor ke Mesir
PPI Cooperates with Export Contract to Egypt

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of ID Food* melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Haggag Import Company dan El Nada for Export & Import dengan komoditas *green bean coffee* sebanyak 950 ton ke Mesir.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, signed a cooperation agreement with Haggag Import Company and El Nada for Export & Import for the commodity of green bean coffee totaling 950 tons to Egypt.



9 Desember 2023
December 9, 2023



PPI Jalin Kerja Sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

PPI Collaborates with Banten Province Food Security Office

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of ID Food* menjalin kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, collaborates with the Provincial Food Security Agency of Banten Province to support food security in Banten Province.



6 Desember 2023
December 6, 2023



PPI Bersama PIHC Gelar TEMANI dan One Day Promotion (ODP) Produk Pupuk Non Subsidi

PPI and PIHC Hold TEMANI and One Day Promotion (ODP) of Non-Subsidized Fertilizer Products

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) *member of ID Food* menggelar program TEMANI dengan Kelompok Tani Pengantap Baru di Lombok Barat. Sebagai wadah sosialisasi dan edukasi bagi petani, TEMANI kali ini berkolaborasi dengan PIHC dengan melakukan *One Day Promotion (ODP)* untuk mendapatkan penawaran harga menarik dengan harga khusus untuk produk-produk Dharmabrand dan pupuk non subsidi.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), a member of ID Food, held the TEMANI program with the New Farmer Group in West Lombok. As a platform for socialization and education for farmers, TEMANI collaborated with PIHC to conduct a One Day Promotion (ODP) to obtain attractive prices, with special prices for Dharmabrand products and non-subsidized fertilizers.

Kerjasama PPI dengan Mitra Usaha

PPI Collaboration with Business Partners

Kerjasama Antar – BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Cooperation with Other State-Owned Enterprises and SOE Subsidiaries Overview

NO	Nama Mitra Usaha Business Partner	Jenis Kerja Sama Type of Cooperation	Produk/Jasa Product/Service
1	PT Rajawali Nusindo	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Alat Kesehatan Medical Devices
2	PT Pertamina Bina Medika IHC	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Alat Kesehatan Medical Devices
3	Perum Bulog	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Beras Rice
4	PT Pertamina Retail	Kerjasama operasi Joint operation	SPBU Gas Station
5	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Pupuk Fertilizer
6	PT Indofarma Tbk	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Produk Obat Generik Generic Drug Product
7	PT Bio Farma (Persero)	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Vaksin Serum, Diagnostik Kit & Alat Kesehatan Serum Vaccines, Diagnostic Kit & Medical Devices
8	PT Petrokimia Gresik	Kerjasama Kedistributoran Pupuk Fertilizer Distributorship cooperation	Pupuk Fertilizer



Bab

02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Report of The Board of Commissioners





“

Dewan Komisaris meyakini bahwa pencapaian tahun ini akan menjadi landasan solid bagi pencapaian yang lebih baik di tahun mendatang.

The Board of Commissioners believes that this year's achievements will serve as a solid foundation for even better achievements in the coming years.

”

Hamli

Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan hormat, ijinkan kami ingin mengawali sambutan ini dengan memuji Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan bimbingan-Nya kepada kita semua sehingga bersama-sama kita dapat menutup tahun 2023 dengan cukup baik.

Selaku Dewan Komisaris, kami memandang penting kesempatan ini sebagai wujud akuntabilitas kami dalam menegakkan standar tertinggi penerapan tata kelola perusahaan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Peran kami tentunya adalah memberikan pengawasan, bimbingan, dan dukungan strategis kepada Direksi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam laporan tahunan ini, kami akan melaporkan secara komprehensif kinerja keuangan, operasional, dan inisiatif strategis yang kami lakukan sepanjang tahun 2023. Kami bangga dengan pencapaian kami sejauh ini, namun kami perlu menegaskan kembali komitmen kami untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin demi mencapai pencapaian yang lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With hearts filled with gratitude and respect, allow us to begin this message by praising the Almighty God for His blessings and guidance bestowed upon us all, enabling us to close the year 2023 fairly well.

As the Board of Commissioners, we view this opportunity as vital to demonstrate our accountability in upholding the highest standards of corporate governance to shareholders and stakeholders alike. Our role is to provide oversight, guidance, and strategic support to the Board of Directors to ensure the long-term success and sustainability of the Company.

In this annual report, we will comprehensively report on the financial, operational, and strategic initiatives we undertook throughout the year 2023. We are proud of our achievements thus far, but we must reiterate our commitment to continuous improvement and strive to work even harder to achieve greater milestones in the years to come.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Strategi Bisnis Perseroan

Berdasarkan RKAP 2023 yang disusun oleh Perusahaan, target-target keuangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Rp2,8 Triliun;
2. GPM 14,4%;
3. EBITDA = Rp126,3 Miliar; dan
3. *Net Profit* = Rp41,4 Miliar.

Adapun portofolio pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Saprota = 21%;
2. Bahan Pokok = 13%;
3. Produk Konsumsi = 4%;
4. Bahan Kimia = 21%;
5. Anak Perusahaan = 30%;
6. Lainnya = 11%.

Sementara, Strategi utama yang dijalankan oleh manajemen untuk mencapai target-target di atas adalah:

1. *Refocus portfolio & Development priorities.*
2. *Sustainable capability & cost-effective ecosystem.*
3. *Financial restructuring.*
4. *Governance & Policy Setting (Subsidiary).*
5. *Human Capital Management (Organization & Talent).*
6. *Digital & Market Driven Process.*

Strategi bisnis di atas diimplementasikan dengan penerapan Program Kerja Utama, antara lain:

1. Memperkuat kinerja komersial dengan menfragmentasi *focus portfolio* bisnis PPI yang mempengaruhi organisasi dan kebutuhan sumber daya (regular, regulated, ekspor, bisnis transisi dan anak perusahaan). Program kerja ini akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Regular: program penetrasi *sales* dan *engagement* terhadap *market* melalui *agrosolution*, program Makmur, ekatalog, *spotwalker* dan *product bundling* serta penjualan bahan pokok ke smelter.
 - b) Regulated: penguatan bisnis non-pangan melalui penambahan alternatif mitra pemasok dan penguatan fasilitas *financing* sementara penguatan bisnis pangan melalui pengembangan komoditi baru yang selaras dengan Bapanas (gandum, kedelai, hortikultura).
 - c) Ekspor: strategi penguatan sumber pasokan untuk mendapatkan produk unggulan yang berkualitas (kopi, *spices* dan rumput laut) dan perluasan potensi *market*.
 - d) Bisnis transisi: memperkuat model bisnis agar tercipta kontinuitas bisnis (*on-going concern*).

BOC View on the Company's Business Strategy

Based on the 2023 Company Business Plan, the financial targets for 2023 are as follows:

1. Revenue: IDR2.8 Trillion;
2. Gross Profit Margin (GPM); 14.4%;
3. EBITDA: IDR126.3 Billion; and
4. Net Profit: IDR41.4 Billion.

The revenue portfolio is distributed as follows:

1. Fertilizers: 21%;
2. Staple Goods: 13%;
3. Consumer Products: 4%;
4. Chemicals: 21%;
5. Subsidiaries: 30%; and
6. Others: 11%.

Meanwhile, the main strategies executed by management to achieve the above targets are:

1. Refocusing portfolio & Development priorities.
2. Sustainable capability & cost-effective ecosystem.
3. Financial restructuring.
4. Governance & Policy Setting (Subsidiary).
5. Human Capital Management (Organization & Talent).
6. Digital & Market Driven Process.

These business strategies are implemented through the execution of Key Work Programs, including:

1. Strengthening commercial performance by fragmenting the business portfolio focus of PPI which affects organizational and resource needs (regular, regulated, export, transition business, and subsidiaries). This work program will be implemented as follows:
 - a) Regular: sales penetration program and market engagement through agrosolutions, Makmur program, e-catalog, spotwalker, and product bundling, as well as staple goods sales to smelters.
 - b) Regulated: strengthening non-food business through the addition of alternative supplier partners and strengthening financing facilities while strengthening the food business through the development of new commodities in line with Bapanas (wheat, soybeans, horticulture).
 - c) Export: strengthening supply sources to obtain quality flagship products (coffee, spices, and seaweed) and expanding market potential.
 - d) Transition business: strengthening the business model to create business continuity (on-going concern).

- | | |
|---|---|
| <p>e) Anak Perusahaan: Penguatan hubungan induk dan anak serta peningkatan kinerja anak perusahaan melalui pengembangan kapabilitas sesuai fokus bisnis.</p> <p>2. Peningkatan kapabilitas melalui <i>market research</i>, <i>business intelligence</i>, <i>sales forecast</i>, SOP, rekonfigurasi infrastruktur pendistribusian serta rekonfigurasi proses bisnis menjadi pengadaan tersentralisasi dan <i>push strategy</i> komersial.</p> <p>3. Penyelesaian hutang jangka panjang melalui <i>debt to equity swap</i>, penyelesaian piutang melalui tim pokja PPI dan BGRLI (TFAR), penguatan pendanaan investasi melalui pelepasan aset non produktif atau <i>strategic alliances (joint venture)</i>, penguatan <i>financing (raising fund)</i> serta optimalisasi aset jangka pendek dan jangka panjang.</p> <p>4. Penguatan modal dasar anak perusahaan untuk <i>on-going concern</i> bisnis BGRLI serta penguatan bisnis PPI Industri ke arah non pangan selain kedistributoran bahan kimia, <i>integrase</i> logistik BGRLI ke kluster pangan untuk mendukung <i>2nd wave transformation</i>, <i>integrated</i> BLS-BGRLI dan aktivasi PPI Properti.</p> <p>5. Peningkatan kapabilitas SDM di setiap level, reorganisasi, pengembangan <i>talent</i> dan realokasi strategi.</p> <p>6. Penguatan proses bisnis komersial dan non komersial melalui digitalisasi.</p> | <p>e) Subsidiaries: Strengthening parent-subsidiary relationships and improving subsidiary performance through the development of capabilities aligned with business focus.</p> <p>2. Increasing capabilities through market research, business intelligence, sales forecasts, SOPs, distribution infrastructure reconfiguration, and business process reconfiguration into centralized procurement and commercial push strategy.</p> <p>3. Resolution of long-term debt through debt-to-equity swaps, settlement of receivables through PPI and BGRLI (TFAR) task forces, strengthening investment financing through the disposal of non-productive assets or strategic alliances (joint ventures), strengthening financing (raising funds), and optimizing short-term and long-term assets.</p> <p>4. Strengthening the basic capital of subsidiaries for the ongoing concern of BGRLI's business and strengthening the PPI Industry business towards non-food besides chemical distribution, logistics integration of BGRLI into the food cluster to support 2nd wave transformation, integrated BLS-BGRLI, and PPI Property activation.</p> <p>5. Increasing human resource capabilities at every level, reorganization, talent development, and strategic reallocation.</p> <p>6. Strengthening commercial and non-commercial business processes through digitization.</p> |
|---|---|

Program-program utama tersebut di atas telah dijalankan Sebagian, terutama dengan program pencapaian kinerja komersial walaupun sebagian terbesar belum mencapai target 2023.

Namun demikian, Dewan Komisaris tetap menghargai upaya-upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Direksi dan Tim Manajemen Perusahaan dalam mencapai target di tengah beragam tantangan yang mereka hadapi. Dan Dewan Komisaris meyakini bahwa pencapaian tahun ini akan menjadi landasan solid bagi pencapaian yang lebih baik di tahun mendatang.

Pandangan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan

Pandangan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2023, di dasarkan pada data-data berikut ini:

- *Sales*
Pencapaian pendapatan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tahun 2023 masih

Most of these main programs have been partially implemented, especially in achieving commercial performance, although the majority have not yet reached the 2023 targets.

Nevertheless, the Board of Commissioners appreciates the efforts and hard work undertaken by the Board of Directors and the Company Management Team in achieving the targets amidst various challenges they face. The Board of Commissioners believes that this year's achievements will serve as a solid foundation for even better achievements in the coming years.

Board of Commissioners' View on the Company's Performance

Based on the data provided, the Board of Commissioners' perspective on the Company's performance throughout 2023 is as follows:

- *Sales*
The revenue of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) in 2023 was still below the target

di bawah target sebesar Rp2.289,3 Milyar atau sebesar 79,4% dari RKAP 2023 sebesar Rp2.881 miliar. Perolehan pendapatan tahun ini jauh lebih rendah dari pencapaian sales tahun lalu (*year on year*) sebesar Rp2.367,5 milyar.

Kontributor terbesar berasal dari penjualan pupuk subsidi sebesar Rp329,5 miliar, atau sebesar 94,3% dari RKAP 2023 (Rp349,4 miliar). Urutan kedua berasal dari penjualan bahan pokok terutama Produk pangan dan Bahan Pokok sebesar Rp237,5 milyar, dengan perolehan pendapatan lebih tinggi dari RKAP 2023 atau tercapai sebesar 108,7% dari target 2023 (Rp218,5 miliar).

Kontributor terbesar berikutnya berasal dari penjualan bahan kimia sebesar Rp237,5 miliar atau 35,3% dari RKAP 2023 (Rp676,1 miliar). Secara *margin*, produk yang memberikan kontribusi tertinggi berturut-turut Pestisida Dharmabrand dengan GPM 36,7% dan Bahan Kimia dengan *Gross Profit Margin* (GPM) sebesar 25,5%. Walaupun margin kedua komoditi tersebut tinggi namun raihannya GPM hanya sebesar 13,2% untuk penjualan seluruh komoditi, lebih rendah dari target GPM sebesar 14,4% tahun 2023.

- **Net Profit**
Realisasi Laba bersih PPI setelah pajak menjadi sebesar Rp16.702 milyar atau 40% dari RKAP tahun 2023. Pencapaian ini jauh lebih kecil dari perolehan laba bersih tahun 2022 sebesar Rp49.089 milyar. Beban pokok penjualan mengalami peningkatan (yoy) menjadi Rp1.987 milyar tahun 2023 dari Rp1.970 milyar tahun 2022. Selain itu, terdapat peningkatan beban usaha dari Rp316.584 tahun lalu (2022) menjadi Rp335.913 milyar tahun 2023 sehingga menyebabkan penurunan laba bersih (yoy).
- **Net Cash Operating Cashflow**
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan dari minus Rp20.159 milyar tahun 2022 menjadi minus Rp132.788 milyar. Hal ini disebabkan penerimaan kas yang berasal dari pencairan piutang menurun menjadi Rp2.178 milyar tahun 2023 dari Rp2.395 milyar tahun 2022.

Di lain pihak, pengeluaran kas untuk pembayaran kepada supplier atas pembelian barang dagangan dan pembayaran hutang usaha meningkat dari Rp2.342 milyar tahun 2022 menjadi Rp2.350 milyar tahun 2023.

at IDR2,289.3 billion, which is 79.4% of the 2023 Business Plan (RKAP) target of IDR2,881 billion. This year's revenue was significantly lower than the sales achievement of the previous year, amounting to IDR2,367.5 billion.

The largest contributor came from the sales of subsidized fertilizers at IDR329.5 billion, equivalent to 94.3% of the 2023 RKAP target (IDR349.4 billion). The second position was from the sales of staple goods, especially food products and staple goods, at IDR237.5 billion, exceeding the 2023 target by 108.7% (IDR218.5 billion).

The next largest contributor comes from the sales of chemicals amounting to IDR237.5 billion or 35.3% of the RKAP 2023 (IDR676.1 billion). In terms of margin, the products that provide the highest contributions are Pestisida Dharmabrand with a GPM of 36.7% and Chemicals with a GPM of 25.5%. Although the margins of these two commodities are high, the overall GPM achieved is only 13.2% for the total commodity sales, which is lower than the target GPM of 14.4% for the year 2023.

- **Net Profit**
The net profit realized by PPI after tax amounted to IDR16,702 billion, representing 40% of the 2023 RKAP. This achievement was significantly lower than the net profit earned in 2022, which was IDR49,089 billion. The cost of goods sold increased (YoY) to Rp1,987 billion in 2023 from IDR1,970 billion in 2022. Additionally, there was an increase in operating expenses from IDR316.584 billion last year (2022) to IDR335.913 billion in 2023, resulting in a decrease in net profit (YoY).
- **Net Cash Operating Cashflow**
The net cash flow from operating activities decreased from minus IDR20,159 billion in 2022 to minus IDR132,788 billion. This was due to a decrease in cash receipts from accounts receivable to IDR2,178 billion in 2023 from IDR2,395 billion in 2022.

On the other hand, cash outflows for payments to suppliers for the purchase of goods and payments of trade payables increased from IDR2,342 billion in 2022 to IDR2,350 billion in 2023.

Hal ini berarti penjualan barang dagangan belum PPI belum mampu menutupi beban pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang dagang atas pembelian barang dagangan. Defisit *cashflow* yang berasal dari hasil usaha PPI juga diikuti dengan *deficit cashflow* yang berasal dari kegiatan pendanaan dan investasi sehingga secara keseluruhan terdapat defisit *cashflow* sebesar Rp118.709 milyar selama tahun 2023 sehingga posisi kas dan internal kas perusahaan menurun secara signifikan dari Rp181.418 milyar tahun lalu (2022) menjadi Rp62.709 milyar tahun 2023.

- **Piutang Usaha**

Piutang Usaha PPI meningkat sebesar Rp51.686 milyar menjadi Rp449.798 milyar tahun 2023 dari Rp433.293 milyar tahun 2022. Atas kualitas piutang, ragu-ragu dengan umur tunggakan (aging) piutang usaha lebih dari 1 (satu) tahun, PPI telah membukukan beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp112.047 milyar tahun 2023.

Pengelolaan piutang macet ini perlu mendapat perhatian dari Direksi PPI agar peningkatan CKPN tidak menekan perolehan laba dalam tahun 2024.

- **Persediaan**

Persediaan meningkat sebesar Rp16.314 milyar dari Rp97.028 milyar tahun 2022 menjadi Rp113.342 milyar tahun 2023. Atas peningkatan nilai persediaan ini, juga telah dibentuk beban cadangan persediaan sebesar Rp23.517 milyar pada tahun buku 2023 untuk persediaan barang dagangan dengan kategori rusak atau *expired*.

Persediaan yang rusak dikelompokkan ke dalam persediaan barang rusak (aset lain-lain) yang merupakan barang-barang yang menurut kondisi fisiknya tidak sesuai lagi dengan isi dan bentuk aslinya dan barang-barang yang masa pemakaiannya sudah melebihi masa yang ditetapkan oleh pabrik (kedaluwarsa).

Stock management perlu ditingkatkan oleh manajemen PPI melalui penyimpanan yang terpisah antara barang dagangan yang masih layak jual dan barang dagangan yang sudah rusak dan/atau sudah kedaluwarsa sehingga bisa menekan biaya provisi untuk persediaan tersebut.

This indicates that PPI's sales of goods have not yet been able to cover the cost of goods sold and the settlement of trade payables for the purchase of goods. The cash flow deficit from PPI's business results was also accompanied by a deficit in cash flow from financing and investment activities, resulting in an overall cash flow deficit of IDR118,709 billion during 2023, leading to a significant decrease in the company's cash position from IDR181,418 billion last year (2022) to IDR62,709 billion in 2023.

- **Accounts Receivable:**

PPI's accounts receivable increased by IDR51,686 billion to IDR449,798 billion in 2023 from IDR433,293 billion in 2022. Due to the doubtful quality of receivables, with overdue receivables aging more than 1 (one) year, PPI has recorded a provision for Impairment Losses of IDR112.047 billion in 2023.

Management of these overdue receivables needs attention from PPI's Board of Directors to ensure that the increase in CKPN does not pressurize profit earnings in 2024.

- **Inventory**

Inventory increased by IDR16,314 billion from IDR97,028 billion in 2022 to IDR113,342 billion in 2023. Due to the increase in inventory value, a provision for inventory loss of IDR23,517 billion was also recorded in the 2023 financial year for damaged or expired inventory.

Damaged inventory is categorized into damaged inventory (other assets), which includes items that no longer match their original content and form due to their physical condition, and items whose usage period has exceeded the manufacturer's specified period (expired).

Stock management needs to be improved by PPI management through separate storage of saleable inventory and damaged and/or expired inventory to reduce provisioning costs for these inventories.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Prospek Perusahaan di Tahun 2024

Prospek bisnis tahun 2024 di Indonesia pada prinsipnya masih cukup baik karena kondisi makro ekonomi Indonesia yang relatif masih stabil kondusif dengan beberapa indikator antara lain pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh sekitar 5%, inflasi yang terjaga di kisaran 3% serta nilai tukar rupiah terhadap dollar US yang berada pada kisaran 14.500 per US Dollar.

Namun demikian dampak dari pandemi COVID-19 di tahun 2023 masih terasa walaupun di berbagai sektor telah mulai *recovery* pulih secara bertahap. Hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah pengaruh global, khususnya perang Rusia Ukraini yang masih belum mereda dan bahkan peningkatan eskalasi konflik Israel dan Palestina/Hamas yang cukup mengkhawatirkan karena akan berpengaruh kepada kelancaran perdagangan internasional.

Tahun 2023 karena menjelang Pilpres dan Pileg pada awal tahun 2024 tentu sangat berpengaruh kepada pelaku usaha yang sebagian terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada perhelatan politik tersebut sehingga pengaruh yang bersifat *negative* ke bisnis Perusahaan perlu diantisipasi, namun pengaruh yang bersifat positif perlu dioptimalkan untuk kemajuan Perusahaan.

Bagi PT PPI stabilitas dan pertumbuhan perekonomian Indonesia sebagai hal yang positif perlu disyukuri dan dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar bisnis tumbuh secara berkelanjutan. Sedangkan hal-hal yang berpotensi sebagai ancaman atau berpengaruh *negative* harus menjadi tantangan yang harus diantisipasi dan disiasati agar dampak negatifnya dapat dimitigasi sebaik-baiknya.

Prospek bisnis yang cukup baik dan masih kondusif dalam tahun 2024 perlu dioptimalkan oleh manajemen untuk peningkatan kinerja, walaupun potensi ancaman dan hambatan yang ada di tahun 2023 cukup menantang untuk diantisipasi dan diatasi.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan GCG

Dewan Komisaris berpendapat bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja PT PPI dalam jangka panjang, kami senantiasa meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate*

Board of Commissioners' View on the Company's Prospects in 2024

The business outlook for 2024 in Indonesia is in principle still quite good because Indonesia's relatively stable macroeconomic conditions are conducive to several indicators including economic growth which is still growing around 5%, inflation which is maintained at around 3% and the rupiah exchange rate against the US dollar which is in the range of 14,500 per US Dollar.

However, the impact of the COVID-19 pandemic in 2023 is still felt even though various sectors have begun to recover gradually. Things to watch out for and anticipate are global influences, especially the Russian Ukrainian war which has not yet subsided and even the escalation of the Israeli and Palestinian / Hamas conflicts which is quite worrying because it will affect the smooth running of international trade.

The year 2023, because of the approaching presidential elections and legislative elections in early 2024, was certainly very influential on business actors, who are partly involved either directly or indirectly in these political events so that negative influences on the Company's business need to be anticipated, but positive influences need to be optimized for the Company's progress.

For PT PPI, the stability and growth of the Indonesian economy as a positive thing needs to be grateful and used as a reference to improve the Company's performance so that the business grows sustainably. Meanwhile, things that have the potential to pose a threat or have a negative effect must be a challenge that must be anticipated and dealt with so that the negative impact can be mitigated as well as possible.

Business prospects that are quite good and still conducive in 2024 need to be optimized by management to improve performance, although the potential threats and obstacles that exist in 2023 are quite challenging to anticipate and solve.

Board of Commissioners' View on GCG Implementation

The Board of Commissioners believes that in efforts to enhance PT PPI's long-term performance, we continually improve the oversight function on the implementation of Corporate Governance (*Good Corporate Governance/*

Governance/GCG) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemegang saham, regulator maupun standar *best practice* yang berlaku.

Penerapan GCG di PT PPI tidak hanya untuk memenuhi peraturan dan Perundang-undangan saja, namun harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama dengan Direksi minimal 1 (satu) bulan sekali, untuk membahas kinerja bulanan, perkembangan bisnis dan isu-isu operasional PT PPI. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah 100%. Selain itu, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) organ pendukung, yaitu Komite Audit, serta Komite Pemantau Risiko Perusahaan. Komite Audit memiliki fungsi utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaporan pencatatan keuangan, melakukan telaah dan klarifikasi atas informasi keuangan, rekomendasi atas penunjukan dan pengawasan pekerjaan auditor independen, evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi internal audit, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Komite Pemantau Risiko Perusahaan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik di lingkup Perusahaan, termasuk, memastikan proses investasi dan pengelolaan aset sesuai dengan pemetaan risiko yang dilakukan secara komprehensif.

Dewan Komisaris terus berupaya memantau penerapan GCG yang menjadi komitmen bersama dengan Direksi. Pengawasan terhadap implementasi GCG dilakukan untuk memastikan seluruh prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi Perusahaan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya sosialisasi dan *refreshment* pemahaman terkait *soft structure* GCG kepada seluruh karyawan, tindak lanjut hasil *Assessment GCG 2022*, reviu *Board Charter* serta *GCG Code*, induksi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan materi RKAP dan RJPP, Pengembangan Bisnis dan lain sebagainya. Dan untuk melihat sejauh mana implementasi GCG diterapkan, maka PT PPI telah melaksanakan *assessment GCG* yang dilaksanakan oleh BPKP dengan mengacu kepada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang

GCG) in accordance with the standards set by shareholders, regulators, and prevailing best practices.

The implementation of GCG at PT PPI is not only to comply with regulations and laws but also to consistently embody the principles of GCG. In carrying out the oversight function, the Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors at least once a month to discuss monthly performance, business developments, and operational issues of PT PPI. During the year 2023, the Board of Commissioners conducted joint meetings with the directors 11 (eleven) times with a 100% attendance rate for each member of the Board of Commissioners. Additionally, the Board of Commissioners is assisted by two supporting organs, namely the Audit Committee and the Company's Risk Monitoring Committee. The Audit Committee's main function is to oversee financial reporting, review and clarify financial information, recommend the appointment and supervision of independent auditors, evaluate the effectiveness of internal audit functions, internal controls, and compliance with applicable laws and regulations. The Audit Committee also oversees the Company's compliance with applicable regulations and laws. Meanwhile, the Company's Risk Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in ensuring that risk management principles are well implemented within the Company, including ensuring that investment processes and asset management are in line with comprehensively conducted risk mapping.

The Board of Commissioners continues to monitor the implementation of GCG, which is a shared commitment with the Board of Directors. Oversight of the implementation of GCG is conducted to ensure that all principles of GCG have been implemented at every level and tier of the Company's organization. Efforts that have been made include socializing and refreshing understanding related to the soft structure of GCG to all employees, following up on the results of the 2022 GCG Assessment, reviewing the Board Charter and GCG Code, inducting new members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with materials on RKAP and RJPP, Business Development, and others. To assess the extent of GCG implementation, PT PPI has conducted a GCG assessment carried out by BPKP referring to parameters developed by the Ministry of SOEs according to the Minister of SOEs Secretary's Decree Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Hasil penilaian tersebut menunjukkan pencapaian skor sebesar 76,15 dengan Klasifikasi kualitas penerapan GCG “Baik”.

Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, serta bekerja sama secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memandang bahwa berbagai upaya penguatan implementasi GCG perlu terus dilakukan, termasuk bekerjasama dan melakukan sinergi dengan berbagai instansi guna mendapatkan masukan tata kelola perusahaan di PT PPI maupun di lingkungan PT PPI secara grup.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris secara saksama memantau dan meninjau kesesuaian seluruh kegiatan usaha Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Kami menilai bahwa Perseroan telah dikelola dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan juga terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh semakin lengkap dan efektifnya infrastruktur serta mekanisme GCG yang dikembangkan oleh manajemen demi menjamin akuntabilitas seluruh proses usaha. Meskipun demikian, Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen harus senantiasa melakukan revidi dan perbaikan secara berkesinambungan terkait dengan pengkinian *Standard Operational Procedure* (SOP) pada setiap proses bisnis serta memastikan proses sosialisasi dan penerapannya dilakukan secara optimal. Dewan Komisaris berharap seluruh upaya untuk mengembangkan penerapan GCG oleh Direksi turut memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

Pandangan Dewan Komisaris tentang Mitigasi Risiko

Pengelolaan risiko tahun 2023 di PT PPI adalah berpedoman kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Pengelolaan profil risiko utama di PT PPI perlu senantiasa ditingkatkan efektivitasnya dengan tata kelola organisasi yang semakin baik. Pengelola risiko korporat perlu lebih

Evaluation of Good Corporate Governance Implementation. The assessment results indicate an achievement score of 76.15 with a “Good” classification of GCG implementation quality.

The Board of Commissioners continually strives to improve the quality of oversight of the Company’s operations and works harmoniously with the Board of Directors as regulated in the Company’s Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners believes that various efforts to strengthen the implementation of GCG need to be continuously undertaken, including cooperating and synergizing with various agencies to obtain input on corporate governance at PT PPI and within the PT PPI group.

Throughout the year 2023, the Board of Commissioners meticulously monitored and reviewed the compliance of all Company activities with applicable laws and regulations and best practices in implementing good corporate governance (GCG).

We assess that the Company has been managed quite well and in accordance with applicable laws and regulations. In general, the quality of GCG implementation within the Company’s environment also continues to improve, as evidenced by the increasingly complete and effective infrastructure and mechanisms of GCG developed by management to ensure the accountability of all business processes. Nevertheless, the Board of Commissioners believes that management must continuously review and improve Standard Operational Procedures (SOP) in every business process and ensure that the process of socialization and implementation is carried out optimally. The Board of Commissioners hopes that all efforts to develop the implementation of GCG by the Board of Directors will provide a strong foundation for the Company’s sustainable growth.

BOC View on Risk Mitigation

Risk management in 2023 at PT PPI is guided by the regulations established by the Ministry of SOEs, namely Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. The management of the main risk profiles at PT PPI needs to continually enhance its effectiveness with increasingly better organizational governance. Corporate risk managers

proaktif dalam proses-proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko yang harus dikelola dalam rangka mendukung pencapaian sasaran bisnis Perusahaan. Proses pendalaman atas akar permasalahan (*root cause*) dari exposure risiko utama di Perusahaan masih perlu ditingkatkan kualitas penerapannya agar langkah-langkah perbaikan (*corrective action*) yang harus dilakukan dapat efektif memitigasi risiko yang dihadapi Perusahaan. Untuk hal tersebut manajemen perlu secara terus menerus meningkatkan kematangan pengelolaan risiko (*risk management maturity*) di setiap level organisasi, termasuk menumbuhkan budaya risiko (*risk culture*) dari setiap pegawai PT PPI secara terus menerus selaras dengan penerapan nilai-nilai budaya Perusahaan, yaitu budaya AKHLAK.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dewan Komisaris memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Perseroan. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme penting bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan tindak pidana tertentu yang mungkin telah terjadi atau diperkirakan akan terjadi dalam kegiatan operasional Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Perseroan mempertahankan sikap waspada terhadap kepatuhan dan perilaku etis, yang dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yang dilaporkan melalui saluran pelaporan pelanggaran. Hal ini menggarisbawahi komitmen Perseroan untuk mengembangkan budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas, di mana karyawan merasa diberdayakan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut akan adanya pembalasan.

Sistem pelaporan pelanggaran yang efektif mencerminkan pendekatan proaktif Perusahaan terhadap manajemen risiko dan tata kelola. Dengan menyediakan jalur rahasia untuk melaporkan potensi pelanggaran, sistem ini memungkinkan deteksi dini dan penyelesaian masalah, sehingga mengurangi risiko reputasi dan keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris memastikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif, dengan mekanisme yang tepat untuk menyelidiki insiden yang dilaporkan secara menyeluruh dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar etika.

Ke depan, Dewan Komisaris tetap berdedikasi untuk menjunjung tinggi integritas dan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran. Sebagai bagian dari tanggung

need to be more proactive in the processes of risk identification, measurement, monitoring, and mitigation that must be managed to support the Company's business objectives. The process of deepening the root causes of the main risk exposures in the Company still needs to improve its application quality so that corrective actions that need to be taken can effectively mitigate the risks faced by the Company. For this purpose, management needs to continuously improve the maturity of risk management at every level of the organization, including fostering a risk culture among every employee of PT PPI continuously aligned with the application of the Company's cultural values, namely the AKHLAK culture.

BOC View on Whistleblowing System

The Board of Commissioners plays a crucial role in monitoring the implementation of the whistleblowing system within the Company. This system serves as a vital mechanism for employees and other stakeholders to report allegations of specific criminal acts that may have occurred or are anticipated to occur within the Company's operations. Throughout the year 2023, the Company maintained a vigilant stance on compliance and ethical conduct, as evidenced by the absence of any reported violations through the whistleblowing channel. This underscores the Company's commitment to fostering a culture of transparency, accountability, and integrity, where employees feel empowered to raise concerns without fear of reprisal.

The effective functioning of the whistleblowing system reflects the Company's proactive approach to risk management and governance. By providing a confidential avenue for reporting potential misconduct, the system enables the early detection and resolution of issues, thereby mitigating reputational and financial risks. The oversight provided by the Board of Commissioners ensures that the whistleblowing system operates effectively, with appropriate mechanisms in place to investigate reported incidents thoroughly and take necessary remedial actions in line with regulatory requirements and ethical standards.

Looking ahead, the Board of Commissioners remains dedicated to upholding the integrity and effectiveness of the whistleblowing system. As part of its oversight

jawab pengawasan, Dewan Komisaris akan terus memantau pelaksanaan sistem, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, dan memperkuat komitmen Perseroan terhadap perilaku etis dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan mengembangkan budaya akuntabilitas dan transparansi, yang didukung oleh mekanisme pelaporan yang kuat, Perseroan bertujuan untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan ketahanan organisasi, dan menjunjung tinggi reputasinya sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab.

Peran Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris secara intensif memberikan saran dan arahan kepada Direksi, terutama dalam upaya memitigasi risiko yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan industri sepanjang tahun 2023. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan yang ketat atas strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris juga memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan.

Dalam struktur tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris merupakan organ yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat terhadap pengelolaan Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, lingkup fungsi pengawasan Dewan Komisaris mencakup proses penelaahan, pemberian persetujuan terhadap rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, hingga menyampaikan laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara umum, keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dijalankan melalui pembagian bidang tugas kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris, sesuai ketentuan internal dan pedoman kerja yang berlaku. Sepanjang 2023 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi dan mengawasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan serta kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk memastikan strategi perusahaan berjalan secara implementatif.

Salah satu fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dalam hal pengurusan dan jalannya proses bisnis Perusahaan, termasuk

responsibilities, the Board will continue to monitor the implementation of the system, identify areas for improvement, and reinforce the Company's commitment to ethical behavior and regulatory compliance. By fostering a culture of accountability and transparency, supported by robust reporting mechanisms, the Company aims to strengthen stakeholder trust, enhance organizational resilience, and uphold its reputation as a responsible corporate citizen.

The Board of Commissioners' Supervisory Role over the Board of Directors

Throughout 2023, the Board of Commissioners provided intensive advice and guidance to the Board of Directors, particularly in efforts to mitigate risks caused by economic and industry conditions throughout the year. The Board of Commissioners conducted strict oversight functions over the strategies and policies implemented by the Board of Directors in managing the Company's business as mandated in the Articles of Association and applicable regulations. In carrying out its duties, the Board of Commissioners also ensured the implementation of good corporate governance and compliance with all relevant laws and regulations related to the Company's operations.

Within the Company's governance structure, the Board of Commissioners is the body responsible for exercising oversight functions and providing advice on Company management. In its execution, the scope of the Board of Commissioners' oversight functions includes the review process, approval of long-term plans, Company work plans and budgets, and reporting to the General Meeting of Shareholders (GMS). Generally, the overall execution of duties and responsibilities is carried out through the allocation of tasks to each member of the Board of Commissioners, in accordance with internal regulations and applicable working guidelines. Throughout 2023, the Board of Commissioners fulfilled its duties and responsibilities in overseeing the management of the Company carried out by the Board of Directors and monitoring the implementation of good corporate governance principles within the Company and the Company's compliance with laws and regulations to ensure that the Company's strategies are implemented effectively.

One of the functions of the Board of Commissioners is to oversee the performance of the Board of Directors in managing and conducting the Company's business

memberikan saran dan nasihat sejalan dengan aspirasi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Mekanisme pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dilakukan dalam bentuk rapat formal maupun komunikasi informal yang dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretariat Dekom, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, kami membangun hubungan kerja dengan Direksi melalui kesamaan pandangan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi Perusahaan.

Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme pengawasan yang terstruktur sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu mekanisme pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris adalah dengan menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi. Dewan Komisaris telah merumuskan berbagai kebijakan dan menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan, sesuai arahan Pemegang Saham, keputusan RUPS, ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris memberikan perhatian pada beberapa aspek utama yang dapat memberikan dampak pada kinerja Perusahaan, baik di 2023 maupun ke depan, antara lain terkait langkah-langkah yang dijalankan Direksi dalam menyikapi persaingan bisnis dan penugasan yang diberikan oleh Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap langkah yang dijalankan Perusahaan sepanjang 2022 telah melalui proses penilaian risiko yang komprehensif, termasuk dalam pengelolaan portofolio investasi Perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Hal lain yang juga menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris adalah program digitalisasi yang dijalankan Perusahaan termasuk *IT security* di Perusahaan. Bagi Dewan Komisaris, digitalisasi dan *IT security* merupakan sebuah keharusan di tengah iklim bisnis saat ini. Selain memberikan kemudahan, digitalisasi juga akan membantu Perusahaan dalam menerapkan salah satu prinsip tata kelola, yaitu transparansi dengan tetap memitigasi risiko yang ada. Hal yang juga tidak kalah penting, perhatian Dewan Komisaris di 2022 adalah terkait pengembangan sumber daya manusia dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang memadai. Dewan Komisaris memandang kedua aspek ini menjadi fundamental bagi Perusahaan untuk dapat terus meningkatkan daya saing dan meraih pertumbuhan berkelanjutan.

processes, including providing advice and recommendations in line with the aspirations of Shareholders and all stakeholders. The oversight mechanism of the Board of Commissioners over the Board of Directors is carried out in the form of formal meetings and informal communications assisted by the Board of Commissioners' Organs consisting of the Dekom Secretariat, Audit Committee, and Risk Monitoring Committee. In carrying out this oversight function, we build a working relationship with the Board of Directors through shared views to achieve the Company's goals, vision, and mission.

The Board of Commissioners has a structured oversight mechanism to produce outputs that meet expectations. One of the oversight mechanisms implemented by the Board of Commissioners is to hold joint meetings with the Board of Directors. The Board of Commissioners has formulated various policies and prepared strategic steps in carrying out Company management duties, following the Shareholders' directives, GMS decisions, provisions of the Articles of Association, and applicable laws and regulations.

Throughout 2023, the Board of Commissioners paid attention to several key aspects that could impact the Company's performance, both in 2023 and in the future, including steps taken by the Board of Directors in responding to business competition and assignments given by Shareholders. Additionally, the Board of Commissioners placed great emphasis on the implementation of risk management aspects in the Company. The Board of Commissioners must ensure that every step taken by the Company throughout 2022 has undergone a comprehensive risk assessment process, including in managing the Company's investment portfolio. This is crucial amidst uncertain conditions. Another important focus for the Board of Commissioners is the Company's digitalization program, including IT security. For the Board of Commissioners, digitalization and IT security are imperative in today's business climate. In addition to providing convenience, digitalization will also assist the Company in implementing one of the governance principles, transparency, while still mitigating existing risks. Equally important, the Board of Commissioners' attention in 2022 is related to human resources development and the implementation of adequate corporate governance principles. The Board of Commissioners considers these two aspects fundamental for the Company to continue improving competitiveness and achieving sustainable growth.

Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan mitra kami atas dukungan yang teguh selama ini.

Bersama-sama, kita siap untuk memanfaatkan peluang yang akan datang dan menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul. Dengan kepercayaan dan dukungan Anda, kami yakin dapat ke depannya dapat memberikan nilai yang lebih baik untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Atas nama Dewan Komisaris, kami juga ingin menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direksi atas kepemimpinan dan dedikasi Anda sepanjang tahun lalu. Visi strategis, pengambilan keputusan yang tepat, dan upaya tak kenal lelah yang Anda lakukan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. Melihat pencapaian Perusahaan di tahun lalu, kami dapat menatap ke depan dengan optimis.

Semoga ke depannya, Direksi dapat terus meraih kesuksesan seiring dengan upaya kita bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran bersama di masa depan.

Closing

The Board of Commissioners extends its highest appreciation to our shareholders, employees, customers, and partners for their steadfast support throughout this time.

Together, we are ready to seize upcoming opportunities and confront any obstacles that may arise. With your trust and support, we are confident that we can deliver better value in the future to achieve sustainable growth for the company and all stakeholders involved.

On behalf of the Board of Commissioners, we also want to convey our heartfelt congratulations and gratitude to the Board of Directors for your leadership and dedication throughout the past year. Your strategic vision, sound decision-making, and tireless efforts have significantly contributed to the success and growth of the company. Looking at the company's achievements in the past year, we can look forward with optimism.

May the Directors continue to achieve success in the future as we collectively strive to realize our shared goals and objectives in the future.

Jakarta, 28 Mei 2024 | May 28, 2024

Hormat kami,
Warm regards,



Hamli

President Komisaris

President Commissioner



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Laporan Direksi

Report of The Board of Directors





“

Menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi, PPI menunjukkan komitmen yang teguh untuk melakukan perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek operasinya.

In response to the challenges faced, PPI has demonstrated an unwavering commitment to continuous improvement in various aspects of its operations.

”

**Soegeng
Hernowo**

Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Mengawali laporan tahunan ini, Direksi terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah yang telah memungkinkan Perseroan untuk menutup tahun 2023 dengan catatan kinerja yang cukup menggembirakan di tengah beratnya tantangan yang dihadapi.

Laporan Tahunan ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan dan inisiatif strategis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, tetapi juga merupakan bukti dedikasi dan kerja keras seluruh tim kami selama tahun yang dilaporkan. Laporan ini merupakan cerminan komitmen kami terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keunggulan tata kelola perusahaan.

Selain itu, laporan ini juga merupakan perwujudan dari upaya kolektif dan kepemimpinan Direksi dalam mengelola dan mengarahkan Perseroan di tengah lanskap industri yang dinamis dan berupaya menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

To Our Respected Shareholders and Stakeholders,

As we commence this annual report, the Board of Directors first and foremost wishes to express gratitude to the Almighty for the abundant blessings that have enabled the Company to conclude the year 2023 with a satisfactory performance amidst the formidable challenges faced.

This Annual Report not only provides a comprehensive overview of the financial performance and strategic initiatives of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia but also serves as evidence of the dedication and hard work of our entire team throughout the reported year. This report reflects our commitment to transparency, accountability, and corporate governance excellence.

Furthermore, this report also embodies the collective effort and leadership of the Board of Directors in managing and directing the Company amidst a dynamic industry landscape and striving to create sustainable value for shareholders and stakeholders.

Kondisi Perekonomian Global dan Nasional pada tahun 2023

Tahun 2023 masih penuh dengan tantangan, sejumlah risiko dapat kembali meningkatkan ketidakpastian perekonomian dunia, di antaranya masih berlanjutnya ketegangan geopolitik, pelemahan ekonomi di sejumlah negara termasuk Tiongkok, serta masih tingginya suku bunga kebijakan moneter dan yield obligasi di negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), sejak adanya tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina, pemulihan ekonomi global masih terus berlangsung hingga kini. Dalam Proyeksi Ekonomi Dunia terbarunya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah di 2,8% pada tahun 2023, untuk kemudian diikuti oleh kenaikan yang moderat menjadi 3% pada tahun berikutnya, atau 0,1% lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya di bulan Januari.

Namun di tengah-tengah tantangan ini, selalu terdapat harapan. Hal ini didasari oleh perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh dengan baik didukung oleh permintaan domestik. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal. Penguatan nilai tukar Rupiah berlanjut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Kondisi-kondisi ini mempengaruhi kinerja perusahaan dalam hal fluktuatif harga pasar dan beragam kebijakan terkait.

Selama kuartal ketiga tahun 2023, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan, mencapai pertumbuhan kumulatif sebesar 5,05%. Kinerja yang kuat ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat, dengan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,9% secara *year-to-date* (ytd) dan investasi yang meningkat 4,2% secara ytd. Meskipun terdapat tantangan dari perlambatan ekonomi global, ekspor mengalami sedikit pertumbuhan sebesar 1,1% ytd, sementara impor melemah sebesar -2,0% ytd, yang mencerminkan sentimen pasar yang berhati-hati dan berkurangnya aktivitas perdagangan internasional.

Per Desember 2023, inflasi di Indonesia berada pada tingkat yang terkendali sebesar 2,61% secara tahunan (YoY), menandai penurunan yang cukup signifikan dari perkiraan sebesar 3,6% untuk periode yang sama. Selain itu, terdapat tren penurunan inflasi yang terlihat pada barang-barang bergejolak, termasuk bahan pokok seperti beras, cabai, dan bawang putih, yang menandakan perkembangan positif dalam stabilitas pasar di penghujung tahun ini.

The global and national economic conditions in 2023

in 2023 remained fraught with challenges, as several risks continued to escalate, contributing to ongoing uncertainty in the global economy. These risks included persistent geopolitical tensions, economic downturns in several countries, including China, and persistently high policy interest rates and bond yields in developed nations. According to the International Monetary Fund (IMF), since the pressures exerted by the pandemic and Russia's invasion of Ukraine, the global economic recovery has continued albeit slowly. In its latest World Economic Outlook, the IMF projected a modest growth rate of 2.8% for the global economy in 2023, followed by a moderate increase to 3% in the following year, which is 0.1% lower than the previous projections in January.

Amidst these challenges, there remains hope, particularly driven by Indonesia's resilient economic growth supported by domestic demand. The performance of Indonesia's Balance of Payments (BOP) underpins the maintenance of external stability. The strengthening of the Rupiah exchange rate continues in line with the consistency of Bank Indonesia's monetary policy, coupled with the easing of global financial market uncertainty and inflation that remains within target ranges. These conditions influence company performance in terms of market price fluctuations and various related policies.

Throughout the third quarter of 2023, the Indonesian economy exhibited resilience, achieving cumulative growth of 5.05%. This robust performance was supported by strong domestic demand, with household consumption growing by 4.9% year-to-date (YTD) and investment increasing by 4.2% YTD. Despite challenges from the global economic slowdown, exports experienced slight growth of 1.1% YTD, while imports weakened by -2.0% YTD, reflecting cautious market sentiment and reduced international trade activity.

By December 2023, inflation in Indonesia remained at a controlled level of 2.61% on an annual basis (YoY), marking a significant decrease from the forecast of 3.6% for the same period. Additionally, there was a downward trend in inflation observed in volatile goods, including staples such as rice, chili, and garlic, indicating positive developments in market stability towards the end of the year.

Perekonomian domestik menunjukkan resiliensi yang kuat di berbagai indikator. Aktivitas manufaktur tetap kuat, dengan PMI berada di level 52,2, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan. Konsumsi listrik mencatat lonjakan, sebesar 14% pada konsumsi bisnis dan 6,7% pada konsumsi industri. Kepercayaan konsumen tetap terjaga tinggi di angka 123,6, sementara Indeks Penjualan Riil mencatat pertumbuhan positif di angka 2,9%.

Selain itu, langkah-langkah pemulihan ekonomi yang efektif dan program-program sosial telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada tahun 2023, melampaui tingkat sebelum pandemi COVID-19 sebesar 9,41% pada tahun 2019.

Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan eksternal dengan memanfaatkan konsumsi domestik dan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Namun, Indonesia tetap waspada dalam menghadapi ketidakpastian eksternal dan membangun ekosistem yang kondusif untuk ekspansi ekonomi yang berkelanjutan melalui langkah-langkah kebijakan yang hati-hati dan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik dan internasional.

Tinjauan Kinerja Industri yang Relevan

Perusahaan holding pangan diproyeksikan akan bekerjasama dalam pengoperasian aset distribusi logistik yang ada masing-masing. Melalui *holding* pangan, persoalan pangan yang mencakup sisi hulu hingga ke hilir dapat dipecahkan persoalannya, baik kesulitan input atau harga yang tinggi terkait produksi pangan. Di sisi hilir, yaitu permasalahan panjangnya rantai pasok hingga ketidakpastian harga diharapkan mampu diatasi.

Dengan menggabungkan jadi satu *holding*, pengoperasian pelaksanaan distribusi logistik yang merupakan faktor menentukan perusahaan pangan akan jadi lebih efisien sehingga akan meningkatkan optimalisasi terasuk pergudangan. Dampak akhirnya tentu bisa meningkatkan kinerja keuangan masing-masing perusahaan.

PPI sebagai bagian dari anggota BUMN Kluster Pangan memegang peran dan fungsi perdagangan dan logistik di dalam rantai nilai kluster pangan, untuk itu PPI dituntut agar dapat meningkatkan kapabilitas perdagangannya sehingga mampu mengemban peran dan fungsi tersebut secara baik. PPI memiliki segmentasi produk yang luas

The domestic economy demonstrated strong resilience across various indicators. Manufacturing activity remained robust, with a PMI level of 52.2, indicating growth. Electricity consumption recorded spikes, with a 14% increase in business consumption and a 6.7% increase in industrial consumption. Consumer confidence remained high at 123.6, while the Real Sales Index recorded positive growth at 2.9%.

Furthermore, effective economic recovery measures and social programs have contributed to a decrease in the poverty rate from 9.54% in March 2022 to 9.36% in 2023, surpassing pre-COVID-19 levels of 9.41% in 2019.

Amidst these dynamics, Indonesia's economy has demonstrated its resilience in facing external challenges by leveraging domestic consumption and investment as primary drivers of growth. However, Indonesia remains vigilant in the face of external uncertainties and is building a conducive ecosystem for sustainable economic expansion through careful policy measures and strategic initiatives aimed at enhancing domestic and international economic resilience.

Relevant Industry Performance Review

Food holding companies are projected to collaborate in operating existing logistics distribution assets respectively. Through the food holding, issues related to food from upstream to downstream can be addressed, including input difficulties or high prices related to food production. On the downstream side, namely the long supply chain and price uncertainty issues are expected to be overcome.

By merging into one holding, the operation of logistics distribution implementation, which is a determining factor for food companies, will become more efficient, thus enhancing optimization including warehousing. The ultimate impact will certainly improve the financial performance of each company.

PPI, as part of the State-Owned Enterprises (BUMN) Food Cluster, plays a role and function in trade and logistics within the food cluster value chain. Therefore, PPI is required to improve its trading capabilities so that it can fulfill these roles and functions effectively. PPI has a wide product segmentation covering various fields ranging

yang mencakup berbagai bidang mulai dari perdagangan non bahan pokok, perdagangan bahan pokok, produk strategis, produk penjualan ekspor, transisi bisnis, dan anak perusahaan.

Peluang dan Tantangan di Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kinerjanya secara keseluruhan, meskipun telah melakukan berbagai upaya. Hambatan-hambatan ini sebagian besar berasal dari eksternal, dan berada di luar kendali langsung perusahaan. Itu sebabnya, Direksi menyadari bahwa kinerja perusahaan pada 2023 secara umum masih belum optimal.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Perseroan adalah ancaman resesi makro ekonomi global dimana terjadi peningkatan dari inflasi dan pelemahan kurs, penurunan harga beberapa komoditas minyak mentah, CPO dan logam dasar, ditambah situasi kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor. Resesi ekonomi makro menandakan periode penurunan ekonomi yang meluas, ditandai dengan penurunan PDB, meningkatnya pengangguran, dan berkurangnya belanja konsumen. Bisnis menghadapi penurunan permintaan barang dan jasa karena konsumen dan bisnis sama-sama mengencangkan ikat pinggang di tengah ketidakpastian ekonomi.

Selama kemerosotan ekonomi, mata uang Rupiah sering kali menghadapi tekanan karena investor cenderung mencari aset yang lebih aman yang mengakibatkan penurunan arus modal. Nilai tukar yang melemah dapat berdampak luas pada bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional, karena memengaruhi biaya impor dan ekspor, daya saing di pasar luar negeri, dan nilai investasi di luar negeri.

Selain itu juga terdapat beberapa hal yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Perseroan. Terjadinya perubahan kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan alokasi pupuk subsidi mempengaruhi pencapaian target perusahaan, yaitu hilangnya wilayah penyaluran Cabang untuk pupuk subsidi yang sebelumnya hanya mendapatkan alokasi pupuk ZA dan SP26 dimana saat ini sudah tidak disubsidi lagi oleh Pemerintah. Sementara dalam hal bisnis ekspor kopi, terdapat perubahan regulasi dari pemerintah Mesir terkait pembayaran ke importir.

Namun demikian, di tengah tekanan yang terjadi Direksi melihat ada berbagai peluang yang harus dicermati dan

from non-staple goods trading, staple goods trading, strategic products, export sales products, business transition, and subsidiaries.

Opportunities and Challenges in 2023

In 2023, the Company faced various challenges that hindered its overall performance, despite numerous efforts. These obstacles largely stemmed from external factors, beyond the direct control of the company. Therefore, the Board of Directors acknowledges that the company's performance in 2023, overall, was still not optimal.

One of the biggest challenges facing the Company was the threat of a global macroeconomic recession, characterized by increasing inflation and currency depreciation, alongside decreasing prices of certain commodities such as crude oil, CPO, and base metals. Additionally, the situation of stabilizing the Rupiah exchange rate policy was continuously reinforced to control the inflation of imported goods. A macroeconomic recession signifies a period of widespread economic decline, marked by declining GDP, rising unemployment, and reduced consumer spending. Businesses face declining demand for goods and services as both consumers and businesses tighten their belts amidst economic uncertainty.

During economic downturns, the Indonesian Rupiah often faces pressure as investors tend to seek safer assets, resulting in a decrease in capital inflows. The weakening exchange rate can have widespread implications for businesses engaged in international trade, affecting import and export costs, competitiveness in foreign markets, and the value of overseas investments.

Furthermore, several significant factors significantly affected the Company's performance. Changes in government policies related to the allocation of subsidized fertilizers affected the company's target achievement, such as the loss of Branch distribution areas for subsidized fertilizers, which previously only received allocations of ZA and SP26 fertilizers that are no longer subsidized by the Government. Meanwhile, in the coffee export business, there were regulatory changes from the Egyptian government regarding payments to importers.

However, amidst the prevailing pressures, the Board of Directors identifies various opportunities that need to

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Salah satunya adalah perluasan bisnis pasar dari berbagai produk-produk PPI dan WIS serta pengembangan pengolahan limbah pangan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi, PPI menunjukkan komitmen yang teguh untuk melakukan perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek operasinya. Melalui pendekatan komprehensif yang mencakup inisiatif strategis dan peningkatan organisasi, PPI berupaya untuk meningkatkan ketangguhan dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Salah satunya adalah PPI memprioritaskan penguatan dan perluasan jaringan penjualan untuk menembus pasar baru, memperdalam hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, dan mendorong pertumbuhan pendapatan. Hal ini melibatkan penerapan strategi pemasaran yang ditargetkan, pemberian insentif kepada tim penjualan, dan investasi dalam sistem manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan efektivitas penjualan dan jangkauan pasar.

Target dan Pencapaian 2023

Pencapaian penjualan pada 2023 adalah sebesar Rp2.285,65 miliar atau 79% dari target penjualan RKAP 2023, sebesar Rp2.881,84 miliar. Capaian pendapatan ini sebesar 97% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 pada periode yang sama.

Penjualan ini terdiri dari perdagangan bahan pokok (produk pangan & bahan pokok dan produk konsumsi), perdagangan non bahan pokok (pupuk subsidi, pupuk non subsidi, Dharmabrand, farmasi & alat kesehatan dan produk non pangan lainnya), dan produk strategis (bahan kimia, produk impor).

Selain itu diperoleh dari transisi bisnis dari PMO Properti, PMO Wis dan dukungan infrastruktur logistik.

Prospek Usaha pada Tahun 2024

PPI sangat optimis untuk mencapai *surplus* pada tahun 2024, dengan berdasarkan atas pemahaman yang komprehensif tentang lanskap ekonomi makro dan dinamika spesifik industri. Melalui analisis yang cermat terhadap kondisi ekonomi makro, termasuk faktor-faktor seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, dan tren ketenagakerjaan, PPI berupaya untuk menyesuaikan strateginya dalam menavigasi potensi hambatan dan memanfaatkan peluang yang muncul.

be scrutinized and can be utilized for the company's benefit. One of them is expanding the market business of various PPI and WIS products and developing food waste processing through cooperation with various parties.

In response to the various challenges faced, PPI demonstrates a firm commitment to continuous improvement in various aspects of its operations. Through a comprehensive approach that includes strategic initiatives and organizational improvements, PPI strives to enhance resilience and sustain long-term growth. One of them is prioritizing the strengthening and expansion of the sales network to penetrate new markets, deepen relationships with existing customers, and drive revenue growth. This involves implementing targeted marketing strategies, incentivizing sales teams, and investing in customer relationship management systems to enhance sales effectiveness and market reach.

Target and Achievement in 2023

The sales achievement in 2023 amounted to IDR2,285.65 billion, which is 79% of the sales target set in the RKAP 2023, amounting to IDR2,881.84 billion. This revenue achievement represents 97% compared to the actual revenue in 2022 for the same period.

These sales consist of staple goods trading (food products & basic necessities and consumer products), non-staple goods trading (subsidized fertilizers, non-subsidized fertilizers, Dharmabrand, pharmaceuticals & medical devices, and other non-food products), and strategic products (chemicals, imported products).

Additionally, revenue was obtained from business transitions from PMO Property, PMO Wis, and logistic infrastructure support.

Business Outlook for 2024

PPI is highly optimistic about achieving a surplus in 2024, based on a comprehensive understanding of the macroeconomic landscape and specific industry dynamics. Through careful analysis of macroeconomic conditions, including factors such as GDP growth, inflation rates, and employment trends, PPI endeavors to adjust its strategies to navigate potential hurdles and capitalize on emerging opportunities.

Selain itu, PPI juga akan terus memonitor kinerja industri perdagangan dengan cermat, menilai tren permintaan, ketahanan rantai pasokan, dan dinamika persaingan untuk menyempurnakan posisi pasar dan alokasi sumber dayanya.

Kinerja keuangan PPI juga menjadi dasar pertimbangan yang memandu proses pengambilan keputusan strategis di tahun-tahun mendatang. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metrik keuangan utama seperti pertumbuhan pendapatan, margin profitabilitas, dan rasio likuiditas, PPI berupaya mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan PPI untuk membuat keputusan investasi yang tepat, memprioritaskan inisiatif dengan potensi penciptaan nilai tertinggi, dan memitigasi risiko keuangan secara efektif.

Terlepas dari ketidakpastian dan tantangan yang melekat pada lingkungan bisnis, PPI tetap teguh dalam komitmennya terhadap manajemen risiko yang proaktif dan kelincahan strategis. Dengan melakukan penilaian risiko yang komprehensif, latihan perencanaan skenario, dan metodologi *stress testing*, PPI berupaya untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai *surplus* pada tahun 2024. Melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan wawasan ekonomi makro, analisis industri, ketajaman keuangan, dan keahlian manajemen risiko, PPI memiliki posisi yang tepat untuk menavigasi kompleksitas lanskap bisnis dan memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan di tahun mendatang.

Penerapan GCG di Perseroan pada tahun 2023

Komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG telah tertanam kuat di dalam Perseroan, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi hingga ke setiap anggota karyawan. Komitmen ini menggarisbawahi dedikasi bersama untuk menegakkan standar tata kelola. Dengan menyelaraskan tindakan dan keputusan dengan prinsip-prinsip dasar ini, Perseroan berupaya untuk menumbuhkan budaya transparansi, integritas, dan akuntabilitas di semua tingkat operasi.

Untuk skor tahun 2023 hingga saat ini masih belum dilakukan assessment, sehubungan dengan berlakunya Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 Perihal Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: Sk-16/S.MBU/2012 Tentang

Additionally, PPI will diligently monitor the performance of the trading industry, assessing demand trends, supply chain resilience, and competitive dynamics to fine-tune its market positioning and resource allocation.

The financial performance of PPI also serves as a foundational consideration guiding strategic decision-making processes in the coming years. By conducting thorough evaluations of key financial metrics such as revenue growth, profitability margins, and liquidity ratios, PPI seeks to identify areas for improvement, optimize resource utilization, and enhance operational efficiency. This data-driven approach enables PPI to make informed investment decisions, prioritize initiatives with the highest potential for value creation, and effectively mitigate financial risks.

Despite the inherent uncertainty and challenges in the business environment, PPI remains steadfast in its commitment to proactive risk management and strategic agility. By conducting comprehensive risk assessments, scenario planning exercises, and stress testing methodologies, PPI endeavors to identify and mitigate potential risks that may impact its ability to achieve surplus in 2024. Through a holistic approach that integrates macroeconomic insights, industry analysis, financial acumen, and risk management expertise, PPI is well-positioned to navigate the complexity of the business landscape and deliver value to stakeholders in the coming year.

Implementation of GCG in the Company in 2023

The commitment to implementing principles of Good Corporate Governance (GCG) has been deeply embedded within the Company, from the Board of Commissioners and Directors to every member of the workforce. This commitment underscores a collective dedication to upholding governance standards. By aligning actions and decisions with these fundamental principles, the Company strives to foster a culture of transparency, integrity, and accountability at all levels of operation.

As for the assessment score for the year 2023, it has not been conducted yet, due to the issuance of the Ministry of State-Owned Enterprises Secretary's Decree Number SK-12/S.MBU/08/2023 Regarding the Revocation of the Ministry of State-Owned Enterprises Secretary's Decree Number: SK-16/S.MBU/2012 Regarding the Indicators/

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Saat ini, dalam pelaksanaan prinsip GCG di Perseroan, Direksi dibantu oleh Komite Disiplin. Komite Disiplin bertujuan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan internal perusahaan maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Direksi menilai bahwa Komite Disiplin telah berjalan cukup optimal.

Kebijakan Perseroan dalam Pengembangan SDM dan IT di Tahun 2023

Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) semakin terasa, didorong oleh dinamika industri yang terus berkembang dan kemajuan teknologi. Integrasi pengembangan SDM dan TI sangat penting untuk mendorong inovasi dan ketahanan organisasi dalam menghadapi kondisi pasar yang terus berubah dan tren yang cenderung disruptif.

Pada tahun 2023, PPI membuat langkah signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan operasional dan meningkatkan efisiensi. Di bidang pengembangan SDM, PPI menerapkan program komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui serangkaian lokakarya, seminar, dan sesi pelatihan khusus. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan para profesional SDM di berbagai bidang, termasuk akuisisi talenta, manajemen kinerja, dan hubungan karyawan, membekali mereka dengan pengetahuan dan perangkat yang dibutuhkan untuk mendorong keunggulan organisasi.

Selain itu, PPI juga melakukan inisiatif untuk meningkatkan dukungan SDM di Kantor Cabang, dengan menyadari peran penting SDM dalam mendorong efektivitas penjualan dan keterlibatan nasabah. Hal ini mencakup evaluasi struktur dan proses SDM yang ada, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, dan menerapkan reformasi untuk merampingkan operasi SDM dan meningkatkan dukungan bagi tim penjualan. Dengan menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan bisnis dan mengoptimalkan kemampuan SDM di tingkat akar rumput, PPI bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan karyawan dan kesuksesan organisasi.

Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Currently, in the implementation of GCG principles in the Company, the Directors are assisted by the Discipline Committee. The Discipline Committee aims to provide guidance and enforce discipline against employees who violate internal company regulations or violate applicable laws and regulations, so that the company's vision and mission can be achieved. The Directors assess that the Discipline Committee has been functioning optimally.

Policies of the Company in Human Resources Development and IT in 2023

In recent years, the importance of Human Resources (HR) and Information Technology (IT) development has become increasingly apparent, driven by the evolving dynamics of industries and technological advancements. The integration of HR and IT development is crucial to foster innovation and organizational resilience in the face of constantly changing market conditions and disruptive trends.

In 2023, PPI took significant steps in the development of human resources (HR) and technological advancements to strengthen operational capabilities and improve efficiency. In the field of HR development, PPI implemented a comprehensive program aimed at enhancing HR competency through a series of workshops, seminars, and specialized training sessions. These initiatives were designed to enhance the skills of HR professionals in various areas, including talent acquisition, performance management, and employee relations, equipping them with the knowledge and tools needed to drive organizational excellence.

Additionally, PPI also undertook initiatives to enhance HR support at Branch Offices, recognizing the critical role of HR in driving sales effectiveness and customer engagement. This included evaluating existing HR structures and processes, identifying areas for improvement, and implementing reforms to streamline HR operations and enhance support for sales teams. By aligning HR strategies with business objectives and optimizing HR capabilities at the grassroots level, PPI aimed to foster a conducive work environment for employee growth and organizational success.

Secara bersamaan, PPI melakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan teknologi untuk memmodernisasi infrastruktur operasional dan memanfaatkan inovasi digital untuk keunggulan kompetitif. Inisiatif utama termasuk optimalisasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk meningkatkan manajemen keuangan, memungkinkan integrasi proses yang lancar dan wawasan real-time ke dalam kinerja keuangan.

Selain itu, PPI berfokus pada pengembangan aplikasi untuk mendukung proses bisnis inti, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Selain itu, PPI memanfaatkan teknologi administrasi pembayaran untuk merampingkan proses transaksional, meningkatkan manajemen arus kas, dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh organisasi. Melalui upaya bersama dalam pengembangan SDM dan teknologi ini, PPI bertujuan untuk menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi, memposisikan diri untuk pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan dalam lanskap bisnis yang dinamis.

Dengan menyelaraskan praktik SDM dengan inisiatif TI, perusahaan minyak dapat menumbuhkan budaya pembelajaran, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi yang berkelanjutan, memberdayakan karyawan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif guna mendorong kinerja dan inovasi bisnis.

Komitmen Perseroan terkait Penerapan Prinsip Berkelanjutan

Implementasi Perusahaan atas penerapan prinsip berkelanjutan dilaksanakan melalui Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). Tujuan program ini adalah sebagai percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara mendorong pelaku ekonomi tingkat menengah dan kecil agar tidak terjadi kesenjangan, sehingga diharapkan akan dapat tercipta kemitraan yang sehat untuk kemakmuran masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Program ini dilakukan dengan berlandaskan atas pilar sosial, lingkungan, ekonomi serta hukum dan tata Kelola yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun di PPI dijalankan melalui turunan program yang berkorelasi pada TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Bermutu), TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan).

Simultaneously, PPI made significant investments in technology development to modernize operational infrastructure and leverage digital innovation for competitive advantage. Key initiatives included the optimization of Enterprise Resource Planning (ERP) systems to enhance financial management, enabling seamless process integration and real-time insights into financial performance.

Furthermore, PPI focused on developing applications to support core business processes, facilitating collaboration and communication with stakeholders, both internal and external. Additionally, PPI utilized payment administration technology to streamline transactional processes, improve cash flow management, and enhance operational efficiency across the organization. Through joint efforts in HR and technology development, PPI aimed to cultivate a culture of continuous improvement, innovation, and adaptability, positioning itself for sustainable growth and success in a dynamic business landscape.

By aligning HR practices with IT initiatives, oil companies can cultivate a culture of continuous learning, collaboration, and sustainable adaptability, empowering employees to effectively leverage technology to drive business performance and innovation.

Komitmen Perseroan terkait Penerapan Prinsip Berkelanjutan

The Company's implementation of sustainable principles is carried out through the Social & Environmental Responsibility Program (TJSL). The aim of this program is to accelerate national economic growth by encouraging medium and small-scale economic actors to prevent disparities, thus creating healthy partnerships for the sustainable prosperity of society.

This program is based on pillars of social, environmental, economic, legal, and governance principles that align with the Sustainable Development Goals (SDGs). At PPI, it is executed through derivative programs correlated with SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education), SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 13 (Climate Action), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).

Penutup

Sebagai penutup, atas nama Direksi dan seluruh staf, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, dan mitra kami atas dukungan dan kepercayaan yang terus menerus diberikan kepada kami untuk terus melangkah maju membentuk masa depan perusahaan. Komitmen Anda yang tak tergoyahkan telah berperan penting dalam mendorong kami mencapai tujuan dan pencapaian kami. Bersama-sama, kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan kami dan meraih kesuksesan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang.

Direksi juga sangat menghargai semangat kerja sama dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dedikasi Dewan Komisaris dalam menjaga kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan telah berperan penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat luas terhadap perusahaan kita.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap karyawan yang telah berdedikasi dan berkomitmen kuat untuk berkerja keras yang sepanjang tahun ini. Berkat dedikasi dan ketangguhan seluruh karyawan, Perseroan mampu mengatasi berbagai tantangan dan mencatat berbagai pencapaian penting.

Saat Direksi melihat kembali pencapaian di masa lalu, kami dipenuhi dengan optimisme dan kegembiraan akan masa depan yang menjanjikan yang ada di depan. Bersama-sama, marilah kita terus menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita anut, meraih peluang-peluang baru, dan berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar.

Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Closing

To end this message, on behalf of the Board of Directors and entire staff, would like to express profound gratitude to our shareholders, and partners for their steadfast support and trust as we forge ahead in shaping the future of our company. Your unwavering commitment has been instrumental in propelling us toward our goals and milestones. Together, we look forward to further strengthening our partnerships and achieving greater success in the chapters yet to be written.

The Board of Directors also deeply appreciate the collaborative spirit and professionalism demonstrated by the Board of Commissioners. Your dedication to safeguarding the interests of shareholders and stakeholders alike has been instrumental in maintaining the trust and confidence of the wider community in our company.

We would also like to extend our heartfelt gratitude to each and every member of our dedicated team for the unwavering commitment and hard work throughout this year. Your dedication and resilience have been instrumental in overcoming challenges and achieving significant milestones.

As we reflect on the achievements of the past, we are filled with optimism and excitement for the promising future that lies ahead. Together, let us continue to uphold our shared values, embrace new opportunities, and strive for excellence as we embark on this journey towards greater success.

Thank you for your continued confidence in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Jakarta, 28 Mei 2024 | May 28, 2024

Hormat kami,
Warm regards,



Soegeng Hernowo
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2023

Statement Letter of Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2023

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2023 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in 2023 has been contained in full, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Jakarta, 28 Mei 2024 | May 28, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Hamli
Komisaris Utama
President Commissioner



Setiawan Wangsaatmaja
Komisaris
Commissioner

Direksi Board of Directors



Soegeng Hernowo
Direktur Utama
President Director



Wien Irwanto
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum
Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs



Edhy Rizwan
Direktur Komersial & Pengembangan
Director of Commercial & Development



Noverita Anggraeny
Direktur Operasi
Director of Operations



Bab 03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

PPI diharapkan dapat terus bertransformasi untuk tumbuh menjadi perusahaan yang melakukan perdagangan umum dan khusus secara komersial dan terukur, sehingga mampu menggerakkan roda perdagangan nasional dan memperkuat ekonomi Indonesia.




PPI is expected to continue to transform to grow into a company that conducts general and special trading in a commercial and measurable manner, so as to drive the wheels of national trade and strengthen the Indonesian economy.





Identitas Perusahaan

Corporate Identity

	Nama Perusahaan / Name of the Company	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
	Nama Singkat / Nickname	PPI
	Domisili Usaha / Business Domicile	Jakarta, Indonesia
	Bidang Usaha / Line of Business	Perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional Domestic and international trade
	Ruang Lingkup Usaha / Scope of Business	Kegiatan ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, retail, dan pengadaan barang-barang. Export, import, inter-island activities, local trade, distribution, representation and agency, retail, and procurement of goods.
	Tanggal Pendirian / Date of Establishment	19 Juni 2003 June 19, 2003
	Dasar Hukum Pendirian / Legal Basis of Establishment	<ul style="list-style-type: none"> Akta Pendirian 04 tanggal 9 Juni 2003 Deed of Establishment 04 dated June 9, 2003 Akta Anggaran Dasar Nomor 33 tanggal 29 Agustus 2008 Deed of Association Number 33 dated August 29, 2008 Akta Penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) Nomor 5 tanggal 2 Desember 2021 Deed of Merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) Number 5 dated December 2, 2021 Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 07 Januari 2022 Amendment to Articles of Association Number 2 dated January 07, 2022
	Modal Dasar / Authorized Capital	Rp1.175.877.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) IDR1,175,877,000,000 (one trillion one hundred and seventy-five billion eight hundred and seventy-seven million rupiah)
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid Capital	Rp942.745.000.000 (sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah). IDR942.745.000.000 (nine hundred forty-two billion seven hundred forty-five million rupiah)
	Kepemilikan Saham / Share Ownership	Kepemilikan saham Perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. The Company's share ownership is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs.
	Jumlah Karyawan / Number of Employee	1.298
	Alamat Kantor Pusat / Head Office Address	Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160
	Jaringan Kantor / Office Network	32 Kantor Cabang 32 Branch Offices Trading House di Kantor Pusat Trading House at the Head Office
	Telepon / Phone Number	(021) 3862141
	Faksimili / Fax Number	021) 3862143
	E-mail	ppi.info@ptppi.co.id
	Website	www.ptppi.co.id

Riwayat Singkat Perusahaan

Corporate Brief History



Pada masa kolonial, Pemerintah Belanda telah mendirikan berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, berupa kantor cabang suatu perusahaan asing, perusahaan lokal yang mewakili perusahaan luar negeri, agen tunggal, perusahaan yang sudah berdiri dari perusahaan induknya di luar negeri, dan perusahaan berbadan hukum dengan anak perusahaan yang berdomisili di Hindia-Belanda.

Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, yang terbesar adalah *The Big Five*, dengan keunggulan manajemen dan jaringan pemasaran ke seluruh pelosok dengan tujuan untuk mengeksport rempah-rempah ke Eropa.

Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia menasionalisasi semua perusahaan perdagangan tersebut menjadi perusahaan milik negara. *The Big Five* menjadi cikal bakal perusahaan dagang dan disebut Niaga pada tahun 1950-an.

Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi bertanggung jawab untuk perdagangan dan pendistribusian komoditi dasar seperti makanan pokok (beras, tepung, jagung, dan lain-lain) di samping rempah-rempah tradisional. Mereka juga bertanggung jawab untuk perdagangan dan distribusi komoditas produk-produk pertanian (pupuk dan pestisida, bahan kimia dan lain-lain) dan produk konsumen (tekstil, otomotif, dan lain-lain). Untuk itu, pemerintah memberikan hak khusus untuk beroperasi dalam jangka peraturan, modal, dan aset.

During the colonial period, the Dutch government established various types of trading companies, including branch offices of foreign companies, local companies representing foreign companies, sole agents, companies that were established from their parent companies abroad, and legally constituted companies with subsidiaries domiciled in the Dutch East Indies.

Among these companies, the largest were The Big Five, known for their management excellence and marketing networks extending throughout the region with the aim of exporting spices to Europe.

Subsequently, following Indonesia's independence, the Indonesian Government nationalized all trading companies, transforming The Big Five into the forerunner of trading companies known as Niaga in the 1950s.

The nationalized companies were responsible for trading and distributing basic commodities such as staple foods (rice, flour, corn, etc.) alongside traditional spices. They were also responsible for trading and distributing agricultural commodity products (fertilizers, pesticides, chemicals, etc.) and consumer products (textiles, automotive, etc.). For this purpose, the government granted special rights to operate within regulatory frameworks, capital, and assets.

Pada bulan Juni 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan tiga perusahaan niaga yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero), menjadi satu perusahaan niaga yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2003 yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi manajemen, memaksimalkan keuntungan, integrasi bisnis dan meningkatkan kepemilikan aset.

Pada 2 Desember 2021 PPI dan PT BGR Logistik Indonesia resmi bergabung berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., Nomor 3 yang disahkan oleh Kemenkumham Nomor AHUAH.01.10-0014967 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Saat ini, PPI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis perdagangan domestik, internasional, pergudangan dan logistik yang terdigitalisasi, melalui tahapan inisiatif strategis dengan memperbaiki *fundamental* (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024) dan seterusnya.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Hingga akhir 2023, PPI tidak pernah melakukan perubahan nama.

In June 2003, the Indonesian Government decided to merge three trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), and PT Pantja Niaga (Persero), into one trading company, namely PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), effective from March 31, 2003, based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2003 aimed at enhancing management efficiency, maximizing profits, business integration, and asset ownership.

On December 2, 2021, PPI and PT BGR Logistik Indonesia officially merged based on Notarial Deed Aulia Taufani, S.H., Number 3 ratified by the Ministry of Law and Human Rights Number AHUAH.01.10-0014967 concerning the Acceptance of Notification of the Merger of the Company Limited (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Currently, PPI is a company engaged in domestic and international trade, warehousing, and digitized logistics business through strategic initiative stages by improving fundamentals (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024), and beyond.

INFORMATION ON CHANGE OF NAME

Until the end of 2023, PPI never changed its name.



Jejak Langkah Milestones



1965

Pemerintah Indonesia menasionalisasi seluruh perusahaan perdagangan menjadi perusahaan milik negara dan disebut sebagai Niaga.

The Indonesian government nationalized all trading companies into state-owned companies and called them Niaga.



1961

- Perubahan nama PN Bhakti, PN Sedjati, dan PN Sinar Bhakti menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 75/1961, PP No. 90/1961, PP No.71/1967, PP No.74/1961;
Changes in the names of Bhakti, PN Sedjati, and PN Sinar Bhakti to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 75/1961, 90/1961. PP No.71/1967, PP No.74/1961;
- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Cipta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; dan
Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Cipta Niaga as stated in PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; and
- Perubahan nama PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, dan PN Tulus menjadi PT Aneka Bhakti dan PT Pantjta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961.
Changes in the names of PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, and PN Tulus to PT Aneka Bhakti and PT Pantjta Niaga as stated in PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961.



1964

- Perubahan nama PN Budi Bhakti menjadi PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti menjadi PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti menjadi PN Dharma, dan PN Fadjar Bhakti menjadi PN Satya Niaga telah dituangkan di dalam PP 31/1964 dan PP 30/1964;
Changes in the name of PN Budi Bhakti to PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti to PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti to PN Dharma, and PN Fadjar Bhakti to PN Satya Niaga as stated in PP 31/1964 and PP 30/1964;
- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Pembangunan Aneka Niaga II telah dituangkan di dalam PP No. 30/1964.
Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Pembangunan Aneka Niaga II as stated in PP No. 30/1964.



1970

- Perubahan nama PN Kerta Niaga menjadi PT Kerta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 32/1970;
Change in the name of PN Kerta Niaga to PT Kerta Niaga as stated in PP No. 32/1970;
- Perubahan nama PN Dharma menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 22/1970;
Change in the name of PN Dharma to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 22/1970;
- Perubahan nama PT Satya Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam RUPSLB PT Dharma Niaga Tanggal 6 April 1970.
Change in the name of PT Satya Niaga to PT Dharma Niaga as stated in the EGMS of PT Dharma Niaga on April 6, 1970.



1966

Perubahan nama PT Aneka Niaga II menjadi PN Kerta Niaga, PT Pembangunan menjadi PT Cipta Niaga, dan PT Aduma Niaga III berubah menjadi PT Dirga Niaga. Seluruh perubahan tercantum di dalam PP No. 7/1966.

Change in the name of PT Aneka Niaga II to PN Kerta Niaga, PT Pembangunan to PT Cipta Niaga, and PT Aduma Niaga III to PT Dirga Niaga. All changes are stated in PP No. 7/1966.



1965

Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Pembangunan Niaga III tercantum di dalam Keputusan Menteri. PDN No. 002/1965 dan Keputusan Menteri. PDN No. 010/1965.

Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Pembangunan Niaga III as stated in the Ministerial Decree. PDN No. 002/1965 and Ministerial Decree. PDN No. 010/1965.

1971

- Perubahan nama PT Aduma Niaga I menjadi PT Aduma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 52/1971;
Change in the name of PT Aduma Niaga I to PT Aduma Niaga as stated in PP No. 52/1971;
- Perubahan nama PN Satya Niaga menjadi PT Satya Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 10/1971;
Change in the name of PN Satya Niaga to PT Satya Niaga as stated in PP No. 10/1971;
- Perubahan nama PT Aneka Niaga I menjadi PT Aneka Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.73/1971;
Change in the name of PT Aneka Niaga I to PT Aneka Niaga as stated in PP No.73/1971;
- Perubahan nama PN Dirga Niaga menjadi PT Dirga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 36/1971;
Change in the name of PN Dirga Niaga to PT Dirga as stated in PP No. 36/1971;
- Perubahan nama PT Pantja berubah menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.37/1971; dan
Change in the name of PT Pantja to PT Pantja Niaga as stated in PP No.37/1971; and
- Perubahan nama PN Pembangunan Niaga I menjadi PT Pembangunan Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.47/1971.
Change in the name of PN Pembangunan Niaga I to PT Pembangunan Niaga as stated in PP No.47/1971.

1992

Penggabungan PT Dirga Niaga dan PT Pembangunan Niaga menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam Keputusan RUPSLB No. 17/1982.

Merger of PT Dirga Niaga and PT Pembangunan Niaga into PT Pantja Niaga as stated in the EGMS Resolution No. 17/1982.

1998

Perubahan nama PT Kerta Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 28/1998.

Change in the name of PT Kerta Niaga to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 28/1998.

2017

Bekerjasama dengan partner Zhong Ni, PPI meresmikan Representative Office di China.

In collaboration with partner Zhong Ni, the PPI inaugurated a Representative Office in China.

2015

Melakukan perubahan logo perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan ITC (*Indonesia Trading Company*) menjadi Perusahaan Perdagangan Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan dari Kementerian BUMN Nomor S-28/MBU/01/2015 pada tanggal 14 Januari 2015.

Change in the Company logo, previously known as ITC (Indonesia Trading Company) to become Perusahaan Perdagangan Indonesia in accordance with the Approval Letter from the Ministry of SOE Number S-28/MBU/01/2015 on January 14, 2015.

2003

Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Niaga atau perusahaan perdagangan, yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), dan PT Pantja Niaga (Persero) menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PPI") atau Indonesia Trading Company (ITC). Hal ini tercantum di dalam PP No. 22/2003.

Merger of 3 (three) Commerce Companies or trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), and PT Pantja Niaga (Persero) to become PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PPI") or Indonesia Trading Company (ITC). This is stated in PP No. 22/2003.



2018

- Pertamkali menerapkan *Sistem Information and Communication Technology (ICT)* yang dimulai dengan pemberlakuan sistem ERP di tahun 2017.

Implemented the Information and Communication Technology (ICT) System for the first time starting with the implementation of the ERP system in 2017.

- PPI mengeskpor komoditi Arang Batok Kelapa ke Sri Lanka dengan sumber pasokan komoditi berasal dari area Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatra Selatan.

PPI exported Coconut Shell Charcoal commodity to Sri Lanka with commodity supply sources coming from West Java, East Java, Sulawesi and South Sumatra.

- PPI memproduksi Dharmafur kemasan 1 kg untuk segmen petani/rumah tangga dengan luasan lahan kecil.

PPI produces Dharmafur packaging in 1 kg size for the small-scale farmer/household segment

- PPI mengeluarkan produk baru dengan *brand* sendiri, yaitu Panganesia. Berkolaborasi dengan produsen minyak goreng di sejumlah wilayah, terutama di Sumatra Utara, dan mulai memasarkan produk minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter dengan *brand* Minyak Goreng Panganesia.

PPI issued a new product with its own brand, namely Panganesia. Collaborated with cooking oil producers in a number of areas, especially in North Sumatra, and began marketing 1 liter and 2 liter packaged cooking oil products under the Panganesia Cooking Oil brand.

- PPI bekerjasama dengan produsen beras di sejumlah sentra produksi beras dan memasarkan produk beras premium kemasan 5 kg dengan *brand* Beras Panganesia.

PPI collaborated with rice producers in a number of rice production centers and marketed premium 5 kg packaged rice products under the Panganesian Rice brand.

- PPI merintis peluang bisnis baru berupa pengembangan usaha kopi beserta produk turunannya dan meluncurkan produk KOPI COVARE.

PPI pioneered new business opportunities by developing the coffee business and its derivative products and launching the KOPI COVARE product.

- PPI meresmikan 15 BUMN *Shop* yang beroperasi di sejumlah wilayah di Indonesia. PPI inaugurated 15 SOE Shops operating in a number of regions in Indonesia.



2021

Penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhandha Ghara Reksa ke dalam PT Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2021 dan PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT BGR Logistik Indonesia ke dalam PPI pada 15 September 2021.

Signing of the Deed of Merger of PT Bhandha Ghara Reksa into PPI on December 2, 2021 and PP Number 97 of 2021 concerning the Merger of PT BGR Logistik Indonesia into the PPI on September 15, 2021



2020

- Bekerja-sama dengan *partner* Al Buraq Investment; Hongkong Star Food, PPI meresmikan *Representative Office* di Dubai. In collaboration with partner Al Buraq Investment & Hongkong Star Food, PPI inaugurated the Representative Office in Dubai.
- Bekerjasama dengan *partner* Legacy Singapura Holding Pte Ltd, PPI meresmikan *Representative Office* di Singapura. In collaboration with partner Legacy Singapore Holding Pte Ltd, PPI inaugurated the Representative Office in Singapore.



2019

- Bekerjasama dengan *partner* Elhamd Trading Company, PPI meresmikan *Representative Office* di Mesir. In collaboration with partner Elhamd Trading Company, PPI inaugurated the Representative Office in Egypt.
- Bekerjasama dengan *partner* Ascent Hi-Tech Corp, PPI meresmikan *Representative Office* di Taiwan. In collaboration with partner Ascent Hi-Tech Corp, PPI inaugurated the Representative Office in Taiwan.



2022

Pada tanggal 7 Januari 2022 secara resmi terbentuk *Holding* BUMN Pangan, dengan PT RNI (Persero) sebagai induk *holding* . Hal ini ditandai dengan telah dilakukan penandatanganan Akta Inbrenng saham Pemerintah antara PT RNI (Persero) dan kelima BUMN Pangan, di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam.

On January 7, 2022, the Food SOE Holding was officially formed, with PT RNI (Persero) as the holding parent. This was marked by the signing of the Deed of Inbrenng of Government shares between PT RNI (Persero) and the five Food SOEs, including PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari and PT Garam.



2023

Merealisasikan ekspor perdana dalam skema Imbal Dagang Indonesia - Mesir
 Realizing the first export in the Indonesia - Egypt under Trade Returns scheme

Bidang Usaha, Produk, dan Layanan

Line of Business, Products, and Services

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI, maka dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPI menjalankan kegiatan usaha utama dan pendukung sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Internasional & Perdagangan Dalam Negeri

- Hasil pertanian serta produk turunannya berikut alat-alat pertanian;
- Hasil kehutanan serta produk turunannya berikut alat-alat eksploitasi hutan;
- Hasil perkebunan serta produk turunannya berikut alat-alat perkebunan;
- Bahan-bahan untuk konstruksi;
- Alat-alat untuk konstruksi;
- Alat-alat kesehatan dan laboratorium.

Kegiatan Usaha Pendukung:

Selain menjalankan kegiatan usaha utama, perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang meliputi pergudangan, perkantoran, pertokoan, pemanfaatan lahan, transportasi, properti, dan pariwisata, serta melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

KEGIATAN USAHA DIJALANKAN DI TAHUN 2023

Dengan memajukan paradigma Perseroan di era modern perdagangan global, PPI secara berkelanjutan menciptakan ekosistem bisnis secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan bersama mulai dari sumber pasokan (hulu), proses nilai tambah (produksi dan pengolahan), dan secara agresif membuka jaringan distribusi (hilir) baik pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan *market share*.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PPI Nomor 3 Tahun 2021, perseroan menjalankan usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar. Untuk mencapai hal tersebut, PPI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI
- Perikanan

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

As stated in the Articles of Association of PPI, in order to achieve the aforementioned purposes and objectives, PPI carries out the following main and supporting business activities:

Main Business Activities:

International Trade & Domestic Trade

- Agricultural products and their derivatives including agricultural tools;
- Forestry products and their derivatives including forest exploitation tools;
- Plantation products and their derivatives including plantation tools;
- Construction materials;
- Construction equipment;
- Health and laboratory equipment.

Supporting Business Activities:

In addition to conducting main business activities, the company may also engage in activities aimed at optimizing resource utilization including warehousing, office space, retail space, land utilization, transportation, real estate, tourism, and carrying out government assignments in accordance with the principles of company management and regulations.

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT IN 2023

By advancing the Company's paradigm in the contemporary era of global trade, PPI continuously creates a comprehensive business ecosystem while considering mutual interests starting from the supply source (upstream), value-added processes (production and processing), and aggressively opening distribution networks (downstream) both in domestic and international markets to increase market share.

Based on Amendment Deed of the Articles of Association of PPI Number 3 of 2021, the company engages in the fields of Agriculture, Fisheries, Manufacturing Industry, and Wholesale Trade. To achieve this, PPI carries out the following business activities:

- Crop Farming, Animal Husbandry, Hunting, and YBDI Activities
- Fisheries

- Pertambangan Batu Bara dan Lignit
 - Industri Makanan
 - Industri Minuman
 - Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
 - *Treatment* Air Limbah
 - Pengumpulan, *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
 - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya
 - Konstruksi Bangunan Sipil
 - Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
 - Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
 - Penyediaan Akomodasi
 - Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
 - Aktivitas Jasa Informasi
 - *Real Estate*
 - Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
 - Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya.
- Coal and Lignite Mining
 - Food Industry
 - Beverage Industry
 - Chemical Industry and Goods from Chemicals
 - Wastewater Treatment
 - Collection, Treatment, and Disposal of Waste and Garbage as well as Material Recovery Activities
 - Remediation and Management of Other Waste and Garbage
 - Civil Construction
 - Trade, Repair, and Maintenance of Cars and Motorcycles
 - Wholesale Trade, Except for Cars and Motorcycles
 - Warehousing and Transport Support Activities
 - Accommodation Provision
 - Programming Activities, Computer Consulting, and YBDI Activities
 - Information Services Activities
 - Real Estate
 - Head Office Activities and Management Consulting
 - Leasing and Operating Leases without Option Rights
 - Office Administration Activities, Office Support Activities, and Other Business Support Activities.

PENGUNGKAPAN INFORMASI BIDANG USAHA DALAM LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Informasi tentang kegiatan usaha di atas juga telah tercantum dalam Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

DISCLOSURE OF BUSINESS FIELDS INFORMATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

Information about the above business activities has also been disclosed in the Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the fiscal year ended December 31, 2023.

Produk dan Komoditi

Products and Commodities



Dalam menjalankan usahanya, PPI menerapkan prinsip integrasi vertikal, yang artinya Perseroan memperluas pengendalian atas berbagai tahap proses produksi dan distribusi dalam industri tertentu, baik ke arah hulu maupun ke arah hilir. Dengan mengintegrasikan secara vertikal ke arah hulu, maka Perseroan dapat mengamankan rantai pasokan, menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas, dan mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal. Sementara integrasi ke arah hilir memungkinkan Perseroan untuk mengendalikan saluran distribusi yang lebih besar, menangkap pangsa yang lebih besar dari rantai nilai, dan menjaga profitabilitas.

Ke arah hulu, Perseroan bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM serta produsen-produsen bahan kimia, pestisida dan obat-obatan. Sementara ke arah hilir, Perseroan memberi nilai tambah agar produk akhir memiliki kualitas yang memuaskan sesuai ekspektasi pelanggan sebelum dipasarkan melalui saluran distribusi di dalam dan luar negeri.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan aktivitas logistik dan pergudangan sebagai portofolio anak perusahaan. Kegiatan logistik dan pergudangan ini akan mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan sumber daya di seluruh rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, dan pada akhirnya mendorong keunggulan kompetitif di pasar.

Berikut ini adalah portofolio produk dan komoditi yang diperdagangkan oleh Perseroan:

In conducting its business operations, PPI adheres to the principle of vertical integration, wherein the Company expands its control over various stages of the production and distribution process within specific industries, both upstream and downstream. By vertically integrating upstream, the Company aims to secure the supply chain, maintain price stability, ensure quality, and reduce dependence on external suppliers. Meanwhile, downstream integration enables the Company to control larger distribution channels, capture a greater share of the value chain, and sustain profitability.

Upstream, the Company collaborates with farmers, livestock breeders, fishermen, MSMEs, as well as producers of chemicals, pesticides, and pharmaceuticals. Conversely, downstream efforts focus on adding value to ensure that the final products meet customer expectations before being marketed through distribution channels domestically and internationally.

Furthermore, the Company also conducts logistics and warehousing activities as part of its subsidiary portfolio. These logistics and warehousing activities will optimize the flow of goods, information, and resources throughout the supply chain, enhance operational efficiency, reduce costs, improve customer service, and ultimately drive competitive advantage in the market.

The following is a portfolio of products and commodities traded by the Company:

Pestisida

Sebagai wujud komitmen untuk menjadi sahabat petani Indonesia, Perseroan terus berinovasi untuk mengembangkan solusi yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Perseroan telah memiliki rangkaian produk unggulan pestisida, yang terbagi menjadi insektisida dan herbisida, yaitu Dharmabrand.

Produk-produk pestisida Perseroan terdiri dari Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, dan Dharmafur 3G yang merupakan golongan insektisida, serta Dharmapara 276SL, dan Dharmara 480SL sebagai golongan herbisida.

Pesticides

As a form of commitment to be the best friend of Indonesian farmers, the Company continues to innovate to develop solutions needed by farmers to increase agricultural production. The Company has a series of pesticide products, which are divided into insecticides and herbicides, namely Dharmabrand.

The Company's pesticide products consist of Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, and Dharmafur 3G which are insecticides, and Dharmapara 276SL, and Dharmara 480SL as herbicides.



Jenis Pestisida Types of Pesticides	Keterangan Description
DHARMASIP 50EC	Insektisida piretroid berbahan aktif Sipermetrin 50 g/l yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan berwarna kuning muda pucat yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, tomat, dan kedelai. Pyrethroid insecticide with active ingredient Cypermethrin 50 g/l which functions as a contact and gastric poison, in the form of a pale light-yellow concentrate that can be emulsified to control pests on chili, onion, cabbage, tomato, and soybean plants.
DHARMASAN 600EC	Insektisida organofosfat berbahan aktif fentoat 600 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning pucat yang dapat membentuk emulsi dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai merah, kapas, kedelai, lada, tebu, dan tembakau. Organophosphate insecticide with active ingredient fentoate 600 g/l which functions as a contact poison in the form of a pale yellow concentrate that can form an emulsion in water to control pests on shallots, red chilies, cotton, soybeans, pepper, sugarcane, and tobacco.
DHARMABAS 500EC	Insektisida karbamat berbahan aktif BPMC 500 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, bawang merah, cabai merah, tebu, kakao, dan teh. Carbamate insecticide with active ingredient BPMC 500 g/l which functions as a contact poison in the form of a yellow concentrate that can be emulsified in water to control pests on rice, shallots, red chili, sugarcane, cocoa, and tea plants.
DHARMAFUR 3G	Insektisida karbamat berbahan aktif karbofuran 3% berbentuk granul yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung yang sistemik berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama pada tanaman kedelai, bawang merah, dan cabai. Carbamate insecticide with active ingredients 3% carbofuran in the form of granules that functions as systemic contact and stomach poison in purple granular form to control pests on soybeans, shallots, and chilies.

Jenis Pestisida Types of Pesticides	Keterangan Description
DHARMAPA- RA 276SL	Herbisida terbatas berbahan aktif paraquat diklorida 247 g/l bekerja sebagai racun kontak purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air berwarna biru kehijauan, untuk mengendalikan gulma umum pada pertanaman kelapa sawit (TBM). Limited herbicide with the active ingredient paraquat dichloride 247 g/l which functions as a post-growth contact poison, in the form of a blue-green solution in water, to control common weeds in oil palm plantations (TBM).
DHARMARA 480SL	Herbisida sistemik purna tumbuh berbahan aktif isopropil amina glifosat 480 g/l setara dengan Glifosat 356 g/l, yang berbentuk larutan dalam air berwarna kekuningan dan tidak selektif terhadap tanaman pengganggu tanaman budidaya (gulma) sasaran pada pertanaman kelapa sawit (TBM). Post-emergence systemic herbicide with the active ingredient isopropyl amine glyphosate 480 g/l equivalent to Glyphosate 356 g/l, which is in the form of a yellowish aqueous solution and is not selective against targeted cultivated plants (weeds) in oil palm plantations (TBM).

Pupuk

PPI sebagai distributor pupuk subsidi dan non subsidi bekerja sama dengan pabrikan pupuk BUMN dan swasta di antaranya PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Tetap Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco dan PT Wilmar untuk menyalurkan kebutuhan pupuk bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. PPI menyediakan kebutuhan pupuk untuk agen, kios dan *end-user* yang tersebar di setiap kantor cabang seluruh Indonesia.

Fertilizer

PPI as a distributor of subsidized and nonsubsidized fertilizers cooperates with state-owned and private fertilizer manufacturers including PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Fixed Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco and PT Wilmar to distribute fertilizer for agricultural businesses which include Food Crops Farmers, Livestock and People's Plantations. PPI provides fertilizer for agents, kiosks and end-users spread across every branch office throughout Indonesia.

Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Pupuk KCL KCL Fertilizer	Pupuk KCL atau yang sering disebut sebagai MOP (<i>Muriate of Potash</i>) merupakan salah satu jenis pupuk tunggal yang memiliki konsentrasi tinggi, yaitu mengandung 60% K ₂ O sebagai Kalium klorida. Ini merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang sangat cocok digunakan untuk segala jenis tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap klorida atau tanah dengan klorida rendah. Selain itu, Pupuk KCL dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanah. KCL fertilizer or often referred to as MOP (<i>Muriate of Potash</i>) is a single type of fertilizer that has a high concentration containing 60% K ₂ O as Potassium chloride. This is a fertilizer containing potassium which is very suitable for all types of plants that are tolerant to chloride or soils with low chloride. In addition, KCL fertilizer can be applied to all types of soil.
Pupuk NPK NPK Fertilizer	Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan unsur hara Nitrogen (N), Fosfat (P) dan Kalium (K). Pupuk majemuk NPK adalah pupuk yang mengandung setidaknya 5 unsur hara yang terdiri dari 3 unsur hara makro yaitu N, P, dan K serta 2 unsur hara mikro. Setiap jenis pupuk atau merk memiliki presentase atau komposisi kandungan yang berbeda-beda, yang ditandai dengan angka seperti NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 atau NPK 12-12-12. Angka-angka tersebut adalah presentase kandungan unsur hara makro yang ada di dalamnya, sedangkan kandungan unsur hara mikro sangat sedikit sehingga umumnya tidak ditulis pada kemasan. NPK fertilizer is a type of fertilizer which contains nitrogen (N), Phosphate (P) and Potassium (K) nutrients. NPK compound fertilizer is fertilizer that contains at least 5 nutrients consisting of 3 macro nutrients, namely N, P, and K and 2 micro nutrients. Each type of fertilizer or brand has a different percentage or composition of content, which is indicated by numbers such as NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 or NPK 12-12-12. These numbers are the percentage of macro nutrients in it, while the content of micro nutrients is very small so they are generally not written on the packaging.

Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Pupuk Urea Urea	<p>Pupuk Urea merupakan zat yang membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk Urea dibuat secara kimiawi dengan kandungan kadar nitrogen yang cukup tinggi. Pupuk Urea membuat daun tanaman lebih hijau, rimbun, dan segar. Nitrogen juga membantu tanaman sehingga mempunyai banyak zat hijau daun (klorofil). Dengan adanya zat hijau daun yang berlimpah, tanaman akan lebih mudah melakukan fotosintesis. Pupuk Urea juga mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah kandungan protein di dalam tanaman, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman usaha perkebunan, tanaman di sekitar peternakan dan juga tanaman di sekeliling usaha perikanan.</p> <p>Urea fertilizer is a substance that helps plant growth. Urea fertilizer is made chemically with fairly high nitrogen. Urea fertilizer makes plant leaves greener, lusher, and fresher. Nitrogen also helps plants to have a lot of green leaf substance (chlorophyll). In the presence of abundant leaf green matter, plants will carry out photosynthesis more easily. Urea fertilizer also accelerates plant growth, increases protein content in plants, can be used for all types of plants, including for food crops, horticultural crops, plantation crops, plants around livestock and also plants around fishing businesses.</p>
Fertilizer Pupuk ZA ZA Fertilizer	<p>Pupuk ZA adalah pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen bagi tanaman. Pupuk ZA mudah menyerap air karena ion sulfat sangat mudah larut dalam air sedangkan ion amonium lebih lemah, pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah yang terkena aplikasinya. Pupuk ZA memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen dan pakan ternak karena peningkatan kadar protein pati, padi, gula, lemak, vitamin, dan lain-lain; memperbaiki rasa dan warna hasil panen; tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan (hama, penyakit, kekeringan); kandungan nitrogennya hanya separuhnya dari pupuk urea, sehingga biasanya pemberiannya dimaksudkan sebagai sumber pemasok hara belerang pada tanahtanah yang miskin unsur ini, maka Pupuk ZA merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara belerang.</p> <p>ZA fertilizer is an artificial chemical fertilizer designed to provide additional nitrogen nutrients to plants. ZA fertilizer easily absorbs water because the sulfate ion is very easily soluble in water while the ammonium ion is weaker. This fertilizer has the potential to lower the pH of the soil affected by its application. ZA fertilizer improves quality and increases production and nutritional value of crop yields and animal feed due to increased levels of protein, starch, rice, sugar, fat, vitamins, and others; improve the taste and color of crops; plants are healthier and more resistant to environmental disturbances (pests, diseases, drought); Its nitrogen content is only half that of urea fertilizer, so it is usually given as a source of sulfur nutrient supply in soils that are poor in this element, so ZA fertilizer is the best choice to meet the needs of sulfur nutrients.</p>



Bahan Berbahaya

PPI sebagai importir dan distributor bahan kimia berbahaya di Indonesia melalui harmonisasi *supply and demand* yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok bahan kimia berbahaya. PPI memiliki produk prioritas Bahan Kimia Berbahaya, yaitu:

Hazardous Chemicals

As an importer and distributor of hazardous chemicals in Indonesia through harmonization of supply and demand supported by information and communication technology systems for the supply chain of hazardous chemicals, PPI has priority products for Hazardous Chemicals, namely:



Jenis Bahan Berbahaya Types of Hazardous Chemicals	Keterangan Description
Borax Pentahydrate	<p>Borax Pentahydrate adalah padatan yang berbentuk kristal berfungsi sebagai pupuk untuk meningkatkan kualitas buah dan mempercepat pertumbuhan; sebagai <i>fluxing agent</i> untuk efisiensi pada ruang pembakaran pada industri kaca dan keramik; dan sebagai pengawet dalam industri kayu dan pengolahan kertas.</p> <p>Borax Pentahydrate is a crystalline solid that functions as a fertilizer to improve fruit quality and accelerate growth; as a fluxing agent for efficiency in combustion chambers in the glass and ceramics industry; and as a preservative in the wood and paper processing industries.</p>
Sodium Cyanide	<p>Sodium Cyanide adalah senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air, berfungsi sebagai bahan pembantu ekstraksi emas, perak, dan tembaga, serta sebagai bahan pengikat dalam proses pelapisan logam.</p> <p>Sodium Cyanide is a white solid compound that is soluble in water, and serves as an auxiliary material for the extraction of gold, silver, and copper, as well as a binder in metal plating processes.</p>
MDEA	<p>MDEA adalah cairan kuning jernih yang berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk proses pemurnian gas <i>Carbon Dioxide</i> (CO₂) dan <i>Hidrogen Sulfida</i> (H₂S) dalam industri pengolahan gas bumi.</p> <p>MDEA is a clear yellow liquid that functions as an ingredient used for the purification of Carbon Dioxide (CO₂) and Hydrogen Sulfide (H₂S) gases in the natural gas processing industry.</p>
TEA	<p>TEA adalah senyawa kimia organik kental dengan bau amonia yang berfungsi sebagai zat pengemulsi dalam industri <i>consumer goods</i>, pewarna tekstil, dan bahan pelapis anti korosi dan anti karat untuk industri besi dan baja.</p> <p>TEA is an organic chemical compound, thick with ammonia odor, which functions as an emulsifier in the consumer goods industry, textile dyes, and anti-corrosion and anti-rust coating materials for the iron and steel industry.</p>
Potassium Chlorate	<p>Potassium Chlorate adalah senyawa yang mengandung kalium, klorin dan oksigen yang berbentuk kristal putih, berfungsi sebagai bahan oksidator dalam industri kembang api, korek api, peledak dan antiseptik.</p> <p>Potassium Chlorate is a compound containing potassium, chlorine and oxygen in the form of white crystals, which functions as an oxidizing agent in the fireworks, matches, explosives and antiseptic industries.</p>

Bahan Bangunan

Selain bahan-bahan yang disebutkan di atas, PPI juga melakukan perdagangan bahan bangunan, yakni Semen dan Aspal. Keduanya merupakan material penting dalam industri konstruksi dan memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di mana pun.

Building Materials

Apart from the materials mentioned above, PPI also trades in building materials, namely cement and asphalt. Both are important materials in the construction industry and play a vital role in infrastructure development everywhere.

Jenis Bahan Bangunan Types of Construction Materials	Keterangan Description
<p>Semen Cement</p> 	<p>PPI mendistribusikan semen Portland Jenis I, semen jenis ini adalah semen hidrolis yang proses pembuatannya mencampurkan beberapa unsur di antaranya terak, gypsum, dan bahan anorganik yang apabila diberi air akan membentuk pasta semen dan kemudian menjadi kaku dan keras. Jenis semen ini digunakan untuk konstruksi bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Kegunaan semen ini di antaranya untuk konstruksi bangunan rumah pemukiman, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, landasan pacu pesawat terbang, dan lain-lain. Karakteristiknya cocok digunakan di lokasi pembangunan kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat rendah. Semen yang didistribusikan oleh PPI merupakan sinergi dengan hasil produk Semen Indonesia Grup (SIG) untuk wilayah Indonesia. Untuk wilayah Papua PPI menghadirkan semen dengan harga yang lebih terjangkau khususnya daerah Pegunungan Tengah Papua.</p> <p>PPI distributes Portland cement Type I. This type of cement is hydraulic cement with manufacturing process mixing several elements including slag, gypsum, and inorganic materials, which when given water will form a cement paste and then become stiff and hard. This type of cement is used for general building construction which does not require special requirements for heat hydration and initial compressive strength. The uses of this cement include the construction of residential houses, high-rise buildings, roads, bridges, airplane runways, and others. Its characteristics are suitable for use in construction sites that are far from the coast and have low sulfate levels. The cement distributed by PPI is a synergy with the products of the Semen Indonesia Group (SIG) for the Indonesian regions. For the Papua region, PPI provides cement at a more affordable price, especially in the Central Highlands of Papua.</p>
<p>Aspal Asphalt</p> 	<p>Aspal merupakan salah satu bahan bangunan yang acapkali digunakan dalam sebuah proyek konstruksi jalan atau sirkulasi, yang fungsi utamanya sebagai bahan pengikat dan pelapis permukaan tanah yang penggunaannya dicampur dengan senyawa lain seperti bitumen dan mineral. Aspal akan mengikat batuan dan komponen lain agar tidak terlepas dari permukaan jalan. Aspal yang didistribusikan PPI adalah jenis asphalt 60/70 yang difokuskan untuk aplikasi konstruksi jalan. Ada dua jenis aspal yang didistribusikan yaitu aspal Pertamina dan aspal Iran. Aspal Pertamina didistribusikan PPI Cabang Yogya, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram, dan Ambon yang meliputi Timika dan Manokwari. Sedangkan aspal Iran didistribusikan Cabang Palu dan Ambon.</p> <p>Asphalt is one of the building materials that is often used in road construction or circulation projects with the main function as a binder and soil surface coating which is used by mixing it with other compounds such as bitumen and minerals. Asphalt will bind rocks and other components so that they are not separated from the road surface. Asphalt distributed by PPI is asphalt 60/70 which is focused on road construction applications. There are two types of asphalt distributed, namely Pertamina asphalt and Iranian asphalt. Pertamina's asphalt is distributed by the PPI Yogya, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram and Ambon branches which include Timika and Manokwari. Meanwhile, the Iranian asphalt is distributed by the Palu and Ambon branches.</p>

Transamin

Transamin adalah obat anti pendarahan berbahan baku Asam Traneksamat pertama di Indonesia. PPI merupakan pemegang lisensi dari Daiichi-Sankyo untuk mendistribusikan produk Transamin. Transamin merupakan pilihan yang terbukti aman dan efektif menangani pendarahan dengan menghambat aktivitas dari activator plasminogen dan plasmin, mencegah degradasi fibrin, meningkatkan agregasi platelet dan aktivitas faktor koagulasi serta mencegah kerapuhan dinding pembuluh darah. Transamin memiliki 4 jenis yakni Transamin Kapsul 250 mg, Transamin Tablet 500 mg, Transamin Injeksi 250 mg, dan Transamin Injeksi 500 mg.

Farmasi dan Alat Kesehatan

PPI sebagai Pedagang Besar Farmasi dengan izin dan sertifikat distribusi oleh Kementerian Kesehatan yang tersebar di 32 Kantor Cabang bekerja sama dalam mendistribusikan produk farmasi dan alat kesehatan dari PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, dan PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribusi merupakan proses yang penting dalam menjaga efikasi, keamanan, dan kualitas suatu obat setelah proses pembuatannya. Dalam proses pendistribusiannya, PPI menjamin kualitas produk mulai dari pengadaan, penyimpanan, peraturan dan registrasi produk hingga sampai ke tangan konsumen sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) perlu diterapkan pada fasilitas distribusi termasuk apotek agar mutu obat dapat terjaga sampai obat dikonsumsi oleh pasien.

Transamin

Transamin is the first anti-bleeding drug made from Tranexamic Acid in Indonesia. PPI is the licensee of Daiichi-Sankyo to distribute Transamin products. Transamin is a proven safe and effective option to treat bleeding by inhibiting the activity of plasminogen and plasmin activator, preventing fibrin degradation, increasing platelet aggregation and activity of coagulation factors and preventing fragility of blood vessel walls. Transamin has 4 types, namely Transamin Capsules 250 mg, Transamin Tablets 500 mg, Transamin Injection 250 mg, and Transamin Injection 500 mg. Transamin

Pharmaceutical and Medical Devices

PPI as a Pharmaceutical Wholesaler with a license and distribution certificate by the Ministry of Health spread across 32 Branch Offices cooperates in distributing pharmaceutical products and medical devices from PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, and PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribution is an important process in maintaining the efficacy, safety, and quality of a drug after the manufacturing process. In the distribution process, PPI guarantees product quality starting from procurement, storage, regulation and product registration until it reaches consumers in accordance with the Good Drug Distribution Method (CDOB) which needs to be applied to distribution facilities including pharmacies so that drug quality can be maintained until the drug is consumed by the patients.





Covare

PPI secara aktif mengembangkan strategi pengelolaan kopi Arabika yang bersumber dari wilayah Sumatra dan Papua. Pendekatan yang dilakukan oleh PPI adalah dengan membantu proses panen, mengawasi kegiatan pasca panen, pengadaan biji kopi, dan mempromosikan produk premium. Dalam beberapa kesempatan, Kopi PPI dipamerkan di hadapan publik untuk disesap, dan mendapat tanggapan positif.

Jajaran varietas kopi yang sedang dikembangkan saat ini meliputi Kopi Papua Wamena, Sumatra Toba, Sumatra Mandailing, Aceh Gayo, dan Papua Blend. Setiap jenis memiliki profil rasa yang berbeda. Sebagai contoh, Kopi Papua Wamena memancarkan aroma yang mengingatkan pada madu, cokelat, dan karamel. Sebaliknya, Sumatra Toba menampilkan rasa herbal, cokelat, manis, pedas dengan wangi buah, diikuti dengan rasa cokelat hitam.

Dipersembahkan di bawah merek kopi PPI, Covare, inisiatif ini membangun hubungan yang kuat antara secangkir kopi dan petani, menggarisbawahi komitmen untuk menghasilkan kualitas terbaik. Konsistensi alami adalah yang terpenting, yang mempengaruhi hasil dari setiap biji kopi. Dengan mensinergikan hubungan petani dengan alam, Covare menjadi platform untuk memperkenalkan biji kopi yang diproses secara cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan respon ekspresif dari konsumen berdasarkan kualitas biji kopi yang ditawarkan dan mengembalikan nilai yang dihasilkan dari setiap cangkir kepada petani.

Covare

PPI is actively advancing strategies for the management of Arabica coffee sourced from the Sumatra and Papua regions. Our approach involves aiding the harvest process, overseeing post-harvest activities, procuring green beans, and promoting premium products. On several occasions, PPI Coffee has been showcased publicly for tasting, receiving positive feedback.

The current lineup of coffee varieties under development includes Papua Wamena Coffee, Sumatra Toba, Sumatra Mandailing, Aceh Gayo, and Papua Blend. Each type boasts distinct flavor profiles. For instance, Papua Wamena Coffee exudes aromas reminiscent of honey, chocolate, and caramel. In contrast, Sumatra Toba features a herbal, chocolatey, sweet, spicy taste with fruity undertones, followed by a dark chocolate after taste.

Presented under the PPI coffee brand name Covare, this initiative establishes a strong connection between a cup of coffee and the farmers, underscoring a commitment to producing the highest quality. Natural consistency is paramount, influencing the outcome of each coffee bean. By synergizing farmer connections with nature, Covare serves as the platform for introducing meticulously processed coffee beans. The goal is to elicit an expressive response from consumers based on the offered coffee bean quality and reciprocate the value generated by each cup to the farmers.

Covare saat ini tersedia di pasar online besar di Indonesia seperti Lazada, Elevation, Shopee, dan Blanja.com, dengan rencana ekspansi ke platform lainnya. Saluran penjualan offline juga sedang dipersiapkan untuk mendekatkan Covare kepada para konsumennya. Untuk mendukung inisiatif ini, PPI sedang mempersiapkan pendirian pabrik kopi di Lodan, Jakarta Utara.

Aspirasi mendasar PPI adalah untuk mengembangkan inisiatif kopi ini dengan mengangkat para petani, membina kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan, dan tentu saja, memajukan pertumbuhan perusahaan dengan keuntungan yang terukur dan adil.

Kopi

PPI merupakan salah satu eksportir komoditas kopi. Kopi adalah jenis minuman hasil seduhan biji tanaman kopi. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis ini menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Kopi dapat diproses menjadi minuman dan produk-produk dengan segudang manfaat untuk kesehatan, terdapat dua jenis varietas kopi yang populer di Indonesia yaitu kopi arabika dan robusta. Adapun perbedaan antara Kopi Robusta dan Kopi Arabica diklasifikasikan berdasarkan tempat hidup, aroma dan cita rasa, proses menanam, perawatan dan ukuran biji kopi. Kopi Arabika tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 - 2000 meter dari permukaan laut, memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat dengan bentuk biji kopi yang lonjong. Adapun Kopi Robusta tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-900, idealnya 400-800 meter dari permukaan laut. Rasa Kopi Robusta cenderung lebih pahit dan kasar dengan ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan Arabika dengan bentuk bulat. Berikut ini adalah jenis-jenis kopi yang tumbuh di Indonesia:

Covare is currently available on major Indonesian online marketplaces such as Lazada, Elevation, Shopee, and Blanja.com, with plans for expansion to other platforms. Offline sales channels are also in preparation to bring Covare closer to its audience. In support of this initiative, PPI is gearing up for the establishment of a coffee factory in Lodan, North Jakarta.

PPI's fundamental aspiration is to cultivate this coffee initiative by uplifting farmers, fostering collaboration among all stakeholders, and, naturally, advancing the growth of the company with measurable and equitable profits.

Coffee

PPI is one of the exporters of coffee commodities. Coffee is a type of beverage that is brewed from the coffee plant. Indonesia is one of the largest coffee producers in the world. This plant that grows in the tropics is a leading commodity in Indonesia. Coffee can be processed into beverages and products with a myriad of health benefits. There are two types of coffee varieties that are popular in Indonesia, namely Arabica and Robusta coffee. The differences between Robusta Coffee and Arabica Coffee are classified based on where they grow, the aroma and taste, the growing process, the treatment and size of coffee beans. Arabica coffee grows well at an altitude of 1000 - 2000 meters above sea level, has a slightly sour taste and a color that is not too thick with an oval shape of coffee beans. The Robusta coffee grows well at an altitude of 0-900, ideally 400-800 meters above sea level. The taste of Robusta coffee tends to be more bitter and coarse with a smaller bean size than Arabica with a round shape. The following are the types of coffee that grow in Indonesia:

Jenis Kopi Type of Coffee	Keterangan Description
Kopi Aceh	<p>Kopi Aceh tersebar di sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatra merupakan penghasil kopi arabika terbaik di Indonesia, dengan kualitas yang baik dengan cita rasa unik, keunikan kopi ini berasal dari karakteristik aroma dan rasa kopinya yang khas. Perkebunan Kopi Aceh berada pada ketinggian 1000 hingga 1200 mdpl.</p> <p>Aceh coffee, spread along the Barisan mountain range in Sumatra Island, is the producer of the finest Arabica coffee in Indonesia, boasting excellent quality with a unique flavor profile. The uniqueness of this coffee stems from its distinct aroma and flavor characteristics. Aceh coffee plantations are situated at elevations ranging from 1000 to 1200 meters above sea level (masl).</p>

Jenis Kopi Type of Coffee	Keterangan Description
Kopi Sumatra	<p>Kopi Sumatra merupakan salah satu varietas kopi yang memiliki tekstur halus dan cita rasa paling berat dan kompleks di antara beragam kopi lainnya. Ketinggian pertumbuhan Kopi Sumatra berada pada 800 - 1500 mdpl.</p> <p>Sumatra coffee is one of the coffee varieties known for its smooth texture and the heaviest and most complex flavor among various coffee types. The growth elevation of Sumatra coffee ranges from 800 to 1500 masl.</p>
Kopi Sulawesi	<p>Kopi Sulawesi mempunyai karakter rasa unik dengan aroma yang kuat dan rasa yang sedikit gurih, biji buah yang tebal serta keasaman yang rendah. Petumbuhan kopi ini berada di ketinggian 1500 - 1900 mdpl.</p> <p>Sulawesi coffee possesses a unique flavor profile with a strong aroma, slightly savory taste, thick fruit beans, and low acidity. The growth of this coffee occurs at elevations between 1500 to 1900 masl.</p>
Kopi Jawa	<p>Kopi Jawa memiliki ukuran biji yang lebih kecil, dengan kandungan kafein yang rendah, serta rasa dan aroma yang nikmat. Kopi Jawa memiliki karakteristik aroma tipis rempah dengan kekentalan dan keasaman medium dan rasa yang seimbang, dengan ketinggian tanaman 1000 - 1500 mdpl.</p> <p>Javanese coffee features smaller beans, low caffeine content, and delightful taste and aroma. Javanese coffee is characterized by a thin spice aroma with medium thickness and acidity, offering a balanced taste. The plants grow at elevations between 1000 to 1500 masl.</p>
Kopi Papua	<p>Kopi Papua terkenal memiliki rasa yang seimbang dan lembut, dengan rasa asam dan aroma yang khas bernuansa cokelat dan floral yang harum. Kopi ini terletak disepanjang lembah yang mengelilingi Kota Wamena pada ketinggian 1200 - 1600 mdpl yang merupakan tanah vulkanik dengan suhu mencapai 15°C saat malam hari.</p> <p>Papuan coffee is renowned for its balanced and smooth taste, with a unique acidity and aroma reminiscent of chocolate and fragrant floral notes. This coffee is located along the valleys surrounding Wamena City at elevations of 1200 to 1600 masl, on volcanic soil with temperatures dropping to 15°C at night.</p>



Beras

PPI kerap diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk membantu menyerap hasil produksi gabah petani dengan tujuan untuk menstabilkan harga beras petani. PPI juga membranding produk beras yang sebelumnya merupakan komoditi *non-branded*, menjadi produk yang memiliki diferensiasi, eksklusif, dan dengan mengedepankan aspek komersial dan terukur.

Branding memungkinkan produsen beras, melalui PPI, untuk membedakan produk mereka dari para pesaing di pasar. Dengan membangun identitas merek yang unik, produsen dapat menonjolkan aspek kualitas, variasi, asal, atau keberlanjutan dari beras mereka, sehingga menonjol di antara produk sejenis.

Brand beras PPI bernama Panganesia. Beras Panganesia diposisikan sebagai beras premium yang diolah dengan teknologi khusus yang memberikan kualitas terbaik bebas batu, bebas gabah, bebas pewangi, bebas pemutih, dan bebas pengawet dengan hasil jadi yang pulen.

Ke depannya, dengan bersinergi dengan BUMN lainnya, PPI akan membangun Rice Milling Unit (RMU) di beberapa kabupaten-kabupaten di Indonesia. Dengan demikian, peran dan kontribusi Perseroan dalam menjaga ketahanan pangan nasional akan semakin meningkat.

Rice

PPI is often assigned by the Government to help absorb farmers' grain production with the aim of stabilizing farmers' rice prices. PPI also brands rice products that were previously non-branded commodities, into products that are differentiated, exclusive, and by prioritizing commercial and measurable aspects.

Branding allows rice producers, through PPI, to differentiate their products from competitors in the market. By building a unique brand identity, producers can highlight the quality, variety, origin, or sustainability aspects of their rice, thus standing out among similar products.

PPI's rice brand is called Panganesia. Panganesia is positioned as premium rice processed with special technology that provides the best quality stone-free, grain-free, fragrance-free, bleach-free, and preservative-free rice with fluffy finished results.

In the future, by synergizing with other SOEs, PPI will build Rice Milling Units (RMU) in several districts in Indonesia. Thus, the Company's role and contribution in maintaining national food security will increase.



Okemam

Setiap tetes Okemam sabun pencuci piring mengandung ekstrak jeruk nipis yang ampuh untuk membantu menghancurkan kelebihan lemak dan minyak, aroma jeruk nipis yang kuat mampu menghilangkan bau sisa makanan pada peralatan dapur sekalipun wadah plastik.

Okemam mengandung jenis bahan aktif *surfaktan anionic* yang dapat larut dalam air sehingga cepat membersihkan dan menghancurkan lemak. Umumnya surfaktan berfungsi membersihkan karena mempunyai sifat yang dapat melebur dengan zat-zat lainnya sehingga dapat membungkus dan menghilangkan kotoran berminyak.

Jagung

PPI mendorong volume produksi jagung dari petani lokal untuk diolah sebagai pakan ternak yang mampu memberikan peluang besar bagi pertumbuhan komoditas jagung. Jagung dipilih sebagai pakan utama ternak karena kandungan nutrisi yang terdapat didalamnya, 70% karbohidrat, 10% protein dan 5% lemak.

Okemam

Every drop of Okemam dishwashing soap contains powerful lime extract to help destroy excess fat and oil. The strong lime aroma is able to remove the smell of food residue on kitchen utensils, even plastic containers.

Okemam contains anionic surfactant active ingredients that can dissolve in water so that it quickly cleans and destroys fat. Generally, surfactants have a cleaning function because they have the property of being able to mix with other substances so they can wrap and remove oily dirt.

Corn

PPI increases the volume of corn production from local farmers to be processed as animal feed which is able to provide great opportunities for the growth of corn commodities. Corn is chosen as the main feed for livestock because of its nutritional content, 70% carbohydrates, 10% protein and 5% fat.



Rempah-Rempah

PPI memiliki komoditas ekspor andalan: rempah-rempah, bahan botani yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Bahan-bahan serbaguna ini berfungsi sebagai bumbu penting dalam aplikasi kuliner dan menjadi komponen penting dalam pengobatan tradisional, formulasi kecantikan, farmasi, wewangian, produksi sabun, dan berbagai industri lainnya.

Spices

PPI boasts a flagship export commodity: spices, botanical ingredients renowned for their robust aromas and flavors. These versatile ingredients serve as essential seasonings in culinary applications and serve as fundamental components in traditional medicine, beauty formulations, pharmaceuticals, perfumery, soap production, and various other industries.

Pala | Nutmeg



Tanaman pala memiliki daun elips yang ramping, buah seperti lemon, berwarna kuning, dan memiliki aroma yang khas karena mengandung minyak atsiri. Berasal dari: Ternate, Banda, Siau, Manado, dan Halmahera, tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian 500- 700 meter, di atas permukaan laut.

Nutmeg plant has slender elliptical leaves, fruit like lemon, yellow in color, and has a distinctive aroma because it contains essential oils. It Coming from Ternate, Banda, Siau, Manado, and Halmahera, it grows well in areas that have an altitude of 500-700 meters, above sea level.

Kapulaga | Cardamom



Kapulaga disebut sebagai salah satu rempah-rempah termahal di dunia setelah kunyit dan vanila. Berasal dari Jawa Barat dan Sumatra Selatan. Kapulaga dapat tumbuh pada ketinggian 200- 1000 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh secara optimal dari 300 hingga 500 m di atas permukaan laut.

Cardamom is named as one of the most expensive spices in the world after turmeric and vanilla. It grows in West Java and South Sumatra. Cardamom can grow at an altitude of 200-1000 meters above sea level and can grow optimally from 300 to 500 meters above sea level.

Lada Hitam | Black Pepper



Lada hitam adalah buah mentah dari tanaman *Piper nigrum* yang telah dikeringkan. Selain digunakan sebagai bumbu masak, lada hitam telah dikonsumsi turun-temurun untuk mengobati gejala gangguan pencernaan maupun kondisi lainnya, termasuk: perut kembung, sakit perut, anoreksia, ulkus peptikum, nyeri perut, kram, diare, sembelit, bronkitis dan kanker.

Black pepper is the unripe fruit of the *Piper nigrum* plant that has been dried. Apart from being used as a cooking spice, black pepper has been consumed for generations to treat symptoms of indigestion and other conditions, including: flatulence, stomach pain, anorexia, peptic ulcer, stomach pain, cramps, diarrhea, constipation, bronchitis and cancer.

Lada Putih | White Pepper



Lada putih adalah rempah-rempah bercita rasa pedas dan mempunyai warna putih. Lada putih biasa dijual dalam bentuk butiran mentah atau sudah ditumbuk, yang didapatkan dari tanaman lada atau piper albi linn dan memberikan efek hangat dan pedas ketika dikonsumsi. Lada putih menjadi primadona dalam berbagai masakan dan menjadi item wajib di dapur.

White pepper is a spice that has a spicy taste and has a white color. White pepper is usually sold in the form of raw or ground granules, which is obtained from the pepper plant or piper albi linn and gives a warm and spicy effect when consumed. White pepper is excellent in various dishes and is a mandatory ingredient in the kitchen.

Cengkeh | Clove



Cengkeh adalah kuncup bunga aromatic dari pohon di keluarga *Myrtaceae*, *Syzygium aromaticum*. Mereka adalah asli Kepulauan Maluku (dari Maluku) di Indonesia, dan umumnya digunakan sebagai rempah-rempah. Cengkeh tersedia sepanjang tahun karena musim panen yang berbeda di berbagai negara.

Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family of *Myrtaceae*, *Syzygium aromaticum*. They are native to the Maluku Islands (from the Maluku) in Indonesia, and are commonly used as a spice. Cloves are available all year round due to different harvest seasons in different countries.

Kelapa dan Turunannya

Kelapa dikenal karena keserbagunaan dan nilai ekonominya, dengan berbagai bagian pohon yang menawarkan sumber daya berharga yang dapat digunakan dalam berbagai industri. Budidaya kelapa tersebar luas di seluruh Indonesia, dengan daerah penghasil utama kelapa termasuk Sumatra, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Sunda Kecil. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, iklim yang mendukung, dan area budidaya yang luas telah mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam produksi kelapa dunia, mengukuhkan statusnya sebagai produsen kelapa nomor satu di dunia.

Kelapa yang dihasilkan telah menjadi salah satu komoditas ekspor PPI. Kelapa memiliki beragam diversifikasi produk, antara lain: Arang Kelapa, Minyak Kelapa, Santan, Sabut Kelapa, dan Gula Kelapa.



Coconut and Its Derivatives

Coconut palm is renowned for its versatility and economic significance, with various parts of the tree offering valuable resources that can be utilized in numerous industries. Its cultivation is widespread across Indonesia, with major coconut-producing regions including Sumatra, Java, Sulawesi, Bali, and the Lesser Sunda Islands. Indonesia’s abundant natural resources, favorable climate, and extensive cultivation areas have propelled it to the forefront of global coconut production, cementing its status as the world’s number one producer of coconuts.

The Coconuts produced has become one of PPI’s export commodities. Coconut has a variety of product diversification, including: Coconut Charcoal, Coconut Oil, Coconut Milk, Coconut Coir, and Coconut Sugar.

Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya

Minyak kelapa sawit mentah merupakan salah satu komoditas ekspor PPI. Minyak ini merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia, digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, industri baja, kawat, radio, industri farmasi, dan juga sebagai sumber bahan bakar nabati atau biodiesel.



Crude Palm Oil and Its Derivatives

Crude palm oil is one of PPI’s export commodities. It is one of the most consumed and produced oils in the world, used as raw material for cooking oil, margarine, soap, cosmetics, steel industry, wire, radio, pharmaceutical industry, and also as a source of biofuel or biodiesel.

Kakao

PPI juga mengekspor biji kakao atau biji coklat. Sebelum diekspor, biji coklat harus melalui proses fermentasi dan pengeringan untuk kemudian diolah lebih lanjut.

Biji kakao merupakan bahan dasar pembuatan bubuk kakao (coklat), yang kemudian diolah lagi menjadi kue, es krim, makanan ringan, susu, dan lain-lain.

Indonesia pada tahun 2020, memperoleh predikat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Tanaman ini tumbuh dengan baik di bawah matahari tropis Indonesia.

Cocoa

PPI also exports cocoa beans or cocoa seeds. Before being exported, cocoa beans must undergo a fermentation and drying process before further processing.

Cocoa beans are the primary ingredient in the production of cocoa powder (chocolate), which is then further processed into cakes, ice cream, snacks, milk, and others.

In 2020, Indonesia earned the distinction of being the world's third-largest cocoa producer. This plant thrives well under Indonesia's tropical sun.



Teh

PPI bergerak di bidang ekspor daun teh. Teh merupakan komoditas ekspor utama di Indonesia dan merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi secara global. Daerah penghasil teh yang terkenal di Indonesia termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Teh menyajikan beragam rasa, warna, aroma, dan jenis, di antaranya adalah:

- Teh Putih: Berasal dari daun teh termuda yang ditemukan di bagian atas tanaman teh, teh putih memiliki kandungan antioksidan tertinggi dibandingkan dengan varietas teh lainnya. Teh ini menawarkan profil rasa yang lembut, segar, dan lembut.
- Teh hitam, yang sangat disukai di kalangan masyarakat Indonesia, juga disebut sebagai teh

Tea

PPI engages in the exportation of tea. Tea stands as a cornerstone export commodity in Indonesia and ranks as the most consumed beverage globally. Notable tea-producing regions in Indonesia include West Java, Central Java, and North Sumatra. Tea presents a diverse array of flavors, colors, aromas, and types, among which are:

- White Tea: Derived from the youngest tea leaves found at the top of the tea plant, white tea boasts the highest antioxidant content compared to other tea varieties. It offers a delicate, fresh, and soft flavor profile.
- Black tea, widely favored among Indonesian citizens, is also referred to as red tea due to its occasional

merah karena warnanya yang terkadang kemerahan. Diproduksi melalui proses oksidasi yang tinggi, teh hitam menghasilkan profil rasa yang kuat yang ditandai dengan rasanya yang lebih kuat, tajam, dan sedikit pahit.

- Teh hijau, yang terkenal sebagai minuman klasik Jepang, mudah didapatkan di pasar. Tidak seperti teh hitam, teh hijau hanya mengalami sedikit oksidasi. Dengan kadar kafein yang berada di antara teh hitam dan teh putih, teh hijau menawarkan perpaduan yang seimbang antara rasa ringan dan rasa pahit yang nyata.



reddish hue. Produced through a high oxidation process, black tea yields a robust flavor profile characterized by its stronger, tangy, and mildly bitter taste.

- Green tea, renowned as a quintessential Japanese beverage, is readily accessible in markets. Unlike black tea, green tea undergoes minimal oxidation. With caffeine levels falling between those of black and white teas, green tea offers a balanced blend of mildness and pronounced bitterness.

Rotan

Posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir produk rotan terbesar berakar kuat pada keanekaragaman hayati yang kaya dan tradisi pemanfaatan rotan yang sudah berlangsung lama. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas yang menjadi rumah bagi beragam spesies rotan, menjadikannya lokasi utama untuk budidaya dan pemanenan rotan.

Industri rotan di Indonesia tidak hanya menjadi kontributor utama bagi perekonomian negara, namun juga memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi banyak orang, terutama di daerah pedesaan di mana pemanenan dan pengolahan rotan lazim dilakukan. Dari pengrajin terampil yang membuat mebel rotan yang rumit hingga masyarakat lokal yang terlibat dalam praktik pemanenan rotan yang berkelanjutan, industri ini mendukung berbagai mata pencaharian di seluruh negeri.

Sektor rotan Indonesia dicirikan oleh kombinasi antara keahlian tradisional dan teknik produksi modern, menghasilkan beragam produk rotan berkualitas tinggi yang memenuhi pasar domestik dan internasional. Furnitur rotan, khususnya, sangat dicari karena daya tahan, estetika alami, dan daya tariknya yang ramah lingkungan.

Rattan

Indonesia's position as one of the largest exporters of rattan products is deeply rooted in its rich biodiversity and longstanding tradition of rattan utilization. The country boasts vast tropical forests that are home to a diverse array of rattan species, making it a prime location for rattan cultivation and harvesting.

The rattan industry in Indonesia is not only a major contributor to the country's economy but also plays a crucial role in providing employment and income for many people, particularly in rural areas where rattan harvesting and processing are prevalent. From skilled artisans crafting intricate rattan furniture to local communities engaged in sustainable rattan harvesting practices, the industry supports a wide range of livelihoods across the country.

Indonesia's rattan sector is characterized by a combination of traditional craftsmanship and modern production techniques, resulting in a diverse range of high-quality rattan products that cater to both domestic and international markets. Rattan furniture, in particular, is highly sought after for its durability, natural aesthetic, and eco-friendly appeal.

Selain itu, industri rotan di Indonesia telah mendapat perhatian karena potensinya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan praktik pemanenan yang bertanggung jawab, mempromosikan budidaya rotan di daerah yang terdegradasi, dan mendukung masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya rotan secara berkelanjutan.

PPI sebagai trader produk furniture dan kerajinan Indonesia melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan material rotan alami dengan berbagai jenis desain kursi dan meja rotan beragam sesuai fungsinya. Industri kerajinan ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan pengrajin yang terampil dan kreatif dalam menyesuaikan permintaan pasar dalam dan luar negeri.

Furthermore, the rattan industry in Indonesia has received attention for its potential to promote sustainable development and environmental conservation. Efforts have been made to implement responsible harvesting practices, promote rattan cultivation in degraded areas, and support local communities in managing rattan resources sustainably.

PPI as a trader of Indonesian furniture and handicraft products conducts domestic and foreign trade with natural rattan materials with various types of rattan chair and table designs varying according to function. This handicraft industry is spread throughout Indonesia with skilled and creative craftsmen in adjusting domestic and foreign market demand.



Ikkan

Perikanan di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, ketahanan pangan, dan mata pencaharian di Indonesia. Indonesia memiliki salah satu ekosistem laut yang paling luas dan beragam di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luas. Sebagai hasilnya, perikanan dan akuakultur merupakan kontributor yang signifikan terhadap PDB, lapangan kerja, dan gizi Indonesia.

PPI sebagai pengambil alih produk perikanan dari BUMN Food Holding, menyediakan produk ikan segar dan ikan beku untuk pasar dalam dan luar negeri.

Fish

Fisheries in Indonesia play a crucial role in the country's economy, food security, and livelihoods. Indonesia boasts one of the most extensive and diverse marine ecosystems globally, with over 17,000 islands and vast ocean territories. As a result, fisheries and aquaculture are significant contributors to Indonesia's GDP, employment, and nutrition.

As fishery product offtaker from SOE Food Holding, PPI provides fresh and frozen fish products for domestic and foreign markets.



Rumput Laut

Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati laut berupa spesies rumput laut, juga merupakan negara eksportir terbesar untuk komoditas rumput laut kering.

PPI memiliki komoditas andalan ekspor rumput laut dengan jenis *Seaweed Eucheuma Cottoni* dan *Seaweed Eucheuma Spinosum*. Pemenuhan komoditas ini melalui kerja sama dengan petani lokal rumput laut yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengekspos potensi komoditi Indonesia dalam memenuhi permintaan rumput laut di luar negeri.

PPI memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) Buduran berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan infrastruktur penunjang aktivitas pengolahan rumput laut yang dimiliki oleh PPI untuk menjamin proses pengemasannya.



Seaweed

Indonesia has a source of marine biodiversity in the form of seaweed species, and is also the largest exporter of dried seaweed commodities.

PPI has a mainstay export commodity for seaweed, namely Seaweed Eucheuma Cottoni and Seaweed Eucheuma Spinosum. Fulfillment of this commodity is through collaboration with local seaweed farmers which aims to encourage national economic growth, exposing the potential of Indonesian commodities in meeting demand for seaweed abroad.

PPI has the Buduran Fish Processing Unit (UPI) located in Sidoarjo, East Java, which is the supporting infrastructure for seaweed processing activities owned by PPI to guarantee the packaging process.

Cangkang Kelapa Sawit

Cangkang kelapa sawit adalah salah satu sumber energi biomassa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Komoditas ini merupakan produk ekspor yang memiliki nilai ekonomis dan diminati masyarakat global.

Cangkang kelapa sawit berasal dari limbah pengolahan minyak kelapa sawit yang mencapai 60% dari produksi minyak. Cangkang ini dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat karbon aktif. karbon aktif dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri, antara lain industri minyak, karet, gula dan farmasi.

Palm Oil Shells

Palm oil shells are an environmentally friendly and sustainable biomass energy source. This commodity is an export product that has economic value and is in demand by the global community.

Palm oil shells come from palm oil processing waste which reaches 60% of oil production. This shell is used as an ingredient to make active carbon. Activated carbon can be used by various industries, including the oil, rubber, sugar and pharmaceutical industries.

Warung Pangan

Aplikasi Warung Pangan adalah aplikasi *mobile* yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN, dan dikembangkan oleh PPI yang bekerjasama dengan BUMN Holding Pangan, UMKM, serta jaringan *supplier* lainnya. Warung Pangan hadir sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dengan menyediakan *platform* digital yang memfasilitasi mereka dalam menawarkan produk pangan dengan harga bersaing dan kualitas terbaik kepada masyarakat luas.

Fitur terdapat dalam aplikasi Warung Pangan meliputi:

1. WP Asik,
2. WP Fund,
3. WP
4. Mitra Get Mitra,
5. Mitra Prioritas,
6. Bayar Nanti.

Warung Pangan

The Warung Pangan Application is a mobile application initiated by the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Ministry of State-Owned Enterprises, and developed by PPI in collaboration with the Food Holding SOE, SMEs, and other supplier networks. Warung Pangan serves as a solution to empower millions of sellers by providing a digital platform that facilitates them in offering food products at competitive prices and the best quality to the wider community.

Features available in the Warung Pangan application include:

1. WP Asik,
2. WP Fund,
3. WP Entrepreneur,
4. Partner with Get Partner,
5. Priority Partner,
6. Pay Later.



Pengelolaan Limbah terpadu

PPI menyediakan layanan terpadu untuk pengelolaan limbah berbahaya B3 yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah Non-B3.

- **Pengelolaan Limbah B3**
Memberikan solusi terpadu penanganan limbah B3 yang terkoneksi dengan Sistem Manifest Elektronik (FestTronik) KLHK yang menghubungkan antara penghasil limbah, pengangkut limbah, dan pengelola akhir limbah yang termonitor dan terintegrasi langsung dengan sistem KLHK.
- **Pengelolaan Limbah Non B3**
Menjawab tantangan dari limbah Non B3 yang dihasilkan dari limbah industri dan rumah tangga melalui aplikasi *online* lapak limbah (ALITA – Angkutan Limbah Logistik Industri dan Rumah Tangga).

Waste Integrated Solution

PPI provides integrated hazardous waste management services which include collection, transportation, utilization, and management of Non-Hazardous waste.

- **Hazardous Waste Management**
It provides an integrated solution for handling hazardous waste that is connected to the KLHK Electronic Manifest System (Fest Tronik) connecting waste producers, waste transporters, and final waste managers which is monitored and integrated directly with the KLHK system.
- **Non Hazardous Waste Management**
It responds to the challenges of Non-Hazardous waste generated from industrial and household waste through the online application for waste stalls (ALITA – Transport for Industrial and Household Logistics Waste).

Berikut ini berbagai jenis limbah yang telah dikelola secara terpadu:

1. *Electronic* dan *electric waste* (pembangkit listrik, distribusi listrik, rumah tangga hingga industri).
2. *Fly ash* dan *bottom ash* dari pembangkit listrik atau pabrik pupuk.
3. Daur ulang minyak goreng bekas menjadi Bio Diesel 50.
4. Pengolahan oli bekas dan limbah rumah sakit yang bekerjasama dengan mitra terpercaya.

The following are various types of waste that have been managed in an integrated manner:

1. Electronic and electric waste (power generation, electricity distribution, household to industry).
2. Fly ash and bottom ash from power plants or fertilizer factories.
3. Recycling used cooking oil into Bio Diesel 50.
4. Treatment of used oil and hospital waste in collaboration with trusted partners.



Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Corporate Vision, Mission, and Cultural Values

PERNYATAAN PENETAPAN VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2023 telah meninjau dan menyetujui bahwa Visi, Misi & Nilai-Nilai Budaya PPI yang digunakan sampai dengan saat ini masih selaras dengan potensi dan perkembangan bisnis PPI.

Perubahan terakhir atas Visi & Misi PPI dilakukan pada tahun 2022 dan telah disetujui perubahannya oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Direksi No. 08/DU/SKD/PPI/III/2022.

STATEMENT OF VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

The Board of Commissioners and Board of Directors in office during the 2023 financial year have reviewed and approved that PPI's Vision, Mission & Cultural Values used to date are still aligned with PPI's business potential and development.

The last amendment to PPI's Vision & Mission was made in 2022 and the amendment was approved by the Shareholders through Board of Directors Decree No. 08/DU/SKD/PPI/III/2022.



Visi Vision

Menjadi Perusahaan **Perdagangan Nasional Berkelas Dunia** yang **Terpercaya dan Terkemuka**.

To be a trusted and leading world-class national trading company.



Misi Mission

1. Melakukan perdagangan umum dan khusus untuk produk pangan dan non-pangan dari hulu hingga hilir dengan sasaran pasar domestik dan internasional.
To conduct general and specialized trading for food and non-food products from upstream to downstream targeting domestic and international markets.
2. Memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan.
Provide quality products, competitive prices, and usefulness to ensure customer satisfaction and establish sustainable partnerships.
3. Merancang ekosistem terintegrasi yang berfungsi menopang bisnis utama dalam perdagangan.
Designing an integrated ecosystem that serves to support the main business in trading.
4. Membangun keunggulan operasional melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi (data analitik) guna mendukung proses bisnis yang efisien dan inovatif.
Build operational excellence through the utilization of information technology systems (data analytics) to support efficient and innovative business processes.
5. Memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan pembangunan infrastruktur pendukung relevan dengan investasi yang efektif.
Ensure optimal asset utilization and relevant supporting infrastructure development with effective investment.
6. Meningkatkan produktivitas, ketangkasan dan mutu kinerja SDM melalui pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai.
Improve the productivity, agility and quality of human resource performance through the development of employee capabilities and competencies.



Tagline Perusahaan Corporate Tagline

“Quality Tradelog for Everyone”

NILAI UTAMA

Core Values – Akhlak

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan perubahan nilai-nilai perusahaan menjadi AKHLAK.

AKHLAK merupakan *Core Values* yang dibangun oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan tujuan umum untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mempunyai tujuan khusus untuk masing-masing BUMN dan anak perusahaannya. Penjabaran nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

CORE VALUES

Core Values – Akhlak

Based on the Circular Letter of the Minister of SOEs Number: SE-7/MBU/07/2020 regarding Guidelines for Cultural Work of State-Owned Enterprises and their subsidiaries, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia has changed the Company’s values into AKHLAK.

AKHLAK is the Core Values developed by the Ministry of SOEs in the context of the welfare of the community, with general goals for the benefit of the nation and state, and has specific goals for each SOE and its subsidiaries. The description of these values is as follows:

Amanah Trustworthy



Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Trustworthy means adhering the trust given, with the expected behavior as follows:

- Fulfilling promises and commitments
- Taking responsibility for tasks, decisions, and actions taken
- Adhering to moral and ethical values

Kompeten Competent



Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Competent means continuing to learn and develop capabilities, with the following expected behaviors:

- Improving self-competence to respond to dynamic challenges
- Helping others learn
- Completing tasks of the highest quality.

Harmonis Harmonious



Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Harmonious means caring for each other and respecting differences, with the following expected behaviors:

- Respecting everyone regardless of background
- Helping others
- Building a conducive work environment.

Loyal Loyal



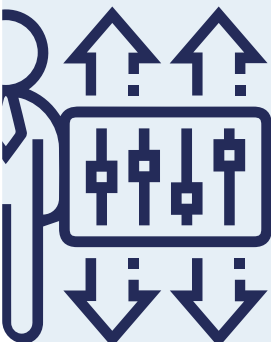
Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Loyal means being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State, with the expected behavior as follows:

- Maintaining the reputation of other employees, leaders, SOEs and the State
- Willing to sacrifice to achieve a bigger goal
- Obeying the leaders as long as it is not against the law and ethics.

Adaptif Adaptive



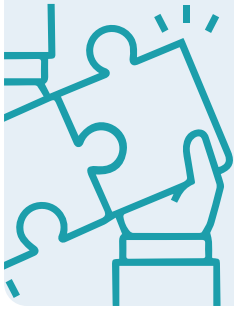
Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

Adaptive means continuing to innovate and being enthusiastic in moving or facing change, with the expected behaviors as follows:

- Adapting to be better quickly
- Continuously improving following technological developments
- Acting proactively

Kolaboratif Collaborative



Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

Collaborative means building a synergistic collaboration with the expected behaviors as follows:

- Providing opportunities for various parties to contribute
- Being open to work together to generate added value
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

Filosofi Perdagangan

Trade Philosophy



1. Komersial

Sebagai Perusahaan Terbatas, Perseron melaksanakan kegiatan perdagangan yang keuntungannya diutamakan untuk pertumbuhan usaha dan mewujudkan stabilisasi harga.

Commercial

As a Limited Liability Company, Perseron conducts trading activities prioritizing profits for business growth and achieving price stabilization.



2. Terukur

Setiap kebijakan dan strategi perdagangan PPI dilaksanakan secara terukur termasuk dalam menetapkan margin keuntungan agar dapat memberikan manfaat kepada setiap *stakeholder*.

Measurable

Every trade policy and strategy implemented by PPI is carried out in a measured manner, including determining profit margins, to ensure benefits for every stakeholder.

Sasaran dan Strategi Perusahaan

Corporate Target and Strategy

SASARAN PERUSAHAAN

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023 ditargetkan mencapai total aset sebesar Rp4,80 triliun, total liabilitas sebesar Rp1,07 triliun dan total ekuitas sebesar Rp3,74 triliun;
2. EBITDA sebesar Rp126,7 Miliar;
3. Laporan laba rugi setelah pajak konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp41 miliar;
4. Total skor Tingkat Kesehatan Perusahaan sebesar 64 atau Sehat (A).

COMPANY TARGETS

1. The consolidated financial position report as of December 31, 2023 is targeted to achieve total assets of IDR4.80 trillion, total liabilities of IDR1.07 trillion, and total equity of IDR3.74 trillion.
2. EBITDA of IDR126,7 billion.
3. Consolidated profit and loss statement for the year 2023 amounting to IDR41 billion.
4. Total Company Health Score of 64 or Healthy (A).

STRATEGI PERUSAHAAN

COMPANY STRATEGY

No.	Strategi Strategy	Tujuan & Sasaran Goals & Objectives
1	<i>Refocus Portfolio & Development Priorities</i>	<p>Fokus bisnis masing-masing segmen yang mendorong prioritas pengembangan dan alokasi sumber daya perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan.</p> <p>Business focus of each segment that drives development priorities and the allocation of company resources to increase revenue growth.</p>
2	<i>Sustainable Capability & Cost-Effective Ecosystem</i>	<p>Pembentukan ekosistem perdagangan yang efektif melalui penguatan infrastruktur dan penguatan efektivitas cabang melalui penatakelolaan.</p> <p>Establishment of effective trade ecosystem through infrastructure strengthening, and enhancement of branch effectiveness through governance.</p>
3	<i>Financial Restructuring</i>	<p>Restrukturisasi keuangan yang bertujuan untuk mengurangi beban keuangan perusahaan dan meningkatkan rasio keuangan korporat untuk memperkuat akses pendanaan operasional.</p> <p>Financial restructuring aimed at reducing the company's financial burden and improving corporate financial ratios to strengthen access to operational funding.</p>
4	<i>Governance & Policy Setting (Subsidiary)</i>	<p>Tata kelola hubungan induk-anak yang mendorong pertumbuhan bisnis anak usaha.</p> <p>Governance of parent-subsidiary relationships that promotes the growth of subsidiaries' businesses.</p>
5	<i>Human Capital Management (Org. & Talent)</i>	<p>Penguatan organisasi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan.</p> <p>Strengthening of the organization and sustainable human resources.</p>
6	<i>Digital & Market Driven Process</i>	<p>Digitalisasi proses bisnis perusahaan yang mendukung kegiatan operasional.</p> <p>Digitalization of the company's business processes to support operational activities</p>



5 Prioritas Strategi BUMN

5 SOE Priority Strategies

PPI mencanangkan rencana Strategis Korporasi yang akan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan sebagai BUMN yang profesional, mandiri, unggul dan berdaya saing, serta berkontribusi maksimal pada internalisasi 5 (lima) Strategi Prioritas BUMN, antara lain:

- 1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia**
Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan;
- 2. Inovasi Model Bisnis**
Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan *stakeholders*, dan fokus pada *core business*.
- 3. Kepemimpinan Teknologi**
Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management*, *advanced management*, *big data*, *artificial intelligence*, dan lain-lain;
- 4. Peningkatan Investasi**
Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat;
- 5. Pengembangan Talenta**
Menedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

PPI has outlined a Corporate Strategic Plan that will serve as a guideline in achieving its goals as a professional, independent, superior, and competitive state-owned enterprise, as well as contributing maximally to the internalization of the 5 (five) Priority Strategies of State-Owned Enterprises, including:

- 1. Economic and Social Value for Indonesia**
Enhancing economic value and social impact, particularly in the areas of food security, energy, and health.
- 2. Business Model Innovation**
Restructuring the business model through ecosystem development, cooperation, addressing stakeholders' evolving needs, and focusing on core business.
- 3. Technological Leadership**
Global leadership in strategic technology and institutionalizing digital capabilities such as data management, advanced management, big data, artificial intelligence, and others.
- 4. Investment Enhancement**
Optimizing asset value and creating a healthy investment ecosystem.
- 5. Talent Development**
Educating and training the workforce, developing high-quality human resources for Indonesia, professionalizing governance, and implementing HR selection systems.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Company Purpose and Objectives

Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar PPI, maksud dan tujuan pendirian PPI adalah melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PPI untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PPI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

As stated in article 3 of PPI's Articles of Association, the purpose and objective of establishing PPI is to conduct business in the trade sector in general, as well as to optimize the utilization of PPI's resources to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/ pursue profits in order to increase the value of PPI by implementing the principles of a Limited Liability Company.

Identitas dan Logo Perusahaan

Corporate Identity and Logo



Simbol "P" pada logo menunjukkan PPI merupakan perusahaan perdagangan terpercaya di Indonesia.
The "P" symbol in the logo indicates that PPI is a trusted trading company in Indonesia.

Warna Orange melambangkan dinamis dan bijaksana.
Orange symbolizes dynamism and wisdom.

Warna Biru melambangkan percaya diri, kemandirian, teknologi, dan tanggung jawab.
Blue symbolizes confidence, independence, technology, and responsibility.



Manajemen dan Pejabat Perusahaan

The Management and Corporate Officers

DIREKSI

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	No: SK- 92/MBU/03/2021	18 Maret 2021 – 26 Juni 2023 March 18, 2021 - June 26, 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021 – 26 Juni 2023 July 1, 2021 - June 26, 2023
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No. SK- 92/MBU/03/2021	18 Maret 2021 – 26 Juni 2023 March 18, 2021 - June 26, 2023
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	No. SK-381/MBU/12/2021	2 Desember 2021 – 26 Juni 2023 December 2, 2021 - June 26, 2023

BOARD OF DIRECTORS

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 26 Juni 2023, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

In accordance with the resolution of the PPI General Meeting of Shareholders dated June 26, 2023, the composition of the Board of Directors changed to:

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021 July 1, 2021
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	No. SK-381/MBU/12/2021	2 Desember 2021 December 2, 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Desember 2023, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

In accordance with the resolution of the PPI General Meeting of Shareholders dated December 18, 2023, the composition of the Board of Directors changed to:

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021 July 1, 2021

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi Director of Operations	No: SK-362/MBU/12/2023 No : 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023	18 Desember 2023 December 18, 2023

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Bara Krishna Hasibuhan	Komisaris Utama President Commissioner	No. SK-291/MBU/XII/2022 dan No.105/Kep.PS/RNI.01/XII/2022	Desember 2022 - Desember 2023 December 2022 - December 2023
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No. SK-385/MBU/12/2021	Desember 2021 - Desember 2023 December 2021 - December 2023
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020	April 2020 - Desember 2023 April 2020 - December 2023
Muhammad Kapitra Ampera	Direktur Operasi Director of Operations	No. SK-102/MBU/04/2020	April 2020 - Desember 2023 April 2020 - December 2023

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Desember 2023, susunan anggota Komisaris berubah menjadi:

In accordance with the resolution of the PPI General Meeting of Shareholders dated December 18, 2023, the composition of the Commissioners changed to:

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Hamli	Komisaris Utama President Commissioner	No : SK-360/MBU/12/2023 No : 152/KEP.PS/RNI.01/XII/2023	Desember 2023 - Sekarang December 2023 - Current
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No. SK-385/MBU/12/2021	Desember 2021 - Sekarang December 2021 - Current

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Hamli
Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia. Beliau lahir di Sampang, tanggal 4 Juli 1962. Saat ini berusia 61 tahun.

Indonesian citizen. He was born in Sampang, July 4, 1962. Currently 61 years old.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik, jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Noverber (1987);
- Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999).

Education Background

- Bachelor of Engineering, majoring in Chemical Engineering from Sepuluh November Institute of Technology (1987);
- Master of Economics from University of Indonesia (1999).

Riwayat Karier

- Kepala Bidang Fisika Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri (2010);
- Kepala Bagian Operasi - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2010-2014);
- Analis Kebijakan Bidang Penindakan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2014-2015);
- Kepala Bidang Pencegahan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2015-2017).
- Direktur Pencegahan BNPT (2017 - 2020)

Career History

- Head of Forensic Physics Division, Forensic Laboratory Center, Criminal Investigation Unit of the National Police (2010);
- Head of Operations Section - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2010-2014);
- Policy Analyst for Enforcement - Densus 88 Anti-Terror, Police (2014-2015);
- Head of Prevention Section - Densus 88 Anti-Terror, Police (2015-2017).
- BNPT Prevention Director (2017 - 2020)

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan.

Concurrent Position

He does not hold concurrent positions within and outside the Company.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors, or the majority/ controlling shareholders.



Setiawan Wangsaatmaja

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia. Beliau lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 1963. Saat ini berusia 59 tahun.

Indonesian citizen. He was born in Bandung, on August 26, 1963. Currently 59 years old.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number: SK-385/MBU/12/2021 dated December 02, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners Company (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Lingkungan ITB (1989);
- Magister Sanitary Engineering IHE DELFT (1994);
- Magister Environmental Engineering Asian Institute of Technology (1997);
- Doktor Teknik Lingkungan ITB (2004).

Educational Background

- Bachelor of Environmental Engineering, ITB (1989);
- Master of Sanitary Engineering, IHE DELFT (1994);
- Master of Environmental Engineering, Asian Institute of Technology (1997);
- Doctor of Environmental Engineering, ITB (2004).

Riwayat Karier

- Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2008 -2013);
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2013 - 2020);
- Sekretaris Daerah - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (2020 - 2023).

Professional Experience

- Head of the Regional Environmental Management Agency (BPLHD) - West Java Government (2008 -2013);
- Deputy for Apparatus Human Resources - Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (2013 - 2020);
- Regional Secretary - Regional Government of West Java (2020 - 2023).

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan.

Concurrent Position

He does not hold concurrent positions within and outside the Company.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Affiliation

She is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/ controlling shareholders.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Soegeng Hernowo
Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia. Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Juli 1964, dan saat ini berusia 60 tahun.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor SIC-I69/M8U/06/2023 dan Nomor GS PS/1.01/V1/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S1 Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) (1989)
- Magister Manajemen, PPM School of Management (2003)

Riwayat Karier

- Kepala Divisi *State Owned Enterprise* (SOE) Bisnis 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2019 – 2020)
- Kepala Divisi Bisnis Menengah dan Non Agri PT BRI Agroniaga, Tbk (2020 – 2021)
- Komisaris Independen PT BRI Asuransi Indonesia (2021 – 2023).

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Citizen of Indonesia. He was born in Jakarta, on July 21, 1964, and is currently 60 years old.

Legal Basis of Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number SIC-I69/M8U/06/2023 and Number GS PS/1.01/V1/2023 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Education Background

- Bachelor's Degree in Agricultural Economics and Resources, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University (IPB) (1989)
- Master of Management, PPM School of Management (2003)

Career History

- Head of State Owned Enterprise (SOE) Business Division 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2019 – 2020)
- Head of Medium and Non-Agricultural Business Division, PT BRI Agroniaga, Tbk (2020 – 2021)
- Independent Commissioner of PT BRI Asuransi Indonesia (2021 – 2023)

Concurrent Positions

He does not hold concurrent positions within and outside the Company.

Affiliation Relationship

He has no affiliation relationship with the Board of Commissioners, other Directors, or with major/controlling shareholders.



Wien Irwanto
 Direktur Keuangan, Manajemen
 Risiko, SDM & Umum
 Director of Finance, Risk Management,
 HC & General Affairs

Warga Negara Indonesia. Beliau lahir di Surabaya, pada tanggal 7 Juni 1972. Saat ini berusia 50 tahun.

Indonesian citizen. He was born in Surabaya, on June 7, 1972. Currently 50 years old.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-221/MBU/07/2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan (1996);
- Magister Ekonomi – Jurusan Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (2009).

Education Background

- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics at Parahyangan Catholic University (1996);
- Master of Economics – Department of Islamic Economics of the Faculty of Economics at the University of Indonesia (2009).

Riwayat Karier

- Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei & Konsultan II, Kementerian BUMN RI (2016- 2019);
- Komisaris PT Mandiri Sekuritas (2019);
- Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I, Kementerian BUMN RI (2019);
- Direktur Komersil PTPN XII (2019-2020);
- Komisaris PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021).

Professional Experience

- Assistant Deputy for Financial Services, Survey Services & Consultants II, Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia (2016-2019);
- Commissioner of PT Mandiri Sekuritas (2019);
- Assistant Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism I, Ministry of SOEs (2019);
- Commercial Director of PTPN XII (2019-2020);
- Commissioner of PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.

Concurrent Position

He does not have any concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Affiliation

He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/ controlling shareholders.



Edhy Rizwan
Direktur Komersial & Pengembangan
Director of Commercial & Development

Warga Negara Indonesia. Beliau lahir di Malang, pada tanggal 23 Maret 1968, dan saat ini berusia 56 tahun.

Citizen of Indonesia. He was born in Malang, on March 23, 1968, and is currently 56 years old.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No: SK-169/MBU/06/2023 dan No: 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Legal Basis of Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No: SK-169/MBU/06/2023 and No: 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Merdeka (1991)

Education Background

Bachelor's Degree in Accounting Economics, Merdeka University (1991)

Riwayat Karier

- Dewan Komisaris PT Gendis Multi Manis (2017 - 2023)
- Direktur PT Estika Tata Tiara Tbk (2023)
- Direktur Komersial & Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2023 - Sekarang)

Career History

- Commissioner of PT Gendis Multi Manis (2017 - 2023)
- Director of PT Estika Tata Tiara Tbk (2023)
- Commercial & Development Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2023 - Present)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.

Concurrent Position

He does not have any concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Affiliation Relationship

He has no affiliation relationship with the Board of Commissioners, other Directors, or major/controlling shareholders.



Noverita Anggraeny
 Direktur Operasi
 Director of Operations

Warga Negara Indonesia. Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal 28 November 1973, dan saat ini berusia 50 tahun.

Citizen of Indonesia. He was born in Jakarta, on November 28, 1973, and is currently 50 years old.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor SK-362/MBU/06/2023 dan Nomor 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia as the Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number SK-362/MBU/06/2023 and Number 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023 regarding the Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Trisakti (1998)
- S2 Program Magister Management, Jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Gajah Mada (2000)

Education Background

- Bachelor of Architecture, Faculty of Civil Engineering and Planning, Trisakti University (1998)
- Master of Management Program, Department of Marketing Management, Gajah Mada University (2000)

Riwayat Karier

- VP Satuan Tata Kelola Risiko dan Renstra, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021)
- VP Departemen Manajemen Risiko, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021 – 2022)
- Kepala Sekretariat Perusahaan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2022 – sekarang)

Career History

- VP of Risk Governance and Strategic Planning Unit, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021)
- VP of Risk Management Department, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2021 – 2022)
- Corporate Secretariat Head, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2022 – present)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.

Concurrent Positions

She does not have any concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Affiliation Relationship

She has no affiliation relationship with either the Board of Commissioners, other Directors, or with major/shareholder/controllers.

Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Kepemilikan saham perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

The ownership of company shares is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises. The ownership of shares has been recorded and administered in the Shareholder Registry (DPS), managed by the Company Secretary.

Dengan demikian di dalam Laporan Tahunan 2023 ini PPI tidak menyajikan informasi mengenai:

Therefore, in this 2023 Annual Report, PPI does not provide information regarding:

1. Pemegang saham berdasarkan klasifikasi institusional;
2. Pemegang saham sampai tingkat individu;
3. Pemegang saham pengendali;
4. Pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih;
5. Kepemilikan saham oleh Direksi & Dewan Komisaris; dan
6. Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar.

Berikut adalah uraian struktur kepemilikan saham PPI per 31 Desember 2023:

Below is the description of PPI's share ownership structure as of December 31, 2023:

Struktur Kepemilikan Saham PPI per 31 Desember 2023

PPI Share Ownership Structure as of December 31, 2023

Nama Name	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal (IDR)	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Shares
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	942.744	1.000.000	Disetor sepenuhnya Fully paid
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	1.000.000	Disetor sepenuhnya Fully paid

Hingga akhir tahun 2023, PPI tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh publik dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun.

Until the end of 2023, PPI did not issue shares for public ownership and did not trade its shares on any stock exchange.

Informasi Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci

Information on Share Ownership by Key Management

Hingga 31 Desember 2023, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak tercatat memiliki saham PPI.

As of December 31, 2023, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors were recorded as owning shares in PPI.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Majority and Controlling Shareholders

Nama Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	942.744	99,9999%

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Karena status PT Perusahaan Perdagangan Indonesia adalah anak BUMN dan bukan perusahaan publik, maka tidak ada informasi mengenai kronologi pencatatan/pergerakan harga saham yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Due to the status of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia as a subsidiary of SOE and not a public company, there is no information regarding the chronology of listing/share price movements that can be disclosed in this Annual Report.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

Sampai dengan 31 Desember 2023, PPI tidak melakukan penerbitan obligasi atau efek lainnya. Oleh karenanya, tidak ada yang dapat disajikan terkait dengan hal tersebut dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

As of December 31, 2023, PPI has not issued any bonds or other securities. Therefore, nothing can be presented related to this matter in this 2023 Annual Report.

Ikhtisar Kebijakan Dividen Perseroan

Overview of the Company's Dividend Policy

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen atas laba bersih Perusahaan tahun 2022 dan 2021.

Based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Company decided not to distribute dividends on the Company's net profit for 2022 and 2021.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP / MSOP)

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

As of the end of 2023, the Company did not carry out a share ownership program for employees and / or management (ESOP / MSOP).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Supporting Institution and Professionals

Hingga tanggal 31 Desember 2022, PPI tidak melakukan penawaran saham umum. Oleh karena itu, PPI tidak memiliki informasi terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang perlu diungkapkan di sini.

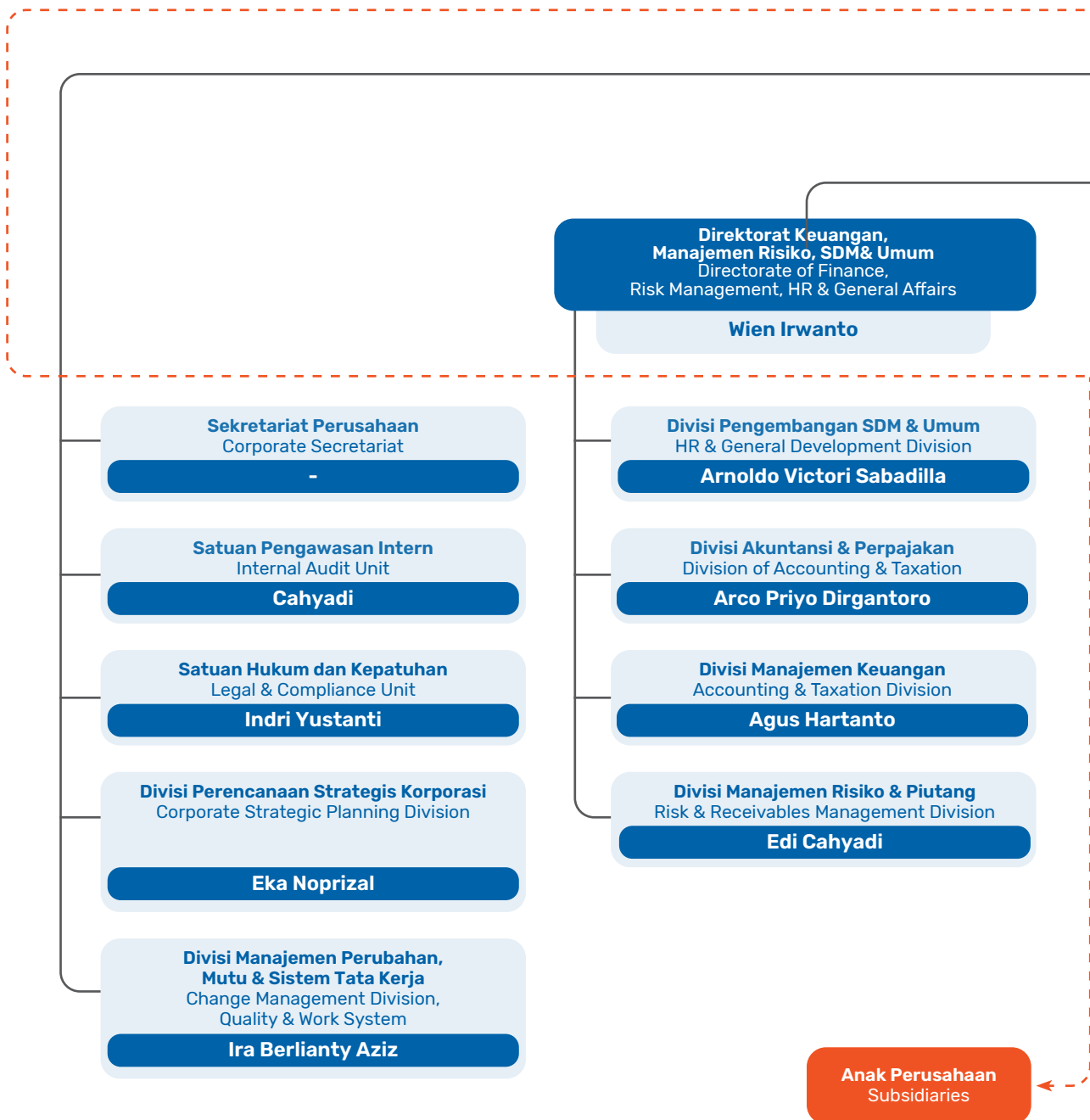
As of December 31, 2022, PPI has not conducted any public stock offerings. Therefore, PPI does not have any information regarding Capital Market Supporting Institutions and Professions that needs to be disclosed here.

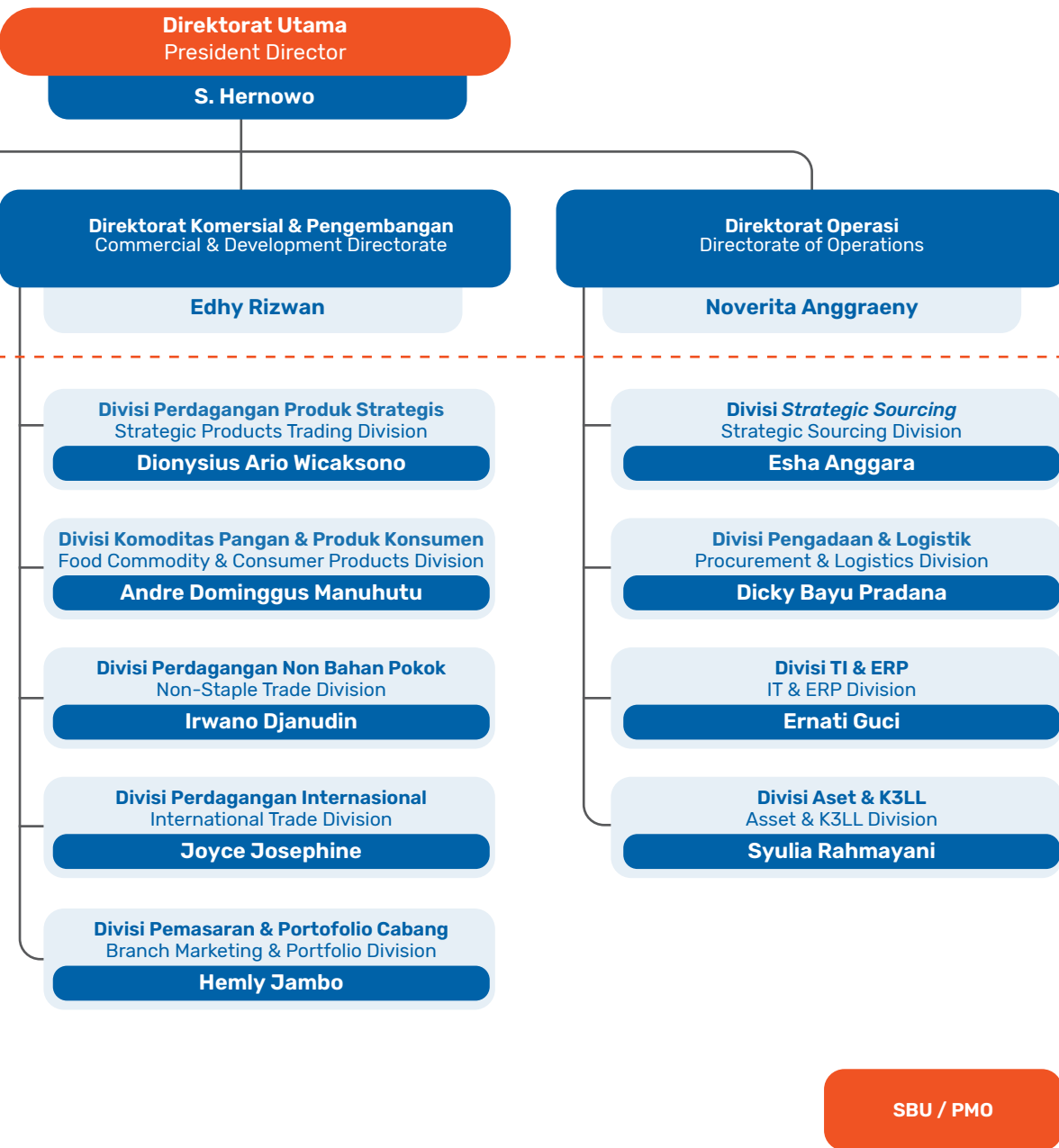
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Nomor: 13/DU/SKD/PPI/II/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, susunan organisasi PPI adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 13/DU/SKD/PPI/II/2023 concerning Determination of the Organizational Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the organizational structure of PPI is as follows:



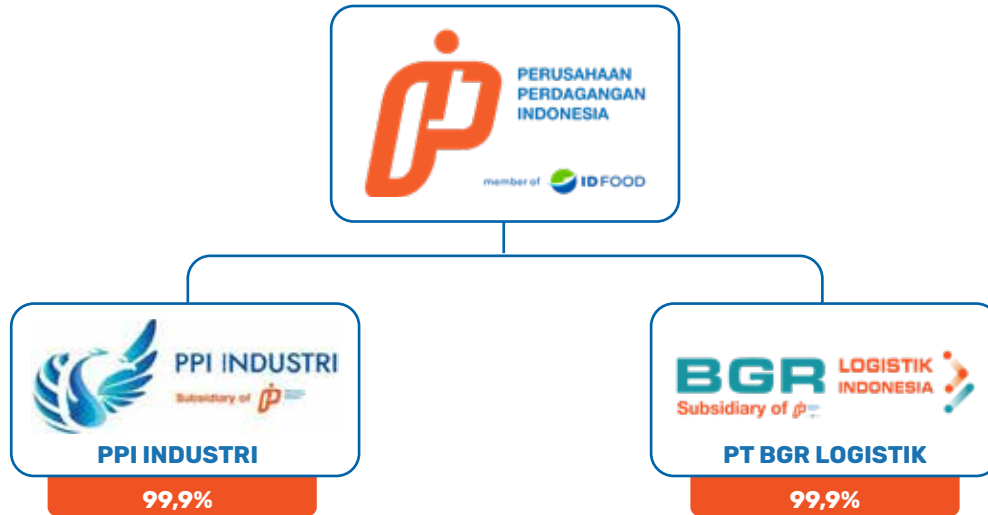


Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure

Hingga tahun 2023, PPI tidak memiliki entitas asosiasi, *joint venture*, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Namun, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak yakni PPI Industri dan PT BGR Logistik Indonesia dengan kepemilikan saham masing-masing 99,90%.

As of 2023, PPI does not have associate entities, joint ventures and Special Purpose Vehicles (SPV). However, PPI has 2 (two) subsidiaries, namely PPI Industri and PT BGR Logistik Indonesia with 99.90% share ownership each.



Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries and Joint Ventures

Entitas Anak Hingga akhir tahun 2023, PPI tercatat memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu PPI Industri dan PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Subsidiary Until the end of 2023, PPI has 2 (two) Subsidiaries, namely PPI Industri and PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (previously known as PT Trisari Veem). The details are as follows:

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA INDUSTRI (“PPI INDUSTRI”)

Pada mulanya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (“PPI Industri”) didirikan dengan nama PT Dharma Niaga Putera Steel berdasarkan Akta Notaris Syamsul Hadi, S.H., No. 33 tanggal 18 September 1986. Selanjutnya, akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan termasuk di antaranya terkait perubahan nama PT Dharma Niaga Putera Steel menjadi PPI Industri sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 13 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (“PPI Industri”) was first established under the name of PT Dharma Niaga Putera Steel based on the Notary Deed of Syamsul Hadi, S.H., No. 33 dated September 18, 1986. Subsequently, the deed of establishment was amended several times, including the change in the name of PT Dharma Niaga Putera Steel to PPI Industri as stated in the Deed No. 13 dated August 25, 2009 made before Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notary in Palembang.

Berdasarkan akta perubahan terakhir No. 38 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang, telah disetujui perubahan mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PPI Industri. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan nomor AHU-AH.01.03-0371005 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

PPI Industri adalah salah satu entitas anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perindustrian umum dalam bidang pembuatan seng dan bahan bangunan lainnya; perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, tidak terbatas pada pengadaan bahan baku dan perdagangan hasil produksi seng.

Based on the latest amendment deed No. 38 dated October 31, 2022 made before Kurnia Ariyani, S.H., Notary in Tangerang, the amendments to the Circular Resolution of the Shareholders of PPI Industri have been approved. The amendments to the Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights in a decree number AHU-AH.01.03-0371005 of 2020 dated August 27, 2020.

PPI Industri is one of the company's subsidiaries that carries out business activities in the general industrial sector in the manufacture of zinc and other building materials; trade related to industrial activities, not limited to the procurement of raw materials and trad of zinc production.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PPI Industri)	
Tahun Pendirian Year of Establishment	1986
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Notaris Syamsul Hadi, S.H., No.33 tanggal 18 September 1986 Deed of Notary Syamsul Hadi, S.H., No.33 dated September 18, 1986
Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	18 September 1986 September 18, 1986
Domisili Domicile	Palembang
Status Status	Anak Perusahaan Subsidiary
Kegiatan Usaha Business Activities	Manufaktur dan Perdagangan Manufacture and Trade
Kepemilikan Saham Share Ownership	99,90%
Jumlah Aset Total Assets	Rp9.479.759.127 IDR9.479.759.127
Status Operasional Status of Operation	Beroperasi In operation
Alamat Address	Jl. Talang Kramat No.25 Kenten Talang Kelapa, Musi Banyuasin, P.O.Box. 130 Palembang 30001 Sumatra Selatan, Indonesia Phone: (0711) 810573/810233 Fax: (0711) 810473

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PPI Industri tanggal 23 Maret 2022 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Wien Irwanto	Aswardi

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PPI Industri's Shareholders' Meeting dated March 23, 2022, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Struktur Permodalan PPI Industri

Modal dasar PPI Industri adalah sebesar Rp1.000.000.000 yang terbagi atas 800 saham prioritas dan 200 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Kinerja PPI Industri

Ikhtisar kinerja PPI Industri selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PPI Industri Capital Structure

The authorized capital of PPI Industri is IDR1,000,000,000 which is divided into 800 priority shares and 200 ordinary shares, each with a par value of IDR1,000,000 per share.

PPI Industri's Performance

The summary of PPI Industri's performance throughout 2023 is as follows:

Uraian Description	(Dalam Juta Rupiah)	
	2023	2022
Penjualan Sales	40.792	81.452
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	38.858	72.428
Laba Kotor Gross Profit	1.934	9.024
Beban Usaha Operating Expenses	4.049	3.433
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Losses)	(2.115)	5.591
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Revenues (Expenses)		
Pendapatan Lain-Lain Other Revenues	4.399	178
Beban Lain-Lain Other Expenses	(212)	(22)
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Revenues (Expenses)	4.188	156
Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan Profit (Losses) before Taxes	2.073	5.435
Pajak Penghasilan Income Taxes	71	(1.264)
Laba (Rugi) Periode Berjalan Current Year Profit (Losses)	2.144	4.171

PT BGR LOGISTIK INDONESIA (“BLI”)

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) didirikan Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S.H., No.20 tanggal 13 Oktober 2021. Entitas menambah kepemilikan di PT TSV dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan perhitungan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta No 50 tanggal 14 Juli 2022, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia (BLI). Berbagai layanan ditawarkan BLI seperti: *Freight For- wading, Depo Container, EMKL/ PPJK, dan Trucking/ Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversivication Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Depo Con-tainer*, dan ke depan yaitu *shipping line & agency, Logistic Solution, Depo & Consolidation, Port Services & Stevedoring*.

Dalam 5 tahun ke depan, BLI diproyeksikan akan menjadi *integrated digital logistics provider* bagi induk usaha/PPI.

Saat ini BLI mempunyai dua kantor cabang, yaitu cabang Belawan & cabang Surabaya, 20 Divisi Regional; 2 UPP dan 2 Depo *Yard* yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan tersebut didukung dengan sistem penunjang yang akan bermanfaat kepada para pengguna jasa BLI, seperti:

- *Warehouse Integrated Application (WINA);*
- *Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);*
- *Depot Management and Agency (DENADA).*

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (previously known as PT Trisari Veem) was established based on notarial deed of Kurnia Ariani, S.H., No.20 dated October 13, 2021. The entity increased its ownership in PT TSV by purchasing 40% shares from PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk totaling 1,000 shares with a value of Rp1,000,000 per share so that the ownership in PT Tri Sari Veem became 99.9%. The shares have been valued at market price based on the valuation calculation conducted by Public Appraisal Services Office Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto and Partners (KJPP AMAR) through report No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 dated November 30, 2020.

Based on the latest deed of amendment by Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No. 50 dated July 14, 2022, PT Trisari Veem changed its name to PT BGR Logistik Indonesia (BLI). Various services are offered by BLI such as: *Freight Forwarding, Container Depot, EMKL / PPJK, and Trucking / Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Container Depot*, and in the future, namely *shipping line & agency, Logistic Solution, Depot & Con- solidation, Port Services & Stevedoring*.

In the next 5 years, BLI is projected to become an *integrated digital logistics provider* for the parent company/PPI.

Currently, BLI has two branch offices, namely Belawan & Surabaya branches, 20 Regional Divisions; 2 UPPs and 2 Depot Yards spread throughout Indonesia.

The service is supported by a supporting system that will benefit BLI service users, such as:

- *Warehouse Integrated Application (WINA);*
- *Fleet Integrated and Order Monitoring Applicat (FIONA);*
- *Depot Management and Agency (DENADA).*

PT BGR Logistik Indonesia (“BLI”)

Tahun Pendirian Year of Establishment	1963
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S.H., No.20 tanggal 13 Oktober 2021 Based on the Deed of Notary Kurnia Ariani, S.H., No.20 dated October 13, 2021
Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	19 November 1963 November 19, 1963
Domisili Domicile	Jakarta Utara

PT BGR Logistik Indonesia ("BLI")	
Status Status	Anak Perusahaan Subsidiary
Kegiatan Usaha Business Activities	Jasa Pengurusan Transportasi Transportation Management Services
Kepemilikan Saham Share Ownership	99,90%
Jumlah Aset Total Assets	Rp131.159.531.470 IDR131.159.531.470
Status Operasional Status of Operation	Beroperasi In operation
Alamat Address	Jl. Kalibesar Timur No. 5-7 Jakarta 11110 - Indonesia Telp: (021) 691 6666 Fax: (021) 690 3162 Email: info@bgrlogistics.id

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT BGR Logistik Indonesia tanggal 13 Desember 2021 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PT BGR Logistik Indonesia Shareholders' Meeting dated December 13, 2021, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
<ul style="list-style-type: none"> Eddi Santosa Mochamad Aswin 	<ul style="list-style-type: none"> Syailendra Energy Indra Iliana

Struktur Permodalan BLI

Modal dasar BLI adalah sebesar Rp5.000.000.000 yang terbagi atas 2 (dua) Pemegang saham yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia memiliki 2.499 lembar saham dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri memiliki 1 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

BLI Capital Structure

The authorized capital of BLI is IDR5,000,000,000 divided into 2 (two) shareholders, namely PT Perusahaan Perdagangan Indonesia owning 2,499 shares and PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri owning 1 share, with a nominal value of IDR1,000,000 per share.

Kinerja BLI

Ikhtisar kinerja BLI selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BLI's Performance

The summary of BLI's performance throughout 2023 is as follows:

Uraian Description	2023	2022
Penjualan Sales	763.406	696.082
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	615.495	551.285
Laba Kotor Gross Profit	147.911	144.797

Uraian Description	2023	2022
Beban Usaha Operating Expenses		
Beban Pemasaran Marketing Expenses	-	3.291
Beban Administrasi dan Umum Administration and General Affairs Expenses	104.523	105.602
Total Beban Usaha Total Operating Expenses	104.523	108.892
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Losses)	43.388	35.905
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Revenues (Expenses)		
Pendapatan Lain-Lain Other Revenues	10.072	8.633
Beban Lain-Lain Other Expenses	(8.054)	(5.302)
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Other Revenues (Expenses)	2.018	3.331
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	45.406	39.235
Pajak Penghasilan Income Tax Profit (Loss) For The Current Period	(22.797)	(8.625)
Laba (Rugi) Periode Berjalan Profit (Loss) for the Period	22.609	30.610
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Revenues (Expenses)	(476)	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Total Comprehensive Incomes (Losses)	22.133	30.610

Ventura Bersama

Hingga akhir 2023, PPI tidak memiliki penyertaan saham pada ventura bersama.

Joint Venture

Until the end of 2023, PPI has no equity participation in joint ventures.

Informasi Pada Website Perseroan Information on the Company's Website

PPI memiliki situs web resmi yang dapat digunakan oleh semua pihak yaitu <https://www.ptppi.co.id>.

PPI has an official website that can be accessed by all parties at <https://www.ptppi.co.id>.

Seluruh informasi yang tersaji pada laman web ditampilkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web ini dioptimalkan penggunaannya sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi mengenai PPI kepada para pemangku kepentingan eksternal.

All information presented on the website is displayed in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. This website is optimized for use as an effective communication medium to convey various information about PPI to external stakeholders.

Pada prinsipnya, pengungkapan seluruh informasi umum perusahaan pada situs web memperhatikan 4 (empat) hal utama yang wajib diungkapkan, antara lain:

1. Informasi Umum Perseroan;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

In principle, the disclosure of all general company information on the website considers 4 (four) main aspects that must be disclosed, including:

1. General Company Information;
2. Information for Shareholders or Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

Pengelola Situs Web

PPI Pengelolaan dan pemutakhiran situs web PPI dilakukan secara profesional sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 13/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pengelolaan *Website* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Direksi menunjuk Sekretaris Perusahaan dan *Senior Manager* Divisi Teknologi Informasi sebagai penanggung jawab atas pengelolaan situs web Perseroan. Perseroan juga membentuk Tim Admin Portal BUMN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/ SKD/PPI/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Admin Portal BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pemenuhan Informasi pada Situs Web PPI Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa situs web PPI telah menyajikan informasi sebagai berikut:

Website Management

PPI manages and updates the PPI website professionally as regulated in the Board of Directors Decree Number: 13/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 dated September 30, 2018, regarding Standard Operating Procedures (SOP) for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Website Management.

Based on this Decree, the Board of Directors appoints the Company Secretary and the Senior Manager of the Information Technology Division as responsible for managing the Company's website. The Company also forms the BUMN Portal Admin Team as designated through the Board of Directors Decree Number: 28/DU/SKD/PPI/III/2017 dated March 16, 2017, regarding the Establishment of the BUMN Portal Admin Team of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Information Fulfillment on PPI Website
In simple terms, it can be concluded that the PPI website has provided information as follows:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Note
Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu Information on Shareholder to the Individual End Owner	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Statements (last 5 years)	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website

Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri Industrial Association Membership

Nama Asosiasi Association	Status	Lingkup Asosiasi Scope of Association
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce	Anggota Biasa Regular Member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) Mechanical and Electrical Technics Enterprises Association	Anggota Member	Provinsi Province

Nama Asosiasi Association	Status	Lingkup Asosiasi Scope of Association
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN) Indonesian Supplier and Distributor Association	Anggota Member	Provinsi Province

Pendidikan dan Pelatihan Level Manajerial di Tahun Buku

Managerial Level Education and Training in the Financial Year

No	Judul Pelatihan Name of Training	Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Training		Jumlah Hari Total Day	Durasi (Jam) Per Orang Duration (Hour) Per Person	Nama / Peserta Name / Participant
				Mulai Begin	Akhir End			
BOD								
1	Uji Kompetensi Manajemen Risiko I Risk Management Competency Test I	Sertifikasi Certification	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body Indonesian	8 Maret 2023 March 8, 2023	08 Maret 2023 March 8, 2023	1	1,25	Wien Irwanto
2	CBDO Cohort 2 Tahun 2023 CBDO Cohort 2 in 2023	Public Training	Forum Human Capital Indonesia Human Capital Forum	11 Maret 2023 March 11, 2023	12, 16, 17, 24, 29 Maret 2023 March 12, 16, 17, 24, 29, 2023 5-6 April 2023 April 5-6, 2023	1	41,5	Andry Tanudjaja
3	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level II Level II Risk Management Competency Test	Sertifikasi Certification	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body Indonesian	15 Maret 2023 March 15, 2023	15 Maret 2023 March 15, 2023	1	1,25	Wien Irwanto
4	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level III Level III Risk Management Competency Test	Sertifikasi Certification	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body Indonesian	24 Maret 2023 March 24, 2023	24 Maret 2023 March 24, 2023	1	1,25	Wien Irwanto

No	Judul Pelatihan Name of Training	Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Training		Jumlah Hari Total Day	Durasi (Jam) Per Orang Duration (Hour) Per Person	Nama / Peserta Name / Participant
				Mulai Begin	Akhir End			
5	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level IV Risk Management Competency Test	Sertifikasi Certification	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body Indonesian	31 Maret 2023 March 31, 2023	31 Maret 2023 March 31, 2023	1	1,25	Wien Irwanto
6	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level V Level V Risk Management Competency Test	Sertifikasi Certification	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Body Indonesian	6 April 2023 April 6, 2023	6 April 2023 April 6, 2023	1	1,25	Wien Irwanto
Komite Committee								
1	<i>Certification In Audit Committee Practices (CACP)</i>	Sertifikasi Certification	iKai (Indonesian Institute of Audit Committee)	22-24 Agustus 2023 28 Agustus 2023 August 22-24 2023 August 28, 2023	22-24 Agustus 2023 28 Agustus 2023 August 22-24 2023 August 28, 2023	3	24	Helman Arif
2	<i>Certification In Audit Committee Practices (CACP)</i>	Sertifikasi Certification	iKai (Indonesian Institute of Audit Committee)	22-24 Agustus 2023 28 Agustus 2023 August 22-24 2023 August 28, 2023	22-24 Agustus 2023 28 Agustus 2023 August 22-24 2023 August 28, 2023	3	24	Reinhard Harianja
3	Wisuda CACP dan Konferensi Nasional Komite Audit Ke-2 CACP Graduation and 2nd National Audit Committee Conference	Public Training	iKai (Indonesian Institute of Audit Committee)	19 Oktober 2023 October 19, 2023	19 Oktober 2023 October 19, 2023	1	9	Helman Arif



Wilayah Operasional Operational Area

Kantor cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, membentuk jaringan bisnis yang komprehensif. Terus berkembang, Perseroan semakin memperkuat kantor-kantor cabangnya untuk mendukung operasi perdagangan, meningkatkan layanan, dan memanfaatkan peluang pasar yang sangat besar dalam industri di Indonesia.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's branch offices span across numerous key cities in Indonesia, forming its comprehensive business network. Continuously evolving, the company enhances these branches to bolster trading operations, enhance services, and tap into the immense market opportunities within Indonesia's industries.





32 Cabang di seluruh Indonesia
32 Branches throughout Indonesia



3 Stockpoint
3 Stockpoints



Negara-negara partner ekspor
Export partner countries



112.426 Mitra Warung Pangan
112.426 Warung Pangan Partners



Para pemasok dalam dan luar negeri
Domestic and foreign suppliers



14.332 Pelanggan
14.332 Customers

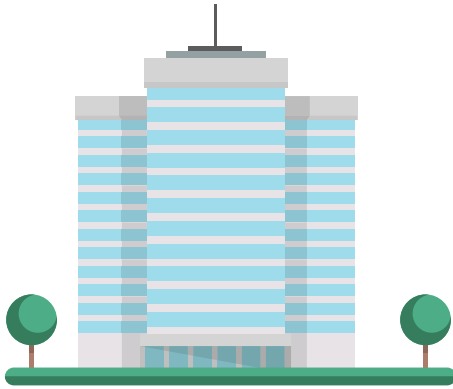


1 Cafe Covare
1 Covare Cafes



DAFTAR ALAMAT KANTOR

OFFICE ADDRESS LIST



Kantor Pusat | Head Office

Graha PPI

Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160

Telp. | Phone: (021) 3862141

Fax.: (021) 3862143

Kantor Cabang | Branch Office

No.	Nama Cabang Name Branch	Alamat Cabang Address
1	Ambon	Jl. Dr. Apituley 21/31, Maluku 97112, Telp. (0911) 344670, Fax. 343897
2	Balikpapan	Jl. Gajah Mada No. 22, Kalimantan Timur 76113, Telp. (0542) 410564, 424493, Fax. 422280
3	Banda Aceh	Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 181, Banda Aceh, 23126, Telp. (0651) 22231, 22093, 23080, Fax. 33150
4	Bandar Lampung	Jl. Jend. Sudirman No 22, Lampung 35118, Telp. (0721) 266555, 266959, Fax. 266702
5	Bandung	Jl. Jawa No.12, Babakan Ciamis, Bandung 40117, Telp. (022) 4203696, 4204024, Fax. 4204027
6	Banjarmasin	Jl.R. Soeprapto No.53, Kalimantan Selatan 70114, Telp. (0511) 3352095, 3354102, Fax. 3352442, 3354157
7	Bengkulu	Jl. A. Yani No.28, Bengkulu 38116, Telp. (0736) 21024, Fax. 22130
8	Cirebon	Jl. Kebumen no. 1, Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kata Cirebon, Jawa Barat 45111, Telp. (0231) 201153, 209765, Fax. 207368
9	Denpasar	Jl. Hayam Wuruk No. 117, Denpasar-Bali 80235, Telp. (0361) 222315, 224104, Fax. 224104
10	Gorontalo	Jl.Cendrawasih No. 12, Gorontalo 96118, Telp. (0435) 821443, 821042, Fax. 829944
11	Jakarta	Jl. Malaka No.7-9, DICE Jakarta 11230, Telp. (021) 6927519, 6928030, Fax. 6911162
12	Jambi	Jl. Pangeran Hidayat No.30C Pal V Kata Baru 36128, Telp. (0741) 43246, Fax. 40269
13	Kendari	Jl. Budi Utomo RT.08 RW.03 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kata Kendari Sulawesi Tenggara 93117, Telp. (0401) 3122425, Fax. 3122425
14	Kupang	Jl. Kakatua No.24 Bonipoi. Nusa Tenggara Timur 85221, Telp. (0380) 833617, 833294, Fax. 833294
15	Madiun	Jl. DR Sutomo No.33, Jawa Timur 63116, Telp. (0351) 452057, 454470, Fax. 495530

No.	Nama Cabang Name Branch	Alamat Cabang Address
16	Makassar	Jl. Bali No.9 Kelurahan Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar 90173, Telp. (0411) 3635421, Fax. 3635361
17	Malang	Jl. Ahmad Yani Utara No.2, Jawa Timur 65126, Telp. (0341) 485995, Fax. 491864
18	Manado	Jl. Garuda no 16 Kel. Mahakeret Barat Kec. Wenang Manado, Telp. (0431) 862066, 862366, Fax. 863221
19	Mataram	Jl. T G H Saleh Hambali no 88 Bengkel Labuapi, Lombok Barat NTB 83361, Telp/Fax. (0370) 631288
20	Medan	Jl. Badur No.3 Sumatra Utara 20151, Telp. (061) 4530933, 4156833, Fax. 4156722
21	Padang	Jl. Jend.Sudirman 37. Sumatra Barat 25215, Telp (0751) 23491, 22686, Fax. 23490
22	Palembang	Jl. Kap.A.Rivai No. 41, Sumatra Selatan 30134, Telp. (0711) 351164, 313348, Fax. 312963
23	Palu	Jl. Sungai Wera No. 4 Kel. Ujuna Kec. Palu Barat, Kode Pos 94222, Telp. (0451) 8204242, Fax. 424497
24	Pangkal Pinang	Jl. Hamidah No. 38. Taman Sari, Bangka Belitung 33121, Telp. (0717) 432557, Fax. 432779
25	Pare-Pare	Jl. Atletik No. 50 Kel. Kampung Baru. Kec.Baeukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan kode Post 91111, Telp. (0421) 25205, Fax. 25224
26	Pekanbaru	Jl. Nuri No.19 Sukajadi, Riau 26124, Telp. (0761) 25105, 22590, Fax. 853823
27	Pontianak	Jl. Kapten Marsan No. 3 Kalimantan Barat 78117, Telp. (0561) 732119, 734254, Fax. 734512
28	Purwokerto	Jl. Jend Sudirman No.347, Purwokerto 53116,Telp. (0281) 626935, 636583, Fax. 626935, 636583
29	Semarang	Jl. Mpu Tantular No. 20, Semarang, Jawa Tengah, Telp. (024) 3546161,3545481, Fax. 3511482
30	Surabaya	Jl. Rajawali No.54, Jawa Timur 60176, Telp. (031) 3520041, 3520262, Fax. 3520233
31	Surakarta	Jl. Letjend Sutoyo No.52, Jawa Tengah 57136, Telp. (0271) 852323, 852755, Fax. 852755
32	Yogyakarta	Kompleks EMPLS. PT KAI Lempuyangan, Yogyakarta 55212, Telp. (0274) 547533, Fax. 586640

Bab

04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Dalam menghadapi tantangan, seperti pelemahan ekonomi, volatilitas pasar, PPI terus berupaya untuk tumbuh menjadi perusahaan yang tangguh dan mampu menunjukkan agilitas yang strategis dalam menghadapi ketidakpastian secara efektif, yakni dengan menerapkan manajemen biaya yang proaktif.

In the face of challenges, such as economic downturns, market volatility, PPI strives to become a resilient company exhibiting strategic agility to navigate uncertainties effectively, among others, by applying proactive cost management.





Tinjauan Perekonomian Global

Global Economic Overview

Berlawanan dengan ekspektasi, pemulihan ekonomi global tahun 2023 tidak sekuat yang diantisipasi sebelumnya. IMF melaporkan tingkat pertumbuhan sekitar 3%, yang lebih rendah dari rata-rata historis dan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya.

Wilayah yang berbeda mengalami pemulihan secara berbeda. Beberapa wilayah, seperti Asia Timur dan Pasifik, mengalami pertumbuhan yang relatif kuat, sementara wilayah lain, seperti Eropa dan Asia Tengah, menghadapi tantangan yang signifikan. Ketidakseimbangan dalam laju pemulihan di seluruh wilayah menunjukkan bahwa beberapa wilayah pulih lebih cepat daripada yang lain, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat vaksinasi, kebijakan pemerintah, dan sektor-sektor yang dominan di setiap perekonomian. Perbedaan regional ini menunjukkan sifat ekonomi global yang kompleks dan saling terkait, di mana dampak dari adanya guncangan eksternal membawa akibat yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Secara keseluruhan, pernyataan IMF memberikan gambaran pemulihan global masih meragukan di tahun 2023, terlihat dari adanya perbedaan kinerja yang signifikan di seluruh wilayah dan peningkatan kerentanan terhadap guncangan eksternal.

Proyeksi dasar IMF memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dengan perkiraan penurunan dari 3,5 persen pada tahun 2022 menjadi 3,0 persen pada tahun 2023 dan lebih lanjut menjadi 2,9 persen pada tahun 2024. Trajektori ini jauh di bawah rata-rata historis sebesar 3,8 persen yang terjadi antara tahun 2000 dan 2019. Negara-negara maju kemungkinan akan mengalami perlambatan dari 2,6 persen pada tahun 2022 menjadi 1,5 persen pada tahun 2023 dan 1,4 persen pada tahun 2024, mencerminkan dampak kebijakan yang ketat.

Sebaliknya, negara berkembang dan pasar berkembang diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan yang moderat, melambat dari 4,1 persen pada tahun 2022 menjadi 4,0 persen pada tahun 2023 dan 2024. Inflasi global diharapkan menunjukkan penurunan stabil, menurun dari 8,7 persen pada tahun 2022 menjadi 6,9 persen pada tahun 2023 dan lebih lanjut menjadi 5,8 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dikaitkan dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, didukung oleh penurunan harga komoditas internasional.

Meskipun inflasi inti umumnya diharapkan menurun secara bertahap, kembalinya inflasi ke tingkat target tidak diantisipasi terjadi hingga tahun 2025 dalam kebanyakan kasus. Di tengah situasi seperti ini, dibutuhkan tindakan dan kerangka kebijakan moneter yang tepat.

Contrary to expectations, the 2023 global economic recovery wasn't as strong as initially anticipated. The IMF reports a growth rate of around 3%, which is lower than the historical average and slower than earlier forecasts.

Different regions experienced the recovery differently. Some, like East Asia and Pacific, saw relatively robust growth, while others, like Europe and Central Asia, faced significant challenges. The unevenness in the pace of recovery across regions suggests that some areas are rebounding more quickly than others, possibly influenced by factors such as vaccination rates, government policies, and the sectors dominant in each economy. This regional divergence emphasizes the complex and interconnected nature of the global economy, where the impacts of external shocks can vary significantly from one region to another. Overall, the IMF's statement paints a picture of a hesitant global recovery in 2023, with significant differences in performance across regions and increased vulnerability to external shocks.

IMF's baseline projection anticipates a deceleration in global economic growth, forecasting a decline from 3.5 percent in 2022 to 3.0 percent in 2023 and further to 2.9 percent in 2024. This trajectory falls well below the historical average of 3.8 percent observed between 2000 and 2019. Advanced economies are poised to experience a slowdown from 2.6 percent in 2022 to 1.5 percent in 2023 and 1.4 percent in 2024, reflecting the impact of tightening policies.

In contrast, emerging market and developing economies are projected to witness a modest dip in growth, easing from 4.1 percent in 2022 to 4.0 percent in both 2023 and 2024. Global inflation is expected to exhibit a steady decline, decreasing from 8.7 percent in 2022 to 6.9 percent in 2023 and further to 5.8 percent in 2024. This downward trend is attributed to a more stringent monetary policy, supported by reduced international commodity prices.

While core inflation is generally expected to decline gradually, the return of inflation to target levels is not anticipated until 2025 in most cases. Against this backdrop, the significance of monetary policy actions and frameworks becomes paramount. These measures play a crucial role

Kebijakan-kebijakan tersebut akan memainkan peran krusial dalam menstabilkan inflasi, memberikan pengaruh stabilisasi pada lanskap ekonomi global. Di saat perekonomian global memasuki fase ini, maka efektivitas dan adaptabilitas kebijakan moneter akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pemulihan ekonomi.

in anchoring inflation expectations, providing a stabilizing influence on the global economic landscape. As the global economy navigates this juncture, the effectiveness and adaptability of monetary policies will be pivotal in sustaining stability and fostering a conducive environment for economic recovery.

Tinjauan Perekonomian Nasional

National Economic Overview

Secara umum, Indonesia berhasil mengelola tantangan-tantangan ekonomi pada tahun 2023 dan mencapai hasil yang relatif jauh lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Artinya, APBN mampu bertahan di tengah tekanan dan juga mampu membantu stabilitas ekonomi nasional. Ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan dibuktikan dengan kemampuannya untuk bertahan dari guncangan eksternal dan tantangan internal, yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan alokasi sumber daya yang strategis. Ketahanan ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan, menumbuhkan kepercayaan investor, dan memastikan layanan publik yang penting tetap terjaga.

Hingga triwulan ke-3 tahun 2023, ekonomi Indonesia secara kumulatif mampu tumbuh 5,05%. Permintaan domestik dan *supply* tercatat masih kuat. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9% (ytd) dan investasi 4,2% (ytd). Sedangkan ekspor tumbuh tipis 1,1% (ytd) dan impor melemah -2,0% (ytd) imbas pelemahan ekonomi global. Sementara sisi produksi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Sektor transportasi, akomodasi, makanan dan minuman dan infokom menjadi sektor-sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sektor pertambangan juga mampu tumbuh 5,7% di tengah moderasi harga komoditas global.

Di sektor perdagangan, meskipun ekspor dan impor cenderung berada di zona negatif sejak awal 2023 akibat melemahnya perekonomian global, khususnya negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Namun, neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan kinerja positif dan mencatatkan surplus 43 bulan berturut-turut. Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari hingga November 2023 mencapai 33,63 miliar dolar Amerika Serikat.

In general, Indonesia has adeptly managed the economic hurdles of 2023, surpassing expectations with notably improved outcomes. This underscores the robustness of the State Budget (APBN) amidst pressure, highlighting its pivotal role in upholding national economic stability. The robustness of the State Budget (APBN) amidst pressure is evidenced by its ability to withstand external shocks and internal challenges, demonstrating prudent fiscal management and strategic allocation of resources. This resilience plays a crucial role in maintaining national economic stability by providing a solid foundation for sustainable growth, fostering investor confidence, and ensuring essential public services remain intact.

As of the third quarter of 2023, the national economy has shown cumulative growth of 5.05%. Both domestic demand and supply remain robust, with household consumption growing by 4.9% (YTD) and investment by 4.2% (YTD). Meanwhile, exports have seen a marginal growth of 1.1% (YTD), while imports have declined by -2.0% (YTD), influenced by the global economic downturn. While the production also exhibits commendable growth, particularly in the transportation, accommodation, food and beverage, and infocom sectors, which recorded the highest growth rates. The mining sector has also shown resilience with a growth of 5.7%, despite the moderation in global commodity prices.

In the trade sector, although exports and imports have been in the negative zone since early 2023 due to the weakening global economy, especially among Indonesia's main trading partners, Indonesia's trade balance continues to exhibit positive performance, registering a surplus for 43 consecutive months. Cumulatively, the trade balance from January to November 2023 reached USD33.63 billion.

Sementara di sektor keuangan, di tengah tekanan suku bunga yang masih sangat tinggi di 2023 walaupun inflasi global mereda, nilai tukar rupiah mampu terjaga baik dan pasar SBN mengalami tren *inflow* serta penurunan *yield*.

Inflasi Indonesia pun terkendali di level 2,61% (yoy) per Desember 2023. Jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi 2023 yang sebesar 3,6%. Inflasi *volatile food* yang menjadi kontributor utama inflasi seperti beras, cabai, dan bawang putih juga mulai menunjukkan tren menurun di Desember 2023.

Pasar SBN mengalami *inflow* hingga Rp8,75 triliun per Desember 2023. Capaian tersebut mendorong *yield* berada pada tren penurunan dalam 2 bulan terakhir. *Yield* SBN 10 tahun membaik, turun menjadi 6,74% per 13 Desember 2023. Adapun rata-rata tertimbang *Yield* SBN 10 tahun sebesar 6,68% (ytd). Sekitar hampir 100 basis poin lebih rendah dari asumsi APBN 2023 yang 7,9%. Capaian apik ini terjadi pada saat suku bunga di Amerika Serikat naik 500 basis *point* di atas 5% oleh *The Fed*. Hal ini menunjukkan *confidence* terhadap ekonomi, *currency*, dan surat berharga masih terjaga kuat. Kemampuan Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas, *confidence*, kredibilitas itu menjadi salah satu pertanda kinerja pengelolaan APBN dan ekonomi yang cukup dipercaya dan baik.

Lebih lanjut, laju ekonomi domestik masih sangat resilien yang ditunjukkan dengan berbagai indikator. Aktivitas produksi masih cukup kuat tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang terus ekspansif mencapai 52,2. Konsumsi listrik tumbuh tinggi 14% untuk bisnis dan 6,7% untuk industri. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen masih terjaga cukup tinggi mencapai 123,6. Sementara Indeks Penjualan Riil tumbuh positif mencapai 2,9%.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat tingkat pengangguran terbuka mampu ditekan ke level 5,32% per Agustus 2023 dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar 5,86%.

Pemulihan ekonomi yang menguat dan berbagai program sosial juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada 2023, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan sebelum COVID-19 yang mencapai 9,41% pada tahun 2019. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Meanwhile, in the financial sector, despite the high interest rate pressure in 2023, even as global inflation subsided, the exchange rate of the rupiah remained stable, and the government securities (SBN) market experienced inflows and a decrease in yields.

Inflation in Indonesia has been well-controlled at 2.61% (YoY) as of December 2023, significantly lower than the projected 3.6% for 2023. Inflation in volatile food items, such as rice, chili, and garlic, has also started to show a declining trend in December 2023.

The SBN market experienced inflows of up to IDR8.75 trillion as of December 2023. This achievement contributed to a downward trend in yields over the past two months. The 10-year SBN yield improved, declining to 6.74% as of December 13, 2023. The weighted average yield for the 10-year SBN stands at 6.68% (YTD), nearly 100 basis points lower than the 7.9% assumption in the 2023 State Budget. This notable achievement occurred even as the United States Federal Reserve raised interest rates by 500 basis points to over 5%. This indicates confidence in Indonesia's economy, currency, and securities remaining robust. The ability of the Indonesian government to maintain stability, confidence, and credibility serves as a significant indicator of the effective management of the State Budget (APBN) and the overall economy.

Furthermore, the domestic economic momentum remains highly resilient, reflected in various indicators. Production activities remain robust, as evident from the Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) for Indonesia, which continues its expansion, reaching 52.2. Electricity consumption has grown significantly by 14% for businesses and 6.7% for industries. On the consumption side, the Consumer Confidence Index remains relatively high at 123.6, while the Real Sales Index shows positive growth at 2.9%.

The relatively strong economic growth has contributed to an improvement in the welfare of the population. The open unemployment rate has been reduced to 5.32% as of August 2023, compared to the same period in the previous year, which was 5.86%.

The strengthening economic recovery and various social programs have also succeeded in reducing the poverty rate from 9.54% in March 2022 to 9.36% in 2023, even lower than the pre-COVID-19 level of 9.41% in 2019. Even Finance Minister Sri Mulyani Indrawati believes that the Indonesian economy in 2023 will grow at around 5%.

meyakini perekonomian Indonesia 2023 tumbuh di kisaran 5%.

Ke depannya, didukung realisasi berbagai indikator yang lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan prediksi IMF, Bank Dunia, dan konsensus *Bloomberg*.

Going forward, supported by the realization of various indicators that are better than previously expected. The economic growth projection is also in line with IMF, World Bank, and Bloomberg consensus predictions.

Prospek Usaha Business Prospect

PPI memiliki optimisme yang tinggi untuk mencapai *surplus* pada tahun 2024, yang didasarkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai lanskap ekonomi makro dan dinamika industri yang spesifik. Dengan menganalisis kondisi ekonomi makro dan mikro secara cermat, termasuk pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, dan tren ketenagakerjaan, PPI berupaya menyesuaikan strateginya untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi dan memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul.

PPI is highly optimistic about achieving a surplus in 2024, grounded in a thorough understanding of the macroeconomic landscape and specific industry dynamics. By carefully analyzing macro and micro economic conditions, including GDP growth, inflation rates, and employment trends, PPI aims to adapt its strategies to navigate potential challenges and capitalize on emerging opportunities.

Asumsi Makro 2024 Macro Assumptions 2024

Indikator Indicator	Outlook 2023	RAPBN 2024
Pertumbuhan ekonomi (% ,yoy) Economic growth (% ,yoy)	5,1	5,2
Inflasi (% ,yoy) Inflation (% ,yoy)	3,1	2,8
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Rupiah Exchange Rate (IDR/USD)	15.100	15.000
Suku Bunga (%) Interest Rate (%)	6,8	6,7
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barrel) Indonesian Crude Oil Price (USD/Barrel)	78	80
Lifting Minyak (ribu barel per hari) Oil Lifting (thousand barrels per day)	614	625
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	985	1.033

Asumsi Mikro 2024 Macro Assumptions 2024

No	Keterangan Description	Realisasi 2022 Realization 2022	Dalam Miliar Rupiah In Billions of Rupiah		
			RKAP 2023	Prognosa 2023 2023 Prognosis	RKAP 2024
1	Perdagangan Non Bahan Pokok (Rp Miliar) Description Non staple trade (IDR Billion)	653,1	903,9	586,3	853,4

Dalam Miliar Rupiah | In Billions of Rupiah

No	Keterangan Description	Realisasi 2022 Realization 2022	RKAP 2023	Prognosa 2023 2023 Prognosis	RKAP 2024
2	Perdagangan Bahan Pokok (Rp Miliar) Staple Goods Trade (IDR Billion)	440,0	286,6	231,3	432,7
3	Produk Strategis (Rp Miliar) Strategic Products (IDR Billion)	489,9	696,8	661,9	554,6
4	Produk Penjualan Ekspor (Rp Miliar) Export Sales Products (IDR Billion)	8,9	89,4	40,2	78,6
5	Transisi Bisnis (Rp Miliar) Business Transition (IDR Billion)	79,2	113,1	29,4	71,1
6	Anak Perusahaan (Rp Miliar) Subsidiaries (IDR Billion)	696,6	792,0	792,5	963,0

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

Segmentasi produk PPI mencakup beragam sektor, yang mencerminkan jangkauan pasar yang luas dan fleksibilitas. Dari pertanian hingga barang konsumsi, bahan kimia hingga komoditas ekspor-impor, dan bahkan solusi dan logistik terintegrasi limbah, penawaran PPI melayani berbagai industri dan kebutuhan. Cakupan produk yang luas ini menggarisbawahi komitmen PPI untuk menyediakan solusi dan layanan yang komprehensif di berbagai sektor ekonomi.

Secara garis besar, PPI mengelompokkan segmen usaha berdasarkan:

- Perdagangan Non Bahan Pokok;
- Perdagangan Bahan Pokok;
- Produk Strategis;
- Produk Penjualan Ekspor;
- Transisi Bisnis; dan,
- Anak Perusahaan.

Di antara beragam segmen bisnis PPI, terdapat beberapa produk yang sangat terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi global dan situasi geopolitik, karena harganya sensitif terhadap perubahan permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian internasional. Beberapa produk, terutama yang bergantung pada rantai pasokan global, rentan terhadap gangguan yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan atau konflik geopolitik, yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi.

PPI's product segmentation encompasses a diverse array of sectors, reflecting its extensive market reach and versatility. From agriculture to consumer goods, chemicals to import-export commodities, and even waste integrated solutions and logistics, PPI's offerings cater to a wide range of industries and needs. This breadth of product coverage underscores PPI's commitment to providing comprehensive solutions and services across various sectors of the economy.

Broadly speaking, PPI categorizes its business segments based on:

- Non-Staple Trade;
- Staple Trade;
- Staple Trade;
- Export Sales Products;
- Business Transition;
- Subsidiary Company.

Among PPI's diverse business segments, there are several products that are highly affected by global economic fluctuations and geopolitical situations, as their prices are sensitive to changes in demand and supply influenced by international events. Some products, particularly those reliant on global supply chains, are vulnerable to disruptions caused by trade tensions or geopolitical conflicts, which can affect production and distribution.

Beberapa peristiwa paling signifikan dengan konsekuensi ekonomi yang meluas termasuk Perang Rusia-Ukraina, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan krisis energi. Peristiwa-peristiwa ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling berinteraksi dan menambah efek satu sama lain, menciptakan lingkungan yang kompleks dan menantang bagi ekonomi global. Dampak penuh dari peristiwa-peristiwa ini masih berlangsung, dan konsekuensi jangka panjangnya masih harus dilihat.

Lonjakan harga pupuk secara global sejalan dengan meningkatnya biaya gas alam di seluruh dunia, yang secara langsung berdampak pada harga dan aksesibilitas bahan baku yang penting untuk pembuatan pupuk PIHC. Peningkatan biaya ini dapat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi industri pertanian yang bergantung pada pupuk ini, yang berpotensi mempengaruhi hasil panen dan produksi pangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemantauan yang cermat dan manajemen strategis terhadap fluktuasi harga ini sangat penting untuk memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan.

Berikut ialah uraian kinerja masing-masing segmen usaha Perseroan:

Some of the most significant events with widespread economic consequences include the Russia-Ukraine War, economic slowdown in China, and energy crisis. These events didn't operate in isolation. They interacted and compounded each other's effects, creating a complex and challenging environment for the global economy. The full impact of these events is still unfolding, and their long-term consequences remain to be seen.

The global surge in fertilizer prices corresponds to the escalating costs of natural gas worldwide, directly impacting both the pricing and accessibility of raw materials essential for PIHC fertilizer manufacturing. This increase in costs can pose significant challenges for agricultural industries reliant on these fertilizers, potentially affecting crop yields and overall food production. As a result, careful monitoring and strategic management of these price fluctuations are crucial to ensure sustainable agricultural practices and food security.

The following is a description of the performance of each of the Company's business segments:

Pendapatan per Segmen Usaha | Revenue per Business Segment

Dalam Miliar Rupiah | In Million Rupiah

Komoditi Commodity	2023			2022		
	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%
Perdagangan Non Bahan Pokok Non-Staple Trade	559,1	35,5	6,3%	653,1	39,9	6,1%
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	329,5	12,4	3,8%	391,1	11,6	3,0%
Pupuk Non Subsidi Non-subsidized Fertilizer	73,4	3,7	5,1%	87,2	6,0	6,9%
Pertisida Dharmabrand Dharmabrand Pesticides	26,1	9,6	36,7%	31,3	10,8	34,6%
Pestisida Non-Dharmabrand Non-Dharmabrand Pesticides	5,0	0,5	10,0%	8,3	0,6	7,7%
Produk dan Alat Pertanian Agricultural Products and Equipment	4,9	0,3	5,7%	1,1	0,0	1,3%
Farmasi dan Alkes Pharmaceuticals and Medical Devices	31,9	4,0	12,6%	53,8	5,9	11,0%
Bahan Kimia Non B2 Non Hazardous Chemicals	74,1	4,2	5,7%	69,8	4,5	6,5%
Bahan Bangunan Building Materials	14,1	0,7	5,1%	10,5	0,5	4,7%

Dalam Miliar Rupiah | In Million Rupiah

Komoditi Commodity	2023			2022		
	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Omzet Sales	Laba Kotor Gross Profit	%
Perdagangan Bahan Pokok Staple Trade	332,2	23,7	7,1%	439,9	30,1	6,8%
Produk Pangan dan Bahan Pokok Food and Staple Products	237,5	17,0	7,2%	349,4	25,5	7,3%
Produk Konsumsi Consumer Products	94,7	6,6	7,0%	90,5	4,6	5,1%
Produk Strategis Strategic Products	605,4	81,0	13,4%	489,9	141,2	28,8%
Produk Pangan dan Hortikultura Food and Horticultural Products	367,9	20,4	5,5%	119,6	22,6	18,9%
Non Pangan Non-Food	237,5	60,6	25,5%	370,3	118,6	32,0%
Produk Penjualan Ekspor Export Sales Products	7,8	0,1	1,1%	8,9	0,3	3,8%
Ekspor Export	7,8	0,1	1,1%	8,9	0,3	3,8%
Transisi Bisnis Business Transition	26,7	20,9	78,2%	79,2	26,3	33,2%
Property Property	25,9	20,8	80,4%	45,0	22,3	49,5%
WIS	0,8	0,1	9,1%	34,2	4,0	11,8%
Anak Perusahaan Subsidiary Company	758,1	141,2	18,6%	696,6	159,8	22,9%
TOTAL	2.289,3	302,3	13,2%	2.367,5	397,7	16,8%

A. PERDAGANGAN BAHAN POKOK

Kontributor terbesar pada pendapatan dan laba kotor perdagangan bahan pokok adalah produk pangan dan bahan pokok, dengan kontribusi pendapatan masing-masing 72% dan 73% untuk laba kotor.

Apabila dibandingkan targetnya, maka realisasi penjualan Perdagangan Bahan Pokok 2023 mencapai 101,5% dari targetnya. Sementara jika dibandingkan dengan periode 2022, pencapaian pendapatan adalah sebesar 75,5%.

Untuk lebih detail, faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian dari tiap komoditi tersebut adalah:

- 1) Produk Pangan dan Bahan Pokok
Produk minyak goreng curah terdapat dalam kategori produk pangan dan bahan pokok dengan pendapatan sebesar Rp237,5 milyar yang mampu memberikan kontribusi terbesar.

A. TRADE OF STAPLE GOODS

The largest contributors to revenue and gross profit in the trade of staple goods are food products and staple goods, contributing 72% to revenue and 73% to gross profit, respectively.

When compared to the target, the realization of sales for the Trade of Staple Goods in 2023 reached 101.5% of the target. Meanwhile, compared to the 2022 period, the revenue achievement was 75.5%.

In more detail, the main factors influencing the performance of each commodity are:

- 1) Food Products and Staple Goods
The bulk cooking oil product is categorized under food products and staple goods. With revenue of IDR237.5 billion, it contributed the most.

- 2) Produk Konsumsi
Produk unilever merupakan produk yang memiliki omset sebesar Rp94,66 Miliar.

- 2) Consumer Products
Unilever products generated a turnover of IDR94.66 billion.

B. PERDAGANGAN NON-BAHAN POKOK

Kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari perdagangan non bahan pokok adalah pupuk subsidi, dengan pendapatan sebesar 59% dan kontribusi laba kotor 35% dari total laba kotor produk non bahan pokok.

Secara total dari perdagangan non bahan pokok, realisasi target pendapatan periode berjalan sebesar 66,1% dan laba kotor 61,0%. Namun jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, pencapaian pendapatan sebesar 85,6% dan laba kotor sebesar 88,9%.

Untuk lebih detail, faktor terbear yang mempengaruhi pencapaian dari tiap komoditi tersebut adalah:

1. Pupuk Subsidi
Pupuk subsidi mencapai 94,3% dari target tahun 2023, hal ini dikarenakan penjualan pupuk subsidi mendekati RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang telah diselaraskan dengan alokasi dari Pupuk Indonesia.
2. Pupuk Non-Subsidi
Secara umum, pendapatan pupuk non-subsidi mencapai 37,8% dari target RKAP periode berjalan.
3. Dharmabrand
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan komoditi pada 2023 antara lain:
 - a. Masuknya produk baru pada komoditi pestisida dengan formulasi yang sama dengan harga yang lebih kompetitif.
 - b. Penurunan harga komoditi di pasar yang berbanding terbalik dengan kenaikan harga bahan aktif pestisida Dharmabrand;
 - c. Kegiatan promosi, optimalisasi rantai pasok, penataan pola perdagangan, dan *product knowledge* kepada salesman belum secara optimal dilakukan;
4. Farmasi & Alat Kesehatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan komoditi pada 2023 adalah *selective customer* produk farmasi untuk menjaga *cash flow*. Tempo pembayaran pelanggan komoditi farmasi dan alat kesehatan cukup lama (*term of payment* ±90 hari) sehingga menjadi mitigasi di PPI untuk mengantisipasi risiko piutang yang berpengaruh pada ketersediaan modal kerja;

B. TRADE OF NON-STAPLE GOODS

The largest contributors to revenue and gross profit from the trade of non-staple goods are subsidized fertilizers, with revenue accounting for 59% and contributing 35% to the total gross profit of non-staple goods.

Overall, the realization of revenue targets for non-essential goods in the current period was 66.1%, and gross profit was 61.0%. However, compared to the previous year, revenue achievement was 85.6%, and gross profit was 88.9%.

In more detail, the main factors influencing the performance of each commodity are:

1. Subsidized Fertilizers
Subsidized fertilizers reached 94.3% of the 2023 target, driven by sales nearing the RDKK (Definitive Plan for Group Needs), which was aligned with the allocation from Pupuk Indonesia.
2. Non-Subsidized Fertilizers
Generally, revenue from non-subsidized fertilizers reached 37.8% of the RKAP target for the current period.
3. Dharmabrand
Factors affecting commodity sales performance in 2023 include:
 - a. The introduction of new products in the pesticide commodity with the same formulation at more competitive prices.
 - b. A decrease in market commodity prices, contrasting with an increase in Dharmabrand pesticide active ingredient prices.
 - c. Promotional activities, supply chain optimization, trade pattern organization, and product knowledge training for salesmen were not optimally implemented.
4. Pharmaceuticals & Medical Equipment
Factors affecting commodity sales performance in 2023 include selective customer targeting for pharmaceutical products to maintain cash flow. The payment term for pharmaceutical and medical equipment customers is quite long (approximately ±90 days), which PPI mitigates to anticipate receivables risk affecting working capital availability.

5. Produk Non Pangan Lainnya
Sinergi untuk komoditi retail dengan kluster pangan masih dalam proses optimalisasi, PPI berencana membuka *Cave Covare* di Waskita Rajawali Tower sebagai representasi kehadiran produk PPI di ID Food.

C. PRODUK STRATEGIS

Kontributor pendapatan dan laba kotor terbesar dari produk strategis adalah dari Produk Pangan dan Hortikultura yaitu kontribusi pendapatan sebesar 61% dan laba kotor sebesar 25%. Apabila dibandingkan targetnya, maka realisasi Produk Strategis 2023 tercapai 84,8% dari targetnya. Sementara jika dibandingkan dengan periode 2022, pencapaian pendapatan meningkat signifikan sebesar sebesar 123,6%.

Faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi pencapaian Produk Strategis adalah:

1. Bahan Kimia
Produk bahan kimia merupakan salah satu produk inti yang memiliki kontribusi besar di PPI, namun cukup terpengaruh dari waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) mengingat karakteristiknya yang merupakan produk teregulasi. Selain itu, kondisi makroekonomi dan geopolitik global juga memiliki pengaruh pada ketersediaan dan harga mengingat produk tersebut didapatkan melalui impor.
2. Produk Impor
Pencapaian realisasi Gula Impor telah direalisasikan pada 2023 senilai Rp323,34 Miliar, disamping itu pencapaian impor beras ketan telah terealisasi sebesar Rp6,06 Miliar.

D. EKSPOR

Pencapaian target ekspor masih belum maksimal dikarenakan: penyiapan infrastruktur berupa gudang penampung rumput laut kering, terjadi pembatasan uang keluar yang mempengaruhi transaksi perdagangan dari negara buyer, sinergi kluster pangan belum maksimal, selain hal tersebut bisnis ekspor juga terpengaruh dari faktor makroekonomi yang menyebabkan peningkatan kurs, faktor geopolitik yang menyebabkan peningkatan biaya *international shipping*.

Di luar perdagangan produk ekspor, PPI juga melaksanakan imbal beli yang masih terkendala proses negosiasi harga dengan Badan Pelaksana negara Mexico dan Turki karena harga produk yang cukup tinggi dan biaya logistik yang cukup mahal sehingga harga jual di retail menjadi di atas harga kompetitor.

5. Other Non-Food Products

The synergy for retail commodities with the food cluster is still in the optimization process. PPI plans to open *Cave Covare* in Waskita Rajawali Tower as a representation of PPI products' presence in ID Food.

C. STRATEGIC PRODUCTS

The largest contributors to revenue and gross profit from strategic products are Food and Horticulture Products, with revenue contributing 61% and gross profit contributing 25%. When compared to the target, the realization of Strategic Products in 2023 reached 84.8% of the target. Meanwhile, compared to the 2022 period, revenue achievement increased significantly by 123.6%.

The main factors influencing the performance of Strategic Products are:

1. Chemical Products
Chemical products are one of the core products that significantly contribute to PPI. However, their performance is somewhat affected by the timing of the issuance of Import Approval Letters (SPI) due to their regulated nature. Additionally, global macroeconomic and geopolitical conditions influence availability and pricing since these products are obtained through imports.
2. Imported Products
The realization of imported sugar reached IDR323.34 billion in 2023. Additionally, the realization of imported glutinous rice amounted to IDR6.06 billion.

D. EXPORT

The achievement of export targets has not been optimal due to several factors: the preparation of infrastructure such as warehouses for storing dried seaweed, restrictions on outgoing funds affecting trade transactions from buyer countries, and the synergy within the food cluster has not been maximized. Additionally, the export business is impacted by macroeconomic factors causing currency fluctuations, geopolitical factors leading to increased international shipping costs.

Beyond trading export products, PPI also engages in countertrade, which has faced challenges in price negotiations with the implementation bodies in Mexico and Turkey. This is due to high product prices and expensive logistics costs, resulting in retail prices being higher than those of competitors.

E. TRANSISI BISNIS

1. PMO Properti

Secara garis besar, realisasi program kerja dalam rangka optimalisasi aset pada tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Target Perpanjangan Sertifikat (Sertifikat Hidup) sebanyak 5 titik;
- b. Pembaharuan Sertifikat (Sertifikat Mati) sebanyak 19 titik;
- c. Target pengosongan aset 13 titik;
- d. Target Litigasi aset 3 titik;
- e. Target pelepasan aset 2 titik.

Progres optimalisasi aset tetap khususnya terhadap 2 titik aset potensial sudah mulai dirintis pada tahun 2018, semuanya masih dalam *progress* penyelesaian.

Progress Komersialisasi aset tetap tahun 2023 ditargetkan 168 titik aset potensial, dimana dalam triwulan keempat target terselesaikan.

2. PMO WIS

Untuk *project* yang berjalan, saat ini kami telah menyelesaikan *project unit Dieng area Well Pad 12, Geodipa Energy*.

F. KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2023, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak usaha yakni, PT PPI Industri (dahulu PT Dharma Niaga Putera Steel) dan PT BGR Logistik Indonesia (dahulu PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

Kegiatan usaha PT PPI Industri adalah perindustrian umum dalam bidang pembuatan seng dan bahan bangunan lainnya; perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, tidak terbatas pada pengadaan bahan baku dan perdagangan hasil produksi seng. Dalam perjalanannya, dikarenakan terkendala permodalan dan peralatan produksi yang sudah rusak, serta sebagai salah satu implementasi strategi refocussing bisnis PPI, maka pada saat ini perseroan telah mengaktifkan kembali PT PPI Industri sebagai distributor bahan kimia.

E. BUSINESS TRANSITION

1. Property PMO

Overall, the realization of work programs aimed at asset optimization in 2023 can be outlined as follows:

- a. Target for Certificate Renewal (Active Certificates) at 5 locations.
- b. Renewal of Certificates (Expired Certificates) at 19 locations.
- c. Target for asset evacuation at 13 locations.
- d. Target for asset litigation at 3 locations.
- e. Target for asset disposal at 2 locations.

The progress of asset optimization, especially for 2 potential assets, began in 2018 and is still in the process of being completed.

The progress of the commercialization of fixed assets in 2023 targets 168 potential asset points, with the aim of completion in the fourth quarter.

2. WIS PMO

For ongoing projects, we have completed the project for the Dieng area Well Pad 12, Geodipa Energy.

F. SUBSIDIARY PERFORMANCE

As of December 31, 2023, PPI has 2 (two) subsidiary entities, namely, PT PPI Industri (formerly PT Dharma Niaga Putera Steel) and PT BGR Logistik Indonesia (formerly PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

The business activities of PT PPI Industri include general industry in the field of zinc manufacturing and other building materials; trading related to industrial activities, including but not limited to the procurement of raw materials and trading of zinc production. Along the way, due to capital constraints and production equipment that has been damaged, as well as as one of the implementations of PPI's business refocussing strategy, the company has currently reactivated PT PPI Industri as a chemical distributor.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan pengurusan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan beban angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan barang-barang sampai dengan diterima oleh pemilik.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia was established with the intention and purpose to engage in the business of transportation services (*freight forwarding*), which includes activities such as receiving, storing, sorting, packaging, labeling, measuring, weighing, document management, issuance of transport documents, calculation of transportation charges, insurance claims for shipped goods, and settlement of goods invoices until accepted by the owner.

Kinerja Entitas Anak Performance of Subsidiaries Entity

dalam miliar Rp | in billions of IDR

Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Pendapatan Revenues					
PT BGR Logistik Indonesia	9,67	67.324	763.406	696.082	58.400
PT PPI Industri	(49,91)	(40.660)	40.792	81.452	68.682
Total	3,42	26.664	804.198	777.534	127.082
Laba Kotor Gross Profits					
PT BGR Logistik Indonesia	2,15	3.114	147.911	144.797	16.035
PT PPI Industri	(78,56)	(7.090)	1.934	9.024	7.762
Total	(2,58)	(3.976)	149.845	153.821	23.797

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review to be outlined in this section pertains to the Financial Statements for the years ended on December 31, 2023, and 2022.

These Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with the opinion that the Company's consolidated financial statements have been fairly presented, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Pada tahun 2023, PPI berhasil mencatat jumlah Aset sebesar Rp4.621,16 miliar, meningkat tipis 0,78% dari Rp4.585,37 miliar di tahun sebelumnya. Sementara, Liabilitas menurun tipis 1,57% dari Rp1.749,76 miliar di tahun 2022 menjadi Rp1.722,22 miliar di tahun 2023. Ekuitas Perusahaan meningkat tipis 2,23% dari Rp2.835,60 miliar di tahun 2022 menjadi Rp2.898,94 miliar di tahun 2023.

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

In 2023, PPI managed to record Total Assets amounting to Rp4,621.16 billion, a slight increase of 0.78% from IDR4,585.37 billion in the previous year. Meanwhile, the total Liabilities decreased slightly by 1.57% from IDR1,749.76 billion in 2022 to IDR1,722.22 billion in 2023. The Company's Equity increased slightly by 2.23% from IDR2,835.60 billion in 2022 to IDR2,898.94 billion in 2023.

Laporan Posisi Keuangan | Statements of Financial Position

dalam miliar Rp | in billions of IDR

Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Aset Lancar Current Assets	(9,50)	(93,54)	890,88	984,42	823,27
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3,59	129,34	3.730,28	3.600,95	3.587,75
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	0,78	35,80	4.621,16	4.585,37	4.411,02
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	(3,06)	(23,12)	731,23	754,35	616,10
Jumlah Aset Total Assets	(0,44)	(4,42)	990,99	995,41	1.007,48
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	(1,57)	(27,54)	1.722,22	1.749,76	1.623,58
Jumlah Ekuitas Total Equities	2,23	63,34	2.898,94	2.835,60	2.787,44
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equities	0,78	35,80	4.621,16	4.585,37	4.411,02

ASET

Pada tahun 2023, PPI membukukan aset sebesar Rp4.621,16 miliar, meningkat tipis 0,78% dari Rp4.585,37 miliar di tahun sebelumnya. Aset lancar menurun 9,50% dari Rp984,42 miliar menjadi Rp890,88 miliar. Namun penurunan ini terkompensasi oleh peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar 3,59%. Walaupun secara prosentase tipis, namun secara nominal peningkatannya lebih besar dari jumlah nominal penurunan Aset Lancar. Detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

ASSETS

In 2023, PPI recorded assets amounting to IDR4,621.16 billion, a slight increase of 0.78% from IDR4,585.37 billion in the previous year. Current assets decreased by 9.50% from IDR984.42 billion to IDR890.88 billion. However, this decrease was compensated by a 3.59% increase in Non-Current Assets. Although the increase in percentage terms is marginal, in nominal terms, it exceeds the nominal decrease in Current Assets. Details can be seen in the table below:

Aset | Assets

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

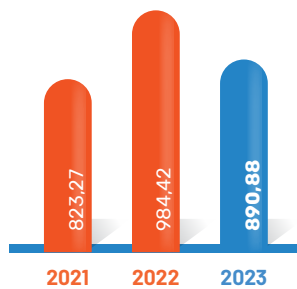
Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	(65,43)	(118,71)	62,71	181,42	173,06
Deposito Berjangka Time Deposit	-	-	-	3,00	21,83
Piutang usaha—bersih Operating receivables—net					
• Pihak Berelasi Related Parties	33,20	51,69	207,38	155,70	182,49
• Pihak Ketiga Third Parties	(12,04)	33,18	242,41	275,59	158,85
• Piutang Lain-Lain Other Receivables	(16,01)	(9,76)	51,21	60,97	62,74
Persediaan Inventories	16,81	16,31	113,34	97,03	74,52
Uang Muka Advances	6,24	7,10	120,96	113,86	53,03
Pajak Dibayar Di muka Prepaid Taxes	13,53	7,56	63,40	55,84	30,67
Biaya Dibayar Di muka Prepaid Expenses	(19,15)	(2,50)	10,54	13,03	36,34
Biaya Operasi dalam Proses Operation Costs in Process	(32,34)	(9,05)	18,93	27,98	29,75
Aset Lancar Current Assets	(9,50)	(93,54)	890,88	984,42	823,27
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	(10,18)	(0,85)	7,52	8,37	10,42
Aset Tetap Fixed Assets	(2,15)	(42,05)	1.917,94	1.960,00	2.124,50
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	(5,41)	(1,07)	18,64	19,71	19,52
Properti Investasi Investment Properties	14,64	164,18	1.285,46	1.121,28	935,87
Aset Hak Guna Right of Use Assets	166,64	12,24	19,58	7,34	0,48

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

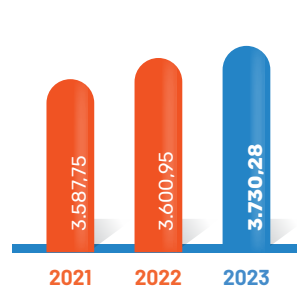
Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	(4,99)	(1,84)	34,97	36,80	37,47
Aset Lain-lain Other Assets	(0,29)	(1,28)	446.168	447.446	459,21
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3,59	129,34	3.730,28	3.600,95	3.587,75
Jumlah Aset Total Assets	(18,65)	(855,08)	3.730,28	4.585,37	4.411,02

Aset Lancar / Current Assets

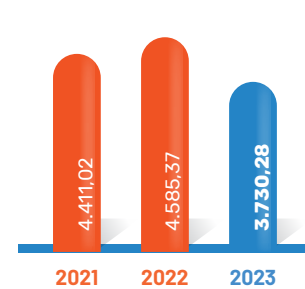
dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

**Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets**

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

**Jumlah Aset / Total Assets**

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah

**ASET LANCAR**

Pada akhir tahun 2023, Aset Lancar Perusahaan turun 9,50% dari Rp984,42 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp890,88 miliar. Penurunan ini terjadi terutama karena adanya penurunan pada Kas dan Setara Kas, dari Rp181,42 miliar di tahun 2022 menjadi Rp62,71 miliar. Atau turun 65,43%.

ASET TIDAK LANCAR

Sebaliknya, Aset tidak Lancar Perusahaan naik 3,59%, dari Rp3.600,95 miliar di tahun 2022 menjadi Rp 3.730,28 miliar di tahun 2023. Peningkatan ini terjadi terutama karena adanya peningkatan pada Properti Investasi sebesar 14,64%, dari Rp1.121,28 miliar di tahun 2022 menjadi Rp1.285,46 miliar di tahun 2023.

LIABILITAS

Liabilitas Perusahaan turun 1,57%, dari Rp1.749,76 miliar di tahun 2022 menjadi Rp1.722,22 miliar di tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan Liabilitas Jangka Pendek (3,06%), maupun Liabilitas Jangka Panjang (88,34%).

CURRENT ASSETS

At the end of 2023, the Company's Current Assets decreased by 9.50% from IDR984.42 billion in the previous year to IDR890.88 billion. This decrease mainly occurred due to a decline in Cash and Cash Equivalents, from IDR181.42 billion in 2022 to IDR62.71 billion, marking a decrease of 65.43%.

NON-CURRENT ASSETS

Conversely, the Company's Non-Current Assets increased by 3.59%, from IDR3,600.95 billion in 2022 to IDR3,730.28 billion in 2023. This increase primarily resulted from a rise in Investment Properties by 14.64%, from IDR1,121.28 billion in 2022 to IDR1,285.46 billion in 2023.

LIABILITIES

The Company's liabilities decreased by 1.57%, from IDR1,749.76 billion in 2022 to IDR1,722.22 billion in 2023. This decrease occurred due to a decrease in Short-Term Liabilities (3.06%), as well as Long-Term Liabilities (88.34%).

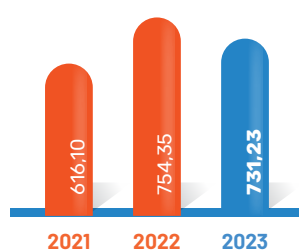
Liabilitas | Liabilities

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Utang Usaha Trade Payable					
• Pihak Berelasi Related Parties	34,67	18,07	70,19	52,12	29,65
• Pihak Ketiga Third Parties	(39,47)	(120,46)	184,73	305,19	180,30
Utang Pajak Tax Payables	162,04	11,44	18,50	7,06	16,46
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities	(19,61)	(7,57)	31,03	38,60	57,88
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	(42,42)	(0,28)	0,38	0,66	0,06
Beban Yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	19,43	13,41	82,41	69,00	59,44
Pendapatan Diterima Di Muka Unearned Revenues	(16,589)	(13,9)	69,95	83,85	102,81
Utang Bank – Jangka Pendek Short Term Bank Loan	48,81	84,83	258,63	173,80	143,37
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Current Portion of Long-Term Liabilities	(35,91)	(8,64)	15,42	24,06	26,15
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	(3,06)	(23,12)	731,23	754,35	616,10
Utang Jangka Panjang Long Term Payables	(0,74)	(6,77)	907,07	913,84	938,09
Liabilitas sewa Lease liabilities	-	-	-	54,42	2,01
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits Liabilities	(55,58)	(21,56)	17,23	38,79	50,15
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	(8,87)	(88,34)	907,07	995,41	990,25
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	(1,57)	(27,54)	1.722,22	1.749,76	1.505,74

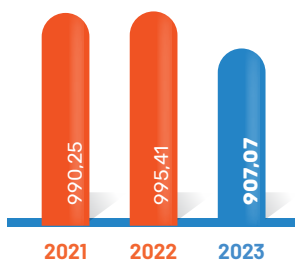
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



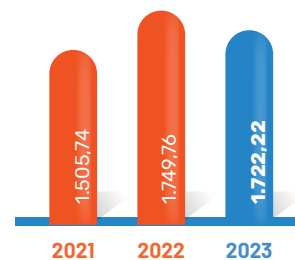
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



Jumlah Liabilitas / Total Liabilities

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan turun 3,06%, dari Rp754,35 miliar di tahun 2022 menjadi Rp731,23 miliar di tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan Utang Usaha pada Pihak Ketiga sebesar 39,47%, dari Rp305,19 miliar di tahun 2022 menjadi Rp184,73 miliar di tahun 2023.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan turun 8,87%, dari Rp995,41 miliar di tahun 2022 menjadi Rp907,07 miliar di tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja sebesar 55,58% dari Rp38,79 miliar di tahun 2022 menjadi Rp17,23 miliar di tahun 2023.

EKUITAS

PPI mencatat kenaikan ekuitas sebesar 63,34% dari Rp2.835,60 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.898,94 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh naiknya Saldo Laba yang Belum ditentukan Penggunaannya.

CURRENT LIABILITIES

The Company's Short-Term Liabilities decreased by 3.06%, from IDR754.35 billion in 2022 to IDR731.23 billion in 2023. This decrease occurred due to a decrease in Accounts Payable to Third Parties by 39.47%, from IDR305.19 billion in 2022 to IDR184.73 billion in 2023.

NON-CURRENT LIABILITIES

The Company's Long-Term Liabilities decreased by 8.87%, from IDR995.41 billion in 2022 to IDR907.07 billion in 2023. This decrease occurred due to a 55.58% decrease in post-employment benefits liabilities from IDR38.79 billion in 2022 to IDR17.23 billion in 2023.

EQUITY

PPI recorded a 63.34% increase in equity from IDR2,835.60 billion in 2022 to IDR2,898.94 billion in 2023. This increase was driven by the increase in Unappropriated Retained Earnings.

Ekuitas | Equity

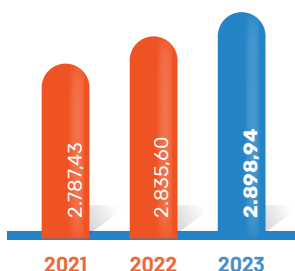
Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Modal Saham Share Capital	0	0	942,74	942,74	942,74
Selisih dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Difference from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control	0	0	(231,04)	(231,04)	(231,04)
Saldo Laba Retained Earnings					
• Telah ditentukan penggunaannya Appropriated					
• Cadangan Umum General Reserves	0	0	111,89	111,89	111,89
• Cadangan Khusus Specific Reserves	0	0	1,53	1,53	1,53
Belum ditentukan Penggunaannya Unappropriated	3,15	63,33	2.073,77	2.010,44	1.962,31
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Total equity attributable to owner of the Entity	2,23	63,34	2.898,90	2.835,56	2.787,43
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	0	0	0,04	0,04	0,00
Jumlah Ekuitas Total Equity	2,23	63,34	2.898,94	2.835,60	2.787,43

dalam miliar Rp | in billions of IDR

Jumlah Ekuitas /

Total Equity

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



ANALISIS LABA RUGI PROFIT

PPI mencatat penurunan Pendapatan Usaha sebesar 3,30% dari Rp2.367,52 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.289,29 miliar pada tahun 2023. Sementara Beban Pokok Pendapatan meningkat tipis 0,87%, dari Rp1.969,87 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1.986,95 miliar pada tahun 2023.

Akibatnya, terjadi penurunan cukup signifikan pada Laba Kotor Perusahaan pada 2023, yakni sebesar 23,97% dari Rp397,65 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp302,34 miliar pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat Rugi Usaha sebesar Rp33,57 miliar, turun 141,41% setelah tahun sebelumnya yang mencatat laba sebesar Rp81,07 miliar. Hal ini membuat Perusahaan mencatat penurunan 59,77% pada Laba (Rugi) Sebelum Pajak, yakni dari Rp75,86 miliar di tahun 2022 menjadi Rp30,52 miliar di tahun 2023.

Beban Pajak Penghasilan menurun 48,38% dari Rp26,77 miliar di tahun 2022 menjadi Rp13,82 miliar di tahun 2023. Hal ini membuat Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp16,70 miliar. Turun 65,98% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp49,09 miliar.

PROFIT AND LOSS ANALYSIS

PPI recorded a 3.30% decrease in operating revenue from IDR2,367.52 billion in 2022 to IDR2,289.29 billion in 2023. Meanwhile, Cost of Revenue increased slightly by 0.87%, from IDR1,969.87 billion in 2022 to IDR1,986.95 billion in 2023.

As a result, there was a significant decrease in the Company's Gross Profit in 2023, which amounted to 23.97% from IDR397.65 billion in 2022 to IDR302.34 billion in 2023.

In 2023, the Company recorded an Operating Loss of IDR33.57 billion, a 141.41% decrease from the previous year which recorded a profit of IDR81.07 billion. This led the Company to record a 59.77% decrease in Profit (Loss) Before Tax, from IDR75.86 billion in 2022 to IDR30.52 billion in 2023.

Income Tax Expense decreased by 48.38% from IDR26.77 billion in 2022 to IDR13.82 billion in 2023. This made the Net Profit (Loss) for the Year in 2023 recorded at IDR16.70 billion. A decrease of 65.98% from the previous year which was recorded at IDR49.09 billion.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Incomes Statement and Other Comprehensive Income

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Pendapatan usaha Operating Revenues	(3,30)	(78,23)	2.289,29	2.367,52	1.938,82

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

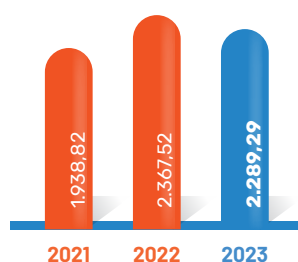
Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Beban Pokok Pendapatan Cost of Goods Sold	0,87	(17,08)	(1.986,95)	(1.969,87)	(1.672,57)
Laba Kotor Gross Profit	(23,97)	(95,31)	302,34	397,65	266,25
Beban Penjualan dan Distribusi Distribution and Selling Expenses	(14,06)	2,21	(13,51)	(15,72)	(16,21)
Beban Umum dan Administrasi General and Administration Expenses	7,16	(21,53)	(322,40)	(300,87)	(378,89)
Beban Usaha Operating Expenses	6,11	(19,33)	(335,91)	(316,58)	(395,10)
Laba (Rugi) Usaha Operating Incomes (Losses)	(141,41)	(114,64)	(33,57)	81,07	(128,85)
Pendapatan Non-Usaha Non-Operating Incomes	216,08	130,73	191,23	60,50	8,74
Beban Non-Usaha Non-Operating Expenses	93,49	(61,43)	(127,14)	(65,71)	(57,84)
Pendapatan (Beban) Non-Usaha – Bersih Non-Operating Incomes (Expenses) – Net	(1332,50)	69,29	64,09	(5,20)	(49,09)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Incomes (Losses) Before Tax	(59,77)	(45,34)	30,52	75,86	(177,94)
Pajak Final Final Tax	4,08	(0,67)	(17,11)	(16,44)	(15,24)
Pajak Kini Current Tax	(11,07)	1	(8,03)	(9,03)	(2,03)
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(970,77)	12,62	11,32	(1,30)	49,91
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak Total Tax Benefits (Expenses)	(48,38)	12,95	(13,82)	(26,77)	32,65
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) For Current Year	(65,98)	(32,39)	16,70	49,09	(145,29)
Program Imbalan Pasti Defined Benefit Program	(180,32)	19,42	8,65	(10,77)	(25,65)
Perubahan Nilai Wajar Asset Keuangan Changes in Fair Value of Financial Assets	(58,54)	1,2	(0,85)	(2,05)	-
Perubahan Nilai Wajar Aset Non Keuangan Changes In Fair Value of Non Financial Assets	361,63	40,72	51,98	11,26	341,87
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Losses	(2187,30)	(13,78)	(13,15)	0,63	(69,57)
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for Current Year	(5168,48)	47,55	46,63	(0,92)	246,66
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) For Current Year	31,52	15,18	63,34	48,16	101,36

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: Net Income Attributable to:					
• Pemilik Entitas Induk Owners of The Entity	(65,97)	(32,38)	16,70	49,08	(145,29)
• Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	0	0	0,00	0,00	(0,00)
Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Income (Loss) Attributable to:					
• Pemilik Entitas Induk Owners of The Entity	31,58	15,2	63,33	48,13	101,37
• Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	(100,00)	(0,03)	0,00	0,03	(0,00)

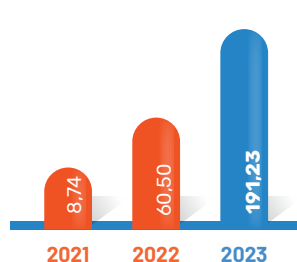
**Pendapatan usaha /
Operating Revenues**

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



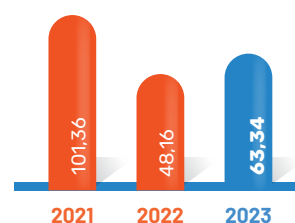
**Pendapatan Non-Usaha /
Non-Operating Incomes**

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



**Jumlah Penghasilan (Rugi)
Komprehensif Tahun Berjalan
/ Total Comprehensive Income
(Loss) For Current Year**

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Incomes Statement and Other Comprehensive Income

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Employee Benefits	(180,32)	19,42	8,65	(10,77)	(25,65)
Perubahan Nilai Wajar Asset Keuangan Changes In Fair Value of Financial Assets	(58,54)	1,2	(0,85)	(2,05)	-
Perubahan Nilai Wajar Aset Non Keuangan Changes In Fair Value of Non-Financial Assets	361,63	40,72	51,98	11,26	341,87
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba / (Rugi) Income Tax related to Incomes Items that will not be reclassified to Profit or / (Losses)	(2187,30)	(13,78)	(13,15)	0,63	(69,57)
Total	(3,18)	(1,53)	46,63	(0,93)	246,65

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp63,34 miliar, meningkat 31,52% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp48,16 miliar.

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp63,33 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp48,16 miliar.

ANALISIS ARUS KAS

PPI membukukan penurunan kas dan setara kas pada akhir tahun 2023 sebesar 65,43% dari Rp181,42 menjadi Rp62,71 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh karena penurunan pada kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

In 2023, the Company recorded Total Comprehensive Income for the Year of IDR63.34 billion, an increase of 31.52% compared to the previous year which was recorded at IDR48.16 billion.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY

Total Comprehensive Income (Loss) attributable to Owners of the Parent Entity in 2023 was recorded at IDR63.33 billion, an increase compared to the previous year which was recorded at IDR48.16 billion.

CASH FLOW ANALYSIS

PPI posted a decrease in cash and cash equivalents at the end of 2023 by 65.43% from IDR181.42 to IDR62.71 billion. This decrease was mainly due to a decrease in net cash used in operating activities.

Laporan Arus Kas Statement of Cashflows

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

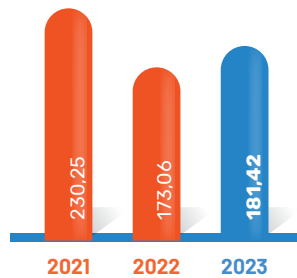
Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES					
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	(9,06)	(216,94)	2.178,46	2.395,40	1.901,01
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Cash payment to vendors and employees	2,50	(58,49)	(2.400,84)	(2.342,35)	(1.948,74)
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya Cash payment to operational expenses and others	(348,80)	89,85	64,09	(25,76)	(18,25)
Pembayaran Pajak Tax payment	(47,02)	22,31	(25,14)	(47,45)	(8,48)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Net cash used in operating activities	809,87	(163,27)	(183,43)	(20,16)	(74,45)

dalam miliar rupiah kecuali bila dinyatakan berbeda | in billion rupiah unless otherwise stated

Uraian Description	YoY (2022-2023)		2023	2022	2021
	%	Nominal			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES					
Pembelian aset tetap Acquisition of fixed assets	0,35	(0,03)	(8,61)	(8,58)	(59,87)
Penambahan properti investasi Addition of investment property	-	-	-	(0,46)	-
Penarikan (penempatan) deposito Withdrawal (placement) deposit	(99,34)	(18,705)	3,00	18,83	(20,43)
Penambahan aset lain-lain Acquisition of other assets	(151,84)	3,72	1,27	(2,45)	(2,52)
Penambahan aset tidak berwujud Acquisition of intangible assets	(97,73)	0,86	(0,02)	(0,88)	(13,65)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash provided from (used in) investing activities	(167,44)	(10,8)	(4,35)	6,45	(96,46)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES					
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka pendek lainnya Receipts (payments) of other current financial liabilities	140,18	49,51	84,83	35,32	120,52
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka Panjang Receipts (payments) of long term loans	17,26	(2,27)	(15,42)	(13,15)	(4,76)
Pembayaran liabilitas sewa Payment of lease liabilities	240,00	(0,24)	(0,34)	(0,10)	(2,04)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash provided from financing activities	212,96	47	69,07	22,07	113,72
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(1519,98)	(127,07)	(118,71)	8,36	(57,19)
Kas dan setara kas – pada awal tahun Cash and cash equivalents – at the beginning of the year	4,83	8,36	181,42	173,06	230,25
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR	(65,43)	(118,71)	62,71	181,42	173,06

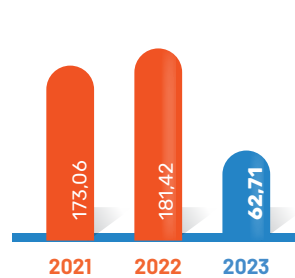
Kas dan setara kas - pada awal tahun / Cash and cash equivalents - at the beginning of the year

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at The end of The Year

dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pada tahun 2023, PPI mencatat kenaikan pada arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, dari Rp20,16 miliar menjadi Rp183,43 miliar. Hal ini didorong oleh naiknya penerimaan kas dari pelanggan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pada tahun 2023, PPI mencatat penurunan pada arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, dari Rp6,45 miliar menjadi negatif Rp4,35 miliar. Hal ini didorong oleh menurunnya penarikan deposito.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pada tahun 2023, PPI mencatat kenaikan pada arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan, dari Rp22,07 miliar menjadi Rp69,07 miliar. Hal ini didorong oleh meningkatnya penerimaan pinjaman jangka pendek lainnya.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

PPI menggunakan berbagai rasio keuangan dasar berikut ini guna mengukur tingkat kesehatan dan kinerja Perseroan:

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

In 2023, PPI recorded an increase in net cash flows used in operating activities, from IDR20.16 billion to IDR183.43 billion. This was driven by an increase in cash receipts from customers.

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

In 2023, PPI recorded a decrease in net cash flow used for investing activities, from IDR6.45 billion to negative IDR4.35 billion. This was driven by a decrease in the withdrawal of deposits.

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

In 2023, PPI recorded an increase in net cash flow used for financing activities, from IDR22.07 billion to IDR69.07 billion. This was driven by the increase in other short-term loan receipts.

FINANCIAL RATIO ANALYSIS

PPI uses the following basic financial ratios to measure the Company's health and performance:

Rasio Keuangan | Financial Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Rasio lancar Current Ratio	%	121,8	123,5	133,6
Rasio Cepat Quick Ratio	%	70,1	77,2	87,0
Rasio Kas Cash Ratio	%	8,6	23,1	31,6

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio Kas Cash Ratio	%	8,6	23,1	31,6
Rasio Cepat Quick Ratio	%	70,1	77,2	87,0
Rasio Lancar Current Ratio	%	121,8	123,5	133,6
Modal Kerja Bersih terhadap Penjualan Net Working Capital to Sales	%	7,0	7,9	10,7
Rasio Leverage Leverage Ratio				
Rasio Hutang terhadap Aset Debt to Assets Ratio	%	37,3	38,2	36,8
Rasio Hutang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	59,4	61,7	58,2
Rasio Cakupan Layanan Utang Debt Service Coverage Ratio	Kali Time	0,02	0,06	(0,2)
Rasio Aktivitas Activity Ratio				
Collection periods	Hari Days	49,78	65	5,7
Perputaran Utang Debt Turnover	Hari Days	71,7	66,5	39,0
Perputaran persediaan Inventory turnover	Hari Days	20,8	18,0	14,0
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio				
Imbalan kepada pemegang saham Return on Equity (ROE)	%	0,6	1,7	(5,1)
Imbalan investasi Return on Investment (ROI)	%	2,2	2,9	(5,3)
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	13,2	16,8	13,7
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	0,7	2,1	(7,5)
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	4,0	5,5	(7,4)

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Level

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

PPI senantiasa melakukan evaluasi dan menganalisis tingkat kesehatan keuangannya secara berkala untuk menjaga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek yang akan jatuh tempo. Keandalan PPI dalam membayar utang-utangnya setidaknya tercermin dari hasil perhitungan rasio likuiditas berikut ini:

Ability to Pay Short-term and Long-term Debts

PPI consistently evaluates and analyzes its financial health to maintain its ability to fulfill both short-term and long-term obligations that will come due. PPI's reliability in paying its debts is reflected at least in the results of the liquidity ratio calculations below:

Rasio Keuangan | Financial Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Rasio lancar Current Ratio	%	121,8	123,5	133,6
Rasio Cepat Quick Ratio	%	70,1	77,2	87,0
Rasio Kas Cash Ratio	%	8,6	23,1	31,6

Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Aktivitas Lainnya

Selain menjaga rasio likuiditasnya, PPI juga mengoptimalkan kemampuannya dalam mengumpulkan piutang. Sepanjang tahun 2023, tingkat kolektibilitas piutang PPI tercatat sebesar 49,78 hari. Sementara perputaran utang PPI pada tahun tersebut adalah sebesar 71,7 hari. Perputaran persediaan sebesar 20,8 kali.

Debt Collection Rate and Other Activity Ratios

In addition to maintaining its liquidity ratio, PPI also optimizes its ability to collect receivables. Throughout 2023, PPI's receivables collection rate was recorded at 49.78 days. Meanwhile, PPI's accounts payable turnover for that year was 71.7 days. Inventory turnover was 20.8 times.

Rasio Aktivitas | Activity Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Collection periods	Hari Days	49,78	65	5,7
Perputaran Utang Debt Turnover	Hari Days	71,7	66,5	39,0
Perputaran Persediaan Inventory turnover	Hari Days	20,8	18,0	14,0

Kemampuan Menghasilkan Laba

Profit Generating Ability

Rasio Keuangan | Financial Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Imbalan kepada pemegang saham Return to Equity (ROE)	%	0,6	1,7	(5,1)
Imbalan investasi Return on Investment (ROI)	%	2,2	2,9	(5,3)
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	13,2	16,8	13,7
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	0,7	2,1	(7,5)
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	4,0	5,5	(7,4)

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal PPI dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Kebijakan struktur modal PPI bersifat fleksibel serta senantiasa memperhatikan faktor makro ekonomi baik global maupun nasional dan karakteristik risiko aset yang mendasarinya. PPI menilai kebijakan struktur modal yang solid sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasi PPI.

Dalam rangka menjaga fundamental struktur modal yang ada, PPI dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengelola pengembalian modal kepada pemegang saham, atau menjual aset untuk mengurangi utang. PPI memonitor kualitas permodalannya melalui rasio *debt-to-equity* agar nilai utangnya tidak melebihi aset yang dimiliki.

Management Policy on Capital Structure

The management of PPI's capital structure is conducted in accordance with applicable laws and regulations and the Articles of Association. PPI's capital structure policy is flexible and always takes into account macroeconomic factors both globally and nationally, as well as the underlying asset risk characteristics. PPI considers a solid capital structure policy essential in supporting its operational sustainability.

To maintain the fundamental existing capital structure, PPI may adjust the amount of dividends paid to shareholders, manage returns of capital to shareholders, or sell assets to reduce debt. PPI monitors the quality of its capital through the *debt-to-equity* ratio to ensure its debt does not exceed its assets.

Struktur Permodalan

Berikut ini adalah komposisi struktur modal PPI selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Capital Structure

Below is the composition of PPI's capital structure over the past 3 (three) years:

Struktur Modal | Capital Structure

Uraian Description	2023		2022		2021	
	Juta Rp Millions of IDR	Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Millions of IDR	Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp Millions of IDR	Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	731.233	15,82	754.350	16,45	616.103	13,97
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	990.992	21,44	995.413	21,71	1.007.482	22,84
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.722.225	37,27	1.749.764	38,15	1.623.585	36,81
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.898.939	62,73	2.835.603	61,84	2.787.438	63,19
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.621.165	100,00	4.585.367	100,00	4.411.023	100,00

Kesesuaian Pengungkapan dengan Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi mengenai struktur modal PPI pada sub-bahasan ini sudah sesuai dengan Laporan Keuangan PPI Tahun Buku 31 Desember 2023.

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen di PPI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku agar cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada penerapannya, pembagian dividen ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan nominal yang dibayarkan senantiasa

Compliance of Disclosure with Financial Statements

The disclosure of information regarding PPI's capital structure in this subsection is in line with PPI's Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2023.

Dividend Policy

The dividend policy at PPI is in accordance with applicable laws and regulations, especially Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where companies are required to allocate a certain amount of net profit each fiscal year so that the reserve reaches at least 20% of the total issued and paid-up capital.

In practice, dividend distribution is determined by the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS), with the nominal amount paid always considering several

mempertimbangkan beberapa hal, antara lain namun tidak terbatas pada tingkat kesehatan perusahaan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk kegiatan operasional, modal kerja, dan pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memutuskan lain.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, PPI tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Investasi Barang Modal dan Ikatan Material Terkait yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Tidak ada Investasi Barang Modal dan Ikatan Material Terkait yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Tidak ada Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi pada tahun 2023 yang dapat/perlu dilaporkan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2023, Grup melakukan peninjauan kembali dan mengubah estimasi atas nilai residu aset tetap. Pengaruh dari perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Dampak dari perubahan estimasi untuk tahun 2023 sebesar Rp38.940.735.718 dan diakui sebagai pendapatan non usaha.

Informasi Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

1. Perubahan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, SH., No. 8 tanggal 3 Januari 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi entitas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioners	Ir. Hamli
Komisaris Commissioners	Setiawan Wangsaatmaja

factors, including but not limited to the company's financial health, sufficiency of capital, operational funding needs, working capital, and business development, without diminishing the GMS's right to decide otherwise.

From 2017 to 2023, PPI has not distributed dividends to Shareholders.

Investment in Capital Goods and Related Material Commitment Realized in the Last Financial Year

There were no Capital Goods Investments and Related Material Ties Realized in the Last Financial Year.

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

There is no Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events in 2023 that can/should be reported.

Changes in Accounting Policies Applied by the Company in the Last Financial Year

In 2023, the Group reviewed and changed its estimate of the residual value of property, plant and equipment. The effect of the change in estimate is prospective. The impact of the change in estimate for 2023 amounted to IDR38,940,735,718 and was recognized as non-operating income.

Material Information After the Date of the Accountant's Report

1. Changes in the Board of Commissioners

Based on Notarial Deed of Aulia Taufani, SH., No. 8 dated January 3, 2024, the composition of the entity's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Direksi Board of Directors

Direktur Utama President Director	Ir. Soegeng Hernowo
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs	Wien Irwanto
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Edhy Rizwan
Direktur Operasi Director of Operations	Noverita Anggraeny

2. Penambahan Modal

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham seri A Dwiwarna Entitas, menyetujui penambahan modal Entitas melalui konversi hutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Catatan 26a dan 26b). Jumlah hutang yang dikonversi menjadi modal sebesar Rp883.386.776.206.

3. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.60012/GBK/2024 tanggal 24 Januari 2024, Group memperoleh fasilitas Kredit Multi Fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Entitas:
 1. Fasilitas kredit lokal dengan limit kredit sebesar Rp10.000.000.000.
 2. Fasilitas *Time Loan Revolving*, *Fasilitas Trust Receipt*, Fasilitas Bank Garansi dan Fasilitas LC/SKBDN dengan kredit limit gabungan sebesar Rp80.000.000.000.
- b. Entitas Anak:
Fasilitas *Time Loan Revolving* dan Bank Garansi dengan kredit limit gabungan sebesar Rp50.000.000.000 dan Rp15.000.000.000 masing-masing untuk PT BGR Logistik Indonesia dan PT PPI Industri.

Jaminan atas fasilitas-fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tanah di Jl. Indrapura No. 12, Surabaya, Jawa Timur.
- b. Tanah dan Bangunan (Kantor) di Jl. Jawa No. 12, Bandung, Jawa Barat.
- c. Tanah dan Bangunan (Gudang) di Jl. Gatot Subroto Barat No. 905X, Kuta Utara, Bali.
- d. Tanah dan Bangunan (Rumah) di Jl. Raung No. 20, Semarang, Jawa Tengah.
- e. Tanah dan Bangunan (Gudang) di Jl. Kenari,

2. Capital Injection

Based on a letter from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 dated February 28, 2024, the Government of Indonesia, as the holder of series A Dwiwarna shares of the Entity, approved the capital increase of the Entity through the conversion of debt to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Notes 26a and 26b). The amount of debt converted into capital is IDR883,386,776,206.

3. Credit Agreement with PT Bank Central Asia

Based on Credit Agreement No. 60012/GBK/2024 dated January 24, 2024, the Group obtained a Multi-Facility Credit with the following details:

- a. Entity:
 1. Local credit facility with a credit limit of IDR10,000,000,000.
 2. Time Loan Revolving Facility, Trust Receipt Facility, Bank Guarantee Facility, and LC/SKBDN Facility with a combined credit limit of IDR80,000,000,000.
- b. Subsidiaries:
Time Loan Revolving and Bank Guarantee facilities with a combined credit limit of IDR50,000,000,000 and IDR15,000,000,000 respectively for PT BGR Logistik Indonesia and PT PPI Industri.

Collateral for the above facilities includes:

- a. Land at Jl. Indrapura No. 12, Surabaya, East Java.
- b. Land and Building (Office) at Jl. Jawa No. 12, Bandung, West Java.
- c. Land and Building (Warehouse) at Jl. Gatot Subroto Barat No. 905X, Kuta Utara, Bali.
- d. Land and Building (House) at Jl. Raung No. 20, Semarang, Central Java.
- e. Land and Building (Warehouse) at Jl. Kenari,

- Semarang, Jawa Tengah.
- f. Tanah dan Bangunan (Gudang) di Jl. Lodan Baru No. 32A, Ancol, Jakarta Utara.
 - g. Persediaan dan/atau piutang usaha senilai Rp150.000.000.000.

Periode fasilitas-fasilitas tersebut di atas adalah 24 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2025 dengan tingkat bunga 8,5% p.a. (tingkat bunga mengambang).

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Material

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Grup mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

1. Hubungan sebagai Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia
Perusahaan mempunyai liabilitas dana pinjaman rekening dana investasi kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan liabilitas kepada eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Hubungan Kepemilikan dan atau Kepengurusan Transaksi dengan seluruh BUMN dan lainnya yang mempunyai hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi, yaitu:
 - a. Transaksi bisnis dengan Perusahaan milik negara yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga.
 - b. Grup mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Jumlah penempatan Grup pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka berjumlah Rp55.048.416.399 pada tanggal 31 Desember 2023 yang mencerminkan 1,19% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023. Grup mempunyai utang bank-jangka pendek pada bank milik negara berjumlah Rp258.629.659.906 pada tanggal 31 Desember 2023 yang mencerminkan 15,02% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023.

- Semarang, Central Java.
- f. Land and Building (Warehouse) at Jl. Lodan Baru No. 32A, Ancol, North Jakarta.
 - g. Inventory and/or accounts receivable valued at IDR150,000,000,000.

The period for these facilities is from January 24, 2024, to January 23, 2025, with an interest rate of 8.5% p.a. (floating rate).

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Material Parties

In its business activities, the Group engages in transactions with related parties. The Group's policy stipulates that the pricing for these transactions is the same as transactions conducted with third parties. Here are the significant agreements/transactions with related parties:

1. Relationship as Shareholders with the Government of the Republic of Indonesia
The Company has liabilities for investment fund account loans to the Directorate of Investment Management System, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and liabilities to the former National Banking Restructuring Agency transferred to the Directorate General of State Assets (DJKN), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
2. Ownership and/or Management Relationships:
Transactions with all state-owned enterprises (BUMN) and others that have ownership and/or management relationships are treated as transactions with related parties, which include:
 - a. Business transactions with state-owned companies are treated in the same manner as transactions with third parties.
 - b. The Group has current accounts and time deposits at several state-owned banks. The Group's placements in state-owned banks in the form of current accounts and time deposits amounted to IDR55,048,416,399 as of December 31, 2023, representing 1.19% of total assets as of December 31, 2023. The Group has short-term bank loans with state-owned banks amounting to IDR258,629,659,906 as of December 31, 2023, representing 15.02% of total liabilities as of December 31, 2023.

3. Hubungan Manajemen Kunci Perusahaan
Manajemen kunci mencakup komisaris dan direksi. Kompensasi yang diberikan pada manajemen kunci dalam hubungan dengan pemberian jasa sebagai berikut:

3. Key Management Relationships:
Key management includes commissioners and directors. Compensation provided to key management in relation to the provision of services is as follows:

Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
Gaji dan imbalan jangka pendek Salaries and short-term benefits	Rp3.342.056.847
Direksi: Board of Directors:	
Gaji dan imbalan jangka pendek Salaries and short-term benefits	Rp7.431.753.090
Pesangon pemutusan kontrak kerja Severance pay	Tidak None

Transaksi Material dengan Pihak Berelasi/ Afiliasi

Dalam aktivitas bisnisnya, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang bukan merupakan transaksi benturan kepentingan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai persyaratan komersial normal, sebagaimana transaksi dengan pihak yang tidak berelasi.

Sifat hubungan dan sifat transaksi antara Perseroan dengan pihak berelasi tercantum pada tabel sebagai berikut:

Material Transactions with Related/Affiliated Parties

In its business activities, the Company engages in various transactions with related parties that do not constitute conflicts of interest transactions. All transactions with related parties are conducted fairly according to normal commercial requirements, just like transactions with unrelated parties.

The nature of the relationships and the nature of transactions between the Company and related parties are listed in the table as follows:

Sifat Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi Nature of Relationship and Transaction with Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pertamina Patra Niaga	Transaksi kerja sama operasional SPBU Gas station operational cooperation transaction
PT Pupuk Indonesia Holding Company	Transaksi kerja sama kedistributoran pupuk Fertilizer distribution cooperation transaction
PT Indofarma Tbk	Transaksi kerja sama kedistributoran produk obat generik Cooperation transaction for the distribution of generic medicine products
PT Bio Farma	Transaksi kerja sama distribusi vaksin serum, diagnostik kit dan alat kesehatan Cooperative transactions in the distribution of vaccine serum, diagnostic kits and medical devices

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties for 2023 and 2022 are as follows:

Pihak berelasi: Related parties:	2023	2022
Ditjen Migas i)	88.669.740.008	88.669.740.008
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	83.503.400.203	504.731.891
PT Pupuk Kaltim	27.183.298.845	15.396.582.159
PT Petrokimia Gresik	15.071.501.022	24.986.496.466
PT Sang Hyang Seri	10.687.455.750	10.982.341.610
PT Pupuk Iskandar Muda	8.421.582.777	7.557.990.235
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	6.667.174.084	13.995.754.578
PT Len Industri (Persero)	5.271.697.016	5.271.697.016
PT Timah Tbk	4.675.572.405	9.999.322.093
PT Kilang Pertamina Internasional	3.540.340.985	-
PT Pupuk Kujang	3.281.777.888	4.500.225.748
PT Adhi Karya	3.006.661.199	2.849.054.970
PT Asuransi Jiwasraya	2.756.476.840	1.800.010.000
PT Perikanan Indonesia	2.468.256.483	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.463.468.894	7.119.812.508
PT Pabrik Gula Rajawali	2.361.377.132	4.754.500.000
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.310.320.749	2.316.067.303
Rumah Sakit umum Daerah	2.306.433.993	6.654.819.598
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	2.151.097.786	2.722.625.686
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	2.084.799.196	3.185.480.146
PT Waskita Beton Precast	1.206.549.817	2.994.107.317
PT Rajawali Nusindo	1.113.610.957	3.100.725.262
PT Pertamina (Persero)	888.224.226	6.566.100.130
Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.878.378	2.868.250.000x
Lainnya (dibawah Rp 2 Milyar) Others (below Rp 2 billion)	13.959.839.855	15.572.442.875,00
Sub jumlah piutang usaha pihak berelasi Sub total trade receivables - related parties	296.054.536.488	244.368.877.599
Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment	(88.669.740.008)	(88.669.740.008)
Piutang usaha pihak berelasi – Bersih Trade receivables related parties – Nett	207.384.796.480	155.699.137.591
Pihak ketiga: Third parties:	2023	2022
PT Telepoint Nusantara ii)	75.546.921.225	75.546.921.225
PT Pembangunan Kota Tua Jakarta	74.784.555.357	10.389.642.335

Pihak ketiga: Third parties:	2023	2022
PT Agro Chemindo Niagatama	28.697.388.316	28.697.388.316
PT Anugerah Pharmindo Lestari	16.815.419.559	784.626.766 PT
PT Krakatau Pipe Industries	12.105.488.733	9.856.774.056
PT Aneka Pupuk Compon	9.881.740.553	9.881.740.553
PT Yahukimo Bersatu Indonesia	6.749.503.741	-
PT Beli Jual Oentung	6.377.482.373	-
PT Pab. Pipa Indonesia	6.157.556.628	6.157.556.628
CUSTOMER PPI	5.590.953.090	-
PT Bukaka Teknik Utama	5.074.250.000	6.282.650.000
PT Sultana Agro Lestari	4.434.297.246	-
One Time BP	4.432.584.484	2.893.714.047
PT Falcon Cargo	4.256.500.000	4.256.500.000
Haggat Import Company	3.768.811.200	-
PT Cemindo Gemilang	3.471.804.797	3.471.804.797
PT Permata Agro Persada	3.442.477.765	3.401.995.615
PT Sari Gunung Polowijo	3.349.130.837	3.473.554.672
PT Sumber Hidup Chemindo	3.286.709.320	1.003.994.320
Penjualan Unilever Bandar Jaya (Bandar Lampung)	3.145.742.588	4.214.153.736
Koperasi Ternak Terpadu Indonesia	3.142.795.400	3.142.795.400
PT Niarta Putra Logistik	2.818.937.500	-
Eastindo Utama Ind Corp	2.765.538.106	2.765.538.106
PT Anugrah Sinar Samudra	2.559.500.000	2.559.500.000
CV Rifaby Gustham	2.525.500.000	2.525.500.000
Penjualan Unilever Tulang Bawang (Bandar Lampung)	2.507.961.182	216.892.814
PT Cipta Andika Teladan	2.443.280.000	2.343.105.520
PT Surya Lintas Gemilang	2.386.225.000	2.386.225.000
PT Tanah Selaras Mandiri	2.344.450.000	2.344.450.000
CV Putra Kutaraja	2.336.191.500	2.336.191.500
PT Sinarkimia Utama	2.314.554.750	1.994.874.750
Enviromate Technology International	2.146.000.000	-
PT Virgo Sari	2.131.731.860	2.131.731.860
PT Semen Jawa	2.064.919.241	2.064.919.241
PT Timuraya Tunggal	2.017.175.732	594.802.262
PT Bintang Daud Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Synnex Metrodata Indonesia	1.817.192.002	1.707.085.157
PT Wilmar Chemical Indonesia	1.683.283.570	3.982.355.502
PT Agri Indoma	1.544.766.692	1.456.496.453
PT Unilever Indonesia Tbk	1.527.011.575	3.059.975.711
PT Davina Celine Abigail	1.270.000.000	-

Pihak ketiga: Third parties:	2023	2022
CV Minahasa Jaya Bersama	837.440.000	25.628.624.000
Corteva Agriscience Seeds Indonesia	173.456.017	193.676.398
PT Graha Jaya Pratama Kinerja	-	20.903.875.200
PT ZTE Indonesia	-	4.261.346.705
PT Jakarta Sereal	-	4.041.910.239
PT Manggala Prabu Pratama	-	3.108.770.000
PT Hajar Aswad Tani Indonesia	-	2.808.232.000
PT Signa Husada	-	2.246.687.175
Debitur lainnya iii) Other debtors iii)	108.339.023.374	108.339.023.374
Lainnya (saldo di bawah Rp 2 milyar) Others (balance below Rp 2 billion)	151.622.544.474	186.705.577.120
Sub Jumlah piutang usaha pihak ketiga Subtotal trade receivables third parties	588.688.795.787	568.163.178.553
Penyisihan Penurunan Nilai Allowance for impairment	(346.275.746.737)	(292.569.540.054)
Piutang usaha pihak ketiga – bersih Trade Receivables third parties – nett	242.413.049.050	275.593.638.499
Total Piutang Usaha – Bersih Total Trade Receivables – Nett	449.797.845.530	431.292.776.090

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PPI bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana tanggal persetujuan RUPS atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sepanjang tahun 2023.

Kontribusi Kepada Negara

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPI berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

Pada tahun 2023, Jumlah setoran Pajak Badan Perseroan adalah sebesar Rp79,97 miliar, naik 6,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp74,86 miliar.

Realization of Utilization of Proceeds from Public Offering

PPI is not a publicly traded company and has not conducted a public offering, so there is no information regarding the total proceeds, plans for fund utilization, details of fund utilization, or the fund balance as of the approval date of the General Meeting of Shareholders regarding the realization of the use of proceeds from a public offering throughout 2023.

Contribution to the State

The responsibility for tax payment obligations reflects the national obligations in the tax field within national development. Therefore, PPI is committed to fulfilling tax payment obligations as both a Taxpayer and a Tax Withholder.

In 2023, the Company's Corporate Tax deposit amounted to IDR79.97 billion, an increase of 6.83% compared to the previous year which amounted to IDR74.86 billion.

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun Mendatang

Comparison between Target, Realization, and Projection of Financial

Setiap tahun, PPI menyusun komitmen rencana kerja dan anggaran yang disepakati bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu, PPI menjadikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas operasional di sepanjang tahun ini. Penyusunan proyeksi tersebut senantiasa mempertimbangkan analisa faktor internal dan faktor eksternal, serta mengamati peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap lini usaha PPI.

Each year, PPI prepare a work plan and budget commitment endorsed by both the Board of Commissioners and the Board of Directors. Subsequently, PPI employs the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as the cornerstone for executing all operational endeavors throughout the year. This projection preparation consistently incorporates analyses of internal and external factors, along with the scrutiny of opportunities and challenges impacting PPI's business sectors.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, SERTA PROYEKSI KEUANGAN

COMPARISON BETWEEN TARGET, REALIZATION, AND FINANCIAL PROJECTION

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	Target 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection 2024
Jumlah Aset Total Assets	4.804.807	4.621.165	96,2	4.721.080
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.736.203	2.898.939	77,6	3.851.770
Pendapatan Revenue	2.881.843	2.289.292	79	2.953.369
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	41.423	16.702	40	22.476

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Operasional

Comparison between Target, Realization, and Projection of Operational

Key Performance Indicator (KPI) dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Indikator Utama Perusahaan (*Key Performance Indicators/ "KPI"*) Konsolidasian per 31 Desember 2023 tercermin dari matriks penilaian KPI PPI, di mana penetapan perspektif, indikator serta pembobotannya telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN.

Berdasarkan pengukuran Indikator Utama Perusahaan, pada tahun 2023 PPI mendapatkan skor 90,24.

Key Performance Indicator (KPI) and Company Health Level

The Consolidated Key Performance Indicators (KPIs) as of December 31, 2023 are reflected in the PPI's KPI assessment matrix, where the determination of perspectives, indicators, and their weighting has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013, regarding Guidelines for Determining KPIs and Criteria for Assessing the Excellent Performance of State-Owned Enterprises.

Based on the measurement of Key Performance Indicators, in 2023, PPI achieved a score of 90.24.

Indikator Kinerja Utama 2023 Key Performance Indicator (KPI) 2023

No	KPI 2023	Satuan Unit	Target 2023	Bobot % Weight %	Skor Score		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
A. NILAI EKONOMI SOSIAL – FINANSIAL SOCIO-FINANCIAL ECONOMIC VALUE				30			21,38
1	EBITDA	Rp miliar Rp Billion	126,67	5	26,76	20,76%	1,04
2	ROIC against WACC	%	-8,87	4	-0,1	110,00%	4,40
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	2,15	3	9,85	21,83%	0,65
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	6,78	4	8,20	82,66%	3,31
5	Progress penagihan piutang macet Non performing receivables collection progress	% Debitur % Debtors	100%	3	39,53%	39,53%	1,19
6	Recovery piutang macet Recovery of non-performing receivables	Rp Miliar Rp Billion	39,9	4	61,58	93,67%	3,75
7	Konversi Utang melalui <i>debt-to-equity swap</i> Debt Conversion through debt-to-equity swap	Waktu Time	Des	4	Des 2023	93,50%	3,74
8	Mitra UMKM Warung Pangan terverifikasi dan tervalidasi Food Stall MSME partners, verified and validated	Jumlah Mitra Number of Partners	10.000	3	12.311	110%	3,30
B. INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION				20			18,49
1	Integrasi Berdikari Logistik dan BGR Logistik Indonesia Integration of Berdikari Logistics and BGR Logistics Indonesia	Waktu Time	Desember	2	Agustus 2023	110%	2,20
2	Integrasi PT Pertani Property dan PT PPI Properti Integration of PT Pertani Property and PT PPI Property	Waktu Time	Desember	2	April 2023	110%	2,20
3	Perluasan jenis komoditi ekspor Expansion of export commodity types	Jumlah produk Number of products	2	2	2	100%	2,00
4	Peningkatan serapan lokal atas komoditi khusus Increase of local uptake of specialty commodities	% serapan SPI % of SPI uptake	70%	2	79,81%	110%	2,20
5	Perluasan jenis komoditi khusus Expansion of special commodity types	Jumlah produk Number of products	2	2	5	110%	2,20
6	Implementasi Integrasi Fungsi <i>Trading</i> dan <i>Retail</i> serta Rantai Pasok secara Komprehensif Implementation of Comprehensive Integration of Trading and Retail Functions and Supply Chain	Rp Miliar (Loco) IDR Billion (Loco)	65,5	2	19,25	29,39%	0,59
7	Kerjasama trading anggota holding / BUMN dengan PPI Cooperation of trading members of the holding / BUMN with PPI	Kontrak Kerjasama Cooperation Contract	5	2	6	110%	2,20
8	Implementasi aplikasi sentralisasi fungsi (IDEAS) Implementation of centralized function application (IDEAS)	%	100	2	85	85%	1,70

No	KPI 2023	Satuan Unit	Target 2023	Bobot % Weight %	Skor Score		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
9	Efisiensi Biaya Pengadaan melalui pelaksanaan <i>Centralized Procurement</i> Procurement Cost Efficiency through the implementation of Centralized Procurement	% Efisiensi Biaya % Cost Efficiency	5	2	6,78	110%	2,20
10	Pembentukan <i>downline R1</i> komoditi Saprotran Establishment of downline R1 commodity Saprotran	Jumlah <i>downline R1</i> Number of downlines R1	60	2	30	50%	1,00
C. KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI LEADERSHIP IN TECHNOLOGY				20			19,50
1	Optimalisasi ERP sesuai proses bisnis dan <i>report analysis</i> ERP optimization according to business process and report analysis	Jumlah laporan bulanan The number of monthly reports.	12	10	12	100%	10,00
2	a. Implementasi Sistem Integrasi <i>Supply Chain Control Tower (SCCT)</i> a. Implementation of Supply Chain Control Tower (SCCT) Integration System	%	100	5	100	100%	5,00
2	b. Implementasi <i>Dashboard Executive Information System (EIS) Holding Pangan</i> b. Implementation of the Executive Information System (EIS) Dashboard for Food Holding	%	100	5	90	90%	4,50
D. PENINGKATAN INVESTASI INCREASE OF INVESTMENT				20			19,97
1	Penambahan jumlah mitra strategis hulu/hilir Increase in the number of upstream/downstream strategic partners	Jumlah Mitra Baru Number of New Partners	5	5	5	100%	5,00
3	Optimalisasi Aset Asset Optimization	Titik Aset Asset Points	168	5	145	86%	4,32
2	Revitalisasi <i>stockpoint</i> Stockpoint revitalization	Jumlah <i>Stockpoint</i> Number of Stockpoints	15	5	28	110%	5,50
4	Pelepasan Aset Asset Disposal	Titik Aset Asset Points	1	5	1,03	103%	5,15
E. PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT				10			10,90
1	Rasio <i>Top Talent</i> Muda (Laki-laki dan Perempuan) dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Young Top Talent (Male and Female) in Nominated Talent	% Talent Milenial % Millennial Talent	25%	5	47,62%	110%	5,50
2	Rasio Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Women in Nominated Talent	% Talent Wanita % Female Talent	18%	2,5	19,05%	105,82%	2,65
3	Rasio pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of qualification fulfillment of Risk Management Organs	% Rasio % Ratio	50%	2,5	59,09%	110,00%	2,75
TOTAL BOBOT KPI TOTAL KPI WEIGHT				100			90,24

Laporan Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level Achievement Report

Merujuk pada surat PT Perusahaan Perdagangan Indonesia nomor 0085/DU/EKS/PPI/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) perihal Surat Permohonan Pemeringkatan Standalone dan Final Rating PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, maka bersama surat ini kami sampaikan Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) sebagai berikut:

Referring to the letter from PT Perusahaan Perdagangan Indonesia number 0085/DU/EKS/PPI/III/2024 dated March 1, 2024, to PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) regarding the Request for Standalone Rating and Final Rating of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, we hereby present the Standalone Rating and Final Rating as follows:

Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating	Peringkat Akhir Final Rating	Tingkat Kesehatan Health Level
IdBBB-(sa)	IdBBB-/Stable	Sehat (Healthy)
<p>Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.</p> <p>Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.</p> <p>Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (<i>Standalone Rating</i>).</p>	<p>Obligor dengan peringkat, idBBB memiliki kemampuan yang idBBB dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.</p> <p>Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.</p>	<p>(sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81)</p>
<p>An obligor with an IdBBB rating has adequate capability, compared to other Indonesian obligors, to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in economic conditions.</p> <p>The minus (-) sign indicates that the given rating is relatively weak and below the average of its respective category.</p> <p>The (sa) sign indicates that the rating is a standalone rating.</p>	<p>An obligor with an idBBB rating has adequate capability compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in economic conditions.</p> <p>The minus (-) sign indicates that the given rating is relatively weak and below the average of its respective category.</p>	<p>(in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 Article 81)</p>
<p>Peringkat ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023.</p> <p>Informasi peringkat yang kami sampaikan di atas adalah untuk kepentingan internal Perusahaan dalam rangka pemenuhan Peraturan Menteri Bada Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023, dan tidak untuk digunakan ataupun diberikan kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan tersebut.</p>	<p>The rating is based on data and information from the Company as well as the Audited Financial Statements as of December 31, 2023.</p> <p>The rating information we provide above is for the Company's internal purposes in order to comply with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023, and is not to be used or given to any other parties not related to this requirement.</p>	

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring

Program Restrukturisasi Hutang Tahun 2023 merupakan kelanjutan program restrukturisasi hutang tahun-tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan RUPS.

The 2023 Debt Restructuring Program is a continuation of the debt restructuring program in previous years that has been approved by the GMS.

Berdasarkan RKAP 2023 dan berdasarkan arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham hanya mengajukan PMN Non Tunai sebesar Rp883 Miliar yang berasal dari Hutang RDI dan Eks BPPN meskipun dari usaha yang telah dilakukan, PT PPI telah mengajukan surat permohonan penyelesaian seluruh hutang kepada pemerintah, yaitu hutang Eks BPPN, hutang Rekening Dana Investasi (RDI) dan hutang Bappenas sebesar Rp907 Miliar dengan skema *Debt to equity swap* melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun Anggaran 2020 kepada Kementerian BUMN.

Based on the 2023 RKAP and based on the direction of the Ministry of SOEs as the shareholder, it only proposes a Non-Cash PMN of IDR883 Billion originating from RDI and Ex-BPN Debt even though from the efforts that have been made, PT PPI has submitted a letter requesting the settlement of all debts to the government, namely Ex-BPN debt, Investment Fund Account (RDI) debt and Bappenas debt of IDR907 Billion with a Debt to equity swap scheme through additional Non-Cash State Capital Injection (PMN) for the 2020 Fiscal Year to the Ministry of SOEs.

PT PPI (Persero) telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh persyaratan penyelesaian utang dengan konversi PMN dan Penghapusan sesuai *timeline* yang diminta oleh Kementerian BUMN sebagai berikut:

PT PPI (Persero) has taken steps to fulfill all debt settlement requirements with PMN conversion and write-off according to the timeline requested by the Ministry of SOEs as follows:

1. Menunjuk Konsultan Independen untuk melakukan Uji Tuntas aspek Hukum (*Legal Due Diligence*), Uji Tuntas aspek Keuangan (*Financial Due Diligence*) dan Uji Tuntas aspek Operasional.
2. Melakukan Uji Tuntas aspek Hukum, Uji Tuntas aspek Operasional dan aspek Keuangan.
3. Laporan hasil Uji Tuntas telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

1. Appointed an Independent Consultant to conduct Legal Due Diligence, Financial Due Diligence and Operational Due Diligence.
2. Conducted Legal Due Diligence, Operational Due Diligence and Financial Due Diligence.
3. The Due Diligence report has been submitted to the Ministry of SOEs and the Ministry of Finance.

Selain Laporan hasil Uji tuntas dari konsultan independen di atas, PT PPI (Persero) telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

In addition to the due diligence report from the independent consultant above, PT PPI (Persero) has fulfilled other administrative requirements in accordance with the Minister of Finance Regulation.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Significant changes in legislation and regulations affecting the company

Tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang terjadi pada tahun 2023.

There are no changes in laws and regulations that have a significant impact on the Company that occur in 2023.

Dampak Perubahan Harga terhadap Perusahaan

Impact of Price Changes on the Company

Tidak ada perubahan harga yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan pada tahun 2023.

There are no price changes that have a significant impact on the Company in 2023.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by the Company (ESOP/MSOP)

PPI hingga akhir tahun 2023 belum memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau manajemen. Oleh karenanya, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise* di dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

Until the end of 2023, PPI has not implemented any employee stock ownership program (ESOP) and/or management stock ownership program (MSOP). Therefore, there is no information regarding the amount of ESOP/MSOP shares, their realization, duration, eligible employees and/or management requirements, and exercise price in this 2023 Annual Report.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

1. Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Dalam hal segmentasi pasar PT PPI mengutamakan B2B sebagai segmen pasar penjualan produk–produk utamanya sebagai pemilik izin perdagangan besar.

Kondisi persaingan di lingkup bisnis PT PPI dapat dikatakan cukup ketat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk yang berkembang di pasaran seiring dengan peningkatan dan perkembangan kebutuhan pelanggan atas produk tersebut.

PT PPI juga melakukan berbagai program promosi serta optimalisasi penjualan produk melalui *distribution channel* diantaranya Kantor Cabang PT PPI, Distributor, Kios / Pengecer, Penjualan *Online* melalui Aplikasi Warung Pangan, atau penajakan peluang Kerjasama dengan berbagai Instansi. Tidak hanya di dalam negeri, PT PPI juga mengoptimalkan penjualan produk ke luar negeri melalui *representative office* yang berlokasi di Tiongkok, Mesir, dan Taiwan.

1. Market Segments and Competition

Regarding market segmentation, PT PPI prioritizes the B2B market segment for selling its main products, leveraging its status as the holder of a large trading license.

The competitive conditions in PT PPI's business environment can be considered quite intense, as evidenced by the numerous products emerging in the market, in line with the increasing and evolving customer demand for these products.

PT PPI also conducts various promotional programs and optimizes product sales through distribution channels including the Branch Offices of PT PPI, Distributors, Kiosks / Retailers, Online Sales through the Warung Pangan Application, or exploring opportunities for cooperation with various agencies. Not only domestically, PT PPI also optimizes product sales abroad through representative offices located in China, Egypt and Taiwan.

2. Posisi Produk di Pasar

Produk-produk yang diperdagangkan oleh PT PPI memiliki posisi yang cukup kuat meskipun di beberapa lini produk bukan merupakan pilihan utama di pasaran. Hal tersebut mengingat PT PPI telah hadir melayani kebutuhan para pelanggan selama puluhan tahun. Untuk itu PT PPI harus terus berkembang dan berinovasi agar terus dapat menjadi pilihan utama para pelanggan.

3. Positioning Produk terhadap Pasar dan Konsumen,

Melalui produk – produk yang diperdagangkan, PT PPI menyampaikan pesan ke dalam ingatan pelanggan sebagai perusahaan yang memiliki produk yang sudah melayani selama puluhan tahun, dapat menjawab segala kebutuhan serta dekat dengan pelanggan.

Salah satu strategi yang digunakan PT PPI untuk mencapai brand image tersebut adalah dengan optimalisasi penjualan melalui Kantor Cabang, kedistributoran, dan Aplikasi Warung Pangan.

Penjualan melalui kantor cabang memiliki beberapa layanan unggulan seperti one day service delivery. Dengan layanan tersebut PT PPI melalui Kantor Cabang memastikan pasokan stok bahan pokok & pangan, pupuk & pestisida, serta farmasi & alkes selalu tersedia untuk para pelanggan. Kemudian melalui distributor terdaftar B2, PT PPI memastikan kebutuhan pelanggan akan bahan kimia berbahaya dapat selalu terpenuhi. Disisi lainnya, pelanggan dimanjakan dengan kemudahan memesan produk – produk PT PPI. Melalui Aplikasi Warung Pangan, para pelanggan akan merasakan kemudahan memesan Produk PT PPI secara *online*.

4. Pangsa Pasar

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, PPI terus berupaya memperluas pangsa pasar yang menjadi indikator bahwa PPI mampu bersaing dengan baik di tengah persaingan. Dengan strategi bisnis, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, pada tahun 2023 PPI berhasil memperluas pangsa pasar menjadi 15,96% meningkat dari tahun lalu yang sebesar 0,27%

2. Product Position in the Market

The products traded by PT PPI hold a relatively strong position, although in some product lines they are not the primary choice in the market. This is because PT PPI has been serving customer needs for decades. Therefore, PT PPI must continue to develop and innovate to remain the top choice for customers.

3. Product Positioning in the Market and with Consumers

Through its traded products, PT PPI ingrains a message in the customer's memory, portraying itself as a company with decades-old products capable of meeting all needs and be close to customers.

One of the strategies PT PPI uses to achieve this brand image is optimizing sales through Branch Offices, distribution channels, and the Warung Pangan App.

Sales through branch offices offer several premium services, such as one-day service delivery. With this service, PT PPI, through its Branch Offices, ensures the supply of staple foods, fertilizers and pesticides, as well as pharmaceuticals and medical devices is always available for customers. Then, through registered hazardous material distributors, PT PPI ensures that customers' needs for hazardous chemicals are always met. Additionally, customers are pampered with the ease of ordering PT PPI products. Through the Warung Pangan App, customers experience the convenience of ordering PT PPI products online.

4. Market Share

In the midst of increasingly fierce business competition, PPI continues to strive to expand market share, an indicator that PPI is able to compete well in the midst of competition. With business strategies, technology utilization, product innovation, in 2023 PPI managed to expand its market share to 15.96%, an increase from last year's 0.27%.

5. Rincian Strategi Pemasaran PPI tahun 2023

Strategi Pemasaran yang telah dilakukan di tahun 2023 terbagi menjadi :

- Program *Awareness* : yaitu formulasi strategi komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan *market share* dan penjualan, mencapai *top of mind awareness* di benak konsumen, mengenalkan produk baru kepada konsumen dan membangun *brand equity*.
- Program *Engagement* : yaitu program yang dilakukan untuk membangun infrastruktur saluran komunikasi pemasaran dengan konsep *human centric*, untuk menciptakan hubungan baik dengan *customer*, meningkatkan loyalitas *customer*, mendapatkan data konsumen & kepuasan pelanggan, menciptakan komunikasi pemasaran dari mulut ke mulut/*advocate*, dan melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal, sehingga tercapainya tujuan dalam membentuk komunitas pelanggan.
- Program *Supporting* : yaitu program yang dilakukan untuk mendukung kegiatan *awareness* dan *engagement* bertujuan membangun jaringan komunikasi pemasaran dalam mendukung program *awareness & engagement* program dan menunjang kegiatan saluran penjualan/*sales plan*.

6. Realisasi dan Capaian Strategi Pemasaran

Realisasi dan Capaian Strategi Pemasaran yang telah dilakukan di tahun 2023 terbagi menjadi :

- Program *Awareness*
 - *Indonesia Agrofood Expo*, PPI berpartisipasi menampilkan produk Pestisida & Kopi.
 - Perkebunan *Indonesia Expo*, PPI berpartisipasi menampilkan produk Pestisida & Kopi.
 - *Indo Premium Coffee Expo & Forum*, PPI berpartisipasi menampilkan produk Kopi dan produk Ekspor PPI seperti Kopi dan *Spices*.
 - *Trade Expo Indonesia*, PPI berpartisipasi menampilkan produk Kopi dan produk Ekspor PPI seperti Kopi dan *Spices*.
 - *Kalsel Healthcare & Medical Expo*, PPI berpartisipasi menampilkan obat Transamin.
 - *Demspray (Demonstration Spray)* pestisida yang telah dilakukan di wilayah kerja Cabang Denpasar (9 Maret 2023) dan Banyuwangi (20 September 2023). Program ini merupakan salah satu kegiatan untuk memperkenalkan produk-produk Pestisida Dharmabrand yang dilakukan pada tingkat Kabupaten.

5. Details of PPI Marketing Strategy in 2023

The Marketing Strategy that has been carried out in 2023 is divided into:

- *Awareness Program*: namely the formulation of marketing communication strategies that aim to increase market share and sales, achieve top of mind awareness in the minds of consumers, introduce new products to consumers and build brand equity.
- *Engagement Program*: a program that is carried out to build a marketing communication channel infrastructure with a human centric concept, to create good relationships with customers, increase customer loyalty, obtain consumer data & customer satisfaction, create word of mouth/advocate marketing communications, and collaborate with external parties, so as to achieve the goal of forming a customer community.
- *Supporting Program*: a program carried out to support awareness and engagement activities aimed at building a marketing communication network in supporting awareness & engagement programs and supporting sales channel/sales plan activities.

6. Realization and Achievement of Marketing Strategy

The Realization and Achievement of Marketing Strategies that have been carried out in 2023 are divided into:

- *Awareness Program*
 - *Indonesia Agrofood Expo*, PPI participated in displaying Pesticide & Coffee products.
 - *Indonesia Plantation Expo*, PPI participated in displaying Pesticides & Coffee products.
 - *Indo Premium Coffee Expo & Forum*, PPI participated displaying Coffee products and PPI Export products such as Coffee and Spices.
 - *Trade Expo Indonesia*, PPI participated displaying Coffee products and PPI Export products such as Coffee and Spices.
 - *Kalsel Healthcare & Medical Expo*, PPI participated displaying Transamin medicine.
 - *Demspray (Demonstration Spray)* of pesticides that have been carried out in the Denpasar Branch work area (March 9, 2023) and Banyuwangi (September 20, 2023). This program is one of the activities to introduce Dharmabrand Pesticide products carried out at the district level.

- Program *Engagement*
 - Program TEMANI (Temu Mitra & Petani) sebagai kendaraan komunikasi pemasaran pada sektor komoditas pupuk non subsidi, pestisida, benih, dan produk lainnya dalam lini bisnis Saprotan. Saat ini program TEMANI sudah dilakukan di 2 (dua) wilayah kerja Cabang Malang dan Mataram, dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan.
 - produk Farmasi telah melakukan program *Engagement* melalui *Sponsorship* kegiatan Seminar dan Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) yang dilaksanakan tanggal 12 November 2023.
- Engagement Program
 - TEMANI (Temu Mitra & Petani) program as a marketing communication vehicle in the commodity sector of non-subsidized fertilizers, pesticides, seeds, and other products in the Saprotan business line. Currently, the TEMANI program has been carried out in 2 (two) working areas of Malang and Mataram Branches, with a total of 6 (six) activities.
 - Pharmaceutical products have conducted an Engagement program through Sponsorship of Seminar activities and Regional Work Conference (Muskerda) which was held on November 12, 2023.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Hingga tahun 2023, Perseroan tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian penting yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya.

Evaluasi manajemen menunjukkan bahwa PPI siap untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan di tahun-tahun mendatang, yang didorong oleh faktor-faktor seperti permintaan pasar, inisiatif strategis, dan tren industri. Penilaian ini menggarisbawahi potensi Perseroan untuk memperluas kehadirannya di pasar, meningkatkan profitabilitas, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Asumsi-asumsi dasar yang melandasi keyakinan Manajemen terhadap kelangsungan PPI berakar pada kinerja historis dan kondisi yang berlaku saat ini dalam lanskap operasionalnya. Faktor-faktor ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis, memastikan ketahanan Perseroan dan keberhasilan yang berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang.

Until 2023, the Company remained unaffected by any significant events that could disrupt its business continuity.

Management's evaluation suggests that PPI is poised to capitalize on promising growth opportunities in the years ahead, driven by factors such as market demand, strategic initiatives, and industry trends. This assessment underscores the Company's potential to expand its market presence, enhance profitability, and create long-term value for stakeholders.

The bedrock assumptions underpinning the Management's confidence in PPI's continuity are rooted in both its historical performance and the current prevailing conditions within its operational landscape. These factors serve as cornerstones for strategic decision-making, ensuring the Company's resilience and sustained success in the face of evolving market dynamics.

Bab

05

PENDUKUNG BISNIS

Business Support

Tujuan dari pendukung bisnis adalah untuk menyediakan alat, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan agar Perusahaan dapat berfungsi dengan lancar dan berkembang.

The goal of business support is to provide the necessary tools, resources, and expertise that the Company needs to function smoothly and grow.





Sumber Daya Manusia

Human Resources

Di tengah lanskap bisnis masa kini yang sangat dinamis, ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, pasar yang terus bergerak progresif, serta praktik-praktik bisnis yang berubah, Perusahaan menyadari perlunya untuk tetap *agile* dan adaptif agar tetap kompetitif.

Agar mampu menavigasi tantangan eksternal dan berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif ini, Perusahaan dituntut untuk memiliki tenaga kerja yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang ada dan mampu berinovasi. Oleh sebab itu, upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD) Perusahaan akan memainkan peran penting dalam mempersiapkan karyawan untuk menghadapi kompleksitas dunia bisnis modern.

Seiring dengan praktik bisnis yang terus berkembang dalam merespon perubahan ekonomi, perubahan peraturan, dan tata kerja, maka Perusahaan harus menyusun program pengembangan sumber daya manusia yang sesuai yang akan memberikan karyawan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikan praktik-praktik bisnis yang baru.

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, Perusahaan menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan di bidang-bidang penting seperti transformasi digital, analisis data, dan keunggulan layanan pelanggan. Selain itu, memupuk budaya perbaikan yang berkesinambungan.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM

Program pengembangan SDM PPI yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan nilai-nilai inti PPI (integritas, disiplin, fleksibilitas, kerja sama tim, dan perbaikan berkelanjutan) diaplikasikan dalam setiap tindakan sehari-hari untuk memperkuat kesiapan PPI dalam menghadapi tantangan bisnis yang muncul. Peran dan tanggung jawab karyawan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Perusahaan secara keseluruhan. Melalui integrasikan fungsi karyawan dengan strategi bisnisnya, PPI dapat memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh karyawan setiap hari secara langsung dapat berkontribusi pada pencapaian target Perusahaan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham.

PPI memahami betul pentingnya memotivasi SDM untuk mencapai kinerja terbaiknya. Oleh karena itu, PPI menyelenggarakan program pengembangan kapasitas

In the contemporary and dynamic business landscape, characterized by swift technological advancements, evolving market dynamics, and changing business practices, the Company faces the imperative of staying agile and adaptive to remain competitive.

To be able to navigate external challenges and to be able to thrive in this increasingly competitive environment, it is imperative for the Company to be supported with a workforce that can swiftly adjust to emerging challenges and embrace innovation. In this context, the Company's Human Resource Development (HRD) initiatives will play a pivotal role in preparing employees for the complexities of the modern business world.

As business practices continuously evolving in response to economic shifts, regulatory changes, and emerging methodologies, the Company's should come up with suitable human resource development programs that will provide employees with the necessary tools and skills to understand, adopt, and implement new business practices.

Building upon identified training needs, the Company provides a range of educational / training programs in critical areas like digital transformation, data analytics, and customer service excellence. Additionally, nurturing a culture of continuous improvement.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT POLICY

PPI's HR development program, which was developed based on needs analysis and PPI's core values (integrity, discipline, flexibility, teamwork, and continuous improvement), is applied in every daily action to strengthen PPI's readiness to face emerging business challenges. The roles and responsibilities of employees are closely aligned with the overall strategic goals and objectives of the Company. By integrating employee functions with its business strategy, PPI ensures that what employees do on a day-to-day basis directly contributes to the achievement of the Company's targets as set by its shareholders.

PPI understands the importance of motivating its human resources to achieve their best performance. Therefore, PPI organizes systematic and intensive capacity and

dan kompetensi SDM yang sistematis dan intensif, serta menerapkan sistem pengembangan karier yang terstruktur.

PPI menegaskan komitmennya untuk terus mengelola SDM secara sejalan dengan visi dan misi PPI, sehingga siap menghadapi era globalisasi dan merealisasikan visi dan misi perusahaan dengan sukses.

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN SDM

Kebijakan mengenai pengelolaan SDM di PPI berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUTK);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan Perdagangan Indonesia PT (Persero) dengan Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Periode 2021-2023;
5. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 112/DirUmum&SDM/SKD/PPI/XI/2009 tentang Penerimaan Pegawai;
6. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
7. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 tentang Penilaian Kinerja Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Kebijakan pengelolaan SDM menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penerapan *reward* and *punishment* sampai dengan program pensiun.

Sepanjang tahun 2023, pasca pandemi COVID-19, PPI sudah menerapkan kebijakan *Work From Office* (WFO) secara penuh.

competency development programs for its human resources, as well as implements a structured career development system.

PPI reaffirms its commitment to continuously managing its human resources in line with PPI's vision and mission, thus preparing them to face the era of globalization and successfully realize the company's vision and mission.

LEGAL BASIS FOR HR MANAGEMENT

The policy regarding human resources management in PPI is based on the following regulations:

1. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUTK);
2. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment;
3. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 36 of 2021 concerning Wages;
4. Collective Labor Agreement (PKB) between Perusahaan Perdagangan Indonesia PT (Persero) and the Labor Union of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the Period 2021-2023;
5. Decision of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 112/DirUmum&SDM/SKD/PPI/XI/2009 regarding Employee Recruitment;
6. Regulation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 concerning Guidelines for the Implementation of Education and Training at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
7. Regulation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 concerning Performance Appraisal of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Employees.

The human resources management policy serves as a guideline for the implementation of human resources planning, recruitment, competence development, performance appraisal, application of rewards and punishments, and retirement programs.

Throughout the year 2023, post COVID-19 pandemic, PPI has fully implemented the *Work From Office* (WFO) policy.

RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Divisi SDM menyusun rencana pengembangan dan strategi pengelolaan SDM, serta melaksanakan program SDM untuk mencapai tujuan PPI.

STRUKTUR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN SDM

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 13/DU/SKD/PPI/ II/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 28 Februari 2023, jalannya pengelolaan program pengembangan dan strategi pengelolaan SDM di PPI berada di bawah tanggung jawab Divisi Pengembangan SDM dan Umum. Secara struktural, divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Pengembangan SDM dan Umum mencakup perencanaan kebijakan, hingga pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.

Per 31 Desember 2023, jumlah personil Divisi Pengembangan SDM dan Umum sebanyak 31 orang termasuk pegawai PPI yang ditugaskan ke PT BGR LI.

Berikut adalah struktur organisasi pengelola SDM di PPI:

SCOPE AND RESPONSIBILITIES

The scope and responsibilities of the Human Resources Division include formulating development plans and management strategies for human resources, as well as implementing human resources programs to achieve PPI's objectives.

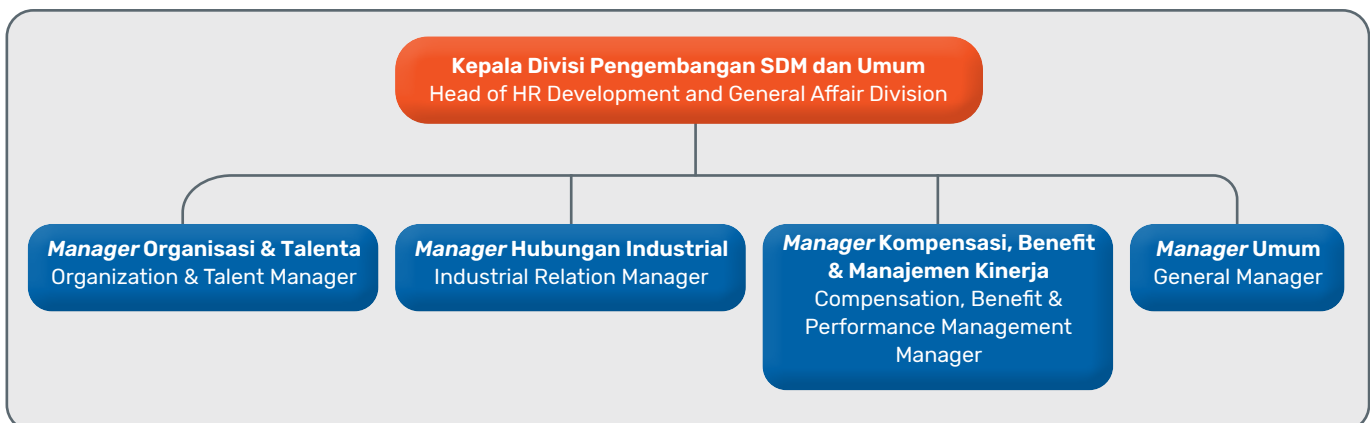
ORGANIZATION STRUCTURE IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

In accordance with Director's Decree No. 13/DU/SKD/PPI/ II/2023 regarding the Determination of the Organizational Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dated December 10, 2021, the management of the human resources development program and management strategy at PPI falls under the responsibility of the Human Resources Development and General Affairs Division. Structurally, this division reports directly to the Director of Finance, Risk Management, Human Resources, and General Affairs.

The tasks and responsibilities of the Human Resources Development and General Affairs Division include policy planning and the implementation of human resources development programs aimed at achieving the company's goals and objectives.

As of December 31, 2023, the number of personnel in the Human Resources Development and General Affairs Division is 31 people, including PPI employees assigned to PT BGR LI.

Below is the organizational structure of the human resources management at PPI:



TATA KELOLA SDM

Perencanaan SDM

Di tengah lanskap bisnis modern yang dinamis, pentingnya rencana pengembangan sumber daya manusia yang kuat tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perencanaan SDM yang demikian menjadi landasan bagi pengembangan tenaga kerja yang terampil, mudah beradaptasi, dan termotivasi, yang sangat penting untuk menghadapi kompleksitas pasar saat ini.

Dengan memprioritaskan pertumbuhan dan pengembangan karyawan, perusahaan akan mendapatkan banyak manfaat yang jauh melampaui peningkatan keterampilan individu. Rencana pengembangan sumber daya manusia yang disusun dengan baik akan meningkatkan kinerja karyawan dengan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk unggul dalam peran mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dengan efisiensi yang lebih besar. Selain itu, berinvestasi dalam pengembangan karyawan akan menumbuhkan budaya pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan, di mana kreativitas berkembang, dan ide-ide baru dipupuk.

Itu sebabnya PPI senantiasa memandang penting perencanaan SDM yang tepat yang diarahkan untuk dapat menghasilkan bibit-bibit pegawai unggul yang bertalenta dan profesional. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis PPI dalam merealisasikan visi, misi, dan target tahunan, serta untuk mendukung keberlangsungan bisnis PPI di masa mendatang dengan memastikan ketersediaan pekerja sesuai dengan pertumbuhan bisnis.

Dalam menyusun perencanaan pengembangan SDM, PPI melakukan koordinasi dengan Departemen Divisi SDM dan Umum. Hasil dari perencanaan SDM tersebut berupa daftar kebutuhan pekerja yang menjadi acuan pelaksanaan rekrutmen pekerja dan memudahkan proses penempatan pekerja menjadi lebih tepat.

Pengelolaan SDM

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selalu menilai kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja secara sistematis dengan melakukan analisa mengenai kebutuhan tenaga kerja, baik dalam hal kuantitas maupun keahlian, selama 5 tahun ke depan.

HR GOVERNANCE

HR Planning

In the dynamic landscape of modern business, the importance of a robust human resource development plan cannot be overstated. Such a plan serves as the cornerstone for cultivating a skilled, adaptable, and motivated workforce, essential for navigating the complexities of today's market.

By prioritizing employee growth and development, organizations unlock a multitude of benefits that extend far beyond individual skill enhancement. A well-crafted human resource development plan bolsters employee performance by equipping them with the necessary skills and knowledge to excel in their roles. This not only enhances productivity but also contributes to achieving organizational objectives with greater efficiency. Moreover, investing in employee development fosters a culture of continuous learning and innovation, where creativity flourishes, and new ideas are cultivated.

Therefore, PPI consistently emphasizes the importance of precise HR planning aimed at cultivating talented and professional employees. This is an indispensable component of PPI's business strategy to fulfill its vision, mission, and annual targets, as well as to ensure the sustainability of PPI's business in the future by aligning workforce availability with business growth.

In preparing HR development planning, PPI coordinates with the HR and General Division Department. The result of the HR planning is a list of worker needs which becomes a reference for the implementation of worker recruitment and facilitates the process of placing workers to be more precise.

HR Management

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia systematically assesses the requirements for workforce capabilities and capacities by conducting an analysis of workforce needs, both in terms of quantity and skills, for the next 5 years.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kebutuhan sumber daya manusia antara lain anggaran kebutuhan sumber daya manusia, strategi dan pengembangan PPI yang selaras dengan rencana bisnis, jumlah karyawan yang pensiun, sifat pekerjaan, dan ketersediaan keuangan.

Dalam melakukan evaluasi, secara konsisten Peseroan memberikan perhatian terhadap kebutuhan kapasitas tenaga kerja dengan menggunakan pendekatan yang membandingkan jumlah karyawan dengan target penjualan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP), yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

Dalam menilai kebutuhan ini tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan level jabatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, fungsi jabatan, status karyawan dan masa kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan formasi jabatan yang ada.

Rekrutmen Karyawan

Sepanjang perjalanan bisnisnya, PPI senantiasa berupaya merekrut karyawan yang berkualitas dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kompetensi yang unggul. PPI percaya bahwa hal ini sangat penting bagi keberhasilan dan ketahanan Perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Individu-individu ini tidak hanya membawa keterampilan dan keahlian yang berharga, tetapi juga menunjukkan kelincihan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menavigasi tren pasar yang terus berkembang, kemajuan teknologi, dan pergeseran prioritas. Dengan mencari kandidat yang memiliki rekam jejak kemampuan beradaptasi, ketahanan, dan kemauan untuk merangkul inovasi, PPI dapat memiliki talenta yang diperlukan untuk berkembang dalam lanskap bisnis yang terus berubah.

Selain itu, karyawan dengan kompetensi yang unggul tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi tetapi juga menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan mereka, menumbuhkan budaya perbaikan dan keunggulan yang berkelanjutan di tempat kerja. Oleh karena itu, berinvestasi dalam perekrutan talenta berkualitas tinggi bukan hanya sebuah keharusan strategis, tetapi juga merupakan pendorong utama kesuksesan dan daya saing jangka panjang.

Factors considered in the analysis of human resources needs include the budget for human resources requirements, PPI's strategies and developments aligned with the business plan, the number of retiring employees, the nature of the work, and financial availability.

In conducting evaluations, the Company consistently pays attention to labor capacity needs by using an approach that compares the number of employees with sales targets as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long Term Plan (RJP), which consists of permanent employees and non-permanent employees.

In assessing these needs, the workforce is categorized based on job level, education, age, gender, job function, employee status, and length of service. Short-term workforce needs are adjusted according to organizational requirements and existing job structures.

Employee Recruitment

Throughout its business journey, PPI has consistently endeavored to recruit high-quality employees capable of adapting to changes and possessing superior competencies. PPI believes it is essential for the success and resilience of the Company in today's dynamic business environment. These individuals not only bring valuable skills and expertise to the table but also demonstrate the agility and flexibility needed to navigate evolving market trends, technological advancements, and shifting priorities. By seeking out candidates with a track record of adaptability, resilience, and a willingness to embrace innovation, PPI can have the talent necessary to thrive in an ever-changing business landscape.

Moreover, employees with superior competencies not only contribute to the achievement of organizational goals but also inspire and motivate their peers, fostering a culture of continuous improvement and excellence within the workplace. Thus, investing in the recruitment of high-quality talent is not just a strategic imperative but a fundamental driver of long-term success and competitiveness.

PPI juga selalu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kewajaran dalam sistem rekrutmen, serta mempertimbangkan kompetensi calon karyawan. Mengadopsi nilai-nilai transparansi, kesetaraan, dan ketidakberpihakan dalam proses rekrutmen menumbuhkan lingkungan yang adil dan inklusif, menarik talenta yang beragam, serta meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan di antara para karyawan.

Program rekrutmen PPI dilaksanakan secara menyeluruh, di mana setiap calon karyawan akan dievaluasi secara ketat dari berbagai aspek latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, media sosial, dan kesehatan. Seleksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan.

PPI melakukan perencanaan SDM untuk mengetahui berapa banyak karyawan baru yang dibutuhkan dan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi kosong. Hal ini bertujuan agar strategi bisnis Perusahaan dapat berjalan dengan baik di jangka pendek dan panjang.

Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai hal ini, Divisi SDM dan Umum bekerja sama dengan unit-unit kerja terkait untuk memetakan kebutuhan karyawan secara lengkap.

PPI berfokus penjangkaran karyawan dari internal Perusahaan terlebih dahulu melalui promosi atau mutasi dengan memerhatikan kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan. Namun, PPI juga membuka kesempatan untuk merekrut melalui jalur fresh graduate dan profesional (*pro-hire*).

Keputusan untuk menerima atau menolak karyawan didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pada setiap kandidat, dengan mempertimbangkan kriteria yang diperlukan untuk mengisi posisi *vacant*.

Setelah dipilih, kandidat karyawan PPI akan diberikan program pengenalan (*induction program*) untuk memperkenalkan siklus bisnis Perusahaan, nilai-nilai budaya dan tata kelola Perusahaan, peluang pengembangan karier, serta tugas dan tanggung jawab mereka sebagai karyawan di PPI.

Sepanjang tahun 2023, PPI merekrut sebanyak 39 karyawan baru yang terdiri dari 0 orang dari jalur *pro-hire* dan 39 orang dari jalur reguler. Jumlah tersebut telah memadai dengan kebutuhan Perusahaan saat ini.

PPI also maintains the values of transparency, equality, and impartiality in its recruitment process, taking into account the competencies of potential candidates. Adopting the values of transparency, equality, and impartiality in the recruitment process fosters a fair and inclusive environment, attracting diverse talent and promoting trust and loyalty among employees.

PPI's recruitment program is conducted comprehensively, where each prospective employee is rigorously evaluated based on various aspects including background, education, work experience, social media presence, and health. Selection is made according to the required quantity and qualifications.

PPI conducts human resource planning to determine the number of new employees needed and the criteria to fill vacant positions. This is aimed at ensuring the company's business strategy runs smoothly in both the short and long term.

To gain a complete understanding of this, the HR and General Affairs Division collaborates with relevant units to map out the complete employee requirements.

PPI primarily focuses on sourcing employees internally through promotions or transfers, considering the required quality and capabilities. However, PPI also opens opportunities for recruitment through fresh graduate and professional channels (*pro-hire*).

Decisions to accept or reject employees are based on comprehensive evaluations of each candidate, considering the criteria needed to fill vacant positions.

Once selected, PPI employee candidates are provided with an induction program to introduce the company's business cycle, cultural values, governance, career development opportunities, as well as their roles and responsibilities as employees at PPI.

Throughout the year 2023, PPI recruited a total of 39 new employees, consisting of 0 individuals from the *pro-hire* channel and 39 individuals from the regular channel. This number adequately meets the company's current needs.

Kebijakan Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

PPI berkeyakinan bahwa program pengembangan karier karyawan merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dihindari di dalam proses pengelolaan SDM agar regenerasi organisasi tetap terjaga. Oleh sebab itu, PPI telah menerapkan sebuah sistem manajemen pengembangan karier berjenjang (tier-system) sebagai salah satu upaya retensi yang bertujuan untuk mempersiapkan karyawan berkualitas menempati berbagai posisi strategis di masa yang akan datang.

Penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan mengacu pada Sistem BSC (Balance Score Card) untuk setiap tingkatan, mulai dari KPI korporat hingga KPI individu. Selanjutnya hasil penilaian KPI tersebut digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam memberikan reward and punishment dan juga digunakan sebagai bahan penilaian dalam menentukan jenjang karier karyawan (carrier planning) mengacu pada kompetensi serta bakat yang dimiliki karyawan sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

PPI membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan agar mereka termotivasi untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu di PPI sebagai bagian dari pengembangan karier masing-masing.

Jumlah Karyawan

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan PPI tercatat sebanyak 1.298 orang, termasuk 781 orang yang diperbantukan ke anak perusahaan. Jumlah karyawan PPI mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.432 orang.

Uraian lengkap mengenai demografi karyawan PPI selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Performance Appraisal and Career Development Policy

PPI believes that employee career development programs are one of the important things that cannot be avoided in the HR management process so that organizational regeneration is maintained. Therefore, PPI has implemented a tier-system career development management system as one of the retention efforts aimed at preparing qualified employees to occupy various strategic positions in the future.

Employee performance assessment is conducted by referring to the BSC (Balance Score Card) System for each level, ranging from corporate KPIs to individual KPIs. Furthermore, the results of the KPI assessment are used by management as a basis for providing rewards and punishments and are also used as an assessment material in determining employee career paths (carrier planning) referring to the competencies and talents of employees so as to create quality human resources and in accordance with the needs of the Company.

PPI provides equal opportunities and opportunities to every employee so that they are motivated to continue to develop their potential so that they can occupy a certain position or position in PPI as part of their respective career development.

Number of Employees

As of December 31, 2023, the number of PPI employees was 1.298 people, including 781 people who were seconded to subsidiaries. The number of PPI employees has decreased compared to the previous year of 1,432 people.

A complete description of the demographics of PPI employees for the last 3 (three) years can be seen in the following tables:

Jumlah Karyawan Number of Employees

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Jumlah Karyawan Number of Employees	517	781	1.298	1.432	1.480

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Employee Composition by Position

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Kepala Divisi Head of Division	17	15	32	28	34
Kepala Cabang Head of Branch	30	25	55	33	53
Fungsional Utama Main Functional	4	-	4	6	8
Spesialis Utama Senior Specialist	0	32	32	26	76
Manager Manager	52	45	97	130	137
Fungsional Madya Intermediate Functional	2	-	2	1	2
Spesialis Madya Middle Specialist	-	-	-	-	-
Kepala Gudang Head of Warehouse	19	236	255	286	283
Asisten <i>Manager</i> Assistant Manager	106	95	201	174	168
<i>Officer</i>	154	315	469	597	574
Fungsional Muda Young Functional	5	-	5	4	1
<i>Salesman</i>	71	-	71	70	65
Apoteker Pharmacist	30	-	30	30	32
Kasir Cashier	26	18	44	43	42
<i>Management Trainee</i>	-	-	-	-	-
Tenaga Dasar Basic Staff	-	-	-	-	-
Supir Driver	1	-	1	4	5
Jumlah Total	517	781	1298	1438	1480

Komposisi Karyawan Berdasarkan Fungsi Jabatan Employee Composition by Position Function

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Komersial Commercial	244	555	799	902	882
Non-Komersial Non-Commercial	273	226	499	530	598
Jumlah Total	517	781	1.298	1.432	1.480

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition by Gender

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Pria Male	327	665	992	1.108	1.137
Wanita Female	190	116	306	324	343
Jumlah Total	517	781	1.298	1.432	1.480

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
< SMA < High School	67	387	454	531	561
Diploma-1 Diploma	4	11	15	16	15
Diploma-2 Diploma	1	2	3	2	2
Diploma-3 Diploma	45	89	134	1437	151
Strata-1 Bachelor's Degree	356	274	630	680	685
Strata-2 Master's Degree	43	18	61	65	65

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Strata-3 Doctorate	1	-	1	1	1
Jumlah Total	517	781	1.298	1.432	1.480

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition by Employment Status

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Tetap Permanent	449	781	1.230	1.324	1.406
Tidak Tetap Non-Permanent	68	-	68	108	74
Jumlah Total	517	781	1.298	1.432	1.480

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Employee Composition by Age

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
<25 tahun years old	5	1	6	11	37
25 – 36 tahun years old	239	339	578	690	724
37 – 45 tahun years old	161	236	397	376	354
46 – 50 tahun years old	56	92	148	173	186
51 – 55 tahun years old	55	113	168	177	175
>55 tahun years old	1	-	1	5	4
Jumlah Total	517	781	1.298	1.432	1.480

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja Employee Composition by Length of Service

Keterangan Description	2023			2022	2021
	PPI	Penugasan di Anak Perusahaan Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
<5 tahun years	164	135	299	387	309
5-10 tahun years	142	300	442	522	573
>10-15 tahun years	106	190	296	241	266
>15-25 tahun years	41	53	94	97	107
> 25 tahun years	64	103	167	185	225
Jumlah Total	517	781	1.298	1.432	1.480

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perusahaan senantiasa menaruh perhatian besar terhadap program pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan berkesinambungan. Program tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti kegiatan pelatihan dan program sertifikasi karyawan.

Semua model pelatihan yang disiapkan Perusahaan dapat dilaksanakan secara internal (*in-house training*) maupun eksternal. Pelatihan internal berarti pelatihan tersebut dilakukan di dalam lingkungan perusahaan.

Pada prinsipnya, program pengembangan kompetensi karyawan dapat diikuti oleh semua karyawan. Kendati demikian, manajemen tetap memperhatikan analisis kebutuhan program pelatihan atau pengembangan potensi SDM masing-masing karyawan (*training need analysis*) untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syaratlah yang diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan.

Setelah sesi pelatihan berakhir, manajemen akan mengevaluasi para peserta untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi manajemen untuk menentukan jenjang karier dan tingkat kebutuhan pelatihan lanjutan karyawan.

Dengan adanya program pengembangan kompetensi karyawan, Perusahaan optimis dapat membentuk generasi karyawan yang memiliki kinerja yang lebih efektif dengan

Employee Training and Development

The Company consistently places great emphasis on comprehensive and sustainable human resource competency development programs. These programs are implemented through various means, such as training activities and employee certification programs.

All training models prepared by the Company can be conducted internally (*in-house training*) or externally. Internal training means that the training is conducted within the company's environment.

In principle, employee competency development programs are open to all employees. Nevertheless, management still pays attention to the needs analysis of training programs or the development of each employee's HR potential (*training need analysis*) to ensure that every eligible employee is prioritized to attend the training held.

After the training sessions conclude, management evaluates the participants to measure the effectiveness of the training implementation. The evaluation results serve as the basis for management to determine career advancement and the level of further training needs for employees.

With the employee competency development programs in place, the company is optimistic about shaping a generation of employees with more effective performance,

semangat kompetitif, dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi dengan tempat kerja.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

PPI memberikan perhatian penuh terhadap program pengembangan kompetensi karyawan untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan luas sehingga diharapkan dapat mendukung daya saing Perusahaan di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Untuk itu, PPI menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang diselenggarakan setiap tahun dimana subjek pelatihan dan peserta yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan kebutuhan pengembangan organisasi. Dengan adanya program dan kegiatan pelatihan tersebut diharapkan seluruh karyawan menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya sesuai bidang profesi masing-masing, serta terpacu untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan pengetahuannya sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Berikut adalah target program kerja SDM pada tahun 2023.

competitive spirit, and higher loyalty to the workplace.

Employee Competency Development

PPI places full attention on employee competency development programs to ensure the availability of competent human resources with broad knowledge, thereby expected to support the company's competitiveness amidst increasingly intense industry competition.

Therefore, PPI provides training and competency development programs for human resources held annually, where the training subjects and participants involved are tailored to the needs of each individual and organizational development requirements. With these training programs and activities in place, it is hoped that all employees will be more motivated to enhance their qualifications in their respective fields of profession and driven to improve their skills, expertise, and knowledge, thus positively impacting the company's performance.

Following is the target for HR work program in 2023

No.	Nama Program Program Name	Indikator Target Target Indicator
1.	Peningkatan Kapabilitas Tenaga Penjualan Pupuk Subsidi Enhancement of Subsidized Fertilizer Sales Force Capability	Jumlah Pelatihan Total Training
2.	Pemenuhan SDM Pupuk Subsidi Fulfillment of HR for Subsidized Fertilizer	100%
3.	Pemenuhan SDM Pupuk Non Subsidi Fulfillment of HR for Non-Subsidized Fertilizer	100%
4.	Peningkatan Kapabilitas Tenaga Penjualan Pupuk Non-Subsidi Enhancement of Non-Subsidized Fertilizer Sales Force Capability	Jumlah Pelatihan Total Training
5.	Pemenuhan SDM Komersial Saprotan Berlatar Belakang Agronomis Fulfillment of HR for Saprotan Commercial with Agronomic Background	%
6.	Pemenuhan Tenaga Salesman Bahan Pokok di 12 Cabang Fulfillment of Staple Food Salesman in 12 Branches	Jumlah Cabang Number of Branches
7.	Peningkatan Kapabilitas Tenaga Penjualan Bahan Kimia Enhancement of Chemical Sales Force Capability	Jumlah Pelatihan Number of Training
8.	Peningkatan Kapabilitas Tenaga Penjualan Perdagangan Internasional Enhancement of International Trade Sales Force Capability	Jumlah Pelatihan Number of Training
9.	Peningkatan Kapabilitas Tenaga Aset Enhancement of Asset Sales Force Capability	Jumlah Pelatihan Number of Trainings
10.	Peningkatan Tenaga Penjualan WP Enhancement of WP Sales Force	Jumlah Pelatihan Number of Trainings

No.	Nama Program Program Name	Indikator Target Target Indicator
11.	Realokasi Strategi SDM HR Reallocation Strategy	% Pegawai Komersial % Commercial Employees
12.	Pemenuhan Kebutuhan SDM Komersial dan Non Komersial Cabang – <i>Manager</i> Komersial Fulfillment of HR for Commercial and Non-Commercial Branch - Commercial Manager	Jumlah Cabang Number of Branches
13.	Pemenuhan Kebutuhan SDM Komersial dan Non Komersial Cabang – Non Komersial Fulfillment of HR for Commercial and Non-Commercial Branch - Non- Commercial	Jumlah Cabang Number of Branches
14.	Peningkatan Kapabilitas Tenaga Penjualan Farmasi Enhancement of Pharmaceutical Sales Force Capability	Jumlah Pelatihan Number of Training
15.	Pemenuhan Kebutuhan Salesman Bahan Bangunan di 4 Cabang Fulfillment of Construction Materials Salesmen in 4 Branches	Jumlah Cabang Number of Branches
16.	<i>Mandatory Holding Program – Basic Development Program</i> Mandatory Holding Program - Basic Development Program	% Kehadiran % Attendance
17.	<i>Mandatory Holding Program – Talent Acceleration Program</i> Mandatory Holding Program - Talent Acceleration Program	% Kehadiran % Attendance
18.	<i>Mandatory Holding Program – Young Development Program</i> Mandatory Holding Program - Young Development Program	% Kehadiran % Attendance
19.	<i>Mandatory Holding Program – Group Development Program</i> Mandatory Holding Program - Group Development Program	% Kehadiran % Attendance
20.	Pelaksanaan BMDP (Staf) Implementation of BMDP (Staff)	Jumlah Pelaksanaan Number of Implementations
21.	Pelaksanaan BMDP (BOD-2) Implementation of BMDP (BOD-2)	Jumlah Pelaksanaan Number of Implementations
22.	Pelaksanaan SMDP (Masa Kerja BOD-1 di atas 3 tahun) Implementation of SMDP (BOD-1 with over 3 years of tenure)	Jumlah Pelaksanaan Number of Implementation
23.	Pelaksanaan DDP (Masa Kerja BOD-1 di atas 3 tahun) Implementation of DDP (BOD-1 with over 3 years of tenure)	Jumlah Pelaksanaan Number of Implementation
24.	<i>Executive Development Program</i> Executive Development Program	Jumlah Pelaksanaan Number of Implementations
25.	<i>Mandatory Holding Program – Person Mapping</i> Mandatory Holding Program - Person Mapping	Waktu Time
26.	Integrasi Organisasi – <i>Man Power Planning ID Food Group</i> Organization Integration - Manpower Planning ID Food Group	Waktu Time
27.	Standarisasi <i>Integrated Talent Management System (ITMS)</i> Standardization of Integrated Talent Management System (ITMS)	Waktu Time
28.	Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko melalui Sertifikasi Profesi Fulfillment of Risk Management Team Qualifications through Professional Certification	Penambahan Addition
29.	<i>Reward dan Insentif Sales</i> Sales Rewards and Incentives	Waktu Time
30.	INDI 4.0 INDI 4.0	Skor Score

No.	Nama Program Program Name	Indikator Target Target Indicator
31.	Program Making Digital Talent BUMN BUMN Digital Talent Making Program	7% dari semua karyawan (Organik & Non Organik, termasuk Anak Perusahaan) 7% of all employees (Organic & Non Organic, including Subsidiaries)
32.	Pemenuhan Amanat UU Penyandang Disabilitas Fulfillment of Mandate of Disabilities Act	Waktu Time
33.	Talent Management Program – Wanita Talent Management Program – Women	% Talent Wanita % Female Talent
34.	Talent Management Program – Milenial Talent Management Program – Millennials	% Talent Wanita % Female Talent

Bila dilihat dari jenisnya, maka program pengembangan SDM yang dilaksanakan PPI di tahun 2023 antara lain adalah:

1. Development Program;
2. PPIjar;
3. In-House Training;
4. BoD Training;
5. Outbound;
6. Public Training;
7. Sertifikasi.

When viewed by type, the human resources development programs implemented by PPI in 2023 include:

1. Development Program;
2. PPIjar;
3. In-House Training;
4. BoD Training;
5. Outbound;
6. Public Training.
7. Certification.

Pada tahun tahun 2023, jumlah karyawan (PKWTT, PKWT, OS Magang, Anak Perusahaan, Pihak Eksternal, dan Direks) yang mengikuti kegiatan In-House Training dan pelatihan eksternal, tercatat mencapai 478 orang, dengan Total Jam Pelatihan 15.027 jam.

In 2023, the number of employees (PKWTT, PKWT, OS Interns, Subsidiaries, External Parties, and Directors) who participated in In-House Training activities and external training, was recorded at 478 people, with a total of 15,027 hours of training.

Biaya Pengembangan Kompetensi SDM tahun 2023 turun 9,47% dari Rp 1.544.814.087 di tahun 2022 menjadi Rp 1.398.509.380 di tahun 2023.

HR Competency Development costs in 2023 decreased by 9.47% from Rp 1,544,814,087 in 2022 to Rp 1,398,509,380 in 2023.

Pelatihan-pelatihan yang dijalankan Perusahaan pada tahun 2023 dapat terlihat pada table di bawah ini:

The trainings conducted by the Company in 2023 can be seen in the table below:

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
1	Anggaran Dasar Perusahaan sebagai Pedoman Utama dalam Pengurusan Perusahaan The Company's Articles of Association as the Main Guideline in the Management of the Company	- Tugas organ Perusahaan - Wewenang organ Perusahaan - Kewajiban organ Perusahaan - Duties of Company organs - Authority of the Company's organs - Obligations of the Company's organs	<i>In-house training</i>	20 Januari 2023 January 20, 2023	20 Januari 2023 January 20, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
2	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Personal Data Protection Law	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkup data pribadi dan data pribadi di lingkungan korporasi, di mana kami akan menyampaikan gambaran lingkup data pribadi yang diatur oleh UU PDP serta data pribadi yang mungkin dikumpulkan dan dikelola oleh korporasi. - Dasar dan aktivitas pemrosesan data pribadi. - Mekanisme pengiriman data pribadi, yang mana akan kami sampaikan strategi kepatuhan atas tindakan pengiriman data pribadi antara anak perusahaan dan <i>holding</i>, atau <i>holding</i> dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri. - Risiko sanksi administratif dan pidana terhadap korporasi atas penerapan UU PDP. - The scope of personal data and personal data in the corporate environment, where we will provide an overview of the scope of personal data governed by the PDP Law as well as personal data that may be collected and managed by corporations. - Personal data processing basics and activities. - Mechanisms for transmitting personal data, where we will present compliance strategies for the act of transmitting personal data between subsidiaries and holding companies, or holding companies and other parties both at home and abroad. - Risks of administrative and criminal sanctions against corporations for the implementation of the PDP Law. 	<i>In-house training</i>	18 Januari 2023 January 18, 2023	18 Januari 2023 January 18, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
3	UU PDP dan Data SDM Korporasi PDP Law and Corporate HR Data	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar dan mekanisme pemrosesan data pribadi karyawan - Strategi pengelolaan risiko terkait pengumpulan data pribadi karyawan, mantan karyawan dan calon karyawan PT PPI - Strategi pengelolaan risiko terkait transfer data pribadi karyawan dari anak perusahaan ke <i>holding (vice versa)</i>, atau ke kementerian/lembaga terkait - Tata kelola perlindungan data pribadi pada MySISKA - Basis and mechanism for processing employee personal data - Risk management strategies related to the collection of personal data of employees, former employees and prospective employees of PT PPI - Risk management strategies related to the transfer of employee personal data from subsidiaries to holding companies (vice versa), or to relevant ministries / agencies - Personal data protection governance on MySISKA 	<i>In-house training</i>	03 Februari 2023 February 03, 2023	03 Februari 2023 February 03, 2023
4	Program Motivasi & <i>Treatment Softskill</i> Peranan Intuisi dalam Bekerja - <i>Batch 1</i> Motivation & Soft skill Treatment Program on the Role of Intuition in Work - Batch 1	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan wawasan dan keterampilan mengembangkan Afirmasi dan Visualisasi - Meningkatkan kemampuan berpikir cepat dalam menjaga kepekaan <i>holistic</i> dengan kecerdasan intuisi - Melatih bisnis intuisi yang berguna sebagai kelengkapan diri dalam menjalankan bisnis Perusahaan - Providing insights and skills to develop Affirmations and Visualization - Enhance the ability to think fast in maintaining holistic sensitivity with intuition intelligence - Train business intuition that is useful as a self-completion in running the Company's business 	<i>In-house training</i>	07 Februari 2023 February 07, 2023	07 Februari 2023 February 07, 2023
5	<i>Supervisor Development Program</i> - Pemasaran Supervisor Development Program - Marketing	Proses bisnis Pemasaran PT PPI PT PPI Marketing business process	<i>In-house training</i>	09 Februari 2023 February 09, 2023	09 Februari 2023 February 09, 2023
6	<i>Supervisor Development Program</i> - Perencanaan Strategis Korporasi Supervisor Development Program - Corporate Strategic Planning	Proses bisnis Perencanaan Strategis Korporasi PT PPI PT PPI Corporate Strategic Planning business process	<i>In-house training</i>	09 Februari 2023 February 09, 2023	09 Februari 2023 February 09, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
7	PPIjar - Cara Penyampaian SPT PPIjar - How to Submit Tax Return	Pelaporan SPT Tax Return Reporting	<i>In-house training</i>	13 Februari 2023 February 13, 2023	13 Februari 2023 February 13, 2023
8	Orientasi Perpindahan Penugasan Karyawan BLI ke PPI Orientation for Secondment of BLI Employees to PPI	Profil PT PPI & Tata Tertib PT PPI Profile & Code of Conduct	<i>In-house training</i>	16 Februari 2023 February 16, 2023	16 Februari 2023 February 16, 2023
9	<i>Supervisor Development Program</i> - Pengadaan Supervisor Development Program - Procurement	Proses bisnis Pengadaan PT PPI PT PPI Procurement business process	<i>In-house training</i>	16 Februari 2023 February 16, 2023	16 Februari 2023 February 16, 2023
10	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	<ul style="list-style-type: none"> - Kegunaan BPJS Ketenagakerjaan - <i>Benefit</i> BPJS Ketenagakerjaan - Usefulness of BPJS Ketenagakerjaan - Benefits of BPJS Employment 	<i>In-house training</i>	21 Februari 2023 February 21, 2023	21 Februari 2023 February 21, 2023
11	<i>Train The Trainer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan para <i>trainer</i> dari Perusahaan pestisida dalam penguasaan materi tentang pemahaman dan peramalam OPT, <i>management</i> resistensi, motivasi dan perubahan perilaku tenaga penjualan, <i>selling skill</i>, pengawasan pupuk dan pestisida, dan teknik presentasi yang baik - Menyiapkan calon tenaga trainer yang kompeten dalam lingkungan industri pestisida - Menyiapkan standarisasi minimal anggota Asosiasi <i>Crop Care</i> Indonesia dalam penyampaian pengetahuan pestisida kepada para petani pada umumnya - Mendorong petani Indonesia untuk maju dan mampu menggunakan pestisida secara aman, efektif dan efisien 	<i>Public Training</i>	21 Februari 2023 February 21, 2023	23 Februari 2023 February 21, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
		<ul style="list-style-type: none"> - Increasing the knowledge of trainers from pesticide companies in mastering material on understanding and experiencing pests, resistance management, motivation and behavior change of salespeople, selling skills, supervision of fertilizers and pesticides, and good presentation techniques - Prepare prospective trainers who are competent in the pesticide industry environment - Prepare a minimum standardization of members of the Indonesian Crop Care Association in the delivery of pesticide knowledge to farmers in general - Encourage Indonesian farmers to advance and be able to use pesticides safely, effectively and efficiently 			
12	<i>Certified Risk Associate</i>	Untuk memperkuat kualitas personil organ Pengelola Risiko To strengthen the quality of Risk Management organ personnel	Sertifikasi Certification	21 Februari 2023 February 21, 2023	23 Februari 2023 February 23, 2023
13	Program Motivasi & <i>Treatment Softskill</i> Peranan Intuisi dalam Bekerja - <i>Batch 2</i> Motivation Program & Softskill Treatment on the Role of Intuition in Work - Batch 2	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan wawasan dan keterampilan mengembangkan Afirmasi dan Visualisasi - Meningkatkan kemampuan berpikir cepat dalam menjaga kepekaan holistic dengan kecerdasan intuisi - Melatih bisnis intuisi yang berguna sebagai kelengkapan diri dalam menjalankan bisnis Perusahaan - To provide insights and skills to develop affirmations and visualizations - To improve the ability to think fast in maintaining holistic sensitivity with intuition intelligence - To train business intuition which is useful as a self-completion in running the Company's business. 	<i>In-house Training</i>	22 Februari 2023 February 22, 2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
14	<i>Supervisor Development Program - Penjualan</i> Supervisor Development Program - Sales	Proses bisnis Penjualan PT PPI PT PPI Sales business process	<i>In-house training</i>	23 Februari 2023 February 23, 2023	23 Februari 2023 February 23, 2023
15	<i>Supervisor Development Program - Leadership</i> Supervisor Development Program - Leadership	Pembekalan kepemimpinan untuk suksesi BOD-3 Leadership briefing for BOD-3 succession	<i>In-house training</i>	23 Februari 2023 February 23, 2023	23 Februari 2023 February 23, 2023
16	Uji Kompetensi Manajemen Risiko I Risk Management Competency Test I	Uji kompetensi Manajemen Risiko Risk Management competency test	Sertifikasi Certification	08 Maret 2023 March 08, 2023	08 Maret 2023 March 08, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
17	<i>Unlocking Your Potential</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait <i>Global Business Savvy</i> yang selaras dengan kompetensi BUMN - Memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait <i>Trading Skill</i> yang selaras dengan kompetensi BUMN - Memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait <i>Unlock Your Potential</i> yang selaras dengan kompetensi BUMN - Providing knowledge, skills and attitudes related to Global Business Savvy that are aligned with BUMN competencies - Providing knowledge, skills and attitudes related to Trading Skills that are aligned with BUMN competencies - Providing knowledge, skills and attitudes related to Unlock Your Potential that are aligned with BUMN competencies 	<i>In-house training</i>	10 Maret 2023 March 10, 2023	11 Maret 2023 March 11, 2023
18	CBDO Cohort 2 Tahun 2023 CBDO Cohort 2 Year 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pengetahuan <i>The Phoenix Encounter Method of Business Model Innovation</i> - Memberikan pengetahuan <i>Strategic Management</i> - Memberikan simulasi <i>Phoenix Encounter</i> - Memberikan pengetahuan <i>Harnessing Emerging Technologies for Effective Innovation</i> - Memberikan pengetahuan <i>Strategy, Growth & Innovation in the Digital Age</i> - Memberikan pengetahuan <i>Creating Value and Innovation through M&As</i> - Memberikan pengetahuan <i>Mastering Technology Acquisitions & Post-Merger Integration</i> - Memberikan pengetahuan <i>Negotiating Effective Deal Structures</i> - Memberikan pengetahuan <i>Mastering Joint Venture</i> - Memberikan pengetahuan <i>How to Build Innovative Products & Service</i> 	<i>Public Training</i>	11 Maret 2023 March 11, 2023	12, 16, 17, 24, 29 Maret 2023 5-6 April 2023 March 12, 16, 17, 24, 29, 2023 March 5-6, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
		<ul style="list-style-type: none"> - Providing knowledge of The Phoenix Encounter Method of Business Model Innovation - Providing knowledge of Strategic Management - Providing Phoenix Encounter simulation - Providing knowledge of Harnessing Emerging Technologies for Effective Innovation - Providing knowledge of Strategy, Growth & Innovation in the Digital Age - Providing knowledge of Creating Value and Innovation through M&As - Providing knowledge of Mastering Technology Acquisitions & Post-Merger Integration - Providing knowledge of Negotiating Effective Deal Structures - Mastering Joint Venture knowledge - Providing knowledge How to Build Innovative Products & Services 			
19	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level II Level II Risk Management Competency Test	Uji kompetensi Manajemen Risiko Risk Management competency test	Sertifikasi Certification	15 Maret 2023 March 15, 2023	15 Maret 2023 March 15, 2023
20	Bela Negara State Defense	Pembentukan kepribadian Personality building	In-house training	17 Maret 2023 March 17, 2023	21 Maret 2023 March 21, 2023
21	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level III Level III Risk Management Competency Test	Uji kompetensi Manajemen Risiko Risk Management competency test	Sertifikasi Certification	24 Maret 2023 March 24, 2023	24 Maret 2023 March 24, 2023
22	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level IV Level IV Risk Management Competency Test	Uji kompetensi Manajemen Risiko Risk Management competency test	Sertifikasi Certification	31 Maret 2023 March 31, 2023	31 Maret 2023 March 31, 2023
23	<i>Certified Risk Professional (CRP)</i> Certified Risk Professional (CRP)	Perlu dalam melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan audit Necessary in conducting audit planning and execution process	Sertifikasi Certification	04 April 2023 April 04, 2023	06 April 2023 April 06, 2023
24	Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level V Level V Risk Management Competency Test	Uji kompetensi Manajemen Risiko Risk Management competency test	Sertifikasi Certification	06 April 2023 April 06, 2023	06 April 2023 April 06, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
25	<i>Inhouse Training</i> Pelatihan HIRADC & Auditor SMK3 Inhouse Training HIRADC & SMK3 Auditor Training	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung implementasi SMK3 di Perusahaan - Menunjang proses bisnis di unit kerja - Supporting the implementation of SMK3 in the Company - Supporting business processes in work units 	<i>Public Training</i>	06 Juli 2023 July 06, 2023	06 Juli 2023 July 06, 2023
26	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Sekretariat Perusahaan Orientation program on Corporate Secretariat Subject for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB)	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Sekretariat Perusahaan Knowing STO, Business Processes, and Challenges at the Corporate Secretariat	<i>In-house training</i>	02 Mei 2023 May 02, 2023	02 Mei 2023 May 02, 2023
27	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi SPI Orientation program on SPI Subject for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB)	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di SPI Knowing STO, Business Processes, and Challenges in SPI	<i>In-house training</i>	02 Mei 2023 May 02, 2023	02 Mei 2023 May 02, 2023
28	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Hukum dan Kepatuhan Orientation program on Legal and Compliance Subject for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB)	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Satuan Hukum dan Kepatuhan Knowing STO, Business Processes, and Challenges in the Legal and Compliance Division	<i>In-house training</i>	02 Mei 2023 May 02, 2023	02 Mei 2023 May 02, 2023
29	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Manajemen Perubahan, Mutu & Sistem Tata Kerja Orientation program on Quality & Work System Subject for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB)	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Manajemen Perubahan, Mutu & Sistem Tata Kerja Knowing STO, Business Process, and Challenges in Change Management, Quality & Work System Division	<i>In-house training</i>	03 Mei 2023 May 03, 2023	03 Mei 2023 May 03, 2023
30	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Orientation program on Strategic Planning & Business Development Subject for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Knowing STO, Business Process, and Challenges in Strategic Planning & Business Development Division	<i>In-house training</i>	03 Mei 2023 May 03, 2023	03 Mei 2023 May 03, 2023
31	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Pengembangan SDM & Umum Orientation program on HR Development & General Affairs Subject for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Pengembangan SDM & Umum Knowing STO, Business Process, and Challenges in HR & General Development Division	<i>In-house training</i>	03 Mei 2023 May 03, 2023	03 Mei 2023 May 03, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
32	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Akuntansi & Perpajakan Orientation program on Accounting & Taxation Subject for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Akuntansi & Perpajakan Knowing STO, Business Process, and Challenges in Accounting & Taxation Division	<i>In-house training</i>	03 Mei 2023 May 03, 2023	03 Mei 2023 May 03, 2023
33	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Manajemen Keuangan Orientation program on Financial Management for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Manajemen Keuangan Knowing STO, Business Process, and Challenges in Financial Management Division	<i>In-house training</i>	04 Mei 2023 May 04, 2023	04 Mei 2023 May 04, 2023
34	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi IT & ERP Orientation program on IT & ERP for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi IT & ERP Knowing STO, Business Process, and Challenges in IT & ERP Division	<i>In-house training</i>	04 Mei 2023 May 04, 2023	04 Mei 2023 May 04, 2023
35	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Aset & K3LL Orientation program on Asset & HSE for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Aset & K3LL Knowing STO, Business Process, and Challenges in Asset & HSE Division	<i>In-house training</i>	05 Mei 2023 May 05, 2023	05 Mei 2023 May 05, 2023
36	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Manajemen Risiko & Piutang Orientation program on Risk & Receivables Management for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Manajemen Risiko & Piutang Knowing STO, Business Processes, and Challenges in Risk & Receivables Management Division	<i>In-house training</i>	05 Mei 2023 May 05, 2023	05 Mei 2023 May 05, 2023
37	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Perdagangan Produk Strategis Orientation program on Strategic Product Trading for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Perdagangan Produk Strategis Knowing STO, Business Process, and Challenges in Strategic Product Trading Division	<i>In-house training</i>	05 Mei 2023 May 05, 2023	05 Mei 2023 May 05, 2023
38	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Perdagangan Internasional Orientation program on International Trading for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Perdagangan Internasional Knowing the STO, Business Process, and Challenges in International Trade Division	<i>In-house training</i>	06 Mei 2023 May 06, 2023	06 Mei 2023 May 06, 2023
39	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Pemasaran & Portofolio Cabang Orientation program on Branch Marketing & Portfolio for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Pemasaran & Portofolio Cabang Knowing the STO, Business Processes, and Challenges in Branch Marketing & Portfolio Division	<i>In-house training</i>	06 Mei 2023 May 06, 2023	06 Mei 2023 May 06, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
40	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Komoditas Pangan & Produk Konsumen Orientation program on Food Commodities & Consumer Products for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Komoditas Pangan & Produk Konsumen Knowing the STO, Business Process, and Challenges in Food Commodities & Consumer Products Division	<i>In-house training</i>	06 Mei 2023 May 06, 2023	06 Mei 2023 May 06, 2023
41	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi <i>Strategic Sourcing</i> Orientation program on Strategic Sourcing for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi <i>Strategic Sourcing</i> Knowing the STO, Business Process, and Challenges in Strategic Sourcing Division	<i>In-house training</i>	06 Mei 2023 May 06, 2023	06 Mei 2023 May 06, 2023
42	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Pengadaan & Logistik Orientation program on Procurement & Logistics for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Pengadaan & Logistik Knowing the STO, Business Process, and Challenges in Procurement & Logistics Division	<i>In-house training</i>	06 Mei 2023 May 06, 2023	06 Mei 2023 May 06, 2023
43	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Perdagangan Non-Bahan Pokok Orientation program on Non-Staple Trade for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di Divisi Perdagangan Non-Bahan Pokok Knowing the STO, Business Process, and Challenges in Non-Staple Trade Division	<i>In-house training</i>	06 Mei 2023 May 06, 2023	06 Mei 2023 May 06, 2023
44	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi <i>Property</i> Orientation program on Property for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di <i>PMO Property</i> Knowing the STO, Business Process, and Challenges in PMO Property	<i>In-house training</i>	10 Mei 2023 May 10, 2023	10 Mei 2023 May 10, 2023
45	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi WIS Orientation program on WIS for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Mengetahui STO, Bisnis Proses, dan Tantangan di PMO WIS Knowing STO, Business Process, and Challenges in PMO WIS	<i>In-house training</i>	10 Mei 2023 May 10, 2023	10 Mei 2023 May 10, 2023
46	Orientasi Karyawan Baru RBB Materi Motivasi Orientation program on Motivation for New Employee from SOE Joint Recruitment (RBB).	Sesi Motivasi Motivation Session	<i>In-house training</i>	11 Mei 2023 May 11, 2023	11 Mei 2023 May 11, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
47	Penilaian Kapabilitas SPI Korporasi BUMN (<i>Internal Audit Capability Model</i>) Capability Assessment of SOE Corporate SPI (Internal Audit Capability Model)	Membekali personil SPI dengan kompetensi terkait penyelenggaraan, <i>monitoring</i> dan pengakuan internal audit capability model (IACM) pada organisasi atau Perusahaan Equip SPI personnel with competencies related to the implementation, monitoring and accounting of the internal audit capability model (IACM) in the organization or company.	<i>Public Training</i>	08 Mei 2023 May 08, 2023	12 Mei 2023 May 12, 2023
48	Kepatuhan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> Hazard Analysis and Critical Control Points Compliance	Kepatuhan <i>Hazard Analysis & Critical Control Points</i> Hazard Analysis & Critical Control Points Compliance	<i>Public Training</i>	20 Mei 2023 May 20, 2023	25 Mei 2023 May 25, 2023
49	<i>Branding for the Game Changers</i> Branding for the Game Changers	<i>To shake the competition landscape and create pathway to success</i> To shake the competition landscape and create a pathway to success	<i>Public Training</i>	11 Mei 2023 May 11, 2023	11 Mei 2023 May 11, 2023
50	Diskusi: <i>Build Confidence in Communication</i> Discussion: Build Confidence in Communication	- Penggalan data perilaku - Pertanyaan perilaku - Pemahaman kompetensi - Memahami proses asesmen - Behavioral data mining - Behavioral questioning - Competency understanding - Understanding the assessment process	<i>In-house training</i>	17 Mei 2023 May 17, 2023	17 Mei 2023 May 17, 2023
51	Standarisasi Kompetensi PJT sesuai Peraturan PMK No. 14 Tahun 2021 Standardization of PJT Competencies in accordance with PMK Regulation No. 14 of 2021	Sebagai persyaratan untuk mendapatkan CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) yang wajib dimiliki oleh PBF yang menjual Alat Kesehatan) As a requirement to obtain CDAKB (Good Medical Device Distribution Method) which must be owned by PBFs that sell Medical Devices)	<i>Public Training</i>	22 Juni 2023 June 22, 2023	23 Juni 2023 June 23, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
52	<i>Workshop</i> Ketenagakerjaan Nasional Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Jalur Pengadilan dan diluar Pengadilan National Employment Workshop on Settlement of Industrial Relations Disputes through Court and out of Court channels	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan analisis dan memahami ketentuan ketenagakerjaan berdasarkan UU Cipta Kerja - Dapat melakukan sinkronisasi peraturan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hubungan industri di Perusahaan - Memahami penerapan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hubungan industrial di Perusahaan - Mampu menangani permasalahan PHK secara internal (mediasi) dan eksternal (pengadilan) - Memahami dasar teknis perundingan dalam hubungan industrial menurut UU Cipta Kerja - Ability to analyze and understand labor provisions based on the Job Creation Law - Able to synchronize Job Creation Law regulations related to industrial relations in the Company - Understand the application of the Job Creation Law relating to industrial relations in the Company - Able to handle termination issues internally (mediation) and externally (court) - Understand the technical basis of negotiation in industrial relations according to the Job Creation Law 	<i>Public Training</i>	19 Juni 2023 June 19, 2023	20 Juni 2023 June 20, 2023
53	Audit Investigasi dan Analisis Titik Kritis/Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Investigation Audit and Critical Point/Fraud Analysis in Goods and Services Procurement	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk dapat membantu tim/divisi dalam audit pengadaan barang & jasa - Menganalisa proses atau titik lemah dalam pengadaan barang & jasa - To be able to assist teams/divisions in the audit of goods & services procurement - Analyze the process or weak points in the procurement of goods & services 	<i>Public Training</i>	23 Juni 2023 June 23, 2023	24 Juni 2023 June 24, 2023
54	<i>Group Development Program (GDP) Vol.1 Topik "Strategic Direction ID FOOD"</i>	<i>Strategic Orientation</i>	<i>Inhouse Training</i>	24 Juni 2023 June 24, 2023	24 Juni 2023 June 24, 2023
55	<i>Young Talent Development Program (YTDP) - Vol. 1</i>	<i>Strategic Direction</i>	<i>In-house training</i>	12 Juli 2023 July 12, 2023	12 Juli 2023 July 12, 2023
56	<i>Talent Acceleration Program (TAP) Sharing Session Vol. 1 Tahun 2023</i>	<i>Strategic Direction</i>	<i>In-house training</i>	14 Juli 2023 July 14, 2023	14 Juli 2023 July 14, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
57	Bimbingan Teknis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Technical Guidance on Increasing the Use of Domestic Products (P3DN)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman terhadap Inpres No. 2 tahun 2022 beserta regulasi - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan penggunaan produk dalam negeri - Penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan P3DN - Kewajiban penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Nilai TKDN - Penerapan TKDN pada tiap-tiap tahapan pengadaan barang/jasa - Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam kontrak - Verifikasi TKDN dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan - Tata cara <i>Self Assesment</i> TKDN - Understanding of Presidential Instruction No. 2 of 2022 and its regulations - Implementation of Procurement of Goods and Services with the use of domestic products - Budget absorption of procurement of goods and services that prioritize P3DN - Obligation to use domestic products based on TKDN Value - The application of TKDN at each stage of the procurement of goods / services - Utilization of Domestic Products (PDN) in the contract - Verification of TKDN and Weighted Value of Company Benefits <p>TKDN Self-Assessment Procedure</p>	Public Training	09 Agustus 2023 August 09, 2023	10 Agustus 2023 August 10, 2023
58	Young Talent Development Program (YTDP) Sharing Session Vol. 2 Tahun 2023	Strategic Orientation	In-house training	18 Agustus 2023 August 18, 2023	18 Agustus 2023 August 18, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
59	<i>Certification In Audit Committee Practices (CACP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan kompetensi dasar Komite Audit berbasis Panduan Komite Audit (KA) tahun 2019 - Mendapatkan pengalaman dari praktisi Komite Audit yang menjadi trainer CACP - Memperkaya wawasan mengenai praktik Komite Audit dari pengalaman peserta CACP - Mendapatkan nilai tambah sebagai pemegang gelar sertifikasi CACP di mata stakeholder - Menjadi bagian dari komunitas profesi Komite Audit di Indonesia - Get the basic competencies of the Audit Committee based on the 2019 Audit Committee Guidelines (KA) - Gain experience from Audit Committee practitioners who are CACP trainers - Enrich insight into the practice of the Audit Committee from the experience of CACP participants - Gain added value as a CACP certification title holder in the eyes of stakeholders - Become part of the Audit Committee professional community in Indonesia 	Sertifikasi Certification	22-24 Agustus 2023 28 Agustus 2023 August 22-24, 2023 August 28, 2023	22-24 Agustus 2023 28 Agustus 2023 August 22-24, 2023 August 28, 2023
60	<i>Leadership</i>	<p>Sesi Motivasi dari Direktur yang membidangi SDM PT RNI</p> <p>Motivational Session from the Director in charge of HR PT RNI</p>	<i>In-house training</i>	30 Agustus 2023 August 30, 2023	30 Agustus 2023 August 30, 2023
61	<p>Pembekalan GCG Tahun 2023 Diselenggarakan Oleh PT PPI & BPKP Provinsi DKI</p> <p>GCG Debriefing in 2023 Organized by PT PPI & BPKP DKI Province</p>	<p>Bertujuan meningkatkan kapabilitas dalam penerapan GCG melalui <i>best practice</i> dari <i>corporate governance</i>, peraturan yang berlaku, perbaikan praktik-praktik <i>corporate governance</i> guna meningkatkan kualitas penerapan <i>corporate governance</i> di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) secara berkesinambungan</p> <p>Aims to improve capabilities in the implementation of GCG through best practices of corporate governance, applicable regulations, improvement of corporate governance practices in order to improve the quality of corporate governance implementation at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) on an ongoing basis.</p>	<i>In-house training</i>	05 September 2023 September 05, 2023	07 September 2023 September 07, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
62	<i>Certified Branch Manager Development Program (Online)</i>	<p>Penyiapan pemimpin Cabang dengan pembekalan materi <i>leadership, business strategy, business execution, Human Capital Management, Service, Financial, Cash Management, Sales Management, dan Marketing Management</i></p> <p>Preparation of Branch leaders with material on leadership, business strategy, business execution, Human Capital Management, Service, Financial, Cash Management, Sales Management, and Marketing Management.</p>	Sertifikasi Certification	22 Agustus 2023 August 22, 2023	25 Agustus 2023 August 25, 2023
63	<i>Personal Branding</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar kepribadian - Peran kepribadian - <i>Personality development</i> - <i>Personal branding</i> dan layanan - Positif Visual Poise (PVP) - <i>Grooming</i> - Personality basics - Role of personality - Personality development - Personal branding and service - Positive Visual Poise (PVP) - Grooming 	<i>In-house training</i>	24 Agustus 2023 August 24, 2023	24 Agustus 2023 August 24, 2023
64	<i>HR Supervisor (BNSP Sertifikasi)</i> <i>HR Supervisor (BNSP Certification)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami standar kompetensi manajemen SDM dan skema sertifikasinya - Memahami pokok materi di setiap dimensi kompetensi yang akan diuji - Mempersiapkan diri dalam menghadapi uji kompetensi BNSP level Supervisor SDM - Understand the HR management competency standards and certification scheme - Understand the subject matter in each dimension of competency that will be tested - Prepare yourself to face the BNSP competency test at the HR Supervisor level 	Sertifikasi Certification	09, 16, 23 September 2023 (pelatihan) 09, 16, 23 September 2023 (training)	09, 16, 23 September 2023 (pelatihan) 09, 16, 23 September 2023 (training)

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
65	<i>Sales Training</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 10 <i>soft skill</i> penting dalam penjualan. - Menyadari pentingnya karakter manusia dari wajah. - Mengetahui bagaimana mengenal seseorang dengan instan. - Mengetahui bagaimana membangun rapport dengan instan. - Membangun kerjasama, kedekatan, dan kekeluargaan. - 10 essential soft skills in sales. - Realizing the importance of human character from the face. - Knowing how to get to know someone instantly. - Knowing how to build rapport instantly. - Building cooperation, closeness, and kinship. 	<i>In-house training</i>	21 September 2023 September 21, 2023	21 September 2023 September 21, 2023
66	Orientasi Karyawan Baru RBB – Disabilitas Orientation for New Employee from RBB - Disability	Pengenalan PT PPI Introduction of PT PPI	<i>Inhouse training</i>	02 Oktober 2023 October 02, 2023	02 Oktober 2023 October 02, 2023
67	<i>In House Training</i> Periksaan Perpajakan (Strategi dan Resikonya) dan Perlakuan PMK 66 In House Training on Tax Audit (Strategy and Risks) and PMK 66 Treatment	memenuhi undangan RNI Group (IDFOOD terkait <i>update</i> peraturan pemeriksaan pajak (strategi & resikonya) dan bagaimana perlakuan PMK 66 Fulfilled the invitation of RNI Group (IDFOOD related to the update of tax audit regulations (strategies & risks) and how PMK 66 is treated.	<i>public training</i>	06 Oktober 2023 October 06, 2023	07 Oktober 2023 October 07, 2023
68	<i>Outbound 2023 "Strong Today, Stronger Tomorrow, Strongest Together"</i>	Engagement Karyawan Employee Engagement	<i>Inhouse training</i>	11 Oktober 2023 October 11, 2023	13 Oktober 2023 October 13, 2023
69	BUMN Spokesperson Master Class	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan komunikasi sebagai juru bicara Perusahaan - Kemampuan dalam menangani isu korporasi - Communication skills as a spokesperson for the Company - Ability to handle corporate issues 	<i>Public Training</i>	18 Oktober 2023 October 18, 2023	18 Oktober 2023 October 18, 2023
70	Wisuda CACP dan Konferensi Nasional Komite Audit Ke-2 CACP Graduation and 2nd National Audit Committee Conference	Kelulusan Sertifikasi CACP dan konferensi nasional komite audit Completion of CACP Certification and national conference of audit committees	<i>Public Training</i>	19 Oktober 2023 October 19, 2023	19 Oktober 2023 October 19, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
71	Manajemen Pergudangan untuk Pengelola Gudang SRG Warehousing Management for SRG Warehouse Managers	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dasar tentang resi gudang serta standar pengelolaan/ instruksi kerja - Pengelolaan resi gudang menunjang pekerjaan dari sisi pembiayaan pengadaan barang serta pengelolaannya di Gudang - Basic knowledge of warehouse receipt and management standards/work instructions - Warehouse receipt management supports the work in terms of financing the procurement of goods and their management in the warehouse 	Public Training	21 November 2023 November 21, 2023	23 November 2023 November 23, 2023
72	PPIjar - Building Management	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman pengelolaan dan perawatan gedung - Pemecahan masalah terkait pengelolaan dan perawatan gedung - Perhitungan <i>service charge</i> - Understanding of building management and maintenance - Problem solving related to building management and maintenance - Service charge calculation 	Inhouse training	21 November 2023 November 21, 2023	21 November 2023 November 21, 2023
73	Potensi Bisnis Bahan Kimia B2 dan Non B2 Business Potential of B2 and Non B2 Chemicals	<p><i>Product knowledge</i>, pangsa pasar, dan cara memasuki pasar</p> <p>Product knowledge, market share, and how to enter the market</p>	In House Training	24 November 2023 November 24, 2023	24 November 2023 November 24, 2023
74	PPIjar - Pendistribusian Unilever PPIjar - Unilever Distribution	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Supplier</i> produk Unilever - Produk Unilever - Tata cara penyaluran produk Unilever kepada Konsumen - Pembayaran produk Unilever - Suppliers of Unilever products - Unilever products - How to distribute Unilever products to consumers - Payment for Unilever products 	In-house training	15 September 2023 September 15, 2023	15 September 2023 September 15, 2023
75	<i>On the Job Training</i> (OJT) Bahan Pokok <i>On the Job Training</i> (OJT) on Basic Commodities	<p>Belajar dan terjun langsung di Cabang Madiun dikarenakan memiliki penjualan yang baik untuk komoditi Bapok.</p> <p>Learn and dive directly in the Madiun Branch because it has good sales for basic commodities.</p>	In-house training	18 Desember 2023 December 18, 2023	22 Desember 2023 December 22, 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Kebutuhan Kompetensi Pelatihan Training Competency Needs	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan (Mulai) Implementation Date (Start)	Tanggal Pelaksanaan (Akhir) Implementation Date (End)
76	<i>Cancer Not Beyond Us</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah wawasan tentang penyakit Kanker. - Meningkatkan kesadaran terhadap bahaya Kanker. - Mengantisipasi secara dini kemungkinan terkena penyakit Kanker. - Mengurangi jumlah penderita Kanker di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. - Add insight into cancer. - Increase awareness of the dangers of cancer. - Anticipate early the possibility of getting cancer. - Reducing the number of cancer patients in Indonesia which continues to increase every year. 	<i>In-house training</i>	21 Juli 2023 July 21, 2023	21 Juli 2023 July 21, 2023

Rencana Pengembangan SDM Tahun 2024

No.	Program Kerja Work Program	Divisi Division	RCSI Matriks	Indikator Target Target Indicator
1	<i>Staff Development Program</i>	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	<i>Responsible</i>	Pelaksanaan berdasarkan Arahan Implementation based on Direction
2	<i>Young Talent Development Program</i>	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	<i>Responsible</i>	Pelaksanaan berdasarkan Arahan Implementation based on Direction
3	<i>Group Development Program</i>	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	<i>Responsible</i>	Pelaksanaan berdasarkan Arahan Implementation based on Direction
4	<i>Skill Up Teknis (Public Training)</i>	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	<i>Responsible</i>	Pelaksanaan berdasarkan Arahan Implementation based on Direction
5	<i>Skill Up Teknis (In house Training)</i>	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	<i>Responsible</i>	Pelaksanaan berdasarkan Arahan Implementation based on Direction
6	Sertifikasi Certification	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	<i>Responsible</i>	Pemenuhan Kompetensi Jabatan Fulfillment of Position Competencies

No.	Program Kerja Work Program	Divisi Division	RCSI Matriks	Indikator Target Target Indicator
7	Program Pengembangan Direksi Board of Directors Development Program	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Pemenuhan Kompetensi Jabatan Fulfillment of Position Competencies
8	Program Pengembangan Komisaris Commissioner Development Program	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Pemenuhan Kompetensi Jabatan Fulfillment of Position Competencies
9	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Terpenuhi 51% 51% fulfilled
10	Engagement Program (Outbound)	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Pelaksanaan Terpenuhi Implementation Completed
11	Masa Persiapan Pensiun (MPP) Retirement Preparation Period (MPP)	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Pelaksanaan Terpenuhi Implementation Completed
12	Millennial Innovation	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Menginisiasi Pelaksanaan Divisi Initiating Division Implementation
13	Women Innovation	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Menginisiasi Pelaksanaan Divisi Initiating Division Implementation
14	Magang Internship	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Pelaksanaan Terpenuhi Maksimal Maximal Implementation
15	Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan Improving Employee Competence through Training	Divisi Pengembangan SDM HR Development Division	Responsible	Jumlah Pelatihan Number of Training

Promosi, Mutasi, Rotasi, dan Demosi Karyawan

Promosi karyawan merupakan bentuk pengakuan dari Perusahaan atas dedikasi dan kontribusi mereka yang berharga bagi perusahaan. Adanya promosi diharapkan dapat memotivasi karyawan untuk terus berprestasi sesuai peran mereka dan menumbuhkan budaya meritokrasi demi kemajuan karier mereka. Selain itu, promosi internal juga ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas karyawan, dan hal tersebut akan berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan.

Di PPI, promosikan karyawan dilakukan dengan berdasarkan pada meritokrasi, di mana individu diakui dan dihargai atas kinerja, keterampilan, dan potensi mereka.

PPI memahami, sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi selama proses promosi, memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat yang

Employee Promotion, Mutation, Rotation, and Demotion

Promoting employees demonstrates the Company's recognition of their dedication and valuable contributions to the organization. It motivates them to continue excelling in their roles and fosters a culture of meritocracy and career advancement. Additionally, promotions often lead to increased employee engagement and loyalty, contributing to overall organizational success.

At PPI, Promoting employees is based on meritocracy, where individuals are recognized and rewarded for their performance, skills, and potential.

PPI understand, it's essential to ensure fairness and transparency throughout the promotion process, providing equal opportunities for all qualified candidates. Moreover,

memenuhi syarat. Selain itu, membina komunikasi yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu karyawan memahami kriteria untuk maju dan mendorong peningkatan yang berkelanjutan.

Selama ini, di PPI, promosi karyawan dilakukan dengan memberi mereka peran, tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Sedangkan mutasi adalah perpindahan pegawai antar-cabang atau wilayah kegiatan, di dalamnya termasuk rotasi. Namun, rotasi itu sendiri lebih memfokuskan pemindahan tugas dan tanggung jawab antar fungsi dan/atau unit kerja dalam satu Direktorat dan/atau antar Direktorat.

Di sisi lain, demosi itu sendiri merupakan bentuk pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah dengan disertai penurunan *grade*.

Berikut merupakan detail pegawai demosi, mutasi, rotasi, promosi serta pengangkatan karyawan tetap pada tahun 2023:

fostering clear communication and providing constructive feedback can help employees understand the criteria for advancement and encourage continuous improvement.

Up until now, at PPI, employee promotions have been carried out by giving them higher roles, duties and responsibilities.

Meanwhile, mutation is the movement of employees between branches or areas of activity, including rotation. However, rotation itself focuses more on the transfer of duties and responsibilities between functions and/or work units within one Directorate and/or between Directorates.

On the other hand, demotion itself is a form of transferring employees to lower positions with a decrease in grade.

The following are details of employee demotions, mutations, rotations, promotions and permanent employee appointments in 2023:

Data Rotasi dan/atau Mutasi Tahun 2023 Rotation and/or Mutation Data for 2023

Kategori Category	Jumlah Karyawan Number of Employee
Demosi / Demotion	6
Mutasi / Mutation	190
Penangkatan Karyawan Tetap / Appointment of Permanent Employees	5
Rotasi / Rotation	-
Promosi / Promotion	32
Total	233

Turnover Karyawan

Menciptakan komposisi karyawan yang proporsional membutuhkan keseimbangan dalam proses perekrutan karyawan baru dan mempertahankan karyawan lama dengan tujuan untuk mengurangi dampak *negative* dari pergantian karyawan. Strategi seperti perencanaan suksesi dan program pengembangan SDM dapat membantu memelihara SDM yang ada, sehingga mengurangi dampak pergantian karyawan pada posisi-posisi kunci.

Employee Turnover

Creating a proportional employee composition involves maintaining a balance between hiring new talent and retaining existing employees to mitigate turnover effects. Strategies such as succession planning and talent development programs can help in nurturing internal talent, reducing the impact of turnover on key positions.

Hingga akhir 2023, terdapat penambahan/ pengurangan karyawan sebagai berikut:

As of the end of 2023, there are the following employee additions/reductions:

Alasan Keluar / Reason for Leaving	2023	2022	2021
Pensiun Normal / Normal Pension	19	18	19
Pensiun Dini / Early Retirement	5	4	5
Habis Kontrak / Contract Expired	6	8	14
Meninggal / Passed Away	1	2	2

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Kebijakan upah minimum merupakan aspek kunci dari regulasi pasar tenaga kerja dan kebijakan kesejahteraan sosial di banyak negara, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kompensasi yang adil bagi para pekerja dan mempertahankan daya saing ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja. Ditujukan untuk mempersempit ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, kebijakan upah minimum ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya hidup, tingkat inflasi, dan tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja.

PPI senantiasa mematuhi perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang tenaga kerja terutama dalam hal ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/ Kota (UMP/K) yang berlaku di wilayah masing-masing unit kerja Perusahaan. Namun lebih dari itu, Perusahaan juga telah menetapkan seperangkat kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas karyawan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap karyawan, antara lain:

Remuneration and Employee Welfare

Minimum wage policy are a key aspect of labor market regulation and social welfare policy in many countries, aiming to strike a balance between ensuring fair compensation for workers and maintaining economic competitiveness and job growth. Aiming at narrowing income inequality and reducing poverty, minimum wage policy is determined by taking into account factors such as cost of living, inflation rates, and prevailing wage levels in the labor market.

PPI always adheres to the laws and regulations governing labor, especially regarding the Provincial/District/City Minimum Wage (UMP/K) provisions applicable in the respective working units of the Company. However, beyond that, the Company has also established a set of compensation, welfare program, and employee facilities to enhance the welfare and productivity of each employee, including:

Uraian Description	Tetap Permanent	Tidak Tetap Contract
Perawatan Pengobatan Treatment Care	√	√
Akomodasi & Transportasi Accommodation & Transportation	-	-
Kematian & Perhelatan Deaths & Occasions	√	√
Transport Lokal Local Transport	√	√
Pensiun/Pesangon Pension/Severance	√	√
Cuti Tahunan Annual Leave	√	√
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan BPJS Health and Employment	√	√
THR RFA	√	√

Reward dan Punishment

PPI memiliki sistem *reward* dan *punishment* yang diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pemberlakuan *Reward* dan *Punishment* bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. *Reward* diberikan untuk memotivasi pekerja dalam mencapai target kinerja secara optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran PPI. Perusahaan memberikan *reward*, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan. Insentif performansi adalah salah satu bentuk *reward* yang diberikan Perusahaan kepada pekerja berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan dan pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI). Selain itu, Perusahaan juga memberikan apresiasi bagi pekerja berkinerja istimewa berupa setiap 3 Bulan mendapatkan Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) di mana penilaian tersebut dapat berdampak kepada besaran pemberian tunjangan kinerja.

Punishment diterapkan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dilakukan oleh pekerja sehingga hal-hal yang menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas kerja dapat dihindari. Perusahaan memberikan *punishment* sesuai tingkat dan jenis sanksi yang berlaku. Jenis sanksi yang berlaku meliputi teguran, surat peringatan dan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah memberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan nominal uang kepada karyawan yang memiliki masa kerja 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 Tahun sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atas pengabdian dan dharma bakti karyawan pada perusahaan.

Program Persiapan Masa Pensiun

Program Persiapan Pensiun memberi individu alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk merencanakan secara efektif keamanan finansial dan kebutuhan gaya hidup selama masa pensiun.

Pada saat ini, PPI belum memiliki program Persiapan Masa Pensiun karena tidak terdapat di RKAP. Namun Perusahaan memiliki program Pelatihan Masa Persiapan Pensiun. Program ini merupakan salah satu bentuk *reward* perusahaan atas dedikasi para karyawan melalui pembekalan pada aspek psikologis, kesehatan, keuangan, wirausaha dan sebagainya. Pelaksanaan pelatihan Persiapan Masa Pensiun tidak hanya sebatas *virtual class*, namun juga dilengkapi dengan kunjungan *virtual*.

Reward and Punishment

PPI has a reward and punishment system clearly outlined in the Collective Labor Agreement (PKB). The implementation of rewards and punishments aims to enhance the performance of every worker. Rewards are provided to motivate workers to achieve optimal performance targets, thereby supporting PPI's objectives. The company provides rewards, both financial and non-financial, tailored to the company's capabilities. Performance incentives are one form of reward given by the company to workers based on monthly performance assessments and the achievement of Key Performance Indicator (KPI) targets. Additionally, the company also appreciates exceptional performance by workers by conducting KPI assessments every 3 months, which may affect the amount of performance incentives given.

Punishments are applied to prevent any form of misconduct by workers, ensuring that factors hindering or disrupting work activities are avoided. The company administers punishments according to the level and type of sanctions applicable. Types of sanctions include warnings, written warnings, and other sanctions adjusted to the level of violation.

Throughout the year 2023, the company has awarded certificates of appreciation and monetary rewards to employees who have served for 5, 10, 15, 20, 25, 30, and 35 years, as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB), for their dedication and service to the company.

Retirement Preparation Program

The Retirement Preparation Program provides individuals with the tools and knowledge necessary to plan effectively for their financial security and lifestyle needs during retirement.

Currently, PPI does not have a Retirement Preparation program because it is not included in the RKAP. However, the Company has a Retirement Preparation Period Training program. This program is a form of corporate reward for the dedication of employees through debriefing on psychological aspects, health, finance, entrepreneurship and so on. The implementation of the Retirement Preparation training is not only limited to virtual classes, but also equipped with virtual visits.

Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja

Kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja memastikan bahwa setiap orang, apa pun jenis kelaminnya, memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan, promosi, dan peningkatan karier. Hal ini menumbuhkan budaya tempat kerja yang adil dan inklusif di mana prestasi dan kualifikasi merupakan faktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mempromosikan kesetaraan *gender*, Perusahaan dapat memanfaatkan potensi penuh tenaga kerja mereka, yang mengarah pada inovasi, produktivitas, dan kesuksesan yang lebih besar.

Dengan tenaga kerja yang beragam, PPI mengedepankan prinsip non-diskriminasi di seluruh aspek manajemen sumber daya manusia, memastikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Secara komprehensif, kebijakan non-diskriminasi ini mencakup proses rekrutmen, evaluasi kinerja, struktur kompensasi, dan inisiatif pengembangan karir, yang menekankan meritokrasi di atas faktor-faktor seperti etnis, agama, ras, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, atau kemampuan fisik. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, PPI menumbuhkan lingkungan yang inklusif di mana setiap karyawan dapat berkembang berdasarkan keterampilan, dedikasi, dan kontribusi mereka, sehingga memaksimalkan keberhasilan organisasi dan dampak sosial.

Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah interaksi dinamis antara pemberi kerja, karyawan, dan perwakilan mereka di tempat kerja. Hubungan ini mencakup proses negosiasi, penyelesaian konflik, dan penetapan kebijakan dan praktik yang mengatur interaksi antara manajemen dan tenaga kerja. Hubungan industrial yang efektif berkontribusi pada lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan mendorong saling pengertian dan kerja sama antara pemberi kerja dan karyawan.

PPI senantiasa berupaya menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka, positif, dan progresif guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil. Untuk melaksanakan hubungan tersebut, PPI membentuk Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai wadah untuk berserikat dalam menyampaikan aspirasinya. Serikat Pekerja PPI memposisikan dirinya sebagai mitra Perusahaan dalam pelaksanaan hubungan industrial.

Gender Equality and Employment Opportunities

Gender equality in employment opportunities ensures that individuals, regardless of their gender, have equal access to jobs, promotions, and career advancement. It fosters a fair and inclusive workplace culture where merit and qualifications are the primary factors in decision-making processes. By promoting gender equality, the Company can harness the full potential of their workforce, leading to greater innovation, productivity, and overall success.

With a diverse workforce, PPI prioritizes non-discrimination principles across all aspects of human resources management, ensuring fairness and equal opportunities for all employees. Its comprehensive policies encompass recruitment processes, performance evaluations, compensation structures, and career advancement initiatives, emphasizing meritocracy over factors such as ethnicity, religion, race, socio-economic status, gender, or physical ability. By upholding these principles, PPI fosters an inclusive environment where every employee can thrive based on their skills, dedication, and contributions, thereby maximizing organizational success and societal impact.

Industrial relations

Industrial relations refer to the dynamic interactions between employers, employees, and their representatives within the workplace. These relations encompass negotiations, conflict resolution, and the establishment of policies and practices governing labor-management interactions. Effective industrial relations contribute to a harmonious work environment, enhance productivity, and promote mutual understanding and cooperation between employers and employees.

PPI consistently strives to create a conducive, open, positive, and progressive work environment to foster harmonious, dynamic, and fair industrial relations. To facilitate these relations, PPI has formed the Workers Union of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) as a platform for employees to voice their aspirations collectively. The Workers Union of PPI positions itself as a partner to the company in managing industrial relations.

Secara umum kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan SDM (hubungan industrial) di Perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perusahaan melakukan sosialisasi dan melaksanakan program penggajian (remunerasi) serta memberikan fasilitas lainnya di luar remunerasi yang bertujuan untuk mendukung tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Overall, the management and implementation of human resources (industrial relations) activities within the company are conducted in accordance with the agreements stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB). PPI conducts socialization and implements remuneration programs, as well as provides additional facilities beyond remuneration aimed at supporting the welfare of employees and their families in line with established policies.

Teknologi Informasi Information Technology

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara optimal sangat penting bagi Perusahaan, antara lain untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Untuk itu, PPI terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi di Perusahaan guna mempercepat pertumbuhan bisnis, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di industri di mana PPI menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu, PPI juga memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi dengan efektif. Memanfaatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan pemberian layanan dan memitigasi risiko operasional secara efisien. Dengan memanfaatkan perangkat dan sistem TI, organisasi dapat merampingkan proses, meningkatkan saluran komunikasi, dan memastikan akses tepat waktu ke data penting, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan daya tanggap. Selain itu, solusi TI menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat dan protokol manajemen data, mengurangi kemungkinan gangguan dan meningkatkan ketahanan secara keseluruhan terhadap potensi ancaman dan kerentanan.

PPI telah memiliki kebijakan dan tata kelola Teknologi Informasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi perusahaan. Acuan tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan Teknologi Informasi telah sesuai dengan pencapaian tujuan PPI. Tata kelola Teknologi Informasi terdiri dari struktur kebijakan

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY AND GOVERNANCE

Optimal utilization of Information Technology (IT) is very important for the Company, among others, to increase its competitiveness in the market. For this reason, PPI continues to strive to develop the Information Technology infrastructure in the Company to accelerate business growth, as well as accommodate various changes that occur in the industry in which PPI conducts its business activities.

In addition, PPI also utilizes Information Technology to provide the best service and minimize business operational risks faced effectively. Utilizing Information Technology (IT) infrastructure enables businesses to optimize service delivery and mitigate operational risks efficiently. By leveraging IT tools and systems, organizations can streamline processes, enhance communication channels, and ensure timely access to critical data, thereby improving service quality and responsiveness. Furthermore, IT solutions offer robust security measures and data management protocols, reducing the likelihood of disruptions and enhancing overall resilience against potential threats and vulnerabilities.

PPI has an Information Technology policy and governance that serves as a reference in managing and developing the company's Information Technology. The reference aims to ensure that the application of Information Technology is in accordance with the achievement of PPI's objectives. Information Technology governance

dan kumpulan proses yang berguna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan Teknologi Informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya Teknologi Informasi, dan mengelola risiko-risiko terkait Teknologi Informasi.

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Secara garis besar, pengelolaan sistem Teknologi Informasi PPI mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-03/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 07/DO/SE/PPI/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
4. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor 08/DO/SE/PPI/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
5. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor 10/DO/SE/PPI/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Tentang Penerbitan Prosedur Operasi Baku Tata Kelola Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
6. Peraturan Direksi nomor : 13/PERDIR/PPI/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Prosedur Operasi Baku Manajemen Akses Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
7. Peraturan Direksi nomor : 14/PERDIR/PPI/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Prosedur Operasi Baku Sistem Manajemen Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

consists of a policy structure and a collection of processes that are useful for optimizing Information Technology benefits and opportunities, controlling the use of Information Technology resources, and managing Information Technology-related risks.

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Broadly speaking, the management of the PPI Information Technology system refers to:

1. PER-02/MBU/2013 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for the Preparation of SOE Information Technology Management;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number: PER-03/MBU/02/2018 dated February 12, 2018 concerning Information Technology Governance Principles of the Ministry of State-Owned Enterprises;
3. Circular Letter of the Board of Directors (SE) Number: 07/DO/SE/PPI/IV/2021 dated April 20, 2021 concerning the General Policy of Information Technology Governance (IT Governance) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
4. Circular Letter of the Board of Directors (SE) Number 08/DO/SE/PPI/IV/2022 dated April 20, 2022 concerning Information Technology Policies and Procedures of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
5. Circular of the Board of Directors (SE) Number 10/DO/SE/PPI/VII/2022 dated July 27, 2022 concerning the Issuance of Standard Operating Procedures for the Governance of the Information Technology Management Work Unit of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
6. BOD Regulation No.:13/PERDIR/PPI/V/2023 dated May 2, 2023, concerning Standard Operating Procedures for Information Technology Access Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
7. BOD Regulation No.:14/PERDIR/PPI/V/2023 dated May 2, 2023, concerning Standard Operating Procedures for Information Technology Management Systems of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan dunia Teknologi Informasi yang sangat dinamis harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Teknologi Informasi sehingga dapat menunjang perkembangan Teknologi Informasi di dalam perusahaan. Untuk itu, PPI berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan internal dan eksternal, khususnya pelatihan yang bersifat teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki.

Selain keterampilan teknis, Perusahaan menekankan pembelajaran mandiri dan pencarian informasi sebagai kompetensi dasar bagi sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi (TI). Pendekatan ini menumbuhkan budaya perbaikan dan kemampuan beradaptasi yang berkelanjutan, memberdayakan para profesional TI untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri. Dengan memprioritaskan kemampuan belajar mandiri dan mencari informasi, Perusahaan memastikan tenaga kerja TI tetap gesit, inovatif, dan siap menghadapi tantangan yang terus berkembang di bidang teknologi yang dinamis.

RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Di tengah dinamika lanskap bisnis modern, Teknologi Informasi (TI) berfungsi sebagai katalisator penting, atau business enabler, bagi kesuksesan bisnis suatu perusahaan, dengan memungkinkan perusahaan tersebut untuk berinovasi, merampingkan proses, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Infrastruktur dan solusi TI harus terintegrasi secara mulus dengan operasi bisnis, memfasilitasi komunikasi yang efisien, manajemen data, dan proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, peran TI sebagai penggerak bisnis terletak pada kemampuannya untuk menyelaraskan kemampuan teknologi dengan tujuan strategis, mendorong pertumbuhan dan menumbuhkan ketahanan di dunia yang semakin terdigitalisasi.

Menyadari hal tersebut, PPI memberi perhatian serius dalam pemilihan dan pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang tepat agar dapat mendukung kelancaran bisnisnya. Seluruh kegiatan pengelolaan TI mulai dari *plan & organize, acquire & implement, delivery & support*, sampai dengan *monitor & evaluate* senantiasa dikelola dengan baik agar memberikan kontribusi maksimal bagi PPI.

INFORMATION TECHNOLOGY HR COMPETENCY DEVELOPMENT

The rapid development of the Information Technology world must be accompanied by an enhancement of the quality and competence of IT human resources to support the company's Information Technology advancements. Therefore, PPI is committed to continuously providing internal and external training, especially technical training tailored to the company's needs, with the aim of enhancing the competence of its IT workforce.

In addition to technical skills, the Company emphasizes self-learning and information-seeking as fundamental competencies for Information Technology (IT) human resources. This approach fosters a culture of continuous improvement and adaptability, empowering IT professionals to stay abreast of emerging technologies and industry trends. By prioritizing self-learning and information-seeking abilities, the Company ensures its IT workforce remains agile, innovative, and equipped to tackle evolving challenges in the dynamic field of technology.

SCOPE AND RESPONSIBILITY

In today's dynamic business landscape, Information Technology (IT) serves as a critical catalyst, or business enabler, for business success, enabling organizations to innovate, streamline processes, and gain competitive advantages. IT infrastructure and solutions should seamlessly integrate with business operations, facilitating efficient communication, data management, and decision-making processes. Ultimately, IT's role as a business enabler lies in its ability to align technological capabilities with strategic objectives, driving growth and fostering resilience in an increasingly digitalized world.

Recognizing this, PPI pays serious attention to the selection and management of Information Technology (IT) to ensure smooth business operations. All IT management activities, from planning & organizing, acquiring & implementing, delivering & supporting, to monitoring & evaluating, are consistently managed well to provide maximum contribution to PPI.

Teknologi Informasi & ERP (Divisi TI & ERP) memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan strategi implementasi sistem informasi yang mendukung tujuan jangka panjang PPI. Selain itu, Divisi TI & ERP juga memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan, implementasi sistem informasi jangka panjang, dan inovasi dalam pengelolaan sistem informasi PPI.

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (2020 - 2024)

Penyelarasan strategi bisnis dan Teknologi Informasi menjadi penting untuk menjamin bahwa penentuan proyek-proyek Teknologi Informasi dan skala prioritasnya telah disusun dengan mengacu pada strategi dan kebutuhan bisnis PPI. Inisiatif strategis dan Kebijakan Teknologi Informasi juga diterapkan secara fleksibel sehingga diharapkan dapat mengikuti perubahan dan proses transformasi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

Implementasi program dan kegiatan Teknologi Informasi PPI berpedoman pada *Information Technology Master Plan (IT MP) 2020-2024* yang disusun terintegrasi. Dalam pelaksanaan *roadmap* program 5 tahunan tersebut, Divisi Teknologi Informasi telah menetapkan target utama yang diharapkan dapat terlaksana setiap tahunnya.

Berkat adanya dokumen rencana strategis tersebut, pengembangan Teknologi Informasi di PPI berjalan lebih terarah dan lebih berperan dalam mendukung dan mengembangkan kegiatan bisnis serta terlibat di dalam transformasi proses bisnis PPI secara berkelanjutan.

The Information Technology Division (IT Division) is responsible for planning and developing the implementation strategy of information systems that support PPI's long-term goals. Additionally, the IT Division provides guidance in formulating policies, implementing long-term information systems, and innovating in the management of PPI's information systems.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP (2020 - 2024)

The alignment of business and Information Technology strategies is important to ensure that the determination of Information Technology projects and their priorities have been prepared with reference to PPI's business strategies and needs. Strategic initiatives and Information Technology policies are also implemented flexibly so that they are expected to keep up with changes and transformation processes that may occur in the future.

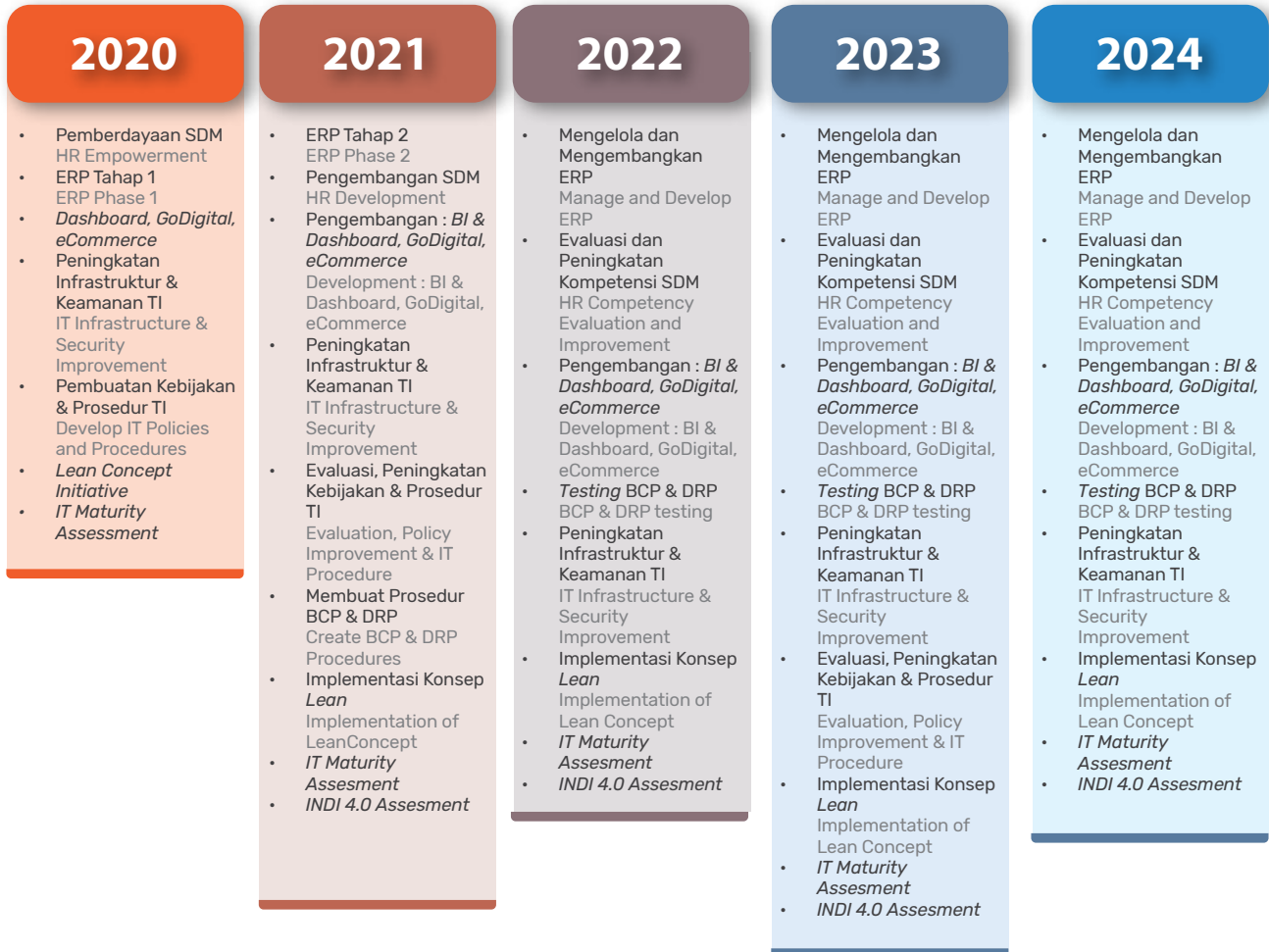
The implementation of PPI's Information Technology programs and activities is guided by the Information Technology Master Plan (IT MP) 2020-2024 which was prepared in an integrated manner. In implementing the 5-year program roadmap, the Information Technology Division has set the main targets that are expected to be implemented every year.

Thanks to the existence of this strategic plan document, the development of Information Technology in PPI is more focused and plays a greater role in supporting and developing business activities and is involved in the transformation of PPI's business processes on an ongoing basis.



Berikut ini adalah *roadmap* pelaksanaan kegiatan Teknologi Informasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

The following is a roadmap for the implementation of Information Technology activities in the last 5 (five) years, namely:



PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 13/DU/SKD/PPI/II/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 28 Februari 2023 ditetapkan bahwa Divisi Teknologi Informasi & ERP adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi PPI. Divisi Teknologi Informasi & ERP dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi.

HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

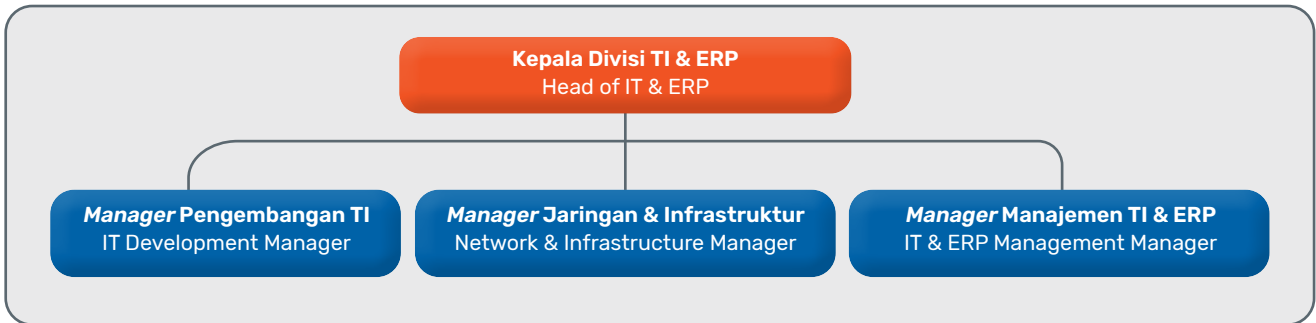
Referring to the Board of Director's Decree No. 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 regarding the Determination of Organizational Structure, it is stipulated that the Information Technology Division is the unit responsible for the development and implementation of PPI's Information Technology development programs. The Information Technology Division is led by a Division Head who reports directly to the Director of Operations.

Per 31 Desember 2023, jumlah personel Divisi Teknologi Informasi adalah sebanyak 11 orang PKWTT dan 3 orang PKWT.

As of December 31, 2023, the number of personnel in the Information Technology Division is 11 permanent employees and 3 contract employees.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola Teknologi Informasi di Perusahaan:

Below is the organizational structure of the Information Technology management in the Company:



INVESTASI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2023, Divisi Teknologi Informasi & ERP telah merealisasikan sejumlah investasi yang bertujuan untuk menunjang Bisnis proses di PPI, di antaranya:

1. Penambahan kapasitas Node Server Operasional HCI Nutanix;
2. Digitalisasi Gudang Stock Point Jakarta di Kelapa Gading;

INVESTMENTS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY

Throughout the year 2023, the Information Technology & ERP Division has implemented several investments aimed at supporting business processes at PPI, including:

1. Increasing the capacity of Nutanix HCI Operational Server Node;
2. Digitalization of the Jakarta Stock Point Warehouse in Kelapa Gading;

REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Di era globalisasi dan revolusi industri, teknologi memiliki peran sentral untuk meningkatkan daya saing yang kuat dalam kegiatan bisnis PPI. PPI terus mengimplementasikan Teknologi informasi dengan melakukan pemenuhan kebutuhan bisnis, pada saat yang sama tetap memperhatikan keamanan, keandalan, dan kapabilitas internal Teknologi Informasi PPI. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan bisnis yang lebih cepat, terpercaya dan dapat memberikan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

REALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAMS IN 2023

In the era of globalization and industrial revolution, technology plays a central role in enhancing strong competitiveness in PPI’s business activities. PPI continues to implement information technology by fulfilling business needs while simultaneously paying attention to the security, reliability, and internal capabilities of PPI’s Information Technology. These efforts are expected to optimize faster and more reliable business development and provide services to all stakeholders.

PPI mengimplementasikan realisasi program pengembangan Teknologi Informasi yang mengacu pada kebijakan internal yang berlaku. Sejalan dengan *corporate plan*, pengembangan Teknologi Informasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasionalbisnis PPI.

PPI implements the realization of Information Technology development programs in accordance with applicable internal policies. In line with the corporate plan, Information Technology development is also carried out sustainably to support PPI’s operational business activities.

Adapun realisasi program Teknologi Informasi di lingkungan Perusahaan sepanjang tahun 2023, antara lain :

The realization of Information Technology programs within the Company throughout the year 2023 includes:

1. Pengembangan & optimalisasi ERP;
2. Penguatan dan peremajaan perangkat infrastruktur dan keamanan data Teknologi Informasi (Sophos) untuk 3 cabang;
3. Implementasi *dashboard EIS (Executive Information System)* dengan modul *sales*, Warung Pangan, HCIS, Account Receivable, Helpdesk, Market Price, inventory dan monitoring Virtual Account;
4. Pengukuran INDI 4.0 (Tingkat Kematangan dalam menghadapi Industri 4.0) dengan nilai akhir 2.35 dari skala 4;
5. Pengembangan aplikasi Arlita-B2, ARKO (Aplikasi Rencana Kerja Online), Arlita-VA (untuk bank BNI dan BRI), SINUR (Sistem Input Pembayaran) dan modul SPPD pada aplikasi MySISKA, SALMA (Sales Management), Karir, dan PPI Property;
6. Pengembangan dan implementasi Supply Chain Control Tower (SCCT)

1. Development & optimization of ERP;
2. Strengthening and rejuvenating infrastructure devices and data security of Information Technology (Sophos) for 3 branches;
3. Implementation of EIS (Executive Information System) dashboard with sales module, Warung Pangan, HCIS, Account Receivable, Helpdesk, Market Price, inventory, and Virtual Account monitoring;
4. Measurement of INDI 4.0 (Maturity Level in facing Industry 4.0) with a final score of 2.35 out of 4 scales;
5. Development of Arlita-B2, ARKO (Online Work Plan Application), Arlita-VA (for BNI and BRI banks), SINUR (Payment Input System), and SPPD module in the MySISKA application, SALMA (Sales Management), Career, and PPI Property;
6. Development and implementation of Supply Chain Control Tower (SCCT).

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2024

Rencana pengembangan Teknologi Informasi di tahun 2024 akan fokus kepada :

1. Optimalisasi ERP;
2. Integrasi antara sistem ERP dengan aplikasi pendukung ERP;
3. Integrasi sistem Anper PPI ke Induk ;
4. Penguatan sistem untuk komersil, operasional dan *supporting*;
5. Penyempurnaan *dashboard* sebagai *tools* untuk mengambil keputusan;
6. Pemenuhan Tata Kelola Teknologi Informasi berupa Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2024-2028 yang selaras dengan *holding*;
7. Pemenuhan dokumen BCP (*Business Continuity Plan*), DRP (*Disaster Recovery Plan*) dan IT Audit;
8. Pemenuhan infrastruktur IT cabang (*IT security & perangkat kerja*).
9. Penguatan aplikasi *supporting holding*.

FOCUS PLAN FOR INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 2024

The Information Technology development plan in 2024 will focus on:

1. Optimization of ERP;
2. Integration between ERP system and supporting ERP applications;
3. Integration of PPI's Anper system into the parent company;
4. Strengthening systems for commercial, operational, and supporting purposes;
5. Refinement of dashboards as decision-making tools;
6. Fulfillment of Information Technology Governance in the form of a 2024-2028 Information Technology Strategic Plan aligned with the holding company;
7. Fulfillment of BCP (*Business Continuity Plan*), DRP (*Disaster Recovery Plan*), and IT Audit documents;
8. Fulfillment of branch IT infrastructure (*IT security & work devices*).
9. Strengthening supporting applications for the holding company.



Bab

06

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

Kami menyadari pentingnya struktur tata kelola yang kuat yang menjunjung tinggi kepentingan para pemangku kepentingan sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, yang melandasi komitmen kami terhadap praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan.

We recognize the paramount importance of robust governance structures that uphold the interests of our stakeholders while fostering sustainable growth, underpinning our commitment to responsible and transparent business practices.







Tata kelola perusahaan yang baik lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan dan regulasi; namun juga untuk mewujudkan budaya akuntabilitas dan tanggung jawab. Hal ini memerlukan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, demi menjaga kepentingan para *stakeholder*, dan mendorong transparansi dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

Good corporate governance transcends mere adherence to rules and regulations; it embodies a culture of accountability and responsibility. It entails a proactive approach to identifying and mitigating risks, safeguarding the interests of stakeholders, and promoting transparency and fairness in decision-making processes.

Pernyataan Komitmen Penerapan GCG

Statement of GCG Implementation Commitment

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten menjadi landasan operasional Perusahaan sehari-hari. Penerapan GCG telah mendarah daging dalam setiap aspek di PPI, sehingga menumbuhkan budaya kerja yang kuat yang ditandai dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

As a state-owned enterprise (SOE), adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG) has consistently served as the cornerstone for our Company's daily operations. The implementation of GCG is ingrained within every facet of PPI, fostering a robust work culture characterized by professionalism, accountability, and responsibility.

Bagi PPI, penerapan GCG lebih dari sekadar kepatuhan terhadap mandat hukum, namun lebih dari itu, GCG merupakan komitmen sukarela yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh seluruh komponen organisasi. Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi kepentingan pemegang saham, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, regulator, mitra kerja, dan lainnya.

For PPI, GCG implementation goes beyond mere compliance with legal mandates; rather, it signifies a voluntary commitment undertaken consciously and willingly by all organizational components. This commitment aims to cultivate sustainable value creation for the benefit of shareholders, society at large, and other stakeholders, including employees, regulators, partners, and beyond.

Penerapan GCG pada jangka panjang diyakini dapat memberikan return ekonomi yang maksimal bagi PPI dan Pemegang Saham, serta dapat mendukung terbentuknya citra dan reputasi positif di mata para Pemangku Kepentingan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan usaha.

Untuk itu, PPI selalu berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG-nya dari waktu ke waktu. seluruh insan PPI menyatakan kesungguhan dan komitmen kuat untuk selalu mengedepankan standar etika tertinggi dalam membangun relasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Komitmen tersebut setidaknya tercantum dalam Pakta Integritas yang setiap awal tahun wajib ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.

The long-term implementation of GCG is believed to provide maximum economic returns for PPI and Shareholders, while also supporting the formation of a positive image and reputation in the eyes of stakeholders. Therefore, it can be concluded that the implementation of GCG is one of the decisive factors for business sustainability.

To achieve this, PPI continually strives to enhance the quality of its GCG implementation over time. Every individual within PPI expresses earnestness and strong commitment to always prioritize the highest ethical standards in building relationships with various parties, both internal and external. This commitment is documented, at the very least, in the Integrity Pact which is mandatory to be signed by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees at the beginning of each year.

Landasan Penerapan GCG

Legal Basis Of GCG Implementation

Penerapan GCG di lingkungan PPI berpedoman pada sejumlah regulasi normatif, antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007;
2. UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

The implementation of GCG within the PPI environment is guided by several normative regulations, including the following:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies dated August 16, 2007;
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
3. Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
4. Guidelines on Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Prinsip-Prinsip GCG dan Implementasinya

GCG Principles and Their Implementation

No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di lingkup PPI Implementation in PPI
1.	Transparansi Transparency	<p>Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perseroan, yang mana pengungkapannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Openness in the decision-making process and disclosure of relevant material information regarding the Company, the disclosure of which must still pay attention to the provisions of the applicable laws and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Laporan Tahunan; • Penerbitan Laporan Keuangan Berkala; dan • Pemanfaatan situs web: www.ptppi.co.id untuk menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. • Issuance of the Annual Report; • Issuance of Periodic Financial Reports; and • Utilization of the website: www.ptppi.co.id to convey information to Shareholders and other Stakeholders.
2.	Akuntabilitas Accountability	<p>Menetapkan pembagian peran, fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas terhadap seluruh organ PPI.</p> <p>Establishing a clear division of roles, functions and implementation of responsibilities for all PPI Organs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi telah tercantum di dalam <i>Board Manual</i> PPI; • Perseroan memiliki standar penilaian kinerja dengan indikator dan metode penilaian yang jelas dan objektif untuk seluruh Organ maupun karyawan. • The description of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been listed in PPI's Board Manual; • The Company has performance appraisal standards with clear and objective indicators and assessment methods for all organs and employees.
3.	Pertanggung-jawaban Responsibility	<p>Menjamin kesesuaian antara kegiatan operasional bisnis yang dijalankan sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ensuring conformity between day-to-day business operations and applicable laws and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar PPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial PPI (<i>corporate social responsibility</i>); dan • Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan. • Complying with the provisions of PPI's Articles of Association and applicable laws and regulations; • Carrying out tax obligations properly and on time; • Carrying out PPI social responsibility activities; and • Carrying out information disclosure obligations in accordance with the aet regulations.
4.	Independensi Independency	<p>Pengelolaan PPI dilakukan secara mandiri dan profesional serta terbebas dari segala bentuk tindakan benturan kepentingan dan/ atau pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>The management of PPI is carried out independently and professionally and free from any form of conflict of interest and/ or influence or pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara Organ PPI; • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan perseroan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pengambilan keputusan. • Mutual respect for rights, obligations, duties, authorities, and responsibilities among PPI's Organs; • Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the management of the Company; • The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees always avoid conflicts of interest in decision making process.

No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di lingkup PPI Implementation in PPI
5.	Kesetaraan Fairness	<p>PPI menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.</p> <p>PPI upholds the principles of equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements, laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices of sound business operations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Pemangku Kepentingan berhak memperoleh manfaat, dan mendapatkan perlakuan yang setara; Membuka kesempatan yang sama dan setara kepada setiap karyawan untuk berkarier dan melaksanakan tugasnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. All Stakeholders are entitled to receive benefits and equal treatment; Opening equal and fair opportunities for every employee to have a career and carry out their duties regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

Maksud dan Tujuan Penerapan GCG

GCG Implementation Purpose and Objective

Sebagai anak perusahaan BUMN yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di PPI bertujuan untuk:

1. Memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tata Kelola yang baik.
2. Melaksanakan pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja PPI menuju *well governed company*.
3. Memberikan acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran Perusahaan dan kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja PPI.

As an independent state-owned entity working professionally and responsibly, the implementation of GCG principles in PPI aims to:

1. Provide assurance to all stakeholders that the company is managed and controlled to protect stakeholders' interests in accordance with laws and good governance practices.
2. Fulfilling or complying with regulations is not only a requirement but also a necessity in enhancing PPI's performance towards becoming a well-governed company.
3. Provide guidance in determining the company's policies and objectives and make a significant contribution to PPI's performance achievements.

Roadmap GCG

GCG Roadmap

PPI menerapkan praktik-praktik bisnis korporasi sehat tercermin melalui penyusunan peta jalan (*roadmap*) GCG yang dirancang secara terstruktur dan komprehensif. Manajemen menggunakan *roadmap* tersebut sebagai referensi utama untuk melakukan sejumlah perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap praktik dan regulasi tata kelola di PPI agar dapat berjalan lebih baik lagi di kemudian hari.

PPI implements sound corporate business practices, as reflected in the structured and comprehensive design of its Good Corporate Governance (GCG) roadmap. Management utilizes this roadmap as the primary reference for making a number of improvements and enhancing the quality of governance practices and regulations within PPI to ensure better performance in the future.



Pada saat ini, PPI masih menunggu update dari Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012, dikarenakan dalam tahun 2023 terdapat 3 omnibus Peraturan BUMN yaitu:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN,
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, dan
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Currently, PPI is still waiting for the update of the Decree of the Ministry of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012, since there are 3 omnibus SOE Regulations issued in 2023, namely:

1. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and SOE Social and Environmental Responsibility Programs,
2. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, and
3. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources.

Ke depannya, penerapan GCG di PPI akan disesuaikan dengan hasil update SK-16 tersebut. Sambil menanti hasilnya, Perseroan juga berupaya agar penerapan GCG tidak hanya diperketat pada kantor pusat PPI, akan tetapi juga di seluruh kantor-kantor cabang PPPI, dimana Perseroan akan menerapkan program-program preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran GCG.

Going forward, the implementation of GCG in PPI will be adjusted to the results of the SK-16 update. While awaiting the result, The Company endeavors to ensure that the enforcement of GCG principles is not only strengthened at PPI's headquarters but also across all PPPI branch offices, where the Company will implement preventive programs to prevent GCG violations.

Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 2023

Efforts to Improve The Quality of GCG Implementation in 2023

Assessment GCG tahun 2023 masih dalam status *on hold*, namun demikian, PPI terus melakukan upaya peningkatan, salah satunya melalui Pembekalan *Assessment* Tahun 2023 bekerjasama dengan BPKP. Sebagai asesor pada *assessment GCG* tahun Buku 2022, BPKP memberikan pelatihan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh PPI dan bagaimana cara memperbaiki kualitas GCG dari masing-masing divisi dan kantor cabang yang ada di PPI.

The 2023 GCG Assessment is still in on hold status, however, PPI continues to make improvements, one of which is through the 2023 Assessment Briefing in collaboration with BPKP. As an assessor in the GCG assessment for the 2022 financial year, BPKP provides training on what things need to be improved by PPI and how to improve the quality of GCG in each division and branch office at PPI.

Acara pembekalan ini dihadiri oleh seluruh divisi dan level BOD hingga Organ Dewan Komisaris.

This briefing event was attended by all divisions and BOD levels up to the Board of Commissioners.

Selain itu, PPI juga tengah melakukan *update* terhadap *board manual* serta melakukan *follow-up* terhadap pembaharuan Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

Apart from that, PPI is also updating the board manual and following up on updates to the Ministry of BUMN Decree Number: SK-16/S.MBU/2012.

Penilaian GCG Oleh Pihak Eksternal

GCG Assessment by External Party

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sangat penting untuk mendorong tata kelola yang efektif di dalam badan usaha milik negara (BUMN), yang pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerjanya. Kerangka kerja GCG yang kuat memastikan bahwa BUMN beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, menyelaraskan tindakan mereka dengan kepentingan terbaik para pemangku kepentingan.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is paramount for fostering effective governance within state-owned enterprises (SOEs), ultimately aiming to optimize their performance. A robust GCG framework ensures that SOEs operate with transparency, accountability, and integrity, aligning their actions with the best interests of stakeholders.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip GCG, BUMN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi mereka, sehingga memaksimalkan potensi kinerja mereka. Kerangka kerja GCG yang mapan akan mendorong proses pengambilan keputusan yang baik, praktik manajemen risiko, dan perilaku etis di seluruh organisasi.

By adhering to GCG principles, SOEs can enhance the efficiency and effectiveness of their operations, thereby maximizing their performance potential. A well-established GCG framework promotes sound decision-making processes, risk management practices, and ethical conduct throughout the organization.

Selain itu, penekanan yang kuat pada GCG memfasilitasi penyelarasan dan koordinasi organisasi yang lebih baik, merampingkan praktik-praktik manajemen perusahaan. Keselarasan ini memungkinkan BUMN untuk secara efektif mengejar dan mencapai target kinerjanya, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai.

Pada intinya, penerapan GCG berfungsi sebagai landasan untuk mendorong praktik tata kelola yang baik di dalam BUMN, memastikan bahwa BUMN beroperasi secara maksimal dan memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PPI menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Sesuai peraturan tersebut, PPI wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali yang dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen.

Penilaian GCG dilakukan sebagai salah satu upaya PPI untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga PPI dapat mengetahui tingkat kecukupan penerapan dan aspek perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dasar Pelaksanaan Penilaian GCG

Penilaian kualitas penerapan GCG di Perseroan mengacu pada sejumlah aturan berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
2. Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep- 117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002; dan
3. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Furthermore, a strong emphasis on GCG facilitates better organizational alignment and coordination, streamlining corporate management practices. This alignment enables SOEs to effectively pursue and achieve their performance targets, driving sustainable growth and value creation.

In essence, the implementation of GCG serves as a cornerstone for fostering good governance practices within SOEs, ensuring that they operate at their full potential and deliver value to stakeholders in a responsible and sustainable manner.

PPI implements the principles of GCG based on the Minister of SOE Regulation Number: Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, regarding the Implementation of GCG Practices in SOEs. According to this regulation, PPI is obliged to conduct periodic assessments of GCG implementation, at least once every 2 years, performed by independent assessors.

The GCG assessment is conducted as one of PPI's efforts to enhance the quality of GCG implementation, enabling PPI to determine the sufficiency of implementation levels and identify improvement aspects that need to be addressed by management.

Legal Basis for Conducting GCG Assessment

The assessment of GCG implementation quality in the Company refers to several regulations, including:

1. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 01, 2011, regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.
2. Decree of the Minister of State/Head of the Investment Coordinating Board and Development of State-Owned Enterprises No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 dated May 31, 2000, concerning the Development of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (SOEs), which was updated with the Minister of State SOE Decree No. Kep- 117/M-MBU/2002, dated August 1, 2002.
3. Secretary of the Ministry of SOE Decree No. SK- 16/S.MBU/2012 dated June 06, 2012, regarding the Assessment Indicators/Parameters and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Kriteria yang Digunakan

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PPI mengacu pada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Criteria Used

The method for measuring GCG implementation in the PPI environment refers to parameters developed by the Ministry of SOE in accordance with the Secretary of the Ministry of SOE Decree Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, regarding the Assessment Indicators/Parameters and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Skor GCG

GCG Score

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER TESTING ASPECTS / INDICATORS / PARAMETERS	BOBOT WEIGHT	CAPAIAN TAHUN 2023 ACHIEVEMENTS IN 2023	
		SKOR SCORE	% CAPAIAN % ACHIEVEMENT
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	5,041	72,01
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	7,540	83,77
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	27,263	77,89
Direksi Board of Directors	35,00	28,860	82,45
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,450	82,78
Subtotal Sub-Total	95,00	76,154	
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0	
SKOR KESELURUHAN OVERALL SCORE	100,00	76,050	BAIK

Rencana Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2023

GCG Quality Improvement Plan In 2023

Sambil menunggu perkembangan dari Surat Keputusan Menteri BUMN No: SK-16/S.MBU/2012, PPI saat ini berencana untuk meningkatkan GCG dengan mengevaluasi dan memperbaiki berdasarkan *Area of Improvement* yang diidentifikasi dari penilaian sebelumnya pada tahun fiskal 2022. Hal ini termasuk mengembangkan kebijakan GCG yang lebih kuat, memperkuat struktur pengawasan dan pengendalian, serta berkolaborasi dengan divisi internal dan eksternal untuk menumbuhkan budaya organisasi berbasis GCG di PPI.

As we await updates on Minister of SOE's Decree Number: SK-16/S.MBU/2012, PPI is currently planning to enhance its GCG by evaluating and improving based on Areas of Improvement identified from the previous assessment in the 2022 fiscal year. This includes developing stronger GCG policies, strengthening oversight and control structures, and collaborating with internal and external divisions to foster a GCG-based organizational culture at PPI.

Struktur dan Mekanisme GCG

GCG Structure and Mechanism

INFRASTRUKTUR GCG

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) mencakup kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan dalam organisasi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas dalam pengambilan keputusan dan operasi. GCG berfungsi sebagai tulang punggung praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, memfasilitasi kepercayaan dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan.

Salah satu aspek mendasar dari infrastruktur GCG adalah pembentukan struktur dan peran organisasi yang jelas. Hal ini mencakup pendefinisian tanggung jawab dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan utama lainnya, untuk memastikan penggambaran yang jelas mengenai wewenang dan akuntabilitas. Dengan memiliki struktur yang transparan, organisasi dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan dan mendorong pengawasan yang efektif.

Organ-organ utama PPI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Setiap organ memiliki peranan penting di dalam struktur dan mekanisme GCG serta menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan PPI.

Selain organ utama, PPI juga memiliki sejumlah organ pendukung, di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Organ pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Sekretaris Dewan Komisaris

GCG INFRASTRUCTURE

The infrastructure of Good Corporate Governance (GCG) encompasses the frameworks, policies, procedures, and mechanisms put in place within an organization to ensure transparency, accountability, fairness, and integrity in decision-making and operations. It serves as the backbone for ethical and responsible business practices, facilitating trust and confidence among stakeholders.

One fundamental aspect of GCG infrastructure is the establishment of clear organizational structures and roles. This involves defining the responsibilities of the board of directors, management, and other key stakeholders, ensuring a clear delineation of authority and accountability. By having transparent structures, organizations can minimize the risks of conflicts of interest and promote effective oversight.

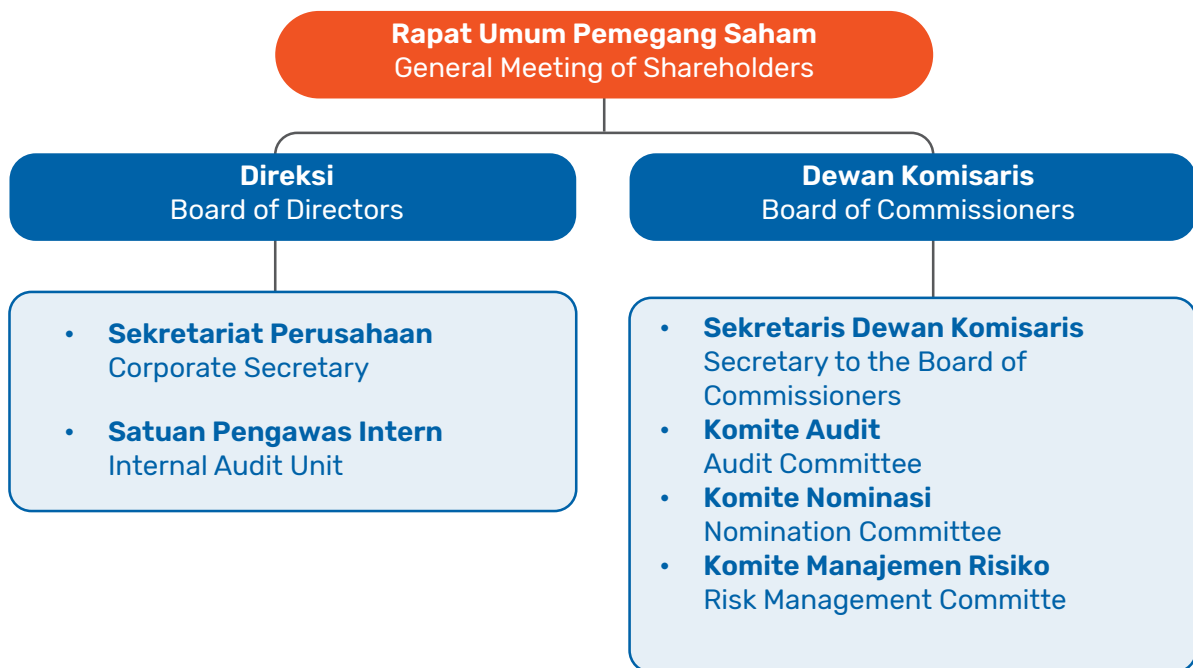
The main organs of PPI consist of the General Meeting of Shareholders (RUPS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Each organ plays a crucial role in the structure and mechanism of GCG and carries out its functions, duties, and responsibilities for the benefit of PPI.

In addition to the main organs, PPI also has several supporting organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. Supporting organs of the Board of Commissioners:
 - a. Secretary of the Board of Commissioners

- b. Komite Audit
- c. Komite Manajemen Risiko
2. Organ pendukung Direksi:
 - a. Sekretaris Perusahaan
 - b. Satuan Pengawasan Intern

- b. Audit Committee
- c. Risk Management Committee
2. Supporting organs of the Board of Directors:
 - a. Corporate Secretariat
 - b. Internal Audit Unit



SOFT STRUCTURE GCG

Sebagai bagian dari upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di seluruh lini usaha, PPI telah menyusun dan mengesahkan sejumlah *Governance Soft Structure*, antara lain:

1. Anggaran Dasar PPI
2. *Code of Conduct*
3. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran
4. Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah
5. Kebijakan Anti-Penyuapan
6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
7. Piagam Dewan Komisaris
8. Piagam Direksi.

GCG SOFT STRUCTURE

As part of efforts to consistently implement GCG principles across all business lines, PPI has developed and ratified several Soft Structure Governance, including:

1. PPI Articles of Association
2. Code of Conduct
3. Policy on Violation Reporting Systems
4. Policy on Acceptance and Giving of Gifts
5. Anti-Bribery Policy
6. Guidelines for Gratification Control
7. Charter of the Board of Commissioners
8. Charter of the Board of Directors.

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Baik Langsung maupun Tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu

Information About Direct and Indirect Majority and Controlling Shareholders Up to the Individual Owner

Pengungkapan lebih lanjut mengenai komposisi dan informasi Pemegang Saham PPI sudah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, di dalam Laporan Tahunan ini.

Further disclosure on the composition and information of PPI's Shareholders has been presented in the Company Profile Chapter, in this Annual Report.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi PPI, yang mempunyai hak dan wewenang melebihi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Dasar PPI. Penyelenggaraan RUPS setiap tahunnya, berfungsi sebagai platform akuntabilitas kepada pemegang saham.

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the supreme body of PPI, endowed with rights and authorities beyond those granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits specified by laws, regulations, and PPI's Articles of Association. The GMS convenes annually, serving as a platform for accountability to shareholders.

Pada dasarnya RUPS merupakan wadah formal bagi pemegang saham untuk menggunakan haknya, menyampaikan pendapat, mengambil keputusan atas kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, dan memperoleh informasi mengenai kinerja PPI.

Fundamentally, the GMS acts as a formal avenue for shareholders to exercise their rights, express opinions, make decisions on strategic policies pertaining to the Company's management, and acquire information regarding PPI's performance.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang masing-masing mempunyai tujuan tertentu atau membahas hal-hal tertentu, antara lain:

The General Meeting of Shareholders (GMS) can typically be classified into several types, each serving a specific purpose or addressing particular matters, include:

1. Rapat Umum Tahunan (RUPST)

Diselenggarakan setahun sekali sesuai amanat undang-undang atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPST terutama fokus pada pembahasan dan persetujuan laporan keuangan tahunan, pemilihan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, penetapan pembayaran dividen, dan penyelesaian hal-hal lain yang berkaitan dengan tata kelola dan kinerja perusahaan.

1. Annual General Meeting (AGM)

Held once a year as mandated by law or the Company's Articles of Association. The AGM is primarily focused on discussing and approving annual financial statements, electing members of the Board of Directors or Board of Commissioners, determining dividend payments, and addressing other matters related to corporate governance and performance.

2. Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB diselenggarakan setiap waktu selain RUPST untuk menangani hal-hal yang mendesak atau luar biasa yang tidak dapat ditunda hingga RUPST berikutnya. Hal-hal tersebut dapat mencakup perubahan signifikan terhadap struktur permodalan perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, merger atau akuisisi, atau keputusan penting lainnya yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

2. Extraordinary General Meeting (EGM)

EGM is convened at any time other than the AGM to address urgent or extraordinary matters that cannot wait until the next AGM. These matters may include significant changes to the company's capital structure, amendments to the Articles of Association, mergers or acquisitions, or other critical decisions requiring shareholder approval.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki saham suatu perusahaan.

Per 31 Desember 2022, kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (RoS) yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Hak-Hak Pemegang Saham

Berikut ini adalah hak-hak pemegang saham yang harus dan wajib dilindungi oleh PPI, antara lain:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
2. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
3. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;
5. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila Perusahaan dilikuidasi;
6. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah);
7. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perusahaan; dan
8. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham

Pemegang saham perseroan adalah kepemilikan tunggal yakni dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Meskipun tidak memiliki struktur kepemilikan saham hingga pemilik individu, PPI tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi pemegang saham

SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares of a company.

As of December 31, 2022, the Company's share ownership is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs. The share ownership has been recorded and administered in the Register of Shareholders (RoS) which is managed by the Corporate Secretary.

Shareholder Rights

The following are the rights of shareholders that must be protected by PPI, including:

1. Attending the GMS and voting in accordance with the classification and number of shares owned;
2. Receiving distribution of the Company's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing in proportion to the number of shares owned;
3. Obtaining material information about the Company in a timely and regular manner;
4. Granting power of attorney with substitution rights to individuals or legal entities to represent them in the GMS;
5. Receiving proportionally the remainder of the liquidation calculation if the Company is liquidated;
6. Filing a lawsuit to the District Court against a member of the Board of Directors whose mistake or negligence has caused a loss to the Company (Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights);
7. Viewing the Register of Shareholders and the Special Register during the Company's office hours; and
8. Holding a GMS in the event that the Board of Directors fails to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS.

Equal Treatment for Shareholders

The Company's shareholders are sole proprietorship which is owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Although it does not have a share ownership structure to individual owners, PPI still upholds the principles of equality and justice for shareholders as a form of full

sebagai bentuk kesadaran penuh atas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Kewenangan RUPS

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Adapun yang menjadi area kewenangan RUPS, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
3. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan dua kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 26 Juni 2023, yang keduanya dilaksanakan secara *hybrid*.

Kedua RUPS tersebut dihadiri oleh para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi PPI, dan telah memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

Keputusan dan hasil RUPS 2023 diuraikan sebagai berikut:

awareness of the implementation of GCG principles.

GMS Authority

Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the GMS is a Company Organ that has authority that cannot be given to either Board of Commissioners or Board of Directors.

The areas of authority of the GMS include:

1. Appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Providing decisions needed to protect the Company's business interests in the long and short term in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
3. Giving approval to the Annual Report including ratifying the Financial Statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
4. Making decisions through an open, fair and accountable process; and
5. Implementing Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility.

Implementation of Shareholders' General Meeting (RUPS) in 2023

In 2023, the Company held two Shareholders' General Meetings (RUPS) on January 30, 2023, and June 26, 2023, both of which were conducted in a hybrid format.

Both RUPS were attended by shareholders, members of the Board of Commissioners, and the Directors of PPI, and they met the quorum to make binding decisions.

The decisions and outcomes of the 2023 RUPS are outlined as follows:

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Agenda	Status Pelaksanaan Implementation Status
RUPS Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 GMS Approval and Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) Year 2023		
30 Januari 2023 Januari 30, 2023	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun 2023. Approval and Ratification of the 2023 Work Plan and Budget and the 2023 Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget.	Sesuai Complied
Persetujuan dan penetapan Key Performance Indicators (KPI) Direksi tahun 2023. Approval and Ratification of the 2023 Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI).		
Persetujuan dan penetapan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris tahun 2023. Approval and Ratification of the 2023 Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI).		
Persetujuan dan penetapan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023. Approval and Ratification of the 2023 Operational Aspect Indicators.		
RUPS Tahunan Annual GMS		
26 Juni 2023 June 26, 2023	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022. Approval of the Annual Report of the Company for the Fiscal Year 2022, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Implementation Report of the Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Program, as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2022.	Sesuai Complied
Pengesahan Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. Approval of the Micro and Small Business Financing (PUMK) Financial Statements for the Fiscal Year 2022.		

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Agenda	Status Pelaksanaan Implementation Status
	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022</p> <p>Determination of the Appropriation of the Company's Consolidated Net Income for the Financial Year 2022</p>	<p>Sesuai Complied</p>
	<p>Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direks dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023, serta Tantiem / Insentif Kinerja / Insentif Khusus untuk Direksi dan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2022.</p> <p>Determination of Salaries/Honorarium along with facilities and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2023, as well as Bonuses/ Performance Incentives/Special Incentives for the Directors and Commissioners for the performance of the Fiscal Year 2022.</p>	<p>Sesuai Complied</p>
	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.</p> <p>Appointment of Public Accountants Office to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2023, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023.</p>	<p>Sesuai Complied</p>

Tanggal dan Tempat Date and Place	Agenda Agenda	Status Pelaksanaan Implementation Status
	<p>Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Pogram Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 2. No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. 3. No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <p>Confirmation of the implementation of the Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 regarding Special Assignments and Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. 2. Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 regarding Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. 3. Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 regarding the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. 	<p>Sesuai Complied</p>

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ utama perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perusahaan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat atau rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memastikan penerapan GCG PPI telah berjalan efektif dan berkelanjutan pada setiap tingkatan organisasi.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris PPI dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. *Level Performance*: Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta menyampaikan masukan/rekomendasi kepada RUPS.
2. *Level Conformance*: Dewan Komisaris melakukan kegiatan pengawasan tahap lanjut untuk memastikan nasihat yang diberikan telah dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan telah dipatuhi dengan baik.

DASAR HUKUM

Keberadaan dan prosedur pengangkatan ataupun pemberhentian Dewan Komisaris PPI mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan

The Board of Commissioners is the principal organ of the company collectively responsible for overseeing the general and/or specific management functions of the company in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations. Additionally, the Board of Commissioners also advises or recommends to the Board of Directors regarding the implementation of the duties and responsibilities of the Directors, and ensures that the implementation of GCG at PPI has been effective and sustainable at every level of the organization.

The supervisory function of the PPI Board of Commissioners is carried out in two (2) levels:

1. *Performance Level*: The Board of Commissioners provides guidance and instructions to the Board of Directors and conveys input/recommendations to the General Meeting of Shareholders (RUPS).
2. *Conformance Level*: The Board of Commissioners conducts advanced supervisory activities to ensure that the advice given has been implemented and that the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association have been properly complied with.

LEGAL BASIS

The existence and procedures for the appointment or dismissal of PPI Board of Commissioners refer to several applicable regulations, including:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. PPI's Articles of Association;
5. Minister of State-Owned Enterprises Decree/Head of the State-Owned Enterprises Supervisory Body No. KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning the Company's Management Report for State-Owned Enterprises;
6. Minister of SOE Decree No. KEP-100/MBU/2002 concerning the Assessment of Health Level;
7. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of GCG Practices in SOEs;
8. Minister of SOE Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs; and

9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG khususnya terkait pemisahan tugas dan wewenang secara jelas, maka Dewan Komisaris senantiasa menjadikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Secara umum, isi pokok *Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan Dewan Komisaris
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Komisaris Independen
7. Etika Jabatan Dewan Komisaris
8. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
9. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Organ Pendukung Dewan Komisaris
13. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun ketentuan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

9. Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

BOARD OF COMMISSIONERS' MANUAL

In order to uphold the principles of GCG, especially regarding clear separation of duties and authorities, the Board of Commissioners consistently refers to the Manual of the Board of Commissioners in carrying out its duties. The Manual of the Board of Commissioners is regulated in the Board Manual established based on Board of Directors Decree No. 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018 concerning the First Amendment to the Board Manual, Policies on Classification and Management of Company Information, Policies on Receipt and Giving of Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

In general, the content of the Board Manual as guidelines and rules of the Board of Commissioners' work regulates the following:

1. Functions of the Board of Commissioners
2. Requirements for the Board of Commissioners
3. Composition and Membership
4. Term of Office
5. Introduction and Capability Enhancement Program
6. Independent Commissioners
7. Board of Commissioners' Code of Ethics
8. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
9. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
10. Board of Commissioners' Meetings
11. Board of Commissioners' Performance Evaluation
12. Supporting Organs of the Board of Commissioners
13. Board of Commissioners' Accountability.

COMPOSITION AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office for members of the Board of Commissioners is five (5) years from the date set by the General Meeting of Shareholders (RUPS) that appoints them and ends at the closing of the 5th Annual GMS after their appointment date, but this provision does not diminish the GMS's right to dismiss Board of Commissioners members at any time before their term ends.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya sudah berakhir maka dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya.

For members of the Board of Commissioners whose terms have ended, they may be reappointed by the GMS for one (1) subsequent term.

Per 31 Desember 2023, anggota Dewan Komisaris PPI berjumlah 2 (dua) orang, tanpa ada Komisaris Independen.

As of December 31, 2023, there were 2 (two) members of the PPI Board of Commissioners, with no Independent Commissioner.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara.

The positions of each member of the Board of Commissioners, including the Chief Commissioner, are equal.

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Desember 2023, susunan anggota Komisaris adalah sebagai berikut:

Prior to the General Meeting of Shareholders of PPI on December 18, 2023, the composition of the Commissioners was as follow:

BOC :

Nama Komisaris Name of Commissioner	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Bara Krishna Hasibuhan	Komisaris Utama President Commissioner	No. SK-291/MBU/XII/2022 dan and No.105/Kep.PS/RNI.01/XII/2022	Desember 2022 - Desember 2023 December 2022 - December 2023
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No. SK-385/MBU/12/2021	Desember 2021 - Desember 2023 December 2021 - December 2023
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020	April 2020 - Desember 2023 April 2020 - December 2023
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Independent Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020	April 2020 - Desember 2023 April 2020 - December 2023

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Desember 2023, susunan anggota Komisaris berubah menjadi:

In accordance with the results of the decision of the PPI General Meeting of Shareholders on December 18, 2023, the composition of the Commissioners has changed to:

Nama Komisaris Name of Commissioner	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Hamli	Komisaris Utama President Commissioner	No : SK-360/MBU/12/2023 No : 152/KEP.PS/RNI.01/XII/2023	Desember 2023 - Sekarang December 2023 - Present
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No. SK-385/MBU/12/2021	Desember 2021 - Sekarang December 2021 - Present

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris, berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegal, antara lain:

As stated in the Board Manual of the Board of Commissioners, the following is a collegial description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners:

Tugas Duties	Tanggung Jawab Responsibilities
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Supervising management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company's Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and GMS resolutions as well as the applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. Mematuhi Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Complying with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders resolutions and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. Memantau dan memastikan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di Perusahaan. Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably in the Company. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan. Ensuring that the Board of Directors has established an effective internal control system to secure the Company's assets. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan; Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company; Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi; Researching and reviewing as well as signing the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors; Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP; Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the reasons for the Board of Commissioners signing the RJPP and RKAP; Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan; Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company; Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance; Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance; Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan termasuk memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta; Researching and reviewing periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report including providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report if requested;

Tugas Duties	Tanggung Jawab Responsibilities
<p>5. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HR management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation these policies.</p> <p>6. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HR management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation these policies.</p> <p>7. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ditetapkan Direksi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut dan penerapannya. Supervising the policies on the management of subsidiaries/joint ventures that have been determined by the Board of Directors, including providing input on these policies and their implementation.</p> <p>8. Melakukan penilaian dengan memberikan tanggapan tertulis terkait proses pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS. Conducting an assessment by providing written responses related to the appointment process of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures to be further submitted to the GMS.</p>	<p>8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); Preparing the annual work plan and budget for the Board of Commissioners and including it in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);</p> <p>9. Membentuk Komite Audit; Establishing an Audit Committee;</p> <p>10. Mengusulkan penetapan Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit termasuk menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut; Proposing the determination of the External Auditor to the GMS based on the proposal from the Audit Committee, including submitting to the GMS the reasons for the nomination and the proposed amount of honorarium/ remuneration for the External Auditor;</p> <p>11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; Making the minutes of meetings of the Board of Commissioners and keeping a copy thereof;</p> <p>12. Membuat Daftar Khusus yang di dalamnya memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris beserta kel- uarganya pada PPI maupun perusahaan lain; Making a Special Register which contains information regarding the share ownership of Members of the Board of Commissioners and their families in PPI and other companies;</p> <p>13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; Providing a report on the supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS;</p> <p>14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Carrying out other obligations to carry out the function of supervision and providing advice, as long as it does not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.</p>

Tugas Duties	Tanggung Jawab Responsibilities
<p>9. Memastikan bahwa Direksi telah mengungkapkan informasi penting perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.</p> <p>Ensuring that the Board of Directors has disclosed important company information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.</p> <p>10. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Maintaining the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations.</p>	

PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

SEPARATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Komisaris Utama President Commissioner	Koordinator atas seluruh bidang pengawasan. Coordinator for all areas of supervision.
Komisaris Commissioner	Koordinator Bidang Teknik, Umum dan Pengembangan dan Anggota Pengawasan 3 (tiga) bidang lainnya, serta Ketua Komite Audit. Coordinator for Engineering, General Affairs and Development and Supervisory Members for 3 (three) other fields, as well as Chairman of the Audit Committee.
Komisaris Commissioner	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Committee
Komisaris Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner

Hak dan Kewenangan

Secara garis besar, Dewan Komisaris PPI mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan, melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.

Rights and Authorities

In general terms, the Board of Commissioners of PPI carries out tasks and responsibilities to:

1. Enter the premises, buildings, and offices used by the Company, inspect books, documents, and other papers, examine cash for verification purposes, and other valuable securities, as well as inspect the Company's assets.
2. If deemed necessary, the Board of Commissioners may, at the Company's expense and for a limited period, seek assistance from experts to conduct examinations in accordance with their duties and

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Menetapkan pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris dan untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan komite-komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
5. Dewan Komisaris melalui keputusan yang diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris, berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
6. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
7. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan dan kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar PPI.

Kriteria Dewan Komisaris PPI, antara lain meliputi:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan

authorities.

3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding any issues related to the management of the Company.
4. Determine the division of tasks and committee membership among the Members of the Board of Commissioners, and for the smooth functioning of the Board of Commissioners, may be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and committees appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense.
5. The Board of Commissioners, through decisions made in accordance with the procedures for decision-making by the Board of Commissioners, has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if they act contrary to the Company's Articles of Association, or if there are indications of causing losses to the Company, or neglecting their duties, or if there are urgent reasons for the Company.
6. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have any Directors, then temporarily the Board of Commissioners is obliged to manage the Company. In such cases, the Board of Commissioners has the right to temporarily delegate authority to one or more of its members, at the expense of the Board of Commissioners.
7. Each Member of the Board of Commissioners is entitled to receive remuneration and allowances/facilities, including retirement benefits, the type and amount of which are determined by the General Meeting of Shareholders, taking into account the provisions stipulated in the Company's regulations and applicable laws and regulations.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

All members of the PPI Board of Commissioners have met the provisions and qualifications as individuals to serve as Commissioners as stipulated in the Articles of Association of PPI.

The criteria for PPI's Board of Commissioners include:

1. Competent/able to perform legal actions.
2. Within 5 (five) years before appointment, has never:
 - a. Been declared bankrupt;
 - b. Served as a Director or Member of the Board of Commissioners or Supervisory Board deemed guilty of causing a company to be declared

- dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PPI; dan
 5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

MEKANISME PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Dewan Komisaris PPI mengacu pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 14 hingga ayat 20.

PROGRAM ORIENTASI/ PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Sebagai organ utama yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengenal seluruh aktivitas bisnis PPI dari hulu ke hilir. Untuk itu, perseroan menyediakan Program Orientasi/Pengenalan bagi anggota Komisaris baru agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai karakteristik, proses bisnis, serta kondisi-kondisi yang terjadi di PPI.

Dengan begitu, PPI berharap setiap anggota Komisaris baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana diuraikan di dalam *Board Manual*. Program Orientasi bagi anggota Komisaris baru, meliputi:

- a. Program Pengenalan Mempertimbangkan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham dan *stakeholders*, maka sangat dimungkinkan diantara Anggota Dewan Komisaris tersebut belum saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Dengan demikian, perseroan menilai keberadaan Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan.

- bankrupt; or
- c. Been convicted of crimes detrimental to state finances and/or related to the financial sector.

3. Committed to compliance with laws and regulations;
4. Have knowledge and/or expertise in the fields required by PPI; and
5. Meet other requirements as stipulated in the Company Law, capital market regulations, and other applicable laws and regulations.

MECHANISM FOR APPOINTMENT, DISMISSAL, AND RESIGNATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by shareholders through the General Meeting of Shareholders (RUPS). The procedures for the appointment, dismissal, and resignation of the PPI Board of Commissioners refer to Articles 14 to 20 of the PPI Articles of Association.

ORIENTATION/INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

As the main body overseeing the management of the company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is required to understand all of PPI's business activities from upstream to downstream. Therefore, the company provides an Orientation/Introduction Program for new Commissioners so that they gain a deeper and comprehensive understanding of the characteristics, business processes, and conditions occurring in PPI.

In this way, PPI hopes that each new Commissioner can fulfill their duties and responsibilities to the best of their ability as outlined in the Board Manual. The Orientation Program for new Commissioners includes:

- a. Introduction Program Considering the diverse backgrounds of the Board of Commissioners' members representing shareholders and stakeholders, it is highly likely that these members may not know each other or have never worked together before. Therefore, the company deems the presence of an Introduction (Orientation) Program crucial.

- b. Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pada tahun 2023, tidak ada pengangkatan komisioner baru, sehingga tidak ada program orientasi bagi komisaris yang diadakan pada tahun tersebut.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN

Merujuk pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 32, anggota Dewan Komisaris PPI diperbolehkan untuk memangku jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

PPI melarang setiap Insan perseroan berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis perseroan yang berdampak pada objektivitas serta pertimbangan komersial.

Dewan Komisaris diamanatkan untuk menjaga profesionalisme dan independensinya sehingga wajib melakukan pengelolaan benturan kepentingan saat melaksanakan fungsi pengawasan.

- b. The Capability Enhancement Program is essential to ensure that Board of Commissioners members are always updated on the latest developments in the company's business activities and other relevant knowledge related to their duties.

In 2023, there was no appointment of new commissioners, and hence no orientation program for commissioners was held that year.

POLICY ON HOLDING CONCURRENT POSITIONS

Referring to Article 32 of the PPI Articles of Association, members of the PPI Board of Commissioners are allowed to hold concurrent positions, except for the following criteria:

1. Membership in the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Other positions as stipulated by laws and regulations, political party officials and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and
3. Other positions that may cause conflicts of interest.

Disclosure of information regarding concurrent positions held by all members of the PPI Board of Commissioners has been made in the Company Profile section, under the Board of Commissioners Profile subsection, in this Annual Report.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

PPI prohibits any individual within the company from being in a situation that creates a conflict of interest, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The company defines a conflict of interest as a conflict between personal economic interests and the company's economic interests that affect objectivity and commercial considerations.

The Board of Commissioners is mandated to maintain professionalism and independence, thus requiring the management of conflicts of interest while performing oversight functions.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang. Mengacu pada kebijakan *Board Manual*, anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan PPI yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

Therefore, the Board of Commissioners should always avoid activities or actions that may trigger conflicts of interest, both now and in the future. Referring to the Board Manual policy, members of the Board of Commissioners are not allowed to hold concurrent positions as:

- a. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises.
- b. Other positions as stipulated by laws and regulations, political party officials and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head.
- c. Other positions that may cause conflicts of interest.

PPI requires Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to comply with the rules set by PPI regarding the prohibition for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to hold concurrent positions as stipulated by the applicable laws and regulations in an effort to avoid potential conflicts of interest.



Independensi Dewan Komisaris

Independency of the Board of Commissioners

Masing-masing anggota Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/atau benturan kepentingan dengan pihak lain. Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang dapat memengaruhi independensinya.

Each member of the Board of Commissioners carries out their supervisory function independently or free from pressure, influence, and/or conflicts of interest with other parties. This commitment is reflected in the Board of Commissioners' independence statement, which is regularly updated. Members of the Board of Commissioners are obligated to report any changes in status that may affect their independence.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris tahun 2023.

Throughout the year 2023, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners as stated in the Board of Commissioners' independence statement for the year 2023.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Declaration of Independence of the Board of Commissioners

Aspek Independensi Aspect of Independency	Bara Krishna Hasibuan	Setiawan Wangsaatmaja	Hamli	Muhammad Kapitra Ampera
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√	√

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/ atau pemegang saham utama yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan terbaik perusahaan.

Mengacu pada keputusan Menteri BUMN SK-102/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 dan SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021, komposisi Komisaris Independen PPI per 31 Desember 2021 berjumlah 1 (satu) orang, yakni Bapak Muhammad Kapitra Ampera. Dengan demikian, PPI telah memenuhi ketentuan UU PT yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan wajib menempatkan minimal satu orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Per tanggal 18 Desember 2023, posisi Komisaris Independen, yang sebelumnya diisi oleh Bapak Kapitra Ampera, belum terisi hingga saat ini.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh anggota Komisaris Independen PPI telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi perseorangan sebagai Komisaris Independen, antara lain sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PPI dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PPI pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PPI;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PPI, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama PPI; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PPI.

PROFIL KOMISARIS INDEPENDEN

Profil lengkap Bapak Muhammad Kapitra Ampera selaku Komisaris Independen PPI dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, managerial, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Directors, other Commissioners, and/or major shareholders that could affect their ability to act independently in the best interests of the company.

Referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020, and SK-385/MBU/12/2021 dated December 2, 2021, the composition of Independent Commissioners of PPI as of December 31, 2021, amounted to 1 (one) person, namely Mr. Muhammad Kapitra Ampera. Thus, PPI has fulfilled the requirements of the Company Law which stipulates that each company must appoint at least one Independent Commissioner or at least 30% of the total number of Commissioners.

As of December 18, 2023, the position of Independent Commissioner, previously filled by Mr. Kapitra Ampera, has not been filled to date.

CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

All members of the Independent Commissioners of PPI have met the individual requirements and qualifications as Independent Commissioners, including the following:

1. Not being a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PPI in the last six months, except for reappointment as an Independent Commissioner of PPI in the following period;
2. Does not own shares, either directly or indirectly, in PPI;
3. Does not have any affiliation with PPI, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of PPI; and
4. Does not have any direct or indirect business relationships related to PPI's business activities.

PROFILE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The complete profile of Mr. Muhammad Kapitra Ampera as the Independent Commissioner of PPI can be seen in the Board of Commissioners' Profile section in this Annual Report.



PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS

Independen Komisaris independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menghindari benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak.

Komisaris independen senantiasa menjaga reputasi Perusahaan melalui penerapan prinsip GCG yang benar, yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan kebijakan yang diambil baik secara individual maupun mufakat. Komisaris independen juga berkewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners are committed to upholding independence, objectivity, and fairness in carrying out their duties and responsibilities by avoiding conflicts of interest or preferences for the interests of any party.

Independent Commissioners always maintain the Company's reputation through the application of correct GCG principles, reflected in their attitudes, actions, and policies taken individually or collectively. Independent Commissioners also have an obligation to report any changes in their status that affect their independence.

Rapat Dewan Komisaris Meeting of the Board of Commissioners

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan), serta Rapat Dewan Komisaris bersama komite-komite.

The Board of Commissioners' meetings consist of Internal Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with invited Directors (Joint Meetings), and Board of Commissioners meetings with committees.

KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar PPI, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan mengikuti rapat, maka rapat tetap dapat berlangsung dan Ketua Rapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling lama atau anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam hal usia.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING POLICY

Referring to Article 16 Paragraph (7) of PPI's Articles of Association, Board of Commissioners meetings must be held at least once every month and chaired by the Chairman of the Commissioners. If the Chairman of the Commissioners is unable to attend or is unable to participate in the meeting, the meeting may still proceed, and the Chairmanship shall be assumed by another member of the Board of Commissioners designated by the Chairman of the Commissioners and/or the member of the Board of Commissioners with the longest tenure or the oldest member of the Board of Commissioners in terms of age.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan mekanisme tersebut disebut keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners meeting provided that all members of the Board of Commissioners have given written approval to the proposed motion and have signed such approval. Decisions made using this mechanism are called circular decisions. Decisions made in this manner have the same force as decisions made validly in a Board of Commissioners meeting.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF MEETINGS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 7 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut :

Throughout the year 2023, the Board of Commissioners has held 7 internal meetings with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran % Attendance
Bara Krishna Hasibuhan	Komisaris Utama President Commissioner	7	4	57,0%
Hamli**	Komisaris Commissioner	7	7	100,0%
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	7	7	87,5%
Muhammad Kampitra Ampera*	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100,0%

*Bara Krishna Hasibuhan dan Muhammad Kampitra Ampera hingga 18 Desember 2023

*Bara Krishna Hasibuhan and Muhammad Kampitra Ampera until December 18, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran % Attendance
Hamli*	Komisaris Utama President Commissioner	1	1	100,0%
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	1	1	100,0%

*Hamli menjabat sebagai Komisaris Utama mulai 18 Desember 2023

*Hamli serves as President Commissioner starting December 18, 2023

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

The agenda for the 2023 Board of Commissioners Meeting is as follows :

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda
9 Januari 2023 January 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Pelepasan Aset Semarang; Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the disposal of Semarang assets; Others
11 April 2023 April 11, 2023	Pembahasan Permohonan Direksi Persetujuan menggunakan aset untuk KMK Bank BRI Discussion on the Board of Directors' Request for Approval to pledge assets for KMK Bank BRI

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda
20 Juli 2023 July 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Mei dan Juni 2023; Pendayagunaan Aset; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on performance until May and June 2023; Asset utilization; Others.
29 Agustus 2023 August 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juli Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to July 2023; Others.
25 September 2023 September 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to August Year 2023; Others.
23 Oktober 2023 October 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan September Tahun 2023; Rancangan RKAP 2024 <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to September Year 2023; Draft RKAP 2024
27 November 2023 November 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Oktober Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to October 2023; Others.
21 Desember 2023 December 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja PT PPI s.d November 2023; Pembahasan Penyampaian permohonan kembali Aset Medan <ol style="list-style-type: none"> Discussion of PT PPI's performance up to November 2023; Discussion on the Submission of Medan Asset reapplication

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023

Report on the Duty Implementation and Supervision of the Board of Commissioners in 2023

Selain untuk memenuhi kewajiban Dewan Komisaris, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Perusahaan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran mengenai metode dan hasil pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2023;
- 2) Memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan tahun 2023 sekaligus pendapat dan saran terhadap hal-hal yang penting;
- 3) Salah satu bentuk perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Pada dasarnya, sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan kewajiban mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas

In addition to fulfilling the obligations of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, this Supervisory Task Implementation Report is prepared with the following purposes and objectives:

- 1) To provide an overview of the methods and results of the Board of Commissioners' supervisory tasks during 2023;
- 2) To provide an overview of the company's performance in 2023 along with opinions and suggestions on important matters;
- 3) As one form of realizing the principles of good corporate governance (GCG).

Basically, throughout 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties of supervising and advising the Board of Directors regularly regarding the effectiveness

penerapan manajemen risiko, dan agar Direksi menetapkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif.

Dewan Komisaris juga telah mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Dewan Komisaris memastikan Direksi telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan masalah sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk aktif dalam mengungkapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi.

Program Kerja Dewan Komisaris PT PPI pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Materi Pengawasan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dewan Komisaris tahun 2023 selain berdasarkan aturan perundangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, juga secara khusus mengacu kepada sasaran korporasi, strategi perusahaan, strategi bisnis, dan kebijakan perusahaan yang disajikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.

Pada hakekatnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk melaksanakan amanat pemegang saham dalam mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan dan kebijakan Direksi terkait pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku. Semua itu untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2. Bidang Pengawasan

Untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan serta sasaran umum yang didasarkan kepada asumsi yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, maka sektor pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris meliputi:

- a) Pengawasan implementasi *Blue Print*/RJPP;
- b) Pengawasan implementasi RKAP;
- c) Pengawasan sistem pengendalian internal Perusahaan;

of risk management implementation, and ensuring that the Board of Directors establishes and implements an effective internal control system.

The Board of Commissioners has also supervised the Board of Directors to ensure timely, accurate, clear, and objective disclosure of important information in the Annual Report and Financial Statements to Shareholders and relevant government agencies in accordance with applicable regulations.

The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has taken the initiative to disclose issues as required by regulations, as well as other important information needed by stakeholders. Additionally, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to actively disclose the implementation of GCG principles and material issues faced.

The Work Program of the Board of Commissioners of PT PPI in 2023 can be outlined as follows:

1. Supervisory Material

The Annual Supervisory Work Program (PKPT) of the Board of Commissioners for 2023, in addition to being based on applicable laws and regulations as outlined above, also specifically refers to corporate goals, corporate strategies, business strategies, and company policies presented in the 2023 Work Plan and Budget.

In essence, the Board of Commissioners carries out supervision to fulfill the mandate of the shareholders in overseeing and directing the implementation and policies of the Board of Directors related to the execution of the Company's Long-Term Plan, the Work Plan and Corporate Budget, the provisions of the Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, and applicable regulations. All of this is for the benefit of the Company and in accordance with the Company's aims and objectives.

2. Supervisory Areas

To realize the Company's vision and mission, as well as general goals, based on assumptions set by the Shareholders, the supervisory sectors carried out by the Board of Commissioners include:

- a) Supervision of the implementation of the *Blue Print*/RJPP;
- b) Supervision of the implementation of the RKAP;
- c) Supervision of the Company's internal control system;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> d) Pengawasan manajemen risiko Perusahaan; e) Pengawasan sistem teknologi informasi Perusahaan; f) Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi); g) Pengawasan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (termasuk usulan KAP); h) Pengawasan kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran); i) Pengawasan kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset); j) Pengawasan terhadap peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. | <ul style="list-style-type: none"> d) Supervision of the cCmpany’s risk management; e) Supervision of the Company’s information technology system; f) Supervision of HR policies and implementation (including training and remuneration); g) Supervision of accounting policies and financial statement preparation (including the selection of public accountants); h) Supervision of procurement policies (including marketing); i) Supervision of quality and service policies (including research); j) Supervision of compliance with laws and regulations and agreements with third parties. |
|--|---|

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan rutin tersebut bertujuan untuk menjaga agar Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pemberian nasehat dapat memberikan saran, masukan, rekomendasi kepada Direksi agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan visi, misi perusahaan yang tertuang dalam *Blue Print* perusahaan, mampu mengantisipasi secara dini hal-hal yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang dituangkan dalam RKAP PT PPI tahun 2023, serta mendukung setiap kebijakan Pemerintah.

The activities carried out to perform these routine tasks aim to ensure that the Board of Commissioners, in accordance with its duties and functions, can provide advice, input, and recommendations to the Board of Directors so that the policies taken remain in line with the company’s vision and mission as outlined in the company’s Blue Print. Additionally, these activities aim to anticipate early potential issues that could hinder the achievement of the performance targets outlined in PT PPI’s 2023 RKAP and support all government policies.

Kegiatan Rutin Dewan Komisaris

Routine Activities of the Board of Commissioners

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Organ Dewan Komisaris | <ul style="list-style-type: none"> a. Internal Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Commissioners’ organs. |
|---|---|

**Penjelasan
Explanation**

1. Rapat yang dilaksanakan hanya untuk internal Dewan Komisaris bersama Organ Pendukung Dewan Komisaris yaitu: Komite Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris.
2. Tujuan dari Rapat ini adalah untuk melakukan koordinasi antara Dewan Komisaris dan organ pendukungnya dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap kegiatan operasional Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, melalui :
 - a. Evaluasi bersama atas Laporan Komite Dewan Komisaris terhadap bidang pengawasan Dewan Komisaris yaitu : implementasi *Blue Print*/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (termasuk usulan KAP), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - b. Koordinasi dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan yang akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisaris maupun Surat Dewan Komisaris kepada Direksi.
1. Meetings held exclusively for the internal Board of Commissioners along with the Board of Commissioners’ supporting organs, namely: the Committees of the Board of Commissioners and the Secretariat of the Board of Commissioners.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. The purpose of this meeting is to coordinate between the Board of Commissioners and its supporting organs in order to enhance the effectiveness of the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners over the operational activities of the Company conducted by the Board of Directors, through: <ol style="list-style-type: none"> a. Joint evaluation of the Committee of the Board of Commissioners' reports on the supervisory areas of the Board of Commissioners, namely: implementation of the Blue Print/RJPP, implementation of the RKAP, the company's internal control system, the company's risk management, the company's information technology system, HR policies and implementation (including training and remuneration), accounting policies and financial statement preparation (including the selection of public accountants), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), and compliance with laws and regulations and agreements with third parties. b. Coordination in decision-making/policies that will be formulated in the form of the Board of Commissioners' decisions or letters from the Board of Commissioners to the Board of Directors.
Sasaran Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai dari Organ Pendukung Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu maupun kondisi perusahaan terkini; 2. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris; 3. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas hal-hal di lingkungan organisasi Dewan Komisaris; 4. Menciptakan hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris. <ol style="list-style-type: none"> 1. To obtain complete and adequate data, information, and analysis results from the supporting organs of the Board of Commissioners, namely: the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Secretariat of the Board of Commissioners, regarding specific issues or the current condition of the company; 2. To improve the quality of the Board of Commissioners' decision-making on specific issues faced by the company and enhance the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory and advisory functions; 3. To improve the quality of the Board of Commissioners' decision-making on matters within the organization of the Board of Commissioners; 4. To create a good working relationship between the Board of Commissioners and its supporting organs.
	<ol style="list-style-type: none"> b. Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi
	<ol style="list-style-type: none"> b. Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors
Penjelasan Explanation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat yang dilaksanakan antara Dewan Komisaris bersama Direksi dengan hanya melibatkan Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris dan organ lainnya sepanjang diperlukan. 2. Tujuan dari Rapat ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi terhadap kinerja keuangan dan operasional Perusahaan periode sebelumnya serta rencana tindak lanjut dari Direksi dan jajarannya; b. Evaluasi terhadap keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan arahan Dewan Komisaris dalam rapat sebelumnya; c. Pengambilan keputusan, pemberian arahan Dewan Komisaris atas hal-hal strategis yang diusulkan oleh Direksi dan jajarannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar memerlukan keputusan, arahan atau tanggapan Dewan Komisaris; d. Menciptakan hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi. 1. Meetings held between the Board of Commissioners and the Board of Directors involving only the Corporate Secretary, the Secretary of the Board of Commissioners, and other relevant parties as necessary. 2. The objectives of this meeting are: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluation of the financial and operational performance of the Company for the previous period and follow-up plans from the Directors and their teams; b. Evaluation of decisions, policies, and implementation of directives from the Board of Commissioners in previous meetings; c. Decision-making, directives from the Board of Commissioners on strategic matters proposed by the Directors and their teams that require decisions, directives, or responses from the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association; d. Establishing good working relationships and coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Sasaran Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap perseroan; 2. Memperoleh data, informasi dan hasil analisis serta evaluasi yang lengkap dan memadai dari Direksi atas permasalahan tertentu maupun kondisi perusahaan terkini meliputi Perusahaan Induk dan juga Anak Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat; 3. Meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan Dewan Komisaris atas permasalahan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris; 4. Tercapainya tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>); 5. Menciptakan hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi. <ol style="list-style-type: none"> 1. The realization of the supervisory function of the Board of Commissioners over the company; 2. Obtaining complete and adequate data, information, analysis results, and evaluations from the Directors on specific issues or the current condition of the company, including both the Parent Company and its Subsidiaries, to facilitate prompt and accurate decision-making; 3. Improving the quality of decision-making by the Board of Commissioners on specific issues faced by the company and enhancing the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties; 4. Achieving good corporate governance (Good Corporate Governance); 5. Creating a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
-----------------------	---

Kegiatan Non-Rutin Dewan Komisaris

Non-routine activities of the Board of Commissioners

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Negeri Domestic Business Trips

Penjelasan Explanation	<p>Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Dewan Komisaris atas perintah pejabat Perusahaan dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa menginap.</p> <p>Domestic business trips are official duties undertaken by the Board of Commissioners at the direction of Company officials, from their workplace to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia, with or without overnight stays.</p>
Sasaran Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan baik fisik maupun nonfisik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT PPI dan anak perusahaan di dalam wilayah Republik Indonesia; 2. Melakukan kegiatan lainnya antara lain : pendidikan dan pelatihan, <i>benchmarking</i> maupun penugasan dari Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting both physical and non-physical inspections of activities carried out by PT PPI and its subsidiaries within the territory of the Republic of Indonesia; 2. Engaging in other activities such as education and training, benchmarking, or assignments from the Government related to the duties of the Board of Commissioners to enhance the effectiveness of their supervisory and advisory roles.

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri

b. Overseas Business Trips

Penjelasan Explanation	<p>Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Dewan Komisaris atas perintah pejabat Perusahaan dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain di luar wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Overseas business trips are official duties undertaken by the Board of Commissioners at the direction of Company officials, from their workplace to other destinations outside the Republic of Indonesia.</p>
Sasaran Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan baik fisik maupun nonfisik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT PPI dan anak perusahaan di luar wilayah Republik Indonesia; 2. Melakukan kegiatan lainnya antara lain : pendidikan dan pelatihan, <i>benchmarking</i> maupun penugasan dari Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting both physical and non-physical inspections of activities carried out by PT PPI and its subsidiaries outside the Republic of Indonesia; 2. Engaging in other activities such as education and training, benchmarking, or assignments from the Government related to the duties of the Board of Commissioners to enhance the effectiveness of their supervisory and advisory roles.

c. Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris

c. Education and Training for the Board of Commissioners

Penjelasan Explanation	<p>Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi Dewan Komisaris untuk menunjang peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.</p> <p>Kegiatan yang termasuk dalam kategori Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Seminar/<i>Workshop</i> yang dilaksanakan oleh pihak ketiga; 2. Kursus dan Sertifikasi; 3. Menghadirkan Narasumber yang ahli dalam bidang tertentu; 4. Keanggotaan Profesi. <p>Education and Training for the Board of Commissioners are activities carried out by the Board of Commissioners to enhance their abilities, knowledge, and competencies, thereby supporting the effectiveness of their supervisory and advisory duties.</p> <p>Activities included in the category of Education and Training for the Board of Commissioners are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attending seminars/workshops conducted by third parties; 2. Courses and certifications; 3. Inviting experts in specific fields; 4. Professional memberships.
Sasaran Target	<p>Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Dewan Komisaris sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasehat.</p> <p>These activities aim to improve the capabilities and competencies of the Board of Commissioners, thereby supporting the effectiveness of their supervisory and advisory duties.</p>

d. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

d. Conducting Focus Group Discussion (FGD) activities

Penjelasan Explanation	<p>Kegiatan FGD dilakukan untuk membahas isu dan perkembangan terkini yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.</p> <p>FGD activities are conducted to discuss current issues and developments related to the company's activities.</p>
Sasaran Target	<p>Mendapatkan informasi terkini yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.</p> <p>The goal is to obtain up-to-date information related to the company's activities, thereby supporting the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners.</p>

e. Program Suksesi Kandidat Calon Direksi Perseroan

e. Succession Program for the Candidates for the Company's Board of Directors

Pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari Pemegang Saham untuk pengisian jabatan Direksi yang kosong.

The implementation of the program is adjusted according to the needs and requests from the Shareholders for filling vacant Board of Directors positions.

Surat-Surat Keputusan Dewan Komisaris

Decrees of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris PPI mengemban 2 (dua) tugas pokok, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan dan/atau laporan tertulis atas laporan manajemen yang disusun pada basis triwulanan/semesteran serta memberikan usulan kepada Menteri BUMN yang sudah disampaikan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2023.

The Board of Commissioners of PPI has two main tasks, namely carrying out supervisory functions and providing advice to the Board of Directors. In carrying out these duties, the Board of Commissioners provides feedback and/or written reports on management reports prepared on a quarterly/semi-annual basis and submits proposals to the Minister of State-Owned Enterprises, as conveyed through the Board of Commissioners Decree for the Year 2023.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan tanggapan atas permasalahan yang menjadi perhatian bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris berikut ini:

Additionally, the Board of Commissioners has also provided feedback on issues of mutual concern between the Board of Directors and the Board of Commissioners through the following Board of Commissioners Decree:

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda
9 Januari 2023 January 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Pelepasan Aset Semarang; Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the disposal of Semarang assets; Others
11 April 2023 April 11, 2023	<p>Pembahasan Permohonan Direksi Persetujuan mengagunkan aset untuk KMK Bank BRI</p> <p>Discussion on the Board of Directors' Request for Approval to pledge assets for KMK Bank BRI</p>
20 Juli 2023 July 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Mei dan Juni 2023; Pendayagunaan Aset; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on performance until May and June 2023; Asset utilization; Others.
29 Agustus 2023 August 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juli Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to July 2023; Others.
25 September 2023 September 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to August Year 2023; Others.
23 Oktober 2023 October 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan September Tahun 2023; Rancangan RKAP 2024 <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to September Year 2023; Draft RKAP 2024
27 November 2023 November 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Oktober Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to October 2023; Others.
21 Desember 2023 December 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja PT PPI s.d November 2023; Pembahasan Penyampaian permohonan kembali Aset Medan <ol style="list-style-type: none"> Discussion of PT PPI's performance up to November 2023; Discussion on the Submission of Medan Asset reapplication

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite penunjang di bawah organ Dewan Komisaris, antara lain:

1. Komite Audit
2. Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris menggunakan kriteria dan indikator penilaian yang telah disepakati bersama dengan komite-komite dalam memberikan penilaian tahunan, seperti efektivitas pelaksanaan rapat komite, peran dan dukungan komite-komite terhadap implementasi tata kelola perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Mengacu pada kriteria penilaian sebagaimana disebutkan di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2023.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners is supported by 2 (two) supporting committees under the organ of the Board of Commissioners, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Management Committee

The Board of Commissioners utilizes criteria and assessment indicators agreed upon with the committees in providing annual evaluations, such as the effectiveness of committee meeting implementations, the roles and support of the committees towards the implementation of corporate governance, and compliance with applicable regulations.

Referring to the assessment criteria as mentioned above, the Board of Commissioners assesses that the committees under the Board of Commissioners have performed their duties and responsibilities well throughout the year 2023.



Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ utama GCG yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan, dan demi kepentingan terbaik Perseroan, serta bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi wajib menjalankan keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan PPI sehingga visi, misi dan sasaran yang telah digariskan di dalam Anggaran Dasar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi wajib mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Masing-masing anggota Direksi memikul tugas dan tanggung jawab secara kolektif, akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk menjalankan tugas dan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pembedaan tugas dan kewenangannya.

Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama.

The Board of Directors is the main GCG organ authorized and fully responsible for managing the Company in accordance with the purpose, objectives, and best interests of the Company, as well as representing the Company both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws.

The Board of Directors is required to carry out resolutions taken at the General Meeting of Shareholders (RUPS), and is responsible for the implementation and management of the Company's strategic plan (PPI) so that the vision, mission, and objectives outlined in the Articles of Association can be realized effectively.

In carrying out their duties and obligations, the Board of Directors must devote all their energy, thoughts, attention, and dedication fully while considering the interests of shareholders and other stakeholders.

Each member of the Board of Directors bears collective duties and responsibilities, but they are still allowed to perform tasks and make decisions according to their assigned responsibilities and authorities.

In principle, the execution of duties performed by each Director remains a collective responsibility.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;

LEGAL BASIS:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number: 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises (BUMN);
4. Articles of Association of PPI;
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises/ Head of the State-Owned Enterprises Steering Committee Number: KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning the Management Report of State-Owned Enterprises;
6. Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of

8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

- Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN);
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN); and
 9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors of State-Owned Enterprises (BUMN).

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi wajib bertindak serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, dan independen dengan mengindahkan *Board Manual* yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: dirubah menjadi:35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang *Board Manual* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pada prinsipnya, *Board Manual* mengatur tentang tata laksana kerja yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perseroan.

Board Manual antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Direksi
2. Persyaratan Direksi
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Etika Jabatan Direksi
8. Tugas dan Kewajiban Direksi
9. Hak dan Wewenang Direksi
10. Rapat Direksi
11. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi
12. Rapat Direksi
13. Organ Pendukung Direksi
14. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
15. Pertanggungjawaban Direksi

MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors are required to act and carry out their duties and responsibilities in a professional, accountable, and independent manner, adhering to the Manual of the Board of Directors, established based on Board Decision Number: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 dated October 28, 2021, regarding the Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

In principle, the Board Manual regulates effective work procedures between the Board of Commissioners and the Board of Directors, explaining structured, systematic, easily understandable, and consistently executable activity stages, serving as a reference for the Board of Directors in carrying out their respective tasks to achieve the company's vision and mission.

The Board Manual, among other things, regulates the following:

1. Function of the Board of Directors
2. Director Requirements
3. Composition and Membership
4. Term of Office
5. Introduction and Capability Enhancement Programs
6. Independence of the Board of Directors
7. Board of Directors' Code of Ethics
8. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
9. Rights and Authorities of the Board of Directors
10. Board of Directors Meetings
11. Delegation of Authority Among Board Members
12. Board of Directors Meetings
13. Supporting Organs of the Board of Directors
14. Relationships with Subsidiaries and Affiliated Companies
15. Accountability of the Board of Directors

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DIREKSI

Periode menjabat Direksi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah dan komposisi Direksi PPI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah mempertimbangkan kebutuhan dan skala bisnis PPI demi terrealisasinya visi, misi, dan rencana strategis PPI.

Sebelum RUPS PPI tanggal 26 Juni 2023, susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Nama Direksi Name of Directors	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	No: SK- 92/MBU/03/2021	18 Maret 2021 – 26 Juni 2023 March 18, 2021 - June 26, 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Management Risk, HR & General Affairs	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021 – 26 Juni 2023 July 1, 2021 - June 26, 2023
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No. SK- 92/MBU/03/2021	18 Maret 2021 – 26 Juni 2023 March 18, 2021 - June 26, 2023
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	No. SK-381/MBU/12/2021	2 Desember 2021 – 26 Juni 2023 December 2, 2021 - June 26, 2023

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 26 Juni 2023, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Nama Direksi Name of Directors	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021 July 1, 2021

COMPOSITION AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office for the Board of Directors is 5 (five) years starting from the date set by the General Meeting of Shareholders (RUPS) that appointed them and ending at the closure of the 5th Annual RUPS after their appointment date, without prejudice to the right of the RUPS to dismiss member of the Board of Directors at any time before their term expires.

Directors whose terms have ended may be reappointed for 1 (one) subsequent term according to the decision of the RUPS.

The number and composition of the PPI Board of Directors comply with applicable laws and regulations and have taken into account the needs and business scale of PPI to realize the vision, mission, and strategic plans of PPI.

Prior to PPI's GMS on June 26, 2023, the composition of the Board of Directors was as follows:

Following the resolution made during the PPI General Meeting of Shareholders on June 26, 2023, there have been changes in the composition of the Board of Directors, resulting in:

Nama Direksi Name of Directors	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	No. SK-381/MBU/12/2021	2 Desember 2021 December 2, 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Desember 2023, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

In accordance with the resolution of the PPI General Meeting of Shareholders dated December 18, 2023, the composition of the Board of Directors changed to:

Nama Direksi Name of Directors	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Soegeng Hernowo	Direktur Utama President Director	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021 July 1, 2021
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No: SK-169/MBU/06/2023 No : 66/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi Director of Operations	No: SK-362/MBU/12/2023 No : 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023	18 Desember 2023 December 18, 2023

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolektif telah diamanatkan di dalam *Board Manual* dan Pasal 11 Anggaran Dasar PPI, antara lain:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

The collective description of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been mandated in the Board Manual and Article 11 of the Articles of Association of PPI, including:

1. Carrying out all actions related to the management of the Company for the Company's interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company, and representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within the limitations as regulated in laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the RUPS.

2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
3. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
4. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
5. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
6. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

2. Endeavoring to ensure the implementation of the CompWwany's business and activities in accordance with its purposes and objectives.
3. Preparing the Company's Long-Term Plan.
4. Devoting full energy, thoughts, attention, and dedication to the tasks, duties, and goals of the Company.
5. Adhering to the Company's Articles of Association and laws and regulations, and obliged to uphold the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
6. Preparing the complete organizational structure of the Company with details and its tasks.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara individu dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi tersebut, antara lain sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Each member of the Board of Directors is entrusted to carry out individual tasks and responsibilities considering their background of experience and competencies, including but not limited to:

Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Direktur Utama President Director	Melaksanakan koordinasi tugas anggota-anggota Direksi lainnya dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satuan Pengawas Intern, Legal, Sekretaris Perusahaan, <i>Strategic Planning</i> , <i>Business Development</i> dan staf ahli/penasihat Perusahaan. Coordinating the duties of other members of the Board of Directors and being responsible for the activities of the Internal Audit Unit, Legal, Corporate Secretary, Strategic Planning, Business Development and expert staff/advisors of the Company.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Menangani Pengembangan Bisnis dan mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling accounting and taxation, restructuring, financial control, HR and general affairs.
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Menangani bidang Produksi, Pengembangan Bisnis, mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling the Production, Business Development, developing marketing and outsourcing strategies related to business operations.
Direktur Operasi Director of Operations	Melakukan bidang IT, Manajemen Aset dan pengendalian operasional PPI. Carrying out IT, Asset Management and operational control of PPI.

HAK DAN KEWENANGAN

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

RIGHTS AND AUTHORITIES

1. Establishing management policies of the Company.
2. Regulating the delegation of authority of the Board of Directors to one or more Directors to make decisions on behalf of the Board or represent the Company in and out of court.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja PPI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan. 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan. 7. Memberi penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment</i>) Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan. 8. Melakukan aktivitas di luar Perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perusahaan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya. 9. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku. 10. Mempergunakan saran profesional. 11. Menerima gaji berikut tunjangan/fasilitas lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 12. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS. 13. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Regulating the delegation of authority of the Board of Directors to one or more employees of PPI, either individually or jointly, or to others, to represent the Company in and out of court. 4. Regulating provisions regarding Company personnel, including the determination of salaries, pensions, or old-age benefits, and other income for Company employees based on applicable laws and regulations. 5. Appointing and dismissing Company employees based on Company employment regulations and applicable laws and regulations. 6. Appointing and dismissing the Company Secretary. 7. Granting awards and imposing sanctions (rewards and punishments) on Company employees based on Company employment regulations. 8. Engaging in activities outside the Company that are not directly related to the Company's interests, such as teaching, serving on business association boards, and similar activities, within reasonable time and with the knowledge of the CEO or other Directors. 9. Taking leave according to applicable regulations. 10. Utilizing professional advice. 11. Receiving salary along with allowances/facilities, including retirement benefits, the type and amount of which are determined by the RUPS. 12. If the Company achieves a profit, the Board of Directors may receive incentives as a reward for their performance, the amount of which is determined by the RUPS. 13. Carrying out all other actions and deeds regarding the management or ownership of Company assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company in and out of court regarding all matters and events within the limitations as regulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the RUPS. |
|---|---|

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan orang perseorangan sebagai anggota Direksi sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI.

CRITERIA FOR BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

All members of the Board of Directors have fulfilled the individual requirements as Board members as stipulated in the Articles of Association of PPI.

Kriteria Direksi PPI, antara lain:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit; atau
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan; dan
5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

MEKANISME PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi PPI mengacu pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 13 hingga ayat 22.

PROGRAM ORIENTASI/PENGENALAN BAGI DIREKSI BARU

PPI memiliki kebijakan orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi yang baru menjabat agar mereka mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai Perseroan, aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, serta panduan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi baru.

Program Orientasi/ Pengenalan bagi anggota Direksi baru PPI, meliputi:

1. **Program Pengenalan**
Dalam rangka membentuk suatu tim kerja yang solid, maka Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan agar seluruh Anggota Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dapat lebih saling mengenal.

Criteria for PPI Directors include:

1. Capable of performing legal acts.
2. Within the last 5 (five) years before appointment, has never:
 - a. Been declared bankrupt; or
 - b. Served as a Director or member of the Board of Commissioners or Board of Supervisors who has been found guilty of causing a Company or State-Owned Enterprise (BUMN) to be declared bankrupt; or
 - c. Been convicted of offenses detrimental to the state's finances and/or related to the financial sector.
3. Committed to complying with laws and regulations.
4. Possesses knowledge and/or expertise in fields required by the Company.
5. Meets other requirements as determined in the Company Law, capital market regulations, and other applicable laws and regulations.

MECHANISM OF APPOINTMENT, TERMINATION, AND RESIGNATION OF DIRECTORS

The procedures for the appointment, termination, and resignation of PPI Directors refer to Articles 10, paragraphs 13 to 22 of the Articles of Association of PPI.

ORIENTATION/INDUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

PPI has an orientation/induction policy for newly appointed Directors to provide them with a comprehensive understanding and knowledge of the Company, its business activities, future company plans, and the guidelines and responsibilities of the Board of Directors.

The Company Secretary is in charge of implementing the orientation/induction program for newly appointed Directors.

The orientation/introduction program for new PPI Directors includes:

1. **Introduction Program**
To form a cohesive team, the Introduction Program is crucial to enable all Directors from various backgrounds to get to know each other better.

2. Program Peningkatan Kapabilitas

Program Peningkatan Kapabilitas ditujukan agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Perseroan di bidang perdagangan dan selalu siap mengantisipasi perubahan di industri demi menjaga keberlangsungan dan kemajuan usaha Perseroan.

2. Capability Enhancement Program

The Capability Enhancement Program aims to ensure that the Directors are always updated on the latest developments in the Company's core business in the trading sector and are ready to anticipate industry changes for the Company's sustainability and progress.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Merujuk pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 34, anggota Direksi PPI diperbolehkan untuk memangku jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Informasi rangkap jabatan seluruh anggota Direksi PPI telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi, di dalam Laporan Tahunan ini.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Direksi wajib menjaga profesionalisme dan independensinya agar seluruh tindakan dan keputusan strategis yang diambil senantiasa demi kepentingan terbaik PPI. Berpedoman pada Board Manual PPI, Direksi hendaknya menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang.

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maka anggota Direksi PPI tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;

POLICY ON HOLDING CONCURRENT POSITION FOR DIRECTORS

Referring to Article 10, paragraph 34 of the Articles of Association of PPI, PPI Directors are allowed to hold multiple directorships, except for the following criteria:

1. Directorship in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Membership in the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises (BUMN);
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies;
4. Other positions as stipulated in laws and regulations, party officials and/or legislative candidates and/ or candidates for Regional Heads/Vice Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

Information on concurrent position of all PPI Directors has been disclosed in the Company Profile section, Director Profile subsection, in this Annual Report.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors are obliged to maintain professionalism and independence so that all strategic actions and decisions taken are always in the best interests of PPI. Guided by the PPI Board Manual, Directors should avoid activities or actions that may trigger conflicts of interest, both now and in the future.

To prevent conflicts of interest, PPI Directors are not allowed to hold other positions as:

1. Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises

3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan
5. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan perseroan yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

(BUMN);

3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies;
4. Other positions as stipulated in laws and regulations, political party officials and/or legislative candidates and/or candidates for Regional Heads/Vice Regional Heads;
5. Other positions that may cause conflicts of interest.

PPI requires members of the Board of Commissioners and Directors to comply with the Company's regulations regarding prohibitions on holding multiple directorships as per applicable laws and regulations in order to avoid potential conflicts of interest.

Independensi Direksi

Independence of the Board of Directors

Independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga agar masing-masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/ atau benturan kepentingan dengan pihak lain.

Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Direksi yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Direksi berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

Dalam rangka menjaga independensi Direksi, maka PPI menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepemimpinan Perusahaan.
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
4. Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bebas benturan kepentingan dan melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

Independence of the Board of Directors is a crucial factor that must be preserved so that each member of the Board can carry out their duties and responsibilities independently, free from pressure, influence, and/or conflicts of interest with other parties.

This commitment is formalized in the statement of independence of the Board of Directors, which is regularly updated. Directors are obligated to report any changes in their status that may affect their independence.

To maintain the independence of the Board of Directors, PPI establishes the following provisions:

1. Apart from the Directors, any other party is prohibited from interfering in the management of the Company.
2. Directors must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest, and free from any pressure from any party.
3. Directors are prohibited from engaging in activities that may disrupt their independence in managing the Company.
4. Each Director is required to make a conflict of interest declaration and report any changes in their status that may affect their independence.

5. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap Anggota Direksi juga membuat Daftar Khusus yang di dalamnya dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi di dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Direksi tahun 2023.

5. All Directors do not hold positions that are prohibited by applicable laws and regulations.
6. Each Director also creates a Special List that includes information about the ownership of shares by Directors and their families in the Company and other companies, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

As of the end of 2023, there were no situations with potential conflicts of interest faced by the Board of Directors in the decision-making process, as stated in the statement of independence of the Board of Directors for the year 2023.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi Declaration of Independence of the Board of Directors

Aspek Independensi Aspect of Independency	Soegeng Hernowo	Wien Irwanto	Edhy Rizwan	Noverita Anggraeny
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√	√

Rapat Direksi

Meeting of the Board of Directors

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi berfungsi sebagai salah satu mekanisme formal bagi sesama anggota Direksi untuk berdiskusi, merencanakan, dan memantau penerapan strategi dan kebijakan PPI.

KEBIJAKAN RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, namun dalam hal Direktur Utama berhalangan menghadiri rapat maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Panggilan rapat Direksi disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Pengambilan keputusan di dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat.

Selain melalui rapat Direksi, Direksi juga dapat mengambil keputusan strategis melalui keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Direksi.

The Board of Directors meetings must be held regularly at least 1 (one) time every month. The Board meetings serve as a formal mechanism for fellow Directors to discuss, to plan, and to monitor the implementation of PPI's strategies and policies.

BOARD MEETING POLICY

Board meetings can be held at any time deemed necessary by one or more Directors, upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners, or upon a written request from 1 (one) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total voting shares.

The Board meetings are chaired by the Chief Executive Officer (CEO), but in the event that the CEO is unable to attend the meeting, one of the Directors designated in writing by the CEO shall chair the Board meeting. If the CEO does not make any designation, then the longest-serving Director shall chair the Board meeting. In the event that there are more than 1 (one) Director who has served the longest as a Board member, the oldest Director in age shall act as the meeting chair.

The notice of the Board meeting is provided in writing to each Director at least 3 (three) days before the meeting is held, or in a shorter period if urgent, without considering the notice date and meeting date.

Decisions at the Board meeting are made based on consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made by a majority vote. If the number of votes in favor and against is equal, the decision of the meeting is the same as the opinion of the meeting chair.

In addition to the Board meetings, the Board can also make strategic decisions through circular resolutions. Decisions made in this manner have the same legal force as decisions made in a regular Board meeting.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2023, rapat Direksi telah terselenggara sebanyak 66 kali dengan uraian sebagai berikut:

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage (%)
Nina Sulistyowati*	Direktur Utama President Director	31	30	96,77
S. Hernowo**	Direktur Utama President Director	73	81	100
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	105	99	94,29
Andry Tanudjaja*	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	31	30	96,77
Edhy Rizwan**	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	73	63	86,30
Tri Wahyundo Hariyatno***	Direktur Operasi Director of Operations	96	95	
Noverita Anggraeny****	Direktur Operasi Director of Operation	9	9	98,96

Agenda Rapat Direksi tahun 2023

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout the year 2023, Board meetings have been held 66 times, with the following details:

Attendance of Members of the Board of Directors in the Meeting

Board of Directors Meeting Agenda in 2023

Tanggal Date	Agenda
2 Januari 2023 January 2, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rencana MOU PT PPI dan PT Energy Trading Co.LTD PLT Direksi Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Permohonan sewa lahan <i>open storage</i> BGRLI
10 Januari 2023 January 10, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Memorandum of Understanding (MOU) Plan between PT PPI and PT Energy Trading Co. LTD Acting Directors for Finance, Risk Management, HR, and General Affairs Request for lease of BGRLI open storage land
17 Januari 2023 January 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Struktur Organisasi Pembahasan Bisnis Rumput Laut
17 Januari 2023 January 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Organizational Structure Discussion Seaweed Business Discussion
17 Januari 2023 January 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait laporan keuangan 2022 PT PPI Agenda SPI
17 Januari 2023 January 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Issues related to the 2022 financial report of PT PPI SPI Agenda

Tanggal Date	Agenda
19 Januari 2023 January 19, 2023	KMK Mandiri KMK Mandiri
20 Januari 2023 January 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana MOU PT PPI dan Pangan Nusantara Indonesia 2. MOU PT PPI dan Said Bawazir Trading Company 3. PLT Direktur Komersial & Pengembangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Memorandum of Understanding (MOU) Plan between PT PPI and Pangan Nusantara Indonesia 2. MOU between PT PPI and Said Bawazir Trading Company 3. Acting Director of Commercial & Development
27 Januari 2023 January 27, 2023	TL Hasil <i>Joint Audit</i> SPI RNI atas kasus dugaan gratifikasi pegawai BLI Follow up on the Outcome of the Joint Audit SPI RNI regarding alleged gratification cases involving BLI employees
1 Februari 2023 February 1, 2023	Pembahasan SDM HR Discussion
15 Februari 2023 February 15, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan dan Pembahasan Rencana PPI Properti oleh Konsultan Arghajata 2. <i>Progress</i> Rencana Integrasi BGR Logistik Indonesia dan Berdikari Logistik Indonesia oleh Konsultan YCP 3. Pembahasan Tindak Lanjut Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Perpanjangan <i>Availability Period</i> Kredit Investasi UPP Medan dan UPP Lampung dari Bank Mandiri 4. Paparan dan Pembahasan <i>Sales Plan</i> Februari 2023 5. Paparan Warung Pangan 6. MOU Gedung CTC 7. Agenda lain-lain (Efisiensi dan Efektivitas Nota Dinas, Limit Kredit di ERP, Kerjasama Imbal Dagang – MoU PPI dengan A to Z) <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation and Discussion of PPI Property Plan by Arghajata Consultant 2. Progress of the Integration Plan between BGR Logistik Indonesia and Berdikari Logistik Indonesia by YCP Consultant 3. Discussion on Follow-up Actions for the Letter of Credit Offering (SPPK) for the Extension of the Availability Period for Investment Credits for UPP Medan and UPP Lampung from Bank Mandiri 4. Presentation and Discussion of the Sales Plan for February 2023 5. Presentation on Food Stalls 6. MOU for CTC Building 7. Other Agenda Items (Efficiency and Effectiveness of Memoranda, Credit Limits in ERP, Trade Balance Cooperation – MoU between PPI and A to Z)
20 Februari 2023 February 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan KJPP terkait Hasil Kajian Pelepasan Aset Medan 2. PMN Tunai 3. Program Penugasan Gula Kristal Putih 4. Program Minyak Goreng DMO <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation by KJPP regarding the Results of the Medan Asset Disposal Study 2. Cash PMN 3. White Crystal Sugar Assignment Program 4. Cooking Oil DMO Program
20 Februari 2023 February 20, 2023	Pembahasan SDM HR Discussion
27 Februari 2023 February 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Review</i> Januari 2023 2. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Review for January 2023 2. Miscellaneous
27 Februari 2023 February 27, 2023	Pembahasan SDM HR Discussion
1 Maret 2023 March 1, 2023	Pembahasan SDM HR Discussion

Tanggal Date	Agenda
6 Maret 2023 March 6, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusbukuan Aset tetap 2. Usulan Penentuan Batas Kewenangan (<i>Threshold</i>) 3. Temuan KAP 4. Program <i>Flush Out</i> Minyak Goreng Mamamia 5. Kasus Hukum SIAC
8 Maret 2023 March 8, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fixed Asset Write-off 2. Proposal for Determining Authorization Limits (<i>Threshold</i>) 3. KAP Findings 4. Flush Out Program for Mamamia Cooking Oil 5. SIAC Legal Cases
9 Maret 2023 March 9, 2023	RUPS Sirkuler BGR LI BGR LI Circular RUPS
9 Maret 2023 March 9, 2023	Bank Mandiri Bank Mandiri
9 Maret 2023 March 9, 2023	Pembahasan SDM HR Discussion
27 Maret 2023 March 27, 2023	Bank BRI
27 Maret 2023 March 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sales Plan</i> Maret 2023 2. Kinerja ytd Februari 2023 3. <i>Update</i> Likuiditas 4. Pembahasan PMO Aset
3 April 2023 April 3, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sales Plan for March 2023 2. Year-to-Date Performance for February 2023 3. Liquidity Update 4. Discussion on Asset PMO
10 April 2023 April 10, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Borax Pentahydrate 2. <i>Update</i> Rumput Laut 3. Proses Penyelesaian Sengketa PT Nindya Karya (Persero) melalui Arbitrase BANI
13 April 2023 April 13, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Borax Pentahydrate 2. Seaweed Update 3. Process of Resolving Disputes with PT Nindya Karya (Persero) through BANI Arbitration
17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan 5 Gudang Semarang Jalan Letjen Soeprapto/Taman Sri Gunting 2. Persewaan Perpanjangan Aset 3. Perubahan Anggaran Dasar PPI Industri 4. Kerjasama dengan Luxchem
17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilization of 5 Warehouses in Semarang at Jalan Letjen Soeprapto/Taman Sri Gunting 2. Extension of Asset Lease 3. Amendments to the Articles of Association of PPI Industri 4. Collaboration with Luxchem
13 April 2023 April 13, 2023	Pembahasan Paket Sembako Discussion on Basic Food Packages
17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persediaan Maret 2023 2. Beras Ketan Lokal 3. Penanganan Bawang dan Cabai 4. MOU antara PT PPI dan PT Aditama Anugerah Abadi tentang Rencana Kerja Sama Penyediaan Bahan Pangan dan Pendukung Pangan Lainnya. 5. PLH Direktur Keuangan Manajemen Risiko, SDM & Umum selama Cuti
17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventory for March 2023 2. Local Sticky Rice 3. Handling of Onions and Chilies 4. MOU between PT PPI and PT Aditama Anugerah Abadi regarding the Plan for Cooperation in the Provision of Food Materials and Other Food Support 5. Acting PLH for Finance Director, Risk Management, HR & General Affairs during Leave

Tanggal Date	Agenda
3 Mei 2023 May 3, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sales Plan 2023 2. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Sales Plan for 2023 2. Miscellaneous
15 Mei 2023 April 15, 2023	Usulan Penetapan Penghasilan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2023 Proposal for Determining the Income of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Directors for the Year 2023
25 Mei 2023 May 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan SDM 2. Program Aset 2023 untuk <i>follow up</i> Catatan Audit 2022 3. Update Rumput Laut 4. Kinerja Cabang ytd Mei 2023 <ol style="list-style-type: none"> 1. HR Discussion 2. Asset Program for 2023 to follow up on the Audit Notes for 2022 3. Seaweed Update 4. Branch Performance Year-to-Date for May 2023
29 Mei 2023 May 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas Bisnis Property ID FOOD 2. Update Integrasi BGR Logistik Indonesia dan Berdikari Logistik Supply 3. Penguatan Modal Anak Perusahaan BGR Logistik Indonesia melalui skema <i>Debt to Equity Swap</i> (DES) 4. Transformasi Perubahan Fundamental Bisnis 5. Permohonan Perubahan Anggaran Dasar BGR Logistik Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Capability of IDFOOD Property 2. Update on the Integration of BGR Logistik Indonesia and Berdikari Logistik Supply 3. Strengthening of Equity Capital of BGR Logistik Indonesia Subsidiaries through Debt to Equity Swap (DES) Scheme 4. Fundamental Business Transformation 5. Request for Amendment to the Articles of Association of BGR Logistik Indonesia
7 Juni 2023 June 7, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Non Bahan Pokok <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Komoditi Pupuk dan Pestisida - Farmasi 2. Program International Trading <ul style="list-style-type: none"> - Rumput Laut - Coklat (Cocoa) <ol style="list-style-type: none"> 1. Non-Essential Commodity Program <ul style="list-style-type: none"> - Discussion on Fertilizer and Pesticide Commodities - Pharmaceuticals 2. International Trading Program <ul style="list-style-type: none"> - Seaweed - Cocoa
14 Juni 2023 June 14, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan SDM 2. Program Bahan Pokok 3. Update Threshold 4. Potensi Covare WRT 5. Update SPBU <ol style="list-style-type: none"> 1. HR Discussion 2. Basic Commodities Program 3. Threshold Update 4. Potential of Covare WRT 5. Gas Station Update
26 Juni 2023 June 26, 2023	Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 PT BGR LI Resolutions of the Annual General Meeting (RUPS) for the Fiscal Year 2022 Annual Report of PT BGR LI
26 Juni 2023 June 26, 2023	Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 PT PPI Industri Resolutions of the Annual General Meeting (RUPS) for the Fiscal Year 2022 Annual Report of PT PPI Industri

Tanggal Date	Agenda
04 Juli 2023 July 04, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pengenalan Profil Bisnis PPI Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Introduction to PPI Business Profile Miscellaneous
10 Juli 2023 July 10, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hutang Usaha PPI 30 Juni 2023 Pelepasan Aset Medan <ol style="list-style-type: none"> Discussion on PPI Business Debt as of June 30, 2023 Disposal of Medan Assets
11 Juli 2023 July 11, 2023	<p>Prognosa Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Performance Forecast of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia</p>
12 Juli 2023 July 12, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Posisi Persediaan Rencana Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Maksud dan Tujuan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia <ol style="list-style-type: none"> Inventory Position Discussion Plan to Amend Article 3 Purpose and Objectives of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's Articles of Association
18 Juli 2023 July 18, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Penjualan Minyak Goreng Rencana PKS Bulog <ol style="list-style-type: none"> Cooking Oil Sales Plan Plan for Cooperation Agreement with Bulog
25 Juli 2023 July 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Penyelesaian Transaksi GKP Presentasi Program <i>Stunting</i> (Distribusi telur & ayam di wilayah jabar) Pembahasan SDM <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the Settlement of GKP Transactions Presentation of Stunting Program (Distribution of eggs & chicken in West Java) HR Discussion
1 Agustus 2023 August 1, 2023	<p>Pembahasan Imbal Dagang dengan Mesir Trade Balance Discussion with Egypt</p>
4 Agustus 2023 August 4, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Kerugian Imbal Dagang dengan Mesir dan Pembelian Kopi Hal-hal lain yang dianggap perlu <ol style="list-style-type: none"> Trade Balance Loss with Egypt and Coffee Purchases Other Matters Deemed Necessary
7 Agustus 2023 August 7, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Modal Dasar Anak Perusahaan melalui skema <i>Debt to Equity Swap</i> (DES) Pendayagunaan Aset Induk oleh Anak Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Strengthening of Subsidiary's Authorized Capital through Debt to Equity Swap (DES) Scheme Utilization of Parent Company Assets by Subsidiaries
15 Agustus 2023 August 15, 2023	<p>Pemberhentian Sdr. Andry Tanudjaja sebagai Komisaris Non Independen PT BGR Logistik Indonesia Termination of Mr. Andry Tanudjaja as Non-Independent Commissioner of PT BGR Logistik Indonesia</p>
15 Agustus 2023 August 15, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Business Review</i> ytd Juli 2023 <i>Update</i> RKAP <ol style="list-style-type: none"> Business Review Year-to-Date July 2023 RKAP Update
21 Agustus 2023 August 21, 2023	<p>RKAP 2024 RKAP 2024</p>
21 Agustus 2023 August 21, 2023	<p>Konfirmasi Negatif <i>Covenant</i> atas Aksi Rencana <i>Debt to Equity Swap</i> Negative Covenant Confirmation on Planned Debt to Equity Swap Action</p>
21 Agustus 2023 August 21, 2023	<p>Pendayagunaan Aset Induk oleh Anak Perusahaan Utilization of Parent Company Assets by Subsidiaries</p>

Tanggal Date	Agenda
28 Agustus 2023 August 28, 2023	Pembahasan Materi <i>Business Review</i> 1. Laporan dan <i>Business Plan</i> Rumput Laut 2. Proses Bisnis di Unit Pengolahan Ikan (UPI) 3. Laporan dan <i>Business Plan</i> Minyak Goreng 4. Laporan dan <i>Business Plan</i> Bahan Kimia Berbahaya 5. Laporan dan <i>Business Plan</i> Kedelai Discussion on Business Review Material 1. Report and Business Plan for Seaweed 2. Business Process at the Fish Processing Unit (UPI) 3. Report and Business Plan for Cooking Oil 4. Report and Business Plan for Hazardous Chemicals 5. Report and Business Plan for Soybeans
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Keputusan Radir Sirkuler: KMK BNI Circular Board of Director's Decision: BNI KMK
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Keputusan Radir Sirkuler: Modal Kerja RNI Circular Board of Director's Decision: RNI Working Capital
8 September 2023 September 8, 2023	Ketentuan dan Prosedur Penetapan Harga Jual Barang Dagangan (Komoditi) di bawah Harga P2B (Program Pengadaan Barang) atau Prakalkulasi Pengadaan Barang. Terms and Procedures for Setting Selling Prices of Trade Goods (Commodities) below P2B Price (Goods Procurement Program) or Pre-calculation of Goods Procurement.
8 September 2023 September 8, 2023	1. Uang Muka Rumput Laut 2. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Buduran 1. Down Payment for Seaweed 2. Buduran Fish Processing Unit (UPI)
13 September 2023	Pengajuan Keberatan Pajak PT PPI Tahun 2012 Submission of Tax Objection by PT PPI for the Year 2012
13 September 2023	Evaluasi Kinerja dan Program Kerja Untuk Periode s.d Agustus 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Performance Evaluation and Work Program for the Period until August 2023 of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
13 September 2023	Pengajuan Penurunan Harga Cabang Jambi dan Yogyakarta Request for Price Reduction for Jambi and Yogyakarta Branches
13 September 2023	1. <i>Stock</i> Minyak Goreng Komersial 2. <i>Update</i> Laporan Pendistribusian Paket <i>Stunting</i> 1. Commercial Cooking Oil Stock 2. Update on the Distribution Report of Stunting Packages
13 September 2023 September 13, 2023	Pembayaran Renovasi Gudang Tarakan Payment for Tarakan Warehouse Renovation
20 September 2023 September 20, 2023	1. Bisnis Model <i>Integrated B2B Upstream System</i> 2. Rencana Importasi Produk Hortikultura - Bawang Putih 3. Lain-Lain 1. Integrated B2B Upstream System Business Model 2. Plan for Importing Horticultural Products - Garlic 3. Miscellaneous
25 September 2023 September 25, 2023	1. Wewenang Penurunan Harga Jual Barang Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2. Penjualan Minyak Goreng Mamamia 1. Authority to Reduce the Selling Price of Merchandise of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2. Sale of Mamamia Cooking Oil
25 September 2023 September 25, 2023	1. Kajian Manajemen Risiko Permintaan Importasi Bawang Putih 7.000 Ton oleh PT SMS. 2. Kajian Manajemen Risiko Permintaan Importasi Kedele US 12.500 ton oleh PT PBB. 1. Risk Management Review of 7,000 Tonnes Garlic Import Request by PT SMS. 2. Risk Management Review of US 12,500 tonnes of soybean import request by PT PBB.

Tanggal Date	Agenda
25 September 2023 September 25, 2023	Pembahasan SDM HR Discussion
26 September 2023 September 26, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Persetujuan Kandidat Direksi PT BGR Logistik Indonesia dari Pemegang Saham Usulan Kandidat Dewan Komisaris PT BGR Logistik Indonesia <ol style="list-style-type: none"> Follow-up Approval of Candidates for Board of Directors of PT BGR Logistik Indonesia from Shareholders Proposed Candidates for the Board of Commissioners of PT BGR Logistik Indonesia 2.
2 Oktober 2023 October 2, 2023	Pengajuan Harga Khusus untuk <i>Distributor Exclusive</i> Dharmatoniil di Cabang Medan Special Price Submission for Exclusive Dharmatoniil Distributor in Medan Branch
2 Oktober 2023 October 2, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Perpanjangan Kontrak Willmar Tindak Lanjut Kurma Tindak Lanjut Rumput Laut <ol style="list-style-type: none"> Willmar Contract Extension Date Follow-up Seaweed Follow-up
2 Oktober 2023 October 2, 2023	Perubahan Limit dan Peruntukkan Fasilitas Kredit Modal Kerja <i>Receivable Financing</i> KMK Mandiri Changes in Limit and Designation of Working Capital Credit Facility Receivable Financing KMK Mandiri
2 Oktober 2023 October 2, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Pelepasan Aset Medan Permasalahan Persewaan Aset PPI di Padang <ol style="list-style-type: none"> Update on Medan Asset Disposal PPI Asset Rental Issues in Padang
9 Oktober 2023 October 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Opsi atas Pengelolaan SPBU Kp Bandan Lain-lain: Usulan Talenta untuk Calon Kandidat Direktur Utama Mitra BUMDes Nusantara <ol style="list-style-type: none"> Option on the Management of Kp Bandan Petrol Station Others: Talent Proposal for Candidates for President Director of BUMDes Nusantara Partners
13 Oktober 2023 October 13, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan Pangan Stunting Tahap Kedua Rencana Kerjasama Jual Beli Beras untuk Cadangan Beras Provinsi Banten <ol style="list-style-type: none"> Second Phase of Stunting Food Assistance Cooperation Plan to Buy and Sell Rice for Banten Province's Rice Reserve.
18 Oktober 2023 October 18, 2023	<i>Risk Appetite</i> Risk Appetite
18 Oktober 2023 October 18, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penjualan GKP Eks Impor dengan PT BEJO Kimia B2 <ol style="list-style-type: none"> Sale of ex-imported GKP with PT BEJO Hazardous Chemical
23 Oktober 2023 October 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan <i>Cafe Covare</i> di Gedung Waskita Rajawali Tower (WRT) Pendayagunaan Aset Tetap di Komplek Pergudangan BGR Kelapa Gading, Jakarta <ol style="list-style-type: none"> Opening of Cafe Covare in Waskita Rajawali Tower (WRT) Building Utilisation of Fixed Assets at BGR Warehousing Complex Kelapa Gading, Jakarta
23 Oktober 2023 October 23, 2023	Pembahasan Pembagian Klasifikasi Cabang PPI, Skema Grading, Skema Remunerasi Kepala PMO & SPBU Discussion on PPI Branch Classification, Grading Scheme, PMO & Service Station Head Remuneration Scheme
24 Oktober 2023 October 24, 2023	<i>Progress Audit & Point of Concern</i> Audit Progress & Point of Concern
26 Oktober 2023 October 26, 2023	Keputusan Radir Sirkuler: Kredit Modal Kerja Bank Permata BOD Meeting Circular Decision: Permata Bank Working Capital Loan
1 November 2023 November 1, 2023	Penjualan GKP Ex PT Bejo Sale of GKP Ex PT Bejo

Tanggal Date	Agenda
1 November 2023 November 1, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Pembagian Wilayah Cabang Binaan Direksi Pembahasan Permasalahan Modal Kerja untuk Pembayaran Hutang Prinsipal Farmasi <i>Pro Cons</i> Implementasi Sistem Agregator B2B <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the Division of Branch Areas Assisted by the Board of Directors Discussion on Working Capital Issues for Payment of Pharmaceutical Principal Debt Pros and Cons of B2B Aggregator System Implementation
2 November 2023 November 2, 2023	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Proyek Eks PT BGR (Kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan UPP Divre Medan dan Lampung) Follow-up on the Examination Report with Specific Objectives (PDTT) of the Former PT BGR Project (Revitalisation and Development of UPP Divre Medan and Lampung)
6 November 2023 November 6, 2023	Pembahasan Jasa Konsultan Hukum (<i>Lawyer</i>) untuk Penanganan dan Pendampingan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2017 Discussion of Legal Consultant Services (<i>Lawyer</i>) for the Handling and Assistance of Cases of Alleged Corruption in Sugar Importation Activities at the Ministry of Trade in 2015 – 2017
6 November 2023 November 6, 2023	Tanggapan atas temuan tahap 1 BPK - Aset JOTRC Response to stage 1 findings of BPK - JOTRC Assets
14 November 2023 November 14, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Persetujuan Batas Kewenangan atas Kerjasama Aset Tetap PT PPI (dari PMO Aset); <i>Update</i> sewa menyewa gedung antara PT PPI dengan PT Pembangunan Kota Tua Jakarta <ol style="list-style-type: none"> Proposed Approval of Authority Limit for PT PPI Fixed Assets Cooperation (from Asset PMO); Update on building lease between PT PPI and PT Pembangunan Kota Tua Jakarta
14 November 2023 November 14, 2023	Finalisasi Nilai Akhir Kalkulasi - Transaksi Jual Beli Beras Ketan Impor & Apel Impor Tahun 2022 antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan PT Jakarta Sereal Finalisation of Final Value Calculation - Sale and Purchase Transaction of Imported Glutinous Rice & Imported Apples in 2022 between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and PT Jakarta Sereal
14 November 2023 November 14, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Ekspor Manggis <i>Representative Office</i> <ol style="list-style-type: none"> Mangosteen Export Representative Office
14 November 2023 November 14, 2023	Tindak lanjut temuan BPK dan Progress Temuan KAP, Sistem pencatatan data aset dalam laporan keuangan Follow-up of BPK findings and Progress of KAP Findings, Asset data recording system in financial statements
14 November 2023 November 14, 2023	SDM (Penetapan Pjs Kepala Divisi Renstra) HR (Determination of the Acting Head of Strategic Division)
14 November 2023 November 14, 2023	Overview Bisnis Unilever di Wilayah Lampung sebagai tindak lanjut temuan KAP 2021 & 2022; Overview of Unilever Business in Lampung Region as a follow-up to KAP findings 2021 & 2022;
20 November 2023 November 20, 2023	Pinjaman untuk PPI Industri Loan for Industrial PPI
20 November 2023 November 20, 2023	Persetujuan Fasilitas Kredit 150 M Bank BCA Approval of Credit Facility 150 M Bank BCA
20 November 2023 November 20, 2023	Bantuan Hukum Legal Assistance
20 November 2023 November 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Pembentukan Komite TJSL <ol style="list-style-type: none"> Establishment of Asset Inventory Team Establishment of TJSL Committee
24 November 2023 November 24, 2023	Minyak Mamamia Mamamia Oil

Tanggal Date	Agenda
24 November 2023 November 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Gudang <i>stock point</i> di Surabaya dan Kelapa Gading Profil aset gudang di Surabaya Kantor cabang Yogyakarta <ol style="list-style-type: none"> Warehouse stock points in Surabaya and Kelapa Gading Asset profile of warehouse in Surabaya Yogyakarta branch office
5 Desember 2023 December 5, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan Pangan <i>Stunting</i> Tahap 2 Warung Pangan Kurma <ol style="list-style-type: none"> Stunting food assistance phase 2 Food stalls Dates
7 Desember 2023 December 7, 2023	Pembahasan Lanjutan Terkait dengan PMO Property Further discussion related to PMO Property
8 Desember 2023 December 8, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Rencana Kerja Sama Jangka Panjang Aset Tubagus Angke nomor 1 Jakarta Sewa Ruang Lantai 4 Graha PPI oleh PT PPI Industri Sewa Gudang Kalimas Barat No.41, Surabaya oleh CV Delton Aset PT PPI di Jalan Yos Sudarso, Kota Tarakan, Kalimantan Utara <ol style="list-style-type: none"> Update on the Long-Term Cooperation Plan for Tubagus Angke Asset number 1 Jakarta Lease of 4th Floor Room Graha PPI by PT PPI Industri Lease of West Kalimas Warehouse No.41, Surabaya by CV Delton PT PPI's assets at Jalan Yos Sudarso, Tarakan City, North Kalimantan
8 Desember 2023 December 8, 2023	Pembangunan <i>Cold Storage</i> Cold Storage Construction
11 Desember 2023 December 11, 2023	Pembahasan SDM HR Discussion
11 Desember 2023 December 11, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Skema Transaksi Bisnis DOP & DINP antara PT PPI & PT Luxchem Indonesia Penetapan Harga Jual Barang Dagangan (Komoditi) Pupuk Non Subsidi Dibawah Harga P2B (Program Pengadaan Barang) atau Prakalkulasi Pengadaan Barang Pupuk ZA Kemasan @50Kg party 15.000 Kg – PPI Cabang Surakarta Harga Tepung PLH Direktur Komersial dan Pengembangan selama cuti ibadah umroh. <ol style="list-style-type: none"> DOP & DINP Business Transaction Scheme between PT PPI & PT Luxchem Indonesia Determination of Selling Price of Non-Subsidised Fertiliser Merchandise (Commodity) Below P2B Price (Goods Procurement Program) or Precalculation of Goods Procurement of ZA Fertiliser Packaging @50Kg party 15,000 Kg - PPI Surakarta Branch Flour Price PLH Director of Commercial and Development during Umrah leave.
18 Desember 2023 December 18, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pencatatan Aset Temuan BPKP 2004 <ol style="list-style-type: none"> Asset Recording BPKP findings 2004
21 Desember 2023 December 21, 2023	Program Kerja Utama yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan (<i>high impact</i>) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Major Work Programmes that have a major influence on company performance (high impact) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
21 Desember 2023 December 21, 2023	Progress Penyampaian Aset pada Portal Aset Kementerian BUMN RI Progress in Submitting Assets to the Asset Portal of the Ministry of SOEs RI
21 Desember 2023 December 21, 2023	PLH Direktur KMRSU PLH Director of KMRSU
27 Desember 2023 December 21, 2023	PMN Non Tunai Non-cash PMN
27 Desember 2023 December 21, 2023	Penjualan Saham CBT CBT Share Sale

Tanggal Date	Agenda
27 Desember 2023 December 27, 2023	Pembahasan Kemitraan (Nestle & Unilever) Partnership Discussion (Nestle & Unilever)
27 Desember 2023 December 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Kelanjutan Luxchem Gudang Surabaya <ol style="list-style-type: none"> Luxchem continuation Surabaya Warehouse
28 Desember 2023 December 28, 2023	Audit BTP Minyak Goreng Mamamia Mamamia Edible Oil BTP Audit
28 Desember 2023 December 28, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penjualan Kurma Rumput Laut <ol style="list-style-type: none"> Date Sales Seaweed

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI TAHUN 2023

Uraian lengkap mengenai daftar kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Direksi sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF BOARD OF DIRECTORS IN 2023

A complete description of the list of training and competency development activities that have been attended by all members of the Board of Directors throughout 2023 can be found in the Company Profile Chapter.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2023

Terkait pelaksanaan tugas di tahun 2023, Direksi telah menjalankan agenda sebagai berikut:

- Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) melalui penerapan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran;
- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
- Menyiapkan susunan organisasi Perseroan;
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- Menyimpan dan memelihara Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi;
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa;
- Menyiapkan pada waktunya RJPP serta mengupayakan tercapainya sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP;
- Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IN 2023

Regarding the implementation of duties in 2023, the Board of Directors has carried out the following agenda:

- Comply with the Company's Articles of Association and Laws and Regulations and implement Good Corporate Governance (GCG) through the application of the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
- Establish the Company's management policy.
- Prepare the Company's organizational structure;
- To seek and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities.
- Keeping and maintaining the Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meeting, and Minutes of Board of Directors Meeting;
- Organizing the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) and/or Extraordinary GMS;
- Prepare the RJPP in due time and strive to achieve the long-term goals stated in the RJPP;
- Prepare and determine the Company's Work Plan and

Anggaran Perusahaan (RKAP);

- Menyusun Laporan Tahunan Perseroan;
- Menyusun Laporan Manajemen Perseroan;
- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif di tingkat korporat;
- Melaksanakan kaji ulang (*review*) secara berkala mengenai pelaksanaan sistem manajemen risiko;
- Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara *accurate, reliable, timely, consistent* dan *useful*;
- Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial;
- Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (*pelecehan/harrasment*);
- Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- Menghadiri Rapat Direksi;
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Budget (RKAP);

- Preparing the Company's Annual Report;
- Preparing the Company's Management Report;
- Developing comprehensive risk management policies and strategies at the corporate level;
- Carry out periodic reviews on the implementation of the risk management system;
- Disclose important information in the Annual Report and Financial Statements to other parties in accordance with applicable laws and regulations in an accurate, reliable, timely, consistent and useful manner;
- Carry out social responsibility activities;
- Provide a work environment that is free from all forms of pressure (*harassment*);
- Develop an accounting system based on the principles of applicable financial accounting standards;
- Attend the Board of Directors Meeting;
- Regulate the provisions of the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old age pensions and other income for the Company's employees based on applicable laws and regulations.

KEPUTUSAN DIREKSI TAHUN 2023

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

No	Jenis Type	Judul Title	Nomor Kebijakan Number of Policy	Tanggal Kebijakan Policy Date
1	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Penetapan Masa Transisi Dalam Penggunaan Aplikasi E-Proposal dan/atau Sinur Yang Tertuang Di Dalam Peraturan Direksi Nomor 26/ PERDIR /PPI/XI/2022 Tentang Prosedur Operasi Baku Penjualan Barang Dagangan PT PPI dan Peraturan Direksi Nomor 29/ PERDIR /PPI/XI/2022 Tentang Prosedur Operasi Baku Pengadaan BA Establishment Of A Transition Period In The Use Of E-Proposal and/or Application of Sinur as Contained In the Board Of Directors Regulation Number 26/ PERDIR /PPI/XI/2022 Concerning Standard Operating Procedures For The Sale of PT PPI Merchandise and Board Of Directors Regulation Number 29/ PERDIR /PPI/XI/2022 Concerning Standard Operating Procedures For The Procurement of BA	0031/DO/INT/ PPI/1/2023	06/01/23
2	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili Tanggal 23 Januari 2023 Joint Leave For Chinese New Year 2574 Kongzili On 23 January 2023	01/DKMRSU/SE/ PPI/1/2023	11/01/23

No	Jenis Type	Judul Title	Nomor Kebijakan Number of Policy	Tanggal Kebijakan Policy Date
3	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Perpanjangan Masa Transisi Dalam Penggunaan Aplikasi E-Proposal yang Tertuang di Dalam Peraturan Direksi Nomor 26/PERDIR/PPI/XI/2022 Tentang Prosedur Operasi Baku Penjualan Barang Dagangan PT PPI dan Peraturan Direksi Nomor 29/PERDIR/PPI/XI/2022 Tentang Prosedur Operasi Baku Pengadaan Barang Dagang Extension of the Transition Period in the Use of the E-Proposal Application Contained in Board of Directors Regulation Number 26/PERDIR/PPI/XI/2022 concerning Standard Operating Procedures for the Sale of Merchandise of PT PPI and Board of Directors Regulation Number 29/PERDIR/PPI/XI/2022 concerning Standard Operating Procedures for the Procurement of Merchandise	0130/DO/INT/PPI/II/2023	28/02/23
4	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Himbauan Kepada Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Dan Anak Perusahaan Beserta Anggota Keluarga Untuk Berperilaku Sesuai Nilai-Nilai Utama Akhlak Dalam Interaksi Sosial Di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Appeal to Employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and its Subsidiaries and Family Members to Behave in accordance with the Main Values of Morals in Social Interactions within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	04/DKMRSU/SE/PPI/IV/2023	04/04/23
5	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Penyebarluasan Informasi dan Kerahasiaan Data Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Dissemination of Information And Confidentiality of Data of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	0026/DKMRSU/INT/PPI/VI/2023	26/06/23
6	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Surat Edaran Perkara Impor Gula Sugar Import Circular Letter	0 1 / D U / S E / PPI/X/2023	04/10/23
7	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Pengendalian Informasi, Komunikasi dan Kerahasiaan Data Perusahaan PT PPI Control of Information, Communication and Confidentiality of PT PPI Company Data	0 2 / D U / S E / PPI/X/2023	18/10/23
8	Surat Edaran Direksi Board of Directors Circular Letter	Keterlibatan Direksi dan Pegawai PT PPI pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Involvement of Directors and Employees of PT PPI in the Implementation of General Elections, Regional Head Elections, and/or as Political Party Managers or Acting Regional Heads and Deputy Regional Heads	03/DU/SE/PPI/XI/2023	06/11/23

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memikul tanggung jawab penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang operasional Perseroan. Bersama-sama, Dewan Komisaris dan Direksi berkolaborasi secara erat untuk membangun kerangka kerja tata kelola yang kuat, mendorong transparansi, dan menjunjung tinggi standar etika di seluruh organisasi. Dengan menjalankan perannya masing-masing secara efektif, mereka berkontribusi dalam menjaga ketahanan, daya saing, dan keberlanjutan Perseroan di tengah lanskap bisnis yang terus berkembang. Hal ini akan tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko;
2. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
3. Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
5. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

RAPAT GABUNGAN

Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk koordinasi guna membahas isu dan hal-hal strategis terkait pengelolaan perseroan, serta sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan langsung dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi.

Di dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dan Direksi umumnya membahas laporan kinerja PPI, mengambil keputusan strategis yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan Dewan komisaris, serta mendiskusikan masalah atau isu terkini yang sedang dihadapi PPI.

Kebijakan Rapat Gabungan

Pelaksanaan rapat gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat gabungan dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat gabungan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

According to their specific roles and responsibilities, both the Board of Commissioners and the Board of Directors bear the crucial responsibility of ensuring the long-term continuity and success of the Company's operations. Together, the Board of Commissioners and the Board of Directors collaborate closely to establish a robust governance framework, promote transparency, and uphold ethical standards throughout the organization. By fulfilling their respective roles effectively, they contribute to maintaining the Company's resilience, competitiveness, and sustainability in the ever-evolving business landscape. This will be reflected in:

1. Implementation of good internal control and risk management;
2. Achievement of reasonable returns for shareholders;
3. The interests of Stakeholders are reasonably protected;
4. Implementation of leadership and management succession in all lines of the organization;
5. Fulfillment of GCG implementation.

JOINT MEETING

The Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors periodically as a form of coordination to discuss issues and strategic matters related to the management of the company, as well as a form of implementation of the direct supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors.

In the joint meeting, the Board of Commissioners and the Board of Directors generally discuss PPI's performance reports, make strategic decisions that require the approval or consideration of the Board of Commissioners, and discuss current problems or issues facing PPI.

Joint Meeting Policy

The implementation of the joint meeting is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the joint meeting is chaired by another Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

The decision-making mechanism in the joint meeting is carried out by deliberation for consensus.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat gabungan bersama Direksi.

Agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di dalam rapat gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout 2023, the Board of Commissioners held 11 (eleven) joint meetings with the Board of Directors.

The agenda and attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the joint meetings are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran % Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Bara Krishna Hasibuhan*	Komisaris Utama President Commissioners	11	11	100%
Hamli**	Komisaris Utama President Commissioners	12	12	100%
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioners	12	12	100%
Muhammad Kampitra Ampera*	Komisaris Commissioners	10	10	100%
Dewan Direksi Board of Directors				
Nina Sulistyowati***	Direktur Utama President Directors	5	5	100%
S. Hernowo****	Direktur Utama President Directors	6	6	100%
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDMU Director of Finance, Risk Management and HRU	11	11	100%
Andry Tanudjaja***	Direktur Komersial dan Pengembangan Director of Commercial and Development	5	5	100%
Edhy Rizwan ****	Direktur Komersial dan Pengembangan Director of Commercial and Development	6	4	66,67%
Tri Wahyundo*****	Direktur Operasi Director of Operations	10	10	100%
Noverita Anggraeny*****	Direktur Operasi Director of Operations	1	1	100%

*Bara Krishna Hasibuhan dan Muhammad Kampitra Ampera hingga 18 Desember 2023

**Hamli menjabat sebagai Komisaris Utama mulai 18 Desember 2023

***Nina Sulistyowati dan Andry Tanudjaja hingga 26 Juni 2023

****S. Hernowo dan Edhy Rizwan mulai 26 Juni 2023

*****Tri Wahyundo hingga 18 Desember 2023

*****Noverita Anggraeny mulai 18 Desember 2023

*Bara Krishna Hasibuhan and Muhammad Kampitra Ampera until December 18, 2023

**Hamli serves as President Commissioner starting December 18, 2023

***Nina Sulistyowati and Andry Tanudjaja until June 26, 2023

****S. Hernowo and Edhy Rizwan from June 26, 2023

*****Tri Wahyundo until December 18, 2023

*****Noverita Anggraeny from December 18, 2023

Agenda Rapat Gabungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
The agenda for the 2023 Joint Meeting is as follows:

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Agenda
31 Januari 2023 January 31, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d bulan Desember 2022; Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT PPI. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of performance up to December 2022; Discussion of proposed changes to the organizational structure of PT PPI.
6 Maret 2023 March 6, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023; Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of performance up to January 2023; Others
31 Maret 2023 March 31, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d bulan Februari 2023; Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of performance up to February 2023; Others
12 April 2023 April 12, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Business Review</i> Kinerja Perusahaan TW I 2023 Business Review of Company Performance TW I 2023
31 Mei 2023 May 31, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d bulan Januari 2023; Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of performance up to January 2023; Others
5 Juni 2023 June 5, 2023	Rapat Gabungan Tematik Piutang Thematic Joint Meeting on Receivables
21 Juli 2023 July 21, 2023	BR Holding atas Kinerja Anak Perusahaan Semester 1 2023 BR Holding on the Performance of Subsidiaries in the 1st Semester of 2023
25 Juli 2023 July 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja Semester I Tahun 2023; Usulan Rencana Pelepasan Aset Medan <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the performance of the first semester of 2023; Proposed Medan Asset Disposal Plan
30 Agustus 2023 August 30, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juli Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to July 2023; Other.
26 September 2023 September 26, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to August 2023; Other.
16 Oktober 2023 October 16, 2023	BR Holding atas Kinerja Anak Perusahaan s.d. September 2023 BR Holding on Subsidiary Performance until September 2023
25 Oktober 2023 October 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan September Tahun 2023; Rancangan RKAP 2024 <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to September Year 2023; Draft RKAP 2024
28 November 2023 November 28, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Oktober Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to October 2023; Other.
22 Desember 2023 December 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan November Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to November Year 2023; Other.

Rekomendasi dan Arahan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Tahun 2023

- a. Terdapat permasalahan aspek profitabilitas produk maupun produktivitas sumber daya yang ada di PPI sehingga laba usaha masih cukup jauh dari target. Hal ini berdampak kepada aspek likuiditas perusahaan yang semakin ketat di mana terjadi penurunan kas yang sangat dalam dari posisi awal tahun 2023. Direksi agar melakukan evaluasi atas penurunan aspek profitabilitas/produktivitas selama tahun 2023 tersebut dan menyusun langkah-langkah strategis peningkatan produktivitas/ profitabilitas yang akan dilakukan Direksi dalam sisa bulan tahun 2023.
- b. Evaluasi Kinerja penjualan PT PPI secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi kinerja produk-produk yang diperdagangkan oleh PT PPI dan strategi peningkatan kinerja sehingga diperoleh kepastian bahwa produk yang diusahakan tersebut memberikan kontribusi laba. Hal ini dikarenakan pencapaian kinerja Laba Usaha dan Laba Bersih yang cukup jauh dari target tersebut mengindikasikan adanya inefisiensi, rendahnya profitabilitas produk/proses bisnis di PPI dan adanya risiko konsentrasi bisnis, khususnya ketergantungan laba PPI kepada bisnis B2 (Bahan Kimia Berbahaya) yang marginnya cukup tinggi dan ketergantungan terhadap Penugasan Pemerintah.
 - (1) Direksi agar melakukan *extraordinary* kegiatan usaha (*beyond business as usual*);
 - (2) Direksi agar mengidentifikasi dan merealisasikan pipeline (potensi bisnis) setiap bulan untuk setiap komoditi;
 - (3) Direksi agar memilih strategi bisnis yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan/atau melakukan efisiensi biaya.
- c. Potret kinerja keuangan yang masih jauh dari target RKAP 2023 terlihat jelas dari profil risiko PT PPI per September 2023 yang masih dominan "merah/*high risk*". Direksi agar melakukan perbaikan profil risiko PPI khususnya Laba Usaha dan Laba Bersih sehingga dapat mencapai atau setidaknya mendekati target RKAP 2023.
- d. Manajemen agar secara kontinu melakukan monitoring dan penagihan terhadap posisi piutang usaha untuk meminimalkan risiko bertambahnya jumlah piutang yang tidak tertagih atau piutang macet yang dapat mempengaruhi likuiditas

Recommendations and Direction from the Board of Commissioners at the Joint Meeting in 2023

- a. There are issues regarding the profitability aspect of products as well as resource productivity at PPI, resulting in operating profit still being quite far from the target. This impacts the company's liquidity aspect, which has become tighter, with a significant decrease in cash from the initial position in 2023. The Board of Directors should evaluate the decline in profitability/productivity aspects during 2023 and develop strategic steps to improve productivity/profitability in the remaining months of 2023.
- b. Evaluate the overall sales performance of PT PPI, including assessing the performance of products traded by PT PPI and strategies for improving performance to ensure that the products contribute to profit. This is because the achievement of Operating Profit and Net Profit performance, which is quite far from the target, indicates inefficiency, low product/business process profitability at PPI, and business concentration risks, especially dependence on B2 (Hazardous Chemicals) business with high margins and dependence on Government Assignments.
 - (1) The Board of Directors should carry out extraordinary business activities (*beyond business as usual*);
 - (2) The Board of Directors should identify and realize pipelines (*business potentials*) every month for each commodity;
 - (3) The Board of Directors should choose a business strategy that is more suitable for the company's conditions, focusing on increasing revenue and/or cost efficiency.
- c. The financial performance profile, which is still far from the 2023 RKAP target, is clearly visible from the risk profile of PT PPI as of September 2023, which is still predominantly "red/*high risk*." The Board of Directors should improve PPI's risk profile, especially Operating Profit and Net Profit, to achieve or at least approach the 2023 RKAP target.
- d. Management should continuously monitor and collect receivables to minimize the risk of increasing uncollectible receivables or bad debts that may affect the company's liquidity and its ability to meet working capital needs. An increase in bad

- perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mencukupi modal kerja. Piutang usaha macet yang meningkat juga akan meningkatkan beban cadangan kerugian penurunan nilai.
- e. Proses identifikasi masalah kinerja yang masih belum mencapai RKAP baik bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal serta agar dilakukan pendalaman sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan secara efektif mengingat potret profil risiko PT PPI didominasi risiko utama yang berada pada zona merah (*high risk*) jauh melampaui risk appetite yang ditetapkan perusahaan.
 - f. Melakukan evaluasi kinerja Cabang terutama yang kinerjanya masih rendah, pembinaan dan pengawasan Cabang dan yang efektif terutama dengan perubahan struktur organisasi perusahaan yang baru. Pemberdayaan Cabang-Cabang PPI sebagai garda terdepan dalam perdagangan adalah sangat penting sehingga diharapkan Cabang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dan berkelanjutan sebagai *Profit Center* yang dapat diandalkan ke depan.
 - g. *Enterprise Resource Planning* (ERP) seharusnya bisa memberikan alert/warning terkait kualitas persediaan yang rusak atau *expired* serta menyajikan data yang akurat terkait piutang jatuh tempo, laporan keuangan, dan lainnya. Direksi agar segera menindaklanjuti implementasi ERP tersebut agar efektif dalam membantu kelancaran operasional/kegiatan perusahaan.
 - h. Mengupayakan optimalisasi aset yang melibatkan pihak ketiga, senantiasa mengacu dan memperhatikan secara seksama POB Aset yang telah dimiliki perusahaan serta peraturan-peraturan lain yang terkait sehingga terpenuhi aspek governance dan terhindar dari risiko hukum di kemudian hari.
 - i. Pelaksanaan Penugasan Pemerintah antara lain importasi gula dan lainnya, agar dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaannya sesuai dengan tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
 - j. Tindak Lanjut Temuan Audit:
 - (1) Direksi agar meningkatkan pengendalian internal dengan mempercepat penyelesaian temuan auditor eksternal dan internal.
 - (2) Direksi agar menyusun dan menerbitkan Peraturan Direksi (Perdir) Tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kedistributoran termasuk di dalamnya mekanisme penagihan piutang dan penjualan barang dagangan.
- receivables will also increase the provision for impairment losses.
- e. Identify performance issues that have not yet reached RKAP, both from internal and external factors, and conduct in-depth analysis so that risk mitigation can be carried out effectively, considering that the risk profile of PT PPI is dominated by main risks in the red zone (high risk) far beyond the company's risk appetite.
 - f. Evaluate the performance of branches, especially those with low performance, and effectively mentor and supervise branches, especially with the new organizational structure of the company. Empowering PPI branches as the frontline in trade is crucial so that branches can make significant and sustainable contributions as reliable Profit Centers in the future.
 - g. Enterprise Resource Planning (ERP) should provide alerts/warnings regarding the quality of damaged or expired inventory and provide accurate data on overdue receivables, financial reports, and others. The Board of Directors should promptly follow up on the implementation of ERP to effectively assist in the smooth operation of the company's activities.
 - h. Optimize assets involving third parties, always referring to and carefully considering the company's Asset POB and other related regulations to fulfill governance aspects and avoid legal risks in the future.
 - i. Government Assignment implementation, such as sugar imports and others, should be carried out with caution and in accordance with Good Corporate Governance.
 - j. Follow-up on Audit Findings:
 - (1) The Board of Directors should improve internal controls by expediting the resolution of external and internal auditor findings.
 - (2) The Board of Directors should develop and issue Board Regulations (Perdir) Regarding Standard Operating Procedures (SOP) for Distribution, including mechanisms for receivables collection and merchandise sales.

- (3) Direksi agar melakukan *Workload Analysis* untuk menganalisa beban kerja berdasarkan *Job Description* dan *Job Competency* dan *Job Evaluation* seluruh jabatan.
- (4) Direksi agar mempercepat implementasi ERP sehingga laporan keuangan secara *system* dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.
- (5) Direksi agar mempercepat sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) 35 titik Aset tanah yg telah habis masa berlakunya

Uraian lengkap mengenai saran dan rekomendasi tersebut telah dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memperhatikan keberagaman komposisi dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman berkarier dari masing-masing kandidat, serta memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompleksitas pengembangan bisnis perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, dan pemahaman mengenai sistem manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang cakap pada bidang yang dibutuhkan PPI serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberagaman komposisi menjadi hal penting karena berperan besar dalam mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan serta pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan adanya latar belakang keberagaman tersebut diharapkan alternatif dan perspektif pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan aspek yang lebih luas sehingga dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan solutif bagi perseroan.

Uraian lebih lengkap mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PPI berdasarkan latar belakang pendidikan dan karier profesional dapat dilihat pada profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

- (3) The Board of Directors should conduct *Workload Analysis* to analyze workloads based on *Job Descriptions*, *Job Competencies*, and *Job Evaluations* for all positions.
- (4) The Board of Directors should expedite ERP implementation so that financial reports can be relied upon for accuracy and fairness.
- (5) The Board of Directors should expedite the certification of *Building Use Rights (HGB)* for 35 land asset points whose validity has expired.

Comprehensive description of the advice and recommendations has been documented in the Board of Commissioners' Oversight Report for the year 2023.

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The nomination process for the Board of Commissioners and the Board of Directors consistently considers diversity in composition, taking into account the expertise, knowledge, and career experiences of each candidate, as well as the organizational needs and business development complexity of the company.

The appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is made considering integrity, dedication, understanding of corporate management systems, expertise in fields required by PPI, and the ability to dedicate sufficient time to fulfill their duties, as well as other requirements based on legal regulations.

Diversity in composition is essential as it significantly contributes to supporting the management, administration, departmentalization, and execution of duties of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. With diverse backgrounds, it is expected that decision-making alternatives and perspectives will consider broader aspects, leading to well-informed and solution-oriented decisions for the company.

A more detailed description of the diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI based on educational backgrounds and professional careers can be found in the profiles of each Board member in the Company Profile section of this Annual Report.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi.

Dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2023, Dewan Komisaris telah menetapkan rencana kegiatan secara umum untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas kinerja Direksi.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan evaluasi atas kinerja perusahaan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RKAP di antaranya sebagaimana tergambar dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 08/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 hal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/"PPI" Tahun Buku 2020 (*Audited*).

Penilaian kinerja Direksi secara tidak langsung juga dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, analisis Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta melalui kunjungan langsung Dewan Komisaris ke cabang. Di samping itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko juga melakukan penilaian terhadap berbagai aspek terkait kegiatan usaha perseroan. Hal tersebut tercermin di dalam laporan-laporan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dalam bentuk evaluasi atas pencapaian target-target KPI Dewan Komisaris untuk periode 1 (satu) tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Pihak Penilai

Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PPI dilakukan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Performance Evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors

1. The Board of Directors

Evaluation of the performance of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners as part of their oversight and advisory responsibilities to the Board of Directors.

In their Work Program for 2023, the Board of Commissioners has outlined a general plan to evaluate and assess the performance of the Board of Directors.

In practice, the Board of Commissioners collectively evaluates the performance of the Board of Directors based on an assessment of the company's performance and the achievement of targets set in the RKAP, as reflected in the Board of Commissioners' Letter No. 08/DK.Eks/PPI/IV/2021 dated April 30, 2021 regarding Responses and Suggestions of the Board of Commissioners regarding the Performance of PT Perusahaan Dagang Indonesia/"PT PPI" for the 2020 Financial Year (*Audited*).

The Board of Commissioners indirectly evaluates the performance of the Board of Directors through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, analysis of reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and through direct visits by the Board of Commissioners to branches. Additionally, the Board of Commissioners, through the Audit Committee and the Risk Management Committee, also evaluates various aspects related to the company's business activities, as reflected in the reports of the Audit Committee and the Risk Management Committee submitted to the Board of Commissioners.

2. The Board of Commissioners

In practice, the Board of Commissioners measures and evaluates the performance of the Board of Commissioners collectively through an evaluation of the achievement of KPI targets for the Board of Commissioners for the 1 (one) fiscal year period as outlined in the Board of Commissioners' Oversight Task Report.

Appraising Party

The appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI is conducted by shareholders through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (RUPS).

Hasil Penilaian

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam hal pemberian skema kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta untuk menentukan keputusan pengangkatan kembali ataupun pemberhentian terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Skor penilaian GCG yang diterima BOC dan BOD tahun 2023:

Aspek Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Indikator Indicator Achievement		
		2021	2022	2023
Dewan Komisaris Boards of Commissioners	35,00	27,263	33,593	-
Direksi Directors	35,00	28,860	31,695	-

Untuk skor tahun 2023 hingga saat ini masih belum dilakukan assessment, sehubungan dengan berlakunya Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 Perihal Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: Sk-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara)

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh pihak penilai.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan salah satu kriteria untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi.

Tabel di bawah ini mengungkapkan hal-hal berikut ini:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Appraisal Results

The results of the appraisal of the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors are used as a basis for consideration in providing compensation schemes for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as to determine decisions regarding reappointment or termination of the respective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

GCG assessment score for BOC and BOD in 2023:

For the score from 2023 until now, the assessment has not yet been conducted, in relation to the issuance of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decree Number SK-12/S.MBU/08/2023 Regarding the Revocation of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-16/S.MBU/2012 Regarding Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are fully committed to continuously improving the quality of GCG implementation by following up on every improvement recommendation provided by the evaluator.

Disclosure of Affiliate Relationships of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders

The affiliate relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders is one of the criteria for measuring the independence of the Board of Commissioners and Directors.

The table below discloses the following:

1. Affiliation relationships among members of the Board of Directors;
2. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;

3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

3. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Major Shareholders and/or controllers;
4. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and
5. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and the Major Shareholders and/or controllers.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/ pengendali.

In the table of disclosure of affiliation relationships below, it can be seen that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI do not have family relationships and financial relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and major shareholders/controllers.

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hamli		V		V		V		V		V		V
Setiawan Wangsaatmaja		V		V		V		V		V		V
Soegeng Hernowo		V		V		V		V		V		V
Wien Irwanto		V		V		V		V		V		V
Edhy Rizwan		V		V		V		V		V		V
Noverita Anggraeny		V		V		V		V		V		V

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Pada periode tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

During the year 2023 period, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company did not own any shares in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan skema remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI menjadi kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS dengan tetap mengindahkan pedoman dan prosedur yang berlaku secara umum.

Pada pelaksanaannya, Dewan Komisaris terlebih dahulu mengajukan rekomendasi terkait struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, untuk ditinjau dan diputuskan dalam RUPS.

Indikator Penetapan Remunerasi Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Indikator utama dalam penentuan remunerasi Direksi, yaitu:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain mengacu pada regulasi di atas, pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan sejumlah indikator berikut ini, antara lain:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri perdagangan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan peer perusahaan lainnya; dan

POLICY AND PROCEDURES FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The determination of remuneration schemes for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI is the authority of shareholders through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (RUPS) while adhering to applicable guidelines and procedures.

In its practice, the Board of Commissioners first submits their recommendations regarding the structure and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be reviewed and decided upon in the RUPS.

The Indicators for Remuneration Determination refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 concerning Guidelines for Determining Income for Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

The main indicators in determining director remuneration are:

1. Scale of business factors;
2. Complexity of business factors;
3. Inflation rate;
4. Company financial condition and capability;
5. Other relevant factors, and must not contradict laws and regulations.

In addition to referring to the above regulations, the provision of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors also considers several of the following indicators, among others:

1. Remuneration is given when the company makes a profit in the respective fiscal year;
2. Remuneration is given based on market developments in the trading industry;
3. Remuneration is given through the measurement of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with their duties and responsibilities;
4. Financial performance and achievement of Key Performance Indicators (KPIs) of the Company;
5. Individual work performance;
6. Fairness compared to peer companies; and

7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PPI.

7. Consideration of long-term goals and strategies of PPI.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PPI, adalah sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the Board of Directors
<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama The salary of the President Commissioner is 45% of the President Director The salary of the Commissioner is 90% of the President Commissioner 	<ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama Perhitungan gaji Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama The salary of the President Director is as the main reference The salary of the Director is 90% of the President Director
Tunjangan Allowance Rp2.942.068.791	Tunjangan Allowance Rp8.570.845.295
Fasilitas Facility Asuransi Kesehatan / Medical Insurance	Fasilitas Facility Asuransi Kesehatan / Health Insurance
Tantiem Dewan Komisaris Tantiem of the Board of Commissioners Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.	Tantiem Dewan Komisaris Tantiem of the Board of Commissioners Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.

TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, PPI telah membagikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun buku 2021 dengan uraian sebagai berikut:

STRUCTURE OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 concerning Guidelines for Determining Income for Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises (SOEs), the structure of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI is as follows:

TRANSPARENCY ON THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2023

In 2023, PPI provided remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors for the performance of the 2021 fiscal year with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan (Dalam 1 Tahun) Monthly Remuneration (in 1 Year)		Tunjangan Hari Raya (THR) Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2022 (Bersih) Tantiem for fiscal year 2022 (Net)	Remunerasi Total Tahun 2023 Total Remuneration in 2023
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance			
Dewan Komisaris The Board of Commissioners						
Bara Krishna Hasibuan	Komisaris Utama President Commissioner	666.994.355	133.398.871	56.250.000	-	856.643.226
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	624.712.500	124.942.500	50.625.000	3.700.000	729.000.000
Hamli	Komisaris Commissioner	627.425.565	125.485.113	50.625.000	44.200.000	627.425.565
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Commissioner Independent	600.294.919	120.058.984	50.625.000	44.200.000	729.000.000
Direksi Board of Directors						
Nina Sulistiyowati*	Direktur Utama President Director	1.495.000.000	-	147.500.000	86.500.000	1.830.000.000
S. Hernowo**	Direktur Utama President Director	792.500.000	-	105.702.740	-	992.833.333
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	1.311.125.000	-	129.500.000	46.700.000	1.605.000.000
Andry Tanudjaja*	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	1.270.500.000	-	129.500.000	73.500.000	1.605.000.000
Edhy Rizwan**	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	673.625.000	-	89.847.329	-	869.345.833
Tri Wahyundo Hariyatno***	Direktur Operasi Director of Operations	1.259.878.226	-	129.500.000	7.500.000	1.605.000.000
Noverita Anggraeny****	Direktur Operasi Director of Operations	51.246.774	-	35.441.507	-	63.666.129
*Nina Sulistiyowati dan Andry Tanudjaja hingga 26 Juni 2023		*Nina Sulistiyowati and Andry Tanudjaja until June 26, 2023				
**S. Hernowo dan Edhy Rizwan mulai 26 Juni 2023		**S. Hernowo and Edhy Rizwan from June 26, 2023				
***Tri Wahyundo hingga 18 Desember 2023		***Tri Wahyundo until December 18, 2023				
****Noverita Anggraeny mulai 18 Desember 2023		****Noverita Anggraeny from December 18, 2023				

Jumlah Remunerasi Total Remuneration	Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors
Di atas Rp2 miliar / More than IDR2 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar More than IDR1 billion- IDR2 billion	-	4
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar More than IDR500 million – IDR1 billion	4	2
Rp500 juta ke bawah Less than IDR500 million	1	-

BONUS KERJA

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020, ketentuannya sebagai berikut:

- Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
 - Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 70;
 - Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
- Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
 - Laba Setelah Pajak;
 - Pencapaian KPI;
 - BUMN yang melakukan investasi jangka Panjang secara agresif;
 - BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau
 - Faktor lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.
 - Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan PPI.
- Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

INCENTIVE

Provision of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors is regulated in the Regulation of Minister of SOE No. No. PER-12/MBU/11/2020 as amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/11/2020. The conditions are as follows:

- Tantiem/Incentives can be given to the Board of Directors and the Board of Commissioners if:
 - Realization of the lowest soundness level score of 70;
 - Minimum KPI achievement of 80% (eighty percent);
 - The opinion issued by the auditor is at least Qualified (WDP);
 - The condition of the Company is not losing more than the previous year for the Company in a loss condition, or the company is not at a loss than before in a profit condition. The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.
- Calculation of Tantiem/Incentives uses internal guidelines set by the Minister of SOEs with the following provisions:
 - The determination of Tantiem takes into account:
 - Profit After Tax;
 - Achievement of KPIs;
 - SOEs that make aggressive long-term investments;
 - SOEs that carry out government assignments; and/or
 - Other factors that can be accounted for in a professional manner.
 - Determination of Performance Incentives takes into account the improvement of PPI's performance and financial capability.
- The composition of the amount of Tantiem/ Incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners follows the position factors as follows:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama; b. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama; dan c. Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama. | <ul style="list-style-type: none"> a. Other members of the Board of Directors: 85% of the President Director; b. President Commissioner: 45% of the President Director; and c. Members of the Board of Commissioners: 90% of the President Commissioner. |
|---|---|

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka membantu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat-nasihat dan membantu jalannya fungsi pengawasan yang berkaitan dengan jalannya pengurusan PPI oleh Direksi dan segenap jajarannya serta melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Sekretaris Dewan Komisaris PPI diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut ini:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Periode jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam masa waktu tertentu namun akan berakhir apabila Dewan Komisaris memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan/ atau bila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In order to facilitate the smooth execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has established a Board of Commissioners Secretariat, accountable to the Board of Commissioners to assist in the smooth implementation of their duties. The Secretary of the Board of Commissioners assists the Board in providing advices and in facilitating supervisory functions related to the management of PPI by the Board of Directors and all its staff, as well as carrying out administrative and secretarial tasks related to the activities of the Board of Commissioners.

Legal Basis

The appointment of the Secretary of the Board of Commissioners at PPI is based on the following applicable regulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs;
3. Company Articles of Association.

Term of Office of the Secretary of the Board of Commissioners

The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is not specified for a specific period but will end if the Board of Commissioners dismisses the Secretary of the Board of Commissioners and/or if the person concerned resigns as Secretary of the Board of Commissioners.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Arie Wijaya
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of The Board of Commissioners

Periode Jabatan Term of Office	Mei 2021 – Sekarang May 2021 - Present
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, berdomisili di DKI Jakarta, dan saat ini berusia 39 tahun. He is an Indonesian citizen, lives in DKI Jakarta and as of now, he is 39 years old.
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/DK/PTPPI/ VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Board of Commissioners Number: 001/DK/PTPPI/ VII/2018 dated July 20, 2018 regarding the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Riwayat Pendidikan Educational Background	D3 - Sekolah Tinggi Akutansi Negara (2005) D3 - State College of Accountancy (2005)
Riwayat Karier Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan (Mei - Oktober 2014) • Analisis Akutabilitas Kinerja (Oktober 2014 - Oktober 2015) • Analisis Keuangan (Oktober 2015 - Januari 2019) • Kepala Subbidang Sinergi BUMN (Januari 2019 - Juni 2020) • Pengendali Subfungsi (Juni 2020 - Desember 2020) • Subkordinator (Desember 2020 - Sekarang) • Sekretaris Dewan Komisaris PPI (2021 - sekarang) <ul style="list-style-type: none"> • Financial Administration (May - October 2014) • Performance Accountability Analyst (October 2014 - October 2015) • Financial Analyst (October 2015 - January 2019) • Head of SOE Synergy Sub-Sector (January 2019 - June 2020) • Sub-function Controller (June 2020 - December 2020) • Sub-Coordinator (December 2020 - present) • Secretary of the Board of Commissioners of PPI (2021 - present)

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, Sekretaris Dewan Komisaris PPI memiliki tugas dan tanggung jawab pokok, antara lain:

1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan.
3. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
5. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
6. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat.
7. Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris, baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.
8. Membuat risalah rapat atas pelaksanaan rapat-rapat rutin maupun non-rutin Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.
11. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggungjawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
 - c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.

Duties and Responsibilities

Based on Board of Commissioners Decree No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, the Secretary of the Board of Commissioners has primary duties and responsibilities, including:

1. Providing information for the needs of the Board of Commissioners for the purpose of decision-making.
2. Preparing necessary materials related to routine reports of the Board of Directors in managing the Company such as RKAP, Annual Reports, Quarterly Reports, Internal Audit Inspection Reports, and other required reports.
3. Preparing materials or content related to matters requiring decisions from the Board of Commissioners regarding the Company's management activities conducted by the Board of Directors and all its staff.
4. Preparing and coordinating meeting agendas with attendees.
5. Preparing and sending meeting invitations to attendees.
6. Confirming the time, place, attendance, and other necessary aspects for the smooth conduct of meetings.
7. Organizing Board of Commissioners meetings, both internal meetings and with the Board of Directors and their staff, as well as other parties.
8. Documenting meeting minutes for both routine and non-routine Board of Commissioners meetings.
9. Distributing meeting minutes to relevant parties.
10. Preparing considerations, opinions, recommendations, and other decisions from the Board of Commissioners for Shareholders, the Board of Directors, and related parties regarding Company management.
11. Following up on every decision of the Board of Commissioners as follows:
 - a. Recording every decision made in decision-making forums and their responsibilities.
 - b. Monitoring and checking the progress stages of implementing meeting decisions/considerations, recommendations, opinions, and other decisions of the Board of Commissioners.
 - c. Encouraging the implementation of follow-up actions from meeting decisions, considerations, opinions, recommendations, and other decisions of the Board of Commissioners to the relevant responsible parties.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 12. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris maupun komite-komitennya. 13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan. 14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumendokumen yang berada dalam penguasaan atau lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil rapat-rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajaran dan pihak-pihak lainnya. b. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah rapat Dewan Komisaris, baik internal maupun rapat bersama Direksi. c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Dewan Komisaris. e. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahan-bahan/ dokumen/ laporan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 12. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners, both for the Board of Commissioners' needs and its committees. 13. Conducting and coordinating document management and archiving activities. 14. Conducting and coordinating data and document security within the scope of the Board of Commissioners' control or work, as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Administering meeting results within the Board of Commissioners, both with the Board of Directors and other parties. b. Administering Board of Commissioners meeting minutes, both internal and joint meetings with the Board of Directors. c. Coordinating the scheduling of Board of Commissioners activities to fulfill the required functions and necessities for carrying out those activities. d. Leading, directing, and coordinating the implementation of existing systems and procedures within the Board of Commissioners' work environment. e. Administering documents/materials/reports provided by the Directors to the Board of Commissioners. |
|---|---|

Hak dan Kewenangan

Berdasarkan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris, wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Dewan Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/laporan/dokumen yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Rights and Authorities

Based on the approval and assignment from the Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners is delegated the following rights and authorities:

1. Establishing letter and archive systems and procedures within the Board of Commissioners' environment.
2. Reviewing records, meeting minutes of the Board of Directors, Company documents, and reports for the provision of necessary information to the Board of Commissioners.
3. Requesting data/information/explanations needed by the Board of Commissioners from relevant parties within or outside the Company for the performance of the Board of Commissioners' duties.
4. Reminding and requesting explanations from relevant units/parties about delays in providing materials/reports/documents needed by the Board of Commissioners.

5. Memasuki pekarangan-pekarangan dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Perusahaan.
 6. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris.
 7. Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris di Perusahaan.
 8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Dewan Komisaris dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan.
 9. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, mengundang Direksi/pejabat-pejabat Perusahaan lainnya (dengan sepengetahuan Direksi), Komite-komite Dewan Komisaris/ pihak-pihak di luar Perusahaan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.
 10. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.
 11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Accessing the Company's premises and buildings.
 6. Representing the Board of Commissioners in dealing with external and/or internal parties according to the assigned tasks and policies set by the Board of Commissioners.
 7. Proposing work plans/programs for the Board of Commissioners regarding secretarial functions within the Company.
 8. Proposing meeting agendas for Board of Commissioners meetings with parties within or outside the Company.
 9. In accordance with the direction of the Board of Commissioners, invite the Board of Directors/other Company officials (with the knowledge of the Board of Directors), Board of Commissioners Committees/ parties outside the Company to attend meetings held by the Board of Commissioners.
 10. Attending meetings with parties inside or outside the Company in accordance with policies previously determined by the Board of Commissioners.
 11. Using the secretarial facilities of the Board of Commissioners to carry out its duties.

Realisasi Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas pengawasannya dengan baik dan efektif, di antaranya, mengadakan rapat-rapat guna meninjau perkembangan kinerja serta masalah-masalah aktual yang dihadapi PPI.

Sekretaris Dewan Komisaris juga membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi penasehatan, yakni dalam hal penyusunan surat-surat rekomendasi Dewan Komisaris baik yang ditujukan kepada Direksi maupun Menteri BUMN selaku Pemegang Saham. Surat-surat Dewan Komisaris senantiasa meminta pendapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Implementation of the Secretary of the Board of Commissioners' Work Program in 2023

Throughout 2023, the Secretary of the Board of Commissioners has effectively carried out supervisory tasks, including holding meetings to review PPI's performance progress and current issues faced.

The Secretary of the Board of Commissioners also assists the Board of Commissioners in its advisory function, particularly in drafting recommendation letters from the Board of Commissioners to both the Directors and the Ministry of SOEs as the Shareholder. These letters always seek input from the Audit Committee and the Risk Management Committee.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan khususnya terkait proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG serta pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perseroan.

Secara struktural, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan kedudukannya setara dengan komite-komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris. Namun dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI).

Dasar Hukum

Komite Audit PPI dibentuk dengan mengacu peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners tasked with assisting in the implementation of supervisory duties, particularly related to financial reporting processes, internal control systems, audit processes, GCG implementation, and monitoring compliance with applicable laws and regulations in the company.

Structurally, the Audit Committee is directly accountable to the Board of Commissioners and its position is equal to other committees under the Board of Commissioners. However, in carrying out its duties, the Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit (IAU).

Legal Basis

The PPI Audit Committee is established in accordance with the following regulations:

1. Law Number: 19 Year 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law Number: 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number: 45 Year 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Articles of Association of PPI;
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises/ Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP- 211/M-PBUMN/1999 concerning the Management Report of State-Owned Enterprises;
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK- 16/S.MBU/2012 concerning the Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Piagam Komite Audit

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, PPI belum memiliki Piagam Komite Audit. Namun demikian, seluruh anggota Komite Audit PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komite Audit dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI.

Periode menjabat anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Saat ini, Komite Audit PPI terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya adalah pihak independen atau

Audit Committee Charter

As of the publication of this Annual Report, PPI does not yet have an Audit Committee Charter. However, all members of the PPI Audit Committee continue to carry out their duties and responsibilities with full integrity and good faith.

Qualifications and/or Criteria of the Audit Committee

All members of the PPI Audit Committee have met the requirements or qualifications of individuals as members of the Audit Committee with the following general criteria:

1. Having high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and capable of communicating effectively.
2. Having the ability and experience in the field of supervision and/or accounting audit, finance, and understanding risk management.
3. Having knowledge of PPI's business processes.
4. Having sufficient time to carry out their duties.
5. Not being an insider of an External Auditor, Legal Consultant Office, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not being a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Composition and Term of Office

The term of office of Audit Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association of PPI.

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or the Chairman of the Audit Committee who concurrently hold positions as members of the Board of Commissioners, their term of office is the same as their tenure as members of the Board of Commissioners.

Currently, the PPI Audit Committee consists of 3 (three) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) others who are independent or external

eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan perseroan.

parties (non-Commissioners) with backgrounds, experience, and other qualifications required by the company.

Sepanjang 2023, komposisi keanggotaan Komite Audit PPI sebagai berikut:

Throughout 2023, the composition of PPI's Audit Committee are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Hamli	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020
Reinhard	Anggota Member	KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021
Helman Arif	Anggota Member	KEP-01/DK/PTPPI/II/2021

Hamli

Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Profil lengkap Bapak Hamli selaku Ketua Komite Audit PPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

The complete profile of Mr. Hamli as the Chairman of PPI's Audit Committee is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Reinhard

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Periode Jabatan Term of Office	2021-sekarang 2021-present
Data Pribadi Personal Data	Kewarganegaraan Citizenship : Indonesia Usia Age : 59
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2
Riwayat Jabatan Position Background	<ul style="list-style-type: none"> Asesor Kompetensi Ikatan Bankir Indonesia (April 2023-sekarang) Pengajar Program <i>Branch Manager</i> dan Sespibank Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2018-sekarang) Anggota Komite Audit PT PPI (2021-Sekarang) Competency Assessor of Indonesian Bankers Association (April 2023-present) Lecturer of Branch Manager Program and Sespibank of Indonesian Banking Development Institute (2018-present) Member of Audit Committee of PT PPI (2021-Present)

Helman Arif

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Periode Jabatan Term of Office	2021-sekarang 2021-present
Data Pribadi Personal Data	Kewarganegaraan Citizenship : Indonesia Usia Age : 45
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2
Riwayat Jabatan Position Background	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Universitas Indonesia • Anggota Komite Audit PT PPI (2021-sekarang) • Lecturer at University of Indonesia • Member of Audit Committee of PT PPI (2021-present)

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Hak dan Kewenangan

Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee is tasked with and in charge of:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external auditor and internal auditor's duties;
2. Assessing the implementation of activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Providing recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensuring that adequate evaluation procedures exist for all information issued by the Company; and
5. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Rights and Authorities

The Audit Committee has the authority to:

1. Access documents, data, and information of the Company regarding employees, funds, assets, and corporate resources as needed.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties responsible for internal audit functions, risk management, and Accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun auditor eksternal Perusahaan. 4. Mengadakan pemeriksaan khusus atas hasil audit internal maupun eksternal Perusahaan bilamana diperlukan. 5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan). 6. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik yang akan dipilih untuk melaksanakan fungsi audit eksternal. 7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Obtain necessary information from the Company's internal and external auditors. 4. Conduct special examinations of the Company's internal and external audit results when necessary. 5. Involve independent parties outside of the Audit Committee members to assist in carrying out its duties (if necessary). 6. Propose to the Board of Commissioners the Public Accounting Firm to be selected to perform external audit functions. 7. Exercise other authorities delegated by the Board of Commissioners based on a mandate letter from the Board of Commissioners. |
|---|---|

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perseroan, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independence of Audit Committee Members

All members of the PPI Audit Committee are independent parties who do not have financial, managerial, shareholding, and/or familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, Controlling Shareholders, or relationships with the company. They also do not hold concurrent positions either within or outside the company in accordance with the provisions of laws and regulations.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit Declaration of Independence of Audit Committee Members			
Aspek Independensi Aspect of Independency	Hamli	Reinhard	Helman Arif
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Pada tahun 2023, Komite Audit mengadakan 21 (dua puluh satu) rapat, yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi, dan Remunerasi.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds regular meetings at least once every month. In 2023, the Audit Committee held 21 (twenty one) meetings, attended by the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Hamli	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	8	8	100
Reinhard	Anggota Member	21	21	100
Helman Arif	Anggota Member	21	21	100

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2023 sebagai berikut:
The agenda of the Audit Committee Meeting in 2023 is as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
9 Januari 2023 January 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Pelepasan Aset Semarang; Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Semarang Asset Disposal Discussion; Others
11 April 2023 April 11, 2023	Pembahasan Permohonan Direksi persetujuan mengagunkan aset tetap Bank BRI Discussion on the Board of Directors' request for approval to pledge Bank BRI's fixed assets.
27 April 2023 April 27, 2023	<i>Exit Meeting</i> Audit Lap Keuangan PT PPI dan Anper Tahun Buku 2022 Exit Meeting Audit of PT PPI and Anper Financial Year 2022
20 Juli 2023 July 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Mei dan Juni 2023; Pendayagunaan Aset; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to May and June 2023; Asset Utilization; Other.
29 Agustus 2023 August 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juli Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to July 2023; Other.
25 September 2023 September 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to August 2023; Other.
23 Oktober 2023 October 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan September Tahun 2023; Rancangan RKAP 2024 <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to September Year 2023; Draft RKAP 2024
27 November 2023 November 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja s.d Bulan Oktober Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Performance up to October 2023; Other.
21 Desember 2023 December 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Kinerja PT PPI s.d November 2023; Pembahasan Penyampaian permohonan kembali Aset Medan <ol style="list-style-type: none"> Discussion of PT PPI's performance until November 2023; Discussion on the Submission of Medan Asset reapplication
27 Februari 2023 February 27, 2023	Kinerja PT PPI Bulan Januari 2023 PT PPI Performance in January 2023
30 Maret 2023 March 30, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja PT PPI Bulan Februari 2023 Perpanjangan KMK Bank Mandiri <ol style="list-style-type: none"> PT PPI Performance in February 2023 KMK Extension of Bank Mandiri
25 Mei 2023 May 25, 2023	Kinerja PT PPI April 2023 PT PPI Performance April 2023

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
20 Juni 2023 June 20, 2023	Pembahasan Threshold PT PPI PT PPI Threshold Discussion
4 Juli 2023 July 4, 2023	Kinerja PT PPI Mei 2023 PT PPI Performance May 2023
20 Juli 2023 July 20, 2023	Kinerja PT PPI Juni 2023 PT PPI Performance June 2023
21 Agustus 2023 August 21, 2023	Kinerja PT PPI Juli 2023 PT PPI Performance July 2023
19 September 2023 September 19, 2023	Kinerja PT PPI Agustus 2023 PT PPI Performance August 2023
18 Oktober 2023 October 18, 2023	Kinerja PT PPI September 2023 PT PPI Performance September 2023
21 November 2023 November 21, 2023	Kinerja PT PPI Oktober 2023 PT PPI Performance October 2023
5 Desember 2023 December 5, 2023	Pembahasan permohonan KMK di Bank BCA Discussion of KMK application at BCA Bank
20 Desember 2023 December 20, 2023	Kinerja PT PPI November 2023 PT PPI Performance November 2023

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, antara lain:

1. Kegiatan Rutin Komite Audit, meliputi:
 - a. Membahas dan memberi pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI yang tujuannya agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI, yaitu agar Komite Audit memahami pelaksanaan pekerjaan SPI yang akan dilakukan selama setahun ke depan.
 - b. Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.
 - c. Melakukan kegiatan pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP) yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Manajemen, SPI dan KAP.
 - d. Menelaah hasil capaian kinerja Perusahaan yang ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit dan kontribusi Komite Audit dalam

Audit Committee Task Implementation Report for the Year 2023

Throughout the year 2023, the Audit Committee has carried out its main tasks as stipulated in the Audit Committee Charter, including:

1. Routine Activities of the Audit Committee, which include:
 - a. Discussing and providing views on the Annual Work Plan of the Internal Audit Unit (SPI) to ensure that the SPI's Annual Work Plan is aligned with the oversight directives from the Board of Commissioners, and as part of the audit function performed by the Audit Committee regarding the tasks of the SPI, to ensure that the Audit Committee understands the implementation of SPI's work for the coming year.
 - b. Reviewing the Results of Internal Audit Examination Reports followed by a Coordination Meeting between the Audit Committee and the SPI.
 - c. Conducting oversight activities on the performance achievements of the external auditors (KAP) followed by a Coordination Meeting between the Audit Committee, Management, SPI, and KAP.
 - d. Reviewing the results of the company's performance achievements followed by an Internal Audit Committee Meeting and the

Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kegiatan Non-Rutin Komite Audit, meliputi: Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Audit dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

contribution of the Audit Committee in the Internal Board of Commissioners Meeting or Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors.

2. Non-Routine Activities of the Audit Committee, including: Conducting domestic business trips in the context of official duties performed by the Audit Committee from the place of work to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia.

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Audit Tahun 2023

Pada tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup kegiatan rutin berupa pembahasan dan pemberian pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI, yang bertujuan agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI tersebut selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit juga telah melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Hingga akhir tahun 2023 tidak ada Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Selama ini fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan manajemen risiko pada lingkup PPI.

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada setiap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko di perseroan.

Assessment and Evaluation of the Audit Committee's Performance for the Year 2023

In 2023, the Audit Committee has effectively carried out its tasks in accordance with applicable provisions, including routine activities such as discussing and providing views on the Annual Work Plan of the Internal Audit Unit (SPI), aimed at ensuring that the SPI's Annual Work Plan is aligned with the oversight directives from the Board of Commissioners, and as part of the audit function performed by the Audit Committee regarding the tasks of the SPI.

Throughout the year 2023, the Audit Committee has also reviewed the Results of Internal Audit Examination Reports, followed by the organization of a Coordination Meeting between the Audit Committee and the SPI.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Until the end of 2023, there was no Nomination and Remuneration Committee at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. So far, the functions of Nomination and Remuneration have been carried out by the Board of Commissioners.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee is one of the committees formed by and directly accountable to the Board of Commissioners, and plays a role in supporting the implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners related to the effectiveness of implementing risk management principles and policies within PPI's scope.

The Risk Management Committee is authorized to fully, freely, and without limitation access any company policies related to risk management in the company.

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Manajemen Risiko antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, PPI belum memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko. Namun demikian, seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseroangan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi,

Legal Basis

The legal basis for the establishment of the Risk Management Committee includes:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Articles of Association of PPI;
5. Minister of State-Owned Enterprises/Head of the State-Owned Enterprises Supervisory Board Decree No. KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning the Company Management Report of State-Owned Enterprises;
6. Minister of State-Owned Enterprises Decree No. KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
8. Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises; and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Charter of the Risk Management Committee

As of the issuance of this Annual Report, PPI does not yet have a Charter for the Risk Management Committee. However, all members of the PPI Risk Management Committee continue to carry out their duties and responsibilities with full integrity and good faith.

Qualifications and/or Criteria for the Risk Management Committee

All members of the PPI Risk Management Committee have met the requirements or qualifications as individual members of the Risk Management Committee with the following general criteria:

1. Having high integrity and dedication, adequate

- pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
 - Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
 - Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
 - Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

- knowledge and experience according to their educational background, and good communication skills.
- Having the ability and experience in the field of supervision and/or accounting audit, finance, and understanding risk management.
 - Having knowledge of PPI's business processes.
 - Having sufficient time to perform their duties.
 - Not being an insider of External Auditors, Legal Consultant Offices, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
 - Not being a person with authority and responsibility to plan, lead, or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Periode menjabat Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Adapun masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/ atau Ketua Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang lainnya merupakan pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan PPI.

Composition and Term of Office

The term of office for the Risk Management Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association of PPI. The term of office for members of the Risk Management Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or the Chairman of the Risk Management Committee who concurrently serve as members of the Board of Commissioners, their term of office is the same as their term of office as members of the Board of Commissioners.

The Risk Management Committee shall consist of at least 3 (three) members, of which 1 (one) member is a Commissioner and 2 (two) others are independent or external (non-Commissioner) parties who have the expertise, experience, and other qualifications required by PPI.

Sepanjang tahun 2023, Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko PPI adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, the Composition of PPI Risk Management Committee Members is as follows :

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Setiawan Wangsaatmaja	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of of Risk Management Committee	KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021
Hertanta	Anggota Member	KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021

Sepanjang tahun 2023, Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko PPI adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, the Composition of PPI Risk Management Committee Members is as follows :

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Dilza Vierson*	Anggota Member	KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021
Eko Setiawan**	Anggota Member	KEP-01/DK/PTPPI/V/2023
*Dilza Vierson hingga 2 Mei 2023 ** Eko Setiawan mulai	*Dilza Vierson until May 2, 2023 ** Eko Setiawan from	

**Profil Keanggotaan
Komite Manajemen Risiko****Profile of Risk Management Committee**

Setiawan Wangsaatmaja

Ketua Komite Manajemen Risiko
Chairman of Risk Management Committee

Profil lengkap Bapak Setiawan Wangsaatmaja selaku Ketua Komite Manajemen Risiko PPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

The complete profile of Mr. Setiawan Wangsaatmaja as the Chairman of PPI's Risk Management Committee is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Hertanta

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Periode Jabatan Term of Office	2021-sekarang 2021-present
Data Pribadi Personal Data	Kewarganegaraan Citizenship : Indonesia Usia Age : 59
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2
Riwayat Jabatan Position Background	<ul style="list-style-type: none"> 2015-2021 Senior Management di BTN: <ol style="list-style-type: none"> Kadiv <i>Enterprise Risk Management</i> Kadiv <i>Commercial Credit Risk</i> Kadiv <i>Human Capital Strategy</i> Kepala SPI 2021 - sekarang : Anggota Komite Pemantau Risiko PT PPI 2015-2021 Senior Management at BTN: <ol style="list-style-type: none"> Head of Enterprise Risk Management Head of Commercial Credit Risk Head of Human Capital Strategy Head of Internal Audit 2021 - present: Member of Risk Monitoring Committee of PT PPI

Eko Setiawan

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Periode Jabatan Term of Office	2021-sekarang 2021-present		
Data Pribadi Personal Data	Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	
	Usia Age	: 52	
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2		
Riwayat Jabatan Position Background	<ul style="list-style-type: none"> • Dir Komersial PT ASABRI (Persero) (Jan 2020-Maret 2021) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Garam (2021-2023) • Anggota Komite Pemantu Risiko PT PPI (2023-sekarang) <ul style="list-style-type: none"> • Commercial Director of PT ASABRI (Persero) (Jan 2020-March 2021) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Garam (2021-2023) • Member of Risk Assistance Committee of PT PPI (2023-present) 		

Independensi Komite Manajemen Risiko

Masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko diharuskan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Untuk itu, masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko telah menyatakan sikap independensinya dalam pakta integritas yang sudah disepakati bersama.

Independence of Risk Management Committee

Each member of the Risk Management Committee is required to maintain professionalism and independence while carrying out their duties and responsibilities as stipulated in the Risk Management Committee Charter. To that end, each member of the Risk Management Committee has stated their independence in the integrity pact that has been mutually agreed upon.

Pernyataan Independensi Anggota Manajemen Risiko Declaration of Independence of Risk Management Committee Members			
Aspek Independensi Aspect of Independency	Setiawan Wangsaatmaja	Dilza Vierson	Hertanta
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan, menilai dan meningkatkan struktur, mekanisme, proses dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara berkelanjutan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas tata kelola manajemen risiko (*risk management governance*), termasuk risiko hukum (*legal risk*) perusahaan;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas penerapan proses manajemen risiko oleh perusahaan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan menilai kemampuan manajemen risiko perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menemukan hubungan antara risiko yang telah ditetapkan perusahaan;
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan tata kelola manajemen risiko, termasuk risiko hukum dan proses manajemen risiko perusahaan;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai risiko-risiko utama, termasuk risiko hukum yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
8. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor unsur ketidakpastian dari risiko berupa adanya berbagai perubahan lingkungan di luar perusahaan yang berdampak kepada perusahaan;
9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko atas usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan dan kegiatan lain perusahaan sebagai bahan analisis dan evaluasi Dewan Komisaris dalam rangka memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan Direksi tersebut;
10. Membuat laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi penugasan;

Selain melaksanakan tugas-tugas di atas, Komite Manajemen Risiko juga menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Responsibilities and Duties

The Risk Management Committee is tasked with the following responsibilities:

1. Assisting the Board of Commissioners in developing, assessing, and improving the structure, mechanisms, processes, and practices of sustainable good corporate governance (GCG).
2. Assisting the Board of Commissioners in assessing risk management governance, including the legal risks of the company.
3. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the implementation of risk management processes by the company.
4. Assisting the Board of Commissioners in assessing the company's risk management capabilities.
5. Assisting the Board of Commissioners in identifying the relationship between the company's established risks.
6. Providing input to the Board of Commissioners for the improvement and development of risk management governance, including legal risks and the company's risk management processes.
7. Assisting the Board of Commissioners in assessing key risks, including the legal risks faced by the company, and ensuring that the Board has taken necessary steps to identify, measure, monitor, and control these risks.
8. Assisting the Board of Commissioners in monitoring the uncertainty elements of risks arising from various external environmental changes impacting the company.
9. Assisting the Board of Commissioners in identifying risks related to proposals from the Board of Directors regarding investment cooperation, capital participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, divestment of company assets, and other company activities for analysis and evaluation by the Board of Commissioners to provide recommendations and approval for such proposals from the Board of Directors.
10. Providing reports, both written and oral, to the Board of Commissioners on matters related to the assignment.

In addition to performing the above tasks, the Risk Management Committee also carries out specific assignments given by the Board of Commissioners.

Hak dan Kewenangan

Komite Manajemen Risiko memiliki hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Manajemen Risiko dapat bekerja sama dengan mitra kerja yaitu Komite Dewan Komisaris lainnya, tim terkait di tingkat Manajemen khususnya fungsi yang menangani Manajemen Risiko, dan Unit-Unit Perusahaan yang terkait dengan mengikuti prosedur kerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komite Manajemen Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris serta atas biaya Perusahaan (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Rapat yang telah dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko di tahun 2023 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pertemuan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Setiawan Wangsaatmaja	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of Risk Management Committee	8	8	100
Hertanta	Anggota Member	33	33	100
Dilza Vierson*	Anggota Member	8	8	100
Eko Setiawan**	Anggota Member	25	25	100

*Dilza Vierson hingga 2 Mei 2023
** Eko Setiawan mulai dari 2 Mei 2023

Rights and Authorities

The Risk Management Committee has rights and authorities, including:

1. Based on a written assignment from the Board of Commissioners, the Risk Management Committee may access records or information about employees, funds, assets, and other resources owned by the Company related to the performance of its duties.
2. In carrying out its authority, the Risk Management Committee may collaborate with other Board Committees, relevant teams at the Management level, especially functions handling Risk Management, and Company Units related to following working procedures and in accordance with applicable regulations.
3. The Risk Management Committee may engage experts and/or consultants/independent parties to assist in the performance of its duties with the written approval of the Board of Commissioners and at the Company's expense (if necessary).
4. Carrying out other authorities granted by the Board of Commissioners based on a letter of assignment from the Board of Commissioners.

Risk Management Committee Meeting

The Risk Management Committee holds meetings regularly, at least once a month.

The meetings conducted by the Risk Management Committee in 2023 amounted to 33 (thirty three) sessions and are as follows:

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The agenda of the Risk Management Committee Meeting is as follows:

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The agenda of the Nomination and Remuneration Committee Meeting is as follows

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
10 Januari 2023 January 10, 2023	Rapat Komite dengan Divisi Manajemen Aset, Pembahasan <i>Draft</i> Perdir Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT PPI Committee Meeting with Asset Management Division, Discussion of Draft Perdir for Cooperation in Utilization of Fixed Assets of PT PPI
18 Januari 2023 January 18, 2023	Rapat Komite Pembahasan <i>Business Review</i> Business Review Committee Meeting
27 Februari 2023 February 27, 2023	Kinerja Bulan Januari 2023 January 2023 Performance
28 Maret 2023 March 28, 2023	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Februari 2023 Risk Mitigation Progress Committee discussion as of February 2023
22 Mei 2023 May 22, 2023	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Maret 2023 Committee discussion on Risk Mitigation Progress as of March 2023
16 Juni 2023 June 16, 2023	Rapat Pembahasan Penguatan Modal Dasar Anak Perusahaan melalui Skema <i>Debt to Equity Swap</i> Discussion Meeting on Strengthening the Authorized Capital of Subsidiaries through Debt To Equity Swap Scheme
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Juli 2023 Committee discussion on Risk Mitigation Progress as of July 2023
20 September 2023 September 20, 2023	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Agustus 2023 dan Diskusi Permasalahan Aset dengan Anggota Komite PT PPI Discussion of Risk Mitigation Progress Committee as of August 2023 and Discussion of Asset Issues with PT PPI Committee Members
06 Oktober 2023 October 06, 2023	Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2024 Meeting to Discuss RKAP Year 2024
18 Oktober 2023 October 18, 2023	Rapat Bulanan Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko dan Piutang Monthly Meeting of Risk Monitoring Committee and Risk and Receivables Management Division
21 November 2023 November 21, 2023	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Oktober 2023 Committee discussion on Risk Mitigation Progress as of October 2023
05 Desember 2023 December 05, 2023	Pembahasan Permohonan Persetujuan Mengagunkan Aset Tetap PT PPI untuk Kredit Modal Kerja Jangka Pendek <i>Jointly and Severally Liable Borrowers</i> di PT BCA Discussion of Request for Approval to Collect Fixed Assets of PT PPI for Short-Term Working Capital Loans Jointly and Severally Liable Borrowers at PT BCA
20 Desember 2023 December 20, 2023	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per November 2023 Risk Mitigation Progress Committee Discussion as of November 2023
9 Januari 2023 January 9, 2023	1. Pembahasan Pelepasan Aset Semarang; 2. Lain-lain 1. Semarang Asset Disposal Discussion; 2. Others
11 April 2023 April 11, 2023	Pembahasan Permohonan Direksi persetujuan mengagunkan aset tetap Bank BRI Discussion on the Board of Directors' request for approval to pledge Bank BRI's fixed assets.

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
20 Juli 2023 July 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s.d Mei dan Juni 2023; 2. Pendayagunaan Aset; 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Performance up to May and June 2023; 2. Asset Utilization; 3. Other.
29 Agustus 2023 August 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Juli Tahun 2023; 2. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Performance up to July 2023; 2. Other.
25 September 2023 September 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus Tahun 2023; 2. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Performance up to August 2023; 2. Other.
23 Oktober 2023 October 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan September Tahun 2023; 2. Rancangan RKAP 2024 <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Performance up to September Year 2023; 2. Draft RKAP 2024
27 November 2023 November 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Oktober Tahun 2023; 2. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Performance up to October 2023; 2. Other.
21 Desember 2023 December 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja PT PPI s.d November 2023; 2. Pembahasan Penyampaian permohonan kembali Aset Medan <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of PT PPI's performance until November 2023; 2. Discussion on the Submission of Medan Asset reapplication
27 Februari 2023 February 27, 2023	Kinerja PT PPI Bulan Januari 2023 PT PPI Performance in January 2023
30 Maret 2023 March 30, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja PT PPI Bulan Februari 2023 2. Perpanjangan KMK Bank Mandiri <ol style="list-style-type: none"> 1. PT PPI Performance in February 2023 2. KMK Extension of Bank Mandiri
25 Mei 2023 May 25, 2023	Kinerja PT PPI April 2023 PT PPI Performance April 2023
20 Juni 2023 June 20, 2023	Pembahasan Threshold PT PPI PT PPI Threshold Discussion
4 Juli 2023 July 4, 2023	Kinerja PT PPI Mei 2023 PT PPI Performance May 2023
20 Juli 2023 July 20, 2023	Kinerja PT PPI Juni 2023 PT PPI Performance June 2023
21 Agustus 2023 August 21, 2023	Kinerja PT PPI Juli 2023 PT PPI Performance July 2023
19 September 2023 September 19, 2023	Kinerja PT PPI Agustus 2023 PT PPI Performance August 2023
18 Oktober 2023 October 18, 2023	Kinerja PT PPI September 2023 PT PPI Performance September 2023
21 November 2023 November 21, 2023	Kinerja PT PPI Oktober 2023 PT PPI Performance October 2023
5 Desember 2023 December 5, 2023	Pembahasan permohonan KMK di Bank BCA Discussion of KMK application at BCA Bank
20 Desember 2023 December 20, 2023	Kinerja PT PPI November 2023 PT PPI Performance November 2023

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2023

Kegiatan Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap: bidang pengawasan Dewan Komisaris yaitu: implementasi *Blue Print*/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
2. Melaksanakan kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa rapat internal Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan Monitoring Kegiatan Perusahaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG berupa pemberian masukan, nasehat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi; dan
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja Perusahaan yang menekankan pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2022.

Kegiatan Non-Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Meninjau Ketentuan Internal PPI seperti *Standard Procedure Operational* (SOP), Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dan lainnya;
2. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko melalui Diklat, *Workshop* atau Seminar terkait Implementasi GCG; dan
3. Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Manajemen Risiko dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Report on the Implementation of the Risk Management Committee's Duties in 2023

Routine Activities of the Risk Management Committee include:

1. Assisting the Board of Commissioners in supervising: the implementation of the Blue Print/Long-Term Plan (RJPP), implementation of the Annual Work Plan and Budget (RKAP), internal control system of the company, company risk management, company information technology system, human resources policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), legislation and agreements with third parties;
2. Conducting coordination activities of the Risk Management Committee for the Implementation of its Tasks and Functions in the form of internal meetings of the Risk Management Committee and the Board of Commissioners;
3. Monitoring Company Activities to align with the principles of Good Corporate Governance (GCG) by providing input, advice, recommendations, or suggestions upon request for approval from the Board of Directors; and
4. Conducting performance evaluations of the Company emphasizing the implementation of the Annual Work Plan and Budget or RKAP for 2022.

Non-Routine Activities of the Risk Management Committee include:

1. Reviewing Internal Regulations of PPI such as Standard Operational Procedures (SOPs), Implementation Guidelines, and others;
2. Conducting Capacity Building Activities for the Risk Management Committee through Training, Workshops, or Seminars related to GCG Implementation; and
3. Undertaking domestic business trips as part of official duties performed by the Risk Management Committee from their workplace to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia.

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi *Blue Print/RJPP*, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan PPI agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Assessment and Evaluation of the Risk Management Committee's Performance in 2023

Throughout 2023, the Risk Management Committee has assisted in the effective implementation of the Board of Commissioners' oversight functions regarding the implementation of the Blue Print/RJPP, implementation of the RKAP, internal control system of the company, company risk management, company information technology system, human resources policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), legislation and agreements with third parties, as well as monitoring all PPI activities to consistently align with the principles of GCG.

Organ Pendukung di Bawah Direksi Supporting Organs Under the Board of Directors

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang mengatur operasi dan proses tata kelola perusahaan. Sekretaris Perusahaan biasanya berperan sebagai penasihat utama bagi Direksi dan Manajemen Senior dalam hal tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan urusan regulasi.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi vital sebagai penghubung (*liaison*) antara Perseroan dengan pihak eksternal. Dalam kaitannya dengan tugas ini, Sekretaris Perusahaan wajib menjaga persepsi publik atas citra perusahaan, menjamin pemenuhan tanggung jawab perusahaan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Kedudukan Sekretaris Perusahaan setingkat dengan Kepala Divisi.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is a senior executive who is responsible for ensuring that the Company complies with all legal and regulatory requirements governing its operations and governance processes. Corporate Secretary typically serve as a key advisor to the Board of Directors and Senior Management on matters of corporate governance, compliance, and regulatory affairs.

In addition, the Corporate Secretary also has a vital function as a liaison between the Company and external parties. In relation to this task, the Corporate Secretary shall maintain public perception of the Company's image, ensure the fulfillment of corporate responsibilities and ensure the Company's compliance with laws and regulations relevant to the Company's line of business.

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors based on the approval of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director.

The position of Corporate Secretary is at the same level as the Head of Division.

Dasar Hukum

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Sesuai struktur organisasi, Sekretariat Perusahaan (*Corporate Secretary*) berada di bawah koordinasi Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Berdasarkan struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan membawahi:

1. Humas, Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan;
2. Sekretariat Direksi dan *BOD Support*.

Legal Basis

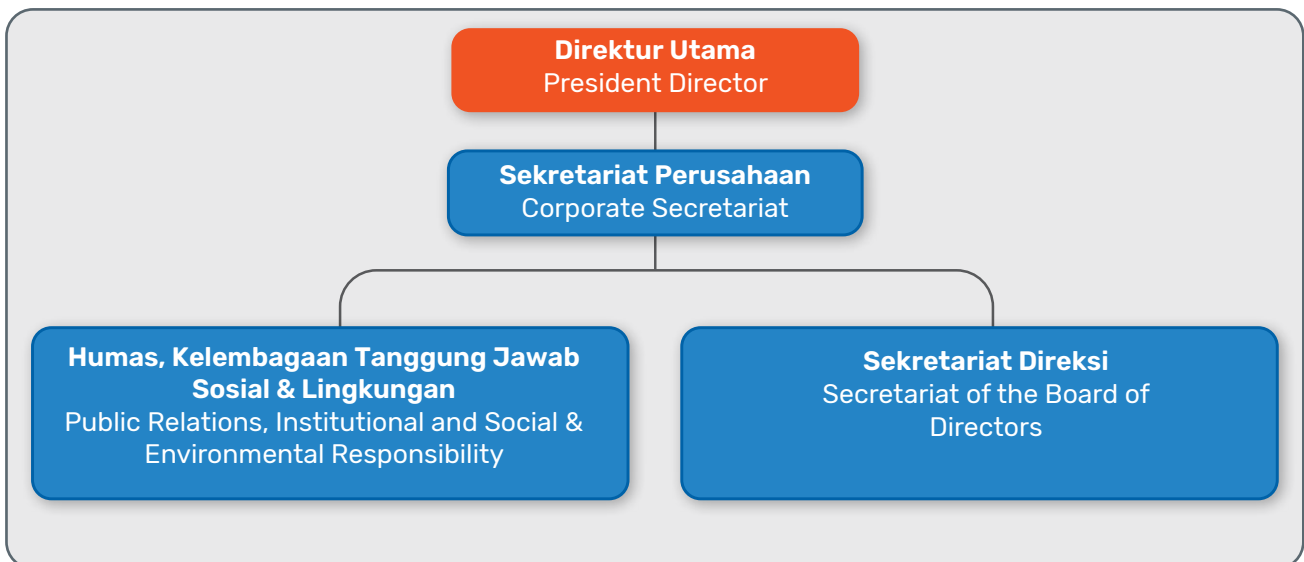
The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012.

Organizational Structure of the Corporate Secretariat

In accordance with the organizational structure, the Corporate Secretary is under the coordination of the President Director and directly responsible to the President Director. The appointment of the Corporate Secretary is made by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Based on the organizational structure, the Corporate Secretary oversees:

1. Public Relations, Institutional and Social & Environmental Responsibility;
2. Secretariat of the Board of Directors and BOD Support.



Humas, Kelembagaan & TJSL

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Perusahaan.

Bagian Humas, Kelembagaan & TJSL mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Diseminasi informasi internal dan eksternal perusahaan,
2. Meningkatkan citra positif dan penghubung komunitas antar lembaga
3. *Liaison Officer*
4. Memberikan kemanfaatan bagi Pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola bagi Perusahaan
5. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah
6. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih Tangguh dan mandiri

Sekretariat Direksi

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Perusahaan.

Bagian Sekretariat Direksi mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya :

1. Mengatur ketertiban Administrasi Perusahaan.
2. Pemutakhiran dokumen Perusahaan dan administrasi perizinan berusaha melalui *system Online Single Submission*.
3. Memastikan terlaksananya agenda rapat rutin Perusahaan.

Public Relations, Institutions and CSR

This department is led by a Manager who reports directly to the Head of the Corporate Secretary.

The Department of Public Relations, Institutions, and CSR carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Dissemination of internal and external company information,
2. Enhance positive image and community liaison between institutions
3. Liaison Officer
4. Provide benefits for economic, social, environmental, as well as legal and governance development for the Company
5. Contribute to the creation of added value
6. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent

Board of Directors Secretariat

This section is led by a Manager who reports directly to the Head of Corporate Secretariat.

The Board of Directors Secretariat carries out a number of tasks and responsibilities, including:

1. Managing the Company's administrative order.
2. Updating company documents and business licensing administration through the Online Single Submission system.
3. Ensuring the implementation of the company's regular meeting agendas.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Per 31 Desember 2023, Ibu Noverita Anggraeny tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia karena telah diangkat sebagai Direktur Operasi. Hingga akhir tahun 2023, belum ada pejabat definitif maupun pejabat pengganti yang ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.

As of December 31, 2023, Ms. Noverita Anggraeny no longer serves as the Corporate Secretary of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia because she has been appointed as the Director of Operations. Until the end of 2023, there has been no definitive officer or acting officer appointed to fill the position.

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekretariat Perusahaan

Kepala Sekretariat Perusahaan mengemban tugas pokok yang berkaitan dengan jalannya kesekretariatan perusahaan dan administrasi serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, promosi dan kemitraan perusahaan.

Secara umum, Sekretaris Perusahaan bertugas untuk:

1. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan divisinya.
2. Membuat rencana program TJSL.
3. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus.
4. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham.
5. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
6. Memastikan Perseroan mematuhi ketentuan tentang keterbukaan dan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).
7. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
8. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta peng-administrasiannya.

Duties and Responsibilities of the Head of Corporate Secretariat

The Head of Corporate Secretariat is tasked with responsibilities related to the Company's secretarial and administrative functions, as well as other activities associated with community engagement, corporate promotion, and partnerships.

In general, the Corporate Secretary is responsible for:

1. Creating the division's annual work plan and budget.
2. Developing the Corporate Social Responsibility (CSR) program plan.
3. Periodically creating and updating the Special List.
4. Periodically creating and updating the Shareholder List.
5. Overseeing the organization of General Meetings of Shareholders (RUPS).
6. Ensuring the Company complies with regulations regarding disclosure and information transparency in the Annual Report.
7. Conducting meetings within the Directorate environment, both routine and ad hoc.
8. Organizing secretarial activities within the Directorate and the Company, including their administration.

9. Mengkoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan komersil dan non-komersil.
10. Menyelenggarakan database dan penyimpanan dokumen perusahaan.
11. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak *stakeholder*.
12. Mengkoordinasikan proses penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen, dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
13. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan/atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.
14. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi.
15. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi termasuk menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi.
16. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan.
17. Melakukan *update website* Perusahaan.
18. Membina hubungan baik dengan media massa.
19. Melaksanakan kegiatan *sponsorship* Perusahaan.

Hak dan Kewenangan

Sekretaris Perusahaan memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh *person in charge*.
4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
5. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari *person in charge* Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi.
6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
7. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang

Rights and Authorities

The Corporate Secretary has the rights and authority to:

1. Establish systems and procedures for correspondence and archiving within the Directorate and the Company.
2. Access records, meeting minutes, company documents, and reports to provide necessary information to the Directorate.
3. Request progress reports on the implementation of decisions made by the Directorate.
4. Request data/information/explanations needed by the Directorate from relevant parties within and outside the Company for the purpose of carrying out Directorate duties.
5. Prompt and request explanations from responsible parties within the Company experiencing delays in the implementation process of Directorate decisions.
6. Remind and request explanations from departments/related parties for delays in providing materials/information/data required by the Directorate.
7. Represent the Directorate in dealings with parties outside the Company and/or within the Company as assigned and according to established policies.

- diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
 9. Menghadiri rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 10. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Pelaksanaan Tugas Kepala Sekretariat Perusahaan 2023

Sepanjang tahun 2023, kepala Sekretariat Perusahaan telah menjalankan tugas-tugas pokok dan merealisasikan sejumlah program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara lain:

1. Melakukan pengkoordinasian penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulanan;
2. Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan kepada Pemegang Saham yang senantiasa dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan pemutakhiran informasi yang disajikan dalam *website* perseroan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bagian Humas yang berada di bawah koordinasi Kepala Sekretariat Perusahaan;
4. Menyiapkan bahan-bahan untuk proses *release* dan penyampaian laporan-laporan kepada *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan informasi kepada *stakeholder* sesuai peruntukannya dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu dan muatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta kegiatan lainnya; Melakukan koordinasi dan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan RUPS/ LB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
7. Membuat, memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen perseroan seperti Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah-risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

8. Propose meeting agendas with parties within/ outside the Company.
9. Attend meetings with parties within/outside the Company according to previously established policies.
10. Utilize secretarial facilities to perform duties.

Implementation of the Corporate Secretariat Head's Duties in 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretariat Head carried out core duties and implemented several work programs established at the beginning of the year, including:

1. Coordinating the preparation of Annual and Quarterly Reports.
2. Delivering Quarterly and Annual Management Reports to Shareholders in a timely manner as stipulated.
3. Updating information presented on the company's website, managed by the Public Relations Department under the coordination of the Corporate Secretariat Head.
4. Preparing materials for release and distributing reports to stakeholders according to applicable regulations.
5. Providing information to stakeholders as appropriate, ensuring timeliness and relevance according to regulations.
6. Coordinating the conduct of Board Meetings, Board of Directors and Commissioners Meetings, and other activities; coordinating and planning the stages of General Meetings of Shareholders/ Board Meetings as scheduled; and
7. Creating, maintaining, and storing company documents such as Shareholder Lists, Special Lists, General Meeting of Shareholders Minutes, and Board Meeting Minutes.

Training and Competency Development Programs for the Corporate Secretary

A comprehensive list of training and competency development programs attended by the Corporate Secretary in 2023 can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Internal Audit Unit (IAU)

PPI memiliki organ Satuan Pengawas Intern (SPI) yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja secara independen terhadap unit-unit kerja lainnya. SPI menjalankan fungsi pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, sistem manajemen dan tata kelola Perusahaan.

PPI has an Internal Audit Unit (SPI) which structurally reports directly to the Chief Executive Officer and operates independently from other units. SPI performs assurance and consulting functions independently and objectively to management in order to enhance the quality of risk management processes, internal controls, management systems, and corporate governance.

DASAR HUKUM

Keberadaan, pembentukan, dan komposisi SPI di Perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi lainnya berikut ini:

1. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan-Perseroan (Persero);
3. Keputusan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 590/DU/SKD/PPI/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang *Internal Audit Charter*.

LEGAL BASIS

The establishment, formation, and composition of SPI in the Company refer to the following laws and regulations:

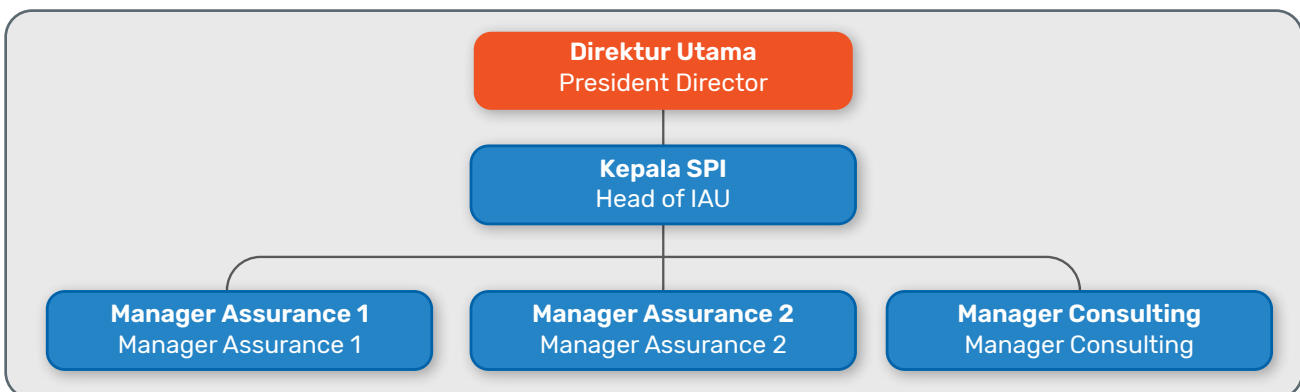
1. Chapter VI of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero);
3. Minister of State-Owned Enterprises Decree No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices in State-Owned Enterprises (BUMN); and
4. Board of Directors Decree Number: 590/DU/SKD/PPI/X/2016 dated October 25, 2016 concerning the Internal Audit Charter.

KEDUDUKAN SPI DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Secara struktur organisasi, SPI merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama sehingga Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Namun pada praktiknya, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*.

POSITION OF SPI IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In terms of organizational structure, SPI is a functional unit that operates under the direct supervision of the Chief Executive Officer, with the Head of SPI reporting directly to the Chief Executive Officer. However, in practice, SPI also coordinates with the Audit Committee in carrying out its duties as outlined in the Board Manual.



ALUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SPI

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

FLOW OF APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE HEAD OF IAU

The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

PROFIL KEPALA SPI

HEAD OF IAU PROFILE



Cahyadi
Kepala SPI
Head of IAU

Periode Jabatan Term of Office	Juli 2021 - Sekarang July 2021 - Present
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Citizenship : Indonesian Usia Age : 40 years old Domisili Domicile : DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi Nomor: 11/DU/SKD/PPI/VII/2021 Decree of the Board of Directors Number: 11/DU/SKD/PPI/VII/2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Akutansi • Bachelor of Accounting
Riwayat Karier Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tim Audit pada Direktorat Pengawasan Internal KPK (2008 - 2020) • Satuan Tugas Audit pada Direktorat Pengawasan Internal KPK (2020 - 2021) • Kepala SPI PPI (2021 - sekarang) • Head of the Audit Team at the KPK Internal Supervision Directorate (2008 - 2020) • Audit Task Force at the Directorate of Internal Supervision of the KPK (2020 - 2021) • Head of SPI PPI (2021 - present)

KEANGGOTAAN PERSONIL SPI

Kecukupan jumlah auditor internal atau personil SPI yang profesional dan memiliki kompetensi andal sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas SPI. Penentuan jumlah dan komposisi auditor perseroan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan ideal organisasi SPI dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga auditor.

Per 31 Desember 2023, jumlah auditor internal perseroan tercatat sebanyak 10 orang termasuk Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap 32 kantor cabang, 4 Direktorat, dan 2 Anak Perusahaan.

SERTIFIKASI PERSONIL SPI

SPI menyusun rencana kerja pengembangan profesi secara berkelanjutan baik dalam rangka mendapatkan sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang audit internal ataupun sebagai wujud implementasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas bagi auditor yang merupakan bagian dari kegiatan rutin SPI sebagaimana tertuang di dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Pada akhir 2023, SPI memiliki sejumlah sertifikasi yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal perseroan, antara lain:

MEMBERSHIP OF SPI PERSONNEL

Sufficient numbers of internal auditors or SPI personnel who are professional and have reliable competence are highly needed to assist in the implementation of SPI functions and tasks. Determining the number and composition of company auditors always considers the ideal needs of the SPI organization, taking into account the auditor workforce requirements.

As of December 31, 2023, the number of company internal auditors recorded 10 individuals, including the Head of Internal Audit Unit, responsible for conducting audits on 32 branch offices, 4 Directorates, and 2 Subsidiaries.

CERTIFICATION OF SPI PERSONNEL

SPI develops a continuous professional development work plan both to obtain relevant professional certifications in the field of internal auditing and as an implementation of capacity development programs for auditors, which is part of SPI's routine activities as outlined in the Annual Audit Work Program (PKPT).

At the end of 2023, SPI holds several relevant certifications to support the implementation of its duties and responsibilities as the company's internal auditors, including:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certificate
Cahyadi	Kepala Divisi SPI Head of IAU	CFE, CRP, PIA, CRMO
David Nicholson	<i>Manager Assurance 1</i>	CRP, CA
Daeng Achmad A.	<i>Manager Consulting</i>	CRP, Auditor Muda BPKP, CRMO CRP, Junior Auditor BPKP, CRMO
Dedy Baruno N.	<i>Manager Assurance 2</i>	-
Dedy Alamsyah	<i>Fungsional Madya</i>	CRP
Dian Auliawati P.	<i>Asman Assurance 1</i>	JFA
R. Aditya Indra P.	<i>Asman Assurance 2</i>	QIA tahap dasar, MDP Audit Basic QIA, MDP Audit
Delfi Yandri	<i>Asman Consulting</i>	ASEAN CPA, CA, ACPA
Pungky Suharjo	<i>Officer Assurance 1</i>	-
Bani Gusti Pradini	<i>Officer Assurance 2</i>	-

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Lingkup tugas dan tanggung jawab SPI, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi Perusahaan dalam pencapaian strategi bisnis;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan;
3. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan *review* dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perusahaan;
4. Melakukan penugasan khusus lainnya sesuai penugasan dari Direktur Utama;
5. Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama;
7. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah di rekomendasikan; dan
8. Menyusun dan menyempurnakan standar dan panduan SPI Perusahaan.

HAK DAN KEWENANGAN

Seluruh personel SPI berwenang untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit internal secara independen;
2. Memperoleh informasi-informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan di lingkungan Perusahaan dan anak Perusahaan/Divisi/ Unit Kerja serta memiliki akses tanpa batas ke semua fungsi, catatan, harta milik dan pegawai Perusahaan selama relevan dengan lingkup pemeriksaan;
3. Memperoleh informasi-informasi dari nara sumber profesional/pihak ahli berkaitan dengan proses audit Perusahaan dan Anak Perusahaan;
4. Melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik Perusahaan dan Anak Perusahaan;
5. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama;
6. Melakukan audit sesuai dengan Program Kerja

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The scope of duties and responsibilities of Internal Audit (SPI) includes the following:

1. Developing audit strategies and work plans based on the analysis of risks faced by the Company in achieving business strategies.
2. Conducting examinations and assessments of efficiency and effectiveness in financial, operational, human resources, marketing, information technology, and other areas in achieving the established missions, objectives, and strategies.
3. Performing and contributing to the enhancement of effective controls by reviewing and evaluating internal controls in all units of activity within the Company.
4. Carrying out other specific assignments as assigned by the CEO.
5. Providing improvement advice and objective information on audited activities at all management levels to enhance systems, procedures, budgets, and policies.
6. Generating audit result reports and presenting them to the CEO.
7. Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation of recommended corrective actions.
8. Developing and refining the Company's Internal Audit Standards and Guidelines.

RIGHTS AND AUTHORITIES

All SPI personnel are authorized to perform the following:

1. Determine the strategy, scope, methods, and frequency of internal audits independently.
2. Obtain information from all work units and employees within the Company and its Subsidiaries/ Divisions/Work Units and have unrestricted access to all functions, records, assets, and employees of the Company as long as relevant to the scope of the audit.
3. Obtain information from professional sources/ experts related to the Company's audit process and Subsidiaries.
4. Conduct physical inspections of all Company and Subsidiary assets.
5. Deliver audit result reports to the CEO.
6. Perform audits according to the Annual Audit Work

- Pemeriksaan Tahunan (PKPT); dan
7. Melakukan penugasan audit khusus sesuai penugasan Direktur Utama.

INDEPENDENSI SPI

Seluruh personil SPI bekerja secara profesional, independen, dan objektif, serta berperan sebagai mitra manajemen yang mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan membantu Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan tugasnya, auditor internal menyatakan kesungguhannya untuk bekerja sesuai standar baku yang berlaku dan mematuhi kode etik profesional yang telah ditetapkan.

KODE ETIK

Seluruh personil SPI wajib bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan pokok-pokok Kode Etik profesi auditor internal sebagaimana telah ditetapkan Perseroan, antara lain:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi Perusahaan dan Internal Audit Perusahaan.
3. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan SPI senantiasa harus mempertahankan sikap independen.
4. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi SPI atau Perusahaan.
5. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas/ kewajiban secara objektif.
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional SPI.
7. Mematuhi sepenuhnya standar profesional SPI, *code of conduct* Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
8. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Perusahaan.
9. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apa pun yang dapat

Program (PKPT).

7. Conduct special audit assignments as directed by the CEO.

INDEPENDENCE OF SPI

All SPI personnel work professionally, independently, and objectively, acting as management partners capable of adding value to the Company and assisting the Board of Directors in implementing principles of GCG. In performing their duties, internal auditors declare their commitment to working according to applicable standard practices and adhering to established professional ethics.

CODE OF ETHICS

All SPI personnel must act and behave in accordance with the core principles of the internal auditor's professional code of ethics as determined by the Company, including:

1. Behaving and acting honestly, objectively, and diligently in carrying out duties and responsibilities.
2. Demonstrating high integrity and loyalty to the Company's profession and Internal Audit.
3. Maintaining independence in all matters related to SPI assignments.
4. Avoiding activities or actions that may harm or are likely to harm the SPI profession or the Company.
5. Avoiding activities conflicting with the Company's interests or preventing the objective performance of duties/obligations.
6. Not accepting any form of gifts or benefits, directly or indirectly, including from assignment objects, clients, customers, suppliers, contractors, and/ or stakeholders of the Company that may interfere or are likely to interfere with SPI's professional judgment.
7. Fully complying with professional standards, the Company's code of conduct, and regulations.
8. Upholding and maintaining the Company's morals and dignity.
9. Not exploiting information obtained for personal gain or benefit or any other reason that may cause or is likely to cause harm to the Company financially

menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik dari sisi finansial maupun dari sisi citra Perusahaan.

10. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apa pun yang diketahuinya karena menjalankan tugas SPI kepada siapa pun, kecuali melalui izin tertulis dari Direktur Utama.
11. Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum.

or in terms of its reputation.

10. Not disclosing any information obtained while performing SPI duties to anyone without written permission from the CEO.
11. Reporting all material assignment results truthfully, revealing the truth based on existing facts, and not concealing information that may harm the Company and/or constitute a legal violation.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SPI TAHUN 2023

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berfungsi sebagai landasan dan acuan kerja bagi seluruh personil SPI dalam menjalankan kegiatan audit internal. PKPT yang disusun oleh SPI harus mendapat persetujuan Direktur Utama dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran sebelum resmi ditetapkan. Penyusunan kerangka PKPT dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based sehingga dalam hal ini SPI berkoordinasi aktif dengan Komite Manajemen Risiko.

Berikut ini adalah uraian realisasi PKPT SPI Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

ANNUAL OVERSIGHT WORK PROGRAM OF SPI FOR 2023

The Annual Audit Work Program (PKPT) serves as the foundation and reference for all SPI personnel in conducting internal audit activities. The PKPT prepared by SPI must be approved by the CEO and submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee for consideration and advice before being officially established. The framework for PKPT development is done using a risk-based approach, so SPI actively coordinates with the Risk Management Committee.

The following is a description of the realization of the SPI PKPT for the year 2023, including:

No	Objek Kegiatan Object of Audit	Realisasi PKPT vs Target PKPT Realization vs Target			
		Realisasi Audit Audit Realization			Target
		Reguler Regular	Remote Remote	Total Total	
1	Audit Kinerja/Operasional Kantor Cabang Branch Office Performance/Operational Audit	4	-	4	4
2	Audit Tematik Thematic Audit	3	-	3	3
3	Audit Kinerja/Operasional Anak Perusahaan Performance/Operational Audit of Subsidiaries	1	-	1	1
4	Pendampingan Audit KAP KAP Audit Assistance	2	-	2	2
5	Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation	1	-	1	1

No	Objek Kegiatan Object of Audit	Realisasi PKPT vs Target PKPT Realization vs Target			
		Realisasi Audit Audit Realization			Target
		Reguler Regular	Remote Remote	Total Total	
6	Validasi Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Data Validation on Increased Use of Domestic Products	12	-	12	12
7	Pengembangan Manajemen SPI SPI Management Development	2	-	2	4
8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Monitoring Follow-up of Audit Results	9	-	9	8
9	Kegiatan Konsultasi Consultation Activities	10	-	10	10
10	Desk Reviu Kegiatan Cabang Usaha Desk Review of Branch Activities	24	-	24	24
11	Penugasan Khusus Manajemen Special Management Assignment	6	-	6	4
12	Pemeriksaan Khusus/PDPT Special Audit/PDPT	2	-	2	2

No	Kegiatan Activities	Waktu Time	Realisasi Pelaksanaan Implementation Realization
1	Divisi Manajemen Risiko dan Piutang (DMR) Risk and Receivables Management Division (DMR)	Januari-Februari 2023 January-February 2023	Januari-Februari 2023 January-February 2023
2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Program <i>Breakthrough</i> Program Minyak Goreng Mamamia. Inspection with a specific purpose of the Mamamia Cooking Oil <i>Breakthrough</i> Program.	Januari-Desember 2023 January-December 2023	November-Desember 2023 November-December 2023
3	GSP-Cabang Surabaya GSP-Surabaya Branch	Januari-Oktober 2023 January-October 2023	Juni 2023 June 2023
4	Pemeriksaan Cabang Gorontalo Audit of Gorontalo Branch	Februari-Maret 2023 February-March 2023	Juli 2023 July 2023
5	Pemeriksaan Cabang Bengkulu Audit of Bengkulu Branch	Februari-Maret 2023 February-March 2023	Agustus 2023 August 2023
6	Pemeriksaan Anak Usaha PPI Industri Audit of PPI Industri Subsidiary	Juni-Juli 2023 June-July 2023	Juni-September 2023 June-September 2023
7	Pemeriksaan Cabang Madiun Audit of Madiun Branch	Januari-Desember 2023 January-December 2023	November 2023 November 2023
8	Audit tematik Pengadaan Barang dan Jasa Non Barang Dagangan; Thematic audit of Procurement of Non-Merchandise Goods and Services;	Mei-Juni 2023 May-June 2023	Desember 2023 December 2023
9	Audit tematik Pengadaan dan Penjualan B2. Thematic audit of B2 Procurement and Sales.	Juni-Juli 2023 June-July 2023	Desember 2023 December 2023
10	Pendampingan Audit KAP KAP Audit Assistance	Januari-Februari 2023, November-Desember 2023	Januari-Februari 2023, November-Desember 2023

No	Kegiatan Activities	Waktu Time	Realisasi Pelaksanaan Implementation Realization
11	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Internal Internal Follow-up Monitoring	Januari, April, Juli, Oktober 2023 January, April, July, October 2023	Januari, April, Juli, Oktober 2023 January, April, July, October 2023
12	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Eksternal External Follow-up Monitoring	Januari, April, Juli, Oktober 2023 January, April, July, October 2023	Januari, April, Juli, Oktober 2023 January, April, July, October 2023
13	<i>Desk Reviu</i> Kegiatan Cabang Usaha Desk Review of Business Branch Activities	Maret-Desember 2023 March-December 2023	Maret-Desember 2023 March-December 2023
14	Kegiatan Konsultasi Consultation Activity	Februari-November 2023 February-November 2023	Februari-November 2023 February-November 2023
15	Valuasi Data P3DN P3DN Data Valuation	Januari-Desember 2023 January-December 2023	Januari-Desember 2023 January-December 2023

Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

Pada tahun 2023, PPI tidak memiliki komite-komite di bawah Direksi. Semua tugas dan kewenangan yang umumnya ada pada komite direksi dapat ditangani langsung oleh Direksi. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi transparansi, etika, dan kepatuhan dalam pengambilan keputusan Perusahaan. Selain itu, PPI juga memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap menjadi prioritas utama.

In 2023, PPI did not have committees under the Board of Directors. All tasks and authorities typically vested in directorial committees could be handled directly by the Board of Directors. However, this does not diminish transparency, ethics, and compliance in the Company's decision-making. Additionally, PPI ensures that shareholder interests remain the top priority.

Akuntan Publik

Public Accountant

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") sebagai pihak eksternal yang bekerja secara independen untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Akuntan Publik dan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui mekanisme RUPS Tahunan.

MECHANISM OF APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM (KAP)

The Company utilizes the services of a Public Accountant Firm ("KAP") as an independent external party to provide opinions regarding the compliance of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

Public Accountants and the KAP that will audit the Consolidated Financial Statements and the PKBL Financial Statements are proposed by the Board of Commissioners and subsequently submitted for approval by shareholders through the mechanism of the Annual General Meeting (RUPS).

Mekanisme penunjukan KAP dimuat di dalam Board Manual serta sudah ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pembahasan terkait penunjukan calon Auditor Eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan perusahaan dengan melibatkan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap calon Auditor Eksternal dalam proses penunjukannya.

Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap kinerja KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) yang telah melakukan audit pada tahun buku sebelumnya untuk selanjutnya diusulkan kembali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Penetapan KAP dan Akuntan Publik Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Komunikasi yang terjalin di antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit, dan Manajemen senantiasa berjalan efektif dan efisien. Selama proses audit berlangsung, KAP berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Oleh karena itu, auditor eksternal dan Komite Audit secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Pada saat menjalankan kegiatan audit, Komite Audit dan KAP melakukan diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP dan menyampaikan hasil auditnya saat *exit meeting*.

The mechanism for appointing the KAP is included in the Board Manual and has been established as part of the Board of Commissioners' Work Program. In practice, the Board of Commissioners discusses the appointment of potential External Auditors who will audit the company's financial statements involving the Audit Committee and the Risk Management Committee.

Through the Audit Committee, the Board of Commissioners evaluates the potential External Auditor in the appointment process.

The Audit Committee has evaluated the performance of KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partner (PKF), which audited the previous fiscal year, and is proposed again to audit the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and the PKBL Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2023.

EXTERNAL AUDIT FUNCTION

The appointment of the Company's Public Accountant Firm and Public Accountants refers to the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, article 3 paragraph 1, which states that general audit services for financial statements of an entity are conducted by a Public Accountant Firm for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years and by a Public Accountant for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

COORDINATION BETWEEN EXTERNAL AUDITOR AND AUDIT COMMITTEE

Communication between the Public Accountant Firm (KAP), the Audit Committee, and Management always runs effectively and efficiently. During the audit process, the KAP coordinates with the Audit Committee to request input/advice on areas of special concern from the Audit Committee. Therefore, the external auditor and the Audit Committee regularly hold meetings to discuss significant important issues.

During the audit activities, the Audit Committee and the KAP discuss the findings obtained by the KAP and present the audit results during the exit meeting.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN AUDITOR EKSTERNAL

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip SAK yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK PERIODE 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai daftar KAP, Akuntan Publik, serta jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan kepada Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

Tahun Buku Year of Book	Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Biaya (Rp) Cost (Rp)	Jenis Audit Audit Type	Opini Audit Audit Opinion
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF)	Sikanto Pawiroatmodjo	750.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> a) Audit Laporan Keuangan PPI dan Anak Perusahaan b) Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern c) Evaluasi Capaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) d) Audit Laporan Program Pendanaan Mikro dan Kecil (PUMK) 	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects
				<ul style="list-style-type: none"> a) Audit of Financial Statements of PPI and Subsidiaries b) Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Controls c) Evaluation of Key Performance Indicator (KPI) Achievement d) Audit of Micro and Small Funding Program Report (PUMK) 	

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Selama pelaksanaan audit, KAP tidak memberikan jasa lain kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selain jasa audit. Pelaksanaan proses audit berjalan independen dan tidak terdapat benturan kepentingan.

SCOPE OF RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND EXTERNAL AUDITOR

Management is responsible for preparing and presenting financial statements in accordance with the principles of SAK as determined by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). Meanwhile, the external auditor is responsible for providing an audit opinion on the financial statements prepared by management based on audit standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS

The following is complete information regarding the list of KAP, Public Accountants, and the services provided and fees charged to the Company for the last 5 (five) years.

OTHER SERVICES PROVIDED BY THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM

During the audit, KAP did not provide other services to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia other than audit services. The implementation of the audit process is independent and there is no conflict of interest.

Manajemen Risiko

Risk Management

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

PPI menghadapi banyak tantangan sebagai akibat dari perubahan lanskap bisnis, politik, dan ekonomi yang cepat dan dinamis pada skala nasional dan global. Penerapan manajemen risiko menawarkan banyak manfaat bagi Perusahaan, memberdayakan kita untuk menavigasi ketidakpastian dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Daripada bereaksi terhadap kejadian tak terduga, kita dapat secara proaktif mengidentifikasi potensi risiko melalui penilaian rutin, perencanaan skenario, dan analisis tren industri. Hal ini memungkinkan dilakukannya intervensi dini dan strategi mitigasi. Dengan demikian misi Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan visi Perusahaan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Sebagai panduan teknis dalam penerapan manajemen risiko bagi pimpinan dan karyawan, PPI telah menyusun Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko melalui dokumen Nomor F-10/ POB/PPI/IX/2018.

Kebijakan Manajemen Risiko

PPI menerapkan Manajemen Risiko berkelanjutan dengan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/ DU/SKD/ POB/PPI/IX/2018 tanggal 30 September 2018.

Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua unit kerja di lingkungan PPI wajib melaksanakan Manajemen Risiko untuk semua aktivitas bisnis dan untuk kepentingan perusahaan.
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan wajib menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu (*Enterprise Risk Management*).
3. Manajemen Risiko merupakan bagian dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik.
4. Semua unit kerja agar terlibat dalam proses penyusunan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta *monitoring* risiko, yang diintegrasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada setiap tahun anggaran.
5. Pengelolaan Risiko merupakan salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) semua unit kerja di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

RISK MANAGEMENT POLICY

PPI encounters numerous challenges as a result of the swiftly and dynamically changing business, political, and economic landscape on a national and worldwide scale. Applying risk management offers a multitude of benefits for the Company, empowering us to navigate uncertainty and achieve our goals more effectively. Instead of reacting to unexpected events, we can proactively identify potential risks through regular assessments, scenario planning, and industry trend analysis. This allows for early intervention and mitigation strategies. In this way, the Company's mission can be carried out well and the Company's vision can be achieved according to the targets set.

As a technical guide in implementing risk management for leaders and employees, PPI has prepared Risk Management Policies and Guidelines through document Number F-10/POB/PPI/IX/2018.

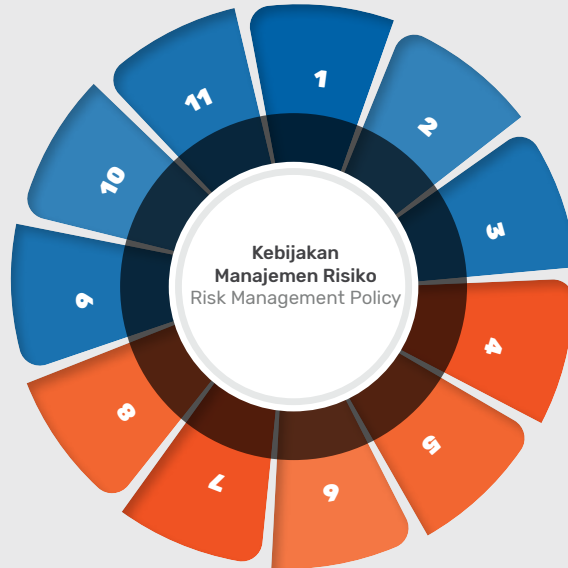
Risk Management Policy

PPI implements sustainable Risk Management based on Board of Directors Decree No. 15/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 dated September 30, 2018.

The implementation of the Risk Management Policy is governed by the following provisions:

1. All work units within PPI are required to implement Risk Management for all business activities and for the benefit of the company.
2. The Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees are required to implement integrated Risk Management (*Enterprise Risk Management*).
3. Risk Management is an integral part of the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG).
4. All work units are to be involved in the process of identifying, analyzing, evaluating, controlling, and monitoring risks, integrated with the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) for each fiscal year.
5. Risk Management is one of the *Key Performance Indicators* (KPIs) for all work units within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy



Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PPI mengacu pada ISO 31000:2009 The Risk Management Principles Applied by PPI refer to ISO 31000: 2009

Prinsip Manajemen Risiko Principles of Risk Management	Penjelasan Description
Menciptakan Nilai Tambah Creating Added Value	Manajemen Risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan peningkatan performansi perusahaan. Risk management contributes to achieving goals and improving company's performance.
Bagian Terpadu dari Proses Organisasi Integrated Part of the Organizational Process	Manajemen Risiko bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, terpisah dari aktivitas dan proses utama perusahaan, namun menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian penting dari perusahaan. Risk management is not a stand-alone activity, separate from the company's main activities and processes, but is a part of management responsibility and an important part of the company.
Bagian dari Pengambilan Keputusan As a Part of Decision Making	Manajemen Risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan yang terinfo, memprioritaskan aksi dan membedakan antar beberapa pilihan jalur alternatif. Risk Management helps decision makers get informed choices, prioritize actions and differentiate between alternative pathway options.
Secara Eksplisit Menangani Ketidakpastian Dealing with Uncertainty Explicitly	Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian, sifat ketidakpastian tersebut dan cara menangani ketidakpastian tersebut. Risk Management explicitly takes into account uncertainty, the nature of the uncertainty and the way it is handled.

Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PPI mengacu pada ISO 31000:2009

The Risk Management Principles Applied by PPI refer to ISO 31000: 2009

Prinsip Manajemen Risiko Principles of Risk Management	Penjelasan Description
Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Tepat Waktu Systematic, Structured and in Timely Manner	Pendekatan sistematis, terstruktur, dan tepat waktu pada manajemen risiko membantu efisiensi dan mendapatkan hasil yang konsisten, komparabel dan reliabel. A systematic, structured and timely approach to risk management helps efficiency and produces consistent, comparable and reliable results.
Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia Based on the Best Available Information	Masukan proses manajemen risiko berdasarkan pada sumber informasi seperti data historis, pengalaman umpan balik stakeholders, pengamatan, perkiraan, dan pertimbangan pakar. Input of the risk management process based on sources of information such as historical data, stakeholder feedback experiences, observations, estimates, and expert judgment.
Disesuaikan Customized	Manajemen Risiko diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal perusahaan, beserta profil risiko perusahaan. Risk management is aligned with the company's internal and external context, as well as the company's risk profile.
Mempertimbangkan Faktor Manusia dan Budaya Considering Human and Cultural Factors	Manajemen Risiko mempertimbangkan kemampuan persepsi dan tujuan manusia, baik di dalam maupun di luar perusahaan, baik yang dapat memudahkan maupun menyulitkan pencapaian tujuan perusahaan. Risk Management considers the ability of perceptions and human goals, both inside and outside the company, which can facilitate or complicate the achievement of company's goals.
Bersifat Transparan dan Inklusif Be Transparent and Inclusive	Keterlibatan secara tepat waktu stakeholder dan khususnya pengambil keputusan pada seluruh tingkatan perusahaan memasukan manajemen risiko tetap relevan dan terkini. Timely involvement of stakeholders and particularly decision makers at all levels of the company to make risk management remains relevant and current.
Bersifat Dinamis, Berulang, dan Responsif terhadap Perubahan Be Dynamic, Repetitive, and Responsive to Change	Manajemen Risiko terus-menerus merasakan dan merespon perubahan. Risk Management is continually sensing and responding to change.
Membantu Peningkatan Organisasi Secara Terus- Menerus Helping Sustainable Organizational Improvement	Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kedewasaan manajemen risiko perusahaan, disamping seluruh aspek lain dalam perusahaan. Organizations must develop and implement strategies to improve the maturity of corporate risk management, in addition to all other aspects of the company.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerja manajemen risiko. Untuk itu, Perusahaan telah mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif.

Kerangka kerja manajemen risiko diperlukan sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas manajemen risiko di semua tingkatan perusahaan. Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerangka kerja manajemen untuk menyediakan pedoman yang diterapkan pada keseluruhan level perusahaan.

Kerangka kerja memastikan informasi tentang risiko yang diturunkan dari proses manajemen risiko dilaporkan secara layak dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta akuntabilitas pada seluruh tingkatan perusahaan.

Adapun skema kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan adalah sebagai berikut:

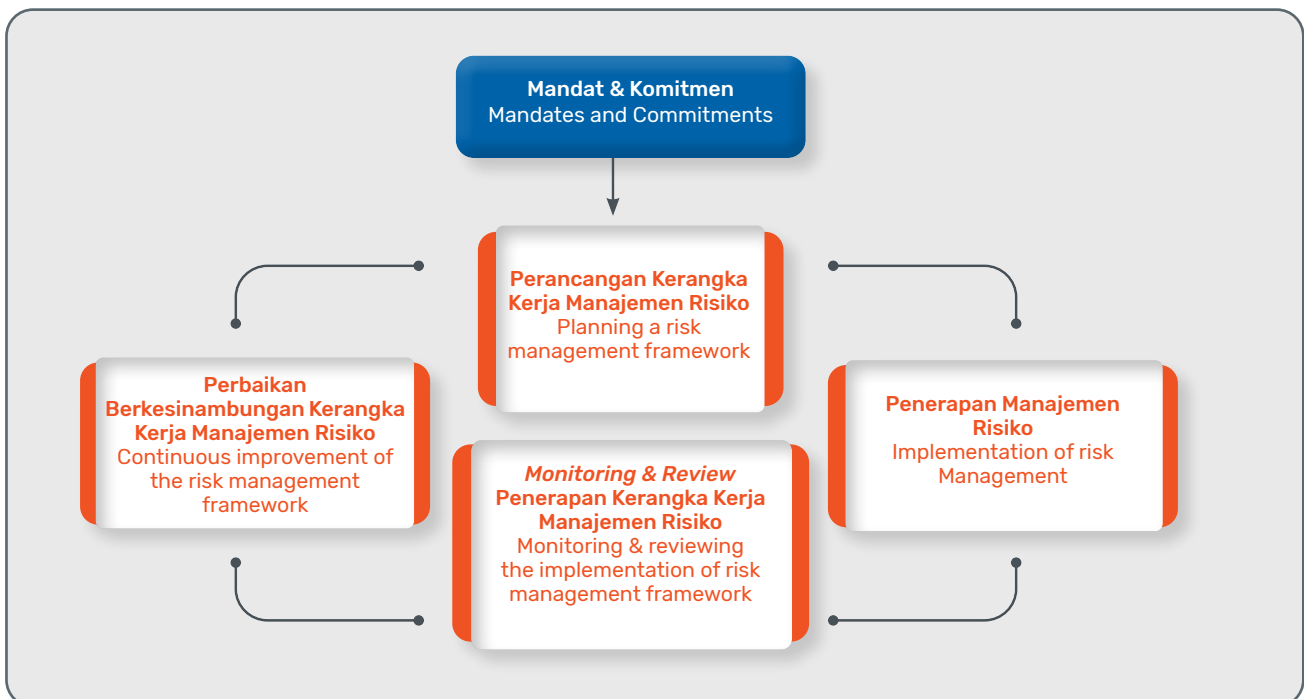
RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The success of implementing risk management depends on the effectiveness of risk management work. Therefore, the Company has developed a risk management framework to ensure that risk management implementation can proceed effectively.

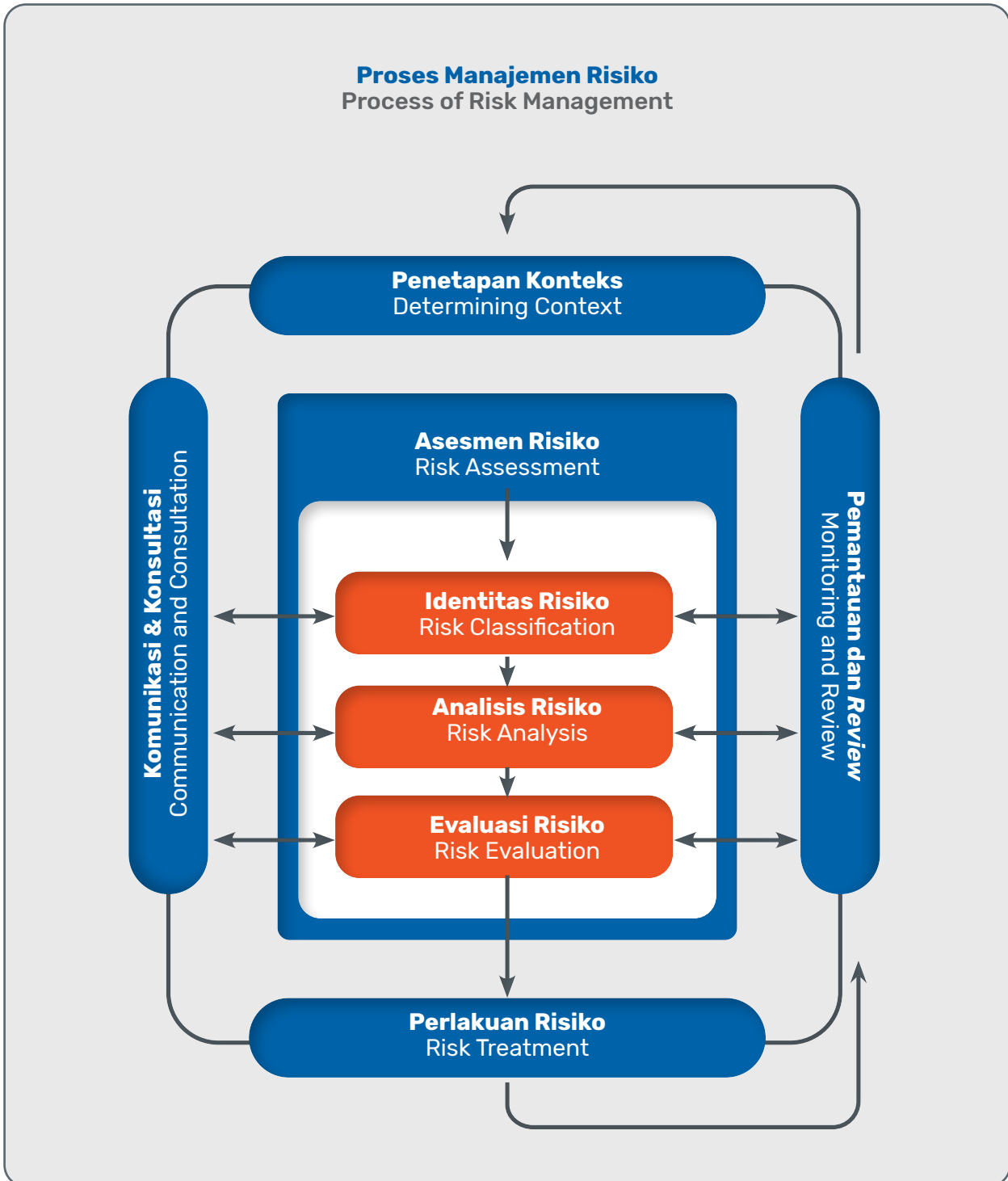
The risk management framework is needed as the basis for implementing all risk management activities at all levels of the company. The success of risk management implementation depends on the effectiveness of the management framework to provide guidelines applied at all levels of the company.

The framework ensures that information about risks derived from the risk management process is reported appropriately and used as the basis for decision-making and accountability at all levels of the company.

The Company's Risk Management Framework scheme is as follows:



Proses Manajemen Risiko
 Process of Risk Management



PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko di PPI dimulai dari penetapan konteks dengan mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan sekitar sasaran yang akan dicapai, *stakeholder* yang berkepentingan dan keberagaman kriteria risiko. Kemudian dilakukan asesmen risiko yang terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko serta perlakuan risiko yang dilakukan dengan perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Adapun proses komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat mencapai sasaran dengan tepat.

Selanjutnya, proses *monitoring* dan *review* dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan serta dengan audit manajemen risiko. Proses *monitoring* dan *review* dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari kebijakan pelaksanaan manajemen sehingga Manajemen dapat melakukan pembaharuan terhadap kebijakan manajemen risiko.

PROFIL & MITIGASI RISIKO

Perseroan telah menetapkan profil dan langkah mitigasi risiko Tahun 2023 sebagai berikut:

Pengelolaan Risiko Perusahaan

Pada tahun 2023, Perseroan telah mengidentifikasi dan menetapkan sembilan risiko utama guna memitigasi risiko – risiko yang mungkin akan dihadapi dalam rencana kerja perusahaan di tahun 2023 yang apabila risiko-risiko tersebut terjadi maka akan dapat mengganggu kinerja perusahaan. Profil risiko perusahaan tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

A. Peta Risiko Posisi Akhir Tahun 2023

Terdapat 9 (sembilan) risiko utama perusahaan pada tahun 2023 yang dituangkan di dalam peta risiko sebagaimana penilaian risiko sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebagai berikut:

PROCESS OF RISK MANAGEMENT

The risk management process at PPI starts from setting the context by identifying and disclosing organizational goals, the environment around the targets to be achieved, interested stakeholders and the diversity of risk criteria. Then it is conducted a risk assessment consisting of identification, analysis and evaluation of risks and risk treatment done by planning for mitigating risks to obtain alternative solutions so that they can be applied effectively and efficiently.

The process of communication and consultation is conducted to ensure the availability of adequate support for each risk management activity and to enable each activity to achieve its targets precisely.

Furthermore, the monitoring and review process is performed through evaluation and examination of ongoing business processes as well as by risk management audits. The monitoring and review process can be done by internal and external parties with the aim of finding out the weaknesses of management implementation policies so that management can make updates to risk management policies.

FRAMEWORK OF RISK MANAGEMENT

The Company has set the profile and risk mitigation steps for 2023 as follows:

Risk Management in Companies

In 2023, the Company identified and defined nine main risks to mitigate potential disruptions to the Company's operations in the 2023 business plan. These risks, if realized, could adversely affect the Company's performance. The Company's risk profile for the year 2023 is outlined as follows:

A. End of Year 2023 Risk Map

Nine main risks were identified for the company in 2023, as depicted in the risk map based on risk assessments conducted until December 2023:

		Dampak Impact				
		1 Sangat Rendah Very Low	2 Rendah Low	3 Menengah Medium	4 Tinggi High	5 Sangat Tinggi Very High
Kemungkinan Possibilities	5 Hampir Selalu terjadi Almost Always happens					
	4 Sering Terjadi Happens Often					
	3 Mungkin Terjadi May Happen					
	2 Jarang Terjadi Rarely Happens					
	1 Hampir Tidak Pernah Terjadi Almost Never Happens					

Keterangan / Note:

Rendah / Low	
Rendah - Menengah Low - Medium	
Menengah Medium	
Menengah - Tinggi Medium - High	
Tinggi High	

B. Realisasi Penanganan Risiko Utama Perusahaan selama Periode Tahun 2023

1. Pencapaian Target EBITDA Perusahaan
 - Pupuk
 - Melakukan pengajuan permohonan untuk alokasi pupuk Urea dan NPK
 - Melakukan koordinasi dengan prinsipal atas ketersediaan pupuk
 - Menambah mitra alternatif sebagai pemasok pupuk non subsidi, memperluas wilayah penyaluran
 - Penguatan sinergi pendistribusian pupuk dengan ID Food.
 - Bahan Kimia
 - Melaksanakan *strategic sourcing* untuk menjaga kontinuitas *supply* dan melakukan komunikasi dengan *stakeholder* terkait penerbitan SPI
 - Penguatan infrastruktur pergudangan untuk standarisasi pergudangan Bahan Kimia
 - Penguatan jejaring penjualan Bahan Kimia.
 - Pestisida
 - Penguatan hilirisasi dan *branding* produk Dharmabrand
 - Pengembangan produk, memperkuat *strategic partnership* untuk menjaga kontinuitas *supply* bahan aktif untuk keperluan produksi Dharmabrand.
 - Farmasi dan Alat Kesehatan
 - Penambahan wilayah kedistributoran, penguatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pergudangan farmasi
 - Melakukan komunikasi serta penagihan secara intensif
2. Piutang Jatuh Tempo tidak lebih dari 40%

Perusahaan berencana untuk melakukan optimalisasi performa pencairan piutang lewat jatuh tempo dan pada triwulan IV tahun 2023, penanganan yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

 - Pemenuhan administrasi terhadap piutang jatuh tempo akan dilakukan audit cabang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/ Rencana Audit Tahunan (RAT) SPI tahun 2023;
 - Strategi penanganan piutang yang dilakukan dengan cara *Soft Collection* dan *Hard Collection*;
 - Berkoordinasi dengan Unit Kerja Komersial untuk dapat melakukan *hold* persetujuan penjualan terhadap pelanggan sebelum membayar kewajiban sebelumnya atau yang sudah melebihi limit kredit;
 - Dalam proses penyusunan ketentuan kredit limit berkoordinasi dengan unit kerja terkait;

B. Realization of the Company's Primary Risk Handling during 2023

1. Achievement of Company's EBITDA Target
 - Fertilizers
 - Submitting requests for allocation of Urea and NPK fertilizers
 - Coordinating with principals regarding fertilizer availability
 - Adding alternative partners as suppliers of non-subsidized fertilizers, expanding distribution areas
 - Strengthening synergy in fertilizer distribution with ID Food.
 - Chemicals
 - Implementing strategic sourcing to maintain supply continuity and communicating with stakeholders regarding the issuance of SPI
 - Strengthening warehouse infrastructure to standardize chemical warehousing
 - Strengthening the sales network for Chemicals.
 - Pesticides
 - Strengthening downstream activities and branding of Dharmabrand products
 - Product development, reinforcing strategic partnerships to maintain the continuity of active ingredient supply for Dharmabrand production.
 - Pharmaceuticals and Medical Devices
 - Adding distribution areas, strengthening licensing, and providing pharmaceutical warehouse infrastructure
 - Conducting intensive communication and billing.
2. Accounts Receivable Past Due not exceeding 40%

The Company plans to optimize the performance of receivables collection by the due date, and in the fourth quarter of 2023, the handling carried out by the Company is as follows:

 - Administrative fulfillment regarding past due receivables will be audited by branches in accordance with the Annual Supervision Work Program (PKPT)/ Annual Audit Plan (RAT) of SPI 2023;
 - Receivables handling strategy implemented through *Soft Collection* and *Hard Collection*;
 - Coordination with the Commercial Work Unit to hold sales approval for customers before paying previous obligations or exceeding credit limits;
 - In the process of setting credit limit terms, coordination with relevant work units is conducted;

- Melakukan rekonsiliasi atas data dan dokumen penagihan atas piutang yang sudah dicadangkan dengan mempertimbangkan bahwa piutang yang dicadangkan merupakan piutang dengan aging >720 hari;
 - Melakukan penagihan dan korespondensi dengan pihak tertagih yang sudah masuk dalam pencadangan piutang dengan aging >720 hari;
 - Sampai dengan bulan Juni, telah dilakukan proses pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri;
 - Dalam proses penyelesaian piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - Dalam proses perbaikan data serta rekonsiliasi terhadap data-data yang masih selisih antara input data manual dengan ERP;
 - Dalam proses penyusunan kebutuhan sajian data untuk dapat ditampilkan dalam *dashboard monitoring* piutang;
3. Volume Penjualan Bahan Kimia dan/atau Komitmen *Buyer* sesuai Target
- Perusahaan telah menyusun rencana penanganan untuk memitigasi risiko sebagai berikut:
- *Sourcing strategic* untuk menjaga kontinuitas supply, penambahan SKU dan pengembangan produk;
 - Penguatan infrastruktur pergudangan kimia B2 dan non-B2 (perbaikan gudang dan sistem ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja)) untuk standarisasi pergudangan B2;
 - Penguatan jejaring penjualan melalui penambahan mitra Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2);
 - Penguatan dan pengembangan penjualan kimia non-B2;
4. Penyaluran Komoditas Pupuk Subsidi dan Non Subsidi sesuai Target
- Penjualan dari komoditas pupuk terdiri dari dua jenis pupuk yaitu:
- a. Pupuk Subsidi
- Memperhatikan beberapa kendala atas pencapaian tersebut, maka perusahaan menyusun rencana mitigasi risiko sebagai berikut:
- i. Melakukan pengajuan permohonan untuk alokasi pupuk Urea dan NPK;
 - ii. Memaksimalkan penyaluran pupuk Urea dan NPK sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPJB dan SK Bupati;
 - iii. Penambahan tenaga *sales* di masing-masing wilayah;
 - iv. Melakukan koordinasi dengan prinsipal atas
- Reconciliation of data and billing documents for reserved receivables considering that reserved receivables have an aging of >720 days;
 - Collection and correspondence with debtors who have entered the receivables reserve with an aging of >720 days;
 - As of June, the process of filing lawsuits in the District Court has been carried out;
 - In the process of settling receivables through Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU);
 - In the process of improving data and reconciling data discrepancies between manual input data and ERP;
 - In the process of preparing data presentation needs to be displayed in the receivables monitoring dashboard.
3. Chemical Sales Volume and/or Buyer Commitments According to Target
- The Company has devised handling plans to mitigate risks as follows:
- Strategic sourcing to maintain a continuous supply, adding SKU, and product development;
 - Strengthening chemical warehouse infrastructure for both Hazardous and non-Hazardous (warehouse improvement and ISO 14001 (Environmental Management System) and ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System)) to standardize Hazardous warehousing;
 - Strengthening sales networks through adding End User of Hazardous Materials (EUHM) partners;
 - Strengthening and developing sales of non-B2 chemicals.
4. Distribution of Subsidized and Non-Subsidized Fertilizer Commodities According to Target
- Sales of fertilizer commodities consist of two types of fertilizers:
- a. Subsidized Fertilizers
- Taking into account several challenges to achieve the target, the company has devised risk mitigation plans as follows:
- i. Submitting requests for allocation of Urea and NPK fertilizers;
 - ii. Maximizing the distribution of Urea and NPK fertilizers according to the targets set in the Supply and Purchase Agreement (SPJB) and Regent's Decree;
 - iii. Adding sales personnel in each region;
 - iv. Coordinating with principals regarding the

- ketersediaan pupuk subsidi untuk pemenuhan penyaluran dalam SPJB.
- b. Pupuk Non Subsidi

Untuk menangani kejadian risiko atas beberapa kendala tersebut, maka perusahaan menyusun rencana mitigasi sebagai berikut:

 - i. Menambah 5 mitra alternatif pasokan pupuk non subsidi (Urea, NPK, KCL, SP36, TSP, ZA, Kaptan, dll) baik prinsipal swasta maupun importasi;
 - ii. Memperkuat hilirisasi dengan pemenuhan tenaga penjualan;
 - iii. Melakukan penyesuaian tupoksi penjualan komoditi di seluruh Kantor Cabang;
 - iv. Memperluas wilayah penjualan atau Kedistributoran Eksklusif di 5 cabang Wilayah Timur sebagai pengganti status Distributor Utama;
 - v. Memperluas market B2B pupuk non-subsidi ke perkebunan;
 - vi. Penguatan sinergi untuk pendistribusian pupuk dengan IDFOOD & PTPN;
 - vii. Optimalisasi penyaluran pupuk non subsidi kedistributoran utama melalui PPI Industri.
5. Volume Penjualan Komoditas Pestisida sesuai Target yang ditetapkan
- Untuk memitigasi risiko atas beberapa kendala, perusahaan telah menyusun rencana penanganan sebagai berikut:
- a. Penguatan hilirisasi dan *branding* Dharmabrand melalui program *spotworker* dan promosi;
 - b. Strategi penjualan melalui *bundling* produk;
 - c. R&D produk untuk menambah varian produk;
 - d. *Sourcing strategic* untuk menambah produk non Dharmabrand;
 - e. Perluasan pasar ke sektor perkebunan BUMN, hortikultura, dan swasta;
 - f. Memperkuat *strategic partnership* untuk menjaga kontinuitas *supply* bahan aktif dan produk;
 - g. Melakukan penyesuaian harga jual agar dapat bersaing dengan kompetitor;
 - h. Memberikan identitas unik pada kemasan yang sulit untuk dipalsukan.
6. Optimalisasi Penjualan Komoditas Bahan Pokok
- Dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko atas sasaran yang telah ditetapkan, perusahaan menetapkan rencana penanganan sebagai berikut:
- a. Penguatan hilirisasi dengan penambahan mitra penjualan B2B di cabang dan ikut serta dalam availability of subsidized fertilizers to fulfill distribution in the SPJB.
- b. Non-Subsidized Fertilizers

To address risks arising from several challenges, the company has devised mitigation plans as follows:

 - i. Adding 5 alternative partners for the supply of non-subsidized fertilizers (Urea, NPK, KCL, SP36, TSP, ZA, Kaptan, etc.) from both private principals and imports;
 - ii. Strengthening downstream activities with sales force reinforcement;
 - iii. Adjusting the job description of commodity sales in all branch offices;
 - iv. Expanding sales territories or Exclusive Distribution in 5 branches in the East Region as replacements for the Main Distributor status;
 - v. Expanding the B2B market for non-subsidized fertilizers to plantations;
 - vi. Strengthening synergy for fertilizer distribution with IDFOOD & PTPN;
 - vii. Optimizing the distribution of non-subsidized fertilizers to main distributors through PPI Industri.
5. Sales Volume of Pesticide Commodities According to Set Targets
- To mitigate risks arising from several challenges, the company has devised handling plans as follows:
- a. Strengthening downstream activities and Dharmabrand branding through *spotworker* programs and promotions;
 - b. Sales strategy through product bundling;
 - c. Product R&D to add product variants;
 - d. Strategic sourcing to add non-Dharmabrand products;
 - e. Market expansion to state-owned plantation sectors, horticulture, and private sectors;
 - f. Strengthening strategic partnerships to maintain the continuity of active ingredient and product supply;
 - g. Adjusting selling prices to compete with competitors;
 - h. Providing unique identities on packaging that are difficult to counterfeit.
6. Optimization of Staple Commodity Sales
- In order to minimize risks associated with set targets, the company has devised handling plans as follows:
- a. Strengthening downstream activities by adding B2B sales partners at branches and participating

- program penjualan Pemerintah/Kementerian dan program lain yang relevan untuk dapat memperbesar *market share*, seperti Bazaar UMKM, paket sembako dan lainnya;
- b. Perbaikan infrastruktur gudang untuk produk konsumsi;
 - c. Penguatan aliansi kluster pangan untuk mendapatkan produk kompetitif;
 - d. *Strategic partnership* di hulu untuk menambah SKU produk.
7. Penjualan Komoditas Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Target yang ditetapkan
- a. Memperhatikan beberapa kendala atas pencapaian tersebut, maka perusahaan menyusun rencana mitigasi risiko sebagai berikut:
 - b. Penambahan wilayah kedistributoran dari prinsipal yang dimiliki;
 - c. Melakukan *Joint Business Plan* (JBP) bersama prinsipal farmasi dan alat Kesehatan;
 - d. Penguatan perizinan di 10 cabang (CDOB CCP);
 - e. Penguatan infrastruktur pergudangan farmasi;
 - f. Melakukan komunikasi dan penagihan secara intensif, mulai dari pemberkasan sampai dengan pencairan anggaran belanja daerah kepada RSUD sesuai dengan penjadwalan yang ditentukan;
 - g. Pemisahan tupoksi tenaga penjualan dan tenaga penagih agar fokus dalam penyelesaian penagihan produk e-katalog RSUD sehingga tidak menjadi piutang bermasalah.
8. Penguatan Jaringan Retail melalui Aplikasi Warung Pangan
Memperhatikan beberapa kendala atas pencapaian tersebut, maka perusahaan menyusun rencana mitigasi risiko sebagai berikut:
- a. Melakukan kerja sama dan mengajukan PO ke beberapa prinsipal
 - b. Penambahan produk tepung di antaranya; "Kompas", "Gatot Kaca", "Gerbang", dan "Serdadu Biru";
 - c. Melakukan beberapa konsinyasi produk IDFOOD Group
 - d. Dalam proses pemetaan Gudang guna pemanfaatan Gudang PPI Cabang menjadi Gudang *Stock Point* Warung Pangan;
9. Optimalisasi Aset sesuai dengan Target yang ditetapkan
Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan telah menyusun beberapa rencana mitigasi sebagai berikut:
- a. Menyusun program pelepasan aset tidak produktif;
 - b. Optimalisasi aset jangka panjang;
 - c. Optimalisasi aset jangka pendek melalui cabang;
- in Government/Ministry sales programs and other relevant programs to increase market share, such as MSME Bazaar, staple food packages, and others;
- b. Improvement of warehouse infrastructure for consumer products;
 - c. Strengthening food cluster alliances to obtain competitive products;
 - d. Strategic partnerships upstream to add SKU product.
7. Sales of Pharmaceutical and Medical Device Commodities According to Set Targets
- a. Considering several challenges in achieving the targets, the company has devised risk mitigation plans as follows:
 - b. Adding distribution areas from owned principals;
 - c. Conducting Joint Business Plans (JBP) with pharmaceutical and medical device principals;
 - d. Strengthening licensing in 10 branches (CDOB CCP);
 - e. Strengthening pharmaceutical warehouse infrastructure;
 - f. Conducting intensive communication and billing, from documentation to disbursement of regional hospital budgets according to the predetermined schedule;
 - g. Separation of job descriptions between sales and collection personnel to focus on resolving collection issues for e-catalog products of regional hospitals to avoid problematic receivables.
8. Strengthening Retail Network through the Food Stall Application
Considering several challenges in achieving the targets, the company has devised risk mitigation plans as follows:
- a. Collaborating and placing purchase orders with several principals
 - b. Adding flour products including "Kompas," "Gatot Kaca," "Gerbang," and "Serdadu Biru";
 - c. Implementing several consignment products from IDFOOD Group
 - d. In the process of mapping warehouses for the utilization of PPI Branch Warehouses as Food Stall Stock Point Warehouses.
9. Asset Optimization According to Set Targets
To overcome these challenges, the company has devised several mitigation plans as follows:
- a. Developing a program to release unproductive assets;
 - b. Long-term asset optimization;
 - c. Short-term asset optimization through branches;

- d. Menyusun program pengamanan aset;
- e. Program pengamanan administrasi.

KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pernyataan Direksi terkait kecukupan sistem manajemen risiko yang disampaikan melalui Peraturan Direksi Nomor 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia adalah bahwa Perusahaan telah memetakan risiko, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance*, melakukan *monitoring* risiko yang dilakukan setiap bulan, melakukan pengukuran tingkat kematangan risiko perusahaan, dan menambahkan kompetensi terkait manajemen risiko *top to bottom* pelatihan manajemen. Perihal pelatihan manajemen risiko ini juga ditunjukkan dengan penerapan pelatihan bersertifikasi kepada Kepala Divisi dan *Manager* bagian Manajemen Risiko serta Kepala Divisi dan *Manager* Satuan Pengawas Internal, hal ini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko di dalam perusahaan.

- d. Developing an asset security program;
- e. Administrative security program.

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The statement from the Board of Directors regarding the adequacy of the risk management system, as conveyed through Board Regulation Number 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 concerning Risk Management Guidelines of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, is that the Company has mapped risks, established risk appetite and risk tolerance, conducted monthly risk monitoring, measured the maturity level of corporate risks, and enhanced competence in top-to-bottom risk management through management training. Regarding risk management training, this is also demonstrated by the implementation of certified training for Division Heads and Managers of the Risk Management department as well as Heads of Divisions and Managers of the Internal Supervisory Units, reflecting management's commitment to implementing Risk Management within the company.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang komprehensif sangat penting bagi Perseroan karena sistem ini melindungi aset, memitigasi risiko, memastikan kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan berkelanjutan sambil meminimalkan potensi ancaman dan kerentanan.

Salah satu upaya perseroan dalam mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur perseroan, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.

Aktivitas pengendalian internal pada lingkup Perseroan secara garis besar bertujuan untuk membantu manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan kinerja perseroan, memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan

INTERNAL CONTROL SYSTEM POLICY

Implementing a comprehensive Internal Control System is vital for the Company as it safeguards assets, mitigates risks, ensures compliance, enhances operational efficiency, and fosters trust and confidence among stakeholders. This system enables organizations to effectively and sustainably achieve their objectives while minimizing potential threats and vulnerabilities.

One of the company's efforts to support the achievement of operational effectiveness and efficiency is by implementing a comprehensive Internal Control System involving elements of the company, such as the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees.

Internal control activities within the scope of the Company broadly aim to assist management in supporting the achievement of the company's performance objectives, providing adequate assurance regarding the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws

peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Komitmen Direksi dan manajemen akan hal tersebut tercantum di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Perseroan telah memiliki Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal, disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tanggal 15 September 2017. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja perseroan dalam menjalankan tata laksana sistem pengendalian internal pada lingkup perseroan serta dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan tanggung jawab dan sistem deteksi dini perseroan.

Perseroan secara rutin mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada semua level, baik dalam hal penerapan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta pengelolaan risiko. Bagi perseroan, hasil evaluasi pengendalian internal tersebut berguna sebagai salah satu dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan yang harus dilakukan Perseroan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Aktivitas pengendalian internal yang diterapkan PPI mengadopsi pendekatan standar internasional - COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) yang dirancang untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

- 1. Efektivitas dan Efisiensi Operasi**
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perseroan dalam rangka mencapai tujuan PPI.
- 2. Keandalan Pelaporan Keuangan**
PPI menjamin ketersediaan laporan yang wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Kepatuhan Terhadap Perundangan- Undangan**
PPI memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan prosedur internal yang ditetapkan oleh PPI.

and regulations, risk management, operational effectiveness and efficiency, and to safeguard company assets at every level of the organization. The commitment of the Board of Directors and management to this matter is stated in the Company's Corporate Governance Guidelines.

The Company has a General Internal Control System Guideline, ratified through Director's Decree Number: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 dated September 15, 2017. This guideline serves as a reference for all company units in implementing the internal control system within the company's scope and to encourage the enhancement of the company's responsibility implementation and early detection systems.

The Company regularly evaluates the effectiveness of internal controls at all levels, both in terms of policy implementation, procedures, internal supervision, and risk management. For the company, the results of these internal control evaluations are useful as one of the bases for determining the improvement and refinement measures that the Company must undertake.

ALIGNMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH THE COSO FRAMEWORK

The internal control activities implemented by PPI adopt an international standard approach - COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) designed to achieve 3 (three) main objectives, namely:

- 1. Effectiveness and Efficiency of Operations**
These activities are intended to enhance the effectiveness and efficiency of the company's resource management in order to achieve PPI's objectives.
- 2. Reliability of Financial Reporting**
PPI ensures the availability of fair, timely, and relevant reports as the basis for making appropriate and accountable decisions.
- 3. Compliance with Laws and Regulations**
PPI ensures that all activities carried out consistently comply with applicable laws and regulations, as well as internal procedures established by PPI.

Berlandaskan pada kerangka COSO, maka unsur-unsur pengendalian internal perseroan mencakup 5 (lima) komponen berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian

Komponen ini menjadi landasan utama bagi komponen pengendalian yang lain karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal serta mencerminkan komitmen, perilaku, dan kesadaran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan sistem pengendalian internal.

2. Identifikasi, Pengukuran dan Pengelolaan Risiko

Kegiatan ini mengawasi proses pengendalian internal secara keseluruhan karena sangat menentukan bentuk design sistem pengendalian yang dibutuhkan serta menentukan apakah suatu pengendalian diperlukan atau tidak bagi perusahaan.

3. Aktivitas Pengendalian

Pada lingkup aktivitas pengendalian, manajemen memastikan bahwa perseroan telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa risiko. Aktivitas pengendalian ini dituangkan dalam dokumen tertulis baik berupa kebijakan ataupun prosedur yang harus ditaati oleh seluruh insan PPI. Aktivitas pengendalian melibatkan semua tingkatan manajemen mulai level Direksi sampai dengan individu (*first line of defence*) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

4. Sistem Informasi dan Komunikasi

PPI menjamin ketersediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi semua lini manajemen hingga individu yang berada di posisi *first line of defence*. Selain itu, komponen ini juga mendorong perseroan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian internal PPI secara keseluruhan.

5. Pemantauan

Aktivitas pemantauan merupakan komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengendalian internal perseroan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh *first line of defence* dan atasannya, maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Auditor Internal/ Eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal senantiasa berjalan efektif.

Based on the COSO framework, the elements of the company's internal control comprise the following 5 (five) components:

1. Control Environment

This component serves as the primary foundation for other control components as it significantly influences the effectiveness of internal control and reflects the commitment, behavior, and awareness of the Board of Commissioners and Directors in implementing the internal control system.

2. Identification, Measurement and Management of Risk

These activities initiate the overall internal control process as they determine the design of the required control system and determine whether a control is necessary for the company.

3. Control Activities

In the scope of control activities, management ensures that the company has taken appropriate actions to prevent a risk event. These control activities are documented in written form, either as policies or procedures to be followed by all PPI personnel. Control activities involve all levels of management from the Director level to individuals (first line of defense) responsible for carrying out daily operational activities.

4. Information and Communication Systems

PPI ensures the availability of relevant, accurate, and timely information for all levels of management down to individuals in the first line of defense. Additionally, this component also encourages the company to ensure the reliability of financial reporting and compliance with regulations. The information and communication component is a vital part of PPI's overall internal control system.

5. Monitoring

Monitoring activities are a crucial component of the company's overall internal control system. These activities are carried out routinely by the first line of defense and their superiors, as well as separate evaluations by the Directors, Board of Commissioners, or Internal/External Auditors. This is done to ensure that the internal control system operates effectively at all times.

SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan PPI mencakup aspek Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan. Implementasi pengendalian internal dari sisi operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan baik berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja. Selain itu, PPI juga melakukan pemeriksaan fisik aset secara ketat guna mengamankan dan melindungi aset-aset perusahaan. Sementara itu, upaya pengendalian internal pada aspek Akuntansi/Keuangan dilakukan dengan melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pemborosan.

PPI juga menggunakan *software* Akuntansi yang dapat diandalkan untuk menjamin akurasi pencatatan atas transaksi yang terjadi serta menyiapkan dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

Selain menguji pengendalian pada aspek Operasional dan Akuntansi / Keuangan, PPI juga menjaga derajat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan lini bisnisnya sebagai entitas BUMN yang bergerak di sektor perdagangan.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Bidang Keuangan

Implementasi pengendalian internal bidang keuangan berfokus pada akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk komitmen, otorisasi, serta penerimaan dan pengeluaran uang.

Bidang Operasional

Implementasi pengendalian internal bidang operasional berfokus pemeriksaan penggunaan sumber daya unit untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi misi dan tujuan perseroan.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Implementasi pengendalian internal bidang kepatuhan berfokus peninjauan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL SYSTEM

The internal control activities carried out by PPI cover Operational, Accounting/Financial, and Compliance aspects. The implementation of internal controls from the operational perspective is further detailed in various policies such as Guidelines, Operational Procedures, and Work Instructions. Additionally, PPI also conducts strict physical asset inspections to secure and protect the company's assets. Meanwhile, internal control efforts in the Accounting/Financial aspect are performed by segregating functions, tasks, and responsibilities to prevent fraud and wastage.

PPI also utilizes reliable Accounting software to ensure the accuracy of transaction recording and to prepare good documentation of control events and transactions.

In addition to testing controls in Operational and Accounting/Financial aspects, PPI also maintains its compliance with relevant laws and regulations pertaining to its business line as a state-owned enterprise operating in the trading sector.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROLS

Financial Domain

The implementation of internal financial controls focuses on accounting and reporting financial transactions, including commitments, authorizations, as well as receipts and disbursements of funds.

Operational Domain

The implementation of internal operational controls focuses on examining the use of unit resources to evaluate whether these resources are used in the most effective and efficient manner to fulfill the company's mission and objectives.

Compliance with Legislation

The implementation of internal compliance controls focuses on reviewing compliance with applicable laws, regulations, policies, and procedures.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

Pada tahun 2023, Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif pada setiap jenjang organisasi.

Rincian kegiatan yang telah terlaksana selama tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Telah terlaksana 4 kegiatan audit kantor cabang antara lain:
 - a. Audit Kantor Cabang Gorontalo;
 - b. Audit Kantor Cabang Bengkulu;
 - c. Audit Kantor Cabang Madiun;
 - d. Audit Kantor Cabang Bandung.
2. Telah terlaksana 3 kegiatan audit tematik antara lain:
 - a. Audit tematik Pengelolaan Piutang Usaha;
 - b. Audit tematik Pengadaan Barang dan Jasa Non Barang Dagangan;
 - c. Audit tematik Pengadaan dan Penjualan B2.
3. Telah terlaksana kegiatan audit operasional PPI Industri;
4. Telah terlaksana pendampingan audit KAP;
5. Telah terlaksana kegiatan Validasi *Risk* Manajemen Index;
6. Telah terlaksana validasi Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
7. Telah terlaksana kegiatan pengembangan manajemen Divisi SPI, antara lain:
 - a. Telah disusun *Internal Audit Charter*;
 - b. Telah disusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
8. Telah dilakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit intern triwulan 1 s.d. 4;
9. Telah dilakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit eksternal (Hasil Audit KAP dan BPK) triwulan 1 s.d. 4;
10. Telah terlaksana 10 kegiatan konsultasi sebagai berikut:
 - a. Pendapat atas prosedur penarikan jaminan nasabah cabang Madiun;
 - b. Usulan pemilihan Saksi terkait Kasus Hukum Cafe Covare Graha PPI;
 - c. Pendapat atas Transaksi ex TEA Brand Merck ex PT Merck Tbk;
 - d. Reviu *Draft* PERDIR Pendistribusian Bahan Berbahaya;

Evaluation of the Implementation of Internal Control Systems in 2023 and Follow-up

In 2023, the Internal Audit Unit (SPI) conducted comprehensive testing of the adequacy of the reliable and effective Internal Control System at every level of the organization.

Details of the completed activities during the year 2023 are as follows:

1. Four branch office audit activities have been conducted, including:
 - a. Gorontalo Branch Office Audit;
 - b. Bengkulu Branch Office Audit;
 - c. Madiun Branch Office Audit;
 - d. Bandung Branch Office Audit.
2. Three thematic audit activities have been completed, including:
 - a. Thematic Audit of Business Receivables Management;
 - b. Thematic Audit of Procurement of Non-Trading Goods and Services;
 - c. Thematic Audit of B2 Procurement and Sales.
3. Operational audit activity of PPI Industri has been completed.
4. Assistance for KAP audit has been completed.
5. Validation of Risk Management Index has been completed.
6. Validation of Domestic Product Usage Increase Data has been completed.
7. Development of SPI Division management activities have been completed, including:
 - a. Internal Audit Charter has been formulated;
 - b. Annual Inspection Work Program has been formulated.
8. Monitoring of follow-up actions on internal audit results for quarters 1 through 4 has been completed.
9. Monitoring of follow-up actions on external audit results (KAP and BPK Audit Results) for quarters 1 through 4 has been completed.
10. Ten consultation activities have been completed, including:
 - a. Opinion on customer guarantee withdrawal procedures for Madiun branch;
 - b. Proposal for selection of witnesses related to the legal case of Cafe Covare Graha PPI;
 - c. Opinion on Transactions ex TEA Brand Merck ex PT Merck Tbk;
 - d. Review of Draft PERDIR Distribution of Hazardous Materials;

- e. Pendapat atas Tindak Lanjut Permasalahan PT MOC (Cafe Covare);
 - f. Pendapat atas Perpanjangan Sewa Aset Bandung;
 - g. Pendapat atas Rencana Rencana Pelepasan Saham PT Manajemen CBT Nusantara oleh PT BGR Logistik Indonesia;
 - h. Reviu dan Masukan *Draft* Pedoman *Subsidiary Governance* PPI Group;
 - i. Pendapat atas Pencantuman Ketentuan Hak bagi Para Pihak untuk Mengaudit Pembukuan dan Catatan Terkait Pelaksanaan Perjanjian dalam Pasal tentang Anti Suap dan Anti Gratifikasi di Perjanjian;
 - j. Pendapat atas Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang Balikpapan.
11. Telah terlaksana 24 kegiatan desk reviu atas kinerja kantor cabang dan 1 Evaluasi Kegiatan Penugasan Bantuan Sosial (Eks PT BGR), antara lain:
 - a. Cabang Ambon;
 - b. Cabang Lampung;
 - c. Cabang Manado;
 - d. Cabang Makassar;
 - e. Cabang Pare-pare;
 - f. Cabang Mataram;
 - g. Cabang Kendari;
 - h. Cabang Pangkal pinang;
 - i. Cabang Malang;
 - j. Cabang Palu;
 - k. Cabang Banjarmasin;
 - l. Cabang Pontianak;
 - m. Cabang Yogyakarta;
 - n. Cabang Surakarta;
 - o. Cabang Semarang;
 - p. Cabang Denpasar;
 - q. Cabang Bandung;
 - r. Cabang Jambi;
 - s. Cabang Cirebon;
 - t. Cabang Palembang;
 - u. Cabang Purwokerto;
 - v. Cabang Padang;
 - w. Cabang Bengkulu;
 - x. Cabang Aceh;
 - y. Evaluasi Penugasan Bansos Tahun 2019.
 12. Telah terlaksana 2 kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Selisih Barang Persediaan pada Gudang Stock Point Surabaya;
 - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Program Breakthrough Program Minyak Goreng
- e. Opinion on Follow-up to PT MOC Issues (Cafe Covare);
 - f. Opinion on Extension of Lease of Bandung Assets;
 - g. Opinion on PT Manajemen CBT Nusantara Share Release Plan by PT BGR Logistik Indonesia;
 - h. Review and Input on Draft Subsidiary Governance Guidelines for PPI Group;
 - i. Opinion on Inclusion of Rights Provisions for Parties to Audit Books and Records Related to Implementation of Anti-Bribery and Anti-Graft Provisions in the Agreement;
 - j. Opinion on Implementation of Renovation Work for Balikpapan Branch Office Building.
11. Twenty-four desk review activities on branch office performance and 1 Evaluation of Social Assistance Assignment (former PT BGR), including:
 - a. Ambon Branch;
 - b. Lampung Branch;
 - c. Manado Branch;
 - d. Makassar Branch;
 - e. Pare-pare Branch;
 - f. Mataram Branch;
 - g. Kendari Branch;
 - h. Pangkal Pinang Branch;
 - i. Malang Branch;
 - j. Palu Branch;
 - k. Banjarmasin Branch;
 - l. Pontianak Branch;
 - m. Yogyakarta Branch;
 - n. Surakarta Branch;
 - o. Semarang Branch;
 - p. Denpasar Branch;
 - q. Bandung Branch;
 - r. Jambi Branch;
 - s. Cirebon Branch;
 - t. Palembang Branch;
 - u. Purwokerto Branch;
 - v. Padang Branch;
 - w. Bengkulu Branch;
 - x. Aceh Branch;
 - y. Evaluation of 2019 Social Assistance Assignments.
 12. Two specific-purpose examination activities have been completed, including:
 - a. Specific-purpose examination of Inventory Discrepancies at Surabaya Stock Point Warehouse;
 - b. Specific-purpose examination of Mamamia Cooking Oil Breakthrough Program.

Mamamia.

13. Telah terlaksana 6 kegiatan penugasan khusus dari manajemen:
 - a. Pelatihan dan Sertifikasi Program Pengelolaan Gratifikasi di PPI;
 - b. Pembuatan Surat Edaran Anti Gratifikasi;
 - c. Pembentukan Tim Pengelola Gratifikasi di Lingkungan PPI;
 - d. Pendampingan Audit Tim BPK;
 - e. Pendampingan Audit Integritas Data dari PT RNI (Persero);
 - f. Pelaksanaan Stock Opname barang persediaan.

Sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, terdapat dua kegiatan pengembangan manajemen SPI yang belum terlaksana di Tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya kegiatan pendampingan audit dari BPK RI dan audit Integritas Data dari PT RNI (Persero).

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan SPI telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan di sepanjang tahun 2022.

AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pengelolaan informasi korporasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dilakukan secara profesional di bawah pengawasan Sekretaris Perusahaan guna mencegah terjadinya misleading information yang dapat berdampak negatif bagi citra perusahaan. Dalam hal ini, PPI membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan keterbukaan informasi dalam batasan yang diatur oleh perundang-undangan dan kebijakan internal perseroan.

SITUS WEB PPI

PPI telah menyediakan kanal informasi melalui situs web www.ptppi.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan investor. PPI mengoptimalkan pemanfaatan

13. Six special management assignment activities have been completed, including:
 - a. Training and Certification Program for Gratuity Management at PPI;
 - b. Preparation of Anti-Graft Circulars;
 - c. Formation of Gratuities Management Team at PPI;
 - d. Assistance for BPK Audit Team Audit;
 - e. Assistance for Data Integrity Audit from PT RNI (Persero);
 - f. Implementation of Inventory Stock Opname.

As stated in the table above, there are two SPI management development activities that have not been completed in 2023 due to the accompaniment of audits from the Supreme Audit Agency (BPK RI) and Data Integrity audits from PT RNI (Persero).

STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors assesses that the units under its supervision have performed their functions and roles well and have achieved effective and efficient performance outcomes. The Corporate Secretary and Internal Audit Unit (SPI) have carried out their duties effectively as support units for the Board of Directors and have assisted the Board in managing and administering the company throughout the year 2022.

ACCESS TO COMPANY DATA AND INFORMATION

The management of corporate information at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia is carried out professionally under the supervision of the Corporate Secretary to prevent the dissemination of misleading information that could negatively impact the company's reputation. In this regard, PPI provides access to information as widely as possible to the public while still adhering to confidentiality requirements and information transparency within the limits set by laws and internal company policies.

PPI WEBSITE

PPI has provided an information channel through the website www.ptppi.co.id, which can be easily accessed by the public and investors. PPI optimizes the use of this

situs web tersebut sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal yang memuat berbagai informasi umum mengenai perseroan, seperti Profil Perusahaan, Struktur Organisasi, Laporan Keuangan, dan informasi korporasi lainnya. Seluruh informasi tersebut disajikan secara faktual, serta ditinjau dan diperbaharui secara berkala relevansinya untuk meningkatkan kualitas distribusi informasi PPI.

Sementara untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai PPI, publik ataupun investor dapat mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi ataupun mengunjungi kantor pusat secara langsung yang beralamat di:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
GRAHA PPI, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160
Tel : +6221 3862141
Fax : +62 21 3862143
Email: ppi.info@ptppi.co.id

MEDIA LAINNYA

Selain mengkomunikasikan kebijakan dan informasi penting melalui *website*, penyebaran informasi perseroan juga dilakukan melalui buletin PPI, press release, media sosial, dan papan-papan pengumuman yang terdapat di lingkungan perseroan. Selain itu, PPI juga mengadakan pertemuan (*gathering*) bersama *stakeholders* yang diselenggarakan secara berkala.

SIARAN PERS TAHUN 2023

Penyebarluasan informasi Perseroan kepada publik salah satunya dilakukan melalui siaran pers. Selama tahun 2023, siaran pers yang telah dilakukan perseroan, antara lain:

website as a communication medium with external parties, containing various general information about the company, such as Company Profile, Organizational Structure, Financial Reports, and other corporate information. All such information is presented factually and is regularly reviewed and updated for relevance to enhance the quality of PPI's information distribution.

For more comprehensive information about PPI, the public or investors can submit written requests addressed to the Board of Directors or visit the headquarters directly at:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
GRAHA PPI, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160
Tel: +6221 3862141
Fax: +62 21 3862143
Email: ppi.info@ptppi.co.id

OTHER MEDIA

In addition to communicating policies and important information through the website, the dissemination of company information is also carried out through PPI bulletins, press releases, social media, and notice boards located within the company premises. Furthermore, PPI also holds gatherings with stakeholders regularly.

PRESS RELEASES IN 2023

The dissemination of company information to the public is done through press releases. During the year 2023, press releases conducted by the company included:

DAFTAR PRESS RELEASE 2023 LIST OF PRESS RELEASES 2023

No	Tanggal Date	Judul Headline
1	1/7/2023	Kilas Balik Peran PPI dalam 1 tahun Holding BUMN Pangan ID Food Looking back at PPI's role in the 1-year Holding BUMN Food ID Food
2	1/13/2023	ULTRA (Ulas Transformasi) Kupas <i>English for Business Purpose</i> ULTRA (Discussing Transformation) Unveils English for Business Purpose
3	1/18/2023	Upaya PPI Memajukan Pangan Indonesia melalui Warung Pangan PPI's Efforts to Advance Indonesian Food through Food Stalls
4	1/24/2023	Ikut Misi Dagang Bareng Mendag ke Arab Saudi, Ini Komitmen PPI ke Pemerintah Participating in Trade Mission with Minister of Trade to Saudi Arabia, PPI's Commitment to the Government

No	Tanggal Date	Judul Headline
5	2/1/2023	PPI & PPT Energy Trading Jajaki Kerja Sama Ekspor Impor PPI & PPT Energy Trading Explore Export-Import Collaboration
6	2/1/2023	Dubes RI untuk Jepang Sambangi PPI, Bahas Peluang Ekspor Komoditi Indonesia Indonesian Ambassador to Japan Visits PPI, Discusses Export Opportunities for Indonesian Commodities
7	2/3/2023	Dirut PPI Kunjungi PPI & BLI Cabang Surabaya, Bahas Realisasi Kinerja dan Kesiapan Ekspor Rumput Laut PPI President Director Visits PPI & BLI Surabaya Branch, Discusses Performance Realization and Seaweed Export Readiness
8	2/3/2023	PPI dan BLI Berkunjung ke PIHC, Silaturahmi dan Bahas Perencanaan Bisnis PPI and BLI Visit PIHC, Exchange Greetings and Discuss Business Planning
9	2/10/2023	PPI Bantu Sesama Melalui Donor Darah PPI Assists Fellow Citizens Through Blood Donation
10	2/11/2023	Dirut PPI Ajak Mahasiswa Yarsi Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan PPI President Director Invites Yarsi Students to Foster Entrepreneurial Spirit
11	2/14/2023	PPI Konsisten Serap Livebird Peternak PPI Consistently Absorbs Livebird Farmers
12	3/10/2023	Optimalkan Infrastruktur, PPI Siap Hadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional Optimizing Infrastructure, PPI Ready to Face Religious and National Holidays
13	2/19/2023	PPI Bersama Ribuan Warga Kota Aceh dan Jambi Antusias Ikuti Jalan Sehat Bersama BUMN PPI, Together with Thousands of Residents of Aceh and Jambi, Enthusiastically Participate in BUMN's Healthy Walk
14	2/21/2023	PPI Berpartisipasi dalam BUMN Goes to Campus di Jambi PPI Participates in BUMN Goes to Campus in Jambi
15	2/27/2023	PPI Hadirkan Rene Suhardono, Bedah "Leading & Managing Change" PPI Presents Rene Suhardono, Discusses "Leading & Managing Change"
16	3/1/2023	PPI dan Aren Mas Nusantara Siap Jalin Kerja Sama PPI and Aren Mas Nusantara Ready to Establish Cooperation
17	3/1/2023	Genjot Ekspor, PPI Gandeng A to Z for Import Company untuk Perluas Pasar Mesir Boosting Exports, PPI Collaborates with A to Z for Import Company to Expand the Egyptian Market
18	3/8/2023	Geber Ekspor, PPI Gandeng Al-Bustan for General Import and Export Perluas Pasar Mesir Ramping up Exports, PPI Partners with Al-Bustan for General Import and Export to Expand the Egyptian Market
19	3/9/2023	Edukasi Pengendalian Hama, PPI Gelar Demspray dan Penyuluhan ke Petani di Bali Pest Control Education, PPI Conducts Demspray and Counseling for Farmers in Bali
20	3/11/2023	Dengan Tema Keberagaman Kopi Nusantara Perkuat Ekonomi Masyarakat dan Pererat Harmoni Bangsa, PPI Semarakkan Hari Kopi Nasional 2023 With the Theme of Nusantara Coffee Diversity Strengthening Community Economy and National Harmony, PPI Enlivens National Coffee Day 2023
21	3/21/2023	Sambut Ramadan, PPI Gelar Munggaran Karyawan Welcoming Ramadan, PPI Holds Employee Gathering
22	3/27/2023	PPI Gelar Pertemuan Bersama DTB2 PPI Holds Meeting with DTB2
23	3/28/2023	PPI Laksanakan Exit Meeting Assesment GCG PPI Tahun Buku 2022 PPI Conducts Exit Meeting for GCG Assessment of PPI Fiscal Year 2022
24	3/31/2023	PPI Sediakan Ribuan Paket Pangan Murah dalam Safari Ramadan BUMN di Bogor PPI Provides Thousands of Affordable Food Packages in BUMN Ramadan Safari in Bogor
25	4/5/2023	PPI, Kemendag, dan Duta Besar Mesir, Jalankan Pelepasan Ekspor Perdana 25 Ton Kopi dengan Skema Imbal Dagang PPI, Ministry of Trade, and Egyptian Ambassador, Launch First Export Release of 25 Tons of Coffee with Trade Scheme

No	Tanggal Date	Judul Headline
26	4/13/2023	PPI Salurkan Bantuan untuk Anak Yatim dan Tenaga Pendukung PPI Distributes Aid to Orphans and Support Staff
27	4/17/2023	PPI dan Aditama Anugerah Abadi Siap Jalin Kerja Sama PPI and Aditama Anugerah Abadi Ready to Establish Cooperation
28	5/9/2023	PPI Terima Kunjungan Dubes RI Mexico City, Gali Potensi Kerja Sama Indonesia & Meksiko PPI Receives Visit from Indonesian Ambassador to Mexico City, Explores Potential Cooperation between Indonesia & Mexico
29	5/16/2023	Perluas Pasar, PPI Jalin Imbal Dagang dengan Sejumlah Perusahaan Mesir Expanding Market, PPI Establishes Trade Schemes with Several Egyptian Companies
30	5/22/2023	PPI Gandeng Thara Jaya Niaga Perkuat Distribusi Pangan PPI Partners with Thara Jaya Niaga to Strengthen Food Distribution
31	5/23/2023	PPI Dukung Rekrutmen Bersama BUMN 2023 PPI Supports Joint Recruitment with BUMN 2023
32	5/24/2023	AKHLAK Talk Series: Kompeten AKHLAK Talk Series: Competence
33	5/24/2023	PPI Sampaikan Peluang Kerja Sama di Depan Presiden Iran PPI Presents Opportunities for Collaboration in Front of the President of Iran
34	5/30/2023	PPI & Rumah Ekonomi Rakyat Jalin Kerja Sama Manfaatkan Platform Warung Pangan PPI & Rumah Ekonomi Rakyat Forge Collaboration Utilizing the Food Stall Platform
35	6/19/2023	HUT ke-20, PPI Operasionalisasikan UPI Buduran Dukung Ekspor Rumput Laut Commemorating the 20th Anniversary, PPI Operationalizes UPI Buduran to Support Seaweed Export
36	6/22/2023	PPI Lakukan Ekspor Perdana Rumput Laut ke Korea Selatan PPI Conducts Inaugural Seaweed Export to South Korea
37	6/22/2023	Konsisten, PPI Kembali Bantu Mitra UMKM Lewat Program Bedah Warung Pangan Consistently, PPI Again Assists MSME Partners Through the Food Stall Revitalization Program
38	6/27/2023	Kementerian BUMN dan ID Food, Lakukan Pergantian Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Ministry of SOEs and ID Food, Replace Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
39	6/30/2023	Momen Iduladha, PPI Group Laksanakan Pemetongan Hewan Kurban Iduladha Moment, PPI Group Conducts Sacrificial Animal Slaughter
40	7/5/2023	PPI Lepas Ekspor Rumput Laut ke China PPI Releases Seaweed Export to China
41	7/12/2023	Perusahaan Perdagangan Indonesia Raih Dua Penghargaan Indonesian Trading Company Achieves Two Awards
42	7/20/2023	Jalin Kemitraan, PPI dan Paskomnas Launching Kios Pangan ID Food Forge Partnerships, PPI and Paskomnas Launch ID Food Food Kiosks
43	7/25/2023	PPI Sosialisasikan Program Makmur Kopi ke Petani Kuningan Jawa Barat PPI Socializes Prosperous Coffee Program to Kuningan Farmers in West Java
44	8/6/2023	PPI Penetrasi Pasar Kamboja Lewat Indonesia Trade & Tourism Promotion 2023 PPI Market Penetration in Cambodia through Indonesia Trade & Tourism Promotion 2023
45	8/15/2023	PPI Bantu Perbaiki Infrastruktur Desa di Madura PPI Assists in Improving Village Infrastructure in Madura
46	8/22/2023	Kembangkan UMKM, PPI Beri Pelatihan Puluhan UMKM di Jakarta Developing MSMEs, PPI Provides Training for Dozens of MSMEs in Jakarta
47	8/31/2023	Sepanjang Semester I, PPI Lakukan Penyaluran Pinjaman ke 18 UMKM melalui Kolaborasi dengan BRI Throughout the First Semester, PPI Distributes Loans to 18 MSMEs through Collaboration with BRI
48	9/4/2023	Dukung Pembudidayaan Ikan Patin, PPI Salurkan Bantuan TJSL Supporting Catfish Farming, PPI Distributes Assistance TJSL
49	9/6/2023	BNPT Fasilitas Kerja Sama PPI dan Koperasi Konsumen Indonesia Harmoni Sejahtera BNPT Facilitates Cooperation between PPI and Indonesian Consumer Cooperative Harmoni Sejahtera

No	Tanggal Date	Judul Headline
50	9/7/2023	Tingkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PPI Helat Workshop Penerapan GCG Improving Good Corporate Governance, PPI Holds GCG Application Workshop
51	9/14/2023	PPI Salurkan Komoditas Pangan untuk Program Bantuan Penanganan Stunting Badan Pangan Nasional PPI Distributes Food Commodities for the National Food Handling Assistance Program for Stunting, by the National Food Agency
52	9/17/2023	PPI Salurkan Bantuan Sembako di Banyuwangi PPI Distributes Grocery Aid in Banyuwangi
53	9/20/2023	Tingkatkan Produktivitas Petani, PPI Gelar Demspray di Banyuwangi Boosting Farmer Productivity, PPI Conducts Demspray in Banyuwangi
54	10/5/2023	PPI Dukung Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula PPI Supports Legal Process in Alleged Corruption Case of Sugar Imports
55	10/5/2023	Undang Pakar, PPI Gelar Diskusi Cold Chain Inviting Experts, PPI Holds Cold Chain Discussion
56	10/16/2023	Perkuat Pasar Komoditi Kopi, PPI Kenalkan Covare di Ajang Indonesia Premium Coffee Expo and Forum 2023 Strengthening the Coffee Commodity Market, PPI Introduces Covare at the Indonesia Premium Coffee Expo and Forum 2023
57	10/16/2023	PPI Terima Kunjungan Delegasi Bisnis Kamboja PPI Receives Business Delegation Visit from Cambodia
58	10/17/2023	PPI Semarakkan Hari Pangan Nasional melalui Gerakan Pangan Murah PPI Enlivens National Food Day through Affordable Food Movement
59	10/20/2023	PPI Tandatangani Kontrak Ekspor Kopi 950 ton ke Mesir PPI Signs Contract to Export 950 tons of Coffee to Egypt
60	10/24/2023	PPI Bangun Sarana Prasarana Pendidikan di Banten dan Bandung Barat PPI Builds Educational Facilities in Banten and West Bandung
61	10/27/2023	Kualitas Produk Bantuan Stunting Bagus, Warga Banyumas Apresiasi PPI Good Quality Stunting Aid Products, Residents of Banyumas Appreciate PPI
62	11/8/2023	Dukung Ketahanan Pangan di Banten, PPI Jalin Kerja Sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Supporting Food Security in Banten, PPI Collaborates with the Banten Provincial Food Security Agency
63	11/9/2023	Kolaborasi Bersama SHS dalam Memberikan Edukasi Tentang Tanaman Padi Potensi Hama Collaborating with SHS in Providing Education About Potential Rice Plant Pests
64	11/13/2023	PPI Dukung Program Pemerintah Gerakan Pangan Murah di Kendari dan Sidoarjo PPI Supports the Government's Affordable Food Movement Program in Kendari and Sidoarjo
65	11/17/2023	PPI Bersama BRI Kolaborasi Salurkan Pinjaman Rp1 Miliar untuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PPI Collaborates with BRI to Distribute a Rp1 Billion Loan for Micro and Small Business Financing Program
66	12/1/2023	PPI Bersama ID Food Group Gelar Program TJSJ Kolaborasi di Cianjur PPI, Together with ID Food Group, Holds a Collaborative TJSJ Program in Cianjur
67	12/13/2023	PPI Raih 2 Penghargaan pada Ajang BUMN Branding & Marketing Award 2023 Tahun ke 11 PPI Receives 2 Awards at the 11th BUMN Branding & Marketing Award 2023 Event
68	12/18/2023	Pergantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Change of Board of Commissioners and Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
69	12/21/2023	Tindak Lanjut Gelaran TEI 2023, PPI Realisasikan Ekspor Kopi ke Mesir Follow-up to TEI 2023 Event, PPI Realizes Coffee Export to Egypt

Perkara Penting Tahun 2023

Legal Cases in 2023

PERKARA PENTING DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana.

PERKARA PENTING DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, Entitas Anak PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana.

LEGAL CASES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout the year 2023, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI were not involved in any legal cases, whether civil or criminal.

LEGAL CASES FACED BY SUBSIDIARIES

Throughout the year 2023, PPI's subsidiary were not involved in any legal cases, whether civil or criminal.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat sanksi administrasi dalam bentuk apa pun yang dikenakan pihak regulator kepada PPI.

As of the end of 2023, there was no administrative sanctions of any kind imposed by the regulator on PPI.

Pedoman Etika Perusahaan

Corporate Ethics Guidelines

KOMITMEN PELAKSANAAN KODE ETIK

Komitmen Perusahaan untuk menerapkan kode etik bermanfaat dalam banyak hal, berdampak pada segala hal mulai dari budaya internal dan semangat kerja karyawan hingga reputasi eksternal dan kepercayaan pelanggan. Kode etik yang terdefinisi dengan baik menetapkan harapan dan pedoman yang jelas bagi perilaku karyawan, menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Hal ini mengarah pada lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Memiliki kerangka perilaku etis membantu karyawan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang menantang. Hal ini dapat mengurangi risiko perilaku tidak etis dan konsekuensinya.

PPI telah menyusun Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan,

COMMITMENT TO IMPLEMENTING CODE OF ETHICS

The Company's commitment to implementing a code of ethics is beneficial in many ways, impacting everything from its internal culture and employee morale to its external reputation and customer trust. A well-defined code of ethics establishes clear expectations and guidelines for employee behavior, fostering a culture of honesty, integrity, and respect. This leads to a more positive and productive work environment. Having a framework for ethical behavior helps employees make informed and responsible decisions, even when faced with challenging situations. This can reduce the risk of unethical conduct and its consequences.

PPI has formulated a Business Ethics and Code of Conduct Guidelines, established through Board of Directors Decree Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018, concerning the First Amendment to the Board Manual, Policies on Classification and Management of Company Information, Gift Acceptance and Provision Policy, Code

Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

Code of Conduct adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan standar perilaku bagi setiap insan PPI yang disusun untuk memengaruhi, membentuk, mengatur dan mengarahkan tingkah laku termasuk saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga tercapai *outcome* yang diharapkan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya PPI.

The Code of Conduct comprises a set of commitments consisting of business ethics and behavioral standards for every individual within PPI, designed to influence, shape, regulate, and direct behavior, including interactions with stakeholders, to achieve desired outcomes in line with PPI's cultural values.

POKOK-POKOK KODE ETIK

KEY POINTS OF THE CODE OF ETHICS

Secara garis besar, pokok-pokok Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis PPI memuat hal-hal berikut ini:

In essence, the main points of PPI's Business Ethics and Conduct Policy include the following:

Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
I	Pendahuluan Introduction	<p>Bab ini berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Latar Belakang Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan Pengertian Maksud Dan Tujuan Daftar Istilah <p>This chapter contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> Background Vision, Mission and Corporate Values Understanding Purpose and Objective Glossary
II	Etika Usaha Perusahaan Company Business Ethics	<p>Bab ini mengatur hubungan dan komitmen Perusahaan dalam berhubungan dengan <i>stakeholders</i>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hubungan Dengan Pemegang Saham Hubungan Dengan Pekerja Hubungan Dengan Pelanggan Hubungan Dengan Pesaing Hubungan Dengan Penyedia Barang dan Jasa Hubungan Dengan Mitra Kerja Hubungan Dengan Kreditur Hubungan Dengan Investor Hubungan Dengan Pemerintah Hubungan Dengan Masyarakat Hubungan Dengan Media Massa Hubungan Dengan Organisasi Profesi. <p>This chapter regulates the Company's relationship and commitment in dealing with stakeholders, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> Relations with Shareholders Relations with Employees Relations with Costumers Relations with Competitors Relations with Goods and Service Providers Relations with Partners Relations with Creditors Relations with Investors Relations with the Government Relationswith Community Relations With Mass Media Relations With Professional Organizations.

Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
III	Standar Tata Perilaku Code of Conduct	<p>Bab Ini Menjelaskan standar perilaku terbaik bagi Insan PPI yang berlandaskan pada prinsip - prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya Budaya Perusahaan yang diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan.</p> <p>Bab ini antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - Hubungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Dan Kerjasama Antar Pekerja - Hubungan Atasan Dan Bawahan 2. Integritas Dan Komitmen 3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Kerahasiaan Data dan Informasi 5. Penggunaan Komunikasi Elektronik 6. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan 7. Hadiah/Cinderamata, Jamuan Bisnis/Hiburan dan Lainnya (Gratifikasi) 8. Penyuapan 9. Aktivitas Politik 10. Aktivitas Sosial 11. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan 12. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3I) 13. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi 14. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian 15. Citra Perusahaan <p>This Chapter Describes the best standard of behavior for PPI's personnel based on the principles of GCG so as to encourage the establishment of a Corporate Culture which is expected to, either directly or indirectly, increase the value of the Company.</p> <p>This chapter includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - Working Relationship <ul style="list-style-type: none"> - Relations and Cooperation among Employees - Boss and Subordinate Relationship 2. Integrity and Commitment 3. Compliance with Laws and Legislation 4. Confidentiality of Data and Information 5. Use of Electronic Communication 6. Conflict of Interest and Abuse of Position 7. Gifts/Souvenirs, Business Meals/Entertainment and Others (Gratuities) 8. Bribery 9. Political Activities 10. Social Activities 11. Protection and Use of Company Assets 12. Occupational Health and Safety (OHS) 13. Data Recording, Reporting and Documentation 14. Abuse of Narcotics, Drugs, Alcohol and Gambling 15. Company Image
IV	Pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku Implementation of Business Ethics and Code of Conduct	<p>Bab ini mengatur Organisasi, Penegakan Pedoman Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelaporan, Penanganan Dan Sanksi Pelanggaran.</p> <p>This chapter regulates the Organization, Code of Conduct Enforcement, Socialization and Internalization, Reporting, Handling and Sanctions for Violations.</p>
V	Penutup Penutup	<p>Berisikan penjelasan terkait pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku dan Penjelasan Pernyataan Pegawai.</p> <p>This provides an explanation regarding the update/revision of business ethics and code of conduct and an explanation of employee statements.</p>

PENERAPAN *CODE OF CONDUCT*

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan, penerapan dan pengawasan atas penegakan *Code of Conduct* di lingkungan perseroan, namun dalam praktiknya, penerapan *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab seluruh karyawan PPI.

Sementara, para Kepala Divisi, Kepala Cabang, *Manager* dan pejabat setingkatnya bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pernyataan bahwa *Code of Conduct* Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

PPI menegaskan bahwa pokok-pokok *Code of Conduct* berlaku setara bagi seluruh insan PPI, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Dengan adanya *Code of Conduct*, PPI berharap setiap individu semakin memiliki kesadaran tinggi untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai etika yang baik sehingga dapat mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan membawa dampak positif terhadap citra PPI.

Komitmen Perseroan akan hal ini ditunjukkan dengan mewajibkan setiap karyawan untuk membaca, memahami, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam *Code of Conduct* dan menandatangani Lembar Pernyataan Komitmen Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang dilakukan secara berkala atau setiap tahun.

Pada tahun 2023, penandatanganan lembar pernyataan tersebut telah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023.

Sosialisasi dan Internalisasi

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi pokok-pokok *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab Tim GCG. PPI berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh Insan Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja serta melakukan penyegaran secara berkala;
2. Setiap Pejabat dan Pegawai Perseroan mendapatkan sosialisasi dan menerima satu salinan *Code of Conduct*, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan *Code of Conduct*;

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the formulation, implementation, and oversight of the enforcement of the Code of Conduct within the company's environment. However, in practice, the implementation of the Code of Conduct becomes the responsibility of all PPI employees.

Meanwhile, Division Heads, Branch Managers, Managers, and their equivalents are responsible for implementing the Code of Conduct within their respective work units.

Statement that the Code of Conduct Applies to All Organizational Levels

PPI asserts that the principles of the Code of Conduct apply equally to all individuals within PPI, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees. With the existence of the Code of Conduct, PPI hopes that each individual will have a heightened awareness to behave in accordance with good ethical values, thereby supporting the creation of harmonious work relationships and positively impacting PPI's image.

The Company's commitment to this is demonstrated by requiring every employee to read, understand, and comply with the provisions set forth in the Code of Conduct and to sign the Commitment Statement Sheet of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's Individuals, which is done periodically or annually.

In 2023, the signing of this statement sheet was conducted on 26 Juni 2023.

Socialization and Internalization

The socialization and internalization of the key points of the Code of Conduct are the responsibility of the GCG Team. PPI is committed to conducting effective and comprehensive socialization activities with the following provisions:

1. Conducting Code of Conduct socialization for all Company Individuals, Customers, and Business Partners and conducting periodic refreshers.
2. Each Officer and Employee of the Company receives socialization and a copy of the Code of Conduct, and signs a commitment form to comply with and implement the Code of Conduct.

3. *Code of Conduct* diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh Pejabat dan Pegawai Perseroan, serta didokumentasikan oleh Tim GCG sebagai koordinator dan penanggung jawab;
4. Mengevaluasi pencapaian atau pemahaman seluruh Insan Perseroan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja; dan
5. Mengkaji *Code of Conduct* secara berkala dalam rangka mengembangkan *Code of Conduct* dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan.

Informasi lebih lanjut mengenai *Code of Conduct* perseroan dapat diunduh pada situs web PPI: [https:// www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/](https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/).

Pelaporan, Penanganan, dan Sanksi Pelanggaran

PPI mendorong seluruh karyawan ataupun pihak eksternal apabila mereka menemukan adanya tindakan ataupun dugaan terjadinya pelanggaran terhadap (yang dikembangkan oleh perseroan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses penegakan *Code of Conduct* di PPI.

Perseroan telah menetapkan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar pokok-pokok *Code of Conduct*. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada kebijakan kepegawaian yang berlaku di perseroan.

Jumlah Pelanggaran Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak menemukan adanya laporan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh insan perseroan.

3. The Code of Conduct is renewed and re-signed annually by Officers and Employees of the Company, and documented by the GCG Team as the coordinator and responsible party;
4. Evaluating the achievement or understanding of all Company Individuals during both the orientation and working periods; and
5. Reviewing the Code of Conduct periodically to develop it further and, if necessary, elaborate it further in various company policies and regulations.

Further information about the company's Code of Conduct can be downloaded from the PPI website: <https://www.ptppi.co.id/governance/good-corporate-governance/>.

Reporting, Handling, and Sanctions for Violations

PPI encourages all employees or external parties to report any actions or suspected violations of (developed by the company as an integral part of the Code of Conduct enforcement process at PPI.

The Company has established strict sanctions for anyone found to violate the principles of the Code of Conduct. The types of sanctions and the mechanism for imposing sanctions refer to the company's personnel policies in force.

Number of Violations in 2023

Throughout 2023, the Company did not receive any reports of complaints regarding violations of the Code of Ethics committed by company individuals.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

LATAR BELAKANG DAN KEBIJAKAN WBS

Sebagai badan usaha milik negara yang berkomitmen menegakkan tata kelola perusahaan yang kuat, Perseroan terus berupaya meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap peraturan dan standar etika yang relevan, sekaligus secara proaktif mencegah potensi pelanggaran.

Oleh karena itu, Perseroan telah mengembangkan dan menerapkan mekanisme pelaporan yang disebut *Whistleblowing System* (WBS), yang dituangkan dalam kebijakan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/ 2018 tanggal 4 Juni 2018 yang mencakup perubahan *Board Manual*, Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi, Penerimaan dan Pemberian Hadiah, Kode Etik, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Pada dasarnya, *Whistleblowing System* (WBS) menjadi platform untuk melaporkan setiap pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Kode Etik, kebijakan perusahaan, dan undang-undang terkait, yang dilakukan oleh insan PPI, yang berpotensi merugikan Perusahaan dan pemangku kepentingannya. Penerapannya menegaskan dedikasi teguh PPI dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif tanpa praktik tata kelola yang tidak etis

Secara umum, Kebijakan WBS perseroan mengatur hal-hal berikut ini:

1. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran
2. Kebijakan Perlindungan Pelapor
3. Apresiasi Pelapor
4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
5. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran
6. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran
7. Administrasi Pelaporan
8. Pemantauan Tindak Lanjut
9. Penyampaian Tanggapan
10. Publikasi dan Sosialisasi

Melalui penerapan WBS, PPI berupaya mendorong seluruh karyawan untuk menjadi lebih berani dan proaktif dalam mencegah/melaporkan pelanggaran, atau dugaan atas pelanggaran etika/peraturan, tanpa ada rasa takut atau keragu-raguan. Tentunya, pelaporan tersebut harus didukung dengan kecukupan bukti awal yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan WBS PPI dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.ptppi.co.id/download/kebijakan-sistem-pelaporan-pelanggaran-wbs/>

WBS BACKGROUND AND POLICY

As a state-owned enterprise committed in upholding robust corporate governance, the Company is dedicated to perpetually enhancing employees' adherence to relevant regulations and ethical standards, while proactively averting potential violations.

Thus, the Company has developed and implemented a reporting mechanism called the Whistleblowing System (WBS), as outlined in a policy established by the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018, which includes amendments to the Board Manual, Policies on Information Classification and Management, Gift Acceptance and Provision, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

Essentially, the Whistleblowing System (WBS) serves as a platform for reporting any breaches of Good Corporate Governance (GCG) principles, the Code of Conduct, company policies, and relevant laws by PPI personnel that could potentially harm the Company and its stakeholders. Its implementation underscores PPI's unwavering dedication to fostering a conducive work environment devoid of unethical governance practices.

In general, the Company's WBS Policy regulates the following:

1. Policy on Receiving and Resolving Violation Reports
2. Whistleblower Protection Policy
3. Whistleblower Appreciation
4. Whistleblowing Team
5. Receipt of Violation Reports
6. Process for Handling Violation Reports
7. Reporting Administration
8. Follow-up Monitoring
9. Submission of Feedback
10. Publication and Outreach

Through the implementation of the WBS, PPI strives to encourage all employees to be more courageous and proactive in preventing/reporting violations, or allegations of ethical breaches/regulations, without fear or hesitation. Naturally, such reports must be substantiated with sufficient strong and accountable initial evidence.

Further information regarding the WBS Policy of PPI can be downloaded from the Company's website: <https://www.ptppi.co.id/download/kebijakan-sistem-pelaporan-pelanggaran-wbs/>

LINGKUP PELAPORAN WBS PPI

Sebagaimana diatur dalam Kebijakan WBS, berikut ini adalah jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain:

- Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
- *Code of Conduct*
- Prinsip-prinsip GCG
- Kecurangan
- Gratifikasi
- Peraturan Perusahaan
- Peraturan Perundang-Undangan
- Regulasi ormativ lain yang relevan dengan bidang usaha PPI.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

PPI secara konsisten melakukan berbagai upaya agar sosialisasi Kebijakan WBS dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan dan *stakeholders* eksternal.

Internalisasi Kebijakan WBS bagi karyawan dilakukan dengan membagikan buku saku mengenai Kebijakan WBS kepada seluruh Unit Kerja. Sementara, sosialisasi kebijakan WBS bagi *stakeholder* eksternal dilakukan dengan mencantumkan kebijakan WBS di dalam situs perseroan serta mengoptimalkan fungsi media sosial perseroan sebagai *tools* untuk meningkatkan *awareness* para pemangku kepentingan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja ditujukan kepada Direksi.
2. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris.
3. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pihak eksternal (*stakeholders*) baik secara lisan maupun tertulis.
4. Perseroan dalam hal ini melalui Tim GCG, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat pihak eksternal (*stakeholders*) mengajukan pelaporan pelanggaran.
5. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada poing 1 di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Disampaikan melalui: PO BOX 1195

SCOPE OF THE COMPANY'S WBS SYSTEM

As stipulated in the WBS Policy, the following are the types of alleged violations that can be reported through WBS, including:

- Corruption, Collusion, Nepotism (KKN)
- Code of conduct
- GCG principles
- Cheating
- Gratuities
- Company regulations
- Legislation
- Other normative regulations relevant to PPI's line of business.

DISSEMINATION OF VIOLATION REPORTING SYSTEM

PPI consistently undertakes various efforts to ensure that the WBS Policy is well-received and understood by all employees and external stakeholders.

Internalization of the WBS Policy for employees is carried out by distributing pocketbooks regarding the WBS Policy to all Work Units. Meanwhile, the dissemination of the WBS policy for external stakeholders is conducted by including the WBS policy on the company's website and optimizing the company's social media functions as tools to enhance stakeholders' awareness.

Violation Reporting Mechanism

1. Reports of suspected violations committed by Employees are directed to the Board of Directors.
2. Reports of suspected violations committed by Directors, the Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are directed to the Board of Commissioners.
3. The Company accepts any reports of violations submitted by external parties (*stakeholders*), whether verbally or in writing.
4. The Company, through the GCG Team, provides explanations regarding the policy and procedures for resolving violation reports when external parties (*stakeholders*) submit violation reports.
5. Reports of suspected violations committed by Employees as referred to in point 1 above can be made using the following mechanism:
 - a. Submitted through: PO BOX 1195

- b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
Direksi
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
up. Tim *Good Corporate Governance* (GCG)
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160
6. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
- Disampaikan melalui: PO BOX 1195
 - Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
Dewan Komisaris
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
up. Tim *Good Corporate Governance* (GCG)
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160
7. Pelaporan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
8. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/ atau pelanggaran yang akan disampaikan.
- b. Sending an official letter addressed to the Board of Directors by hand delivery or by mail to the following address:
Board of Directors
of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
c/o Good Corporate Governance (GCG) Team
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160
6. Reports of suspected violations committed by Directors, the Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners as referred to in point 2 above can be made using the following mechanism:
- Submitted through: PO BOX 1195
 - Sending an official letter addressed to the Board of Directors by hand delivery or by mail to the following address:
Board of Commissioners
of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
c/o Good Corporate Governance (GCG) Team
Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160
7. Written reports of violations should preferably be accompanied by photocopies of identification and supporting evidence such as documents related to the actions/transactions in question and/or the violations being reported.
8. Written reports of violations without identification (anonymous) must be supplemented with supporting evidence such as documents related to the actions/transactions in question and/or the violations being reported.

Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran

- Tim GCG melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Selanjutnya, Tim GCG akan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Apabila hasil verifikasi sebagaimana disebut pada poin 1 di atas menunjukkan bahwa pelaporan yang disampaikan terbukti tidak benar dan tidak memiliki kecukupan bukti maka laporan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.
- Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
- Sementara itu, pelaporan pelanggaran yang melibatkan Pekerja akan ditindaklanjuti diinvestigasi oleh Tim GCG melalui jalur Direksi.

Violation Reporting Handling Process

- The GCG Team verifies incoming reports. Subsequently, the GCG Team will decide whether an investigation into the reported violation is necessary within 30 (thirty) days, extendable up to a maximum of 30 (thirty) working days.
- If the verification results as mentioned in point 1 above indicate that the reported violation is unsubstantiated and lacks sufficient evidence, the report will not be further processed.
- If the verification results indicate indications of a violation accompanied by sufficient evidence, the report may proceed to the investigation stage.
- Meanwhile, reports of violations involving Employees will be investigated by the GCG Team through the Director's channel.

5. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang memerlukan investigasi, akan ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh Tim Pengelola Pelanggaran melalui jalur Dewan Komisaris.
6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Apabila terjadi pelaporan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang hanya sebatas melakukan proses verifikasi, sedangkan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim GCG.
8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.
9. Skema proses pelaporan pelanggaran sebagaimana terlampir.

Perlindungan bagi Pelapor

PPI berkomitmen akan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik beserta keluarganya.

Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, faximili, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
2. Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas (anonim), tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
3. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau PPI. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga Pelapor.
4. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Protection for Whistleblower

PPI is committed to maintaining the confidentiality of the Whistleblower identity and providing assurance of protection to well-intentioned Whistleblower and their families.

Protection for Whistleblower includes:

1. Assurance of reporting channels (telephone, facsimile, mail, email) or an independent, free, and confidential Ombudsman.
2. Assurance of confidentiality of the reporter's identity and the contents of the report. This protection is provided if the Whistleblower provides their identity and information that can be used to contact them. While allowed, anonymous reporting is not recommended. Anonymous reporting complicates communication for follow-up actions.
3. Assurance of protection against retaliation from the accused or PPI. Protection from pressure, delayed promotions, dismissal, legal action, asset seizure, to physical harm and other detrimental treatment. This protection is not only for the Whistleblower but can also extend to the Reporter's family members.
4. Assurance of confidentiality of communication/information channels with the Whistleblower. Information on the follow-up actions, including when and how and to which institution the follow-up actions are submitted, is communicated confidentially to the Whistleblower who provides complete identification.

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

1. Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pekerja:
 - a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b. Direksi menetapkan Tim GCG sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi.
 - c. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja PPI.
2. Kewenangan Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Ketua Komite Audit.
 - d. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Violation Reporting Management Team

1. Authority of the Board of Directors and the Alleged Employee Violation Reporting Management Team:
 - a. The Board of Directors is responsible for the implementation of the Policy on Alleged Employee Violation Reporting Management as stipulated in this Decision.
 - b. The Board of Directors appoints the GCG Team as the Alleged Employee Violation Reporting Management Team. This team is also referred to as the Alleged Employee Violation Reporting Management Team through the Director's channel.
 - c. The Alleged Employee Violation Reporting Management Team through the Director's channel is responsible for following up on reports of violations allegedly committed by PPI Employees.
2. The authorities of the Board of Commissioners and Whistleblowing Team for Reporting Violations Allegedly Committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are as follows:
 - a. The Board of Commissioners is responsible for the implementation of the Management Policy for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners, as stipulated in this Decree.
 - b. The Board of Commissioners establishes a Management Team for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, consisting of representatives from the Audit Committee and other parties as needed in accordance with their competence and expertise based on the decisions of the Board of Commissioners. This team is also known as the Whistleblowing Team for Board of Commissioners.
 - c. The Chairman of the Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is the Chairman of the Audit Committee.
 - d. The Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is tasked with following up on reports of violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Jenis Sanksi yang Diberikan

Apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di PPI, maupun secara umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH PELAPORAN DAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN WBS TAHUN 2023

Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media *Whistleblowing System* sehingga tidak terdapat proses penanganan atau tindak lanjut.

EVALUASI PENERAPAN WBS

PPI secara konsisten melakukan evaluasi terhadap implementasi WBS untuk memastikan bahwa fungsi WBS senantiasa berjalan dengan baik demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta terbebas dari tindak kecurangan atau hal-hal lain yang berpotensi merugikan Perseroan di kemudian hari. PPI juga terus memperkuat kerja sama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyosialisasikan pilar-pilar WBS kepada seluruh karyawan.

Types of Sanctions Imposed

If the Accused is found guilty of committing a violation, the sanctions imposed will refer to the regulations applicable to PPI, as well as generally in accordance with prevailing laws and regulations.

NUMBER OF REPORTS AND RESULTS OF WBS COMPLAINT HANDLING IN 2023

During the year 2023, there were no reports of alleged violations submitted through the Whistleblowing System, thus there were no processing or follow-up actions.

EVALUATION OF WBS IMPLEMENTATION

PPI consistently evaluates the implementation of the WBS to ensure that the WBS functions effectively to create a safe and comfortable working environment and is free from fraudulent activities or other potential harm to the Company in the future. PPI also continues to strengthen cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) in disseminating the pillars of the WBS to all employees.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Corruption and Gratuity Control Policy

Dalam pengelolaan bisnisnya, PPI tetap teguh berupaya memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini ditegakkan melalui peningkatan praktik bisnis sehat yang mengedepankan persaingan sehat, sportivitas, dan profesionalisme, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PPI telah menyusun Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020. Kebijakan ini menegaskan dedikasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memegang teguh pedoman utama pengendalian gratifikasi di lingkungan PPI.

In its business management, PPI remains steadfast in its pursuit to eliminate all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). This commitment is upheld through the promotion of sound business practices that champion fair competition, sportsmanship, and professionalism, while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG).

To actualize this commitment, PPI has devised a Gratuity Control Policy outlined in the Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 3, 2020. This policy underscores the dedication of both the Board of Commissioners and the Board of Directors to uphold the primary guidelines for controlling gratuities within PPI.

Ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan tersebut menguraikan parameter pengelolaan gratifikasi antara karyawan dan entitas eksternal terkait dengan aktivitas bisnis, yang mencakup penerimaan, penyediaan, dan permintaan gratifikasi, serta pembentukan unit manajemen dan mekanisme pelaporan.

DASAR HUKUM

Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PPI berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan KPK No. 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 06 tahun 2015;
4. Surat KPK No. B.143/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
5. Surat Edaran No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang bersih melalui implementasi pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan intern; Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia; dan
6. Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PPI telah memuat ketentuan-ketentuan di antaranya yaitu:

1. Ruang Lingkup Gratifikasi
2. Kategori Gratifikasi (Penolakan Gratifikasi, Penerimaan Gratifikasi, Pemberian Gratifikasi, Permintaan Gratifikasi, dan Alternatif Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi)
3. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
4. Implementasi

Signed on July 10, 2020, by the Board of Commissioners and the Board of Directors, the policy delineates the parameters for managing gratuities between employees and external entities in relation to business activities, encompassing the receipt, provision, and solicitation of gratuities, alongside the establishment of management units and reporting mechanisms.

LEGAL BASIS

The preparation of PPI's Gratuity Control Guidelines refers to the following laws and regulations:

1. Law No. 28 of 2009 concerning Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
3. KPK Regulation No. 02 of 2014 concerning Guidelines for Reporting and Determination of Gratification Status as amended by KPK Regulation No. 06 of 2015;
4. KPK Letter No. B.143/01-13/03/2017 dated March 15, 2017 concerning Guidelines and Limitations of Gratuity;
5. Circular No. SE-2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019 concerning Clean Management of State-Owned Enterprises through the implementation of preventing Corruption, Collusion, Nepotism, and handling conflicts of interest as well as strengthening internal supervision; Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 3, 2020 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia; and
6. Statement of Commitment to Implementing Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

GUIDELINES FOR GRATUITY CONTROL

The Gratuity Control Policy of PPI encompasses provisions including:

1. Scope of Gratification
2. Categories of Gratification (Rejection of Gratification, Acceptance of Gratification, Provision of Gratification, Solicitation of Gratification, and Alternative Utilization of Gratification Receipt)
3. Management of Gratuity Control
4. Implementation

5. Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan
6. Sanksi atas Pelanggaran
7. Perlindungan Pelaporan
8. Ketentuan Tambahan.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PPI telah mengatur batasan pemberian yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diterima oleh insan PPI sehubungan dengan kegiatan penugasan dan jabatannya. Uraian lengkap mengenai kriteria dan ketentuan tersebut sudah diungkapkan secara jelas di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/>. Di samping itu, perseroan juga sudah memiliki Kebijakan ISO Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016.

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Setiap tahun, PPI mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada seluruh insan PPI, di antaranya dengan memuat imbauan mengenai larangan gratifikasi dalam bentuk *pull up banner* dan poster yang dipasang di lingkungan PPI. Selain itu, PPI juga membagikan buku saku tentang Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah kepada seluruh karyawan sebagai salah satu upaya internalisasi pedoman pengendalian gratifikasi pada lingkup PPI.

Kebijakan *Kickbacks* dan Anti-Penyuapan Kickbacks and Anti-Bribery Policy

Kebijakan Suap dan Anti-Penyuapan adalah seperangkat pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk mencegah karyawan, kontraktor, dan agen terlibat dalam praktik korupsi seperti penyuapan, sogokan, atau bentuk perilaku tidak etis lainnya. Kebijakan Anti-Suap menguraikan sikap Perusahaan terhadap penyuapan dan korupsi, dengan menekankan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini biasanya mencakup ketentuan yang melarang karyawan menawarkan, meminta, atau menerima suap dalam bentuk apa pun, baik uang maupun non uang.

PPI telah memiliki kebijakan Anti-Penyuapan yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 29/DU/SKD/PPI/

5. Mechanisms and Procedures for Reporting
6. Sanctions for Violations
7. Protection of Reporting
8. Additional Provisions.

MANAGEMENT OF GRATUITY CONTROL

PPI has defined limits on permissible and impermissible provisions to be received by PPI personnel in relation to their assignments and positions. A comprehensive description of these criteria and provisions has been clearly articulated in the Guidelines for Gratuity Control, accessible through the PPI website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/>. Additionally, the company has implemented the ISO Anti-Bribery Management System Policy ISO 37001:2016.

GRATUITY POLICY DISSEMINATION

Annually, PPI communicates and disseminates the gratuity control policy to all PPI personnel, including by displaying reminders about the prohibition of gratuities in the form of pull-up banners and posters placed within the PPI premises. Moreover, PPI distributes pocketbooks on the Policy for Receiving and Giving Gifts to all employees as part of the internalization efforts for the gratuity control guidelines within PPI's scope.

A Kickbacks and Anti-Bribery Policy is a set of guidelines and rules established by the Company in order to prevent employees, contractors, and agents from engaging in corrupt practices such as bribery, kickbacks, or other forms of unethical behavior. An Anti-Bribery Policy outlines the Company's stance against bribery and corruption, emphasizing compliance with applicable laws and regulations. It usually includes provisions prohibiting employees from offering, soliciting, or accepting bribes in any form, whether monetary or non-monetary.

The PPI has adopted an Anti-Bribery Policy as ratified through Director's Decision Letter No. 29/DU/SKD/PPI/

VII/2020 tanggal 6 Juli 2020. Penyusunan Kebijakan Anti-Penyuapan berpedoman pada perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan Anti-Penyuapan ini menjadi salah satu bentuk upaya dan mitigasi yang dilakukan Perseroan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. PPI berharap seluruh karyawan dengan kesadaran penuh dapat mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalamnya.

VII/2020 dated July 6, 2020. The formulation of the Anti-Bribery Policy is guided by the following legislation and regulations:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and
3. Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.

This Anti-Bribery Policy serves as one of the Company's efforts and mitigations to prevent undesirable actions. PPI hopes that all employees will fully comply with the provisions outlined therein.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Provision of Funds for Social and Political Activities

PPI tidak pernah memberikan dana atau hibah untuk kepentingan kegiatan politik atau kepada partai politik, namun bersedia memberikan dana untuk kepentingan sosial selama hal itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

PPI has never provided funds or grants for political activities or to political parties, but is willing to provide funds for social purposes as long as it is done in accordance with applicable regulations.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Management of State Officials Wealth Reports

LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, adalah laporan wajib yang harus disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaannya pada awal masa jabatan, saat pergantian, kenaikan pangkat, dan pada saat pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah pernyataan harta kekayaan dan kesediaan untuk menjalani pemeriksaan harta kekayaan. Tujuan dibuatnya LHKPN adalah sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya melalui pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.

LHKPN, or Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, is a mandatory report to be submitted by state officials regarding their wealth at the beginning of their term, during any changes, promotions, and upon retirement. Another obligation accompanying the LHKPN is the declaration of wealth and willingness to undergo examinations of their assets. The purpose of creating the LHKPN is as part of the authority held by the Corruption Eradication Commission (KPK) to take preventive measures against corruption, including by registering and examining the LHKPN.

Definisi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut undang-undang ini, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai BUMN, PPI mewajibkan pejabat struktural sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian LHKPN terdiri dari:

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
2. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. PER. KPK No. 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

WAJIB LAPOR LHKPN

Secara khusus, PPI telah memiliki Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 28/DU/SKD/POB/PPI/VII/2019 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Mengacu pada pedoman tersebut, Perseroan menetapkan pejabat perseroan yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, di antaranya:

- Direksi;
- Dewan Komisaris;
- Kepala Divisi
- *Branch Manager*
- Direksi Anak Perusahaan; dan
- Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang tidak sekaligus menjabat Direksi PPI.

The definition of state officials is regulated in Article 1 paragraph 1 of Law No. 28 of 1999 concerning the Administration of the State Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. According to this law, state officials are government officials who perform executive, legislative, or judicial functions, as well as other officials whose main functions and duties are related to the administration of the state in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

As an SOE, PPI requires structural officers up to two levels below the Board of Directors to submit a report on their assets to the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia.

LEGAL BASIS

The legal basis for submitting LHKPN consists of:

1. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free-from-Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) State Apparatus;
2. Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission;
3. PER. KPK No. 02 of 2020 concerning the Procedure for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.

LHKPN MANDATORY REPORTING

In particular, PPI has established Guidelines for Reporting the Wealth of State Officials (LHKPN), based on the Board of Director's Decree Number: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 dated January 31, 2020, regarding the First Amendment to the Board of Director's Decree of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 28/DU/SKD/POB/PPI/VII/2019 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for the Procedure for Reporting the Wealth of State Apparatus (LHKPN) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Referring to these guidelines, the Company designates corporate officials who are required to submit LHKPN to the Corruption Eradication Commission (KPK), including:

- Board of Directors;
- Board of Commissioners;
- Division Heads;
- Branch Managers;
- Subsidiary Board of Directors; and
- Subsidiary Board of Commissioners who do not simultaneously hold positions as Board of Directors of PPI.

Per 31 Desember 2023, dari total sebanyak 61 orang pejabat PPI yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Seluruh pejabat PPI telah melakukan pelaporan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendorong ketepatan waktu dalam penyampaian laporan LHKPN, Direksi telah memberikan imbauan kepada pejabat terkait yang belum memenuhi ketentuan pelaporan LHKPN sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor:001/LHKPN/PPI/I/2021 tentang Kewajiban Pengisian E-LHKPN.

As of December 31, 2023, out of a total of 61 PPI officials are required to submit LHKPN to the KPK. All PPI officials have reported.

In this regard, and to encourage timely submission of LHKPN reports, the Board of Directors has issued a reminder to related officials who have not fulfilled the LHKPN reporting requirements as stated in Note Number: 001/LHKPN/PPI/I/2021 concerning the Obligation to Fill out E-LHKPN.

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices

Dalam kegiatan operasionalnya, PPI senantiasa mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, dan memastikan tidak pernah terjadi praktik tata kelola perusahaan yang buruk di lingkup perusahaan, yang berkaitan dengan:

1. Pencemaran lingkungan;
2. Pelanggaran hukum;
3. Ketidapatuhan terhadap kewajiban pajak;
4. Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan; dan
5. Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

LAPORAN MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat laporan pencemaran lingkungan yang disebabkan, atau terkait dengan aktivitas PPI.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

PPI senantiasa mematuhi perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal perpajakan sehingga sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan PPI tidak pernah memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan.

Pada tahun 2023, PPI membayar pajak sebesar Rp71.907, meningkat/menurun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp107,44 miliar.

In its operational activities, PPI always complies with applicable rules and regulations, and ensures that there are no bad corporate governance practices occurring within the Company, which relates to:

1. Environmental pollution;
2. Violation of the law;
3. Non-compliance with tax obligations;
4. Violation of employee rights; and
5. Non-compliance of financial reporting with applicable regulations.

REPORT ON ENVIRONMENTAL POLLUTION

Throughout 2023, there were no reports of environmental pollution caused by, or related to PPI activities.

FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

PPI always complies with applicable laws including in terms of taxation so that until this Annual Report is published PPI has never had a case related to taxation.

In 2023, in total, PPI paid taxes amounting to IDR71.907, an increase/decrease compared to the previous year, which was IDR107.44 billion.

Kontribusi Perpajakan Tahun 2023 & 2022

Tax Contribution in 2023 & 2022

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2023	2022
Kontribusi Pajak / Tax Contribution		
PPh Pasal 4 (2) / Income Tax Article 4 (2)	498	1.440
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	8.469	8.871
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	7.347	8.425
PPh Pasal 22 Import / Income Tax Article 22 Import	7.533	2.943
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	798	887
PPh Pasal 25 / Income Tax Article 25	17.534	4.630
PPN	1.837	13.731
PPN - WAPU / VAT-WAPU	25.955	26.345
Jumlah Kontribusi Pajak Total Tax Contribution	69.970	66.973
Kontribusi Pajak Lainnya Other Tax Contribution		
Pajak Bumi & Bangunan / Property Tax	4.831	6.381
Pajak Kendaraan / Vehicle Tax	1.070	793
Bea Masuk / Customs	4.101	710
Jumlah Kontribusi Pajak Lainnya Total Tax Contribution Others	10.002	7.883
JUMLAH TOTAL	79.972	74.856

Ketidakesesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi, analisa dan pembahasan kinerja di dalam laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan PPI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan .

Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All information presentation, analysis, and performance discussions within this annual report are based on the PPI Financial Statements for the years ending December 31, 2023, and December 31, 2022, which have been audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

The Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely the Financial Accounting Standards Statement (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Standards Board ("DSAK") and applicable Capital Market Regulations, including Regulation No. VIII.G.7 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) regarding Financial Statements Presentation Guidelines, Chairman of Bapepam-LK Decree No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan

Policy on Company Information Classification and Management

PPI telah menerapkan Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan yang bertujuan untuk mengkategorikan informasi dan menetapkan mekanisme pengungkapan internal dan eksternal. Inisiatif ini selaras dengan kepentingan PPI, persyaratan pemegang saham, dan harapan para pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan informasi PPI dilakukan secara profesional dan prudent oleh Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat. Divisi ini yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Namun demikian, seluruh Pejabat PPI tetap bertanggung jawab terhadap keamanan informasi PPI yang meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan atas informasi perseroan di unit kerja masing-masing.

Perseroan memiliki Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi yang ditujukan sebagai panduan yang jelas bagi seluruh Insan PPI. Panduan ini mengatur klasifikasi dan mekanisme dalam memperlakukan informasi perusahaan agar pengungkapan informasi perusahaan dilakukan dengan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan Perseroan.

Uraian lengkap mengenai Pedoman Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance>.

PPI has implemented a Corporate Information Classification and Management Policy aimed at categorizing information and establishing mechanisms for internal and external disclosure. This initiative aligns with PPI's interests, the requirements of shareholders, and the expectations of other stakeholders associated.

PPI's information management is carried out professionally and prudently by the Corporate Secretary and Public Relations Division. This division is directly responsible to the President Director.

However, all PPI Officers remain responsible for PPI's information security which includes the arrangement, implementation and management of company information in their respective work units.

The Company has an Information Classification and Management Policy which serves as a clear guide for all PPI personnel. This guideline regulates the classification and mechanism in treating corporate information so that the disclosure of corporate information is carried out by always complying with applicable laws and regulations and does not harm the Company.

A complete description of the Information Classification and Management Policy Guidelines can be found on PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance>.

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Governance

KEBIJAKAN

PPI memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan Surat Peraturan Direksi nomor 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan. SOP tersebut menjelaskan hal-hal mengenai ketentuan, prosedur dan proses pengadaan.

POLICY

PPI has established formal policies concerning the procurement of goods and services, in accordance with the Board of Directors Decree Number: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 dated July 29, 2011, concerning the Guidelines for the Implementation of Company Operational Activities based on Company Standard Operating Procedures (SOP), as well as the Board of Directors Regulation Letter number 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 concerning Guidelines for Procurement of Trade Goods. The SOP provides detailed information regarding provisions, procedures, and the procurement process.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG

PPI senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel dalam proses pengadaan.

PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN TAHUN 2023

Secara umum proses pengadaan barang dan jasa Perseroan selama tahun buku 2023 telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Perseroan tidak ditemukan adanya temuan terkait aspek pengadaan barang dan jasa oleh auditor internal dan eksternal yang signifikan.

PRINCIPLES OF PROCUREMENT

PPI consistently upholds formal principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, reasonableness, and accountability throughout the procurement process.

IMPLEMENTATION OF THE PROCUREMENT PROCESS IN 2023

In general, the Company's procurement process for goods and services during the fiscal year 2023 has proceeded in accordance with established regulations. No significant findings pertaining to the procurement of goods and services were identified by either internal or external auditors.

Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Commitment to Fulfilling The Rights of Creditors

Perseroan memiliki kebijakan terkait hubungan dengan kreditur sebagaimana telah dijelaskan di dalam:

1. Pedoman GCG, pada bagian Pedoman bagi *Stakeholder*, aspek Kreditur; dan
2. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) pada bagian Etika Usaha Perusahaan, aspek Hubungan dengan Kreditur.

Dalam kebijakan tersebut antara lain dijelaskan bahwa Perseroan memenuhi hak-hak kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati. PPI melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukannya serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal dalam upaya menjaga kepercayaan kreditur.

The Company has policies regarding relationships with creditors as described in:

1. GCG Guidelines, in the Stakeholder Guidelines section, regarding Creditors; and
2. Business Ethics and Code of Conduct in the Company's Business Ethics section, regarding Relationships with Creditors.

These policies outline the Company's commitment to honoring creditors' rights as stipulated in the agreed-upon agreements. PPI manages loan funds effectively according to their purposes and strives for optimal repayment rates in an effort to maintain creditor trust.

Kebijakan Seleksi Pemasok

Supplier Selection Policy

PPI memiliki kebijakan dan pedoman yang digunakan sebagai panduan untuk menjalin hubungan dengan pemasok, antara lain diatur dalam:

- 1) Peraturan Direksi Nomor: 036/DU/SKD/PPI/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Ketentuan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Barang Dagangan; dan
- 2) Surat Keputusan Direksi Nomor: 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PPI, mulai dari analisa kebutuhan, proses dan tahapan pengadaan barang/jasa sampai dengan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Dalam praktiknya, pelaksanaan hubungan dengan pemasok/rekanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seleksi pemasok/rekanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persyaratan yang terukur dan jelas.
- 2) PPI memberikan informasi yang sama kepada setiap rekanan terkait peluang atau rencana pengadaan, persyaratan, tata cara serta melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka sampai dengan penetapan calon pemenang penyedia barang dan/atau jasa. Akses informasi peluang pengadaan barang/jasa dimuat dalam website Perseroan.
- 3) PPI memberikan peluang yang sama bagi calon pemasok sepanjang aturan dan ketentuan yang telah ditentukan diikuti oleh calon pemasok. Pemilihan calon pemasok dilakukan PPI berdasarkan proses atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

PPI melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemasok/rekanan (*vendor performance*) untuk melihat keterlibatan pemasok/rekanan dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas dan kebutuhan Perseroan serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perseroan untuk menggunakan kembali rekanan/pemasok yang bersangkutan.

PPI has policies and guidelines that are used as guidance for building relationships with suppliers, including those regulated in:

- 1) The Board of Directors Regulation Number: 036/DU/SKD/PPI/IV/2016 dated April 13, 2016, regarding Changes to the Provisions and Procedures for the Procurement of Non-Trade Goods and Services; and
- 2) The Board of Director's Decree Number: 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 regarding Guidelines for the Procurement of Merchandise.

The procurement for goods and services are carried out in accordance with the provisions and procedures applicable at PPI, starting from needs analysis, the procurement process, and stages of goods/services procurement up to payment in accordance with the requirements in the agreement. In practice, the implementation of relationships with suppliers/vendors can be explained as follows:

- 1) Supplier/vendor selection is carried out in accordance with applicable regulations with measurable and clear requirements.
- 2) PPI provides the same information to each vendor regarding procurement opportunities or plans, requirements, procedures, and conducts the procurement process for goods and services openly until the determination of the prospective winning provider of goods and/or services. Information access for procurement opportunities for goods/services is posted on the company's website.
- 3) PPI provides equal opportunities for prospective suppliers as long as the rules and regulations established are followed by the prospective suppliers. The selection of prospective suppliers is carried out by PPI based on the processes or stages established in the Procurement Procedures for Goods and Services.

PPI conducts assessments and evaluations of suppliers/vendors (*vendor performance*) to observe the involvement of suppliers/vendors in supporting the company's activities and needs and is used as consideration for the Company to reuse the respective vendors/suppliers.

Bab 07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Di PPI, kami percaya bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan bagian integral dari misi kami untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan serta kesejahteraan karyawan dan masyarakat yang kami layani.

At PPI, we believe that responsible business practices are integral to our mission of driving sustainable growth while contributing to environmental stewardship as well as the well-being of our employee and the communities we serve.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Dengan mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, Perusahaan juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan dalam buku yang terpisah dari Laporan Tahunan. Namun demikian, Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan Perusahaan.

Dengan mengacu pada GRI Standard, Laporan Keberlanjutan 2023 yang diterbitkan Perusahaan memuat berbagai informasi yang elaboratif dan komprehensif mengenai kinerja keberlanjutan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) Perseroan pada tahun 2023. Selain itu, Laporan Keberlanjutan Perusahaan juga memuat pernyataan komitmen dan strategi keberlanjutan Perseroan. Melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkannya, PPI ingin membuktikan komitmennya atas transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta untuk membantu Perusahaan dalam mengelola risiko keberlanjutan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Atas alasan tersebut di atas, maka Laporan Tahunan ini tidak memuat informasi lengkap mengenai kegiatan TJSL. Namun Laporan Tahunan ini memuat ringkasan kinerja keberlanjutan Perusahaan pada tahun 2023 untuk memberi gambaran besar kepada Pemangku Kepentingan mengenai pencapaian keberlanjutan Perusahaan di tahun 2023.

Laporan Keberlanjutan Perseroan tersedia pada situs web Perseroan <https://www.ptppi.co.id/>

Referring to POJK No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as well as SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of Annual Reports, the Company also publishes a Sustainability Report in a separate book from the Annual Report. However, the Sustainability Report is an integral part of the Company's Annual Report.

In accordance with GRI Standards, the Company's 2023 Sustainability Report contains various elaborative and comprehensive information regarding sustainability performance and the implementation of the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) programs in 2023. Additionally, the Company's Sustainability Report also includes statements of commitment and sustainability strategies. Through the publication of its Sustainability Report, the Company aims to demonstrate its commitment to transparency, accountability, and responsible business practices, as well as to assist the Company in managing sustainability risks and creating long-term value for all stakeholders.

For these reasons, this Annual Report does not contain comprehensive information about CSR activities. However, this Annual Report provides a summary of the Company's sustainability performance in 2023 to give stakeholders an overview of the Company's sustainability achievements in 2023.

The Company's Sustainability Report is available on the Company's website <https://www.ptppi.co.id/>.



Bab

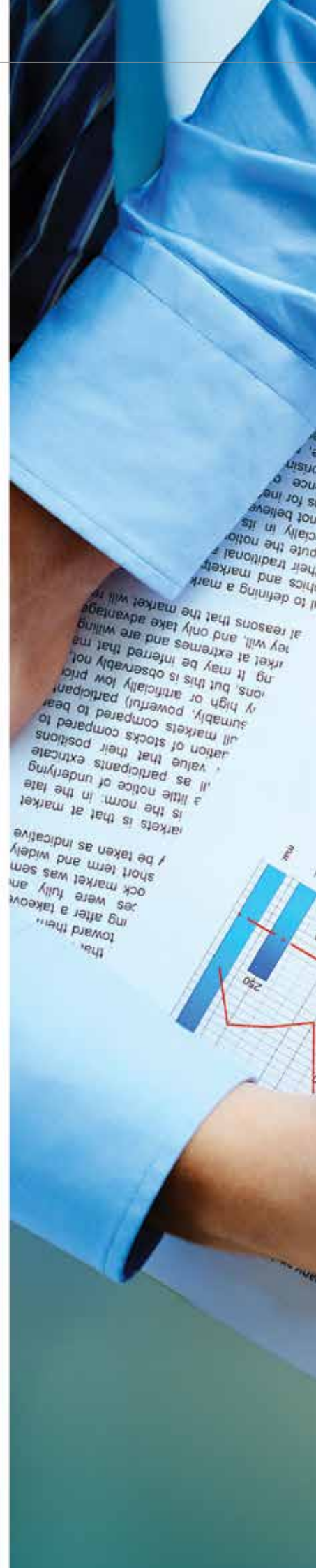
08

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

Laporan keuangan kami menjadi bukti komitmen kami terhadap transparansi, dengan memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai aktivitas keuangan kami. Dengan membagikan catatan rinci ini, kami menjunjung tinggi akuntabilitas kami kepada para pemangku kepentingan, memastikan kepercayaan dan keyakinan dalam operasi kami.

Our financial statements serve as a testament to our commitment to transparency, providing clear and accurate accounts of our financial activities. By sharing these detailed records, we uphold our accountability to stakeholders, ensuring trust and confidence in our operations.







PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak/*and Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

*Consolidated Financial Statements
for the year ended
31 December 2023*

beserta Laporan Auditor Independen/
with Independent Auditor's Report thereon

Daftar Isi/ *Table of Contents*

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Direksi / *Directors Statement*

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian/ *Consolidated Financial Statements*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / <i>Statements of Consolidated Financial Position</i>	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Changes in Equity</i>	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Cash Flows</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	7 – 127
Lampiran/ <i>Appendices</i>	
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)/ <i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>	i – ii
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>	iii

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/**

***DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA AND SUBSIDIARIES***

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama/ Name | : Soegeng Hernowo |
| Alamat Kantor/ Office Address | : Jl. Abdul Muis No. 8-10, Jakarta Pusat, 10160 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card | : Jl. H. Tholib Nomor 1-B, Cipete, Kebayoran Baru |
| Nomor Telepon/ Phone Number | : +62 21 386 2141-42 |
| Jabatan/ Position | : Direktur Utama/ President Director |
| 2. Nama/ Name | : Wien Irwanto |
| Alamat Kantor/ Office Address | : Jl. Abdul Muis No. 8-10, Jakarta Pusat, 10160 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card | : Duta Bintaro B-1/9, Pakujaya, Serpong Utara |
| Nomor Telepon/ Phone Number | : +62 21 386 2141-42 |
| Jabatan/ Position | : Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum/
Director of Finance, Risk Management, Human Resources &
General |

Menyatakan bahwa:

Stated that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan entitas anak; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and subsidiaries;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan Keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material; | b. <i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material information and fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan entitas anak. | 4. <i>We are responsible for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and subsidiaries internal control system.</i> |
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *The statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 26 Maret 2024/ March 26, 2024

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum/
Director of Finance, Risk Management, Human Resources &
General



Soegeng Hernowo

Wien Irwanto



No. : 00865/2.1133/AU.1/05/0259-1/1/III/2024

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris
dan Direksi
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Laporan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Entitas Anaknya (“Grup”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor’s Report

*The Shareholders, Commissioners,
and Directors
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Report on the Audit of the Consolidated Financial
Statements*

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and its subsidiaries (“the Group”) which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including information relating to material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards established by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang mengungkapkan nilai buku aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.917.944.433.415. Nilai buku tersebut termasuk:

- Tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga sebesar Rp 18.515.431.625, dan
- Tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa sebesar Rp 82.650.664.990.

Kami juga membawa perhatian ke catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang mengungkapkan nilai buku aset lain-lain (aset tetap yang tidak dimanfaatkan) pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 419.540.656.287. Nilai buku tersebut termasuk:

- Tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga sebesar Rp 4.920.446.578, dan
- Tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa. sebesar Rp 235.979.462.902.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 14 to the attached consolidated financial statements which discloses the book value of fixed assets as at 31 December 2023 amounting to Rp 1,917,944,433,415. The book value includes:

- *Land and buildings that do not yet have Right to Use certificates or other proof of ownership documents and are physically controlled by third parties amounting to Rp 18,515,431,625, and*
- *Land and buildings which Right to Use certificates had expired amounting to Rp 82,650,664,990.*

We also draw attention to Note 18 to the consolidated financial statement which discloses the book value of other assets (unused fixed assets) as at 31 December 2023 amounting to Rp 419,540,656,287. The book value includes:

- *Land and buildings that do not yet have Right to Use certificates or other proof of ownership documents and are physically occupied by third parties amounting to Rp 4,920,446,578 and*
- *Land and buildings which Right to Use certificates had expired amounting to Rp 235,979,462,902.*

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



**Laporan atas Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Lain**

***Report on Other Legal and Regulatory
Requirements***

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal yang merupakan tanggung jawab manajemen Group.

We also conducted test of compliance with laws and regulations and internal control which are responsibility of the Group's management.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. PHHARP-AL/086/YS/DA/2024 dan No. PHHARP-AL/087/YS/DA/2024 tertanggal 26 Maret 2024.

The reports on compliance with certain regulations and internal controls are submitted to the management, separately in our reports No. PHHARP-AL/086/YS/DA/2024 and No. PHHARP-AL/087/YS/DA/2024 dated 26 March 2024.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Drs. Sikanto, Ak., CA., CPA., Asean CPA., M.M
Register Akuntan Publik/ *Public Accountant Registered No. AP.1655*



26 Maret / *March* 2024

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Statements of Consolidated Financial Position
As at 31 December 2023
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	3e, 5	62.709.091.702	181.417.662.371	Cash and Cash Equivalents
Deposito Berjangka	6	-	3.000.000.000	Time Deposits
Piutang Usaha	3f, 7			Trade Receivables
Pihak Berelasi		207.384.796.480	155.699.137.591	Related Parties
Pihak Ketiga		242.413.049.050	275.593.638.499	Third Parties
Piutang Lain-Lain	8	51.208.776.900	60.966.897.707	Other Receivables
Persediaan	3h, 9	113.342.843.162	97.027.966.024	Inventories
Uang Muka	3i, 10	120.956.257.670	113.857.090.222	Advances
Pajak Dibayar Dimuka	25a	63.397.481.244	55.841.283.523	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	3i, 11	10.539.517.502	13.035.553.643	Prepaid Expenses
Biaya Operasi dalam Proses	12	18.929.682.717	27.980.946.657	Operation Costs in Process
Jumlah Aset Lancar		890.881.496.427	984.420.176.237	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Investasi pada Entitas				Investment in
Asosiasi	13	7.520.672.339	8.372.650.462	Associates
Aset Tetap	3j, 14	1.917.944.433.415	1.959.994.688.400	Fixed Assets
Aset Tidak Berwujud	15	18.640.047.252	19.705.899.498	Intangible assets
Properti Investasi	3k, 16	1.285.459.000.000	1.121.278.365.153	Investment Properties
Aset Hak Guna	17	19.582.478.888	7.344.079.928	Right of Use Assets
Aset Pajak Tangguhan	25c	34.968.724.654	36.805.214.050	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	18	446.168.091.531	447.446.044.927	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.730.283.448.079	3.600.946.942.418	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		4.621.164.944.506	4.585.367.118.655	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statement form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**

Statements of Consolidated Financial Position
(continued)

As at 31 December 2023

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	19			Trade Payables
Pihak Berelasi		70.187.103.313	52.119.587.840	Related Parties
Pihak Ketiga		184.727.553.779	305.191.151.013	Third Parties
Utang Pajak	25b	18.501.786.381	7.060.350.848	Taxes Payable
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek				Other Current
Lainnya	20	31.030.292.863	38.597.913.803	Financial Liabilities
Liabilitas Sewa	21	379.039.341	664.204.976	Lease Liabilities
Beban Yang Masih Harus Dibayar	22	82.407.262.083	69.005.300.485	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima				Unearned Revenues
Dimuka – jangka pendek	3s, 23	69.953.061.735	83.848.616.144	- current portion
Utang Bank – Jangka Pendek	24	258.629.659.906	173.802.032.540	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Panjang yang				Current Portion
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	26	15.417.371.970	24.061.349.309	of Long Term Loans
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		731.233.131.371	754.350.506.958	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang	26	907.074.320.324	913.847.714.953	Long Term Loans
Pendapatan Diterima				
Dimuka	3s, 23	66.687.069.263	42.724.542.760	Unearned Revenues
Liabilitas Sewa	27	-	54.425.994	Lease Liabilities
				Post-Employment
				Benefits
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	28	17.230.968.112	38.787.165.185	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		990.992.357.699	995.413.848.892	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		1.722.225.489.070	1.749.764.355.850	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham	3w, 29	942.745.000.000	942.745.000.000	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	1e	(231.042.410.552)	(231.042.410.552)	Additional Paid in Capital
Saldo laba				Retained Earnings
Telah ditentukan				
Penggunaannya				Appropriated
Cadangan Umum	30	111.890.435.294	111.890.435.294	General Reserves
Cadangan Khusus	31	1.531.912.169	1.531.912.169	Specific Reserves
Belum ditentukan				
Penggunaannya	32	2.073.773.294.954	2.010.438.746.181	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat				Total equity
diatribusikan kepada pemilik				attributable to
Entitas		2.898.898.231.865	2.835.563.683.092	owner of the Entity
Kepentingan non –pengendali	33	41.223.571	39.079.713	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		2.898.939.455.436	2.835.602.762.805	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.621.164.944.506	4.585.367.118.655	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statement form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
**Statements of Consolidated Profit or Loss and Other
Comprehensive Income**
For the Year ended
31 December 2023
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Usaha	3r, 34	2.289.292.024.670	2.367.519.377.945	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	35	(1.986.949.638.604)	(1.969.866.797.099)	Cost of Revenues
LABA KOTOR		302.342.386.066	397.652.580.846	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan dan Distribusi	36	(13.508.046.861)	(15.716.466.664)	Distribution and Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	37	(322.405.015.419)	(300.867.574.467)	General and Administration Expenses
Beban Usaha		(335.913.062.280)	(316.584.041.131)	Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA		(33.570.676.214)	81.068.539.715	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA				NON OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non-Usaha	38	191.235.816.087	60.506.581.580	Non-Operating Income
Beban Non-Usaha	38	(127.142.087.893)	(65.712.439.213)	Non-Operating Expense
Pendapatan (Beban) Non-Usaha - Bersih		64.093.728.194	(5.205.857.633)	Non-Operating Income (Expense) - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		30.523.051.980	75.862.682.082	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
Penghasilan (Beban) Pajak:				Tax Benefit (Expense):
Pajak Final	25c	(17.108.603.083)	(16.444.673.079)	Final Tax
Pajak Kini	25c	(8.029.640.520)	(9.032.834.641)	Current Tax
Pajak Tanggahan	25c	11.316.952.807	(1.296.013.874)	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak		(13.821.290.796)	(26.773.521.594)	Total Tax Benefit (Expense)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		16.701.761.184	49.089.160.488	NET PROFIT (LOSS) FOR CURRENT YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	28c	8.655.175.966	(10.767.528.497)	Remeasurement of Employee Benefits
Perubahan nilai wajar aset Keuangan		(851.978.123)	(2.049.631.112)	Changes in fair value of Financial assets
Perubahan nilai wajar aset non Keuangan		51.985.175.808	11.265.571.490	Changes in fair value of non Financial assets
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi		(13.153.442.204)	627.543.665	Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan		46.634.931.447	(924.044.454)	Other Comprehensive Income for Current Year
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		63.336.692.631	48.165.116.034	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR CURRENT YEAR

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian** (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
**Statements of Consolidated Profit or Loss and Other
Comprehensive Income** (continued)
For the year ended
31 December 2023

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Laba Bersih yang Distribusikan kepada:				Net Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		16.699.617.326	49.084.983.601	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali		2.143.858	4.176.887	Non-controlling Interest
		16.701.761.184	49.089.160.488	
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Distribusikan kepada:				Comprehensive Income (Loss) Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		63.334.548.773	48.131.684.981	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non pengendali	33	2.143.858	33.431.053	Non-controlling Interest
		63.336.692.631	48.165.116.034	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statement form an integral part of these consolidated financial statements.

	Saldo Laba (Rugi) / Retained Earnings							Description	
	Telah ditentukan penggunaannya/		Belum ditentukan penggunaannya/		Kewajiban Non Pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah/ Total	Jumlah/ Total		
	Appropriated	Unappropriated	Appropriated	Unappropriated					
	Modal Saham/ Description Shares Capital	Tambahan modal disector/ Additional paid in capital	Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Khusus/ Specific Reserve					
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.962.307.061.200	2.787.431.998.111	5.648.660	2.787.437.646.771	Balance as at 31 December 2021
Labai bersih tahun berjalan	-	-	-	-	49.084.983.601	49.084.983.601	4.176.887	49.089.160.488	Total comprehensive income for current period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	(953.298.620)	(953.298.620)	29.254.166	(924.044.454)	income for current period
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	2.010.438.746.181	2.835.563.683.092	39.079.713	2.835.602.762.805	Balance as at 31 December 2022
Labai bersih tahun berjalan	-	-	-	-	16.699.617.326	16.699.617.326	2.143.858	16.701.761.184	Net profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	46.634.931.447	46.634.931.447	-	46.634.931.447	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	2.073.773.294.954	2.898.898.231.865	41.223.571	2.898.939.455.436	Balance as at 31 December 2023

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statement form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Statements of Consolidated Cash Flows
For the year ended
31 December 2023
(Expressed in Rupiah)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	2.178.457.845.563	2.395.403.333.932	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(2.400.843.938.640)	(2.342.347.792.285)	Cash payment to vendors and employees
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya	64.093.728.194	(25.764.062.063)	Cash payment to operational expenses and others
Pembayaran pajak	(25.138.243.604)	(47.449.996.493)	Tax payment
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(183.430.608.487)	(20.158.516.909)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(8.610.363.131)	(8.579.570.355)	Acquisition of fixed assets
Penambahan properti investasi	-	(463.346.667)	Addition of investment property
Penarikan (penempatan) deposito	3.000.000.000	18.828.113.040	Withdrawal (placement) deposit
Penambahan aset lain-lain	1.277.953.396	(2.450.020.124)	Acquisition of other assets
Penambahan aset tidak berwujud	(16.216.216)	(885.200.000)	Acquisition of intangible assets
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(4.348.625.951)	6.449.975.894	Net cash provided from (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS IN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka pendek lainnya	84.827.627.366	35.318.983.155	Receipts (payments) of other current financial liabilities
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka Panjang	(15.417.371.968)	(13.148.697.683)	Receipts (payments) of long term loans
Pembayaran liabilitas sewa	(339.591.629)	(103.016.634)	Payment of lease liabilities
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	69.070.663.769	22.067.268.838	Net cash provided from financing activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(118.708.570.669)	8.358.727.823	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan setara kas – pada awal tahun	181.417.662.371	173.058.934.548	Cash and cash equivalents – at the beginning of the year
KAS DAN SETARA KAS – PADA AKHIR TAHUN	62.709.091.702	181.417.662.371	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statement form an integral part of these consolidated financial statements.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (“Entitas”) atau Indonesia Trading Company (ITC) merupakan hasil penggabungan dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Cipta Niaga (Persero), yang bergerak di bidang perdagangan ekspor, impor, dan distribusi. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Pasal 34 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang penggabungan PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero) kedalam PT Cipta Niaga (Persero) yang berganti nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Penggabungan PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Dharma Niaga (Persero) ke dalam PT Cipta Niaga (Persero) disepakati melalui rancangan penggabungan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing perusahaan tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2003 yang dikukuhkan dengan akta notaris Betsail Untajana, S.H No.4 tanggal 9 Juni 2003. Penggabungan ketiga perusahaan tersebut disahkan dengan akta Risalah Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H tanggal 9 Juni 2003 yang antara lain mengesahkan perubahan nama perusahaan menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, perubahan anggaran dasar serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No.C-14008 HT.04- TH.2003 tanggal 19 Juni 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 75 Tambahan No. 8784 tanggal 19 Juni 2003.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (“The Entity”) or Indonesia Trading Company (ITC) is the merger of three State-Owned Enterprises (BUMN), PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) and PT Cipta Niaga (Persero), which engaged in export trade, import and distribution. The merger was conducted under Act No. 1 of 1995 concerning Limited Companies and Government Regulation No.27 of 1998 Article 34 regarding Merger, Consolidation and Takeover of Limited Company and Government Regulation No.22 Year 2003 dated 31 March 2003 regarding merger of PT Dharma Niaga (Persero) and PT Pantja Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) which was renamed PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The merger of PT Pantja Niaga (Persero) and PT Dharma Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) was agreed through the draft merger in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the respective company held on 4 February 2003 as certified by notarial deed of Betsail Untajana, S.H No.4 dated 9 June 2003. The merger of the three companies was approved by deed of Extraordinary Shareholders Meeting of Notary Public Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H No.3 dated 9 June 2003 which among others legalized the change of company’s name to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, amendment of articles of association and increase of authorized capital, issued and paid-up capital. The amendment of the articles of association was approved by the Ministry of Law and Human Rights through its Decision Letter No.C-14008 HT.04-TH.2003 dated 19 June 2003 and published in State Gazette No.75 Supplement No. 8784 dated 19 June 2003.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No:S-922/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H., Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Kantor pusat Entitas berlokasi di Graha PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

b. Bidang Usaha

Entitas melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Entitas untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha utama Entitas yaitu perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri yang mencakup ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan dan juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan umum, industri, bahan bahan konstruksi, alat-alat Kesehatan, treatment air limbah, pergudangan, penyedia akomodasi, penyedia makanan minuman, real estate, sewa guna dan laboratorium, jasa perdagangan, perdagangan besar farmasi, minyak dan gas serta produk turunannya.

I. G E N E R A L (continued)

a. Establishment and General Information
(continued)

Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: S-922/MBU/12/2021 dated 2 December 2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia which was notarized under Deed No.3 dated 2 December 2021 by Aulia Taufani, S.H., the Ministry of State Owned Enterprises agreed to restructure State Owned Enterprises through the merger of PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The Entity's head office is located at Graha PPI Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

b. Scope of Business

The Entity is to conduct business in the field of general trading, as well as optimise the utilization of resources owned by the Entity to produce high quality goods and/or services with strong competitiveness to generate profit/ by applying the principles of Limited Liability Company. The Entity's main business activities are international trade and domestic trade covering export, import, inter island, local trade, distribution, representative and agency as well as procurement of agricultural, forestry, plantation, fishery, mining industry, construction materials, medical devices wastewater treatment, warehousing, accommodation providers, food and beverage providers, real estate, leasing and laboratories, trade services, pharmaceutical wholesale, oil and gas and its derivative products.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

b. Bidang Usaha (lanjutan)

Disamping kegiatan usaha utama tersebut Entitas dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki yaitu sewa gedung, sewa gudang, sewa kantor, sewa ruko, sewa lahan, transportasi, properti, pariwisata dan melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Entitas menjalankan kegiatan usahanya melalui Kantor Pusat di Jakarta dan:

- (1) Kantor Cabang Regional (10 Kantor Cabang Regional);
- (2) Kantor Cabang, (22 Kantor Cabang);
- (3) Kantor Sub Cabang, (2 Kantor Sub Cabang);
- (4) Kantor Depo.

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (Catatan 46):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Bara Khrisna Hasibuan ¹⁾
Komisaris	Muhammad Kapitra Ampera ²⁾
Komisaris	Hamli
Komisaris	Setiawan Wangsaatmaja

Dewan Direksi

Direktur Utama	Nina Sulistyowati ³⁾
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	Wien Irwanto
Direktur Komersial & Pengembangan	Andry Tanudjaja ⁴⁾
Direktur Operasi	Tri Wahyundo Hariyatno ⁵⁾

¹⁾ Digantikan oleh Ir. Hamli sejak 3 November 2023 (catatan 46).

²⁾ Muhammad Kapitra Ampera diberhentikan sejak 3 November 2023 (Catatan 46).

³⁾ Nina Sulistyowati digantikan oleh Ir. Soegeng Hernowo sejak 26 Juni 2023 (Catatan 46).

I. G E N E R A L (continued)

b. Scope of Business (continued)

In addition to the principal business activities, the Entity may conduct business activities in the framework of optimizing the utilization of its own resources, namely building rental, warehouse lease, office rent, rental shop, land rental, transportation, property, tourism and carry out government assignments in accordance with the principles of corporate governance and laws and legislation.

The Entity carried out its business activities through Head Office in Jakarta and:

- (1) Regional Branch Offices, (10 Regional Branch Offices);*
- (2) Branch Offices, (22 Branch Offices);*
- (3) Sub-Branch Office, (2 Sub-Branch Offices);*
- (4) Depo Office.*

c. The composition of the Board of Commissioners and Directors

The composition of the Entity's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2023 and 2022 are as follows (Notes 46):

Board of Commissioner

<i>President Commissioner</i>
<i>Commissioner</i>
<i>Commissioner</i>
<i>Commissioner</i>

Board of Director

<i>President Director</i>
<i>Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs</i>
<i>Director of Commercial & Development</i>
<i>Director of Operation</i>

¹⁾ *Replaced by Ir. Hamli effective from 3 November 2023 (Notes 46).*

²⁾ *Muhammad Kapitra Ampera discharged effective from 3 November 2023 (Notes 46).*

³⁾ *Nina Sulistyowati replaced by Ir. Soegeng Hernowo effective from 26 June 2023 (Notes 46).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
(lanjutan)

**c. The composition of the Board of
Commissioners and Directors** (continued)

- ⁴⁾ Andry Tanudjaja digantikan oleh Edhy Rizwan sejak 26 Juni 2023 (Catatan 46).
⁵⁾ Tri Wahyundo Hariyatno digantikan oleh Noverita Anggraeny sejak 18 Desember 2023 (Catatan 46).

- ⁴⁾ Andry Tanudjaja was replaced by Edhy Rizwan effective from 26 June 2023 (Note 46).
⁵⁾ Tri Wahyundo Hariyatno was replaced by Noverita Anggraeny effective from 18 December 2023 (Note 46).

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

d. Consolidated Subsidiaries

Kepemilikan Entitas pada entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

The Entity's ownership in the consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Dimulainya Kegiatan Komersial/ Commencement of Commercial Activities	Jumlah Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Elimination (Rp)	
			2023	2022		2023	2022
PT PPI Industri	Palembang	Manufaktur dan Perdagangan/ Manufacturing and Trading	99,90%	99,90%	18 Sep 1986	55.114.867.355	64.571.653.391
PT BGR Logistik Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai/ formerly known as PT Trisari Veem)	Jakarta	Jasa Logistik/ Logistic Services	99,96%	99,96%	19 Nov 1963	280.798.927.944	235.172.049.154
PT PPI Property	Jakarta	Manajemen Poperti / Property Management	99,96%	99,96%	-	-	-

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Industri (PT PPI Industri)**

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri) sebelumnya dikenal sebagai PT Dharma Niaga Putera Steel didirikan berdasarkan akta notaris Syamsul Hadi, S.H No. 33 tanggal 18 September 1986.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Industri (PT PPI Industri)**

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri) formerly known as PT Dharma Niaga Putera Steel was established based on notarial deed of Syamsul Hadi, S.H No. 33 dated 18 September 1986.

**PT BGR Logistic Indonesia (sebelumnya
dikenal sebagai PT Trisari Veem)**

PT Trisari Veem didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963.

**PT BGR Logistic Indonesia (formerly
known as PT Trisari Veem)**

PT Trisari Veem was established based on notarial deed of Eliza Pondaag, S.H., No.49 dated 19 November 1963.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT BGR Logistic Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S.H No.20 tanggal 13 Oktober 2021. Entitas menambah kepemilikan dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp 1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Kurnia Ariyani, S.H., No 22 tanggal 13 Oktober 2021, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistic Indonesia (BLI).

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Property (PT PPI Property)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Property didirikan berdasarkan akta notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 22 Oktober 2010. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51257.AH.01.01 tanggal 1 November 2010.

e. Penggabungan Usaha

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-119/MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Pangan, Pemerintah Indonesia berencana menggabungkan sembilan BUMN di Indonesia ke dalam Holding Pangan.

1. G E N E R A L (continued)

d. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT BGR Logistic Indonesia (formerly known as PT Trisari Veem) (continued)

Based on Notarial Deed of Kurnia Ariani, S.H., No.20 dated 13 October 2021. The entity increased its ownership by acquiring 40% shares from PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk consisting of 1,000 shares with a par value of Rp 1,000,000 per share, therefore the ownership in PT Tri Sari Veem became 99.9%. The shares was valued at market based on the valuation carried out by the Public Appraisal Service Office of Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto and Partners (KJPP AMAR) through report No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 dated 30 November 2020.

Based on notarial deed of Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 dated 13 October 2021 PT Trisari Veem was renamed PT BGR Logistic Indonesia (BLI).

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Property (PT PPI Property)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Property was established based on notarial deed of Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., No 10 dated 22 October 2010. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-51257.AH.01.01 dated 1 November 2010.

e. Merger

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No. SK-119/MBU/04/2020 dated 16 April 2020 regarding Establishment of Food Industry Acceleration and Development Team, the Government of Indonesia planned to merge nine SOEs in Indonesia into ID Food Holding.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

e. Penggabungan Usaha

BUMN yang akan digabung ke dalam Holding Pangan tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Garam (Garam).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 menetapkan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan segala hak dan kewajiban serta kekayaan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) beralih karena hukum kepada Entitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460/KMK.06/2021 tanggal 9 November 2021, nilai kekayaan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) yang digabung ke dalam modal saham Entitas sebesar Rp 786.545.000.000.

Pada tanggal 2 Desember 2021, melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: S-922/MBU/12/2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H., Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan diatas, modal dasar Entitas ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.175.877.000.000 terbagi atas 1.175.877 saham yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, 1.175.876 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 1.175.876.000.000.

1. G E N E R A L (continued)

e. Merger

SOEs to be merged into Food Holding are: PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and PT Garam (Garam).

Subsequently, Government Regulation No. 97 Year 2021 dated 15 September 2021 stipulated that PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) was declared dissolved without liquidation and by law all rights and obligations as well as assets of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) were transferred to the Entity.

Based on Decree of Minister of Finance of the Republic Indonesia No. 460/KMK.06/2021 dated 9 November 2021 the value of the net assets of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) to be merged into the share capital of the Entity amounting to Rp 786,545,000,000.

On 2 December 2021, through Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: S-922/MBU/12/2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia as notarized under Deed No.3 dated 2 December 2021 by Aulia Taufani, S.H., the Ministry of State Owned Enterprises agreed to restructure State Owned Enterprise through the merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

In connection with the above merger, the Entity's authorized capital was increased to Rp 1,175,877,000,000 divided into 1,175,877 shares consisting of: 1 A series Dwiwarna share, with a nominal value of Rp 1,000,000, 1,175,876 B series shares each with a nominal value of Rp 1,000,000 or amounting to Rp 1,175,876,000,000.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 942.745 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 942.745.000.000 yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 942.744 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 942.745.000.000.

Seluruh saham yang ditempatkan tersebut di atas telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara berikut: Sebesar Rp 156.200.000.000 berasal dari setoran lama sesuai dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 Juni 2003, Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, Notaris di Tangerang, dan sebesar Rp 786.545.000.000 berasal dari Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

i) Tambahan Modal Disetor

Atas penggabungan usaha tersebut di atas Entitas menerapkan PSAK 38: "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan mengakui "Tambahan Modal Disetor" atas selisih restrukturisasi entitas sepengendali dengan perhitungan sebagai berikut:

	2021	
Nilai buku aset bersih BGR	555.502.589.448	<i>Net assets of BGR</i>
Nilai valuasi saham BGR	786.545.000.000	<i>Share valuation value of BGR</i>
Tambahan modal disetor	(231.042.410.552)	<i>Additional paid in capital</i>

1. G E N E R A L (continued)

e. Merger (continued)

Of the authorized capital, 942,745 shares have been issued and subscribed by the Republic of Indonesia with a total nominal value of Rp 942,745,000,000 consisting of: 1 A series Dwiwarna share and 942,744 B series shares each with a par value of Rp 1,000,000 or amounting to Rp 942,745,000,000.

All of the issued shares above have been fully paid up by the Republic of Indonesia (Shareholder) through the following of: a total of Rp 156,200,000,000 originating from the previous placement in accordance with the Notarial Deed No. 3 dated 9 June 2003 of Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, Notary in Tangerang, and a total of Rp 786,545,000,000 originating from the Merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

i) Additional Paid in Capital

For the above merger, the Entity applied SFAS 38: "Business Combination of Entities under Common Control" and Recognized "Additional Paid in Capital" from the difference in restructuring of entities under common control with the following calculation:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang relevan dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak (“Grup”).

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Penerapan dari amandemen dan revisi terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada periode berjalan:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan kebijakan Akuntansi”
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 16 “aset tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” – Definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal
- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Revisi PSAK 107 “Akuntansi Ijarah”

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS) AND INTERPRETATIONS OF SAK (IFAS)

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which are considered relevant to the accounting policies of the Entity and its Subsidiaries (“the Group”).

a. Standards effective in the current year

The implementation of amendments and revisions to accounting standards, effective as at 1 January 2023, did not result in significant changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current period:

- *Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" - Disclosure of Accounting Policies*
- *Amendment to SFAS 16 "Property, Plant, and Equipment" regarding pre-use intended proceeds*
- *Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" - Definition of accounting estimates*
- *Amendment to SFAS 46 "Income Taxes" - Deferred Taxes Related to Assets and Liabilities Arising from Single Transactions*
- *SFAS 74: Insurance Contracts*
- *Revision to SFAS 107 "Accounting for Ijarah"*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

b. Standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan

Standar-standar dibawah ini harus diterapkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” – Liabilitas Jangka Panjang dengan Konvenan
- Amendemen PSAK 73, “Sewa - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik”
- Amendemen PSAK 74, “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif”
- Revisi PSAK 109, “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah”

Saat ini Grup sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar amendemen dan penyesuaian tersebut serta pengaruhnya pada laporan Keuangan Grup.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS) AND INTERPRETATIONS OF SAK (IFAS)
(continued)

b. Standards issued not yet adopted

The following standards must be applied on or after 1 January 2024:

- SFAS 74: Insurance Contracts
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" - Long-term Liabilities with Covenants
- Amendment to SFAS 73, "Leases - Lease Liabilities in Sale and Leaseback"
- Amendment to SFAS 74, "Insurance Contracts on Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information"
- Revision to SFAS 109, "Accounting for Zakat, Infak, and Sedekah"

The Group is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these amendments and improvement standard on the consolidated financial statements of the Group.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usaha dijelaskan di bawah ini:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip kelangsungan usaha dan dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar biaya perolehan, kecuali bila dinyatakan secara khusus dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsional tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies adopted by the Group which influence determination of financial position and results of its operations are explained below:

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared on going concern basis and on an accrual basis, except for the statement of cash flows. The consolidated financial statements are also prepared at cost, unless specifically stated in the respective accounting policies of the respective accounts. The statements of cash flows are prepared using the direct method and present changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and measures its transactions in its respective functional currency.

All figures in the consolidated financial statements are stated in full Rupiah, unless otherwise stated.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

1. Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan entitas anak yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Entitas.

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian. Entitas mengendalikan entitas lain ketika Entitas terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Entitas. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Entitas kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup menetapkan setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi atas dasar akuisisi demi akuisisi, baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali dilaporkan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation

1. Subsidiaries

The consolidated financial statements include the financial statements of subsidiaries in which the Entity has the ability to directly or indirectly exercise control.

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Entity has control. The Entity controls another entity when the Entity is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Entity. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognizes any noncontrolling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

1. Entitas Anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis dicapai secara bertahap, tanggal akuisisi nilai tercatat dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin memiliki perubahan nilai kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang ditetapkan dalam pendapatan komprehensif lain ditetapkan atas dasar yang sama seperti yang disyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepaskan secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas yang dikonsolidasikan yang belum di realisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

1. Subsidiaries (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of each non-controlling interest in the acquiree and the fair value at the acquisition date of the equity interest previously held by the acquirer in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If the amount of the consideration transferred, the recognized non-controlling interest recognized, and the previously held interest of the acquirer is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a discounted purchase, the difference is recognized in the consolidated statements of income.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognized change in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was already recognized in other comprehensive income shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Transactions, balances and gains between consolidated entities that have not been realized have been eliminated. Unrealized losses are also eliminated. If required, reported values by subsidiary has been changed to conform to the accounting policies adopted by the Group.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

2. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

3. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian, setiap kepentingan yang tersisa dalam entitas diukur kembali ke nilai wajarnya pada tanggal ketika pengendalian hilang, dengan perubahan jumlah tercatat yang diakui dalam laba rugi. Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk tujuan akuntansi selanjutnya untuk kepentingan yang dipertahankan sebagai entitas asosiasi, ventura bersama, atau aset keuangan. Selain itu, setiap jumlah yang sebelumnya ditetapkan dalam penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Entitas telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya ditetapkan dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

2. Changes in ownership interests in subsidiaries without change of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

3. Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Entity had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

4. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi di entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi di entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi bagi akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas pendapatan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Entitas atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

4. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% to 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. Investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment. When the share of losses in an associate equal or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

4. Entitas asosiasi (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas hasil bersih entitas asosiasi” di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi konsolidasian.

5. Penggabungan Usaha

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

4. Associates (continued)

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount adjacent to “share of profit/(loss) of an associate” in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an Impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and associate are recognised in the Group’s financial statements only to the extent of unrelated investor’s interests in the associates.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the consolidated statement of income.

5. Merger

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

c. Transactions and Balances in Foreign Currencies

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan keuangan konsolidasian.

The books of accounts of the Group are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. As at the date of the consolidated financial statements, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Bank Indonesia middle rate prevailing at the date of the consolidated financial statements.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Foreign currency gains or losses arising from transactions denominated in foreign currencies and the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current year statement of profit or loss.

Mata uang asing dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia:

Foreign currencies are translated at Bank Indonesia's middle rate:

	2023	2022	
USD	15.416	15.731	USD
SGD	11.712	11.659	SGD
YUAN	2.170	2.257	YUAN

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup Melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi jika:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e) Entitas tersebut menyelenggarakan suatu program imbalan kerja karyawan untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor
 - f) Entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam (1).

d. Transactions with Related Parties

In its business activities, the Group has transactions with related parties in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 concerning "Related Parties Disclosures".

A party is considered related party if:

- 1) The person or the immediate family member has a relationship with the Group if the person:
 - a) Have control or joint control over the reporting entity;
 - b) Have significant influence over the reporting entity; or
 - c) Are key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
- 2) An entity is related to a reporting entity if it meets one of the following:
 - a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, which the other entity is a member).
 - c) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - e) The entity is conducting an employee benefits program for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - f) Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (1).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

- g) Orang yang diidentifikasi dalam (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- h) Entitas, atau anggota dari grup di mana entitas merupakan bagian grup dari grup tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Transaksi Grup dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan yang tidak dibatasi.

f. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan bukti objektif bahwa saldo piutang mengalami penurunan nilai.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties (continued)

- g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent of the entity).
- h) An entity, or a member of a group of which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

All transactions with related parties, conducted at normal prices, terms and conditions as those done with third parties and have been disclosed in the consolidated financial statements.

The Group's transactions with State- Owned Enterprises/ Local Government conducted in the ordinary course of business are disclosed as transactions with related parties.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all-time deposits with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not restricted.

f. Trade Receivables

Trade receivables represent receivables arising from the sale of goods and services to the customers in their normal course of business.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial, net of allowance for impairment which is established based on objective evidence that a receivable balance is impaired.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan) 3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Grup melakukan penerapan PSAK No. 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan akuntansi lindung nilai.

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

- i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;
- ii. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual dan apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

g. Financial instruments

Financial assets

The Group has applied SFAS No. 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

The Group classifies its financial assets in the following categories:

- i. Financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income;
- ii. Financial assets at amortised cost.

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows and whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

On 31 December 2023 and 2022, the Group has financial assets classified as financial assets at amortised cost. Financial assets at amortised cost consist of cash and cash equivalents, time deposit, trade receivables and other receivable. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as noncurrent.

Financial assets at amortised cost are recognized initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Liabilitas keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition.

When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and other receivables without significant financing component.

Financial liabilities

There are no changes in classification and measurement of financial liabilities.

Financial liabilities within the scope of SFAS 71 are classifies as follows:

- i. Financial liabilities at amortized cost;*
- ii. Financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI).*

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Grup memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Grup memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang bank, utang usaha, utang sewa, utang lain-lain dan akrual. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka Panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

The Group has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

On 31 December 2023 dan 2022, the Group has financial liabilities measured at amortised cost are trade payables, accrued expenses and other current liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognized in the statements of profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan di saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

h. Persediaan

Persediaan dibukukan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan persediaan ditentukan menggunakan metode FIFO. Barang dalam perjalanan dinyatakan sebesar FOB *Shipping Point*. Barang dalam proses dinyatakan sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap pemrosesan.

Persediaan yang rusak dikelompokkan kedalam persediaan barang rusak (aset lain-lain), yang merupakan barang-barang yang menurut kondisi fisiknya tidak sesuai lagi dengan isi dan bentuk aslinya dan barang-barang yang masa pemakaiannya sudah melebihi masa yang ditetapkan oleh pabrik (kadaluwarsa). Atas persediaan barang yang rusak disisihkan seluruhnya.

i. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode manfaat yang diharapkan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan di muka untuk barang atau jasa.

Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instrument (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparties.

h. Inventories

Inventories are recorded at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories is determined using FIFO method. The goods in transit are stated at FOB Shipping Point. Processed goods are expressed at the costs incurred in the processing phase.

Damaged inventories are grouped into inventory of damaged goods (other assets), which are goods which, according to their physical condition, are no longer in accordance with the original contents and forms and goods whose use has exceeded the period specified by the manufacturer (expired). Full provision is made on the damaged goods.

i. Prepaid Expense and Advances

Prepaid expense is amortized on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Advances are part of contractually due that is paid in advance for goods or services.

Advances are recorded as asset on the consolidated statement of financial position.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya perolehan juga termasuk estimasi awal biaya pembongkaran.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan menggunakan metode garis lurus, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tarif per Tahun/ Rate per Year	Types of Fixed Assets
Bangunan	2,5% - 5%	Building
Alat-alat berat	12,5%	Heavy equipment
Inventaris kantor	12,5% - 25%	Office plant & equipment
Peralatan lainnya	12,5% - 25%	Other equipment
Kendaraan bermotor	12,5% - 25%	Vehicle

Pada tahun 2023 dan 2022, Grup melakukan peninjauan kembali dan mengubah estimasi atas nilai residu aset tetap. Pengaruh dari perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Dampak dari perubahan estimasi untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 38.940.735.718 dan Rp 24.210.450.327 diakui sebagai pendapatan non usaha (Catatan 38).

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun terjadinya.

j. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The cost includes the cost of replacing part of fixed assets when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. The cost also includes an initial estimate of the cost of disassembly.

Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method, after calculating residual value based on the estimated useful lives of the assets as follows:

In 2023 and 2022, the Group reviewed and changed the estimate of the residual value of fixed assets. The effect of the changes in these estimates is accounted for on a prospective basis. The impact of the change in estimate in 2023 and 2022 amounting to Rp 38,940,735,718 and Rp 24,210,450,327 respectively was recognized as non-operating income (Note 38).

The cost of maintenance and repairs is recognized as an expense at the time of collection. Expenditures that extend the useful life of an asset or that provide an economic benefit in the form of capacity building, production quality, or performance are capitalized and depreciated in accordance with the useful life of the assets.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the consolidated financial statements and the resulting gains or losses are recognized in the consolidated statements of income.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset akan diturunkan sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat diperoleh kembali diakui sebagai rugi dan dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Beban pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi aset tersebut secara substansial telah selesai dan siap digunakan.

k. Properti Investasi

Properti investasi, diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- Besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke Grup; dan
- Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Setelah pengakuan, Grup memilih menggunakan model nilai wajar untuk mengukur seluruh properti investasinya.

Jika Grup menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan tidak dapat diukur secara andal tetapi memperkirakan nilai wajar properti tersebut dapat diukur secara andal saat pembangunan selesai, maka properti investasi dalam proses pembangunan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau sampai pembangunannya selesai (mana yang lebih awal).

Jika Grup menentukan bahwa nilai wajar dari properti investasi (selain properti investasi dalam proses pembangunan) tidak dapat diukur secara andal atas dasar keberlanjutan, maka Grup mengukur properti investasi tersebut menggunakan model biaya.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed Assets (continued)

If the carrying amount of fixed assets is greater than the recoverable amount, then the carrying amount of the asset will be reduced by the recoverable amount. The difference between the carrying amount and the recoverable amount is recognized as loss and charged to consolidated statements income for current period.

Borrowing cost that can be directly attributed by acquisition, construction or production of a particular asset are capitalized as part of the cost of the asset. Capitalization of borrowing costs is terminated when activities to acquire, build or produce the asset are substantially complete and ready for use.

k. Investment Property

Investment property, is recognized as an asset if:

- *It is probable that future economic benefits related to investment property will flow to the Group; and*
- *The acquisition cost of investment property can be measured reliably.*

Investment property is initially measured at cost. Transaction fees are included in the initial measurement. After the recognition, the Group elects to use the fair value model to measure the entire investment property.

If the Group determines that the fair value of investment property in the development process cannot be reliably measured but estimates that the fair value of the property can be measured reliably when the construction is completed, the investment property in the development process is measured at cost until its fair value can be measured reliably or until the construction is complete (whichever is earlier).

If the Group determines that the fair value of investment property (other than investment property in the development process) cannot be measured reliably on the basis of sustainability, then the Group measures the investment property using a cost model.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

1. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

PSAK 48 menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Grup mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan Grup membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Aset yang memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi dan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan.

Aset non keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah dipulihkan adalah lebih tinggi dari harga jual bersih aset dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat terendah yang menghasilkan arus kas terpisah (Unit Penghasil Kas). Aset non keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah kembali untuk kemungkinan adanya pemulihan untuk setiap aset yang telah diturunkan nilainya pada setiap tanggal pelaporan.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Impairment of Non Financial Assets

SFAS 48 prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through the use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised SFAS requires the Group to recognize an impairment loss. This revised SFAS also specifies when the Group should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Assets that have an infinite useful life are not amortized and are tested for impairment annually. Amortized assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

Non financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the assets' carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's net selling price and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that have suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada tanggal 19 September 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan PSAK 70: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

Berdasarkan PSAK 70, Aset Pengampunan Pajak diukur berdasarkan nilai yang dilaporkan pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP), sementara liabilitas terkait diukur berdasarkan nilai kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual sehubungan dengan pembelian aset Pengampunan Pajak. Uang tebusan (jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan Pengampunan Pajak) dibebankan pada laporan laba Rugi pada periode saat SKPP diterima.

Selisih antara nilai yang diakui sebagai aset dan liabilitas dicatat pada ekuitas sebagai Tambahan Modal Disetor, dan tidak boleh direklasifikasi sebagai saldo laba atau komponen laba atau rugi tahun berjalan.

Grup diperbolehkan untuk mengukur Kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan pada PSAK pada tanggal SKPP.

Selisih antara nilai setelah pengukuran kembali dan nilai pencatatan awal diakui sebagai penyesuaian pada Tambahan Modal Disetor.

Grup memutuskan untuk mengikuti aturan Pengampunan Pajak dan menerapkan persyaratan pengungkapan PSAK 70 untuk laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2016.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Tax Amnesty Assets and Liabilities

On 19 September 2016, Indonesian Financial Accounting Standard Board (IFASB) issued SFAS 70: "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities".

Based on SFAS 70, the Tax Amnesty assets are measured on the basis of the value reported in the Tax Amnesty Certificate (SKPP), while the related liability is measured based on the cash value or cash equivalent used to settle the contractual obligations with respect to the purchase of the Tax Amnesty assets. Tax settlement amount (the amount of tax payable in accordance with the Tax Amnesty rules) is charged to the income statement in the period in which the SKPP is received.

The difference between the value recognised as an asset and liability is recorded in equity as Additional Paid-in Capital, and it should not be reclassified as retained earnings or components of the current year's profit or loss.

The Group is allowed to re-measure the assets and liabilities of Tax Amnesty based on fair value in accordance with the provisions of the SFAS at SKPP date.

The difference between the value after the remeasurement and the initial listing value is recognized as an adjustment to the Additional Paid-in Capital.

The Group decided to follow the Tax Amnesty rules and applied the disclosure requirements of SFAS 70 for the consolidated financial statements in 2016.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Hak Atas Tanah

Beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui sebagai liabilitas, jika ketiga syarat dibawah ini terpenuhi, yaitu:

- 1) Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- 2) Kemungkinan besar (*probable*) penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis; dan
- 3) Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Penggunaan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan dalam hal penentuan provisi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan konsolidasian tersebut, meskipun sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar saldo akun lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Namun, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, meskipun hal ini jarang terjadi maka liabilitas ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai liabilitas kontinjensi.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Landrights

All costs incurred in connection with the acquisition of landrights are recognized as part of the landright's acquisition cost. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of the land. Extension or renewal cost of legal right over land is recognized as intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

o. Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provision

Provision is a liability whose time and amount are uncertain. Provisions are recognized as liabilities, if the following three conditions are met:

- 1) The Group has current obligations (both legal and constructive) as a result of past events;
- 2) It is probable that the settlement of such obligations results in an outflow of resources containing economic benefits; and
- 3) Reliable estimates of the amount of these liabilities can be made.

The use of the best estimate of payments required to settle current liabilities at the end of the reporting period in the case of determining provision is a fundamental part of the preparation of the consolidated financial statements and does not reduce the reliability of the consolidated financial statements, although it contains higher uncertainty than most other account balances in consolidated statements of financial position. However, when reliable estimates cannot be made, although this is rare then these liabilities are disclosed in the notes to the consolidated financial statements as contingent liabilities.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (lanjutan)

Liabilitas Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, adalah:

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi lebih pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a) Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban; atau
 - b) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Namun, bilamana arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis kemungkinan kecil terjadi, maka tidak diperlakukan sebagai liabilitas kontinjensi. Meskipun demikian, entitas akan melakukan kajian ulang secara terus menerus sekurang-kurangnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (neraca) pada akhir tahun, untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar.

Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan besar (*highly probable*) arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh entitas, dimana aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Meskipun demikian, entitas akan melakukan kajian ulang secara terus menerus sekurang-kurangnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets (continued)

Contingent Liabilities

Contingent liabilities disclosed in the notes to the consolidated financial statements are as follows:

1. The potential obligations arising from past events and their existence become more certain with the occurrence or absence of one or more future events not entirely within the entity's control; or
2. Current obligations arising as a result of past events, but not recognized because:
 - a. There is no possibility of an entity issuing resources containing economic benefits to settle the obligation; or
 - b. The amount of these liabilities cannot be measured reliably.

However, when cash flows of resources containing economic benefits are unlikely to occur, they are not treated as contingent liabilities. However, the entity shall conduct a continuous review at least at the date of its consolidated statement of financial position (balance sheet) at the end of the year, to determine whether the level of probability of an outflow of resources containing economic benefits is increasing to be highly probable.

Contingent Assets

Contingent assets are disclosed in the notes to the consolidated financial statements if there is a high probability of inflow of economic benefits to the entity, in which the contingent asset is a potential asset arising from past events and its existence is confirmed by the occurrence or absence of one or more events at a future that is not entirely within the entity's control. However, the entity shall conduct a continuous review at least at the date of its consolidated statement of financial position at the end of the year to ensure that its development has been properly reflected in the consolidated financial statements.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pajak Penghasilan

Grup telah menerapkan PSAK 46: Pajak Penghasilan dan Amandemen PSAK 46 tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi konsolidasian, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui diluar laba atau rugi konsolidasian.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas Pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Income Tax

The Group has implemented to SFAS 46: Income Tax and Amendment to SFAS 46 concerning Recognition of Deferred Tax Assets on Unrealized Losses, which establishes the accounting treatment for income tax in calculating the consequences of current and future taxes on recovery (settlement) of carrying amounts of assets (liabilities) recognized in the consolidated statement of financial position and other transactions and events of the current period recognized in the consolidated financial statements.

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized as an expense or income in consolidated statement of income, except to the extent that income tax resulting from transactions or events that are recognized outside statement of profit or loss (either in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside consolidated profit or loss.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current years profit and loss, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang, sedangkan aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi akan diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal masih dapat dipakai. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final, tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan.

Pajak Penghasilan Final

Peraturan pajak di Indonesia menetapkan bahwa penghasilan kena pajak tertentu dikenakan pajak final. Pajak final yang diterapkan pada nilai kotor transaksi diterapkan bahkan aset para pihak yang melakukan transaksi mengakui kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 sebagaimana disebutkan di atas, pajak final tidak lagi diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Grup telah memutuskan untuk menyajikan semua pajak final yang timbul dari pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti investasi sebagai bagian dari pajak kini.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Income Tax (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all deductible temporary differences to the extent possible can be utilized to reduce taxable income in future periods, whereas deferred tax assets from future tax benefits and tax losses to the extent that it is probable that the future taxable profit will be available against which the future tax benefits and tax losses can still be used. Amendments to tax obligations are recognized when a tax assessment (SKP) is received or, if objected or appealed against, when the decision on the objection or appeal is determined.

In accordance with the tax laws, income subject to final income tax, no longer reported as taxable income and all expenses relating to income subject to final income tax cannot be deducted.

Final Income Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying in the transaction is recognizing losses.

Referring to revised SFAS No 46 as mention above, final tax is no longer governed by SFAS No 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from rental income generated from investment properties as of part of current tax.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan) **3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pajak pasal 4 (2) tentang pajak final, pendapatan dari sewa tanah dikenakan pajak final 10%.

Penghasilan (beban) pajak penghasilan merupakan jumlah agregat (i) pajak kini (current tax) dan (ii) pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Akun ini disajikan dengan merinci unsur-unsur beban pajak kini dan penghasilan (beban) pajak.

Beban pajak kini merupakan perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan pada satu tahun fiskal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan memperhitungkan (a) penghasilan neto komersial, (b) penghasilan yang dikenakan PPh. Final dan yang tidak termasuk obyek pajak, (c) penyesuaian fiskal positif dan negatif, dan (d) pengurangan penghasilan neto.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari hasil perhitungan pendapatan (beban) tangguhan disajikan secara neto di posisi keuangan konsolidasian.

q. Liabilitas Imbalan pasca Kerja

Grup memiliki program iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) yang terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu.

p. Income Tax (continued)

Based on Tax Regulation article 4 (2) about final tax, income from land rental is subject to final tax of 10%.

Other income (expense) of income tax is the aggregate amount of (i) Current tax (current tax) and (ii) Deferred tax (deferred tax) are considered in the profit or loss. This account is presented by detailing the elements of current tax expense and deferred income (expense) tax.

Current tax expense is the calculation of corporate income tax liability in a fiscal year in accordance with taxation laws in force in Indonesia, taking into account (a) the commercial net income, (b) income subject to final income tax and that does not include tax object, (c) positive and negative fiscal adjustment, and (d) reduction of net income.

Deferred tax assets and liabilities arising from the calculation of deferred income (expenses) is presented in net amount in the consolidated statement of financial position.

q. Post-Employment Benefits Liabilities

The Group has defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Liabilitas Imbalan pasca Kerja (lanjutan)

Grup menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengelolaan pesangon karyawan Grup dilakukan oleh pihak ketiga. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaris adalah metode *projected unit credit* yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian.

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, bonus, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

(ii) Imbalan kerja dan imbalan jangka panjang lainnya

Perhitungan liabilitas imbalan kerja terkait dengan program imbalan pasca kerja dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Liabilitas neto imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi berkaitan dengan program imbalan pasti dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Post-Employment Benefits Liabilities (continued)

The Group provides employee benefits as per the prevailing Labor Law. The Group Employee retirement benefits has been organized by a third party. The valuation method used by the actuary is the projected unit credit method, which reflects employee services at the time of the appraisal.

(i) Short-term employee benefits liabilities

The short-term employee benefits consist of salary and related remuneration, bonuses, incentives, and other short-term employee benefits which are recognized as expense and are not discounted when the employee has provided services to Group.

(ii) Post-employment benefits and other long-term employee benefits

The calculation of employment benefit liabilities related to post-employment benefits program is carried out by an independent actuary using the projected unit credit method.

The net liability for employee benefits is recognized in the consolidated statements of financial position related to defined benefit plans, and are carried at the present value of estimated employee benefit in the future related to the services in the present and the past, less the fair value of plan assets. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated cash outflows in future using interest rates of government bonds, which are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have a term to maturity nearest to the period of related post-employment benefit obligations. Government bonds are used because there is no active market for high quality corporate bonds.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Liabilitas Imbalan pasca Kerja (lanjutan)

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto), diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) neto dengan tingkat diskonto. Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Post-Employment Benefits Liabilities (continued)

Plan assets are assets held by the pension plan. These assets are measured at fair value at the end of the reporting period. Remeasurement, consisting of actuarial gains and losses, the impact of limitation of assets, excluding the amounts in net interest on the net benefit obligation and the yield of the plan assets (excluding amounts in net interest on the net benefit liability), are recognized in equity through other comprehensive income in the period incurred. Remeasurement is not classified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss on an earlier date between:

- *when the amendments or curtailment program occurs; and*
- *when the Group's restructuring or termination cost is recognized.*

Net interest is calculated by multiplying the net liability (asset) by the discount rate. Gain or loss on curtailment is recognized when there is a commitment to reduce the number of employees significantly covered by a program or when there are changes in regulation in a benefit plan, in which the material part of the services provided by the employee in the future no longer give employee benefits, or lower employee benefits.

Profit or loss of settlement is recognized whenever there is a transaction which abolished all legal or constructive obligations on part or all of the benefits in a benefit program.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan

Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah sebagian Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri sebagian dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri sebagian diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan bagi kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu bagi pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue Recognition

The Group has implemented SFAS 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 assessment steps:

1. Identify contracts with customers.
2. Identify performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer different goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration expected to be entitled to the entity in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration that is expected to be entitled in exchange for the transfer of goods or services promised to the customer less the estimated amount of guaranteed service levels to be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price for each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. If this cannot be observed directly, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.
5. Recognize revenue when performance obligations are fulfilled by transferring the promised goods or services to the customer (that is, when the customer gains control of the goods or services).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui sebagai kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Grup menjual barang impor dan lokal, menyewakan properti, memberikan jasa kepabeanan dan logistik, ekspor dan lainnya.

Untuk barang umum, pendapatan diakui pada suatu waktu atau setelah dikirimkan ke pelanggannya, dan pelanggan memperoleh kendali atas aset yang dijanjikan dan kewajiban pelaksanaan Grup. Indikator kontrol dialihkan ke pelanggan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Grup memiliki hak sekarang untuk pembayaran aset;
- b. Pelanggan memiliki hak legal atas aset;
- c. Grup telah mengalihkan kepemilikan fisik aset;
- d. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan aset; dan
- e. Pelanggan telah menerima aset tersebut.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue Recognition (continued)

The implementation obligation can be fulfilled in the following conditions:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer).
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of transaction prices is different for each contract. Contract assets are recognized after the consideration paid by the customer is less than the balance of the fulfillment obligation. Contract liabilities are recognized after the consideration paid by the customer is more than the balance of the fulfillment obligation.

The Group sells imported and local goods, provide rental spaces, rendering custom and freight as well as logistic services, exports and others.

For general goods, revenue is recognized at point in time or upon delivery to its customer, and the customer obtains control of a promised asset and the Group's performance obligation. Indicators of control is transferred to customer include but not limited to the following:

- a. The Group has a present right to payment of the asset;
- b. The customer has legal title to the asset;
- c. The Group has transferred physical ownership of the asset;
- d. The customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset; and
- e. The customer has received the asset.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan. Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

s. Pendapatan Diterima Dimuka

Sewa dan biaya layanan yang diterima di muka dari penyewa dikreditkan ke "Pendapatan Diterima Dimuka" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

t. Sewa

Pemberi sewa mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Pemberi sewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau sistematis lainnya. Lessor menerapkan dasar sistematis lain jika basis tersebut lebih mewakili pola di mana manfaat dari penggunaan aset yang mendasarinya berkurang.

Pemberi sewa mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang terjadi dalam memperoleh pendapatan sewa sebagai beban.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue Recognition (continued)

Service income is recognized when the service is provided. Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

s. Unearned Revenue

Space rental and service charge received in advance from tenant are credited to "Unearned Revenue" in the consolidated statements of financial position and recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

t. Leases

A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

A lessor shall recognize lease payments from operating leases as income on either a straight-line basis or another systematic basis. The lessor shall apply another systematic basis if that basis is more representative of the pattern in which benefit from the use of the underlying asset is diminished.

A lessor shall recognize costs, including depreciation, incurred in earning the lease income as an expense.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Pemberi sewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam memperoleh sewa operasi ke nilai tercatat aset yang mendasarinya dan mengakui biaya tersebut sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

Kebijakan penyusutan untuk aset dasar yang dapat didepresiasi yang dikenakan sewa operasi harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal *lessor* untuk aset serupa. Lessor menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16.

Pemberi sewa menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset yang mendasari sewa operasi mengalami penurunan nilai dan mencatat setiap kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Leases (continued)

A lessor shall add initial direct costs incurred in obtaining an operating lease to the carrying amount of the underlying asset and recognize those costs as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.

The depreciation policy for depreciable underlying assets subject to operating leases shall be consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets. A lessor shall calculate depreciation in accordance with SFAS 16.

A lessor shall apply SFAS 48 to determine whether an underlying asset subject to an operating lease is impaired and to account for any impairment loss identified.

Determining whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement itself and assessing whether fulfillment of the agreement depends on the use of certain assets, and whether the agreement conveys the right to use the assets.

The Group leases various fixed assets. Lease contracts are usually drawn up for a fixed period of 1 to 3 years but may have extension options.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak guna didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa.
- pembayaran sewa sebagian yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu.
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran sebagian untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Leases (continued)

Lease terms are negotiated individually and contain a variety of different terms and conditions. The lease agreement does not impose any agreement other than collateral for borrowing purposes.

Leases are recognized as rights of use assets and related liabilities on the date on which the leased assets are available for use by the Group. Each lease payment is allocated between a liability and finance cost. Finance costs are charged to profit or loss over the lease term, resulting in a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period. Rights of use assets are depreciated over the shorter period between the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method.

Assets and liabilities arising from leases are initially measured on the present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including fixed payments in substance), less lease incentive receivables.*
- *variable lease payments which are based on an index or rate, initially measured using an index or rate at the start date.*
- *the amount expected to be paid by the lessee based on a guaranteed residual value.*
- *the exercise price of the purchase option if the lessee is confident enough to exercise the option, and*
- *payment of penalties for termination of the lease, if the lease term reflects the lessee exercising the option.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman tambahan penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima.
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit, dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Leases (continued)

Lease payments that must be made under certain extension options are also included in the measurement of the liability.

Lease payments are discounted using the implicit interest rate in the lease. If the rate cannot be immediately determined, which is generally the case with leases in the Group, the incremental loan interest rate of the lessee is used, namely the rate that must be paid by the lessee to borrow the funds needed to acquire an asset with a value equal to the right of use assets in similar economic environment with similar terms and conditions.

To determine the incremental interest rate, the Group:

- *Where possible, uses the most recent third party financing received by individual lessees as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received.*
- *Uses a build-up approach starting with a risk-free interest rate adjusted for credit risk, and*
- *Make specific adjustments to leases, such as term, country, currency and security.*

The Group is faced with the potential for future increases in variable lease payments based on index or tariff, which are not included in the lease liability until enacted. When the adjustment of lease payments based on index or interest rates comes into effect, the lease liability is revalued and adjusted according to the right of use assets.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa.
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.
- Biaya langsung awal, dan
- Biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara Grup menilai kembali tanah dan bangunannya yang ada di dalam properti, gedung, dan peralatan, Grup memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Grup.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Leases (continued)

Lease payments are allocated between principal and finance costs. Finance costs are charged to the income statement over the lease term so as to produce a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period.

Right of use assets are measured at cost, which consists of the following:

- *The initial measured amount of the lease liability.*
- *Lease payments made on or before the commencement date less rental incentives received.*
- *Initial direct costs, and*
- *Restoration costs.*

Rights of use assets are generally depreciated over the shorter of the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method. If the Group is confident enough to exercise the purchase option, the rights of use assets are depreciated over the useful life of the underlying asset. While the Group reassesses its land and buildings in the property, buildings and equipment, the Group chooses not to do so for the use rights buildings owned by the Group.

Payments related to short-term leases and leases of low value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in the profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Sewa (lanjutan)

Opsi Ekstensi dan Terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan Nilai Residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

u. Restrukturisasi Utang Bermasalah

Perlakuan akuntansi atas restrukturisasi utang bermasalah sebagai berikut:

- Pelunasan utang melalui pengalihan aset berupa tanah dan bangunan, aset lain, dan piutang kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh liabilitas; Grup dapat mengakui keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi liabilitas tersebut.
- Keuntungan dihitung dari selisih lebih antara (a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga yang terutang dan premi, diskonto, beban keuangan, atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan (b) nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditor.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Leases (continued)

Extension and Termination Options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases throughout the Group. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of contract management. The majority of extension and termination options that are owned can only be exercised by the Group and not by the respective lessors.

Residual Value Guarantee

To optimize rental costs during the contract period, the Group sometimes provides a residual value guarantee in connection with the equipment lease.

Lease income from leasing operations wherein the Group acts as the lessor is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

u. Debt Restructuring

The accounting treatment for the debt restructuring are as follows:

- Debt repayment through the transfer of assets in the form of land and buildings, other assets, and receivables to creditors to settle all liabilities; the Group may recognize gains arising from the restructuring of such liabilities.
- Profit is calculated from the excess of (a) the carrying amount of the settled debt (the nominal amount minus or plus the interest payable and the unamortized premium, discount, expense, or cost of issuance), with (b) the fair value of the assets transferred to creditor.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Restrukturisasi Utang Bermasalah (lanjutan)

- Restrukturisasi utang bermasalah dapat berupa penyelesaian sebagian utang dengan pengalihan aset debitor atau pemberian saham (atau keduanya) kepada kreditor dan modifikasi persyaratan utang yang masih tersisa.

v. Kuasi Reorganisasi

Berdasarkan PSAK 51 (2003) “Akuntansi Kuasi Reorganisasi”, kuasi reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur Grup untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya pada nilai wajar tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Dengan melakukan prosedur ini, dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan aset bersih dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali sehingga entitas diharapkan dapat melanjutkan usahanya seperti baru, dengan laporan posisi keuangan konsolidasi yang menunjukkan posisi keuangan yang lebih baik tanpa defisit dari masa lampau.

Saldo akumulasi kerugian, sesuai dengan PSAK tersebut, dieliminasi terhadap akun-akun ekuitas dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- Cadangan umum;
- Cadangan khusus;
- Selisih penilaian aset dan liabilitas (termasuk didalamnya selisih revaluasi aset tetap);
- Tambahan setoran modal dan sejenisnya;
- Modal saham.

Penentuan nilai wajar aset dan liabilitas Grup dalam rangka kuasi-reorganisasi ini dilakukan berdasarkan nilai pasar. Apabila nilai pasar tidak tersedia atau tidak menggambarkan nilai wajar yang sebenarnya, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, atau dengan model arus kas diskontoan.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Debt Restructuring (continued)

- Troubled debt restructuring may be a partial settlement of debt with the transfer of the debtor’s assets or the grant of shares (or both) to the creditor and modification of the remaining debt terms.

v. Quasi Reorganization

In accordance with SFAS 51 (2003) “Quasi-Reorganization Accounting”, quasi-reorganization is an accounting procedure governing the Group to restructure its equity by eliminating deficits and reassessing all its assets and liabilities at fair value without legal reorganization. By performing this procedure, it may result in an increase or decrease in net assets compared to the carrying amount prior to the revaluation so that the entity is expected to continue its business as new, with a consolidated statement of financial position showing a better financial position without deficits from the past.

The accumulated balance of losses, in accordance with the SFAS, is eliminated against equity accounts in the following order of priority:

- General reserves;
- Specific reserves;
- Difference in valuation of assets and liabilities (including property, fixed assets revaluation);
- Additional deposits of capital and the like;
- Capital stock.

The determination of the fair value of the Group’s assets and liabilities in the quasi-reorganization exercise is based on market value. If market value is unavailable or does not represent actual fair value, fair value estimates are made taking into account the price of similar assets, or with the discounted cashflow model.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Kuasi Reorganisasi (lanjutan)

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 42, Grup melakukan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 September 2012 mengikuti persyaratan dari PSAK di atas.

Berdasarkan PPSAK 10 mengenai Pencabutan PSAK 51 (2013): Akuntansi Kuasi-Reorganisasi, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013, Grup telah mereklasifikasi saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi ke saldo laba. (Catatan 42).

w. Modal Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan dengan penerbitan saham biasa diakui sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pengaruh pajak.

x. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi adalah Dewan Direksi sebagai pengambil keputusan strategis.

Suatu segmen operasi merupakan suatu komponen di dalam entitas:

1. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Quasi Reorganization (lanjutan)

As described in Note 42, the Group executed quasi-reorganization on 30 September 2012 following the terms of the above SFAS.

In accordance with RSAF 10 regarding Revocation of SFAS 51 (2013): Quasi-Reorganization Accounting which is effective on 1 January 2013, the Group has reclassified the balance of the difference in valuation of assets and liabilities in the course of quasi reorganization to retained earnings. (Note 42).

w. Share Capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects.

x. Operating Segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as Board of Directors that makes strategic decisions.

An operating segment is a component of an entity:

1. that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
2. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
3. for which discrete financial information is available.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Peristiwa setelah tanggal pelaporan

Peristiwa paska akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa yang memerlukan) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian jika jumlahnya material. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Hasil bagi mungkin berbeda dari taksiran ini. Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi diakui pada periode saat estimasi tersebut direvisi dan pada periode mendatang yang terpengaruh.

Estimasi dan asumsi yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam 12 bulan ke depan dibahas di bawah ini.

3. INFORMATION RELATING TO MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Subsequent event

Post year-end events that provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with SFAS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN** (lanjutan)

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah membuat penilaian berikut, selain dari yang termasuk estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang lingkungan ekonomi utama tempat setiap entitas beroperasi. Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya, antara lain, mata uang yang terutama memengaruhi pendapatan, biaya, dan aktivitas pendanaan, serta mata uang yang biasanya digunakan untuk penerimaan dari kegiatan operasi. Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan yang mendasari yang relevan bagi Grup, mata uang fungsional telah ditentukan menjadi Rupiah Indonesia (Rp).

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian (ECL), manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION** (continued)

a. Judgement

In the process of applying the accounting policies, management has made the following judgements, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. The Entity considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained. Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (Rp).

Allowance for Impairment Losses on Receivables

The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses (ECL), management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Grup mengevaluasi akun-akun tertentu yang diketahui bahwa beberapa pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah terutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas ECL piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang diakui masing-masing sebesar Rp 434.945.486.745 dan Rp 381.239.280.062 (catatan 7) dan cadangan penurunan nilai piutang lain-lain masing-masing Rp 181.970.502.237 dan Rp 178.197.125.137 (catatan 8).

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)

a. Judgement (continued)

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgements, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount of allowance for ECL of trade receivables

As at 31 December 2023 and 2022, allowance for impairment losses on trade receivables amounting to Rp 434,945,486,745 and Rp 381,239,280,062 respectively (note 7) and allowance for impairment losses on other receivable amounting to Rp 181,970,502,237 and Rp 178,197,125,137 respectively (note 8).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Nilai Realisasi Bersih Persediaan

Dalam menentukan nilai realisasi bersih (NRV) dari persediaan, Grup mempertimbangkan persediaan usang, kerusakan, kerusakan fisik, perubahan tingkat harga, perubahan permintaan konsumen, atau penyebab lain untuk mengidentifikasi persediaan yang akan dituliskan ke NRV. Grup menyesuaikan biaya persediaan ke jumlah terpulihkan pada tingkat yang dianggap memadai untuk mencerminkan penurunan pasar dalam nilai persediaan.

Pengakuan pendapatan

Grup mengakui pendapatan atas penjualan barang dan jasa selama tahun berjalan. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan produk jika pelanggan merasa tidak puas. Berdasarkan pengalaman masa lampau atas penjualan yang serupa, Grup yakin bahwa tingkat ketidakpuasan tidak akan lebih dari 0,029%. Oleh karena itu, Grup tidak mengakui pendapatan dikurangi dengan provisi atas estimasi retur.

Penentuan umur sewa

Dalam menentukan umur sewa, manajemen mempertimbangkan fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomi untuk mengambil opsi perpanjangan, atau tidak mengambil opsi pembatalan. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pembatalan) hanya dimasukkan dalam masa sewa jika secara meyakinkan diperpanjang (atau tidak dibatalkan).

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

a. Judgement (continued)

Net Realizable Value of Inventories

In determining the net realizable value (NRV) of inventories, the Group considers inventory obsolescence, damages, physical deterioration, changes in price levels, changes in consumer demands, or other causes to identify inventories which are to be written down to NRV. The Group adjusts the cost of inventories to recoverable amount at a level considered adequate to reflect market decline in the value of the inventories.

Revenue recognition

The Group has recognized revenue for sales of goods and services during the year. The buyer has the right to return the goods if its customers are dissatisfied. Based on past experience with similar sales, the Group believes that the dissatisfaction rate will not exceed 0.029%. The Group therefore does not recognize revenue on this transaction with a corresponding provision against revenue for estimated returns.

Determining lease term

In determining the lease term, management considers facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan umur sewa (lanjutan)

Untuk sewa bangunan dan peralatan, faktor-faktor berikut biasanya paling relevan:

- jika ada denda signifikan untuk membatalkan (atau tidak memperpanjang), Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Jika ada *leasehold improvement* yang diperkirakan memiliki nilai sisa yang signifikan, Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Selain dari itu, Grup mempertimbangkan faktor mencakup sejarah durasi sewa dan biaya serta halangan bisnis untuk menggantikan aset sewa.

Mayoritas opsi perpanjangan untuk sewa kantor dan kendaraan tidak dimasukkan ke dalam liabilitas sewa, karena Grup dapat mengganti aset tanpa biaya signifikan atau halangan bisnis

Umur sewa dinilai Kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)

a. Judgement (continued)

Determining lease term (continued)

For leases of properties and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- *If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

Most extension options in offices and vehicles leases have not been included in the lease liability, because the Group could replace the assets without significant cost or business disruption.

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Tetap

PSAK mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan terhadap aset tetap ketika peristiwa atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan dari estimasi membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan dihasilkan dari penggunaan berkelanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Sementara diyakini bahwa asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai wajar yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, perubahan signifikan dalam asumsi ini dapat secara material mempengaruhi penilaian jumlah terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memiliki dampak material yang merugikan pada hasil operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada aset tetap Grup masing - masing sebesar Rp 60.783.616.979. (Catatan 14).

b. Asumsi dan Estimasi

Asumsi penting mengenai masa depan dan sumber utama lainnya dalam ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan dijabarkan di bawah ini.

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)

a. Judgement (continued)

Impairment of fixed assets

SFAS requires that an impairment review be performed on fixed assets when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Determining the net recoverable amount of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. While it is believed that the assumptions used in the estimation of fair values reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the valuation of recoverable amounts and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the result of operations.

On 31 December 2023 and 2022, allowance for impairment losses recognized on the Group's fixed assets amounting to Rp 60,783,616,979 respectively (Note 14).

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian, Manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

Estimasi Masa Manfaat atas aset tetap dan aset tidak berwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud berdasarkan pada ekspektasi dari penggunaan aset seperti yang dituangkan di dalam rencana dan strategi bisnis serta juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pelaku pasar yang diharapkan di masa yang akan datang. Estimasi mengenai masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud didasarkan pada penilaian kolektif Grup terhadap praktik industri. Evaluasi teknik internal dan pengalaman pada aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya akibat pemakaian dan kerusakan fisik. Teknis atau usang dan adanya keterbatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aset tersebut.

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Determining Fair Value of Financial Instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Estimating Useful Lives of fixed assets and intangible assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and intangible assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets and intangible assets is based on the Group collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat atas aset tetap dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Hal ini dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat terpengaruh secara material oleh perubahan atas perkiraan yang timbul yang diakibatkan dalam faktor-faktor yang disebutkan di atas. Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode dipengaruhi oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud Grup akan meningkatkan biaya operasi yang dicatat dan menurunkan nilai dari aset tidak lancar. Perpanjangan masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud Grup akan menurunkan biaya operasi yang dicatat dan meningkatkan nilai dari aset tidak lancar.

Estimasi atas Pensiun dan Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa depan. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat imbalan pasca kerja. Tingkat diskonto merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan estimasi nilai kini atas arus kas keluar di masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Untuk tingkat kenaikan gaji, Grup mengumpulkan semua data historis yang berhubungan dengan perubahan dasar gaji dan mengoreksinya di dalam rencana bisnis di masa yang akan datang.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGEMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimating useful lives of fixed assets and intangible assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's fixed assets and intangible assets increases the recorded operating expenses and decreases non-current assets. An extension in the estimated useful lives of the Group's fixed assets and intangible assets decreases the recorded operating expenses and increases non-current assets.

Estimation of Pension and Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on factors that are determined on an actuarial basis using several assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Estimasi atas Pensiun dan Imbalan Kerja (lanjutan)

Asumsi utama liabilitas imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan telah dipaparkan di Catatan 28d.

Realisasi Aset Pajak Tangguhan dan estimasi pajak penghasilan

Dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan yang signifikan. Transaksi dan perhitungan tertentu dalam penentuan pajak yang pada akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan. Jika hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

Grup menelaah jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang tersedia untuk pemulihannya.

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimation of Pension and Employee Benefits (continued)

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 28d.

Realization of Deferred Tax Assets and Estimation of income tax

Determining provision for corporate income tax requires significant judgement by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

The Group reviews the carrying amount of a deferred tax asset at each reporting date and the carrying amount of the deferred tax asset is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Provisi dan Kontinjensi

Provisions and Contingencies

Grup, dalam menjalankan bisnis biasa, menetapkan ketentuan yang sesuai untuk kewajiban hukum atau kewajiban konstruktifnya saat ini, jika ada, sesuai dengan kebijakannya tentang ketentuan dan kontinjensi. Dalam mengenali dan mengukur provisi, manajemen memperhitungkan risiko dan ketidakpastian.

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Kas	1.047.016.380	1.280.625.979	Cash on hand
Bank Pihak berelasi Rupiah			Bank Related parties Rupiah
Bank Mandiri	35.003.550.579	109.974.861.380	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	9.732.816.390	27.220.536.803	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	9.175.659.584	15.634.066.046	Bank Rakyat Indonesia
BPD NTT	213.968.991	14.988.168	BPD NTT
BPD Jabar Banten	119.835.946	213.896.787	BPD Jabar Banten
BPD Sulselbar	64.262.364	187.383.441	BPD Sulselbar
Bank Tabungan Negara	54.038.816	54.176.184	Bank Tabungan Negara
BPD Jatim	17.114.995	17.460.698	BPD Jatim
Bank DKI	4.555.000	-	Bank DKI
USD			USD
Bank Mandiri	385.854.155	2.959.127.775	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	67.403.839	42.644.696	Bank Negara Indonesia
Bank Permata	8.477.968	-	Bank Permata
Bank Rakyat Indonesia	2.372.368	2.195.622.391	Bank Rakyat Indonesia
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
Bank Permata	6.331.418.209	5.759.600.000	Bank Permata
Bank Central Asia	282.240.714	378.470.141	Bank Cental Asia
Bank Syariah Indonesia	198.535.404	334.201.882	Bank Syariah Indonesia
Subjumlah	61.662.075.322	164.987.036.392	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2023	2022	
Deposito berjangka Rupiah			<i>Time deposits Rupiah</i>
Bank Negara Indonesia	-	10.200.000.000	<i>Bank Negara Indonesia</i>
Bank Mandiri	-	4.950.000.000	<i>Bank Mandiri</i>
Subjumlah	-	15.150.000.000	<i>Subtotal</i>
Jumlah	62.709.091.702	181.417.662.371	<i>Total</i>

Tingkat suku bunga tahunan atas deposito berjangka (1-3 bulan) pada tahun 2022 adalah 2,25% - 3,25%.

Annual interest rate of time deposits (1-3 months) in 2022 is 2.25% - 3.25%

6. DEPOSITO BERJANGKA

6. TIME DEPOSITS

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Pihak berelasi: Rupiah			<i>Related party: Rupiah</i>
Bank Mandiri	-	3.000.000.000	<i>Bank Mandiri</i>
Jumlah	-	3.000.000.000	<i>Total</i>

Deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.000.000.000 digunakan sebagai jaminan atas perjanjian jual-beli dengan PT Sentana Adidaya Pratama dan PT Wilmar Chemical Indonesia.

Time deposits as at 31 December 2022 amounting to Rp 3,000,000,000 is placed as collaterals for trading agreement with PT Sentana Adidaya Pratama and PT Wilmar Chemical Indonesia.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Pihak berelasi:			Related parties:
Ditjen Migas ¹⁾	88.669.740.008	88.669.740.008	Ditjen Migas ¹⁾
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	83.503.400.203	504.731.891	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Pupuk Kaltim	27.183.298.845	15.396.582.159	PT Pupuk Kaltim
PT Petrokimia Gresik	15.071.501.022	24.986.496.466	PT Petrokimia Gresik
PT Sang Hyang Seri	10.687.455.750	10.982.341.610	PT Sang Hyang Seri
PT Pupuk Iskandar Muda	8.421.582.777	7.557.990.235	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	6.667.174.084	13.995.754.578	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Len Industri (Persero)	5.271.697.016	5.271.697.016	PT Len Industri (Persero)
PT Timah Tbk	4.675.572.405	9.999.322.093	PT Timah Tbk
PT Kilang Pertamina Internasional	3.540.340.985	-	PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pupuk Kujang	3.281.777.888	4.500.225.748	PT Pupuk Kujang
PT Adhi Karya	3.006.661.199	2.849.054.970	PT Adhi Karya
PT Asuransi Jiwasraya	2.756.476.840	1.800.010.000	PT Asuransi Jiwasraya
PT Perikanan Indonesia	2.468.256.483	-	PT Perikanan Indonesia
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.463.468.894	7.119.812.508	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Pabrik Gula Rajawali	2.361.377.132	4.754.500.000	PT Pabrik Gula Rajawali
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.310.320.749	2.316.067.303	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rumah Sakit umum Daerah	2.306.433.993	6.654.819.598	Regional Public Hospital
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	2.151.097.786	2.722.625.686	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	2.084.799.196	3.185.480.146	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
PT Waskita Beton Precast	1.206.549.817	2.994.107.317	PT Waskita Beton Precast
PT Rajawali Nusindo	1.113.610.957	3.100.725.262	PT Rajawali Nusindo
PT Pertamina (Persero)	888.224.226	6.566.100.130	PT Pertamina (Persero)
Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.878.378	2.868.250.000	Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Lainnya (dibawah Rp 2 Milyar)	13.959.839.855	15.572.442.875,00	Others (below Rp 2 billion)
Sub jumlah piutang usaha pihak berelasi	296.054.536.488	244.368.877.599	Sub total trade receivables – related parties
Penyisihan penurunan nilai	(88.669.740.008)	(88.669.740.008)	Allowance for impairment
Piutang usaha pihak berelasi – Bersih	207.384.796.480	155.699.137.591	Trade receivables related parties – Nett

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Notes to Consolidated Financial Statements
(continued)
For the year ended
31 December 2023

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

	2023	2022	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Telepoin Nusantara ⁱⁱ⁾	75.546.921.225	75.546.921.225	PT Telepoin Nusantara ⁱⁱ⁾
PT Pembangunan Kota Tua Jakarta	74.784.555.357	10.389.642.335	PT Pembangunan Kota Tua Jakarta
PT Agro Chemindo Niagatama	28.697.388.316	28.697.388.316	PT Agro Chemindo Niagatama
PT Anugerah Pharmindo Lestari	16.815.419.559	784.626.766	PT Anugerah Pharmindo Lestari
PT Krakatau Pipe Industries	12.105.488.733	9.856.774.056	PT Krakatau Pipe Industries
PT Aneka Pupuk Compon	9.881.740.553	9.881.740.553	PT Aneka Pupuk Compon
PT Yahukimo Bersatu Indonesia	6.749.503.741	-	PT Yahukimo Bersatu Indonesia
PT Beli Jual Oentung	6.377.482.373	-	PT Beli Jual Oentung
PT Pab. Pipa Indonesia	6.157.556.628	6.157.556.628	PT Pab. Pipa Indonesia
CUSTOMER PPI	5.590.953.090	-	CUSTOMER PPI
PT Bukaka Teknik Utama	5.074.250.000	6.282.650.000	PT Bukaka Teknik Utama
PT Sultana Agro Lestari	4.434.297.246	-	PT Sultana Agro Lestari
One Time BP	4.432.584.484	2.893.714.047	One Time BP
PT Falcon Cargo	4.256.500.000	4.256.500.000	PT Falcon Cargo
Hagat Import Company	3.768.811.200	-	Hagat Import Company
PT Cemindo Gemilang	3.471.804.797	3.471.804.797	PT Cemindo Gemilang
PT Permata Agro Persada	3.442.477.765	3.401.995.615	PT Permata Agro Persada
PT Sari Gunung Polowijo	3.349.130.837	3.473.554.672	PT Sari Gunung Polowijo
PT Sumber Hidup Chemindo	3.286.709.320	1.003.994.320	PT Sumber Hidup Chemindo
Penjualan Unilever Bandar Jaya (Bandar Lampung)	3.145.742.588	4.214.153.736	Penjualan Unilever Bandar Jaya (Bandar Lampung)
Koperasi Ternak Terpadu Indonesia	3.142.795.400	3.142.795.400	Koperasi Ternak Terpadu Indonesia
PT Niarta Putra Logistik	2.818.937.500	-	PT Niarta Putra Logistik
Eastindo Utama Ind Corp	2.765.538.106	2.765.538.106	Eastindo Utama Ind Corp
PT Anugrah Sinar Samudra	2.559.500.000	2.559.500.000	PT Anugrah Sinar Samudra
CV Rifaby Gustham	2.525.500.000	2.525.500.000	CV Rifaby Gustham
Penjualan Unilever Tulang Bawang (Bandar Lampung)	2.507.961.182	216.892.814	Penjualan Unilever Tulang Bawang (Bandar Lampung)
PT Cipta Andika Teladan	2.443.280.000	2.343.105.520	PT Cipta Andika Teladan
PT Surya Lintas Gemilang	2.386.225.000	2.386.225.000	PT Surya Lintas Gemilang
PT Tanah Selaras Mandiri	2.344.450.000	2.344.450.000	PT Tanah Selaras Mandiri
CV Putra Kutaraja	2.336.191.500	2.336.191.500	CV Putra Kutaraja
PT Sinarkimia Utama	2.314.554.750	1.994.874.750	PT Sinarkimia Utama
Enviromate Technology International	2.146.000.000	-	Enviromate Technology International
PT Virgo Sari	2.131.731.860	2.131.731.860	PT Virgo Sari
PT Semen Jawa	2.064.919.241	2.064.919.241	PT Semen Jawa
PT Timuraya Tunggal	2.017.175.732	594.802.262	PT Timuraya Tunggal
PT Bintang Daud Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Bintang Daud Indonesia
PT Synnex Metrodata Indonesia	1.817.192.002	1.707.085.157	PT Synnex Metrodata Indonesia
PT Wilmar Chemical Indonesia	1.683.283.570	3.982.355.502	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Agri Indoma	1.544.766.692	1.456.496.453	PT Agri Indoma
PT Unilever Indonesia Tbk	1.527.011.575	3.059.975.711	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Davina Celine Abigail	1.270.000.000	-	PT Davina Celine Abigail
CV Minahasa Jaya Bersama	837.440.000	25.628.624.000	CV Minahasa Jaya Bersama
Corteva Agriscience Seeds Indonesia	173.456.017	193.676.398	Corteva Agriscience Seeds Indonesia
PT Graha Jaya Pratama Kinerja	-	20.903.875.200	PT Graha Jaya Pratama Kinerja
PT ZTE Indonesia	-	4.261.346.705	PT ZTE Indonesia
PT Jakarta Sereal	-	4.041.910.239	PT Jakarta Sereal
PT Manggala Prabu Pratama	-	3.108.770.000	PT Manggala Prabu Pratama
PT Hajar Aswad Tani Indonesia	-	2.808.232.000	PT Hajar Aswad Tani Indonesia
PT Signa Husada	-	2.246.687.175	PT Signa Husada
Debitur lainnya ⁱⁱⁱ⁾	108.339.023.374	108.339.023.374	Other debtors ⁱⁱⁱ⁾
Lainnya (saldo di bawah Rp 2 milyar)	151.622.544.474	186.705.577.120	Others (balance below Rp 2 billion)
Sub Jumlah piutang usaha pihak ketiga	588.688.795.787	568.163.178.553	Subtotal trade receivables third parties
Penyisihan Penurunan Nilai	(346.275.746.737)	(292.569.540.054)	Allowance for impairment
Piutang usaha pihak ketiga – bersih	242.413.049.050	275.593.638.499	Trade Receivables third parties – nett
Total Piutang Usaha – Bersih	449.797.845.530	431.292.776.090	Total Trade Receivables – Nett

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

i) Piutang Ditjen Migas

Pada tanggal 5 Februari 2015 Entitas melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN dengan Kementerian ESDM dan Dirjen Anggaran. Hasil dari pembahasan penyelesaian tagihan tersebut, Entitas mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.19/DU/Eks/PPI/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015. Pada tanggal 12 April 2017, Entitas mendapatkan undangan pertemuan dengan Kementerian ESDM dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan gedung Migas Center termasuk kewajiban kepada Entitas.

Piutang Ditjen Migas telah disisihkan secara penuh.

ii) Piutang PT Telepoint Nusantara

Saldo piutang PT Telepoint Nusantara sebesar Rp 75.546.921.225 (termasuk denda). Piutang ini timbul dari kontrak kerjasama impor CT-2 dan handset-nya sesuai Surat Perjanjian No. 24.DNT/K/95 tanggal 29 September 1995 dan No. 228.A/DTK tanggal 10 Mei 1996 dimana eks PT Dharma Niaga (Persero) membuka L/C dan PT Telepoint Nusantara memasarkannya dengan liabilitas melunasi L/C pada saat jatuh tempo. Dalam realisasinya, penjualan CT-2 dan handset-nya mengalami kegagalan yang berakibat PT Telepoint Nusantara tidak dapat melunasi L/C yang telah jatuh tempo tersebut.

Sejak tahun 2015, tidak terdapat penerimaan dari PT Telepoint Nusantara.

Piutang PT Telepoint Nusantara telah disisihkan secara penuh.

iii) Debitur Lainnya

Merupakan piutang usaha yang berasal dari penggabungan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022	
Debitur eks. PT Dharma Niaga	55.257.769.425	55.257.769.425	Debtor ex. PT Dharma Niaga
Debitur eks. PT Cipta Niaga	20.838.760.575	20.838.760.575	Debtor ex. PT Cipta Niaga
Debitur eks. PT Pantja Niaga	4.455.753.714	4.455.753.714	Debtor ex. PT Pantja Niaga
Lainnya	27.786.739.660	27.786.739.660	Others
Jumlah	108.339.023.374	108.339.023.374	Total

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

i) Trade Receivable from Ditjen Migas

On 5 February 2015, the Entity had a meeting facilitated by the Ministry of SOEs with the Ministry of ESDM and the Director General of Budget. The result from the discussion of the settlement of the claims, the Entity sent a letter to the Minister of Energy and Mineral Resources No.19/DU/Eks/PPI/II/2015 dated 20 February 2015. On 12 April 2017, the Entity received an invitation to meet with the Ministry of Energy and Mineral Resources in an effort to solve the problem of building the Oil and Gas Center including the obligations to the Entity.

Receivables from Ditjen Migas had been fully provisioned.

ii) Receivables from PT Telepoint Nusantara

The balance of receivables from PT Telepoint Nusantara amounting to Rp 75,546,921,225 (including penalties). This receivable arises from the contract of cooperation of import of CT-2 and its handset by Letter of Agreement No. 24.DNT/K/95 dated 29 September 1995 and No. 228.A/DTK dated 10 May 1996 where ex. PT Dharma Niaga (Persero) opened L/C and PT Telepoint Nusantara marketed it with the obligation to pay off L/C at maturity. In realization, the sales of CT-2 and handset failed which resulted in PT Telepoint Nusantara unable to repay the L/C.

Since 2015, there had been no receivables collected from PT Telepoint Nusantara.

Receivables from PT Telepoint Nusantara had been fully provisioned.

iii) Other Debtors

Represent trade receivables originating from the merger of the 3 (three) State-Owned Enterprises (SOE) with details as follows:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)
iii) Debitur Lainnya (lanjutan)

Debitur lainnya telah disisihkan secara penuh.
Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi
atas penurunan nilai piutang cukup untuk
menutup kerugian atas tidak tertagihnya
piutang.

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	2023	2022	
Saldo awal	381.239.280.062	381.571.179.732	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	53.706.206.683	20.326.488.939	Current year provision
Pemulihan	-	(10.407.465.678)	Recovery
Reklasifikasi ke piutang lain-lain	-	(10.250.922.931)	Reclassification to other receivables
Saldo akhir	434.945.486.745	381.239.280.062	Ending balance

Piutang usaha dijadikan jaminan atas fasilitas
pinjaman bank (Catatan 24 dan 26).

7. TRADE RECEIVABLES (continued)
iii) Other Debtors (continued)

Other debtors had been fully provisioned.
Management believes that the provision for
impairment is adequate.

Movements of Allowance for Impairment Losses

	2023	2022	
Saldo awal	381.239.280.062	381.571.179.732	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	53.706.206.683	20.326.488.939	Current year provision
Pemulihan	-	(10.407.465.678)	Recovery
Reklasifikasi ke piutang lain-lain	-	(10.250.922.931)	Reclassification to other receivables
Saldo akhir	434.945.486.745	381.239.280.062	Ending balance

Trade receivables are pledged as collaterals
for bank loan facilities (Notes 24 and 26).

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022	
SPKPBM Minol	117.709.880.717	117.709.880.717	SPKPBM Minol
Perum Pembangunan Perumahan Nasional	58.280.615.659	58.280.615.659	Perum Pembangunan Perumahan Nasional
PT Ficorp	20.556.276.100	20.556.276.100	PT Ficorp
Piutang pegawai	9.144.317.398	10.118.869.515	Employee receivable
PT Berkat Manunggal Jaya	5.196.270.874	5.196.270.874	PT Berkat Manunggal Jaya
Piutang klaim	5.627.793.459	3.454.553.348	Claims receivable
PT Agrochemindo Niagatama	2.868.699.532	2.868.699.532	PT Agrochemindo Niagatama
Lain-lain	13.795.425.398	20.978.857.099	Others
Jumlah	233.179.279.137	239.164.022.844	Total
Penyisihan:			Allowance:
Saldo awal	(178.197.125.137)	(158.799.489.724)	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	(3.773.377.100)	(9.146.712.482)	Current year provision
Reklasifikasi dari piutang usaha	-	(10.250.922.931)	Reclassification from trade Receivables
Saldo akhir	(181.970.502.237)	(178.197.125.137)	Ending balance
Jumlah Bersih	51.208.776.900	60.966.897.707	Net Amount

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

<u>Piutang distributor atas SPKPBM Minol</u>		<u>Distributors' receivables for SPKPBM Minol</u>	
	2023	2022	
PT Indovinos	56.491.277.066	56.491.277.066	PT Indovinos
PT Muliatama Mitra Sentosa	23.521.553.670	23.521.553.670	PT Muliatama Mitra Sentosa
PT Geka Nara Sutra	9.241.686.791	9.241.686.791	PT Geka Nara Sutra
PT Bimasena Cipta Caraka	7.631.344.405	7.631.344.405	PT Bimasena Cipta Caraka
PT Citra Surya Gemilang	7.387.340.939	7.387.340.939	PT Citra Surya Gemilang
PT Danisa Texindo	5.544.742.235	5.544.742.235	PT Danisa Texindo
PT Megaguna Semesta	3.268.483.338	3.268.483.338	PT Megaguna Semesta
PT Esham Dima	2.566.539.045	2.566.539.045	PT Esham Dima
PT Duta Permata Synergy	2.056.913.228	2.056.913.228	PT Duta Permata Synergy
Jumlah	117.709.880.717	117.709.880.717	Total

Merupakan tagihan kepada para distributor yang timbul dari terbitnya Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), Cukai Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pendistribusian Minuman Beralkohol antara Grup dengan para distributor yang terkait dengan importasi Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) tahun 2006.

Represent receivables from distributors arising from the issuance of the Letter of Import Duty Shortage Notification (SPKPBM), Excise of Administration Fines and Taxes in the Framework of Imports and in accordance with the Distribution Agreement of Alcoholic Drinks between the Company and the distributors related to the import of Beverages Containing Ethyl Alcohol (MMEA) in 2006.

Piutang distributor atas SPKPBM Minol telah disisihkan secara penuh.

Receivables from distributor SPKPBM Minol had been fully provisioned.

Piutang pegawai

Piutang pegawai merupakan pinjaman pegawai untuk biaya perawatan dan pinjaman lainnya yang pengembaliannya dilakukan dengan pemotongan atas gaji yang bersangkutan, atas piutang pegawai.

Employee receivables

Employee receivables represent employee loans for maintenance and other borrowings whose repayments are made by deductions on the respective wages, on employees' accounts receivable.

Piutang klaim

Piutang klaim merupakan klaim kepada pihak ketiga dan perorangan atas produk Grup, setoran inkaso, retur barang dan lain sebagainya, serta klaim biaya promosi kepada pemasok.

Claims receivable

Claims receivable represent claims to third parties and individuals on Group's products, collection deposits, return of goods, etc., and claims to supplier for promotion expenses.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

9. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022	
Barang dalam gudang:			Goods in warehouse:
Produk kimia berbahaya	50.269.004.621	25.622.538.609	Hazardous chemical products
Produk pupuk dan pestisida	25.011.176.292	29.533.578.574	Fertilizer and pesticide products
Produk konsumsi dan bahan pokok	21.342.344.392	25.024.749.341	Consumption and basic commodity products
Produk Unilever	8.423.074.306	6.873.491.535	Unilever products
Produk farmasi dan alat kesehatan	7.916.711.339	9.232.410.310	Pharmaceutical products and medical devices
Produk bahan bangunan lainnya	639.245.633	1.011.217.204	Other building material products
Produk/jasa lainnya	714.259.565	112.425.086	Other products/services
Sub Jumlah	114.315.816.148	97.410.410.659	Subtotal
Perlengkapan:			Supplies:
Suku cadang kendaraan	498.928.779	283.444.436	Spare part
Alat tulis kantor	-	806.012.694	Office stationery
Sub Jumlah	498.928.779	1.089.457.130	Subtotal
Jumlah Persediaan	114.814.744.927	98.499.867.789	Total Inventory
Akumulasi penurunan nilai	(1.471.901.765)	(1.471.901.765)	Accumulated impairment
Jumlah Pesediaan – Bersih	113.342.843.162	97.027.966.024	Total Inventory – Net

Pada tahun 2023 dan 2022, persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Ramayana dan PT Asuransi Jasindo dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 110.426.472.008 dan Rp 63.817.813.811 terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusakan dan risiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut telah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

In 2023 and 2022 the inventories were insured to PT Asuransi Jasindo with total insured amounting to Rp 110,426,472,008 and Rp 63,817,813,811, respectively, against the risk of losses that might occur as a result of fire, loss, natural disasters, riots and other risks. Management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses.

Persediaan usang dan rusak dipindahkan dari persediaan ke persediaan barang rusak (Catatan 18).

Obsolete and damaged inventory is transferred from inventory to inventory of damaged goods (Note 18).

Persediaan dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman bank (Catatan 24).

Inventories are pledged as collaterals for bank loan facilities (Note 24).

10. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022	
Uang muka pembelian	104.271.914.415	88.472.692.915	Advances
Uang muka operasional	11.805.029.365	6.130.202.677	Operating advance
Uang muka lain-lain	4.879.313.890	19.254.194.630	Other advances
Jumlah	120.956.257.670	113.857.090.222	Total

10. ADVANCES

The account consists of:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

11. PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Operasional	8.033.624.812	9.936.462.738	Operational
Umum dan administrasi	1.841.471.917	1.904.949.342	General & administration
Sewa gudang/ kantor/ rumah	470.240.140	326.636.773	Warehouse/office/home rentals
Asuransi	194.180.633	867.504.790	Insurance
Jumlah	10.539.517.502	13.035.553.643	Total

12. BIAYA OPERASI DALAM PROSES

12. OPERATING COSTS IN PROCESS

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Jasa pergudangan	10.408.939.284	12.205.939.653	Warehousing services
Jasa logistik	8.520.743.433	15.728.235.904	Logistic services
Waste integrated system	-	46.771.100	Waste integrated system
Jumlah	18.929.682.717	27.980.946.657	Total

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	% Kepemilikan/ Ownership	2023	2022
Perusahaan Asosiasi/Associate Company			
• PT Kias Intertrada	40,00	20.000.000	20.000.000
Akumulasi penurunan nilai/ Accumulated impairment			
Perusahaan Asosiasi/Associate Company			
• PT Kias Intertrada	40,00	(20.000.000)	(20.000.000)
Sub jumlah / Subtotal		-	-
Penyertaan saham/Investment in			
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Manajemen CBT Nusantara	6,10	250.000.000	250.000.000
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	3,98	160.000.000	160.000.000
BV Nederland Unipro	1,70	45.936.640	45.936.640
PT Tropicana Utama Furniture	10,00	38.251.125	38.251.125
Unipro Amsterdam	2,84	32.125.754	32.125.754
PT Djengger Tour	3,38	3.385.000	3.385.000
Unipro Singapore	2,84	1.605.450	1.605.450
Multi Niaga, Amsterdam	-	18	18
Obligasi RI tahun 1959/ RI Bonds in 1959	-	33	33
Sub jumlah / Subtotal		10.531.304.020	10.531.304.020

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 13. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)
(lanjutan)

	% Kepemilikan/ Ownership	2023	2022
Akumulasi penurunan nilai / Accumulated impairment			
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	(2.729.327.661)	(1.877.349.538)
PT Manajemen CBT Nusantara	6,10	-	-
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	3,98	(160.000.000)	(160.000.000)
BV Nderland Unipro	1,70	(45.936.640)	(45.936.640)
PT Tropicana Utama Furniture	10,00	(38.251.125)	(38.251.125)
Unipro Amsterdam	2,84	(32.125.754)	(32.125.754)
PT Djengger Tour	3,38	(3.385.000)	(3.385.000)
Unipro Singapore	2,84	(1.605.450)	(1.605.450)
Multi Niaga, Amsterdam	-	(18)	(18)
Obligasi RI tahun 1959/ Bonds RI in 1959	-	(33)	(33)
Subjumlah / Subtotal		(3.010.631.681)	(2.158.653.558)
Nilai Tercatat / Carrying Value		7.520.672.339	8.372.650.462

Penyertaan pada Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, PT Kias Intertrada, dan BV Nderland Unipro nilainya disisihkan secara permanen karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi.

Grup memiliki keyakinan bahwa, tidak ada kewajiban dalam bentuk *constructive obligation* di masa datang terkait kepemilikan tersebut.

Pada tanggal 24 Maret 2017, sesuai surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-204/MBU/03.2017 perihal persetujuan Pendirian Anak Grup Perum Bulog PT Mitra BUMDes Nusantara dan surat dari Entitas No. FI/DU/Int/PPI/V/2017 Perihal Pembentukan PT Mitra BUMDes Nusantara, Entitas menyeter sebesar Rp 10.000.000.000 sebagai penyertaan saham di PT Mitra BUMDes Nusantara atau sebesar 10% dari komposisi modal dasar PT Mitra BUMDes Nusantara.

Investments in Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, PT Kias Intertrada, and BV Nderland Unipro were impaired permanently as these companies are longer in operation.

The Group believes that there is no obligation in the form of future constructive obligations related to such ownership.

On 24 March 2017, pursuant to the letter from the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-204/MBU/03.2017 concerning the approval of the Establishment of Subsidiary of Perum Bulog PT Mitra BUMDes Nusantara and the letter from the Entity No. FI/DU/Int/PPI/V/2017 concerning the Establishment of PT Mitra BUMDes Nusantara, the Entity paid a total of Rp 10,000,000,000 as investment in PT Mitra BUMDes Nusantara or 10% of the composition of the authorized capital of PT Mitra BUMDes Nusantara.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

	2023					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Increase	Pengurangan/ Decrease	Penyesuaian dan Reklasifikasi / Adjustment and Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	1.618.652.818.760	-	-	(45.684.630.000)	1.572.968.188.760	Land
Bangunan	298.339.786.885	2.023.497.000	-	(3.929.725.735)	296.433.558.150	Buildings
Kendaraan	223.541.005.330	672.292.000	(5.544.790.000)	-	218.668.507.330	Vehicle
Inventaris kantor	109.098.289.059	1.292.454.009	-	-	110.390.743.068	Office Equipment
Emplasement & pagar	58.781.344.401	-	-	-	58.781.344.401	Emplacement & fence
Peralatan lainnya	8.083.364.227	1.921.751.173	-	-	10.005.115.400	Other Equipment
Aset dalam pelaksanaan:						Assets in Progress:
Bangunan	100.164.251.953	2.700.368.949	-	(2.097.791.575)	100.766.829.327	Building
Jumlah harga perolehan	2.416.660.860.615	8.610.363.131	(5.544.790.000)	(51.712.147.310)	2.368.014.286.436	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(93.922.878.880)	(6.676.173.559)	5.729.829.179	1.069.900.118	(93.799.323.142)	Buildings
Kendaraan	(165.138.430.616)	(12.940.593.263)	29.382.934.155	-	(148.696.089.724)	Vehicle
Inventaris Kantor	(88.149.959.326)	(12.043.216.675)	-	-	(100.193.176.001)	Office Equipment
Peralatan Lainnya	(5.144.261.283)	(705.282.874)	-	-	(5.849.544.157)	Other Equipment
Emplasement & pagar	(43.527.025.131)	(2.057.414.013)	4.836.336.126	-	(40.748.103.018)	Emplacement & fence
Jumlah akumulasi penyusutan	(395.882.555.236)	(34.422.680.384)	39.949.099.460	1.069.900.118	(389.286.236.042)	Total accumulated depreciation
Akumulasi penurunan nilai:						Accumulated impairment
Tanah	(60.096.600.000)	-	-	-	(60.096.600.000)	Land
Bangunan	(687.016.979)	-	-	-	(687.016.979)	Building
Jumlah akumulasi penurunan nilai	(60.783.616.979)	-	-	-	(60.783.616.979)	Total accumulated impairment
Nilai Buku	1.959.994.688.400	-	-	-	1.917.944.433.415	Book Value

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

	2022					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Increase</i>	Pengurangan/ <i>Decrease</i>	Penyesuaian dan Reklasifikasi / <i>Adjustment and Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	1.697.362.152.396	-	-	(78.709.333.636)	1.618.652.818.760	<i>Land</i>
Bangunan	315.978.033.820	78.000.000	-	(17.716.246.935)	298.339.786.885	<i>Buildings</i>
Kendaraan	224.232.603.350	452.901.980	(1.144.500.000)	-	223.541.005.330	<i>Vehicle</i>
Inventaris Kantor	104.758.078.241	2.806.930.174	-	1.533.280.644	109.098.289.059	<i>Office Equipment</i>
Emplasement & pagar	58.113.344.401	668.000.000	-	-	58.781.344.401	<i>Emplacement & Fence</i>
Peralatan Lainnya	10.157.695.923	344.159.835	-	(2.418.491.531)	8.083.364.227	<i>Other Equipment</i>
Aset dalam pelaksanaan: Bangunan	99.576.379.319	5.114.789.158	-	(4.526.916.524)	100.164.251.953	<i>Assets in Progress: Building</i>
Jumlah harga Perolehan	2.510.178.287.450	9.464.781.147	(1.144.500.000)	(101.837.707.982)	2.416.660.860.615	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	(102.122.502.563)	(7.043.955.915)	-	15.243.579.598	(93.922.878.880)	<i>Buildings</i>
Kendaraan	(159.893.598.840)	(16.346.203.531)	1.144.500.000	9.956.871.755	(165.138.430.616)	<i>Vehicle</i>
Inventaris kantor	(79.040.828.792)	(13.064.887.070)	-	3.955.756.536	(88.149.959.326)	<i>Office Equipment</i>
Peralatan lainnya	(5.906.117.273)	(313.730.417)	-	1.075.586.407	(5.144.261.283)	<i>Other Equipment</i>
Emplasement & pagar	(38.727.152.841)	(4.799.872.290)	-	-	(43.527.025.131)	<i>Emplacement & fence</i>
Jumlah akumulasi Penyusutan	385.690.200.309	41.568.649.223	1.144.500.000	(30.231.794.296)	(395.882.555.236)	Total accumulated Depreciation
Akumulasi penurunan nilai:						Accumulated Impairment
Tanah	-	60.096.600.000	-	-	(60.096.600.000)	<i>Buildings</i>
Bangunan	-	687.016.979	-	-	(687.016.979)	<i>Vehicle</i>
Jumlah akumulasi penurunan nilai	-	60.783.616.979	-	-	(60.783.616.979)	Total accumulated impairment
Nilai Buku	2.124.488.087.141				1.959.994.688.400	Book Value

Aset tetap bangunan dan kendaraan diasuransikan dengan keseluruhan nilai pertanggungan sebesar Rp 64.696.820.000 dan Rp 184.401.318.053, masing-masing untuk tahun 2023 dan 2022. Grup berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 34.422.680.384 dan Rp 41.568.649.223 diakui sebagai Beban Administrasi dan Umum (Catatan 37).

Aset tetap dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman bank (Catatan 24 dan 26).

Fixed assets of building and vehicles are insured with total sum insured amounting Rp 64,696,820,000 and Rp 184,401,318,053, respectively for years 2023 and 2022. The Group believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses.

Depreciation in 2023 and 2022 statement amounting to Rp 34,422,680,384 and Rp 41,568,649,223 respectively, is General and Administration Expenses (Note 37).

Fixed assets are pledged as collaterals for bank loan facilities (Notes 24 and 26).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2023 dan 2022, Grup merubah kebijakan estimasi nilai residu dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian yang mengurangi akumulasi penyusutan bangunan dan kendaraan masing-masing sebesar Rp 34.432.554.460 dan Rp 20.456.847.753.

Nilai buku aset tetap pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.917.944.433.415, termasuk Rp 18.515.431.625 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga, dan Rp 82.650.664.990 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa. Manajemen telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan penguasaan secara fisik dan sertifikat kepemilikan atas aset-aset tersebut.

Rincian atas reklasifikasi aset tetap pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

In 2023 and 2022, the Group revised the policy regarding estimate residual value in calculating depreciation of fixed assets which resulted in an adjustment that decrease the accumulated depreciation of buildings and vehicle amounting to Rp 34,432,554,460 and Rp 20,456,847,753, respectively.

Book value of fixed assets as at 31 December 2023 amounting to Rp 1,917,944,433,415, including Rp 18,515,431,625 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or other proof of ownership and are physically occupied by third parties, and Rp 82,650,664,990 of land and buildings which Right to Use certificates had expired. Management has taken measures and will continue its effort to ensure that it secures the physical possession and the ownership certificates of the assets concerned.

The details of the reclassification of fixed assets in 2023 and 2022 are as follows:

2023

Harga perolehan/Acquisition Cost				
	Dari/ From	Ke/ To	Jumlah/ Total	
Reklasifikasi dari (ke) Properti Investasi (Catatan 16)				Reclassification from(to) Investment Properties (Note 16)
Tanah	-	(45.684.630.000)	(45.684.630.000)	Land
Bangunan	-	(6.027.517.310)	(6.027.517.310)	Building
Jumlah	-	(51.712.147.310)	(51.712.147.310)	Total
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation				
	Dari/ From	Ke/ To	Jumlah/ Total	
Reklasifikasi dari (ke) Properti Investasi (Catatan 16)				Reclassification from(to) Investment Properties (Note 16)
Bangunan	-	1.069.900.118	1.069.900.118	Building
Subjumlah	-	1.069.900.118	1.069.900.118	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

2022				
Harga perolehan/Acquisition Cost				
	Dari/ From	Ke/ To	Jumlah/ Total	
Reklasifikasi dari (ke)				Reclassification from(to)
Properti Investasi				Investment Properties
(Catatan 16)				(Note 16)
Tanah	35.249.943.505	(116.412.567.141)	(81.162.623.636)	Land
Bangunan	-	(20.044.301.159)	(20.044.301.159)	Building
Subjumlah	35.249.943.505	(136.456.868.300)	(101.206.924.795)	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke)				Reclassification from(to)
Aset Lain-lain (Catatan 18)				Other Assets (Note 18)
Tanah	2.453.290.000	-	2.453.290.000	Land
Bangunan	135.880.000	-	135.880.000	Building
Aset dalam pelaksanaan	-	(2.334.742.300)	(2.334.742.300)	Assets in progress
Subjumlah	2.589.170.000	(2.334.742.300)	254.427.700	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke)				Reclassification from(to)
Aset Tak Berwujud				Intangible Assets
Peralatan kantor	-	(885.210.887)	(885.210.887)	Office equipment
Subjumlah	-	(885.210.887)	(885.210.887)	Subtotal
Jumlah	37.839.113.505	(139.676.821.487)	(101.837.707.982)	Total
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation				
	Dari/ From	Ke/ To	Jumlah/ Total	
Reklasifikasi dari (ke)				Reclassification from(to)
Properti Investasi				Investment Properties
(Catatan 16)				(Note 16)
Bangunan	-	(4.792.830.205)	(4.792.830.205)	Building
Subjumlah	-	(4.792.830.205)	(4.792.830.205)	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke)				Reclassification from(to)
Aset Lain-lain (Catatan 18)				Other Assets (Note 18)
Bangunan	47.758.336	-	47.758.336	Building
Subjumlah	47.758.336	-	47.758.336	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke)				Reclassification from(to)
Aset Tak Berwujud				Intangible Assets
Peralatan kantor	-	(5.031.342.942)	(5.031.342.942)	Office equipment
Subjumlah	-	(5.031.342.942)	(5.031.342.942)	Subtotal
Jumlah	47.758.336	(9.824.173.147)	(9.776.414.811)	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

15. ASET TIDAK BERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

The account consist of:

	2023	2022	
Piranti lunak	37.953.385.898	37.937.169.682	Software
Akumulasi Penyusutan – Piranti lunak	(22.613.338.646)	(21.531.270.184)	Accumulative depreciation- Software
Goodwill	3.300.000.000	3.300.000.000	Goodwill
Jumlah	18.640.047.252	19.705.899.498	Total

16. PROPERTI INVESTASI

16. INVESTMENT PROPERTIES

2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					<i>At cost</i>
Tanah	450.492.634.392	45.684.630.000	-	496.177.264.392	Land
Bangunan	57.652.209.037	4.957.617.192	-	62.609.826.229	Building
	508.144.843.429	50.642.247.192	-	558.787.090.621	
Perubahan nilai wajar					<i>Changes in fair value</i>
Tanah	623.699.291.608	104.473.932.047	-	728.173.223.655	Land
Bangunan	(10.565.769.884)	9.370.245.608	(305.790.000)	(1.501.314.276)	Building
	613.133.521.724	113.844.177.655	(305.790.000)	726.671.909.379	
Jumlah	1.121.278.365.153			1.285.459.000.000	<i>Total</i>

2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					<i>At cost</i>
Tanah	363.976.612.552	121.765.965.345	(35.249.943.505)	450.492.634.392	Land
Bangunan	43.551.147.312	14.101.061.725	-	57.652.209.037	Building
	407.527.759.864	135.867.027.070	(35.249.943.505)	508.144.843.429	
Perubahan nilai wajar					<i>Changes in fair value</i>
Tanah	535.526.391.000	88.172.900.608	-	623.699.291.608	Land
Bangunan	(7.187.257.312)	(3.378.512.572)	-	(10.565.769.884)	Building
	528.339.133.688	84.794.388.036	-	613.133.521.724	
Jumlah	935.866.893.552			1.121.278.365.153	<i>Total</i>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

16. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Penambahan dan pengurangan properti investasi merupakan reklasifikasi dari/ke aset tetap (Catatan 14). Atas penambahan di tahun 2023 dan 2022, Group mengakui perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp 51.985.175.808 dan Rp 69.425.363.883 yang dibukukan sebagai Penghasilan Komprehensif Lain.

Perubahan nilai wajar atas properti investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 61.859.001.847 dan Rp 15.369.024.153 dibukukan sebagai bagian dari Pendapatan Non-Usaha (Catatan 38).

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muhammad Taufik dan Rekan, sedangkan Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2022 didasarkan pada laporan penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira dan Rekan.

17. ASET HAK GUNA

Akun ini terdiri dari:

2023					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurang/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balances</i>	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	11.166.621.138	21.495.848.561	-	32.662.469.699	Building
Kendaraan	1.193.771.136	3.077.572.697	-	4.271.343.833	Vehicle
Peralatan kantor	-	1.069.677.474	-	1.069.677.474	Office equipment
Jumlah	12.360.392.274	25.643.098.732	-	38.003.491.006	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	4.270.650.178	12.215.335.060	-	16.485.985.238	Building
Kendaraan	745.662.168	832.805.555	-	1.578.467.723	Vehicle
Peralatan kantor	-	356.559.157	-	356.559.157	Office equipment
Jumlah	5.016.312.346	13.404.699.772	-	18.421.012.118	Total
Nilai buku Bersih					Net book Value
	7.344.079.928			19.582.478.888	

16. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Addition and deduction of property investment in represents reclassification from fixed assets (Note 14). Relating to the addition in 2023 and 2022, the Group recognises changes in fair value amounting to Rp 51,985,175,808 and Rp 69,425,363,883, respectively, which is recorded as Other Comprehensive Income.

Changes in fair value of property investment as at 31 Desember 2023 and 2022 amounting to Rp 61,859,001,847 and Rp 15,369,024,153, respectively, are recorded as part of Non-Operating Income (Note 38).

Fair value of the investment property as at 31 December 2023 is based on appraisal valuation prepared by Public Appraisal Firm Muhammad Taufik and Partner, while Fair value of the investment property as at 31 December 2022 is based on appraisal valuation prepared by Public Appraisal Firm Dasa'at Yudistira and Partner.

17. RIGHT OF USE ASSETS

The account consists of:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

17. ASET HAK GUNA (lanjutan)

17. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

2022					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurang/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balances</i>	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Bangunan	2.265.574.146	8.901.046.992	-	11.166.621.138	<i>Building</i>
Kendaraan	-	1.193.771.136	-	1.193.771.136	<i>Vehicle</i>
Jumlah	2.265.574.146	10.094.818.128	-	12.360.392.274	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	1.788.248.693	2.482.401.485	-	4.270.650.178	<i>Building</i>
Kendaraan	-	745.662.168	-	745.662.168	<i>Vehicle</i>
Jumlah	1.788.248.693	3.228.063.653	-	5.016.312.346	Total
Nilai buku Bersih					Net book Value
	477.325.453			7.344.079.928	

18. ASET LAIN-LAIN

18. OTHER ASSETS

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Aset tetap yang tidak dimanfaatkan	419.540.656.287	417.427.547.027	<i>Unused fixed assets</i>
Beban tangguhkan	19.858.971.133	21.017.385.149	<i>Deferred Expenses</i>
Uang jaminan	176.302.500	2.559.643.428	<i>Deposits</i>
Lain-lain	6.592.161.611	6.441.469.323	<i>Others</i>
Jumlah	446.168.091.531	447.446.044.927	Total

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan

Unused fixed assets

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan merupakan reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Unused fixed assets are reclassification of fixed assets which are not used in business, with details as follows:

	2023	2022	
Tanah	416.171.239.738	416.171.239.738	<i>Land</i>
Bangunan	27.708.446.156	27.708.446.156	<i>Building</i>
Akumulasi Penyusutan:			<i>Accumulated depreciation:</i>
Saldo awal	(26.452.138.867)	(26.543.539.679)	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	(1.379.257.182)	(1.654.782.409)	<i>Addition</i>
Perubahan nilai residu	3.492.366.442	1.746.183.221	<i>Change in residual value</i>
Saldo akhir	(24.339.029.607)	(26.452.138.867)	<i>Ending balance</i>
Jumlah	419.540.656.287	417.427.547.027	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

18. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Nilai buku aset tetap yang tidak dimanfaatkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 419.540.656.287, termasuk Rp 4.920.446.578 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga, dan Rp 235.979.462.902 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa. Manajemen telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan penguasaan secara fisik dan sertifikat kepemilikan atas aset-aset tersebut.

Beban tangguhan

Beban tangguhan merupakan beban-beban yang dikeluarkan terkait dengan perpanjangan hak atas tanah serta pengembangan dan pemeliharaan. Beban perpanjangan hak atas tanah diamortisasi selama 20 tahun. Biaya pengembangan dan pemeliharaan diamortisasi sesuai masa manfaatnya.

18. OTHER ASSETS (continued)

The book value of unused fixed assets as at 31 December 2023 amounting to Rp 419,540,656,287, including Rp 4,920,446,578 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or other proof of ownership and are physically occupied by third parties, and Rp 235,979,462,902 of land and buildings which Right to Use certificates had expired. Management has taken measures and will continue its effort to ensure that it secures the physical possession and the ownership certificates of the assets concerned.

Deferred expenses

Deferred expenses represent expenses incurred in connection with the extension of land rights and development and maintenance costs. Land rights extension expenses are amortized over 20 years. Development and maintenance costs are amortized over their useful life.

	2023	2022	
Beban hak atas tanah	26.713.351.139	26.011.727.960	<i>Deferred expenses</i>
Biaya pengembangan dan Pemeliharaan	16.247.271.488	15.975.470.259	<i>Development and maintenance costs</i>
Amortisasi	(23.101.651.494)	(20.969.813.070)	<i>Amortization</i>
Jumlah	19.858.971.133	21.017.385.149	Total

Lain-lain

Others

	2023	2022	
Persediaan barang rusak	24.130.459.139	21.510.060.105	<i>Inventory of damaged goods</i>
Cadangan persediaan barang rusak	(24.130.459.139)	(21.510.060.105)	<i>Provision for damaged goods</i>
Pos dalam penyelesaian	34.133.150.235	34.133.150.235	<i>Posts in progress</i>
Akumulasi amortisasi pos dalam Penyelesaian	(33.431.674.936)	(33.431.674.936)	<i>Accumulated amortization of post in progress</i>
Lainnya	5.890.686.312	5.739.994.024	<i>Others</i>
Jumlah	6.592.161.611	6.441.469.323	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

19. UTANG USAHA

19. TRADE PAYABLES

Akun ini terdiri dari:	<i>The account consists of:</i>		
	2023	2022	
Pihak berelasi:			Related parties:
PT Nindya Karya	10.765.141.982	10.765.141.982	PT Nindya Karya
PT Pupuk Kalimantan Timur	15.470.476.839	5.917.511.163	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Petrokimia Gresik	10.030.752.381	4.531.992.790	PT Petrokimia Gresik
PT PG Rajawali II	9.215.594.400	-	PT PG Rajawali II
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	5.979.001.713	716.224.240	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
PT Petrosida Gresik	4.467.103.932	10.169.852.951	PT Petrosida Gresik
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	3.524.356.183	-	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Timah	634.538.585	5.569.408.620	PT Timah
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	3.433.973.644	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Lainnya (saldo dibawah Rp 2 milyar)	10.100.137.298	11.015.482.450	Others (Balance below Rp 2 billion)
Sub Jumlah	70.187.103.313	52.119.587.840	Subtotal
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Industri Nabati Lestari	16.169.433.057	21.444.642.294	PT Industri Nabati Lestari
Koperasi Pemasaran Peternak Unggas Sejahtera	14.824.488.784	-	Koperasi Pemasaran Peternak Unggas Sejahtera
PT Unilever Indonesia	12.046.219.408	14.829.442.664	PT Unilever Indonesia
CV Arjuna Group	10.340.488.359	-	CV Arjuna Group
PT Samaco Karkasindo Utama	9.623.105.545	-	PT Samaco Karkasindo Utama
PT Permata Hijau Palm Oleo	6.984.543.102	7.332.787.247	PT Permata Hijau Palm Oleo
PT LDC Indonesia	6.446.684.255	-	PT LDC Indonesia
Koperasi Pinsar Petelur Nasional	5.262.290.874	-	Koperasi Pinsar Petelur Nasional
PT Prima Karya Sarana Sejahtera	5.246.426.407	6.580.303.142	PT Prima Karya Sarana Sejahtera
PT Widodo Makmur Unggas	5.237.208.653	-	PT Widodo Makmur Unggas
PT Inti Everspring Indonesia	4.225.322.226	4.570.320.885	PT Inti Everspring Indonesia
PT Sinar Prapanca	3.811.443.747	817.688.217	PT Sinar Prapanca
PT Angkasa Biru Laut	3.442.975.867	3.874.882.681	PT Angkasa Biru Laut
PT Multi Bangun Abadi	3.304.854.863	5.652.180.510	PT Multi Bangun Abadi
Primus Sanus Cooking Oil Industrial	3.213.399.979	2.922.058.281	Primus Sanus Cooking Oil Industrial
PT Janu Putra Sejahtera	3.153.232.807	-	PT Janu Putra Sejahtera
PT Surya Darma Perkasa	2.970.916.403	-	PT Surya Darma Perkasa
PT Arjuna Mitra Persada	2.858.658.158	-	PT Arjuna Mitra Persada
PT Smart	2.273.112.697	2.273.112.697	PT Smart
PT Sari Dumai Sejati	2.183.999.680	1.189.843.356	PT Sari Dumai Sejati
PT Lyono Transportasi Logistik	2.148.050.582	-	PT Lyono Transportasi Logistik
PT Sigma cipta caraka	2.000.581.260	3.207.803.593	PT Sigma cipta caraka
PT LDC East Indonesia	1.760.883.860	2.970.539.145	PT LDC East Indonesia
PT Karya Putra Dumai Mandiri	1.671.858.879	4.001.622.979	PT Karya Putra Dumai Mandiri
PT Emjebe Pharma	1.529.216.527	13.508.949.158	PT Emjebe Pharma
PT Widatra Bhakti	1.508.012.713	4.635.504.989	PT Widatra Bhakti
PT Tiga A	1.467.367.741	6.621.724.769	PT Tiga A
PT Inovasi Global Solusindo	1.378.812.997	1.828.812.997	PT. Inovasi Global Solusindo
PT Satoria Aneka Industri	1.153.089.993	15.525.497.104	PT Satoria Aneka Industri
PT. Jasa Prima Logistik Bulog	243.685.223	943.685.223	PT. Jasa Prima Logistik Bulog
PT Wilmar Chemical Indonesia	196.000.137	4.744.005.895	PT Wilmar Chemical Indonesia
OCI (Hongkong) Ltd	-	26.761.230.408	OCI (Hongkong) Ltd
PT Esha Sumber Hidayag Agung	-	11.555.050.900	PT Esha Sumber Hidayag Agung
Tan Thanh An Co Ltd	-	10.066.074.380	Tan Thanh An Co Ltd
Xiamen Ditai Import and Export Co Ltd.	-	7.968.715.000	Xiamen Ditai Import and Export Co Ltd.
PT Mustika Ratubuana Internasional	-	6.932.315.000	PT Mustika Ratubuana Internasional
PT Prima Karya Sarana	-	6.824.073.998	PT Prima Karya Sarana
Cong Ty Tnhh Mtv Cong Thanh	-	5.336.402.500	Cong Ty Tnhh Mtv Cong Thanh
PT Airindo Teknologi Perkasa	-	3.975.000.000	PT Airindo Teknologi Perkasa
Surya Trans Pte Ltd	-	3.488.840.000	Surya Trans Pte Ltd
Sanmik Group Ltd.	-	2.679.129.819	Sanmik Group Ltd.
Beeecom Inc. Corporation	-	2.520.359.100	Beeecom Inc. Corporation
PT Wahyu Putra Jaya	-	1.032.666.576	PT Wahyu Putra Jaya
Lainnya (saldo di bawah Rp 2 milyar)	46.051.188.996	86.575.885.506	Others (balance below Rp 2 billion)
Sub Jumlah	184.727.553.779	305.191.151.013	Subtotal
Jumlah	254.914.657.092	357.310.738.853	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA	2023	2022	20. OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES
Akun ini terdiri dari:			<i>The account consists of:</i>
PT Sarana Jakarta Ventura	2.291.666.667	4.883.000.000	<i>PT Sarana Jakarta Ventura</i>
PT Sarana Kaltim Ventura	2.500.000.000	-	<i>PT Sarana Kaltim Ventura</i>
PT Sarana Sulsel Ventura	2.000.000.000	-	<i>PT Sarana Sulsel Ventura</i>
Deposito Pelanggan	-	11.214.482.146	<i>Customers Deposits</i>
PT Telkom	-	2.890.982.418	<i>PT Telkom</i>
PT Mitra Steel Indonesia	-	1.620.753.444	<i>PT Mitra Steel Indonesia</i>
Lainnya	24.238.626.196	17.988.695.795	<i>Others</i>
Jumlah	31.030.292.863	38.597.913.803	Total

21. LIABILITAS SEWA

21. LEASE LIABILITIES

Liabilitas sewa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 379.039.341 dan Rp 664.204.976 dan merupakan utang sewa kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan rata-rata 36 bulan dengan tingkat bunga berkisar 5,57% - 14,05%.

Lease liabilities as at 31 December 2023 and 31 December 2022 amounting to Rp 379,039,341 and Rp 664,204,976 respectively represent leases payable of vehicles with an average financing period of 36 months with an interest rate of 5.57% - 14.05%.

22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

22. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Beban operasi	61.262.771.598	48.843.004.421	<i>Operating expenses</i>
Beban kantor	19.591.555.797	18.891.210.084	<i>Office expenses</i>
Beban pegawai	696.969.999	13.941.632	<i>Employee expenses</i>
Beban lainnya	855.964.689	1.257.144.348	<i>Other expenses</i>
Jumlah	82.407.262.083	69.005.300.485	Total

23. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

23. UNEARNED REVENUES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Jasa pergudangan	63.831.747.016	55.418.569.655	<i>Warehouse services</i>
Uang muka penjualan produk	50.404.364.481	51.953.147.436	<i>Advance for product sales</i>
Pendapatan sewa	22.403.719.502	17.670.862.494	<i>Rental income</i>
Lainnya	299.999	1.530.579.319	<i>Others</i>
Jumlah	136.640.130.998	126.573.158.904	Total
Bagian jangka pendek	69.953.061.735	83.848.616.144	Current portion
Bagian jangka panjang	66.687.069.263	42.724.542.760	Non current portion

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

24. UTANG BANK – JANGKA PENDEK

24. SHORT TERM – BANK LOAN

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	86.351.117.899	104.381.333.960	<i>PT Bank Mandiri</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	82.239.013.340	-	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	69.841.944.667	69.420.698.580	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	20.197.584.000	-	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
Jumlah	258.629.659.906	173.802.032.540	Total

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No KP-COD/PK-KMK/2003 tanggal 10 Februari 2003, Grup (ex-BGR) memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini telah diubah dengan *Addendum XXIV* pada tanggal 17 April 2023 dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on Credit Agreement No. KP-COD/PK-KMK/2003 dated 10 Februari 2003, the Group (ex-BGR) obtained Working Capital Credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The agreement has been amended with Addendum XXIV dated 17 April 2023 with detail of facilities as follows:

1. Fasilitas *KMK Revolving* dengan limit kredit sebesar Rp 80.000.000.000.
2. Fasilitas *Receivable Financing* dengan limit kredit sebesar Rp 25.000.000.000 .
3. Fasilitas Non-Cash Loan, yang terdiri dari Bank Garansi dan Letter of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”) dengan limit kredit gabungan sebesar Rp 40.000.000.000.
4. Fasilitas Supplier Financing dengan limit kredit sebesar Rp 5.000.000.000.

1. *KMK Revolving Facility with credit limit of Rp 80,000,000,000.*
2. *Receivable Financing Facility with credit limit of Rp 25,000,000,000.*
3. *Non-Cash Loan Facility, consisting of Bank Garansi and Letter of Credit/Domestic Credit Documents with a maximum combined limit of Rp 40,000,000,000.*
4. *Supplier Financing Facility with credit limit of Rp 5,000,000,000.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

24. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

24. SHORT TERM – BANK LOAN (continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

**a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(continued)**

Jaminan atas fasilitas-fasilitas tersebut diatas
adalah sebagai berikut:

*Collaterals for the above facilities are as
follows:*

- 1) Piutang dagang sebesar
Rp 150.000.000.000.
- 2) Tanah dan bangunan:
 - SHGB No. 727 seluas 190.239 m² di
Medan atas nama PT Bhanda Ghara
Reksa.
 - SHGB No. 444 seluas 32.100 m² dan
SHGB No. 477 seluas 4.320 m² di
Bandar Lampung atas nama
PT Bhanda Ghara Reksa.

- 1) *Trade receivable in the amount of
Rp 150,000,000,000.*

- 2) *Land and building:*
 - *SHGB No. 727 of 190,239 m² in
Medan under the name of
PT Bhanda Ghara Reksa.*
 - *SHGB building No. 444 of 32,100
m² and SHGB No. 477 of 4,320 m²
in Bandar Lampung under the
name of PT Bhanda Ghara
Reksa.*

Periode fasilitas-fasilitas tersebut diatas
adalah 27 April 2023 sampai dengan 3 Mei
2024 dengan tingkat bunga 7,75% p.a.
(tingkat bunga mengambang).

*The period of the above facilities is from
27 April 2023 to 3 May 2024 with
interest rate of 7.75% p.a. (floating
interest rate).*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo
gabungan fasilitas pinjaman tersebut diatas
masing-masing sebesar Rp 86.351.117.899 dan
Rp 104.381.333.960.

*As at 31 December 2023 and 2022, the
combined balance of the above loan
facilities amounted to Rp 86,351,117,899
and Rp 104,381,333,960, respectively.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

24. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian Kredit No. 51 tanggal 17 Oktober 2019, Grup memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan limit kredit sebesar Rp 100.000.000.000 dan tingkat bunga 9,50% p.a (tingkat bunga mengambang). Perjanjian ini telah diubah dengan Addendum No. (5) 51 tanggal 16 Oktober 2023.

Jaminan atas fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan SHGB No. 569 seluas 950 m² di Kota Manado, atas nama Entitas.
- 2) Tanah dan bangunan SHGB No. 287 seluas 1.082 di Yogyakarta m² atas nama Entitas.
- 3) Tanah dan bangunan di Surabaya:
 - SHGB No. 00561 seluas 6.870 m² atas nama Entitas.
 - SHGB No. 00562 seluas 107 m² atas nama Entitas.
 - SHGB No. 00563 seluas 4.854 m² atas nama Entitas.
- 4) Tanah dan bangunan SHGB No. 689 seluas 214 m² di Jakarta atas nama Entitas.
- 5) Tanah dan bangunan SHGB No. 44 seluas 2.770 m² di Denpasar atas nama Entitas.
- 6) Piutang usaha sebesar Rp 62.500.000.000.
- 7) Persediaan sebesar Rp 62.500.000.000.

Periode fasilitas tersebut diatas adalah 17 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 82.239.013.340 dan nihil.

24. SHORT TERM – BANK LOAN (continued)

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Credit Agreement No. 51 dated 17 October 2019, the Group obtained Working Capital Credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with credit limit of Rp 100,000,000,000, at interest rate of 9.50% p.a.(floating interest rate). The agreement has been amended with Addendum No. (5) 51 dated 16 October 2023.

Collaterals for the above facility are as follows:

- 1) Land and building, SHGB No. 569 of 950 m² in Manado City under the name of the Entity.*
- 2) Land and building, SHGB No. 287 of 1,082 m² in Yogyakarta under the name of the Entity.*
- 3) Land and building in Surabaya:
 - SHGB No. 00561 of 6,870 m² under the name of the Entity.
 - SHGB No. 00562 of 107 m² under the name of the Entity.
 - SHGB No. 00563 of 4,854 m² under the name of the Entity.*
- 4) Land and building, SHGB No. 689 Area 214 m² in Jakarta under the name of the Entity.*
- 5) Land and building, SHGB No. 44 Area 2,770 m² in Denpasar under the name of the Entity .*
- 6) Trade receivables in the amount of Rp 62,500,000,000.*
- 7) Inventories in the amount of Rp 62,500,000,000.*

The period of the above facility is from 17 October 2023 to 16 October 2024.

As at 31 December 2023 and 2022, the balance of the above loan facility amounted to Rp 82,23,013,340 and nill, respectively.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

24. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

24. SHORT TERM – BANK LOAN (continued)

c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 4 Mei 2017, Grup (eks-BGR) memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan limit kredit sebesar Rp 70.000.000.000 dan tingkat bunga 9% p.a. (tingkat bunga mengambang). Perjanjian ini telah diubah dengan perjanjian No. 29 tanggal 30 Mei 2023.

Jaminan atas fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang dagang sebesar Rp 140.000.000.000;
- 2) Persediaan sebesar Rp 12.028.000.000;
- 3) Tanah dan Bangunan:
 - SHGB No. 17/2 seluas 66.650 m² di Palembang atas nama PT Bhanda Ghara Reksa.
 - SHGB No. 40/2 seluas 100.000 m² di Palembang atas nama PT Bhanda Ghara Reksa.

Periode fasilitas tersebut diatas adalah 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 69.841.944.667 dan Rp 69.420.698.580.

c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Credit Agreement dated 4 May 2017, the Group (ex-BGR) obtained Working Capital Credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with credit limit of Rp 70,000,000,000 at interest rate of 9% p.a. (floating interest rate). The agreement has been amended with Agreement No. 29 dated 30 May 2023.

Collaterals for the above facility are as follows:

- 1) Trade receivables in the amount of Rp 140,000,000,000;
- 2) Inventories in the amount of Rp 12,028,000,000;
- 3) Land and Building:
 - SHGB No. 17/2 of 66,650 m² in Palembang under the name of PT Bhanda Ghara Reksa.
 - SHGB No. 40/2 of 100,000 m² in Palembang under the name of PT Bhanda Ghara Reksa.

The period of the above facility is from 31 May 2023 to 31 May 2024.

As at 31 December 2023 and 2022, the balances of the above loan facilities amounted to Rp 69,841,944,677 and Rp 69,420,698,580 respectively.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

24. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

24. *SHORT TERM – BANK LOAN* (continued)

d. PT Bank Permata

Berdasarkan Perjanjian kredit No. 11 tanggal 23 Desember 2022, Grup memperoleh fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- *Omnibus Letter of Credit* dengan limit kredit sebesar Rp 50.000.000.000.
- SKBDN dan Bank Garansi dengan limit kredit gabungan sebesar Rp 50.000.000.000

Jaminan atas fasilitas-fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan SHGB No. 3.195 seluas 5.000 m² di Jakarta atas nama Entitas.
- 2) Persediaan sebesar Rp 50.000.000.000.
- 3) Piutang dagang sebesar Rp 50.000.000.000.

Periode fasilitas-fasilitas tersebut diatas adalah 23 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2023 dengan tingkat bunga 8,75% p.a untuk mata uang Rupiah dan 5,7% p.a untuk mata uang USD (tingkat bunga mengambang). Berdasarkan perubahan perjanjian No. 0002/KK/AMD/I/2024/CG7 tanggal 7 Maret 2024 periode fasilitas-fasilitas tersebut telah diperpanjang sampai dengan 23 Desember 2024 dengan tingkat bunga 10,75% p.a untuk mata uang Rupiah dan 8,00% p.a untuk mata uang USD (tingkat bunga mengambang).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo gabungan fasilitas pinjaman tersebut diatas masing-masing sebesar Rp 20.917.584.000 dan nihil.

d. PT Bank Permata

Based on Credit Agreement No. 11 dated 23 December 2022, the Group obtained the following credit facilities:

- *Omnibus Letter of Credit with credit limit of Rp 50,000,000,000.*
- *SKBDN and Bank Guarantee with a combined credit limit of Rp 50,000,000,000.*

Collaterals for the above facilities are as follows:

- 1) *Land and Building SHGB No. 3,195 of 5,000 m² in Jakarta. under the name of the Entity.*
- 2) *Inventory in the amount of Rp 50,000,000,000.*
- 3) *Trade receivable in the amount of Rp 50,000,000,000.*

The period of the above facilities is from 23 December 2022 to 23 December 2023 with interest rate of 8.75% p.a for Indonesian Rupiah, and 5.7% p.a for US Dollars (floating interest rate). Based on the amendment No. 0002/KK/AMD/I/2024/CG7 dated 7 March 2024 facilities period has been extended to with interest rate of 10.75% p.a for Indonesian Rupiah and 8.00% p.a for US Dollars (floating interest rate).

As at 31 December 2023 and 2022, the combined balance of the above loan facilities amounted to Rp 20,917,584,000 and nill respectively.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. PERPAJAKAN

25. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Entitas			The Entity
PPH pasal 28A			Income tax article 28A
2021	17.339.464.881	29.211.260.458	2021
2022	20.307.505.514	20.307.505.514	2022
2023	16.740.080.503	-	2023
PPN	-	147.263.177	VAT
Subjumlah	54.387.050.898	49.666.029.149	Subtotal
Entitas Anak			The Subsidiaries
PPN	474.544.644	633.397.423	VAT
Pph pasal 23/26	1.444.503.204	-	Income tax article 23/26
Pph pasal 28A	795.866.552	-	Income tax article 28A
Pajak final	6.295.515.946	5.541.856.951	Final tax
Subjumlah	9.010.430.346	6.175.254.374	Subtotal
Jumlah	63.397.481.244	55.841.283.523	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Entitas			The Entity
PPN Keluaran	1.309.380.974	395.087.763	VAT Out
PPN Masukan (WAPU)	6.601.993.397	160.043.400	VAT In (WAPU)
PPH pasal 21	1.376.560.042	1.451.722.792	Income Tax Art. 21
PPH pasal 22	1.709.916.796	1.003.086.020	Income Tax Art. 22
PPH pasal 23	63.878.092	160.084.391	Income Tax Art. 23
PPH pasal 25	-	762.339.854	Income Tax Art. 25
PPH pasal 4 (2)	-	10.666.664	Income Tax Art. 4 (2)
Hutang pajak bumi & bangunan	39.930.000	-	Land & building tax payable
Hutang pajak lainnya	2.174.754.904	-	Other taxes payable
Sub Jumlah	13.276.414.205	3.943.030.884	Subtotal
Entitas Anak			The Subsidiaries
PPN Keluaran	3.589.722.824	1.182.346.001	VAT out
PPH 15	2.478.358	1.590.600	Income Tax Art. 15
PPH pasal 21	1.024.979.991	470.294.458	Income Tax Art. 21
PPH pasal 23	199.809.397	405.358.597	Income Tax Art. 23
PPH pasal 25	99.453.585	95.533.055	Income Tax Art. 25
PPH pasal 29	226.974.884	630.097.300	Income Tax Art. 29
PPH pasal 4 (2)	81.953.137	332.099.953	Income Tax Art. 4 (2)
Sub Jumlah	5.225.372.176	3.117.319.964	Subtotal
Jumlah	18.501.786.381	7.060.350.848	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

25. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan

c. Income Taxes

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Entitas			The Entity
Pajak final	(2.110.786.509)	(1.624.797.568)	Final tax
Pajak kini	-	-	Current tax
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak final	(14.997.816.574)	(14.819.875.511)	Final tax
Pajak kini	(8.029.640.520)	(9.032.834.641)	Current tax
Jumlah pajak kini	(25.138.243.603)	(25.477.507.720)	Total current tax
Pajak tangguhan	11.316.952.807	(1.296.013.874)	Deferred tax
Jumlah	(13.821.290.796)	(26.773.521.594)	Total

i) Pajak Kini

i) Current Tax

Rekonsiliasi antara laba rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laba komersial dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Reconciliation between consolidated profit or loss before income tax between commercial income with taxable income for the years ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Laba (rugi) sebelum pajak dalam laporan laba rugi konsolidasi	30.523.051.980	75.862.682.068	Profit (loss) before tax in the consolidated statement of profit loss
Dikurangi:			Less:
Laba (rugi) sebelum pajak anak Perusahaan	45.368.227.236	61.496.280.077	Profit (loss) before tax of subsidiaries
Laba komersil sebelum pajak penghasilan – Entitas	(14.845.175.256)	14.366.401.991	Commercial income before income tax – the Entity
Beda Waktu			Timing Difference
Penyisihan persediaan	2.620.399.032	1.800.580.994	Provision for inventories
Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain – bersih	56.156.465.701	17.142.783.338	Allowance for account receivable and other receivable – net
Penyusutan aset lain-lain	2.235.333.150	2.024.280.456	Depreciation of other assets
Penyusutan aset tetap	(19.838.728.108)	(12.306.628.544)	Depreciation of fixed assets
Penurunan nilai aset tetap	-	2.672.602.000	Impairment of fixed assets
Liabilitas imbalan pasca kerja	(12.659.210.085)	(52.815.836.212)	Post-employment benefits obligations
Jumlah Beda Waktu	28.514.259.690	(41.482.217.968)	Total Timing Difference

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

25. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

i) Pajak Kini (lanjutan)

i) Current Tax (continued)

	2023	2022	
Beda Tetap:			Permanent Difference:
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	20.926.544.956	12.764.205.949	Non deductible expense
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	28.556.139.092	27.066.837.248	Expense of revenue subjects to final tax
Pendapatan bunga – final	(596.476.187)	(765.033.904)	Interest income – final
Pendapatan sewa – final	(25.208.001.540)	(21.998.582.408)	Rental income – final
Pendapatan final – lain	-	(23.018.466.773)	Other Income
Surplus properti investasi	(58.943.401.847)	(15.369.024.153)	Investment Property Surplus
Jumlah Beda Tetap	(35.265.195.526)	(21.320.064.041)	Total Permanent Difference
Rugi Fiskal Entitas – dibulatkan	(21.596.111.000)	(48.435.880.000)	The Entity's taxable profit (loss)- rounded
Kompensasi rugi fiskal	-	-	Fiscal loss compensation
Akumulasi rugi fiskal	(234.999.730.889)	(213.403.619.889)	Accumulated fiscal loss
Taksiran Pajak Kini Entitas (22%)	-	-	Estimated Current Tax of the Entity (22%)
Pajak Kini Entitas Anak	8.029.640.520	9.032.834.641	Current tax of Subsidiaries
Taksiran Pajak Kini	8.029.640.520	9.032.834.641	Total Current Tax
Dikurangi kredit pajak dibayar dimuka			Less tax credit:
PPh Pasal 22	(124.059.828)	(19.100.079)	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	(7.802.665.636)	(7.540.577.957)	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	(671.806.724)	(843.059.463)	Income Tax Article 25
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	(568.891.668)	630.097.142	Under (Over) Payment of Corporate Income Tax

Di tahun 2023, sehubungan dengan SKPLB tahun fiskal 2020, Entitas melakukan penyesuaian atas saldo Uang Muka PPh pasal 28A dan membukukan biaya pajak sebesar Rp 10.276.128.270.

In 2023, in connection with the Tax Overpayment Assessment Letter for fiscal year 2020, the Entity adjusted the balance of Prepaid Tax Article 28A and recorded Tax Expense amounting to Rp 10,276,128,270.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00047/406/21/051/23 tanggal 26 Juni 2023, rugi fiskal tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 48.995.184.524, dan lebih bayar pajak tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 11.653.397.059. Pada tanggal 19 September 2023 Entitas telah mengajukan surat keberatan dan hingga tanggal laporan keuangan ini, hasil dari keberatan tersebut belum diketahui.

Based on Notice of Tax Overpayment Assessment of Income Taxes No. 00047/406/21/051/23 dated 26 June 2023, fiscal loss for 2021 was determined at Rp 48,995,184,524, and overpayment of tax of 2021 was determined at Rp 11,653,397,059. On 19 September 2023, the Entity has submitted objection letter and as of the date of this financial statement, the results of this objection are not yet known.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and Subsidiaries
Notes To The Consolidated Financial Statements (continued)
For the year ended
31 December 2023
(In Rupiah)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)
c. Pajak Penghasilan (lanjutan)
ii) Aset Pajak Tangguhan

25. TAXATION (continued)
c. Income Taxes (continued)
ii) Deferred Tax Assets

	Saldo Awal 31 Des 2022 / Total Beginning Balance 31 Dec 2022	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi) / Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian ke laporan laba rugi/ Adjustment to Profit (Loss)	Penyesuaian ke Pedapatan Komprehensif Lain / Adjustment to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des 2023/ Ending Balance 31 Dec 2023	
Entitas							The Entity
Estimasi kegiatan fiscal	46.948.796.375	4.751.144.322	-	-	-	51.699.940.697	Estimated fiscal loss
Penyisihan Peseftaan	5.037.136.375	576.487.787	-	-	-	5.613.624.162	Provision for Inventories
Penyisihan Piutang Usaha	83.036.104.343	11.524.279.492	-	-	-	94.560.383.835	Allowance for impairment of Receivables
Penyisihan Piutang lain-lain	39.163.908.264	830.142.962	-	-	-	39.994.051.226	Allowance for impairment of others Receivables
Akumulasi penyusutan aset tetap	(30.700.970.274)	(4.364.520.184)	-	-	-	(35.065.490.458)	Accumulated depreciation of Fixed Assets
Penyisihan aset tetap	587.972.440	-	-	-	-	587.972.440	Allowance for Fixed Assets
Penyisihan aset lain-lain	3.616.858.393	491.773.293	-	-	-	4.108.631.686	Allowance for other assets
Penyisihan penurunan nilai penyertaan saham	488.074.685	-	187.435.187	(8.770.901)	-	666.738.971	Allowance for impairment of investment
Manfaat Karayawan	8.363.366.026	(2.785.026.219)	(2.038.382.076)	-	-	3.539.957.731	Employee Benefits
Penilaian kembali atas properti investasi	(112.484.924.308)	-	(11.436.738.678)	-	-	(123.921.662.986)	Revaluation of property investment
Sub jumlah	44.056.322.319	11.024.281.453	(13.287.685.567)	(8.770.901)	-	41.784.147.304	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

25. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tanggahan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

	2023			
	Saldo Awal 31 Des 2022 / Beginning Balance 31 Dec 2022	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi) / Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian ke Laporan Laba (Rugi) / Adjustment to Profit (Loss)
				Saldo Akhir 31 Des 2023 / Ending Balance 31 Dec 2023
Entitas anak				
Penyusutan dan amortisasi	(8.263.592.118)	(72.439.195)	-	(8.336.031.313)
Manfaat karyawan	169.810.315	33.912.566	134.243.363	337.966.244
Sewa dengan hak opsi	49.172.826	(21.319.311)	-	27.853.515
Rugi fiskal	781.896.600	291.085.976	-	1.072.982.576
Penyisihan	-	70.202.220	-	70.202.220
Penurunan nilai investasi	11.604.108	-	-	11.604.108
Sub jumlah	(7.251.108.269)	301.442.256	134.243.363	(6.815.422.650)
				Subtotal
Jumlah aset pajak tanggahan	36.805.214.050			34.968.724.654
				Total deferred tax assets

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Notes To The Consolidated Financial Statements (continued)
For the year ended
31 December 2023

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

25. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tanggahan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

	Saldo Awal 31 Des 2021 / Total Beginning Balance 31 Dec 2021	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi) / Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian ke laporan laba rugi/ Adjustment to profit (Loss)	Penyesuaian ke Pendapatan Komprehensif Lain / Adjustment to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des 2022/ Ending Balance 31 Dec 2022	
Entitas							The Entity
Estimasi kerugian fiscal	33.176.585,024	10.655.893,600	-	3.116,317,751	-	46.948.796,375	Estimated fiscal loss
Penyisihan Persediaan	4.641.008,556	396.127,819	-	-	-	5.037.136,375	Provision for Inventories
Penyisihan Piutang Usaha	83.497.400,734	1.793.906,654	-	(2.255.203,045)	-	83.036.104,343	Allowance for impairment of Receivables
Penyisihan Piutang lain-lain	33.363,810,052	1.977.505,680	-	3.822.592,532	-	39.163.908,264	Allowance for impairment of others Receivables
Akumulasi penyusutan aset tetap	(27.993,511,994)	(2.707,458,280)	-	-	-	(30.700,970,274)	Accumulated depreciation of Fixed Assets
Penyisihan aset tetap	-	587.972,440	-	-	-	587.972,440	Allowance for Fixed Assets
Penyisihan aset lain-lain	3.707.859,291	445.341,700	-	(536.342,598)	-	3.616.858,393	Allowance for other receivables
Penyisihan penurunan nilai penyertaan saham	48.759,948	-	439.314,737	-	-	488.074,685	Allowance for impairment of investment
Mandiat Karyawan Bonus dan Tantem	17.604.988,429	(11.619,483,966)	2.377,861,563	-	-	8.363,366,026	Employee Benefits Bonus and tantem
Efek perubahan tarif pajak	6.648,619,667	-	-	(6.648,619,667)	-	-	Effects of changing tax rates
Pendapatan komprehensif lainnya	957.109,987	-	-	(957.109,987)	-	-	Comprehensive income
Penilaian kembali atas properti investasi	(638,724,062)	-	-	352,529,783	286,194,279	-	Revaluation of property investment
	(118,257,673,472)	-	5,772,749,164	-	-	(112,484,924,308)	
Sub jumlah	36,756,232,160	1,529,805,647	8,589,925,464	(3,105,835,231)	286,194,279	44,056,372,319	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. UTANG JANGKA PANJANG

26. LONG TERM LOANS

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Utang Jangka Panjang			Long Term Loans
a. PT Rajawali Nusantara Indonesia-Eks BPPN			a. PT Rajawali Nusantara Indonesia- Ex BPPN
PT Rajawali Nusantara Indonesia Eks BPPN	609.660.827.108	609.660.827.108	PT Rajawali Nusantara Indonesia Ex BPPN
Sub jumlah	609.660.827.108	609.660.827.108	Subtotal
b. PT Rajawali Nusantara Indonesia-Eks RDI			b. PT Rajawali Nusantara Indonesia-Ex RDI
RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017	192.202.716.631	192.202.716.631	RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017
RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017	64.870.305.071	64.870.305.071	RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017
RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017	16.652.927.396	16.652.927.396	RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017
Sub jumlah	273.725.949.098	273.725.949.098	Subtotal
c. Bappenas			c. Bappenas
Bappenas (kedelai)	23.687.544.118	23.687.544.118	Bappenas (soybeans)
Sub jumlah	23.687.544.118	23.687.544.118	Subtotal
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit Investasi	15.417.371.970	30.834.743.938	Investment Loan
Sub jumlah	15.417.371.970	30.834.743.938	Subtotal
Jumlah Utang	922.491.692.294	937.909.064.262	Total Loans
Bagian Utang Jangka Panjang yang Jatuh tempo dalam Satu Tahun			Current Portion of Long Term Loans
PT Rajawali Nusantara Indonesia-Eks RDI			PT Rajawali Nusantara Ex-RDI
RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017	-	6.069.559.473	RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017
RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017	-	2.048.535.948	RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017
RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017	-	525.881.916	RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit Investasi	15.417.371.970	15.417.371.972	Investment Loan
Sub jumlah	15.417.371.970	24.061.349.309	Subtotal
Jumlah Utang Jangka Panjang	907.074.320.324	913.847.714.953	Total Long Term Loans

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG TERM LOANS (continued)

a. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Eks BPPN

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Aset Kredit Eks BPPN No. BAR01/202206/REKON/BPPN/KN.4.2/2022, tanggal 24 Juni 2022, Entitas mempunyai utang kepada Pemerintah Indonesia yang berasal dari pinjaman eks BPPN sebesar Rp 609.660.827.108.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. S-598/MK.06/2022 tanggal 21 Juli 2022, Kementerian Keuangan menyetujui novasi utang eks BPPN Entitas sebesar Rp 609.660.827.108 menjadi utang PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku induk Holding Pangan. Berdasarkan perjanjian novasi dan amandemen No PRJ-3/KN/2023 tanggal 31 Maret 2023 antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas, tagihan Pemerintah kepada Entitas (eks BPPN) dialihkan menjadi tagihan Pemerintah kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Selanjutnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mempunyai tagihan kepada Entitas sebesar Rp 609.660.827.108.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham seri A Dwiwarna Entitas, menyetujui penambahan modal Entitas melalui konversi hutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diatas (Catatan 46).

a. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Ex BPPN

Based on Reconciliation of Assets ex. BPPN No. BAR01/202206/REKON/BPPN/KN.4.2/2022 dated 24 Juni 2022, the Entity has a debt to the Government of Indonesia originating from loans ex BPPN amounting to Rp 609,660,827,108.

Based on the letter of the Minister of Finance to the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. S-598/MK.06/2022 dated 21 July 2022, the Ministry of Finance agreed to the novation of ex. BPPN debt of the Entity amounting to Rp 609,660,827,108 to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the parent company of ID Food. Based on novation agreement and amendment No PRJ-3/KN/2023 dated 31 March 2023 amongst the Government of the Republic of Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the Entity, the Government's receivables from the Entity (ex BPPN) was novated as the Government's receivables from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Subsequently PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) will have a receivable from the Entity amounting to Rp 609,660,827,108.

Based on the letter from the Minister Finance of the Republic Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 dated 28 February 2024, the Government of Indonesia as the holder of class A Dwiwarna shares of the Entity, approved the increase in the Entity's capital through conversion of debt to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) above (Note 46).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG TERM LOANS (continued)

b. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Eks RDI

b. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Ex RDI

i) Rekening Dana Investasi No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017

i) Investment Fund Account No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. BA-325/KP.1210/2022 pada tanggal 7 April 2022, Hak Tagih Pemerintah/Posisi Pinjaman 31 Desember 2022 sebesar Rp 192.202.716.631 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the reconciliation No. BA-325/KP.1210/2022 dated 7 April 2022, The Government's Charge/Lending Position as at 31 December 2022 amounted to Rp 192,202,716,631 with details as follows:

	2022	
Pinjaman Pokok	106.534.687.612	<i>Principal Loan</i>
Pinjaman Non-pokok	85.668.029.019	<i>Non-principal Loan</i>
Subjumlah	192.202.716.631	<i>Subtotal</i>

Berdasarkan perjanjian novasi dan amandemen No. RDI-421/EKS-RDI-371/DSMI/2023 tanggal 3 April 2023 antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas, hutang Rekening Dana Investasi No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 dialihkan menjadi tagihan Pemerintah kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Selanjutnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mempunyai tagihan kepada Entitas sebesar Rp 192.202.716.631.

Based on novation agreement and amendment No. RDI-421/EKS-RDI-371/DSMI/2023 dated 3 April 2023 amongst the Government of the Republic Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the Entity, the Investment Fund Debt Account No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 was novated as the Government's receivables from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Subsequently PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) will have a receivable from the Entity amounting to Rp 192,202,716,631.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham seri A Dwiwarna Entitas, menyetujui penambahan modal Entitas melalui konversi hutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diatas (Catatan 46).

Based on the letter from the Minister Finance of the Republic Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 dated 28 February 2024, the Government of Indonesia as the holder of class A Dwiwarna shares of the Entity, approved the increase in the Entity's capital through conversion of debt to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) above (Note 46).

ii) Rekening Dana Investasi No. AMA-187/RDI/-299/DSMI/2017

ii) Investment Fund Account No. AMA-187/RDI/-299/DSMI/2017

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. BA-324/KP.1210/2022 tanggal 7 April 2022, Hak Tagih Pemerintah/Posisi Pinjaman 2022 sebesar Rp 64.870.305.071 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the reconciliation No. BA-324/KP.1210/2022 dated 7 April 2022, the Government's Charge/Lending Position as at 31 December 2022 amounting to Rp 64,870,305,071 with details as follows:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG TERM LOANS (continued)

**b. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Eks RDI
(lanjutan)**

**b. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Ex RDI
(continued)**

**ii) Rekening Dana Investasi No. AMA-
187/RDI/- 299/DSMI/2017 (lanjutan)**

**ii) Investment Fund Account No. AMA-
187/RDI/-299/DSMI/2017 (continued)**

	2022	
Pinjaman Pokok	24.255.115.000	<i>Principal Loan</i>
Pinjaman Non Pokok	40.615.190.071	<i>Non-principal Loan</i>
Jumlah	64.870.305.071	Total

Berdasarkan perjanjian novasi dan amandemen No. RDI-420/EKS-RDI-299/DSMI/2023 tanggal 3 April 2023 antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas, hutang Rekening Dana Investasi No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017 dialihkan menjadi tagihan Pemerintah kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Selanjutnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mempunyai tagihan kepada Entitas sebesar Rp 64.870.305.071.

Based on novation agreement and amendment No. RDI-420/EKS-RDI-299/DSMI/2023 dated 3 April 2023 amongst the Government of the Republic Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the Entity, the Investment Fund Debt Account No. AMA-187/RDI- 299/DSMI/2017 was novated as the Government's receivables from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Subsequently PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) will have a receivable from the Entity amounting to Rp 64,870,305,071.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham seri A Dwiwarna Entitas, menyetujui penambahan modal Entitas melalui konversi hutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diatas (Catatan 46).

Based on the letter from the Minister Finance of the Republic Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 dated 28 February 2024, the Government of Indonesia as the holder of class A Dwiwarna shares of the Entity, approved the increase in the Entity's capital through conversion of debt to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) above (Note 46).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG TERM LOANS (continued)

b. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Eks RDI (lanjutan)

b. PT Rajawali Nusantara Indonesia - Ex RDI (continued)

iii) Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (lanjutan)

iii) Investment Fund Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (continued)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. BA-323/KP.1210/2022 tanggal 7 April 2022, Hak Tagih Pemerintah/Posisi Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 16.652.927.396 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the reconciliation No. BA-323/KP.1210/2022 dated 7 April 2022, the Government's Charge/Lending Position as at 31 December 2022 amounted to Rp 16,652,927,396 with details as follows:

	2022	
Pinjaman Pokok	6.271.484.377	<i>Principal Loan</i>
Pinjaman Non Pokok	10.381.443.019	<i>Non principal Loan</i>
Jumlah	16.652.927.396	Total

Berdasarkan perjanjian novasi dan amandemen No. RDI-419/EKS-RDI-006/DSMI/2023 tanggal 3 April 2023 antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas, hutang Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 dialihkan menjadi tagihan Pemerintah kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Selanjutnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mempunyai tagihan kepada Entitas sebesar Rp 16.652.927.396.

Based on novation agreement and amendment No. RDI-419/EKS-RDI-006/DSMI/2023 dated 3 April 2023 amongst the Government of the Republic Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the Entity, the Investment Fund Debt Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 was novated as the Government's receivables from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Subsequently PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) will have a receivable from the Entity amounting to Rp 16,652,927,396.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham seri A Dwiwarna Entitas, menyetujui penambahan modal Entitas melalui konversi hutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diatas (Catatan 46).

Based on the letter from the Minister Finance of the Republic Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 dated 28 February 2024, the Government of Indonesia as the holder of class A Dwiwarna shares of the Entity, approved the increase in the Entity's capital through conversion of debt to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) above (Note 46).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG TERM LOANS (continued)

c. Bappenas

Utang Bappenas berasal dari pemanfaatan sebagian dana Non- Project Type Grand Assistance (NPTGA) 2001 sebesar JPY 3.000.000.000 (tiga milyar Yen Jepang) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia untuk mengimpor kedelai yang disalurkan oleh distributor yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 2005, Grup tidak melakukan angsuran lagi.

c. Bappenas

Bappenas' debt originated from the utilization of part of the Non-Project Type Grand Assistance (NPTGA) 2001 fund of JPY 3,000,000,000 (three billion Japanese Yen) from the Government of Japan to the Government of Indonesia to import soybeans for distribution by distributors appointed by the Government of Indonesia.

Since 2005, the Group has not made any further installments.

d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. WC.KP/369/KI/2020 tanggal 22 Desember 2020, Grup (ex-BGR) memperoleh fasilitas Kredit Investasi (atau KI) dari Bank Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Credit Agreement No. WC.KP/369/KI/2020 dated 22 Desember 2020, the Group (ex-BGR) obtained an Investment Credit (or KI) facility from Bank Mandiri as follows:

Limit kredit	Rp 75.000.000.000	Credit limit
Tingkat bunga (mengambang)	7,75%	Interest rate (floating)
Jangka waktu	48 bulan/ months	Tenor
Jatuh tempo	23 Desember/ December 2024	Due date

Jaminan atas fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Collaterals for the above facility are as follows:

- Tanah dan Bangunan SHGB No. 737 seluas 190.239 m² di Medan atas nama PT Bhanda Ghara Reksa.
 - Tanah dan Bangunan SHGB No. 444 dan No. 477 seluas 36.420 m² di Bandar Lampung atas nama PT Bhanda Ghara Reksa.
 - Tanah dan Bangunan SHGB No. 21 seluas 11.907 m² dan 1.514 m² di Kalimantan Selatan atas nama PT Bhanda Ghara Reksa.
- *Land and Building SHGB No. 737 of 190,239 m² in Medan under the name of PT Bhanda Ghara Reksa.*
 - *Land and Building SHGB No. 444 and No. 477 of 36,420 m² in Bandar Lampung under the name of PT Bhanda Ghara Reksa.*
 - *Land and Building SHGB No. 21 of 11,907 m² and 1,514 m² in South Kalimantan under the name of PT Bhanda Ghara Reksa.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. Kredit Investasi (lanjutan)

Jaminan atas fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut (lanjutan):

- Tanah dan Bangunan SHGB No. 2 seluas 10.350 m² dan 3.306 m² di Bali atas nama PT Bhanda Ghara Reksha.
- Tanah dan Bangunan SHGB No. 98 dan No. 57 seluas 8.775 m² dan 2.967 m² di Bali atas nama PT Bhanda Ghara Reksha.
- Piutang dagang sebesar Rp 90.000.000.000

27. LIABILITAS SEWA

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar nihil dan Rp 54.425.994 merupakan utang sewa kendaraan jangka panjang.

28. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA

Liabilitas imbalan paska kerja Entitas didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Azwir Arifin dan Rekan sesuai laporan No. 240100/LAA-AAR/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, sedangkan untuk Entitas Anak didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Nurichwan.

26. LONG TERM LOANS (continued)

d. Investment Loan (continued)

Collaterals for the above facility are as follows (continued):

- *Land and Building SHGB No. 2 of 10,350 m² in Bali under the name of PT Bhanda Ghara Reksha.*
- *Land and Building SHGB No. 98 and No. 57 of 8,775 m² and 2,967 m² in Bali under the name of PT Bhanda Ghara Reksha.*
- *Trade receivables in the amount of Rp 90,000,000,000,000.*

27. LEASE LIABILITIES

Balance as at 31 December 2023 and 2022 nil and Rp 54,425,994 respectively represent long term payables for vehicle lease.

28. POST - EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The employee-benefit liabilities of the Entity is based on calculations performed by Actuarial Consulting Office (KKA) Azwir Arifin and Partner report No. 240100/LLA-AAR/I/2024 dated 29 January 2024, while that of the Subsidiaries is based on calculation by Actuarial Consulting Office (KKA) Nurichwan.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

28. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA 28. **POST - EMPLOYMENT BENEFITS**
(lanjutan) **OBLIGATIONS** (continued)

a. Kewajiban/(aset) pada neraca:

Perhitungan aktuaria independen untuk
Entitas dan Entitas Anak tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Liabilities/(assets) on balance sheet:

Independent actuarial calculations for the
Entity and the Subsidiaries are as follows:

	2023	2022	
Entitas			The Entity
Nilai kini kewajiban			<i>Present value of</i>
Imbalan pasti	67.079.617.128	61.848.745.352	<i>Employee benefits liabilities</i>
Nilai wajar aset program	(50.988.900.167)	(23.833.445.234)	<i>Fair value of program assets</i>
Lianbilias imbalan jasa –			Employee benefit liabilities –
Entitas	16.090.716.961	38.015.300.118	the Entity
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Nilai kini kewajiban			<i>Present value employee</i>
imbalan pasti	1.140.251.151	771.865.067	<i>benefit liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of program assets</i>
Liabilitas imbalan jasa -			Employee benefit liabilities –
Entitas Anak	1.140.251.151	771.865.067	Subsidiaries
Liabilitas Imbalan Jasa			Consolidated Employee Benefit
Konsolidasian	17.230.968.112	38.787.165.185	Liabilities

b. Beban/(pendapatan) pada laba rugi:

b. Expense/(income) on income statement:

	2023	2022	
Entitas			The Entity
Beban jasa kini	7.917.089.742	7.432.932.564	<i>Current service expense</i>
Bunga neto atas liabilitas (aset)	2.358.276.988	1.663.067.170	<i>Net interest on liabilities/(assets)</i>
Iuran dibayar karyawan	(2.321.114.467)	-	<i>Contribution paid by employees</i>
Biaya jasa lalu	(226.380.539)	(6.250.341.338)	<i>Past service expenses</i>
Dampak penerapan SP DSAK 05042022	-	(8.472.456.479)	<i>Implementation impact on PR DSAK 05042022</i>
Pengakuan atas KKA	(897.940.144)	(2.086.359.609)	<i>Recognition of AG/L</i>
Beban imbalan jasa			The Entity's employee
Entitas	6.829.931.580	(7.713.157.692)	benefit expenses
Entitas Anak			Subsidiaries
Beban jasa kini	100.194.658	58.613.628	<i>Current service expenses</i>
Biaya bunga	53.953.368	61.467.611	<i>Interest expenses</i>
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(95.793.119)	<i>Adjustment of changes in attribution method</i>
Beban imbalan jasa	154.148.026	24.288.120	Subsidiaries employee
Entitas Anak			benefit expenses
Beban Imbalan Jasa			Consolidated Employee
Konsolidasi	6.984.079.606	(7.688.869.572)	Benefit Expenses

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

28. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA **28. POST EMPLOYMENT BENEFITS**
(lanjutan) **OBLIGATIONS (continued)**

c. **Pergerakan kewajiban yang diakui di neraca:** c. **Movement of liability in balance sheet:**

	2023	2022	
Entitas			The Entity
Kewajiban/aset awal	38.015.300.118	51.482.222.465	<i>Beginning asset/(liability)</i>
Pendapatan/beban laba rugi	6.829.931.580	(7.713.157.692)	<i>(Expense)/Income</i>
Penghasilan komprehensif lain	(9.265.373.072)	10.808.461.651	<i>Other comprehensive income</i>
Manfaat dibayar	(13.525.649.873)	(673.332.945)	<i>Benefit paid</i>
Iuran dibayar	(5.963.491.792)	(15.888.893.361)	<i>Contribution paid</i>
Liabilitas bersih			<i>Net Liability</i>
Akhir periode	16.090.716.961	38.015.300.118	<i>End of Period</i>
Entitas Anak			Subsidiaries
Nilai kini kewajiban			<i>Present value liability of</i>
Imbalan pasti – awal	771.865.068	967.993.867	<i>defined benefit – beginning</i>
Biaya bunga	53.953.368	58.613.628	<i>Interest expense</i>
Biaya jasa kini	100.194.658	61.467.610	<i>Current service expense</i>
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(95.793.119)	<i>Adjustment of changes on attribution method</i>
(Keuntungan) kerugian aktuarial	610.197.106	(40.933.154)	<i>Actuarial loss (gain)</i>
Manfaat yang dibayarkan	(395.959.049)	(179.483.765)	<i>Benefit paid</i>
Liabilitas bersih			<i>Net Liability</i>
Akhir periode	1.140.251.151	771.865.067	<i>End Of Period</i>
Liabilitas imbalan paska kerja konsolidasian	17.230.968.112	38.787.165.185	Consolidated employee benefits liabilities

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

28. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA (lanjutan)			28. POST EMPLOYMENT OBLIGATIONS (continued)
d. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan paska kerja adalah sebagai berikut:			d. Assumptions used in the calculation of employee benefit liabilities are as follows:
	2023	2022	
Entitas			The Entity
Usia Pensiun Normal	55 Tahun / 55 Years	55 Tahun/ 55 Years	Normal Retirement Age
Tingkat Mortalitas	TMI IV Tahun 2019/ TMI IV Years 2019	TMI IV Tahun 2019/ TMI IV Years 2019	Mortality Rate
Tingkat Cacat	5,00%	5,00%	Rate of Disability
Tingkat Pengunduran Diri	2,50% sampai usia 40 Tahun dan menurun secara linier sampai 0,5% pada usia 50 Tahun dan 0,00% pada usia lebih dari 50 Tahun/ 2,50% until the age of 40 Years and decreases linierly until age of 50 Years and 0,00% ath the age more than 50 Years	2,50% sampai usia 40 Tahun dan menurun secara linier sampai 0,5% pada usia 50 Tahun dan 0,00% pada usia lebih dari 50 Tahun/ 2,50% until the age of 40 Years and decreases linierly until age of 50 Years and 0,00% ath the age more than 50 Years	Rate of Resignation
Tingkat Diskonto	6,44% - 7,14%	5,52% - 7,44%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	6,00%	6,00%	Salary Increase Rate
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Usia Pensiun Normal	56 Tahun/ 56 Years	56 Tahun/ 56 Years	Normal Retirement Age
Tingkat Diskonto	6,82%	6,99%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji Per Tahun	10,00%	10,00%	Salary Increase Rate per Year
Tingkat Kematian	100% TMI-IV	100% TMI-IV	Death Rate
Tingkat Cacat	5,00%	5,00%	Rate of Disability
Proporsi Pensiun Normal	100,00%	100,00%	Proporsion of Normal Retirement

29. MODAL SAHAM

Modal dasar sebesar Rp 1.175.877.000.000 terbagi atas 1.175.877 saham yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, 1.175.876 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 1.175.876.000.000.

29. SHARE CAPITAL

The authorized capital is Rp 1,175,877,000,000 divided into 1,175,877 shares consisting of: 1 A series Dwiwarna share, with a nominal value of Rp 1,000,000, 1,175,876 B series shares each with a nominal value of Rp 1,000,000, totalling Rp 1,175,876,000,000.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dari modal dasar tersebut, telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 942.745 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 942.745.000.000 terdiri dari:

Pemegang saham/ Shareholder	Lembar saham/ Shares	Nilai perlembar saham/ Value per share	Nilai nominal/ Nominal value
Saham Seri A/ <i>A Series Shares</i>	1	1.000.000	1.000.000
Saham Seri B/ <i>B Series Shares</i>	942.744	1.000.000	942.744.000.000
	942.745		942.745.000.000

29. SHARE CAPITAL (continued)

Of the authorized capital, 942,745 shares have been subscribed and fully paid by the Republic of Indonesia with a total nominal value of Rp 942,745,000,000 consisting of:

30. CADANGAN UMUM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Mei 2019 yang diaktakan dalam Akta No. 12 tanggal 15 Mei 2019 oleh Notaris Tris Nur Patrini Notaris di Bogor, laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2018 disisihkan sebagai cadangan umum.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Cadangan umum Grup masing-masing sebesar Rp 111.890.435.294.

30. GENERAL RESERVES

Based on the General Meeting of Shareholders on 15 May 2019, which was documented under deed No. 12 dated 15 May 2019 by Notary Tris Nur Patrini Notary in Bogor, the consolidated net income for the year 2018 Fiscal Year was set a side as general reserves.

As at 31 December 2023 and 2022, the Group's general reserves amounting to Rp 111,890,435,294 respectively.

31. CADANGAN KHUSUS

Utang dividen yang hingga sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan belum diselesaikan sebesar Rp 1.531.912.169 dan oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 73 jumlah tersebut direklasifikasi ke cadangan khusus.

31. SPECIFIC RESERVES

Debt of dividends up to the date of this report has not yet been finalized amounting to Rp 1,531,912,169 and therefore in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company article 73 the said amount is reclassified to specific reserves.

32. SALDO LABA - BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Saldo laba ditahan-belum ditentukan penggunaannya pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.073.773.294.954 dan Rp 2.010.438.746.181.

Grup melaksanakan kuasi reorganisasi pada 30 September 2012. Sesuai Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi, bahwa akuntansi kuasi reorganisasi (PSAK 51) dinyatakan tidak berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, yang diterapkan secara prospektif dengan ketentuan bahwa, saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi direklasifikasi secara langsung ke saldo laba.

32. RETAINED EARNINGS - UNAPPROPRIATED

Retained earnings-unappropriated as at 31 December 2023 and 2022, amounting to Rp 2,073,773,294,954 and Rp 2,010,438,746,181 respectively.

The Group conducted quasi reorganization on 30 September 2012. In accordance with Revocation of SFAS 51: Accounting for Quasi Reorganization, that quasi reorganization accounting (SFAS 51) is declared as ineffective effective since 1 January 2013, which is applied prospectively provided that the balance of asset and liabilities valuation in the quasi-reorganization is reclassified directly to retained earnings.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

33. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

33. NON-CONTROLLING INTEREST

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	% 2023	% 2022	Nilai tercatat / Carrying amount		Bagian laba (rugi) / Share of profit (loss)	
			2023	2022	2023	2022
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri	0,1	0,1	41.223.571	39.079.713	2.143.858	33.431.053
PT BGR Logistik Indonesia	0,04	0,04	-	-	-	-
Jumlah/ Total			41.223.571	39.079.713	2.143.858	33.431.053

34. PENDAPATAN USAHA

34. REVENUES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Perdagangan	1.524.858.267.976	1.676.306.287.415	Trading
Jasa Logistik	344.823.274.946	335.464.920.451	Logistic Services
Jasa Pergudangan	299.362.422.751	299.555.599.682	Warehousing Services
Kewajiban Pelayanan Publik	98.299.003.000	-	Public Service Obligation
Jasa Penyewaan Properti	21.107.865.097	21.998.582.408	Rental Property Services
Jasa WIS	841.190.900	34.193.987.989	Waste Integrated System
Jumlah	2.289.292.024.670	2.367.519.377.945	Total

a. Perdagangan

a. Trading

	2023	2022	
Lokal	460.471.401.692	969.545.034.443	Local
Impor	679.486.872.914	559.684.364.480	Import
Warung pangan	45.506.599.088	41.938.938.390	E-commerces
Ekspor	7.787.628.910	8.878.415.920	Export
Gula impor - Eks RNI	320.779.949.391	-	Imported sugar - Ex RNI
Lainnya	10.825.815.981	96.259.534.182	Others
Sub jumlah	1.524.858.267.976	1.676.306.287.415	Subtotal

b. Jasa Logistik

b. Logistic Services

	2023	2022	
Logistik terpadu	160.150.125.293	159.023.732.861	Integrated logistic
Jasa logistik darat	125.612.942.125	112.506.674.170	Land logistic services
Jasa logistik laut	59.060.207.528	63.934.513.420	Sea logistic services
Sub jumlah	344.823.274.946	335.464.920.451	Subtotal

c. Jasa Pergudangan

c. Warehousing Services

	2023	2022	
Gudang sendiri	121.887.144.333	111.297.594.972	Owned warehouse
Gudang sewa	116.494.678.191	136.743.173.488	Rented warehouse
Gudang manajemen	37.592.406.794	30.517.658.179	Management warehouse
Record management center	12.278.728.549	10.070.469.860	Record management center
Gudang terbuka	7.567.397.340	5.641.265.720	Open storages warehouse
Collateral management Services	3.542.067.544	5.285.437.463	Collateral management services
Sub jumlah	299.362.422.751	299.555.599.682	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

34. REVENUES (lanjutan)

d. Kewajiban Pelayanan Publik

c. Public Service Obligation

	2023	2022	
Daging Ayam	58.587.428.000	-	Chicken Meat
Telur Ayam	39.711.575.000	-	Chicken Egg
Subjumlah	98.299.003.000	-	Subtotal

35. BEBAN POKOK PENDAPATAN

35. COST OF REVENUES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Perdagangan	1.395.501.898.971	1.461.386.679.992	Trading
Jasa Logistik	291.487.458.080	285.630.565.693	Logistic Services
Jasa Pergudangan	208.910.239.455	192.662.067.344	Warehousing Services
Kewajiban Pelayanan Publik	90.285.323.098	-	Public Service Obligation
Jasa <i>Waste Integrated System</i> dan jasa lainnya	764.719.000	30.161.957.145	Waste Integrated System and Other Services
Jasa Penyewaan Properti	-	25.526.925	Rental Property
Jumlah	1.986.949.638.604	1.969.866.797.099	Total

a. Perdagangan

a. Trading

	2023	2022	
Lokal	436.579.688.020	910.689.760.493	Local
Impor	594.302.664.177	413.962.336.422	Import
Warung pangan	41.884.872.721	36.495.561.644	E-commerce
Ekspor	7.702.119.504	8.540.816.678	Export
Gula impor - Eks RNI	303.649.945.298	-	Imported sugar - Ex RNI
Lainnya	11.382.609.251	91.698.204.755	Others
Subjumlah	1.395.501.898.971	1.461.386.679.992	Subtotal

b. Jasa logistik

c. Logistic services

	2023	2022	
Logistik terpadu	130.872.808.525	130.290.106.816	Intergrated logistics
Logistik darat	107.927.178.650	98.048.247.916	Land logistics
Logistik laut	52.687.470.905	57.292.210.961	Sea logistics
Subjumlah	291.487.458.080	285.630.565.693	Subtotal

c. Jasa Pergudangan

c. Warehouses services

	2023	2022	
Gudang sewa	96.422.514.468	76.872.611.883	Rented warehouses
Gudang sendiri	65.755.421.886	63.064.529.695	Entity's warehouses
Gudang manajemen	36.345.376.022	38.027.799.161	Management warehouses
<i>Record Management Center</i>	6.964.600.995	3.032.214.814	<i>Record Management Center</i>
Gudang terbuka	2.115.701.809	10.333.446.653	Open Storage warehouses
<i>Collateral Management services</i>	1.306.624.275	1.331.465.138	<i>Collateral Management Services</i>
Subjumlah	208.910.239.455	192.662.067.344	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

35. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

35. COST OF REVENUES (continued)

d. Kewajiban Pelayanan Publik

d. Public Service Obligation

	2023	2022	
Daging Ayam	54.470.231.740	-	Chicken Meat
Telur Ayam	35.815.091.358	-	Chicken Egg
Subjumlah	90.285.323.098	-	Subtotal

36. BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

36. DISTRIBUTION AND SELLING EXPENSES

Akun ini merupakan beban penjualan dan distribusi lokal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 13.508.046.861 dan Rp 15.716.466.664.

This account represents local sales and distribution expenses for the years ended 31 December 2023 and 2022, amounting to Rp 13,508,046,861 and Rp 15,716,466,664 respectively.

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

37. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Pegawai	180.841.382.491	148.979.066.049	Employee
Perlengkapan dan utilitas	37.738.840.055	45.734.183.151	Equipment and utilities
Penyusutan (Catatan 14)	34.422.680.384	41.568.649.223	Depreciation (Note 14)
Perjalanan dinas	10.673.256.934	9.928.461.593	Travel expense
Transportasi	8.552.201.909	8.211.371.769	Transportation
Biaya profesional	6.702.285.983	9.148.513.922	Professional fee
Amortisasi	3.688.329.437	8.405.486.438	Amortization
Manfaat karyawan	6.984.079.606	(7.688.869.572)	Employee benefits
Umum dan administrasi lainnya	32.801.958.620	36.580.711.894	General and other administration
Jumlah	322.405.015.419	300.867.574.467	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

38. PENDAPATAN/(BEBAN) NON USAHA

38. NON OPERATING INCOME (EXPENSE)

Akun ini terdiri dari:

The account consists of:

	2023	2022	
Pendapatan Non Usaha:			Non Operating Income:
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 16)	61.859.001.847	15.369.024.153	Investment property fair value increase (Note 16)
Denda klaim	60.929.782.594	-	Claim penalty
Dampak perubahan estimasi nilai residu aset tetap (Catatan 3j)	38.940.735.718	24.210.450.327	Effect of changes in estimate residual value of fixed assets (Note 3j)
Pendapatan bunga	973.560.892	1.092.522.867	Interest income
Pemulihan piutang ragu-ragu	54.118.056	10.407.465.678	Recovery bad debt exp
Lainnya	28.478.616.980	9.427.118.555	Others
Sub Jumlah	191.235.816.087	60.506.581.580	Subtotal
Beban Non Usaha:			Non Operating Expenses:
Biaya penyisihan piutang dan piutang lain	(57.479.583.783)	(29.473.201.421)	Allowance for receivables and other receivables
Beban bunga dan provisi Bank	(20.116.707.513)	(22.372.093.001)	Interest expenses and bank provision
Rugi selisih kurs	(14.003.627.811)	(844.598.747)	Losses foreign exchanges
Management fee (Catatan 39)	(3.216.792.194)	-	Management fee (Note 39)
Beban penurunan nilai aset lain – lain	(2.235.333.150)	(2.024.280.456)	Impairment of other assets
Beban penurunan nilai aset non keuangan	-	(6.168.804.141)	Impairment of non financial assets
Lainnya	(30.090.043.442)	(4.829.461.447)	Others
Sub Jumlah	(127.142.087.893)	(65.712.439.213)	Subtotal
Jumlah	64.093.728.194	(5.205.857.633)	Total

Denda klaim di tahun 2023 merupakan tagihan denda atas keterlambatan pembayaran sewa oleh PT Pembangunan Kota Tua Jakarta atas sewa gedung milik Entitas.

Claim penalty in 2023 represents charges for late rental payment by PT Pembangunan Kota Tua Jakarta of the Entity's building.

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Grup mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

In its business activities, the Group entered into transactions with related parties. The Group's policy stipulates that the pricing of these transactions is the same as for transactions made with third parties. The following are significant agreements/transactions with related parties:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

a. Hubungan sebagai Pemegang Saham

Pemerintah Republik Indonesia

Di tahun 2022 Perusahaan mempunyai liabilitas dana pinjaman rekening dana investasi kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan liabilitas kepada eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**b. Hubungan Kepemilikan dan atau
Kepengurusan**

Transaksi dengan seluruh BUMN dan lainnya yang mempunyai hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi, yaitu:

- i. Transaksi bisnis dengan Perusahaan milik negara yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga.
- ii. Grup mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Jumlah penempatan Grup pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka masing-masing berjumlah Rp 55.048.416.399 dan Rp 173.231.035.275 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing mencerminkan 1,19% dan 3,78% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Grup mempunyai utang bank-jangka pendek pada bank milik negara masing-masing berjumlah Rp 258.629.659.906 dan Rp 173.802.032.540 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing mencerminkan 15,02% dan 9,93% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

a. Relationship as Shareholder

Government of the Republic of Indonesia

In 2022 The Group has an obligation to settle the investment fund account to the Directorate of Investment Management System of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and liabilities to the former Indonesian Bank Restructuring Agency to the Directorate General of State Assets (DJKN) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

**b. Relationship of Ownership and/or
Management**

Transactions with all BUMN and others with ownership and or management relationships are treated as transactions with related parties, namely:

- i. Business transactions with a State-owned Enterprises, are treated the same way as a transaction with a third party.
- ii. The Group has current accounts and time deposits with several state-owned banks. The Group's placements with state-owned banks in the form of current accounts and time deposits amounting to Rp 55,048,416,399 and Rp 173,231,035,275 as at 31 December 2023 and 2022, respectively representing 1.19% and 3.78% of total assets as at 31 December 2023 and 2022. The Group has short-term loans from state-owned banks amounting to Rp 258,629,659,906 and Rp 173,802,032,540 as at 31 December 2023 and 2022, respectively representing 15.02% and 9.93% of total liabilities as at 31 December 2023 and 2022.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (lanjutan)

c. Hubungan Manajemen Kunci Perusahaan

c. Key Corporate Management Relationships

Manajemen kunci mencakup komisaris dan direksi. Kompensasi yang diberikan pada manajemen kunci dalam hubungan dengan pemberian jasa sebagai berikut:

Key management includes commissioners and directors. The compensation given to key management in relation to the provision of services are as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris:			Board of Commissioner:
Gaji dan imbalan jangka pendek	3.342.056.847	4.344.210.000	Salaries and rewards short-term
Direksi:			Directors:
Gaji dan imbalan jangka pendek	7.431.753.090	6.430.586.948	Salaries and rewards short-term
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	Termination benefits employment contract

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI **39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**
(lanjutan) (lanjutan)

d. Ikhtisar

d. Overview

	2023	2022	
Pendapatan			Revenues
Pupuk dan Pesticida			Fertilizer and Pesticides
Badan Usaha Milik Desa	3.128.698.450	3.472.741.956	<i>Village-Owned Enterprise</i>
PT Dahana	1.347.366.670	1.987.627.750	<i>PT Dahana</i>
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	1.223.414.118	-	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun</i>
Dinas pertanian dan Peternakan	438.856.550	8.143.717.553	<i>Department of Agriculture and Livestock</i>
PT Petrosida Gresik	-	98.000.000	<i>PT Petrosida Gresik</i>
Lainnya (dibawah Rp200 juta)	665.713.965	-	<i>Others (below Rp200 million)</i>
Jumlah	6.804.049.753	13.702.087.259	Total
Bahan Kimia Berbahaya			Hazardous Chemicals
PT Aneka Tambang, Tbk	3.996.000.000	-	<i>PT Aneka Tambang, Tbk</i>
PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)	2.108.053.500	-	<i>PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)</i>
PT Gendhis Multi Manis	122.645.000	-	<i>PT Gendhis Multi Manis</i>
RSUP Fatmawati	6.750.000	-	<i>RSUP Fatmawati</i>
RSUP DR. Moh. Hoesin	4.800.000	-	<i>RSUP DR. Moh. Hoesin</i>
RS Pelabuhan Palembang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.500.000	-	<i>RS Pelabuhan Palembang Regional Water Company</i>
	-	89.832.012	
Jumlah	6.239.748.500	89.832.012	Total
Produk Farmasi			Pharmaceutical Products
RSUD DR.H.Soewondo Kendal (Semarang)	444.621.842	-	<i>RSUD DR.H.Soewondo Kendal (Semarang)</i>
Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan (Bandung)	351.907.558	-	<i>Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan (Bandung)</i>
RSUD Bandung Kiwari	606.890.750	-	<i>RSUD Bandung Kiwari</i>
RSUD DR. Gunawan Mangunkusumo (Semarang)	291.349.522	-	<i>RSUD DR. Gunawan Mangunkusumo (Semarang)</i>
RS Sumantri (Pare-Pare)	277.969.800	-	<i>RS Sumantri (Pare-Pare)</i>
RSUD KRMT Wongsonegoro (Semarang)	277.224.765	-	<i>RSUD KRMT Wongsonegoro (Semarang)</i>
Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin (Bandung)	276.228.826	-	<i>Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin (Bandung)</i>
RSUD DR Gondo Suwarno / RSUD Ungaran (Semarang)	232.138.976	-	<i>RSUD DR Gondo Suwarno / RSUD Ungaran (Semarang)</i>
RSUD Polewali (Pare-Pare)	212.591.000	-	<i>RSUD Polewali (Pare-Pare)</i>
Dinas Kesehatan	77.894.843	2.086.475.889	<i>Department of Health</i>
PT Kimia Farma Tbk	31.487.351	128.213.608	<i>PT Kimia Farma Tbk</i>
RSUD Cideres	7.810.811	577.462.270	<i>RSUD Cideres</i>
PT Rajawali Nusindo Indonesia	-	2.823.977	<i>PT Rajawali Nusindo Indonesia</i>
PT Pertamina (Persero)	-	388.669.021	<i>PT Pertamina (Persero)</i>
Lainnya (dibawah Rp200 juta)	3.799.196.662	-	<i>Others (below Rp200 million)</i>
Jumlah	6.887.312.706	3.183.644.765	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 39. **TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**
(lanjutan) (continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	2023	2022	
Pendapatan (lanjutan)			Revenues (continued)
Produk Konsumsi			Consumer Products
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	97.731.349.000	-	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Perikanan Indonesia	11.199.565.728	-	PT Perikanan Indonesia
Dinas Pangan	811.936.335	304.783.220	Dinas Pangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	61.321.351	329.057.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perum Bulog	-	572.220.000	Perum Bulog
PT Reksa Multi Usaha	-	22.530.500	PT Reksa Multi Usaha
Lainnya (dibawah Rp2 milyar)	6.296.844.019	-	Others (below Rp2billion)
Jumlah	116.101.016.433	1.228.591.220	Total
Produk Penyewaan, Pergudangan dan Logistik			Rent, Warehousing and Logistics Products
PT Petrokimia Gresik	137.870.574.416	157.301.030.294	PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	108.748.121.766	64.879.679.379	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	37.655.387.604	35.944.271.628	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Iskandar Muda	30.863.410.188	25.043.873.641	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	25.059.732.208	-	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Pupuk Kujang	10.853.865.519	11.429.092.022	PT Pupuk Kujang
PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)	3.540.340.985	-	PT Kilang Pertamina Internasional (KPS)
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	3.073.548.750	-	PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi
PT Perkebunan Nusantara VIII	2.671.213.852	5.437.287.928	PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Adhi Karya	2.637.332.313	-	PT Adhi Karya
PT Wijaya Karya Beton	2.438.521.973	1.705.194.451	PT Wijaya Karya Beton
PT Pembangunan Perumahan	2179.890.178	-	PT Pembangunan Perumahan
PT Rajawali Nusindo	1.828.805.150	1.523.758.834	PT Rajawali Nusindo
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	523.855.937	19.108.108	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Yayasan Bumn Untuk Indonesia	-	1.593.091.500	Yayasan Bumn Untuk Indonesia
Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	-	3.933.795.580	Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi	-	1.085.471.662	PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
PT Semen Padang	-	174.689.840	PT Semen Padang
PT Pembangunan Perumahan Presisi	-	79.500.000	PT Pembangunan Perumahan Presisi
Lainnya (dibawah Rp2 milyar)	4.502.493.453	50.967.337.095	Others (below Rp2billion)
Jumlah	374.447.094.292	361.117.181.962	Total
Jumlah Pendapatan Pihak Berelasi (a)	510.479.221.684	379.321.337.218	Total Revenues from Related Parties (a)
Pendapatan Usaha (b)	2.289.292.024.670	2.367.519.377.945	Revenues (b)
Persentase (a): (b)	22,30%	16,02%	Percentage (a): (b)

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI **39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**
(lanjutan) (continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	2023	2022	
Pembelian			Purchase
Pupuk dan Pestisida			Fertilizer and Pesticides
PT Petro Kimia Gresik	175.332.691.750	190.369.663.092	PT Petro Kimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	122.888.167.208	110.060.366.558	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	27.923.697.286	60.251.213.434	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Kujang	27.070.324.428	40.650.663.530	PT Pupuk Kujang
PT Pupuk Sriwijaya	13.217.560.099	-	PT Pupuk Sriwijaya
PT Pupuk Iskandar Muda	2.724.529.300	15.567.722.960	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Petrosida Gresik	2.198.665.440	6.309.142.676	PT Petrosida Gresik
PT Pupuk Indonesia Pangan	1.740.350.016	-	PT Pupuk Indonesia Pangan
PT Pupuk Indonesia Niaga	1.145.633.620	-	PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Indonesia	620.944.150	-	PT Pupuk Indonesia
PT Mega Eltra	-	1.241.216.216	PT Mega Eltra
PT Pertani	-	248.544.600	PT Pertani
Jumlah	374.862.563.297	424.698.533.066	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	2023	2022	
Waste Integrated Solution (WIS)			Waste Integrated Solution (WIS)
PT Geo Dipa Energi (Persero)	764.719.000	-	PT Geo Dipa Energi (Persero)
Jumlah	764.719.000	-	Total
Produk Konsumer			Consumer Products
PT PG Rajawali II	305.160.592.520	-	PT PG Rajawali II
Perum Bulog	742.690.580	403.025.115	Perum Bulog
PT PG Rajawali I	392.893.500	-	PT PG Rajawali I
PT Rajawali Nusindo	220.296.723	6.823.716.903	PT Rajawali Nusindo
PT Sang Hyang Seri	218.733.000	-	PT Sang Hyang Seri
PT. PG. Candi Baru	202.500.000	-	PT. PG. Candi Baru
PT Garam	655.000	59.082.000	PT Garam
PT Pertani	-	649.079.054	PT Pertani
Lainnya (dibawah Rp200 juta)	24.754.636	-	Others (below Rp200 million)
Jumlah	306.963.115.959	7.498.903.072	Total
Farmasi			Pharmacy
PT Biofarma (Persero)	4.764.248.299	1.450.824.132	PT Biofarma (Persero)
PT Rajawali Nusindo	395.380.571	-	PT Rajawali Nusindo
PT Kimia Farma Trading & Distribution	46.376.000	1.664.426.766	PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Indofarma Global Medica	26.799.154	11.902.942	PT Indofarma Global Medica
PT Kimia Farma	6.164.167	-	PT Kimia Farma
Jumlah	5.238.968.191	3.127.153.840	Total
Produk Bahan Bangunan			Building Material Products
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	11.834.227.787	-	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Padang	225.041.441	8.924.804.037	PT Semen Padang
Jumlah	12.059.269.228	8.924.804.037	Total
Stasiun Pompa Bensin umum			General Petrol Pump Station
PT Pertamina (Persero)	-	21.933.705.256	PT Pertamina (Persero)
Jumlah	-	21.933.705.256	Total
Jumlah Pembelian dari Pihak Berelasi (a)	699.888.635.675	496.122.671.518	Total Purchases from Related Parties (a)
Jumlah Pembelian (b)	1.464.955.027.825	1.445.239.367.971	Total Purchases (b)
Persentase (a): (b)	47,78%	34,33%	Percentage (a): (b)
	2023	2022	
Managemnt Fee			Managemnt Fee
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	(3.216.792.194)	-	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Total	(3.216.792.194)	-	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Saldo aset dan liabilitas per 31 Desember 2023
dan 2022 dengan pihak berelasi sebagai berikut:

The balances of assets and liabilities as at
31 December 2023 and 2022, with related parties
are:

	2023	2022	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	55.048.416.399	173.231.035.275	Cash and cash equivalents
Deposito dijaminkan	-	3.000.000.000	Guaranteed deposit
Piutang usaha	292.791.123.226	155.699.137.591	Trade receivables
Investasi pada Entitas Asosiasi	7.520.672.339	8.372.650.462	Investments in Associates
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	Other non current financial Assets
Jumlah	355.360.211.964	340.302.823.328	Total
	2023	2022	
Liabilitas jangka pendek			Short-term liabilities
Utang usaha	41.165.805.772	52.119.587.840	Trade payables
Bagian liabilitas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	15.417.371.970	24.061.349.309	Current portion of long term liabilities
Liabilitas jangka Panjang	907.074.320.324	913.847.714.953	Long-term liabilities
Jumlah	963.657.498.066	990.028.652.102	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

40. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

40. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the operating between segments of the Group are set out in the tables below:

	2023						Jumlah/ Total
	Perdagangan/Trading	Pergudangan/Warehouse	Logistik/ Logistics	Kewajiban pelayanan publik/PSO	Penyewaan property/ Building rental services	WIS/ WIS	
Hasil Segmen/ Segment Result							
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	1.524.858.267.976	299.362.422.751	344.823.274.946	98.299.003.000	21.107.865.097	841.190.900	2.289.292.024.670
Beban Pokok Penjualan/ Cost of Goods Sold	1.395.501.898.971	208.910.239.455	291.487.458.080	90.285.323.098	-	764.719.000	1.986.949.638.604
Laba Kotor/ Gross Profit	129.356.369.005	90.452.183.296	53.335.816.866	21.107.865.097	21.107.865.097	76.471.900	302.342.386.066
Beban Usaha / Operating Expenses							
Beban Penjualan & distribusi/ Sales & distribution expenses	5.779.381.175	4.041.220.771	2.382.936.521	358.035.025	943.056.760	3.416.610	13.508.046.862
Biaya Administrasi dan Umum/ General and Administrative Expense	137.940.110.503	96.454.347.436	56.875.038.538	8.545.446.194	22.508.526.378	81.546.370	322.405.015.419
Jumlah Beban Usaha/ Total Operating Expense	143.719.491.678	100.495.568.207	59.257.975.059	8.903.481.219	23.451.583.138	84.962.980	335.913.062.281
Laba Usaha/ Operating Profit	(14.363.122.673)	(10.043.384.911)	(5.922.158.193)	(889.801317)	(2.343.718.041)	(8.491.080)	(33.570.676.215)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain/ Other Income (Expenses)	27.422.327.591	19.175.007.931	11.306.689.061	1.698.824.396	4.474.667.895	16.211.320	64.093.728.194
Laba Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	13.059.204.918	9.131.623.020	5.384.530.868	809.023.079	2.130.949.854	7.720.240	30.523.051.979

	2022						Jumlah/ Total
	Perdagangan/Trading	Pergudangan/Warehouse	Logistik/ Logistics	Kewajiban pelayanan publik/PSO	Penyewaan property/ Building rental services	WIS / WIS	
Hasil Segmen/ Segment Result							
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	1.676.306.287.415	299.555.599.682	335.464.920.451	-	21.998.582.408	34.193.987.989	2.367.519.377.945
Beban Pokok Penjualan/ Cost of Goods Sold	1.461.386.679.992	192.662.067.344	285.630.565.693	-	25.526.925	30.161.957.145	1.969.866.797.099
Laba Kotor/ Gross Profit	214.919.607.423	106.893.532.338	49.834.354.758	-	21.973.055.483	4.032.030.844	397.652.580.846
Beban Usaha / Operating Expenses							
Beban Penjualan & distribusi/ Sales & distribution expenses	8.494.291.269	4.224.764.829	1.969.608.681	-	868.443.487	159.358.398	15.716.466.664
Biaya Administrasi dan Umum/ General and Administrative Expense	162.610.137.857	80.876.622.836	37.705.127.952	-	16.625.014.460	3.050.671.361	300.867.574.466
Jumlah Beban Usaha/ Total Operating Expense	171.104.429.126	85.101.387.665	39.674.736.633	-	17.493.457.947	3.210.029.759	316.584.041.130
Laba Usaha/ Operating Profit	43.815.178.297	21.792.144.673	10.159.618.125	-	4.479.597.536	822.001.085	81.068.539.716
Pendapatan (Beban) Lain-Lain/ Other Income (Expenses)	(2.813.614.026)	(1.399.393.687)	(652.405.061)	-	(287.659.641)	(52.785.219)	(5.205.857.634)
Laba Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	41.001.564.271	20.392.750.986	9.507.213.064	-	4.191.937.895	769.215.866	75.862.682.082

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

41. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN **41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

Kebijakan Manajemen Risiko adalah pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan dan mengembangkan alternatif penanganan risiko, serta dalam memantau dan mengandalkan penerapan penanganan risiko. Tujuan Manajemen Risiko adalah untuk meningkatkan jaminan pencapaian target Grup.

Risk Management Policy is a structured and systematic guide in identifying, measuring, mapping and developing risk management alternatives, as well as in monitoring and relying on the application of risk management. The purpose of Risk Management is to increase assurance of achieving the Group's target.

Secara ringkas, risiko yang dihadapi Grup dan langkah-langkah mitigasinya sebagai berikut:

In summary, the risks faced by the Group and its mitigation measures are:

a) Risiko Likuiditas

a) Liquidity Risk

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Grup untuk memenuhi liabilitas keuangannya yang selanjutnya mengakibatkan Grup tidak dapat memanfaatkan peluang investasi atau tidak memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya mengakibatkan default.

Liquidity Risk is defined as the Group's inability to meet its financial liabilities which subsequently resulted in the Group not being able to take advantage of investment opportunities or not fulfill short-term financial liabilities that ultimately result in default.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.

In managing liquidity risk, the Group monitors and maintains the level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to overcome the impact of fluctuations in cash flows.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.

The table below analyses financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity period.

	2023		2022	
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>Over 1 year</i>	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>Over 1 year</i>
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short-Term Bank Loan</i>	258.629.659.906	-	173.802.032.540	-
Utang usaha/ <i>Trade payables:</i>				
Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	41.165.805.772	-	52.119.587.840	-
Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	213.748.851.320	-	305.191.151.013	-
Biaya yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses</i>	82.407.262.083	-	69.005.300.485	-
Liabilitas jangka pendek lainnya/ <i>Other current financial liabilities</i>	31.030.292.863	-	38.597.913.803	-
Utang jangka panjang/ <i>Long-term loans</i>	15.417.371.970	907.074.320.324	24.061.349.309	913.847.714.953
Utang sewa pembiayaan/ <i>Lease payables</i>	379.039.341	-	664.204.976	54.425.994
Jumlah/Total	642.778.283.255	907.074.320.324	663.441.539.966	913.902.140.947

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

41. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b) Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi Grup adalah risiko ketidakmampuan dari pihak-pihak yang berutang (debitur) untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada penilaian Grup, penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk dan jasa kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar dan akan menggunakan uang muka/jaminan pelanggan sebagai pembayaran atas gagal bayar tersebut.

b) Credit Risk

The credit risk faced by the Group is the risk of the inability of debtors to comply their obligations in accordance with mutually agreed terms.

Based on the Group's valuation, a specific allowance may be made if the receivables are considered uncollectible. To mitigate credit risk, the Group will terminate the distribution of all products and services to the customer in the event of a delay and/or default and will use the advance/customer guarantee as payment for the default.

	2023		2022	
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / Over 1 year	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / Over 1 year
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	62.709.091.702	-	181.417.662.371	-
Deposito berjangka/Time deposits	-	-	3.000.000.000	-
Piutang usaha/Trade receivables:				
Pihak berelasi/Related parties	204.121.383.218	-	155.699.137.591	-
Pihak ketiga/Third parties	245.676.462.312	-	275.593.638.499	-
Piutang lain-lain/Other receivables	51.208.776.900	-	60.966.897.707	-
Jumlah/Total	563.715.714.132	-	676.677.336.168	-

Grup memiliki jenis aset keuangan berikut yang menggunakan model kerugian kredit ekspektasian:

- Piutang usaha
- Piutang lain lain

The Group has following types of financial assets that are subject to the expected credit loss model:

- Trade receivables
- Other receivables

Sementara kas dan setara kas sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71. Kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi tidak material.

While cash and cash equivalents are also subject to impairment requirements of SFAS 71. The identified impairment loss was immaterial.

Grup menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset kontrak.

The Group applies the SAFS 71 simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and contract assets.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

41. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) **41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

c) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing didefinisikan sebagai penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Grup harus menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing secara pelaporan terutama berasal dari transaksi impor komoditi dalam mata uang asing, ketidakseimbangan dalam hal waktu pembelian dan penjualan akan mempengaruhi harga jual.

Kebijakan berkaitan dengan risiko nilai tukar yang saat ini dijalankan adalah secara natural (tanpa lindung nilai) yaitu:

- Grup melakukan pembelian komoditi impor dalam mata uang asing, dimana saat transaksi penjualan komoditi tersebut dilakukan, penetapan harga selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup.
- Grup mengatur risiko dengan berusaha menyelaraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.

d) Risiko Komoditas

Dampak risiko komoditas yang dihadapi Grup terutama sehubungan dengan pembelian atau pengadaan barang dagangan yang berkelanjutan, ketersediaan komoditas secara langsung dipengaruhi oleh tingkat produksi, tingkat permintaan dan penawaran pasar serta angkutan barang. Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko tersebut dengan menjaga tingkat persediaan secara optimal untuk meyakinkan penjualan dan distribusi yang berkelanjutan kepada para pelanggan.

c) Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is defined as a decrease in asset/income or increase in value of liabilities/expenses caused by fluctuations in foreign currency exchange rates. The Group should face foreign exchange risk exposure by reporting mainly from the transactions on imports of commodities in foreign currency, an imbalance in terms of time of purchase and sale will affect the selling price.

Policies relating to exchange rate risk currently being executed are natural (without hedging), namely:

- *The Group purchases imported commodities in foreign currency, whereby when the sale of the commodity is executed, the pricing shall always take into account the rates favorable to the Group.*
- *The Group manages risk by trying to harmonize receipts and payments for each type of currency.*

d) Commodity Risk

The impact of commodity risks faced by the Group is primarily related to the purchase or procurement of sustainable merchandise, the availability of commodities directly affected by the level of production, the level of demand and supply of the market and the transportation of goods. The Group's policy to minimize such risks is by maintaining optimal inventory levels to ensure sustainable sales and distribution to customers.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

42. KUASI REORGANISASI

Krisis ekonomi yang telah terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disebabkan oleh melemahnya secara drastis nilai Rupiah terhadap mata uang asing dan beberapa faktor makro ekonomi lainnya seperti meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, ketatnya likuiditas, serta turunnya tingkat kepercayaan investor memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia pada waktu itu. Akumulasi saldo rugi per tanggal 30 September 2012 (sebelum kuasi reorganisasi) sebesar Rp 581.917.351.573. Meskipun saldo defisit Grup masih berjumlah signifikan, Grup telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 127.485.626.056 sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Direksi berkeyakinan bahwa Grup memiliki prospek usaha yang baik di masa depan dan mempunyai potensi pendapatan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya sebagaimana tercakup dalam rencana usaha jangka panjang Grup. Sehubungan dengan itu, Grup melakukan kuasi-reorganisasi untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 51 (revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi ("PSAK 51") dengan menggunakan neraca tanggal 30 September 2012.

Langkah kuasi-reorganisasi tersebut di atas merupakan awal dari serangkaian langkah yang akan ditempuh Grup dalam mengupayakan kesinambungan usaha maupun pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Grup berkeyakinan bahwa kuasi reorganisasi akan memberikan dampak positif dan prospek yang baik terhadap Grup di masa mendatang, antara lain:

- Memulai awal baru dengan neraca yang menunjukkan posisi keuangan dan struktur modal yang lebih baik tanpa dibebani defisit masa lampau;
- Meningkatkan kemampuan dalam perolehan pendanaan dalam rangka pengembangan usaha;

42. QUASI REORGANIZATION

The economic crisis that occurred in mid 1997 caused by the drastic weakening of the Rupiah value against foreign currencies and other macroeconomic factors such as rising lending rates, tight liquidity, and lower investor confidence had a negative impact on the Indonesian economy at the that time. Position of Accumulated losses as at 30 September 2012 (before quasi-reorganization) amounted Rp 581,917,351,573. Although the Group deficit balance is still significant, the Group had recorded a net profit of Rp 127,485,626,056 from 2006 to 2011. The Board of Directors believed that the Group has good business prospects in the future and has potential revenues to be earned in the future comes with its strengths and resources as covered by the Group's long-term business plan. Accordingly, the Group conducted quasi-reorganization to restructure its equity by eliminating deficits and reassessing all of its assets and liabilities, in accordance with SFAS 51 (revised 2003) on Quasi-Reorganization Accounting ("SFAS 51") using the balance sheet dated 30 September 2012.

The above-mentioned quasi-reorganization step is the beginning of a series of steps that the Group would take in pursuing business continuity as well as sustainable long-term growth. The Group believed that quasi-reorganization would have a positive impact and good prospects for the the Group in the future, including:

- *Starting with a balance sheet showing better financial position and capital structure without being burdened with past deficits;*
- *Improving the ability to obtain funding in the framework of business development;*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

42. KUASI REORGANISASI (lanjutan)

Kuasi-reorganisasi yang telah dilaksanakan Grup menghasilkan kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset sebesar Rp 1.853.363.433.290 yang terdiri dari aset tetap sebesar Rp 1.443.622.410.205 dan aset tidak lancar yang akan ditinggalkan sebesar Rp 409.741.023.083.

Dengan kuasi-reorganisasi tersebut, Grup mengeliminasi saldo akumulasi kerugian per tanggal 30 September 2012 sebesar Rp 581.917.351.573, untuk komponen ekuitas sebagai berikut:

Akumulasi kerugian Rp 581.917.351.573	Kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset Rp 1.853.363.433.290	Cadangan umum Rp 19.296.469.106.
---------------------------------------	--	----------------------------------

Penentuan dari nilai wajar aset Grup didasarkan pada penilaian pada tanggal 30 September 2012 yang dilakukan oleh penilai independen dalam laporan KJPP Husni, Joediono dan Rekan No.238-HJR/PPILR/IV/2013 dan No.007-HJR/PP-LR/IV/2013, KJPP Gunawan No. 295/KBP/PPFIV/2013, KJPP Latief Hanif No. 268.LAP.KJPP.LHR.13, KJPP Kampianus Roman No. 030/KJPP-KR/LL/PL-KL/BgrN/2013, KJPP Toto Suharto No. M.P.P.13.11.0135 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk aset tanah dan metode biaya pengganti terdepresiasi untuk aset bukan tanah.

42. QUASI REORGANIZATION (continued)

The quasi-reorganization of the Group resulted in an increase in the revaluation of the fair value of assets amounting to Rp 1,853,363,433,290 consisting of fixed assets amounting to Rp 1,443,622,410,205 and noncurrent assets which will be abandoned amounting to Rp 409,741,023,083.

With the quasi-reorganization, the Group eliminated the accumulated losses as at 30 September 2012, amounting to Rp 581,917,351,573, for the following equity components:

<i>Accumulated losses Rp 581,917,351,573</i>	<i>Increase in revaluation of asset fair value Rp 1,853,363,433,290</i>	<i>General reserves Rp 19,296,469,106.</i>
--	---	--

The determination of the fair value of the Group assets is based on the valuation as at 30 September 2012, conducted by an independent appraiser in KJPP Husni, Joediono and Associates under its reports No. 238-HJR/PPILR/IV/2013 and No.007-HJR/PP-LR/IV/2013, KJPP Gunawan No.295/KBP/PPFIV/2013, KJPP Latief Hanif No.268.LAP.KJPP.LHR.13, KJPP Kampianus Roman No.030/KJPP-KR/LL/PL-KL/BgrN/2013, KJPP Toto Suharto No.MPP13.11.0135 using a market data comparison approach to land assets and the method of replacement cost depreciates for non-land assets.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

42. KUASI REORGANISASI (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup sebelum dan setelah kuasi reorganisasi per tanggal 30 September 2012 sebagai berikut:

42. QUASI REORGANIZATION (continued)

The consolidated financial position of the Group before and after quasi-reorganization as at 30 September 2012, are as follows:

	Sebelum Kuasi / Before the Quasi	Penyesuaian / Adjustment	Setelah Kuasi / After the Quasi	
Aset lancar	849.677.694.787	-	849.677.694.787	Current assets
Aset tidak lancar	408.462.437.325	1.853.363.433.290	2.261.825.870.615	Non-current assets
Total aset	1.258.140.132.112	1.853.363.433.290	3.111.503.565.402	Total assets
Liabilitas lancar	1.089.094.456.779	-	1.089.094.456.779	Current liabilities
Liabilitas tidak lancar	574.642.483.059	-	574.642.483.059	Non-current liabilities
Modal saham	156.200.000.000	-	156.200.000.000	Capital stock
Penyertaan modal				Government equity
Pemerintah	86.248.756	-	86.248.756	Participation
Cadangan umum	19.269.469.106	(19.269.469.106)	-	General reserves
Selisih penilaian aset dan Liabilitas	-	1.290.715.550.823	1.290.715.550.823	Difference in valuation of assets and liabilities
Saldo laba (rugi)	(581.917.351.573)	581.917.351.573	-	Retained earnings (loss)
Kepentingan nonpengendali	764.825.985	-	764.825.985	Non-controlling interests
Total liabilitas & ekuitas	1.258.140.132.112	1.853.363.433.290	3.111.503.565.402	Total liabilities & Equity

Berdasarkan PPSAK 10 mengenai Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi, Grup telah mereklasifikasi saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi ke saldo laba.

Based on RSFAS 10 regarding Revocation of SFAS 51: Quasi-Reorganization Accounting, the Group has reclassified the balance of the difference in valuation of assets and liabilities in connection with quasi reorganization to retained earnings.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

43. KONTINJENSI

a) Gugatan perdata PT Wisanggeni Mitra Sejahtera

Grup saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak atas pekerjaan pembangunan *cold storage* dengan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera telah menggugat perdata Group (Eks-BGR), Pemerintah Republik Indonesia Cq Walikota Jakarta Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan gugatan nilai kerugian sebesar Rp 11.868.720.000 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah). Group (Eks-BGR) mengajukan gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) senilai Rp 9.798.546.000 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dan empat puluh enam ribu Rupiah). Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 46/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 8 Oktober 2018 gugatan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera tersebut ditolak.

Pada tanggal 15 Oktober 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 336/Pdt/2020/PTDKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tanggal 19 Oktober 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Sampai dengan tanggal laporan ini, hasil dari proses hukum tersebut di atas belum diketahui.

43. CONTINGENCIES

a) Civil lawsuit of PT Wisanggeni Mitra Sejahtera

Currently, the Group is facing a lawsuit on the contract regarding cold storage construction work with PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed a civil lawsuit against the Group (Ex-BGR), Government of Republic of Indonesia Cq Mayor of North Jakarta, Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) with total compensation amounting to Rp 11,868,720,000 (eleven billion eight hundred sixty-eight million seven hundred and twenty thousand Rupiah). the Group (Ex-BGR), filed a lawsuit for Reconvention (Counterclaim) amounting to Rp 9,798,546,000 (Nine billion seven hundred ninety-eight million five hundred and forty-six thousand Rupiah). Based on decision of the District Court of West Jakarta No 546/Pdt.G/2017/ PN.JKT.BRT dated 8 October 2018, the lawsuit PT Wisageni Mitra Sejahtera was rejected.

On 15 October 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed an appeal on the court decision. Based on decision of the High Court DKI Jakarta No. 336/Pdt/2020/PTDKI upheld the decision of the District Court of West Jakarta. On 19 October 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Up to the date of this report, the result of this legal processes is not known yet.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

43. KONTINJENSI (lanjutan)

43. CONTINGENCIES (continued)

b) Gugatan perdata Agrocorp International Pte Ltd.

Grup saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak tripartit atas pekerjaan *Collateral Management Services* dengan para pihak yaitu: Agrocorp International Pte,Ltd., PT Coffindo dan LH Asia.

Agrocorp International Pte Ltd telah menggugat perdata PT Coffindo dan Group (Eks-BGR) di *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*. SIAC telah memutuskan bahwa PT Coffindo harus membayar ganti rugi sebesar USD 4.566.697 kepada Agrocorp International Pte Ltd. Jika PT Coffindo gagal melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, maka akan menjadi beban Group (Eks-BGR). Group (Eks-BGR) juga harus membayar kerugian Agrocorp International Pte Ltd sebesar USD 98.464. Selain itu, Group (Eks-BGR) dan PT Coffindo secara bersama-sama harus menanggung biaya perkara sebesar USD 75.036.

Permohonan Agrocorp International Pte.Ltd., untuk melakukan eksekusi keputusan SIAC di atas, telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan tanggal 28 Januari 2019. Karena putusan tersebut belum bersifat final dan mengikat (*inkracht*), Group (Eks-BGR) telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan eksekusi.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2023, Group mengajukan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas. Sampai dengan tanggal laporan ini, hasil dari proses hukum ini belum diketahui.

b) Civil lawsuit of Agrocorp International Pte Ltd.

Currently, the Group is facing a lawsuit on the tri-partite contract regarding Collateral Management Services whose parties are Agrocorp International Pte,Ltd., PT Coffindo and LH Asia.

Agrocorp International Pte Ltd and LH Asia have filed a civil lawsuit against PT Coffindo and the Group (Ex-BGR) at Singapore International Arbitration Center (SIAC). SIAC had ruled that PT Coffindo should pay indemnity amounting to USD 4,566,697 to Agrocorp International Pte Ltd. If PT Coffindo failed to make the indemnity payment, it should be borne by the Group (Ex-BGR). The Group (Ex-BGR) should also pay the indemnity to Agrocorp International Pte Ltd amounting to USD 98,464. In addition, the Group (Ex-BGR) together with PT Coffindo should pay the court fee amounting to USD 75,036.

The request by Agrocorp International Pte Ltd to execute the SIAC's ruling had been granted by the District Court of Central Jakarta on 28 January 2019. As the court's decision is not final and binding yet (inkracht), the Group (Ex-BGR) is taking legal action by lodging a request to revoke the execution approval.

Subsequently, on 29 March 2023, the Group filed a memory of cassation against the above Central Jakarta District Court Decision. Up to the date of this report, the result of this legal processes is not known yet.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

44. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

44. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The table below is the carrying amount and fair value of financial assets and financial liabilities in the statement of financial position as at 31 December 2023 and 2022.

	2023		2022	
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value
Aset Keuangan/Financial Assets				
Pinjaman dan piutang: /				
Loans and receivables:				
Kas dan bank/Cash and Cash Equivalent	62.709.091.702	62.709.091.702	181.417.662.371	181.417.662.371
Daposiso berjangka/Time Deposits	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
Piutang usaha/Trade receivables:				
Pihak berelasi/Related parties	204.121.383.218	204.121.383.218	155.699.137.591	155.699.137.591
Pihak ketiga/Third parties	245.676.462.312	245.676.462.312	275.593.638.499	275.593.638.499
Piutang lain-lain/Other receivables	51.208.776.900	51.208.776.900	60.966.897.707	60.966.897.707
Jumlah/Total	563.715.714.132	563.715.714.132	676.677.336.168	676.677.336.168
Liabilitas keuangan lain-lain: /				
Other financial liabilities:				
Utang usaha/Trade payable:				
Pihak berelasi/Related parties	41.165.805.772	41.165.805.772	52.119.587.840	52.119.587.840
Pihak ketiga/Third parties	213.748.851.320	213.748.851.320	305.191.151.013	305.191.151.013
Utang Bank/Bank Loan	258.629.659.906	258.629.659.906	173.802.032.540	173.802.032.540
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya /Other current financial liabilities				
	31.030.292.863	31.030.292.863	38.597.913.803	38.597.913.803
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Current Portion of Long- Term Liabilities				
	15.417.371.970	15.417.371.970	24.061.349.309	24.061.349.309
Utang Jangka Panjang/ Long Term Loans				
	907.074.320.324	907.074.320.324	913.847.714.953	913.847.714.953
Utang sewa/Leases liabilities				
	-	-	54.425.994	54.425.994
Jumlah/Total	1.467.066.302.155	1.467.066.302.155	1.507.674.175.452	1.507.674.175.452

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

44. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset Keuangan

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar bank dibatasi penggunaannya mendekati nilai tercatat karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala untuk merefleksikan suku bunga pasar.

Liabilitas Keuangan

Nilai tercatat liabilitas keuangan seperti utang bank, utang usaha, utang sewa utang lain-lain dan akrual adalah mendekati estimasi nilai wajarnya karena sifatnya yang jangka pendek.

45. ESTIMASI NILAI WAJAR

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan harus diestimasi untuk pengakuan dan pengukuran atau untuk tujuan pengungkapan.

PSAK 60: Instrumen Keuangan: "Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkat hierarki pengukuran nilai wajar berikut:

1. Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (level 1). Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif berdasarkan harga pasar kuotasian pada tanggal pelaporan. Harga pasar yang dikutip digunakan dalam harga penawaran saat ini, sedangkan liabilitas keuangan menggunakan harga permintaan.
2. Input selain harga kuotasi termasuk dalam level 1 yang dapat diamati untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (berasal dari harga) (level 2), dan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Penilaian ini memaksimalkan penggunaan jika data pasar yang dapat diobservasi di mana itu adalah nilai yang tersedia dan bergantung sesedikit mungkin pada perkiraan. Jika semua input signifikan mensyaratkan nilai wajar suatu instrumen dapat diobservasi, instrumen tersebut termasuk dalam level 2.

44. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

The fair value of financial assets and financial liabilities is measured on the following basis:

Financial Assets

The fair value of the underlying financial assets (generally less than one year), such as cash and cash equivalent, trade receivables, and other receivables is carried at carrying amount as it approximates the fair value.

The fair value of the bank is limited to its carrying value close to the carrying amount because the interest rate changes are periodically assessed to reflect the market interest rate.

Financial Liabilities

The carrying amount of financial liabilities, such as bank debt, trade payable, lease liabilities, other debts and accruals is approximating the estimated fair value due to its short-term nature.

45. FAIR VALUE ESTIMATION

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

SFAS 60: Financial Instruments: "Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

1. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1). The fair value of financial instrument traded in active market based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used in the current bid price, while financial liabilities use ask price.
2. Inputs other than quoted price included within level 1 that are observable for the assets or the liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and the fair value of financial instruments that are not traded in active market is determined using valuation techniques. These valuations maximize the use of observable market data where it is value available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs require to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

45. ESTIMASI NILAI WAJAR (lanjutan)

3. Input untuk aset dan liabilitas yang sedikit berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (level 3)

Jika satu atau lebih input signifikan tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen termasuk dalam level 3.

Teknik penilaian khusus yang digunakan untuk menilai instrumen keuangan meliputi:

- (a) Penggunaan kuotasi harga pasar atau penawaran dealer untuk instrumen serupa, dan
(b) Teknik lain, seperti analisis arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tersisa.

Aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur dan diakui menggunakan pengukuran nilai wajar level 2.

45. FAIR VALUE ESTIMATION (continued)

3. Inputs for the assets and liabilities that are little based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- (a) The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments, and
(b) Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognized using the fair value measurement of level 2.

46. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

a. Perubahan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, SH. No. 8 tanggal 3 Januari 2024, susunan dewan komisaris dan direksi entitas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Ir. Hamli
Setiawan Wangsaatmaja

Board of Commissioner

President Commissioner
Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan, Manajemen
Risiko, SDM &
Umum
Direktur Komersial &
Pengembangan
Direktur Operasi

Ir. Soengeng Hernowo

Wien Irwanto

Edhy Rizwan
Noverita Anggraeny

Board of Director

President Director
Director of Finance, Risk
Management, HR & General
Affairs
Director of Commercial &
Development
Director of Operation

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

46. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)

b. Penambahan Modal

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham seri A Dwiwarna Entitas, menyetujui penambahan modal Entitas melalui konversi hutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Catatan 26a dan 26b). Jumlah hutang yang dikonversi menjadi modal sebesar Rp 883.386.776.206.

c. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 60012/GBK/2024 tanggal 24 Januari 2024, Group memperoleh fasilitas Kredit Multi Fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

a. Entitas:

1. Fasilitas kredit local dengan limit kredit sebesar Rp 10.000.000.000.
2. Fasilitas Time Loan Revolving, Fasilitas Trust Receipt, Fasilitas Bank Garansi dan Fasilitas LC/SKBDN dengan kredit limit gabungan sebesar Rp 80.000.000.000

b. Entitas Anak:

Fasilitas Time Loan Revolving dan Bank Garansi dengan kredit limit gabungan sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 15.000.000.000 masing-masing untuk PT BGR Logistik dan PT PPI Industri

46. SUBSEQUENT EVENT (continued)

b. Capital Increase

Based on the letter from the Minister Finance of the Republic Indonesia No. S-121/MBU/02/2024 dated 28 February 2024, the Government of Indonesia as the holder of class A Dwiwarna shares of the Entity, approved the increase in the Entity's capital through conversion of debt to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Note 26a and 26b). Total debt converted into capital amounting to Rp 883,386,776,206.

c. Credit Agreement with PT Bank Central Asia

Based on Credit Agreement No. 60012/GBK/2024 dated 24 January 2024, the Group obtained Multi Credit Facilities with detail of as follows:

a. The Entity:

- 1. Local Credit Facility with credit limit of Rp 10,000,000,000.*
- 2. Time Loan Revolving Facility, Trust Receipt Facility, Bank Guarantee Facility and LC/SKBDN Facility with combined credit limit of Rp 80,000,000,000.*

b. The Subsidiaries:

Time Loan Revolving Facility and Bank Guarantee Facility with combined credit limit of Rp 50,000,000,000 and Rp 15,000,000,000 respectively for PT BGR Logistik and PT PPI Industri.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

46. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)

c. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia

Jaminan atas fasilitas –fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Tanah di Jl. Indrapura No. 12, Surabaya, Jawa Timur
- Tanah dan Bangunan (Kantor) di Jl. Jawa No. 12, Bandung, Jawa Barat
- Tanah dan Bangunan (Gudang) di Jl. Gatot Subroto Barat No. 905X, Kuta Utara, Bali
- Tanah dan Bangunan (Rumah) di Jl. Raung No. 20, Semarang, Jawa Tengah
- Tanah dan Bangunan (Gudang) di Jl. Kenari, Semarang, Jawa Tengah
- Tanah dan Bangunan (Gudang) di Jl. Lodan Baru No. 32A, Ancol, Jakarta Utara
- Persediaan dan/atau piutang usaha senilai Rp 150.000.000.000.

Periode fasilitas-fasilitas tersebut diatas adalah 24 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2025 dengan tingkat bunga 8,5% p.a. (tingkat bunga mengambang).

46. SUBSEQUENT EVENT (continued)

c. Credit Agreement with PT Bank Central Asia

Collaterals for the above facilities are as follows:

- *Land on Jl. Indrapura No. 12, Surabaya, Jawa Barat*
- *Land and Building (Office) on Jl. Java No. 12, Bandung, West Java*
- *Land and Building (Warehouse) on Jl. West Gatot Subroto No. 905X, North Kuta, Bali*
- *Land and Building (House) on Jl. Roar No. 20, Semarang, Central Java*
- *Land and Building (Warehouse) on Jl. Kenari, Semarang, Central Java*
- *Land and Building (Warehouse) on Jl. Lodan Baru No. 32A, Ancol, North Jakarta*
- *Inventory and/or trade receivables in the amount of Rp 150,000,000,000.*

The period of the above facilities is from 24 January 2024 to 23 January 2025 with interest rate of 8.5% p.a. (floating interest rate).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

46. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)

d. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia (lanjutan)

Fasilitas ini Grup menjaminkan:

- T/K di Jl. Indrapura No. 12, Surabaya, Jawa Timur
- T/B (Kantor) di Jl. Jawa No. 12, Bandung, Jawa Barat
- T/B (Gudang) di Jl. Gatot Subroto Barat No. 905X, Kuta Utara, Bali
- T/B (rumah) di Jl. Raung No. 20, Semarang, Jawa Tengah
- T/B (gudang) di Jl. Kenari, Semarang, Jawa Tengah
- T/B (gudang) di Jl. Lodan Baru No. 32A, Ancol, Jakarta Utara

Persediaan dan/atau piutang usaha senilai Rp 150.000.000.000.

47. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu pada laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2022 telah direklasifikasi kembali untuk tujuan penyajian dengan rincian sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Pendapatan Diterima				<i>Unearned Revenues</i>
Dimuka – jangka pendek	126.573.158.904	(42.724.542.760)	83.848.616.144	<i>- current portion</i>
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Pendapatan Diterima				<i>Unearned Revenues</i>
Dimuka – jangka panjang	-	42.724.542.760	42.724.542.760	<i>-non current portion</i>

48. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2024.

46. SUBSEQUENT EVENT (continued)

d. Credit Agreement with PT Bank Central Asia (continued)

This facility the Group guarantees:

- T/K on Jl. Indrapura No. 12, Surabaya, Jawa Barat
- T/B (Office) on Jl. Jawa No. 12, Bandung, West Java
- T/B (Warehouse) on Jl. West Gatot Subroto No. 905X, North Kuta, Bali
- T/B (house) on Jl. Roar No. 20, Semarang, Central Java
- T/B (warehouse) on Jl. Kenari, Semarang, Central Java
- T/B (warehouse) on Jl. New Lodan No. 32A, Ancol, North Jakarta

Inventory and/or trade receivables worth IDR 150,000,000,000.

47. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Several accounts in the financial statement for the period 31 December 2022 have been reclassified for presentation purposes with the following details:

48. MANAGEMENT RESPONSIBILITY

The Entity's management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that were completed on 26 March 2024.

LAMPIRAN

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Entitas Induk)
Laporan Posisi Keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)**

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Parent Entity)
Statements of Financial Position
As at 31 December 2023
(Expressed in Rupiah)**

	2023	2022	
ASET			ASSETS
Aset Lancar			Current Assets
Kas dan Setara Kas	30.869.507.594	126.601.091.588	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Deposito Berjangka	-	-	<i>Time Deposits</i>
Piutang Usaha	308.004.594.882	346.509.133.633	<i>Trade Receivables</i>
Piutang Lain-Lain	50.488.123.583	59.604.980.733	<i>Other Receivables</i>
Persediaan	107.142.975.772	84.090.893.445	<i>Inventories</i>
Uang Muka	108.900.087.440	105.951.453.835	<i>Advances</i>
Pajak Dibayar Dimuka	54.387.050.898	49.666.029.149	<i>Prepaid Taxes</i>
Biaya Dibayar Dimuka	905.138.613	1.681.771.185	<i>Prepaid Expenses</i>
Jumlah Aset Lancar	660.697.478.782	777.105.353.568	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar			Non-Current Assets
Investasi pada Entitas Anak	3.498.000.000	3.498.000.000	<i>Investments in Subsidiaries</i>
Investasi pada Entitas Asosiasi	7.270.672.339	8.122.650.462	<i>Investments in Associates</i>
Aset Tetap	1.911.255.399.951	1.953.939.804.965	<i>Fixed Assets</i>
Aset Tidak Berwujud	18.640.047.252	19.705.899.498	<i>Intangible assets</i>
Properti Investasi	1.244.721.500.000	1.083.150.675.153	<i>Investment Properties</i>
Aset Hak Guna	3.946.503.686	844.358.969	<i>Right of Use Assets</i>
Aset Pajak Tangguhan	41.784.147.304	44.056.322.320	<i>Deferred Tax Assets</i>
Aset Lain-lain	445.998.002.270	447.140.504.950	<i>Other Assets</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.677.114.272.802	3.560.458.216.317	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	4.337.811.751.584	4.337.563.569.885	TOTAL ASSETS

Lampiran – 1

Appendix – 1

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Entitas Induk)
Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)
 Pada tanggal 31 Desember 2023

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Parent Entity)
Statements of Financial Position (continued)
 As at 31 December 2023

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2023	2022	
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek			Current Liabilities
Utang Usaha	223.001.690.388	319.364.843.210	Trade Payable
Utang Pajak	13.276.414.205	3.943.030.884	Tax Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek			Other Current
Lainnya	21.815.914.558	28.005.947.821	Financial Liabilities
Beban Yang Masih Harus Dibayar	14.094.815.926	12.154.210.666	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	50.952.472.517	64.089.734.582	Unearned Revenues
Utang Bank – Jangka Pendek	258.629.659.906	173.802.032.540	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh			Current Portion of Long Term
Tempo dalam Satu Tahun	15.417.371.970	24.061.349.309	Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	597.188.339.470	625.421.149.012	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang			Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang	907.074.320.324	913.847.714.953	Long Term Loans
Pendapatan diterima dimuka - jangka panjang	16.365.959.199	5.506.395.253	Unearned Revenues
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	16.090.716.961	38.015.300.117	Post-Employment Benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	939.530.996.484	957.369.410.323	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	1.536.719.335.954	1.582.790.559.335	Total Liabilities
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham	942.745.000.000	942.745.000.000	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	(231.042.410.552)	(231.042.410.552)	Additional Paid in Capital
Saldo laba			Retained Earnings
Telah ditentukan Penggunaannya			Appropriated
Cadangan Umum	111.890.435.294	111.890.435.294	General Reserves
Cadangan Khusus	1.531.912.169	1.531.912.169	Specific Reserves
Belum ditentukan Penggunaannya	1.975.967.478.719	1.929.648.073.639	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	2.801.092.415.630	2.754.773.010.550	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.337.811.751.584	4.337.563.569.885	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Entitas Induk)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir Pada
tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Parent Entity)

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive
Income

For the year ended
31 December 2023

(Expressed in Rupiah)

	2023	2022	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan Usaha	1.501.951.259.109	1.649.358.064.707	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(1.349.453.853.874)	(1.420.291.089.418)	Cost of Revenues
LABA KOTOR	152.497.405.235	229.066.975.289	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan dan Distribusi	(13.432.310.539)	(11.913.861.329)	Distribution and Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(213.909.337.998)	(194.212.489.604)	General and Administration Expenses
Beban Usaha	(227.341.648.537)	(206.126.350.933)	Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA	(74.844.243.302)	22.940.624.356	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA			NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non-Usaha	176.764.751.294	52.621.360.237	Non-Operating Income
Beban Non-Usaha	(118.876.469.757)	(59.570.785.034)	Non-Operating Expense
Pendapatan (Beban) Non-Usaha – Bersih	57.888.281.537	(6.949.424.797)	Non-Operating Income (Expense) – Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(16.955.961.765)	15.991.199.559	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
Penghasilan (Beban) Pajak:			Tax Benefit (Expense):
Pajak Final	(2.110.786.509)	(1.624.797.568)	Final Tax
Pajak Kini	-	-	Current Tax
Pajak Tangguhan	11.015.510.551	(1.576.029.583)	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	8.904.724.042	(3.200.827.151)	Total Tax Benefit (Expense)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(8.051.237.723)	12.790.372.408	NET PROFIT (LOSS) FOR CURRENT YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:			Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	9.265.373.072	(10.808.461.651)	Remeasurement of Employee Benefits
Perubahan nilai wajar aset Keuangan	(851.978.123)	(1.996.885.166)	Changes in fair value of Financial assets
Perubahan nilai wajar aset non Keuangan	51.985.175.808	(26.239.768.929)	Changes in fair value of non Financial assets
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	(13.287.685.567)	8.876.119.743	Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan	47.110.885.190	(30.168.996.003)	Other Comprehensive Income (loss) for Current Year
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	39.059.647.467	(17.378.623.595)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR CURRENT YEAR

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

BUMI UNTUK
INDONESIA



PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

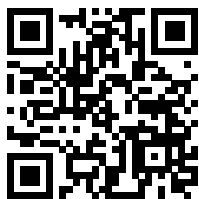
GRAHA PPI

Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160

Tel.: (021) 3862141

Fax.: (021) 3862143

email: ppi.info@ptppi.co.id



Website: www.ptppi.co.id